PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 26 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026

P-RKPK 2026

Bappeda Kota Lhokseumawe

Tahun 2026

WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lhokseumawe serta hasil evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan, pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan pada Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019/Nomor.197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
19. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 6);
20. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 1);
21. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 9);
22. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 2);

23. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2023 Nomor 6);
24. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2025 Nomor 8);
25. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2025 Nomor 10);
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 96);
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2025 Nomor 27);
29. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);
30. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 Nomor 2);
31. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 Nomor 2);
32. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 Nomor 6);
33. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 Nomor 27), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 September 2026 M
19 Rabiul Awal 1447 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 September 2026 M
19 Rabiul Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

A. HARIS

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026 NOMOR 26

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

ADHB	Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	Atas Dasar Harga Konstan
AIDS	*Acquired Immune Deficiency Syndrome*
AKI	Angka Kematian Ibu
APBA	Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
APBK	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ARG	Anggaran Responsif Gender
ASN	Aparatur Sipil Negara

B

Baduta	Bawah Dua Tahun
Balita	bawah lima tahun
Bangga Kencana	Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Beravsi	Belajar dengan video animasi
Bidan Ceting	Bidan Dampingi Ibu Cegah Stunting
BKB	Bina Keluarga Balita
BKL	Bina Keluarga Lansia
BKR	Bina Keluarga Remaja
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BO	Bantuan Operasional
BOP	Bantuan Operasional Penyelenggaraan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK RI	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPKD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
BPS	Badan Pusat Statistik
BPS	Badan Pusat Statistik
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah

C

CAR	*Capital Adequacy Ratio*
Cemara exstansa	Cerdas dengan Matematika dengan Excello SD Negeri 1
Ceudah Brat	Cerdas Elektronik untuk Digital Arsip Berani dan Akurat
CHT	Cukai Hasil Tembakau
CPP	Cadangan Pangan Pemerintah
CSR	*Corporate Social Responsibility*

D

DAK	Dana Alokasi Khusus
DAM	Depot Air Minum
DASHAT	Dapur Sehat Atasi Stunting
Dasibangsida	Database Hasil Penelitian, Informasi Pembangunan dan Inovasi Daerah
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DD	Dana Desa
DOKA	Dana Otonomi Khusus Aceh
DPA	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRK	Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
DUPAK	Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

E

E-DALEV	Elektronik Pengendalian dan Evaluasi

F

Fasyankes	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

G

GNPIP	Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan

H

HBKN	Hari Besar Keagamaan Nasional
HIV	*Human Immunodeficiency Virus*
HKG	Hari Kesehatan Gampong

I

I-BANGGA	Indeks Pembangunan Keluarga
ICOR	*Incremental Capital Output Ratio*
IHK	Indeks Harga Konsumen
IID	Indeks Inovasi Daerah
KA	Indeks Kualitas Air
IKD	Indikator Kinerja Daerah
IKLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKTL	Indeks Kualitas Tutupan Lahan
IKU	Indeks Kualitas Udara

IKU	Indikator Kinerja Utama
IMB	Izin Mendirikan Bangunan
IMP	Institusi Masyarakat Pedesaan
IPG	Indeks Pembangunan Gender
IPHA	Indeks Pemenuhan Hak Anak
IPKA	Indeks Perlindungan Khusus Anak
IPKI	Izin Perluasan Kawasan Industri
IPM	Indeks Pembangunan Manusia IPM
IPUI	Izin Perluasan Usaha Industri
IUI	Izin Usaha Industri
IUKI	Izin Usaha Kawasan Industri

J

JITUPASNA	Kajian Kebutuhan Pascabencana
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional

K

KAD	Kerjasama Antar Daerah
KB	Keluarga Berencana
Kehati	Keanekaragaman Hayati
KIE	Komunikasi, Informasi dan Edukasi
KLB	Kejadian Luar Biasa
KOD	Kematangan Organisasi
KRP	Kebijakan, Rencana, dan Program
KS	Keluarga Sejahtera
KtA	Kekerasan terhadap Anak
KtP	Kekerasan terhadap Perempuan
KTP-EI	Kartu Tanda Penduduk Elektronik
KUA	Kebijakan Umum Anggaran
KUR	Kredit Usaha Rakyat

L

Lalat	Lapak Literasi
Limbah B3	Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
LK3	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
LKD	Lembaga Kemasyarakatan Desa
LLAJ	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
LNPRT	Lembaga Non Profit Rumah Tangga
LPM	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LPTKS	Penempatan Tenaga Kerja Swasta
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LU	Lapangan Usaha

M

MBG	Makan Bergizi Gratis
mCPR	*Modern/Modem Contraceptive*
MHA	Masyarakat Hukum Adat
Minilok	Mini Lokakarya
MKJP	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
MoU	*Memorandum of Understanding*

MtM	*Month to Month*
MTQ	Musabaqah Tilawatil Quran

N

NAPZA	Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya
NKV	Nomor Kontrol Veteriner
NPL	*Non-Perfoming Loan*

O

ODMK	Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
OTSUS	Otonomi Khusus

P

PAD	Pendapatan Asli Daerah
PastaGakPaRah	Pasar Tani dan Gerakan Pangan Murah
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
Pelataran PBB-P2	Pelayanan Antar Himbauan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Peusijuk	Perekaman Untuk Siswa/i Jangkau Usia KTP
PFK	Perhitungan Fihak Ketiga
PHA	Pemenuhan Hak Anak
PHMS	Penyakit Hewan Menular Strategis
PIK-R	Pusat Informasi dan Konseling Remaja
PKB	Penyuluh Keluarga Berencana
PKK	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PK-P	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
PK-RT	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Pliek Digata	Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Untuk Anda
PLKB	Petugas Lapangan Keluarga Berencana
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMI	*Purchasing Managers' Index*
PMTB	Pembentukan Modal Tetap Bruto
PN	Prioritas Nasional
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu
PPAS	Plafon Anggaran Sementara
PPh	Pajak Penghasilan
PPI	Pangkalan Pendaratan Ikan
PPKBD	Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa
PPKS	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
PPLH	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
P-RKPK	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota
ProSN	Program Strategis Nasional
PSU	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
PUG	Pengarusutamaan Gender
Puspaga	Pembelajaran keluarga

Q

QtQ	*Quarter to Quarter*

R

R3P	Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana
Rakorcam	Rapat Koordinasi Kecamatan
Rakordes	Rapat Koordinasi Desa
RDTR	Rencana Detail Tata Ruang
RENJA	Rencana Kerja
RENJA-PD	Rencana Kerja Perangkat Daerah
RENSTRA	Rencana Strategis
RENSTRA-PD	Rencana Strategis Perangkat Daerah
RIPJ-PUD	Rencana Induk dan Peta Jalan Produk Unggulan Daerah
RKA	Rancangan Kerja dan Anggaran
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RKPA	Rencana Kerja Pemerintah Aceh
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKPK	Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota
RKUD	Rekening Kas Umum Daerah
RPJMA	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMK	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPPLH	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
RRTR	Rencana Rinci Tata Ruang
RT	Rukun Tetangga
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
RW	Rukun Warga

S

Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional

SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SDA	Sumber Daya Alam
SDA	Sumber Daya Air
SDGs	*Sustainable Development Goals*
SDM	Sumber Daya Manusia
SDM	Sumber Daya Manusia
SIINas	Sistem Informasi Industri Nasional
SILPA	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
SiLPA	Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun Sebelumnya
SIP	Surat Izin Praktik
SIPD	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
Sipentalmu	Aplikasi Presensi Digital SD Muhammadiyah
SKP	Sasaran Kinerja Pegawai
SKPK	Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota
SPA	Stasiun Peralihan Antara / T*ransfer Station*
SPALD	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPGDT	Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu
SPHP	Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan
SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPM	Standar Pelayanan Minimal

T

3T	Tertinggal, Terdepan, dan Terluar
TDBH MIGAS	Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas
TFR	*Total Fertility Rate*
TIK	Teknologi, Informasi dan Komunikasi
TJSLP	Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan
TKD	Transfer ke Daerah
TPA	Tempat Pemrosesan Akhir
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPID	Tim Pengendali Inflasi Daerah
TPM	Tempat Pengelolaan Makanan
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
TPST	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TRC	Tim Reaksi Cepat
TRC PB	Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
Tw	Triwulan

U

UHH	Usia Harapan Hidup
UKBM	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
UKM	Upaya Kesehatan Masyarakat
UKP	Upaya Kesehatan Perorangan
UKPBJ	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Umbi Kanja	UMKM Center, Majukan Bisnis Ciptakan Keajaiban
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UMOT	Usaha Mikro Obat Tradisional
UPPKA	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor
UPPKA	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor
UUPA	Undang-Undang Pemerintah Aceh

W

WS	Wilayah Sungai

Y

YoY	*Year on Year*

Z

ZIS	Zakat, Infak, dan Sedekah
ZISWAF	Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2026 telah tersusun dengan baik. RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2026 dilakukan pada tahun 2026, dalam penyusunan Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 ini, setiap sasaran pembangunan daerah maupun program dan kegiatan periode sebelumnya akan menjadi titik tolak pelaksanaan pembangunan periode tahun 2026.

Perubahan RKPK Lhokseumawe harus bersinergi dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya maupun dengan dokumen perencanaan nasional (RPJMN dan RKP Perubahan). Mengingat kompleksnya penyusunan Perubahan RKPK Lhokseumawe maka perlu adanya kerjasama dari tim penyusun dokumen dengan stakeholder yang terkait. Perubahan RKPK 2026 juga mengakomodir perubahan kondisi ekonomi, infrastruktur dan sosial akibat bencana hidrometrologi pada akhir tahun 2025.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen perencanaan ini. Semoga usaha yang dilakukan menjadi persembahan terbaik bagi masa depan Kota Lhokseumawe.

Meskipun telah diupayakan kesempurnaan penyusunan dokumen perencanaan ini, namun kami sadari masih perlu pembenahan dan perbaikan. Oleh karena itu, segala kritik, saran, dan masukan akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi perumusan dokumen perencanaan ke depan. Semoga Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 ini dapat dipergunakan sebagai panduan pembangunan daerah tahun 2026 oleh setiap Perangkat Daerah terkait dan mendorong peningkatan kinerja daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Lhokseumawe.

WALI KOTA LHOKSEUMAWE

Dr. SAYUTI ABUBAKAR, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM i
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xiii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Tahapan Perubahan RKPK Tahun 2026 ..... I-4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan I-6
1.4 Hubungan Antar Dokumen I-9
1.5 Maksud dan Tujuan I-13
1.6 Sitematika Penyusunan I-14
BAB II EVALUASI TRIWULAN I HASIL PELAKSANAAN RKPK LHOKSEUMAWE TAHUN 2026 ..... II-1
2.1. Capaian Terhadap Proyeksi Kebijakan Keuangan.. II-1
2.1.1. Capaian Pendapatan II-1
2.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah II-4
2.1.1.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat II-4
2.1.1.3. Pendapatan Transfer Antar Daerah II-5
2.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah II-6
2.1.2. Capaian Belanja Daerah II-6
2.1.2.1. Belanja Operasi II-7
2.1.2.2. Belanja Modal II-8
2.1.2.3. Belanja Tidak Terduga II-8
2.1.2.4. Belanja Transfer II-9
2.2. Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Kota Lhokseumawe II-9
2.2.1. Capaian Indikator Makro Kota Lhokseumawe II-9
2.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia II-10
2.2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi II-12
2.2.1.3 PDRB Perkapita II-13
2.2.1.4 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota II-14
2.2.1.5 Tingkat Kemiskinan II-15
2.2.1.6 Tingkat Penganguran Terbuka II-16
2.2.1.7 Indeks Gini II-16
2.2.1.8 Indeks Kualitasi Lingkungan Hidup II-17
2.2.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah ... II-18
2.2.3. Capaian Indikator Kinerja Daerah II-22
2.2.4. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II II-41

2.2.4.1. Evaluasi Capaian Kinerja Program II-45
2.2.4.2. Evaluasi Capaian Kinerja Subkegiatan..... II-46
2.2.4.3. Evaluasi Realisasi Keuangan II-47
2.2.5. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 Berdasarkan Bidang Urusan Pemerintahan..... II-50
2.2.5.1. Urusan Pendidikan II-51
2.2.5.2. Urusan Kesehatan II-52
2.2.5.3. Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Infrastruktur..... II-52
2.2.5.4. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat..... II-53
2.2.5.5. Urusan Sosial II-54
2.2.5.6. Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-54
2.2.5.7. Urusan Lingkungan Hidup II-55
2.2.5.8. Urusan Administrasi Kependudukan II-55
2.2.5.9. Urusan Perhubungan II-56
2.2.5.10. Urusan Komunikasi, Informatika dan Persandian..... II-56
2.2.5.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian..... II-57
2.2.5.12. Urusan Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan..... II-57
2.2.5.13. Urusan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata..... II-58
2.2.5.14. Urusan Perencanaan Pembangunan II-58
2.2.5.15. Urusan Keuangan Daerah II-58
2.2.5.16. Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur II-59
2.2.5.17. Urusan Pengawasan II-59
2.2.5.18. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kecamatan..... II-59
2.2.5.19. Urusan Syariat Islam, Pendidikan Dayah dan Kelembagaan Keagamaan..... II-60
2.3. Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi RKPK Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 ..... II-64
2.3.1. Kesimpulan II-64
2.3.2. Rekomendasi II-64
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN KOTA LHOKSEUMAWE III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi III-1
3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Global dan

Nasional III-1
3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Aceh III-9
3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Lhokseumawe III-17
3.1.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) III-20
3.1.3.2 Pertumbuhan Ekonomi III-25
3.1.3.3 PDRB Per Kapita III-28
3.1.3.4 Laju Inflasi III-30
3.1.3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka III-34
3.1.3.6 Kemiskinan III-35
3.1.3.7 Indeks Gini (*Gini Ratio*) III-37
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Kota Lhokseumawe III-40
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Kota Lhokseumawe III-43
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Kota Lhokseumawe III-53
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Kota Lhokseumawe III-57
3.3 Dukungan Pembiyaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP) III-71
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA LHOKSEUMAWE IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-2
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan IV-12
4.2.1 Prioritas Pembagunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 ..... IV-13
4.2.2 Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2026 ..... IV-14
4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026 ..... IV-15
4.3 Arah Kebijakan dan *Highlight* Intervensi Proyek Prioritas Nasional untuk Kota Lhokseumawe IV-82
4.4 Pengembangan Inovasi Daerah IV-83
4.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRK IV-84
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KOTA LHOKSEUMAWE V-1
BAB VI PENUTUP VI-1
DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Target dan Capaian Pendapatan 2026 terhadap RKPK Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II II-3
Tabel 2.2. Target dan Capaian Belanja Daerah 2026 terhadap RKPK Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II II-7
Tabel 2.3. Capaian Indikator Kinerja Makro Kota Lhokseumawe Tahun 2026 ..... II-10
Tabel 2.4. Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2026 ..... II-19
Tabel 2.5. Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2026 ... II-23
Tabel 2.6. Rekapitulasi Capaian SKPD pada Evaluasi Hasil RKPD Pemerintah Kota Lhokseumawe Kondisi Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026..... II-49
Tabel 2.7. Rekapitulasi Capaian Bidang Urusan pada Evaluasi Hasil RKPD Pemerintah Kota Lhokseumawe Kondisi Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026.... II-60
Tabel 3.1. Target Makro Ekonomi Tahun 2026..... III-38
Tabel 3.2. Gambaran Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2026 .. III-43
Tabel 3.3. Realisasi Pendapatan tahun 2025 dan Target Perubahan Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2026 ..... III-45
Tabel 3.4. Rincian Perubahan Komponen Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2026..... III-47
Tabel 3.5. Realisasi Belanja Tahun 2025 dan Target Perubahan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2026 ..... III-56
Tabel 3.6. Realisasi Pembiayaan Tahun 2025 dan Perubahan Pembiayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2026 ..... III-58
Tabel 3.7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Kota Lhokseumawe Tahun 2025 ..... III-59
Tabel 3.8. Anggaran dan Realisasi TJLSP/CSR Tahun 2025 Di Kota Lhokseumawe III-60
Tabel 3.9. Gambaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2026 ..... III-68
Tabel 3.10. Pembangunan Rumah Layak Huni Islamic Relief dan Baitul Mal Kota Lhokseumawe Tahun 2025 ..... III-72
Tabel 3.11. Pembangunan Rumah Layak Huni Islamic Relief dan Baitul Mal Kota Lhokseumawe Tahun 2026 ..... III-78
Tabel 3.12. Pembangunan Rumah Layak Huni Islamic Relief dan Baitul Mal Kota Lhokseumawe Tahun 2026 ..... III-79
Tabel 4.1. Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe..... IV-6
Tabel 4.2. Tema Pembangunan Tahun 2026 ..... IV-12

Tabel 4.3. Persandingan Target Indikator Makro Nasional, Aceh dan Kota Lhokseumawe Tahun 2026 ..... IV-16

Tabel 4.4. Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe dengan Prioritas Pembangunan Aceh dan Prioritas Pembangunan Nasional IV-17
Tabel 4.5. Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Daerah dengan Prioritas Pembangunan Aceh dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 ..... IV-21
Tabel 4.6. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2026..... IV-25
Tabel 4.7. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2026 Dengan Program Unggulan pada Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029 ..... IV-31
Tabel 4.8. Matriks Prioritas dan Program Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026 ..... IV-44
Tabel 4.9. Pengembangan Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2025 ..... IV-83
Tabel 5.1. Rekapitulasi Anggaran Perangkat Daerah pada Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 ..... V-2
Tabel 5.2. Rekapitulasi Pagu Indikatif Dukungan SPM dalam Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 ..... V-6
Tabel 5.3. Dukungan Pro SN pada P-RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 ..... V-24
Tabel 5.4. Realisasi Anggaran TKD Kebencanaan Kota Lhokseumawe Tahun 2026 ..... V-29
Tabel 5.5. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2026..... V-34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Visi Misi Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 ..... 1.2
Gambar 1.2. Sumber Pendapatan Pada P-RKPK Tahun 2026 .. I-2
Gambar 1.3 Perubahan Rencana Pendapatan dan Belanja pada P-RKPK Tahun 2026..... 1-3
Gambar 1.4 Capaian dan Target Indikator Makro Kota Lhokseumawe Tahun 2026 ..... I-4
Gambar 1.5 Tahapan Proses P-RKPK Tahun 2026..... I-5
Gambar 1.6 Permasalahan P-RKPK Tahun 2026 dan RPJMK Lhokseumawe 2025-2029 ..... I-11
Gambar 1.7 Isu Strategis P-RKPK Tahun 2026 dan RPJMK Lhokseumawe 2025-2029 ..... I-11
Gambar 1.8 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kota Lhokseumawe I-13
Gambar 1.9 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Kota.... I-13
Gambar 2.1 Grafik Realisasi Kinerja RKPK Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II II-44
Gambar 2.2 Persentase Realisasi Kinerja Program, Subkegiatan dan Keuangan RKPD TAhun 2026 sampai dengan Triwulan II II-45
Gambar 3.1. Prioritas Pembangunan Tahun 2026..... III-8
Gambar 3.2. PDRB Aceh ADHB Tw.I-2025, Tw.IV-2025 dan Tw.I-2026 (Triliun Rupiah) III-9
Gambar 3.3. PDRB Aceh ADHK Tw.I-2025, Tw.IV-2025 dan Tw.I-2026 (Triliun Rupiah) III-10
Gambar 3.4. Laju Pertumbuhan PDRB Aceh Tw.I-2026 (Persen) III-11
Gambar 3.5. Struktur PDRB Aceh (ADHB) Tw.I-2026 dengan Migas Menurut Lapangan Usaha (Persen) III-13
Gambar 3.6. Struktur PDRB Aceh (ADHB) Tw.I-2026 dengan Tanpa Migas Menurut Lapangan Usaha (Persen) III-14
Gambar 3.7. Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen PDRB Aceh Menurut Pengeluaran Tw.I-2026 (Persen) ... III-15
Gambar 3.8. Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2026..... III-17
Gambar 3.9. PDRB ADHK Lhokseumawe Tahun 2021-2025 (Triliun Rupiah)..... III-20
Gambar 3.10. PDRB ADHK Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 (Triwulan Rupiah) III-21
Gambar 3.11. Distribusi Persentase PDRB ADHB Lhokseumawe dengan Migas Tahun 2025 (persen)..... III-22
Gambar 3.12. Distribusi persentase PDRB ADHB Lhokseumawe Tanpa Migas Tahun 2025 (persen) III-22
Gambar 3.13. PDRB Lhokseumawe Menurut Pengeluaran Dengan Migas Tahun 2021-2025 (triliun rupiah) III-24
Gambar 3.14. Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2021 dan Tahun 2025 ..... III-25

Gambar 3.15. Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Tahun 2021-2025 (persen) III-26
Gambar 3.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Menurut Lapangan Usaha Tahun 2025 (persen).. III-27
Gambar 3.17. Laju pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe ADHK Menurut Pengeluaran Tahun 2021-2025 (persen) III-27
Gambar 3.18. PDRB Per Kapita Lhokseumawe ADHB Tahun 2021-2025 (juta rupiah) III-28
Gambar 3.19. PDRB Per Kapita Lhokseumawe ADHK Tahun 2021-2025 (juta rupiah)..... III-29
Gambar 3.20. Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita ADHB Tahun 2021-2025 (juta rupiah) III-30
Gambar 3.21. Inflasi Nasional, Aceh, Lhokseumawe dan Kabupaten/Kota di Aech Tahun 2025 (persen).... III-31
Gambar 3.22. Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Lhokseumawe Bulan Juni 2026 ..... III-32
Gambar 3.23. Informasi Sebaran Pembangunan Rumah Layak Huni Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2026 ..... III-80
Gambar 3.24. Potret Kondisi Rumah Sebelum Pembanunan Tahun 2025 dan 2026..... III-81
Gambar 4.1. Komponen Penyusunan Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 ..... IV-1
Gambar 4.2. Visi Dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029 ..... IV-3
Gambar 4.3 Tema Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026-2030 ..... IV-5

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Pemerintah Kota Lhokseumawe Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2026
Lampiran II	Catatan Hasil Reviu (CHR) atas Dokumen Rancangan Akhir RKPK Lhokseumawe Tahun 2026
Lampiran III	Jawaban atas Catatan Hasil Reviu (CHR) atas Dokumen Rancangan Akhir RKPK Lhokseumawe Tahun 2026
Lampiran IV	Hasil Fasilitasi Perubahan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2026
Lampiran V	Tindak Lanjut Hasil Fasilitasi Perubahan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2026

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2026 telah ditetapkan dengan Paraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 27 Tahun 2025 tetang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2026. RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 disusun secara simultan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029.

Namun demikian pembangunan yang terjadi seringkali dihadapkan pada berbagai dinamika dan perubahan yang tidak terduga. Baik faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi nasional dan bencana alam, maupun faktor internal seperti evaluasi terhadap pelaksanaan program dan perubahan prioritas daerah, dapat menyebabkan kebutuhan akan penyesuaian dalam perencanaan. Dalam hal ini, Perubahan RKPK Lhokseumawe menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang telah direncanakan tetap relevan dengan kondisi yang berkembang.

Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: (a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi

daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan/atau (b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya dan tambahan dari sumber lain yang harus digunakan untuk tahun berjalan, tanpa menghilangkan kesinambungan pembangunan sesuai dengan Misi Pembangunan berdasarkan RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029.

Gambar 1.1
Visi dan Misi Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Gambar 1.2
Sumber Pendapatan Pada P-RKPK 2026

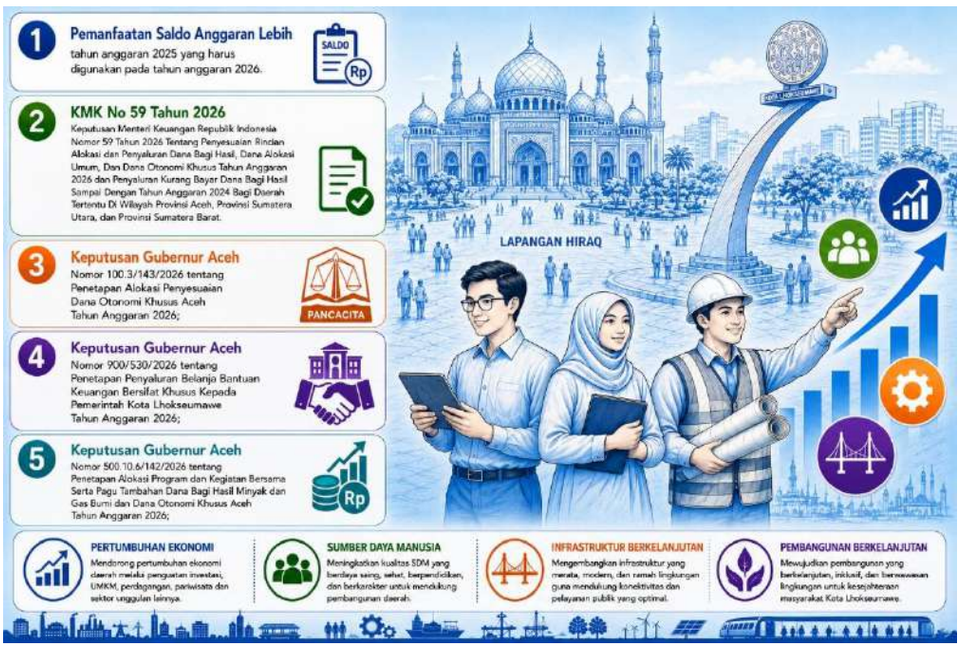

Gambar 1.3
Perubahan Pendapatan dan Belanja Pada P-RKPK 2026

Alasan utama yang menjadi dasar Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 adalah:

1. Pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih tahun anggaran 2025 yang harus digunakan pada tahun anggaran 2026.
2. Penyesuaian belanja kegiatan/sub-kegiatan untuk percepatan penanganan rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana Hidrometeorologi pada bulan November 2025.
3. Upaya pemenuhan belanja untuk capaian kinerja indikator Program Strategis Nasional;
4. Perubahan Target pada Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Lhokseumawe.

serta perubahan Target Indikator Makro ini (baris RPJMK 2025-2029, merupakan target dari 2025 s.d 2029, untuk dokumen tahunan, tahun 2025 merupakan capaian, dan tahun 2026 s.d 2027 merupakan target yang diproyeksikan sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.4

Capaian dan Target Indikator Makro Kota Lhokseumawe Tahun 2026

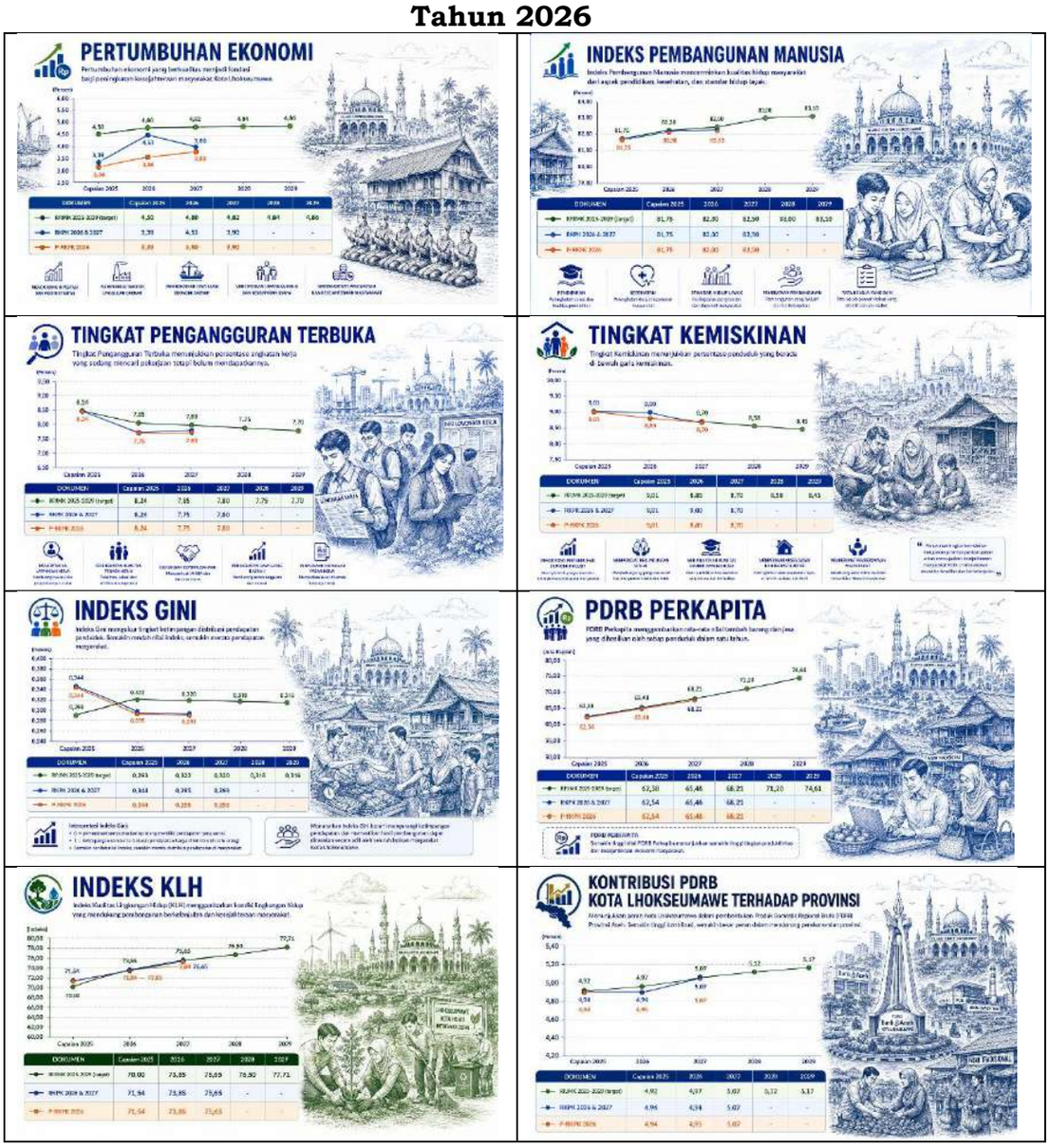

Penyusunan Perubahan RKPK Tahun 2026 tetap pada tema **"Pertumbuhan dengan Penguatan Sektor Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Yang Belanjutan".**

1.2 Tahapan Perubahan RKPK Tahun 2026

Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyampaian Surat Edaran Wali Kota Lhokseumawe Nomor 000.8.2.4/646/SE/2026 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja-PD Tahun 2026 tanggal 5 Juni 2026;

2. Pelaksanaan Evaluasi RKPK TW-II Tahun 2026, yang pelaksanaannya dimulai tanggal 23 Januari 2026;
3. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPK 2026 dengan memperhatikan hasil capaian Indikator Makro dan hasil evaluasi tahun berjalan;
4. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan verifikasi rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah oleh Bidang Koordinasi pada Bappeda Kota Lhokseumawe;
5. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPK Tahun 2026;
6. Reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPK Tahun 2026 oleh Inspektorat, sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.7.2.4./964, tanggal 14 Agustus 2026;
7. Fasilitasi Perubahan RKPK Tahun 2026 oleh Bappeda Aceh pada tanggal 31 Agustus 2026; dan
8. Penetapan Perwal tentang Perubahan RKPK Tahun 2026;

Mengacu pada hal-hal tersebut diatas, Perubahan RKPK Tahun 2026 selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), serta menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBK (KUA) Tahun 2026, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Perubahan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Gambar 1.5
Tahapan Proses P-RKPK Tahun 2026

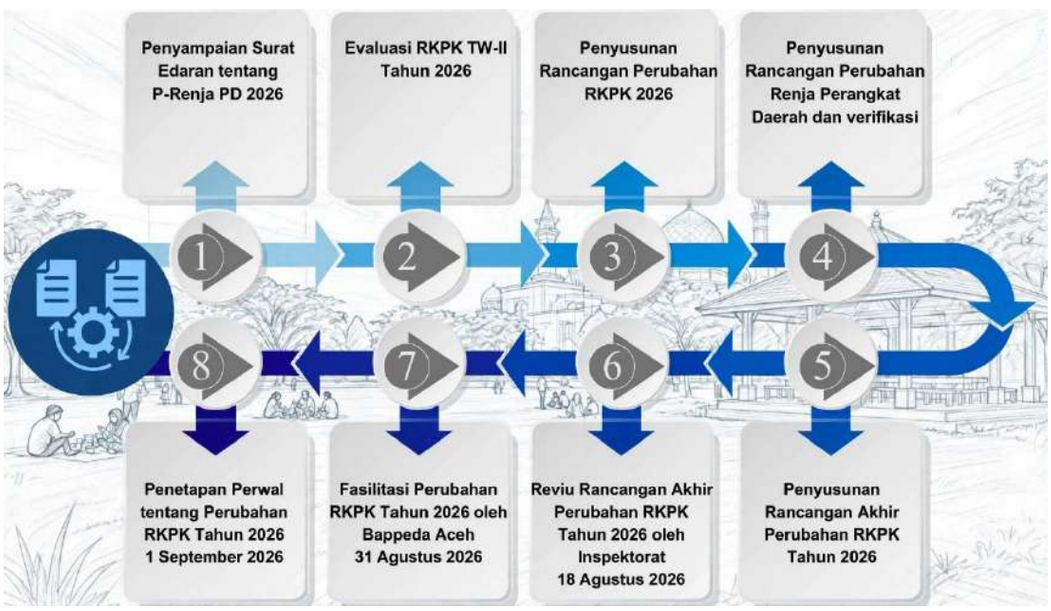

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No 1419);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024 Bagi Daerah Tertentu Di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;
16. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
17. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
19. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus; (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6)
20. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 151);
21. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 10);
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Aceh;

24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2025 Nomor 27);
25. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.3.3/1416/2025 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometerologi di Aceh Tahun 2025.
26. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3/143/2026 tentang Penetapan Alokasi Penyesuaian Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2026;
27. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/530/2026 tentang Penetapan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
28. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.10.6/142/2026 tentang Penetapan Alokasi Program dan Kegiatan Bersama Serta Pagu Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2026;
29. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
30. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044;
31. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045;
32. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2026;
33. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2026;

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan Perubahan RKPK Lhokseumawe berpedoman pada RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029, RPJMA Tahun 2025-2029 dan RPJMN 2025-2029 sebagaimana telah ditetapkan dengan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 merupakan tahun Ketiga pelaksanaan RPJMK Lhokseumawe dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, tujuan, sasaran, indikator tujuan, indikator sasaran, target tujuan, target sasaran dan prioritas pembangunan diselaraskan sesuai dengan RPJMK Lhokseumawe dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1. P-RKPK dan RPJPK 2025-2045

   Keterkaitan antara P-RKPK Lhokseumawe dan RPJPK Lhokseumawe tercermin dalam fungsi RKPK sebagai instrumen pelaksanaan secara bertahap dari arah pembangunan 20 tahunan. RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045, menetapkan Visi jangka panjang **"Kota Lhokseumawe Yang Islami, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan",** yang kemudian dijabarkan secara bertahap dalam lima tahunan melalui RPJMK, dan secara tahunan melalui RKPK. Dengan demikian, RKPK memastikan agar setiap program dan kegiatan yang dirancang tetap berada dalam koridor visi jangka panjang Kota.

   Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 merupakan pelaksanaan periode pertama RPJPK yakni periode 2025-2029. RKPK berisikan prioritas program dan kegiatan berdasarkan analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPK Lhokseumawe yang disesuaikan dengan RPJP Aceh dan RPJPN.

2. P-RKPK dan RPJMK 2025-2029

   Hubungan dengan RPJMK Lhokseumawe bersifat langsung, karena RKPK pada dasarnya adalah penjabaran tahunan dari RPJMK. Dalam hal ini, RKPD mengimplementasikan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program prioritas RPJMK sesuai dengan tahapan tahun pelaksanaan. RKPK juga berfungsi sebagai dasar evaluasi kinerja pencapaian target RPJMK setiap tahun, serta menjadi rujukan dalam penyesuaian apabila terdapat dinamika internal maupun eksternal yang memengaruhi capaian sasaran pembangunan.

Perubahan RKPK Tahun 2026 berisi penjabaran program pembangunan dan capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan. Melalui Perubahan RKPK, penyesuaian capaian target pembangunan tahunan dapat dilakukan penyesuaian sekaligus dapat menangani Permasalahan dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe.

Gambar 1.6
Permasalahan P-RKPK Tahun 2026 dan RPJMK Lhokseumawe 2025-2029

Gambar 1.7
Isu Strategis P-RKPK Tahun 2026 dan RPJMK Lhokseumawe 2025-2029

3. P-RKPK dan Renstra PD

   Perubahan RKPD memiliki keterkaitan erat dengan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah, karena Renstra PD merupakan dokumen perencanaan lima tahunan pada tingkat Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan RPJMK Lhokseumawe. P-RKPD juga mengarahkan Perubuahan Renja PD agar program dan kegiatan tidak keluar dari prioritas pembangunan daerah dan tetap dalam kerangka pencapaian tujuan Renstra PD.

4. P-RKPK dan Renja PD

   Perubahan RKPK Tahun 2026 sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.

5. P-RKPK dan RKPK

   Perubahan RKPK Tahun 2026 merupakan penyesuaian terhadap RKPK Tahun 2026 akibat dari adanya tambahan sumber dana dan peruntukan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024 Bagi Daerah Tertentu Di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 Dalam APBD Bagi Daerah Terdampak Bencana di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat.

6. P-RKPK dan P-APBK

   Perubahan RKPK tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBK Lhokseumawe dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan P-APBK tahun 2026.

Gambar 1.8
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kota Lhokseumawe

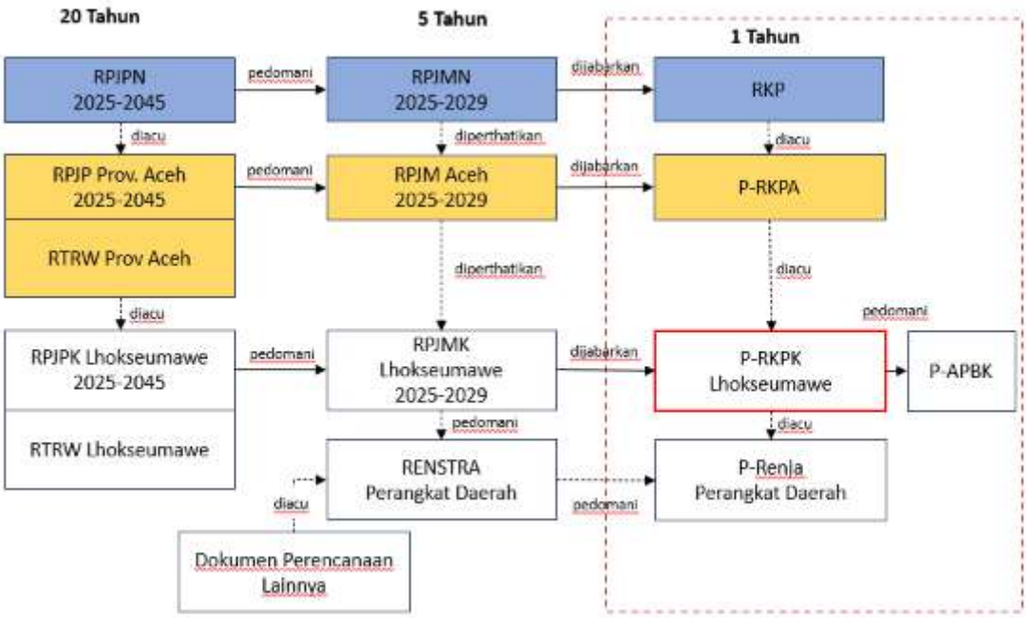

Gambar 1.9
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Kota

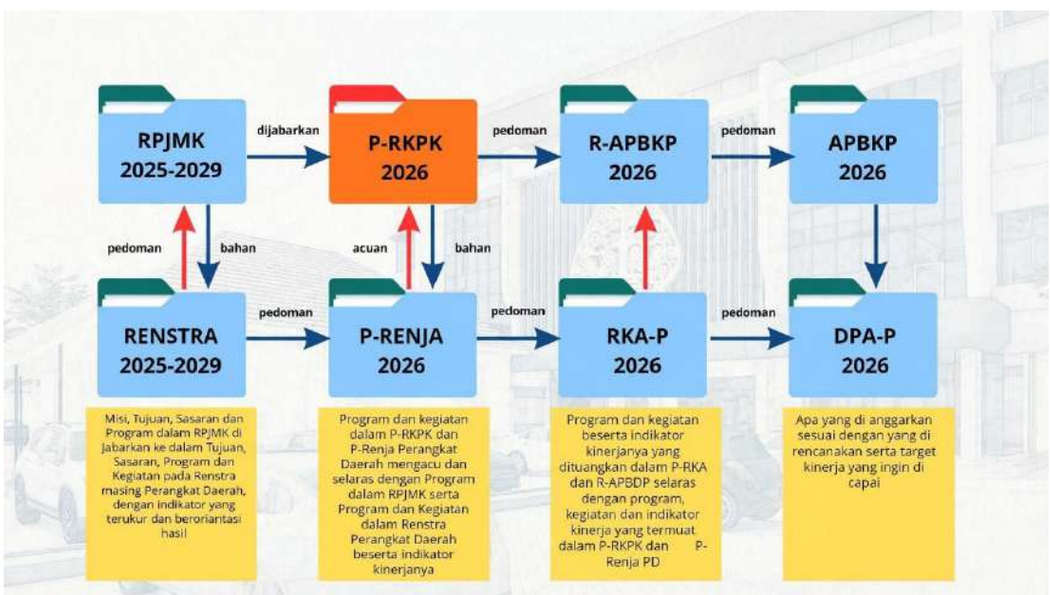

1.5 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengakomodir Visi, Misi dan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026;
2. Melakukan penyesuaian target Indikator Makro Kota Lhokseumawe Tahun 2026;
3. Melakukan penyesuaian pendapatan dan belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2026;
4. Pemenuhan belanja pada Sub Kegiatan yang mendukung Program Strategis Nasional; dan
5. Penanganan kerusakan infrastruktur yang terdampak bencana Hidrometeorologi pada bulan November 2025.

B. Tujuan

Tujuan perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026;
2. Pedoman penyusunan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
3. Sebagai pedoman penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.6. Sistimatika Penyusunan

Sistematika penyusunan perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan RKPK, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, serta Sistimatika Dokumen.

BAB II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 Sampai Dengan Triwulan II

Menguraikan hasil evaluasi kinerja pembangunan kota serta program dan kegiatan pada tiap urusan penyelenggaraan pemerintah sampai dengan dengan triwulan II Tahun 2026.

BAB III. Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Kota Lhokseumawe

Menguraikan tentang perubahan kerangka ekonomi daerah secara makro di wilayah Kota Lhokseumawe menyangkut arah kebijakan keuangan daerah yang tertuang dalam ringkasan anggaran berdasarkan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah untuk perubahan tahun 2026.

BAB IV. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe Pada bab ini dijelaskan perubahan sasaran prioritas pembangunan daerah, penyesuaian target indikator kinerja utama daerah.

BAB V. Rencana Kerja Dan Pendanaan Kota Lhokseumawe

Pada bab ini dijelaskan Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun Kota Lhokseumawe Tahun 2026 serta perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2026

BAB VI. Penutup

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK LHOKSEUMAWE TAHUN 2026 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

P-RKPK 2026

BAPPEDA KOTA LHOKSEUMAWE

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK LHOKSEUMAWE TAHUN 2026 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Capaian Terhadap Proyeksi Kebijakan Keuangan

Evaluasi kebijakan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam mengevaluasi pelaksanaan RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2026. Evaluasi tidak hanya diarahkan untuk mengetahui tingkat realisasi pendapatan dan belanja, tetapi juga untuk menilai konsistensi antara target yang ditetapkan dalam RKPK dengan penganggaran dalam APBK, perkembangan realisasi sampai dengan Triwulan II, serta kemampuan pelaksanaan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dengan pendekatan tersebut, evaluasi kebijakan keuangan dilakukan dengan membandingkan tiga kondisi utama, yaitu target RKPK Tahun 2026, anggaran setelah pergeseran ke-4, dan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Perbandingan tersebut penting untuk mengidentifikasi perubahan kebijakan fiskal, tingkat pencapaian, deviasi, serta potensi risiko terhadap pencapaian target pembangunan

2.1.1 Capaian Pendapatan

Dalam RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2026, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp817.489.376.141. Namun, dalam penetapan APBK Murni Tahun Anggaran 2026, target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp692.756.169.636, sehingga mengalami penurunan sebesar Rp124.733.206.504 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RKPK Tahun 2026. Penurunan tersebut terjadi sebagai dampak dari kebijakan efisiensi dan penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2026.

Dalam perjalanan pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Pusat selanjutnya menetapkan kebijakan pemulihan alokasi TKD bagi daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada tahun 2025. Kota Lhokseumawe memperoleh

tambahan TKD dalam rangka penanganan dan pemulihan dampak bencana hidrometeorologi sebesar Rp124.162.677.000,00.

Adanya tambahan TKD tersebut selanjutnya diakomodir dalam proses pergeseran APBK Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan hasil pergeseran ke-4, target pendapatan daerah meningkat menjadi sebesar Rp830.087.605.138,00. Dengan demikian, dibandingkan dengan APBK Murni sebesar Rp692.756.169.636,34, terdapat peningkatan target pendapatan sebesar Rp137.331.435.501.

Dari peningkatan tersebut, tambahan TKD untuk pemulihan akibat bencana hidrometeorologi sebesar Rp124.162.677.000, sedangkan selisih sebesar Rp13.168.758.501 merupakan penyesuaian dan tambahan pendapatan lainnya dalam proses pergeseran APBK.

Dengan demikian, perkembangan target pendapatan daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2026 menunjukkan bahwa target awal dalam RKPK sebesar Rp817.489.376.141,00 mengalami penyesuaian menjadi Rp692.756.169.636,34 pada APBK Murni akibat kebijakan efisiensi dan penyesuaian TKD oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya, melalui adanya tambahan TKD untuk pemulihan dampak bencana hidrometeorologi tahun 2025 sebesar Rp124.162.677.000,00 serta penyesuaian pendapatan lainnya, target pendapatan pada pergeseran ke-4 meningkat menjadi Rp830.087.605.138.

Tabel 2.1
Target dan Capaian Pendapatan 2026 terhadap RKPK
Tahun 2026 sampai dengan Triwulan 2

Kode Rekening	URAIAN	RKPK 2026	ANGGARAN pergeseran ke 4	REALISASI 2026	Capaian Realisasi terhadap target APBK 2026 TW 2 (%)	Capaian Realisasi terhadap target RKPK 2026 TW 2 (%)
1	2	3	4	5	6 = (5/4)*100	7=(5/3)*100
4	PENDAPATAN DAERAH	817.489.376.141	830.087.605.138	389.950.002.109	46.98	47.70%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80.802.475.448	86.314.691.187	33.953.099.635	39.34	42.02%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	690.777.280.000	690.530.827.000	349.219.319.750	50.57	50.55%
4.3	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	31.895.671.958	38.128.138.216		0.00	0.00%
4.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.013.948.735	15.113.948.735	6.777.582.723	44.84	48.36%

Sumber : LRA Lhokseumawe Tahun 2026 sampai dengan triwulan 2

Secara agregat, realisasi pendapatan terhadap target RKPK sebesar 47,7% menunjukkan bahwa kinerja pendapatan sampai dengan semester pertama telah mencapai hampir separuh target tahunan. Namun, capaian tersebut belum dapat langsung dikategorikan berhasil atau tidak berhasil hanya berdasarkan angka 50%, karena karakteristik penerimaan daerah berbeda-beda dan sebagian pendapatan memiliki pola penyaluran yang tidak merata sepanjang tahun.

Hal yang lebih penting dari sisi evaluasi adalah struktur dan kualitas pendapatan. Capaian realisasi PAD hanya mencapai 42,0% dari target RKPK, lebih rendah dibandingkan pendapatan transfer yang mencapai 50,55%. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai 48,36%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sampai dengan semester pertama, peningkatan kapasitas pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri belum sekuat penerimaan yang bersumber dari transfer.

Dengan demikian, temuan evaluasi utama pada sisi pendapatan bukan semata-mata rendahnya realisasi, tetapi masih kuatnya ketergantungan struktur pendapatan Kota Lhokseumawe terhadap transfer serta belum optimalnya realisasi PAD.

2.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RKPK Tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp80.802.475.448 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp86.314.691.187 dalam anggaran setelah pergeseran ke-4. Sampai Triwulan II, realisasi PAD mencapai Rp33.953.099.635,00 atau 42,02% terhadap target RKPK.

Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian karena target PAD yang meningkat dalam APBK harus diikuti oleh kemampuan riil dalam merealisasikan penerimaan. Apabila peningkatan target tidak disertai penguatan basis data dan strategi pemungutan, maka terdapat risiko terjadinya over-estimation target PAD pada akhir tahun.

Kinerja PAD sampai Triwulan II perlu dikategorikan sebagai area yang memerlukan penguatan, khususnya pada komponen lain-lain PAD yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.1.1.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah Kota Lhokseumawe. Dalam RKPK Tahun 2026, pendapatan transfer pemerintah pusat ditargetkan sebesar Rp690.777.280.000,00, sedangkan dalam anggaran setelah pergeseran ke-4 ditetapkan sebesar Rp690.530.827.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat mencapai Rp349.219.319.750,00, atau sebesar 50,55% terhadap target RKPK dan 50,57% terhadap anggaran setelah pergeseran ke-4.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara agregat realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat sampai dengan semester pertama telah mencapai lebih dari separuh target tahunan. Namun, capaian antarjenis transfer masih menunjukkan perbedaan

yang cukup signifikan, yang dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing sumber pendapatan serta mekanisme dan waktu penyalurannya.

Beberapa jenis transfer yang telah terealisasi memberikan kontribusi terhadap capaian pendapatan daerah, sedangkan komponen transfer yang belum terealisasi atau masih rendah perlu mendapat perhatian. Kondisi tersebut penting untuk diperhatikan karena ketepatan waktu penerimaan transfer berpengaruh terhadap ketersediaan kas daerah dan kemampuan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Dengan demikian, meskipun secara keseluruhan pendapatan transfer pemerintah pusat telah mencapai 50,55% terhadap target RKPK, pengendalian dan pemantauan terhadap masing-masing komponen transfer tetap perlu dilakukan, khususnya terhadap sumber transfer yang realisasinya masih rendah atau belum terealisasi. Hal ini diperlukan untuk meminimalkan risiko ketidaksesuaian waktu antara penerimaan pendapatan transfer dengan kebutuhan belanja daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

2.1.1.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari transfer Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe. Dalam RKPK Tahun 2026, pendapatan transfer antar daerah ditargetkan sebesar Rp31.895.671.958 kemudian menjadi sebesar Rp38.128.138.216,00 dalam anggaran setelah pergeseran ke-4, atau mengalami peningkatan sebesar 19,54%.

Perubahan anggaran tersebut menunjukkan adanya penyesuaian komposisi pendapatan transfer antar daerah dalam rangka menyesuaikan target penerimaan dengan kebijakan dan perkembangan penganggaran pada tahun berjalan. Peningkatan anggaran setelah pergeseran ke-4 terutama berasal dari penambahan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi.

Dengan demikian, pendapatan transfer antar daerah tetap menjadi salah satu sumber pendapatan yang perlu diperhatikan dalam mendukung kemampuan pendanaan Pemerintah Kota Lhokseumawe, khususnya melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait penetapan, penyaluran, dan pemenuhan persyaratan administrasi pendapatan transfer.

2.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp14.013.948.735 dalam RKPK Tahun 2026 dan meningkat menjadi sebesar Rp15.113.948.735 dalam anggaran setelah pergeseran ke-4, atau mengalami peningkatan sebesar 7,85%. Realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp6.777.582.723,00 atau sebesar 48,36% terhadap target RKPK.

Perubahan target tersebut berasal dari adanya penambahan Pendapatan Hibah sebesar Rp1.100.000.000, sedangkan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tetap sebesar Rp14.013.948.735. Sementara itu, Dana Darurat tidak dianggarkan pada Anggaran pergeseran ke-4.

Dengan demikian, jumlah realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebesar Rp6.777.582.723,00.

2.1.2 Capaian Belanja Daerah

Berdasarkan data pada tabel, realisasi Belanja Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Triwulan II mencapai Rp317.973.282.998 dari target APBK 2026 Pergeseran ke-4 sebesar Rp877.410.064.399, atau baru mencapai 36,24%. Jika dibandingkan dengan target RKPK 2026 sebesar Rp816.489.376.141, realisasi tersebut mencapai 38,94%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja daerah sampai dengan Triwulan II masih berada pada tingkat yang relatif rendah, terutama karena terdapat komponen belanja yang realisasinya jauh di bawah target, khususnya belanja modal dan belanja tidak terduga.

Tabel 2.2
Target dan Capaian Belanja Daerah 2026 terhadap RKPK
Tahun 2026 sampai dengan Triwulan 2

Kode Rekening	URAIAN	RKPK 2026	APBK 2026 PERGESERAN KE 4	REALISASI 2026	Capaian Realisasi terhdapat target APBK 2026 TW 2 (%)	Capaian Realisasi terhdapat target RKPK 2026 TW 2 (%)
1	2	3	4	5	6 = (5/4)*100	7=(5/3)*100
5	**BELANJA DAERAH**	**816.489.376.141**	**877.410.064.399**	**317.973.282.998**	**36,24%**	**38,94%**
5.1	BELANJA OPERASI	619.238.614.223	605.388.732.111	281.938.999.428	46,57%	45,53%
5.2	BELANJA MODAL	78.636.668.918	159.383.725.145	7.766.785.500	4,87%	9,88%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.435.485.250	9.740.129.843	48.224.600	0,50%	1,40%
5.4	BELANJA TRANSFER	115.178.607.750	102.897.477.300	28.219.273.470	27,42%	24,50%

Sumber : LRA Lhokseumawe Tahun 2026 sampai dengan triwulan 2

Secara keseluruhan, Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBK 2026 Pergeseran ke-4 sebesar Rp877.410.064.399 lebih tinggi dibandingkan dengan target RKPK 2026 sebesar Rp816.489.376.141 atau meningkat sekitar 7,46%. Namun demikian, sampai dengan Triwulan II realisasi baru mencapai Rp317.973.282.998. Dengan capaian 36,24% terhadap APBK dan 38,94% terhadap RKPK, dapat dinilai bahwa penyerapan anggaran belum optimal. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena pada akhir semester pertama idealnya sebagian besar program dan kegiatan yang bersifat rutin telah berjalan, sementara kegiatan yang membutuhkan proses pengadaan atau pekerjaan fisik seharusnya mulai menunjukkan peningkatan realisasi.

2.1.2.1 Belanja Operasi

Pada kelompok Belanja Operasi, alokasi APBK 2026 Pergeseran ke-4 sebesar Rp605.388.732.111 dengan realisasi Rp281.938.999.428. Dengan demikian, tingkat realisasi mencapai 46,57% terhadap target APBK dan 45,53% terhadap target RKPK sebesar Rp619.238.614.223. Dibandingkan kelompok belanja lainnya, belanja operasi menunjukkan tingkat penyerapan paling baik. Capaian yang mendekati separuh pagu pada akhir Triwulan II menunjukkan bahwa belanja yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta kebutuhan operasional perangkat daerah

relatif telah berjalan sesuai dengan rencana. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 53,43% pagu APBK yang belum terealisasi sehingga perlu dipastikan bahwa sisa anggaran tersebut didukung oleh jadwal pelaksanaan kegiatan yang jelas pada Triwulan III dan IV.

2.1.2.2 Belanja Modal

Berbeda dengan belanja operasi, Belanja Modal menunjukkan kinerja penyerapan yang sangat rendah. Dari alokasi APBK Pergeseran ke-4 sebesar Rp159.383.725.145, realisasi sampai dengan Triwulan II hanya Rp7.766.785.500, atau 4,87%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target RKPK sebesar Rp78.636.668.918, realisasi baru mencapai 9,88%. Rendahnya realisasi belanja modal menjadi salah satu faktor utama yang menahan peningkatan penyerapan belanja daerah secara keseluruhan. Kondisi ini perlu dievaluasi lebih lanjut karena belanja modal umumnya berkaitan dengan pembangunan atau penyediaan infrastruktur dan aset daerah yang memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Rendahnya realisasi dapat mengindikasikan adanya keterlambatan proses perencanaan teknis, pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pekerjaan fisik, maupun proses pembayaran.

2.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Selanjutnya, Belanja Tidak Terduga (BTT) memiliki alokasi APBK 2026 Pergeseran ke-4 sebesar Rp9.740.129.843, sedangkan realisasi sampai dengan Triwulan II hanya Rp48.224.600, atau sebesar 0,50% dari target APBK. Jika dibandingkan dengan target RKPK sebesar Rp3.435.485.250, realisasi mencapai 1,40%. Rendahnya realisasi BTT pada dasarnya tidak serta-merta menunjukkan kinerja yang buruk, karena karakteristik belanja ini memang diperuntukkan bagi kebutuhan yang sifatnya tidak terduga dan/atau keadaan darurat sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, besarnya peningkatan alokasi BTT dari RKPK ke APBK perlu menjadi perhatian evaluatif untuk memastikan bahwa perubahan tersebut didasarkan pada kebutuhan dan risiko fiskal yang teridentifikasi.

2.1.2.4 Belanja Transfer

Pada Belanja Transfer, alokasi APBK 2026 Pergeseran ke-4 sebesar Rp102.897.477.300, dengan realisasi sebesar Rp28.219.273.470. Tingkat realisasi mencapai 27,42% terhadap target APBK dan 24,50% terhadap target RKPK sebesar Rp115.178.607.750. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan transfer masih relatif rendah pada akhir Triwulan II. Kondisi ini perlu dikaitkan dengan mekanisme penyaluran, persyaratan administrasi, tahapan penyaluran, serta kesiapan penerima transfer. Apabila keterlambatan bukan disebabkan oleh faktor administratif atau persyaratan penyaluran, maka perlu dilakukan percepatan agar tidak terjadi penumpukan realisasi pada akhir tahun anggaran.

Dengan demikian, kinerja penyerapan Belanja Daerah Kota Lhokseumawe sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat dikategorikan belum optimal. Realisasi secara keseluruhan baru mencapai 36,24% dari APBK Pergeseran ke-4. Permasalahan utama bukan terletak pada belanja operasi, tetapi terutama pada belanja modal dan belanja transfer yang tingkat realisasinya masih rendah.

2.2 Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Kota Lhokseumawe

2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Makro Kota Lhokseumawe

Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPK tidak dapat hanya didasarkan pada indikator keuangan. Keberhasilan pembangunan harus dinilai berdasarkan kemampuan program dan kegiatan dalam menghasilkan *output* dan *outcome* serta memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan daerah yang ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja makro daerah.

Terdapat delapan indikator makro yaitu; Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per kapita, Kontribusi PDRB, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Indeks Gini, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Namun, sebagian besar indikator tersebut belum tersedia/dirilis datanya untuk Tahun 2026, dikarenakan Badan Pusat Statistik merilis data dimaksud secara tahunan. Oleh karena itu, indikator yang belum tersedia, belum dapat dinilai karena data capaian Tahun 2026 belum tersedia secara resmi.

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Makro Kota Lhokseumawe
Tahun 2026

No	Indikator Makro	Satuan	Capaian 2024	Capaian 2025	Target RKPK 2026	Capaian TW 1 2026	Capaian TW 1 2026	Status Evaluasi
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	80,89	81,75	81,95 - 82,30	N/A	N/A	Belum dapat dinilai
2	Laju pertumbuhan Ekonomi	%	4.46	3,39	4,53-4,80	N/A	N/A	Belum dapat dinilai
3	PDRB Perkapita	Rp. Juta	59,12	62,54	65,48	N/A	N/A	Belum dapat dinilai
4	Kontribusi PDRB Kabupaten/kota Terhadap PRB Aceh	%	4,87	4,94	4,94	N/A	N/A	Belum dapat dinilai
5	Tingkat Kemiskinan	%	10,44	9,01	9,00-9,81	N/A	N/A	Untuk Kab/Kota Belum dirilis BPS
6	Tingkat Pengangguran	%	8,47	8,24	7,75-7,85	N/A	N/A	Untuk Kab/Kota Belum dirilis BPS
7	Indeks Gini	Nilai	0,326	0,344	0,295-0,322	N/A	N/A	Belum dapat dinilai
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	69,4	71,54	73,35 - 73,85	N/A	N/A	Belum dapat dinilai

Sumber : RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 dan BPS

Dari tabel diatas dapat dipaparkan untuk masing-masing indikator makro Kota Lhokseumawe tahun 2026, sebagai berikut :

2.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Lhokseumawe Tahun 2025 tercatat 81,75, sedangkan target Tahun 2026 ditetapkan sebesar 81,95–82,30. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, data IPM belum tersedia secara resmi.

Dengan demikian, pencapaian IPM belum dapat dinilai secara kuantitatif. Namun, dari perspektif pengendalian pembangunan, pemerintah tidak harus menunggu angka IPM tahunan untuk melakukan evaluasi. Pengendalian dapat dilakukan melalui indikator pembentuknya, terutama:

a) pendidikan;
b) kesehatan;

c) standar hidup layak.

1. Faktor Pendorong

Peningkatan IPM pada periode 2024–2025 didorong oleh membaiknya akses dan kuantitas-kualitas layanan pendidikan serta kesehatan bagi masyarakat, yang berkontribusi pada peningkatan usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah. Selain itu, peningkatan daya beli masyarakat turut menjadi faktor penting dalam mendorong kenaikan indeks ini.

Berbagai program pelayanan dasar yang berjalan konsisten juga memberikan dukungan signifikan terhadap capaian tersebut. Tidak kalah penting, posisi IPM yang sudah berada pada kategori tinggi menunjukkan bahwa pondasi pembangunan manusia yang telah dibangun sebelumnya cukup kuat dan musti terus ditingkatkan. Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu memperhitungkan kebijakan lebih lanjut untuk menjamin peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, disamping secara kuantitatif layanan infrastruktur pendidikan dan kesehatan secara simultan ditingkatkan.

2. Faktor Penghambat

Di sisi lain, masih terdapat kesenjangan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan antar-wilayah maupun antar-kelompok masyarakat, yang berpotensi menghambat pemerataan peningkatan IPM. Selain itu, karena capaian IPM sudah berada pada level yang tinggi, upaya peningkatan lebih lanjut memerlukan intervensi yang terarah guna peningkatan kualitas. Tidak hanya cukup dengan program-program dasar yang sebagian besarnya mengintervensi kuantitas dan sarana prasarana semata.

Faktor lain yang turut membatasi adalah keterbatasan kesempatan kerja bagi usia produktif. Hal tersebut dapat menghambat peningkatan pendapatan dan standar hidup masyarakat secara berkelanjutan.

2.2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Target pertumbuhan ekonomi Tahun 2026 ditetapkan sebesar 4,53–4,80%, sedangkan capaian Tahun 2025 tercatat 3,39%. Data pertumbuhan Tahun 2026 belum tersedia secara resmi. Target tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota mengharapkan adanya percepatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan capaian sebelumnya sesuai dengan semangat Asta Cita.

Untuk Tahun 2025 capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 3,39%. lebih rendah dibandingkan capaian Tahun 2024 sebesar 4.46% hal ini dikarenakan terjadinya bencana Hidrometeorologi pada akhir Tahun 2025 lalu, namun faktor bencana bukan merupakan satu-satunya faktor penuruan pertumbuhan ekonomi adanya struktur ekonomi yang belum cukup terdiversifikasi dan belum memiliki banyak mesin pertumbuhan alternative, masih lemahnya diversifikasi ekonomi, lemahnya transmisi investasi menjadi aktivitas ekonomi lokal, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dengan adanya investasi. Yang lebih penting adalah berapa besar investasi tersebut menciptakan nilai tambah lokal dan berapa besar multiplier effect-nya terhadap masyarakat dan dunia usaha lokal, belanja pemerintah atau *government spending* belum sepenuhnya menjadi pengungkit pertumbuhan disebabkan karena APBK 2025 rendah dan juga terjadi efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat, pengurangan TKD ke daerah.

Dikarenakan indikator pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dinilai tahunan, untuk semester kedua nanti diharapkan penilaian dapat dilakukan terhadap sub-indikator diantaranya:

- perkembangan sektor utama ekonomi;
- investasi;
- perdagangan;
- industri;
- konsumsi;
- ketenagakerjaan;
- inflasi; dan
- aktivitas ekonomi lokal.

1. Faktor Pendorong

Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh aktivitas perdagangan dan jasa, konsumsi masyarakat, serta aktivitas sektor industri dan UMKM. Posisi Lhokseumawe sebagai pusat kegiatan ekonomi regional turut memberikan kontribusi positif. Besaran belanja Pemerintah *(Government Spending)* juga menjadi pendorong yang dominan dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

2. Faktor Penghambat

Terjadnya bencana Hidrometeorologi, adanya struktur ekonomi yang belum cukup terdiversifikasi dan belum memiliki banyak mesin pertumbuhan alternative, masih lemahnya diversifikasi ekonomi, lemahnya transmisi investasi menjadi aktivitas ekonomi lokal, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dengan adanya investasi. Yang lebih penting adalah berapa besar investasi tersebut menciptakan nilai tambah lokal dan berapa besar multiplier effect-nya terhadap masyarakat dan dunia usaha lokal, belanja pemerintah atau government spending belum sepenuhnya menjadi pengungkit pertumbuhan disebabkan karena APBK 2025 rendah dan juga terjadi efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat, pengurangan TKD ke daerah.

2.2.1.3 PDRB Perkapita

PDRB per kapita Tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp65,48 juta, sedangkan capaian Tahun 2025 dalam dokumen realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp62,538 juta. Untuk Data Tahun 2026 belum tersedia/dirilis oleh BPS.

Secara konseptual, target tersebut menunjukkan kebutuhan peningkatan aktivitas ekonomi dan pendapatan regional per penduduk. Namun, peningkatan PDRB per kapita tidak otomatis berarti peningkatan kesejahteraan apabila distribusi pendapatan tidak membaik. Karena itu, indikator ini harus dibaca bersama dengan kemiskinan dan Indeks Gini.

1. Faktor Pendorong:

Peningkatan PDRB per kapita didorong oleh peningkatan nilai tambah ekonomi dan pendapatan per kapita, seiring dengan aktivitas perdagangan, jasa, dan industri yang terus tumbuh secara nominal.

2. Faktor Penghambat:

Kenaikan PDRB per kapita belum otomatis mencerminkan peningkatan kesejahteraan seluruh penduduk. Ketimpangan yang meningkat, inflasi yang dapat mengurangi daya beli *riil*, serta distribusi pendapatan yang belum merata menjadi faktor penghambat utama.

2.2.1.4 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap PDRB Aceh

Kontribusi PDRB Kota Lhokseumawe terhadap PDRB Aceh pada 2025 tercatat 4,94%, sedangkan target 2026 sebesar 4,94%. Data 2026 belum tersedia/diriis BPS. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam evaluasi: target 2026 lebih rendah daripada capaian 2025.

Penurunan target ini tidak dapat langsung dianggap sebagai penurunan kinerja, tetapi perlu dijelaskan berdasarkan asumsi perencanaan.

Dari sisi perencanaan, penetapan target tahun 2026 sebesar 4,94 persen menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe menetapkan target yang bersifat mempertahankan posisi kontribusi ekonomi daerah, bukan meningkatkan pangsa kontribusinya terhadap perekonomian Aceh. Dengan kata lain, target 2026 mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe diperkirakan relatif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Aceh secara keseluruhan, sehingga proporsi PDRB Lhokseumawe terhadap PDRB Aceh dipertahankan pada tingkat yang sama.

Apabila target tersebut memang mencerminkan proyeksi realistis, dasar penetapannya perlu dijelaskan agar konsisten dengan target pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe.

1. Faktor Pendorong

   Peningkatan kontribusi ini didorong oleh menguatnya peran Kota Lhokseumawe sebagai pusat perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan pelayanan wilayah, serta aktivitas ekonomi perkotaan yang relatif berkembang.

2. Faktor Penghambat

Skala ekonomi kota khususnya sektor perdagangan, jasa dan pariwisata yang relatif terbatas dan daya tarik investasi yang belum maksimal menjadi kendala. Kontribusi sektor unggulan yang belum berkembang optimal serta keterkaitan ekonomi dengan wilayah sekitar yang masih perlu diperkuat turut membatasi peningkatan kontribusi ini.

2.2.1.5 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Tahun 2025 tercatat 9,01%, sedangkan target Tahun 2026 ditetapkan sebesar 9,00–9,81%. Untuk data Tahun 2026 belum tersedia/dirilis BPS. Target tersebut menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan tetap menjadi prioritas pembangunan.

Namun, evaluasi kemiskinan tidak boleh hanya dilakukan ketika angka kemiskinan tahunan diterbitkan. Program penanggulangan kemiskinan perlu dievaluasi melalui:

- ketepatan sasaran bantuan;
- peningkatan pendapatan kelompok miskin;
- akses pekerjaan;
- pendidikan;
- kesehatan;
- Resiliensi terhadap bencana;
- perlindungan sosial; dan
- pemberdayaan ekonomi

1. Faktor Pendorong

Penurunan tingkat kemiskinan didukung oleh program perlindungan sosial, pemulihan aktivitas ekonomi, peningkatan pendapatan sebagian masyarakat, pengurangan kantong-kantong kemiskinan, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, serta intervensi pengurangan kemiskinan yang lebih terarah.

2. Faktor Penghambat

Capaian 9,01% masih sedikit di atas target terendah. Kelompok rentan terhadap kemiskinan masih besar, ditambah tantangan kualitas dan stabilitas pekerjaan, lapangan pekerjaan yang terbatas, pengangguran

tinggi, inflasi kebutuhan dasar, serta ketepatan sasaran program perlindungan sosial yang perlu terus diperbaiki.

2.2.1.6 Tingkat Pengangguran

Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2026 sebesar 7,75–7,85%, sementara capaian 2025 dalam tabel sebesar 8,24%. Untuk data 2026 belum tersedia/dirilis BPS. Dengan demikian, Pemerintah Kota harus melakukan pengendalian terhadap program yang berhubungan langsung dengan penciptaan kesempatan dan lapangan kerja. Fokus evaluasi perlu diarahkan pada hubungan:
investasi → aktivitas usaha → penciptaan lapangan/kesempatan kerja → penurunan pengangguran.

Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menilai program pelatihan, tetapi juga apakah pelatihan tersebut benar-benar menghasilkan penempatan kerja atau peningkatan usaha.

1. Faktor Pendorong

Penurunan tingkat pengangguran didorong oleh pemulihan aktivitas ekonomi, peningkatan aktivitas perdagangan/jasa, program pelatihan dan fasilitasi tenaga kerja, serta berkembangnya kegiatan usaha/UMKM.

2. Faktor Penghambat

Tingkat pengangguran masih tinggi dibandingkan target 7,75–7,85%. *Missmatch* kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, terbatasnya pekerjaan formal dan produktif, serta pertumbuhan ekonomi yang belum cukup kuat menciptakan lapangan kerja menjadi faktor penghambat.

2.2.1.7 Indeks Gini

Indeks Gini Tahun 2025 sebesar 0,344, sedangkan target Tahun 2026 sebesar 0,295–0,322. Data 2026 belum tersedia/dirilis BPS. Target tersebut mengindikasikan adanya arah kebijakan untuk menurunkan ketimpangan. Namun, target penurunan dari 0,344 menuju rentang 0,295–0,322 perlu didukung program yang menyentuh kelompok masyarakat berpendapatan rendah, bukan hanya pertumbuhan ekonomi secara agregat.

1. Faktor Pendorong

Pertumbuhan PDRB per kapita dan aktivitas ekonomi berpotensi menciptakan peluang pendapatan baru bagi sebagian masyarakat.

2. Faktor Penghambat

Manfaat pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi secara merata. Kesenjangan pendapatan dan kesempatan ekonomi, konsentrasi kegiatan ekonomi pada kelompok/sektor tertentu, serta akses terhadap pekerjaan produktif dan aset ekonomi yang belum merata menjadi penyebab memburuknya indeks ini.

2.2.1.8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan HIdup (IKLH) Tahun 2025 tercatat sebesar 71.54, sementara target Tahun 2026 sebesar 73,35–73,85. Untuk data Tahun 2026 belum tersedia/dirilis. Target tersebut menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup. Karena IKLH merupakan indikator komposit, evaluasi semester pertama sebaiknya menggunakan indikator antara seperti:

- kualitas air;
- kualitas udara;
- tutupan lahan;
- pengelolaan sampah;
- pengendalian pencemaran; dan
- kegiatan rehabilitasi lingkungan

1. Faktor Pendorong

   Peningkatan IKLH didorong oleh penguatan pengelolaan lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat, program pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan, serta dukungan kebijakan lingkungan yang konsisten.

2. Faktor Penghambat

   Target 73,35–73,85 masih cukup tinggi untuk dicapai. Tekanan dari aktivitas industri, permukiman, dan perkotaan, serta tantangan dalam pengelolaan sampah dan limbah, membuat kualitas air, udara, dan tutupan lahan perlu terus dijaga secara berkelanjutan.

2.2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah, RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2025–2029 telah menetapkan sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah beserta target kinerja yang harus dicapai selama periode perencanaan. IKU tersebut merupakan instrumen penting untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah karena menggambarkan perubahan kondisi pembangunan yang menjadi sasaran utama Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Evaluasi IKU pada Tahun 2026 memiliki posisi strategis karena Tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, hasil evaluasi pada tahun pertama tidak hanya digunakan untuk menilai capaian tahunan, tetapi juga menjadi *early warning system* untuk memastikan bahwa arah pelaksanaan pembangunan tetap berada pada jalur pencapaian target RPJMD sampai dengan Tahun 2029.

Evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa belum seluruh IKU dapat diukur capaian tahun berjalan. Hal ini terutama disebabkan oleh karakteristik sebagian indikator yang bersifat tahunan dan data resminya baru tersedia setelah periode pengukuran berakhir. Oleh karena itu, indikator yang belum tersedia tidak dapat langsung dinilai sebagai tidak tercapai. Untuk indikator tersebut, Evaluasi diarahkan pada ketersediaan indikator antara, kecenderungan capaian, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian indikator sasaran.

Berdasarkan Tabel 2.4, dari 48 IKU yang ditetapkan, terdapat sejumlah indikator yang telah memiliki data capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, sedangkan sebagian lainnya masih menunggu publikasi data resmi atau hasil pengukuran pada akhir tahun. Dengan demikian, penilaian IKU dilakukan dengan membedakan antara: indikator yang sudah dapat dinilai; indikator yang dapat dipantau melalui indikator antara; dan indikator yang belum dapat dinilai karena data belum tersedia.

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN CAPAIAN TAHUN2026			Ket
			2024	2025	Target	Capaian TW 1	Capaian TW 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	*4.46*	*4.39*	*4.53-4.80*	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
2	Indeks Gini	Nilai	*326*	0.344	*0.295-0.322*	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
3	Kontribusi PDRB Perdagangan	%	23.24	23.72	23.69	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
4	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	%	16.70	15.73	16.75	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
5	Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	9.30	9.37	9.54	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
6	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	83.03	68.46	85.32	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
7	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%) PDRB)	%	39.65	39.92	40.95	44.79	N/A	*Triwulan 2 dalam proses*
8	Indeks Kemandirian Fiskal	Nilai	0.974 Rendah	0.117 Rendah	1.140 Rendah	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
9	PDRB per kapita	(Rp. Juta)	59.12	62.54	65.48	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
10	Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2.30	2.40	2.42	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
11	Total Kredit/PDRB	%	46.67	48.27	48.12	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8.47	8.24	7.75-7.85	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
13	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	(Rp. Juta)	135,96	142.23	142.60	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
14	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	80.89	81.75	81.95-82.30	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
15	Harapan Lama sekolah	Tahun	15.55	15.56	16.00	N/A	15.56	
16	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	11.31	11.64	11.58	N/A	11.64	
17	Angka Literasi SD	%	56.72	53.59	61.72	53.39	53.39	
18	Angka Numerasi SD	%	49.44	44.77	55.24	44.77	44.77	
19	Angka Literasi SMP	%	68.34	68.95	70.54	68.95	68.95	
20	Angka Numerasi SMP	%	59.94	60.49	62.94	60.49	60.49	
21	Usia Harapan Hidup	Tahun	74.93	75.29	75.12	N/A	N/A	*Data belum tersedia*

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN CAPAIAN TAHUN2026			Ket
			2024	2025	Target	Capaian TW 1	Capaian TW 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
22	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	20.80	N/A	17.50	4,56	4.49	
23	Tingkat Kemiskinan	%	10.44	9.01	9.00-8.85	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
24	Pengeluaran Perkapita	Rp.	12.694,-	13.071,-	13.832,-	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
25	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	%	39.55	33.46	48.65	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
26	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	Nilai	65.86	72.50	68.00	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
27	Indeks Desa	Nilai	0.7762	71.73	77.72	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
28	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0.331	0.254	0.300	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
29	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	96.59	96.82	96.65	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
30	Nilai Kota Layak Anak	Nilai	728.14		740	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
31	Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi	%	22.10	44.52	47.37	7.5	9.18	
32	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	87.23	88.19	89.03	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
33	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	59.26	58.00	60.87	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
34	Tingkat Pelayanan Jalan	Level/Nilai	C 0.5	C 0.57	C 0.5	C 0.5	C 0.52	
35	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	%	81.78	80.16	84.80	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
36	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	69.40	71.54	73.35-73.85	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
37	Indeks Risiko Bencana	Nilai	136.99	168.97	132.99	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
38	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori/ Point	B 67.70	BB 72.17	BB 72.85	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
39	Nilai SAKIP	Kategori/ Nilai	B 61.12	B 61.76	BB 71.20	N/A	N/A	*Data belum tersedia*

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET DAN CAPAIAN TAHUN2026			Ket
			2024	2025	Target	Capaian TW 1	Capaian TW 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
40	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
41	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	79.42		81.67	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
42	Indeks Integritas/ SPI	Nilai	64,37	74.31	72.50	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
43	Indeks Maturitas SPIP	Level/ Nilai	Level 3 3.031	Level 3 3.037	Level 3 3.300	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
44	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	B 3.94	A 4.31	A 4.28	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
45	Indeks SPBE	Nilai	2.80	2.80	3.10	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
46	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	43.66	29.68	52.36	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
47	Indeks Pembangunan Syariah	Nilai	83.91	80.11	84.91	N/A	N/A	*Data belum tersedia*
48	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	26.85	54	40.74	N/A	N/A	*Data belum tersedia*

Sumber : RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU daerah Tahun 2026 pada semester pertama menunjukkan bahwa arah pembangunan Kota Lhokseumawe secara umum telah mengacu pada sasaran RPJMD Tahun 2025–2029, tetapi tingkat pencapaian masing-masing indikator masih menunjukkan variasi yang cukup besar.

Hal yang paling penting dari hasil evaluasi ini adalah bahwa tahun pertama RPJMD harus diperlakukan sebagai tahun penguatan fondasi pencapaian target jangka menengah, bukan hanya sebagai tahun penyerapan anggaran. Oleh karena itu, rendahnya atau belum tersedianya capaian pada sebagian indikator harus menjadi dasar untuk memperkuat pengendalian, bukan sekadar dicatat sebagai kondisi statistik.

Dari perspektif evaluasi pembangunan, terdapat empat isu strategis yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Lhokseumawe:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, mengingat target pertumbuhan 2026 cukup tinggi dibandingkan capaian 2025 dan TPT masih relatif tinggi.

2. Penguatan kemandirian fiskal daerah, karena pencapaian pembangunan masih membutuhkan dukungan sumber pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan.
3. Peningkatan kualitas pembangunan manusia, terutama pada literasi, numerasi, pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan.
4. Penguatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik, dengan memastikan bahwa peningkatan indeks reformasi birokrasi, SAKIP, SPBE, SPIP dan pelayanan publik benar-benar menghasilkan perbaikan kualitas pemerintahan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Dengan demikian, hasil evaluasi IKU sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat dijadikan *early warning* bagi perangkat daerah untuk melakukan koreksi dan percepatan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung sasaran RPJMD. Evaluasi Triwulan III dan IV selanjutnya perlu diarahkan lebih tajam pada keterkaitan antara capaian IKU, realisasi program/kegiatan, realisasi anggaran, output, outcome, serta faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, sehingga evaluasi tidak berhenti pada pengukuran angka, tetapi menjadi instrumen pengendalian pembangunan daerah.

2.2.3 Capaian Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan instrumen untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah yang mencerminkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Oleh karena itu, evaluasi IKD tidak hanya diarahkan untuk mengetahui apakah target telah tercapai, tetapi juga untuk mengidentifikasi arah perubahan kinerja, kesenjangan terhadap target, konsistensi antara kondisi awal dengan target, serta kebutuhan intervensi kebijakan pada periode berikutnya.

Evaluasi IKD Kota Lhokseumawe sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa ketersediaan data capaian masih bervariasi antarindikator. Sebagian indikator telah mempunyai capaian Triwulan II, sementara sebagian lainnya merupakan indikator

tahunan atau memerlukan proses pengukuran dan verifikasi tertentu sehingga belum tersedia pada periode evaluasi. Dengan demikian, indikator yang belum memiliki data capaian tidak dapat langsung dikategorikan sebagai tidak berhasil, tetapi diklasifikasikan sebagai belum dapat dinilai sampai data kinerja tersedia.

Dari hasil pengelompokkan terhadap Tabel 2.5, evaluasi IKD dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek daya saing daerah.

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Daerah
Tahun 2026 Sampai dengan Triwulan II

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target dan Capaian Tahun 2026			
			2024	2025	2026			Ket
					Target	Capaian Tw 1	Capaian Tw 2	
1	2	3	4	5	6			7
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI							
1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	83.03	68.46	85.32	N/A	8.49	
2	Prevalensi Ketidakukupan Konsumsi Pangan	%	7.08	5.50	5.50	N/A	N/A	
3	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Perpipaan	%	17.07	19.78	67.33	N/A	N/A	
4	Akses Rumah Tangga terhadap air siap minum perpipaan	%	n.a	N/A	35.00	N/A	N/A	
5	Kapasitas Air Baku	m3/ detik	n.a	0.251	242	N/A	N/A	
6	Indeka Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Nilai	69.40	71.54	73.35-73.85	N/A	N/A	
7	lndeks Kualitas Air	Nilai	70.00	75.61	71.20	N/A	N/A	
8	Indeks Kualitas Udara	Nilai	92.89	82.03	92.93	N/A	N/A	
9	Indeks Tutupan Lahan	Nilai	24.95	45.17	25.25	N/A	N/A	
10	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	9.43	9.43	9.45	N/A	N/A	
11	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	n.a	N/A	15.2	N/A	N/A	
12	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sarnpah	%	0.92	0.93	1.52	N/A	N/A	
13	Indeks Risiko Bencana	Nilai	136.99	168.97	132.99	N/A	N/A	
14	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0.40	0.41	0.41	N/A	N/A	
15	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.3	1.09	1.40	N/A	N/A	
16	Rasio Penduduk	%	98.72	98.66	98.8	N/A	N/A	
17	Kepadatan Penduduk	Orang/k m2	1.097	1.109	1.15	N/A	N/A	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					N/A	N/A	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4.46	3.39	4.53-4.80	N/A	N/A	
2	Tingkat Kemiskinan	%	10.44	9.01	9.00-8.85	N/A	N/A	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target dan Capaian Tahun 2026			Ket
			2024	2025	2026			
					Target	Capaian Tw 1	Capaian Tw 2	
1	2	3	4	5	6			7
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	59.12	62.54	65.48	N/A	N/A	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8.47	8.24	7.75-7.85	N/A	N/A	
5	Indeks Gini	Nilai	326	0.344	0.295-322	N/A	N/A	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	80.89	81.75	81,95-82,3	N/A	N/A	
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	74.93	75.25	75.12	N/A	N/A	
8	Prevalensi Stunting	%	20.80	N/A	17.50	4,56	4.49	
9	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran Hidup	Angka	27.96	181.71	109	136	64	
10	Angka Kematian Bayi	Angka	9.50	12.72	9.43	N/A	N/A	
11	Angka Kematian Balita	Angka	8.60	12.72	13.80	10	5	
12	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage	%	145.4	100	100	23,9	42	
13	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	%	88.85	79.31	92.00	74,48	72.5	
14	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	%	93.28	92.29	93.65	94,16	95.1	
15	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	53.20	61.30	65.00	15	33.4	
16	Cakupan Penerima Pemeriksa Kesehatan Gratis	%	15.00	17.22	31.00	14	36.1	
17	Persentase Hipertensi dalam Pengendalian	%	99.00	96.14	100.00	0	0	
18	Proporsi Penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	62.60	22.00	63.50	0	0	
19	Persentase Lanjut Usia Yang Mandiri	%	80.00	87.00	84.00	93	93.8	
20	Eliminasi Kusta	Orang	17	8	16	0	1	
21	Prevalensi Depresi pada Usia ≥ 15 Tahun	%	0.74	N/A	0.80	0.09	0.06	
22	Persentase Merokok Penduduk 10-21 Tahun	%	6.50	1.24	6.50	1.7	2,5	
23	Prevalensi Obesitas > 18 Tahun	%	6.30	4.66	15.00	2.3	2	
24	Jumlah Desa yang memiliki unit Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Desa	62	68	62	68	68	
25	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	%	57.00	N/A	57.00	57.14	57,14	
26	Persentase Puskesmas Dengan SDMK Sesuai Standar	%	85.70	100.00	100.00	100	100	
27	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11.31	11.64	11.58	11.64	11,64	
28	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15.55	15.56	16.00	15.56	15,56	
29	Angka Literasi SD	Angka	56.72	53.39	61.72	53.39	53.39	
30	Angka Numerasi SD	Angka	49.44	44.77	55.24	44.77	44.77	
31	Angka Literasi SMP	Angka	68.34	68.95	70.54	68.95	68.95	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target dan Capaian Tahun 2026			Ket
			2024	2025	2026			
					Target	Capaian Tw 1	Capaian Tw 2	
1	2	3	4	5	6			7
32	Angka Numerasi SMP	Angka	59.94	60.49	62.94	60.49	60.49	
33	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) (PAUD)	Angka	90.63	89.19	95.73	89.19	89,19	
34	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 (SD/SMP)	Angka	98.95	99.77	99.05	98.75	98,75	
35	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan	Angka	41.35	30.86	57.57	30.86	30,86	
36	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	60.34	67.96	61.17	67.96	67,96	
37	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	69.71	89.59	75.52	89.59	89,59	
38	Iklim Inklusivitas SD	Angka	58.07	56.82	63.07	56.82	56,82	
39	Iklim Inklusivitas SMP	Angka	56.55	58.50	61.35	58.5	58.5	
40	Iklim Keamanan SD	Angka	74.60	73.04	76.40	73.04	73.04	
41	Iklim Keamanan SMP	Angka	71.06	71.53	74.06	71.53	71.53	
42	Iklim Kebinekaan SD	Angka	71.47	65.93	73.47	65.93	65.93	
43	Iklim Kebinekaan SMP	Angka	69.77	66.37	71.77	66.37	66.37	
44	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	58.41	16.77	62.68	N/A	N/A	
45	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	39.55	33.46	48.65	N/A	29.00	
46	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	50.25	49.98	50.55	N/A	29.00	
47	Pengeluaran Perkapita	Rp.	12.694,-	13.071,-	13.832,-	N/A	N/A	
48	Nilai Kota Layak Anak	Nilai	728.14	N/A	740	N/A	N/A	
49	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	-	N/A	72.13	N/A	N/A	
50	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Nilai	65.86	72.50	68.00	N/A	N/A	
51	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Nilai	67.6	68.30	69.6	N/A	N/A	
52	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2.28	2.28	2.27	N/A	N/A	
53	Angka kelahiran remaja umur 15-19 (ASFR 15-19)	Angka	8.50	9.6	7.00	N/A	N/A	
54	Demand Satisfed	%	74.10	75.10	77.30	N/A	N/A	
55	Persentase Kehamilan tidak direncanakan (KTD)	%	14.30	12.50	10.40	N/A	N/A	
56	Indeks Lansia Berdaya	Nilai	57.70	65.93	59.90	N/A	N/A	
57	Indeks Pengasuhan Remaja	Nilai	87.80	85.20	89.80	N/A	N/A	
58	Persentase Kampung KB Mandiri	%	94.10	42.65	95.60	N/A	N/A	
59	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0.331	0.254	0.300	N/A	N/A	
60	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	96.59	96.82	96.65	N/A	N/A	
61	Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi	%	22.10	44.52	47.37	7.5	9.18	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target dan Capaian Tahun 2026			Ket
			2024	2025	2026			
					Target	Capaian Tw 1	Capaian Tw 2	
1	2	3	4	5	6			7
62	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	0.25	0.45	0.45	N/A	N/A	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Angka Ketergantungan	%	46.45	45.80	46.20	N/A	N/A	
2	Kontribusi PDRB Perdagangan	%	23.24	23.46	23.69	N/A	N/A	
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	16.70	15.73	16.75	N/A	N/A	
4	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	2.30	2.40	2.42	5.02	8.18	
5	Rasio Kewirausahaan	%	7.36	7.92	8.16	N/A	7.32	
6	Tingkat Pertisipasi Angkatan Kerja	%	64.61	64.56	65.20	N/A	N/A	
7	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	43.66	29.68	52.36	N/A	N/A	
8	Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	9.30	9.37	9.54	N/A	N/A	
9	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level Kab/Kota	%	5.92	4.77	5.90	N/A	5.88	
10	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Nilai	45.76	42.00	47.60	N/A	N/A	
11	Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Tingkat Kabupaten/kota	%	6.10	10.60	6.25	N/A	N/A	
12	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	%	0.21	0.11	0.35	3.14	4.39	
13	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	39.65	38.92	40.95	N/A	N/A	
14	Ekspor Barang dan Jasa	%	0.42	-0.23	1.20	N/A	N/A	
15	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	87.23	88.19	89.03	N/A	N/A	
16	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	59.26	48.00	60.87	N/A	N/A	
17	Tingkat Pelayanan Jalan	Level/Nilai	C	C	C	N/A	N/A	
			0.5	0.57	0.5			
18	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	81.78	71.73	84.80	N/A	N/A	
19	Indeks Desa	Nilai	0.7762	42.65	77.72	N/A	N/A	
20	Persentase Desa Mandiri	%	36.76	0.73	48.53	N/A	N/A	
21	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0.73	0.117 Rendah	0.76	N/A	N/A	
22	Indeks Kemandirian Fiskal	Nilai	974	5.56	1.140	N/A	N/A	
			Rendah	48.27	Rendah	N/A	N/A	
23	Tingkat Inflasi	%	2.73	23.99	2.5 ± 1	0.91	1.37	
24	Total Kredit/PDRB	%	46.67	5.27	48.12	N/A	N/A	
25	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	40.90	0.65	41.97	N/A	N/A	
26	Indeks Akses Keuangan Daerah	Nilai	3.88	53.90	3.93	N/A	N/A	
27	Indeks Zakat Nasional	Nilai	0.65	3.49	0.71	N/A	N/A	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target dan Capaian Tahun 2026			Ket
			2024	2025	2026			
					Target	Capaian Tw 1	Capaian Tw 2	
1	2	3	4	5	6			7
28	Persentase Pekerja Informal	%	50.69	4.77	49.67	N/A	N/A	
29	Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi	%	1.93	42.00	2.82	N/A	N/A	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM					N/A	N/A	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori / Nilai	B 67.70	BB 72.17	BB 72.85	N/A	N/A	
2	Nilai SAKIP	Kategori /Nilai	B 61.12	B 61.76	BB 71.20	N/A	N/A	
3	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	77.72	67.26	79.32	N/A	N/A	
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	2.80	2.80	3.10	N/A	N/A	
5	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	N/A	N/A	
6	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	79.42	79.65	81.67	N/A	N/A	
7	Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	1.69 Kurang	1.69 Cukup	1.80 Cukup	N/A	N/A	
8	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	B 3.94	A 4.31	A 4.28	N/A	N/A	
9	Indeks kualitas Kebijakan	Nilai	n.a	60.73 Cukup	52 Cukup	N/A	N/A	
10	Indeks Integritas Nasional	Nilai	64.37	74.31	71.35	N/A	N/A	
11	Indeks Maturitas SPIP	Nilai	Level 3 3.031	Level 3 3.037	Level 3 3.300	N/A	N/A	
12	Persentase Penegakan Perda	%	95.00	90.17	97.00	25.83	47.50	
13	Persentase Capaian Aksi HAM	%	67.50	70.00	67.70	N/A	N/A	
14	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3.75	3.90	4.10	N/A	N/A	
15	Indeks Pembangunan Syariah	Nilai	83.91	80.11	84.91	N/A	N/A	
16	Persentase Dayah Mandiri	%	7.81	10.67	10.9	N/A	N/A	
17	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Nilai	26.85	54.00	40.74	N/A	N/A	
18	Jumlah Konflik SARA	Nilai	0	0	0	N/A	N/A	
	INDIKATOR KINERJA KUNCI							
A	Pendidikan							
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	90.63	89.19	95.73	89.19	89.18	
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	98.95	99.77	99.05	98.75	98.75	
3	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	41.35	30.86	57.57	30.86	30.86	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target dan Capaian Tahun 2026			Ket
			2024	2025	2026			
					Target	Capaian Tw 1	Capaian Tw 2	
1	2	3	4	5	6			7
4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	56.72	53.39	61.72	N/A	N/A	
5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	49.44	49.43	55.24	N/A	N/A	
6	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	68.34	68.34	70.54	N/A	N/A	
7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	59.94	59.93	62.94	N/A	N/A	
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi minimal B	%	60.34	67.96	61.17	67.96	67.96	
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%	69.71	89.59	75.52	89.59	89.59	
10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Angka	74.60	73.04	76.40	73.04	73.04	
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Angka	71.06	71.53	74.06	71.53	71.53	
12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Angka	71.47	69.93	73.47	65.93	65.93	
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Angka	69.77	66.37	71.77	66.37	66.37	
14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Angka	58.07	56.82	63.07	56.82	56.82	
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Angka	56.55	58.50	61.35	58.5	58.5	
B	Kesehatan							
1	Jumlah Kematian Ibu	Angka	27.96	181.71	109	136	64	
2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	%	20.80	N/A	18.00	4.56	4.49	
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	98.47	91.91	100	18.08	20.67	
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	85.06	97.52	100	19.06	20.56	
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	89.47	84.65	100	18.25	22.00	
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	79.08	89.42	100	20,86	23.52	
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	97.79	100	100	3,59	62.61	
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	112.03	85.97	100	20.95	20.71	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target dan Capaian Tahun 2026			Ket
			2024	2025	2026			
					Target	Capaian Tw 1	Capaian Tw 2	
1	2	3	4	5	6			7
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	1047.58	99.08	100	24.29	28.47	
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	96.81	68.84	100	33.41	11.92	
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	97.65	100	100	39.48	16.59	
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100	100	100	43.98	27.78	
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	100	159.09	100	25.04	29.79	
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	98.44	117.01	100	29.81	23.51	
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	1.53	2.22	11.53	N/A	N/A	
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	%	61.11	60.06	63.10	N/A	N/A	
3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	0.00	N/A	30.00	N/A	N/A	
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	20.00	20.00	30.00	N/A	N/A	
5	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	19.36	19.78	21.09	N/A	N/A	
6	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	93.71	93.71	93.89	N/A	N/A	
7	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	71.50	72.65	73.66	N/A	N/A	
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	64.40	59.54	61.54	N/A	N/A	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target dan Capaian Tahun 2026			Ket
			2024	2025	2026			
					Target	Capaian Tw 1	Capaian Tw 2	
1	2	3	4	5	6			7
9	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	32.31	26.15	32.31	N/A	N/A	
10	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	
11	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari	20	20	20	N/A	N/A	
12	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	
D	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					N/A	N/A	
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	0.00	N/A	5.00	N/A	N/A	
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0.00	N/A	25.00	N/A	N/A	
3	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	0.92	0.92	1.40	N/A	N/A	
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	1.19	1.00	1.83	N/A	N/A	
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	64.40	65.06	65.73	N/A	N/A	
E	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100	88.89	100	25.83	47.50	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	25	62.50	
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	5	5	8	2	2	
4	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	80.00	87.50	80.00	80	80	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target dan Capaian Tahun 2026			Ket
			2024	2025	2026			
					Target	Capaian Tw 1	Capaian Tw 2	
1	2	3	4	5	6			7
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	100	62.50	100	100	100	
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	100	50	100	10	100	
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	101.12	111.436	100	N/A	N/A	
8	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0.11	59.54	0.10	N/A	N/A	
9	Persentase Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	N/A	N/A	
10	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ilegal	%	100	100	100	N/A	N/A	
11	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	N/A	N/A	
12	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	N/A	N/A	
13	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100	100	N/A	N/A	
14	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	N/A	N/A	
F	Sosial							
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	80.00	50.00	80.00	30	30	
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	80.00	100	80.00	20	20	
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	80.00	100	80.00	18	18	
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	0.00	50.00	60.00	30	30	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target dan Capaian Tahun 2026			Ket
			2024	2025	2026			
					Target	Capaian Tw 1	Capaian Tw 2	
1	2	3	4	5	6			7
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	60.00	60.00	60.00	60	60	
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	70.00	86.44	79.66	80	80	
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	80.00	90.00	80.00	80	80	
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	
11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan social (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	100	100	100	100	100	
12	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100	100	93.63	93.63	
13	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	0	100	53.33	N/A	N/A	
14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	kali	2	2	12	3	3	
G	Tenaga Kerja							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	N/A	N/A	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	5.95	0.55	7.65	N/A	N/A	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.Juta	135.96	142.23	142.60	N/A	N/A	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target dan Capaian Tahun 2026			Ket
			2024	2025	2026			
					Target	Capaian Tw 1	Capaian Tw 2	
1	2	3	4	5	6			7
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	3.42	14.04	46.71	12.90	70.25	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	8.91	3.77	10.03	16.67	12.2	
H	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	96.59	96.59	96.65	N/A	N/A	
2	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0.331	0.254	0.300	N/A	N/A	
3	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	3.06	3.1	3.5	N/A	N/A	
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	20	20	
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	35	100	30.5	25	25	
I	Pangan							
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	0	0.00	13.5	N/A	N/A	
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Nilai	77.54	88.9	78.00	N/A	84.70	
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	33.82	33.82	20.58	N/A	N/A	
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	80.00	80.00	86.00	N/A	N/A	
J	Pertanahan							
1	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	%	n.a	N/A	0	N/A	N/A	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target dan Capaian Tahun 2026			Ket
			2024	2025	2026			
					Target	Capaian Tw 1	Capaian Tw 2	
1	2	3	4	5	6			7
2	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	%	n.a	N/A	0	N/A	N/A	
3	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	%	n.a	N/A	0	N/A	N/A	
4	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	%	n.a	N/A	0	N/A	N/A	
5	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	19.23	20.19	21.20	N/A	N/A	
6	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	%	n.a	N/A	0	N/A	N/A	
7	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	18.99	18.99	20.94	N/A	N/A	
8	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	%	n.a	N/A	0	N/A	N/A	
9	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	%	n.a	N/A	0	N/A	N/A	
K	Lingkungan Hidup					N/A	N/A	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Angka	69.40	71.54	73.35-73.85	N/A	N/A	
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	%	43,00	N/A	51,00	N/A	N/A	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	0	20	100	N/A	N/A	
L	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target dan Capaian Tahun 2026			Ket
			2024	2025	2026			
					Target	Capaian Tw 1	Capaian Tw 2	
1	2	3	4	5	6			7
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	99.66	98.88	99.80	100	100	
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%		47.73		52	52	
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	%	100	50	100	N/A	N/A	
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	10.59	11	20.00	11	11	
8	Perekaman KTP Elektronik	%	98.41		99.65	100	100	
9	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	0	2	3	1	1	
M	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	38.89	16.00	13.33	N/A	N/A	
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	0	8.82	14.71	N/A	N/A	
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	0	14.71	17.65	N/A	N/A	
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga masyarakatan Desa	%	66.67	73.53	76.47	33.3	33.3	
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	100	100	100	25	25	
N 1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana							
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka	2.28	2.28	2.27	N/A	N/A	
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) 4)7)	%	50.20	48.70	57.10	N/A	N/A	
3	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	15.90	16.10	8.41	N/A	N/A	
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 3)4)	Angka	8.5	9.64	7.0	N/A	N/A	
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	65.86	72.5	68.00	N/A	N/A	
O	Perhubungan							

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target dan Capaian Tahun 2026			
			2024	2025	2026			Ket
					Target	Capaian Tw 1	Capaian Tw 2	
1	2	3	4	5	6			7
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0.50	0.52	0.50	0.50	0.50	
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	62.50	6.2.50	62.50	62.50	62.50	
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan 4)	%	0.00	0.00	14.29	0.00	0.00	
P	Komunikasi dan Informatika							
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	N/A	N/A	
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100	100	N/A	N/A	
3	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	100	100	100	N/A	N/A	
Q	Koperasi, usaha kecil dan menengah							
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	12.00	28.72	26.90	N/A	N/A	
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	0.65	2.04	0.76	N/A	N/A	
3	Pertumbuhan Wirausaha	%	6.02	7.07	10.53	N/A	N/A	
R	Penanaman Modal							
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	110.86	148.23	2.00	-95.77	N/A	*Belum Tersedia nya data tw 2*
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	105.20	261.22	98.08	10.58	N/A	*Belum Tersedia nya data tw 2*
S	Kepemudaan dan Olahraga							
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	Nilai	0	0.0814	0.33	0.1	0.2	
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	1.17	N/A	1.00	N/A	0.25	
T 1	Statistik							
1	Indeks Pembangunan Statistik	%	1.69 Kurang	1.69 Cukup	1.80 Cukup	N/A	N/A	
U	Persandian					N/A	N/A	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target dan Capaian Tahun 2026			Ket
			2024	2025	2026			
					Target	Capaian Tw 1	Capaian Tw 2	
1	2	3	4	5	6			7
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	n.a	1	0.31	N/A	N/A	
V	Kebudayaan					N/A	N/A	
1	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	0	N/A	14.81	N/A	N/A	
2	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	%	26.9	41.67	40.7	N/A	N/A	
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi dibidang kebudayaan	%	0	4.76	13.00	N/A	N/A	
W	Perpustakaan					N/A	N/A	
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	68.15	62.90	70.11	N/A	N/A	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 3)4)	Nilai	58.41	16.77	67.42	N/A	N/A	
X	Kearsipan							
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah)	%	20.49	5.03	21.40	N/A	N/A	
Y	Kelautan dan Perikanan							
1	Produksi Perikanan Tangkap	%	89.87	70.92	92.00	25	25	
2	Produksi Perikanan Budi Daya	%	100	88.16	99.50	25	25	
Z	Pariwisata							
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	6.24	0.016	6.48	N/A	N/A	
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	14.9	15.00	16.50	5.02	8.18	
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	0.90	1.7	2.60	N/A	N/A	
AA 1	Pertanian							
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	5.67	0.92	5.71	0.32	2.86	
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	3.14	-14.26	4.50	2.25	0.50	
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	0.30	1.24	1.58	0.90	0.68	
4	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	%	1.34	22.48	1.94	N/A	N/A	
5	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	15.00	20.00	25.00	N/A	N/A	
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%	100.00	100.00	100.00	40	50	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target dan Capaian Tahun 2026			Ket
			2024	2025	2026			
					Target	Capaian Tw 1	Capaian Tw 2	
1	2	3	4	5	6			7
BB	Perdagangan							
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	%	93.99	95.04	94.15	N/A	N/A	
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	76.41	76.22	76.46	N/A	N/A	
CC	Perindustrian							
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi :							
	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	0.57	1.71	1.80	N/A	N/A	
	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota	%	16.70	15.73	16.75	N/A	N/A	
	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	4.50	4.96	7.00	N/A	N/A	
	Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	85.00	86.29	89.00	N/A	N/A	
	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	55.00	62.45	68.00	N/A	N/A	
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	65.00	48.55	75.00	N/A	N/A	
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan	%	51.04	90.00	93.10	N/A	N/A	
4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan	%	51.04	90.00	93.10	N/A	N/A	
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	88.00	90.00	91.00	N/A	N/A	
DD	Perencanaan							
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	85.71	100	100	N/A	N/A	
EE	Keuangan							

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target dan Capaian Tahun 2026			Ket
			2024	2025	2026			
					Target	Capaian Tw 1	Capaian Tw 2	
1	2	3	4	5	6			7
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	38.50	42.26	41.51	N/A	19.2	
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	8.14	10.03	10.29	6.37	9.26	
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	96.60	79.88	95.78	19.75	33.8	
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	1.58	3.10	2.74	N/A	N/A	
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	40.00	20.25	20.07	5.51	9.86	
6	Persentase Penurunan SILPA	%	-65.88	274.16	-37.50	56.51	45.63	
FF	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan							
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Kategori / Nilai	B 76.54	B 77.37	B 77.37	N/A	N/A	
GG	Penelitian dan Pengembangan							
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	0	N/A	66.67	N/A	N/A	
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	63.64	75.00	76.00	N/A	N/A	
HH	Fungsi Pengawasan							
1	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	N/A	N/A	
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level/ Nilai	Level 3 3.031	Level 3 3.300	Level 3 3.300	N/A	N/A	
3	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level/ Nilai	Level 3 3.00	Level 3	Level 3 3,2	N/A	N/A	
4	Manajemen Risiko Indeks	Level/ Nilai	Level 2 2.832	Level 3 3.059	Level 3 3.06	N/A	N/A	
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	81.11	82.31	82.40	N/A	N/A	
II	Fungsi Pengadaan					N/A	N/A	
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	poin	24.20	24.32	25.50	N/A	N/A	
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	poin	3.33	3.33	3.65	N/A	N/A	
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	poin	8.89	35.56	9.15	N/A	N/A	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target dan Capaian Tahun 2026			
			2024	2025	2026			Ket
					Target	Capaian Tw 1	Capaian Tw 2	
1	2	3	4	5	6			7
JJ 1	Hubungan dengan Perwakilan Daerah							
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/ Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	N/A	
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	54.55	75	100	N/A	N/A	
KK 1	Pelayanan Publik							
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	91.35	N/A	94.00	N/A	N/A	

Sumber : RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator kinerja daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan Kota Lhokseumawe menunjukkan capaian yang beragam antarbidang.

Beberapa indikator menunjukkan kecenderungan positif, antara lain ketahanan pangan, penurunan kemiskinan, PDRB per kapita, cakupan jaminan kesehatan, pembangunan keluarga, pembangunan gender, kewirausahaan dan beberapa indikator pendidikan.

Namun demikian, terdapat indikator yang membutuhkan perhatian dan percepatan, terutama:

1. pertumbuhan ekonomi, yang harus meningkat cukup signifikan dari capaian 2025 untuk mencapai target 2026;
2. Indeks Gini, yang meningkat sehingga menunjukkan peningkatan ketimpangan;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka, yang masih membutuhkan penurunan;
4. literasi dan numerasi SD, yang masih relatif rendah terhadap target;
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yang masih membutuhkan peningkatan;
6. Indeks Risiko Bencana, yang perlu diverifikasi dan dikendalikan;

7. kualitas industri pengolahan, yang memerlukan penguatan nilai tambah ekonomi; dan
8. inovasi daerah, yang perlu diverifikasi apabila angka 29,68 merupakan capaian aktual 2026.

Secara evaluatif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pembangunan Kota Lhokseumawe bukan hanya bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut menghasilkan pemerataan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas manusia, pelayanan dasar yang lebih baik, serta ketahanan terhadap risiko lingkungan dan bencana.

Oleh karena itu, hasil evaluasi IKD Triwulan II Tahun 2026 perlu digunakan sebagai *early warning system* dalam pelaksanaan RKPK. Perangkat daerah perlu melakukan penajaman terhadap program/kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap indikator dengan status "perlu percepatan", sementara indikator yang telah menunjukkan kinerja positif harus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya.

2.2.4 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Tujuan evaluasi hasil RKPK adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPK dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.

Evaluasi hasil RKPK dilaksanakan setiap semester oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPK. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala SKPK wajib melaksanakan

evaluasi hasil Renja SKPK setiap semester berdasarkan realisasi DPA SKPK. Evaluasi Hasil RKPK

a. Bappeda melakukan Evaluasi Hasil RKPK setiap semester berdasarkan Hasil Evaluasi Renja SKPK yang dilaporkan/disampaikan Kepala SKPK.
b. Evaluasi Hasil RKPK selanjutnya digunakan untuk penyusunan Perubahan RKPK Tahun Berjalan atau RKPK Tahun berikutnya.
c. Formulir Evaluasi Hasil RKPK Provinsi/Kabupaten/Kota adalah seperti dapat dilihat pada tabel yang menyerupai Formulir Evaluasi Hasil Renja.

Untuk lebih jelas mengenai mekanisme pengisian Evaluasi Hasil RKPK Provinsi/Kabupaten/Kota, dapat dilihat sebagai berikut:

- Baris rata-rata capaian kinerja (%) diisi dengan rata-rata capaian kinerja K) dan penyerapan anggaran (Rp) setiap program, dengan menjumlahkan persentase realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai seluruh kegiatan dibagi dengan jumlah kegiatan dalam program dimaksud.
- Baris predikat kinerja diisi dengan gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kinerja yang dicapai pada baris rata-rata capaian kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Skala Nilai Peringkat Kinerja Semester 1			Skala Nilai Peringkat Kinerja Semeter 2	
INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA		INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
45,5% ≤ 50%	Sangat tinggi		91% ≤ 100%	Sangat tinggi
38% ≤ 45%	Tinggi		76% ≤ 90%	Tinggi
33% ≤ 37,5%	Sedang		66% ≤ 75%	Sedang
25,5% ≤ 32,5%	Rendah		51% ≤ 65%	Rendah
≤ 25%	Sangat Rendah		≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Khusus Untuk Evaluasi hingga semester 1, nilai capaian kinerja K dan Rp. Harus dikalikan 2 terlebih dahulu sebelum melihat skala penilaian kinerja.

Catatan :

1. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan atas pelaksanaan RKPK pada triwulan I dan triwulan II, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPK untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Bappeda provinsi/kabupaten/kota dengan melakukan perubahan RKPK.
2. Dalam hal dilakukan perubahan RKPK, data dan informasi pada Kolom (7) disesuaikan dengan data dan informasi yang tercantum dalam perubahan RKPK.

Setelah Formulir Evaluasi Hasil RKPK diisi, maka diketahuilah tingkat capaian kinerja untuk masing-masing program, masing-masing urusan maupun masing-masing SKPK.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II, yang bersumber dari aplikasi e-Dalev SIPD RI, secara umum pelaksanaan RKPK telah menunjukkan adanya kemajuan baik dari sisi capaian kinerja maupun realisasi keuangan. Namun demikian, tingkat kemajuan tersebut belum sepenuhnya sejalan antara capaian kinerja program, capaian kinerja subkegiatan, dan realisasi keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belum secara otomatis mencerminkan pencapaian keluaran pembangunan yang direncanakan.

Berdasarkan rekapitulasi pada Tabel 2.6, dari total pagu RKPK sebesar Rp816.489.376.141,00, sampai dengan Triwulan II Tahun

2026 telah direalisasikan sebesar Rp325.886.691.733,00 atau sekitar 39,91 persen. Sementara itu, rata-rata capaian kinerja program mencapai 23,20 persen dan rata-rata capaian kinerja subkegiatan mencapai 30,12 persen.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara realisasi keuangan dengan capaian kinerja. Secara agregat, realisasi keuangan telah mencapai sekitar 39,91 persen, sedangkan capaian kinerja program baru mencapai 23,20 persen dan capaian subkegiatan 30,12 persen. Apabila Triwulan II digunakan sebagai titik evaluasi tengah tahun dengan asumsi distribusi pelaksanaan yang relatif proporsional, maka capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi keuangan relatif lebih cepat dibandingkan kemajuan capaian kinerja, khususnya pada tingkat program. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena keberhasilan pelaksanaan RKPK pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang terserap, tetapi terutama oleh kemampuan perangkat daerah menghasilkan output dan outcome sesuai target yang telah ditetapkan.

Gambar 2.1
Grafik Realisasi Kinerja RKPK Tahun 2026
sampai dengan Triwulan II

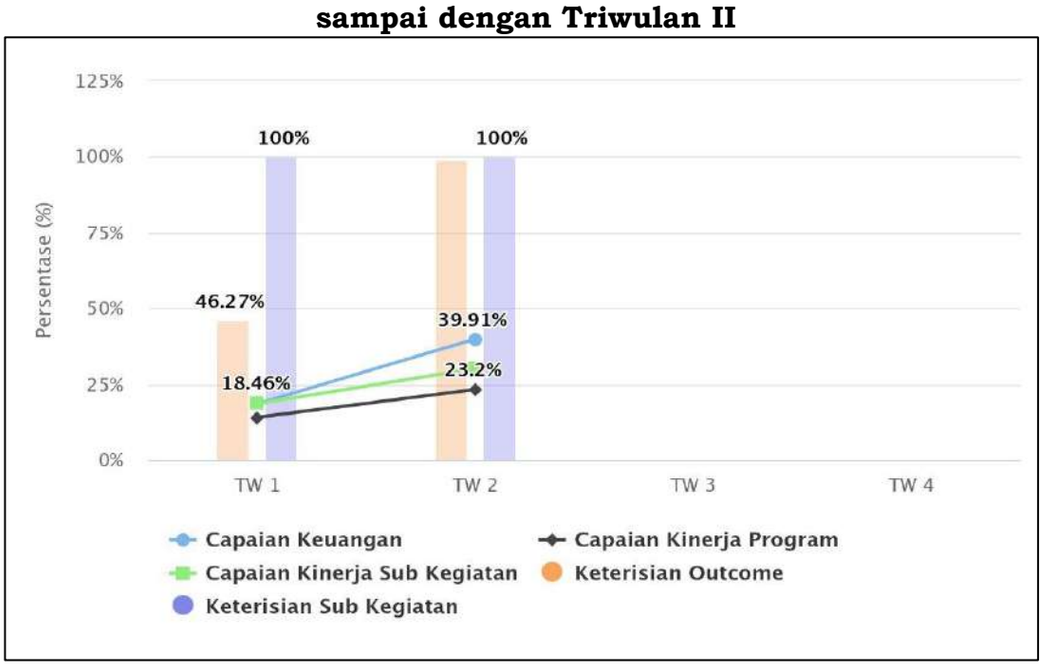

Sumber : E Dalev SIPD Tahun 2026 s.d Triwulan II

Gambar 2.2
Persentase Realisasi Kinerja Program, Subkegiatan dan Keuangan RKPD TAhun 2026 sampai dengan Triwulan II

Sumber : E Dalev SIPD 2026 s.d Trwulan II

2.2.4.1 Evaluasi Capaian Kinerja Program

Capaian rata-rata kinerja program sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebesar 23,20 persen menunjukkan bahwa secara agregat pelaksanaan program masih berada pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan dengan posisi waktu pelaksanaan tahun anggaran. Dari 34 Perangkat Daerah yang dievaluasi, hanya sebagian perangkat daerah yang telah menunjukkan capaian program relatif tinggi, sementara sebagian besar lainnya masih mencatat capaian di bawah 50 persen.

Beberapa perangkat daerah menunjukkan capaian program yang relatif tinggi, antara lain Kecamatan Blang Mangat sebesar 66,00 persen, Sekretariat Majelis Adat Aceh sebesar 62,85 persen, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 62,50 persen, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 60,32 persen, serta Dinas Kesehatan sebesar 55,96 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pada perangkat daerah tersebut sebagian program telah berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata keseluruhan.

Namun demikian, terdapat pula perangkat daerah yang sampai dengan Triwulan II belum menunjukkan capaian kinerja program,

yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kecamatan Muara Satu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, Sekretariat Baitul Mal, serta Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.

Kondisi capaian program sebesar 0 persen tidak serta-merta dapat diartikan bahwa tidak terdapat aktivitas sama sekali pada perangkat daerah tersebut, karena beberapa di antaranya justru telah menunjukkan realisasi keuangan dan capaian subkegiatan. Oleh karena itu, kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut pada level program dan subkegiatan untuk mengetahui apakah penyebabnya berkaitan dengan belum terlaksananya indikator program, belum tersedianya data capaian, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, karakteristik kegiatan yang pelaksanaannya berada pada semester II, atau ketidaksesuaian mekanisme pengukuran kinerja dalam aplikasi e-Dalev.

Dengan demikian, rendahnya capaian program secara agregat merupakan sinyal bahwa diperlukan penguatan pengendalian pelaksanaan RKPK, khususnya terhadap program-program yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian sasaran RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2025–2029.

2.2.4.2 Evaluasi Capaian Kinerja Subkegiatan

Rata-rata capaian kinerja subkegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 mencapai 30,12 persen. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian program sebesar 23,20 persen, tetapi masih menunjukkan adanya ruang percepatan pelaksanaan pada semester II.

Beberapa perangkat daerah telah menunjukkan capaian subkegiatan yang sangat tinggi, yaitu Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah sebesar 100 persen, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana sebesar 100 persen, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 100 persen. Selain itu, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mencapai 52,07 persen dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencapai 43,65 persen.

Di sisi lain, terdapat sejumlah perangkat daerah dengan capaian subkegiatan yang masih sangat rendah, antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 4,85 persen, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 8,50 persen, Dinas Perhubungan sebesar 8,64 persen, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama sebesar 10,90 persen, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar 10,48 persen, serta Dinas Sosial sebesar 11,81 persen.

Temuan tersebut menunjukkan adanya variasi kemampuan pelaksanaan antar-Perangkat Daerah. Variasi tersebut perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan karakteristik masing-masing kegiatan. Kegiatan yang bersifat rutin dan pelayanan dasar pada umumnya memiliki pola pelaksanaan yang berbeda dengan kegiatan yang memerlukan proses pengadaan barang/jasa, pembangunan fisik, verifikasi penerima manfaat, koordinasi lintas perangkat daerah, maupun kegiatan yang pelaksanaannya memang direncanakan pada semester II.

Oleh karena itu, evaluasi tidak cukup hanya memberikan penilaian berdasarkan persentase capaian, tetapi perlu mengidentifikasi subkegiatan yang kritis, subkegiatan yang menjadi prasyarat pencapaian indikator program, serta subkegiatan yang memiliki risiko tidak selesai sampai akhir tahun anggaran.

2.2.4.3 Evaluasi Realisasi Keuangan

Dari sisi keuangan, total realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 mencapai Rp325.886.691.733,00 dari total pagu sebesar Rp816.489.376.141,00, atau sebesar 39,91 persen. Secara umum, realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan dan sebagian besar perangkat daerah telah melakukan penyerapan anggaran. Namun, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja program sebesar 23,20 persen dan capaian subkegiatan

sebesar 30,12 persen, terlihat bahwa kecepatan realisasi anggaran lebih tinggi daripada kecepatan pencapaian kinerja.

Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena dapat menunjukkan adanya risiko *front loading* anggaran, yaitu pengeluaran atau penyerapan anggaran yang telah terjadi sebelum keluaran program/subkegiatan memberikan kontribusi yang sebanding terhadap target kinerja. Meskipun demikian, kesenjangan tersebut belum dapat langsung dikategorikan sebagai inefisiensi tanpa dilakukan analisis lebih lanjut terhadap jenis belanja, tahapan pekerjaan, kontrak, target output, serta waktu pelaksanaan masing-masing kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Beberapa perangkat daerah menunjukkan realisasi keuangan relatif tinggi, antara lain Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebesar 83,21 persen, Dinas Pertanahan sebesar 80,59 persen, Dinas Lingkungan Hidup sebesar 78,41 persen, Kecamatan Blang Mangat sebesar 64,63 persen, dan Kecamatan Banda Sakti sebesar 61,79 persen.

Namun demikian, tingginya realisasi keuangan pada beberapa perangkat daerah perlu dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Sebagai contoh, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah telah merealisasikan keuangan sebesar 83,21 persen, tetapi capaian program dan subkegiatannya masing-masing baru sebesar 21,09 persen dan 10,65 persen. Kondisi serupa terlihat pada Dinas Pertanahan, yang telah merealisasikan 80,59 persen anggaran dengan capaian kinerja program 0 persen dan subkegiatan 40,44 persen, serta Dinas Lingkungan Hidup dengan realisasi keuangan 78,41 persen tetapi capaian kinerja program 0 persen dan subkegiatan 11,91 persen.

Kesenjangan tersebut merupakan salah satu temuan penting dalam evaluasi karena mengindikasikan perlunya pemeriksaan lebih lanjut terhadap keterkaitan antara realisasi belanja dengan output yang dihasilkan. Dalam perspektif evaluasi kinerja, tingginya serapan anggaran baru dapat dinilai positif apabila diikuti oleh pencapaian *output* dan *outcome* yang sesuai dengan target. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Rekapitulasi Capaian SKPD pada Evaluasi Hasil RKPD
Pemerintah Kota Lhokseumawe
Kondisi Sampai Dengan : Triwulan II Tahun 2026

No.	Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
			Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	1.484.329.412,00	50	100	703.302.243,00	47,38
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	222.524.776.805,00	23,56	4,85	76.800.347.298,00	34,51
3	Dinas Kesehatan	125.971.019.886,00	55,96	21,35	59.167.669.609,00	46,97
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	65.264.662.955,00	0	23,28	16.227.691.969,00	24,86
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.337.943.218,00	0	43,65	4.542.372.909,00	54,48
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	10.344.885.794,00	21,09	10,65	8.607.934.937,00	83,21
7	Dinas Sosial	4.559.626.268,00	49,1	11,81	1.916.350.827,00	42,03
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.110.882.752,00	10,89	100	2.797.641.609,00	39,34
9	Dinas Pertanahan	3.542.567.907,00	0	40,44	2.855.061.674,00	80,59
10	Dinas Lingkungan Hidup	40.887.730.122,00	0	11,91	32.058.085.748,00	78,41
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.257.344.053,00	0	8,5	2.206.832.799,00	51,84
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	4.349.042.182,00	24,37	18,94	2.152.598.644,00	49,5
13	Dinas Perhubungan	6.918.615.760,00	0	8,64	3.004.216.339,00	43,42
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	6.882.996.749,00	0	52,07	1.594.710.185,00	23,17
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	7.509.508.050,00	23,55	22,38	3.528.753.524,00	46,99
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	6.861.431.789,00	36,58	39,75	2.655.822.232,00	38,71
17	Sekretariat Majelis Adat Aceh	1.980.376.406,00	62,85	24,86	942.079.615,00	47,57
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.537.957.649,00	25,27	24,17	1.972.209.574,00	55,74
19	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	11.158.891.361,00	46,59	30,14	5.688.154.371,00	50,97
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	9.262.915.708,00	31,69	10,48	2.564.809.542,00	27,69
21	Sekretariat Daerah	30.226.287.931,00	27,59	33,09	13.515.755.267,00	44,72
22	Sekretariat DPRK	26.931.623.309,00	54,42	17,08	13.659.936.189,00	50,72
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.623.074.456,00	62,5	23,14	3.483.682.051,00	45,7
24	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	141.334.698.847,00	60,32	100	37.320.357.088,00	26,41
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.042.769.906,00	0	20,51	2.697.232.848,00	33,54

No.	Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
			Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
26	Inspektorat	7.931.647.243,00	23,84	47,44	4.402.438.970,00	55,5
27	Kecamatan Banda Sakti	3.611.794.902,00	27,2	30,26	2.231.627.561,00	61,79
28	Kecamatan Blang Mangat	2.899.941.803,00	66	35,3	1.874.146.712,00	64,63
29	Kecamatan Muara Satu	2.722.511.841,00	0	12,19	1.390.497.549,00	51,07
30	Kecamatan Muara Dua	2.851.337.256,00	5,56	31,03	1.610.462.417,00	56,48
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.216.004.336,00	0	12	2.046.594.151,00	39,24
32	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	3.260.805.336,00	0	10,9	1.803.293.254,00	55,3
33	Sekretariat Baitul Mal	7.575.535.858,00	0	25,45	1.273.654.450,00	16,81
34	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	13.513.838.291,00	0	17,74	6.590.367.578,00	48,77
		816.489.376.141,00	**23,2**	**30,12**	**325.886.691.733,00**	**39,91**

Sumber : e Dalev SIPD RI sampai triwulan 2 Tahun 2026

2.2.5 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 Berdasarkan Bidang Urusan Pemerintahan

Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II dilakukan tidak hanya berdasarkan tingkat realisasi anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah, tetapi juga dianalisis berdasarkan bidang urusan pemerintahan. Pendekatan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih substantif mengenai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan telah mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2025–2029.

Berdasarkan hasil evaluasi e-Dalev SIPD RI sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, secara agregat terdapat pagu RKPK sebesar Rp816.489.376.141,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp325.886.691.733,00 atau 39,91 persen. Sementara itu, rata-rata capaian kinerja program mencapai 23,20 persen dan rata-rata capaian kinerja subkegiatan sebesar 30,12 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan RKPK sampai dengan Triwulan II telah berjalan dari sisi penyerapan anggaran, namun capaian kinerja masih relatif tertinggal dibandingkan dengan realisasi keuangan. Oleh karena itu, evaluasi berdasarkan bidang urusan menjadi penting untuk mengidentifikasi

urusan yang telah berjalan baik, urusan yang memerlukan percepatan, serta urusan yang memiliki risiko terhadap pencapaian target pembangunan Tahun 2026.

2.2.5.1 Urusan Pendidikan

Pelaksanaan urusan pendidikan terutama dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta didukung oleh Majelis Pendidikan Daerah. Berdasarkan data evaluasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki pagu sebesar Rp222.524.776.805,00, dengan capaian kinerja program sebesar 23,56 persen, capaian subkegiatan sebesar 4,85 persen, dan realisasi keuangan sebesar Rp76.800.347.298,00 atau 34,51 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara realisasi keuangan dengan capaian subkegiatan. Realisasi keuangan telah mencapai lebih dari sepertiga pagu, sementara capaian subkegiatan baru 4,85 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian karena urusan pendidikan merupakan salah satu urusan pelayanan dasar yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian indikator pembangunan manusia, terutama rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, serta indikator literasi dan numerasi.

Capaian program sebesar 23,56 persen juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum berjalan optimal sampai dengan pertengahan tahun. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelusuran terhadap subkegiatan yang menjadi pengungkit utama pencapaian indikator pendidikan, terutama subkegiatan yang capaian fisik/kinerjanya rendah tetapi telah menyerap anggaran cukup besar.

Sementara itu, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah menunjukkan capaian subkegiatan 100 persen dengan realisasi keuangan 47,38 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian output pada unit tersebut relatif lebih baik dibandingkan capaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, perbedaan capaian tersebut perlu dilihat berdasarkan karakteristik masing-masing kegiatan sehingga tidak dilakukan perbandingan secara langsung tanpa memperhatikan bobot dan jenis intervensinya.

Urusan pendidikan perlu dilakukan percepatan pelaksanaan subkegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan capaian indikator literasi, numerasi, serta indikator pendidikan dalam RPJMD.

2.2.5.2 Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan dilaksanakan terutama oleh Dinas Kesehatan dengan pagu sebesar Rp125.971.019.886,00. Sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja program mencapai 55,96 persen, capaian subkegiatan 21,35 persen, dan realisasi keuangan sebesar Rp59.167.669.609,00 atau 46,97 persen.

Dari sisi program, capaian Dinas Kesehatan termasuk relatif tinggi dibandingkan rata-rata keseluruhan perangkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program kesehatan telah berjalan cukup baik. Namun demikian, capaian subkegiatan yang baru mencapai 21,35 persen masih menunjukkan adanya ruang percepatan pada tingkat pelaksanaan operasional.

Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena urusan kesehatan mempunyai kontribusi langsung terhadap indikator pembangunan manusia, termasuk usia harapan hidup dan prevalensi stunting. Dengan demikian, penilaian terhadap urusan kesehatan tidak cukup hanya berdasarkan tingkat penyerapan anggaran, tetapi harus dilihat dari ketercapaian output pelayanan kesehatan dan kontribusinya terhadap outcome kesehatan masyarakat.

Urusan kesehatan secara umum berkinerja relatif baik pada tingkat program, namun perlu penguatan pelaksanaan subkegiatan yang berkontribusi langsung terhadap penurunan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan, dan peningkatan usia harapan hidup.

2.2.5.3 Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Infrastruktur

Urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat dilaksanakan terutama melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pagu yang dialokasikan sebesar Rp65.264.662.955,00, dengan capaian kinerja program 0 persen,

capaian subkegiatan 23,28 persen, dan realisasi keuangan Rp16.227.691.969,00 atau 24,86 persen.

Capaian program sebesar 0 persen perlu menjadi perhatian serius, terutama karena urusan ini memiliki keterkaitan dengan pelayanan infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, kualitas jalan, perumahan, serta kualitas pelayanan dasar masyarakat.

Meskipun capaian subkegiatan telah mencapai 23,28 persen dan realisasi keuangan 24,86 persen, belum tercapainya capaian program menunjukkan perlunya verifikasi terhadap sistem pengukuran indikator program. Evaluasi perlu memastikan apakah angka 0 persen mencerminkan belum tercapainya indikator program atau terdapat persoalan dalam penginputan dan pelaporan capaian kinerja. Kondisi serupa juga perlu dikaitkan dengan indikator pembangunan daerah seperti tingkat pelayanan jalan dan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Urusan infrastruktur merupakan salah satu urusan yang perlu mendapatkan pengendalian lebih intensif, terutama terhadap program yang capaian kinerjanya belum tercatat sementara anggaran telah direalisasikan.

2.2.5.4 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ini antara lain dilaksanakan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. BPBD memiliki capaian program 0 persen, capaian subkegiatan 43,65 persen, dan realisasi keuangan 54,48 persen. Sementara Satpol PP dan WH memiliki capaian program 21,09 persen, capaian subkegiatan 10,65 persen, dengan realisasi keuangan yang sangat tinggi yaitu 83,21 persen.

Kondisi Satpol PP dan WH menunjukkan kesenjangan yang sangat besar antara realisasi keuangan dengan capaian kinerja. Dengan realisasi keuangan telah mencapai 83,21 persen, sementara capaian subkegiatan baru 10,65 persen, diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa belanja yang telah direalisasikan telah menghasilkan output yang sesuai. Pada BPBD, realisasi

keuangan 54,48 persen dan capaian subkegiatan 43,65 persen menunjukkan hubungan yang relatif lebih seimbang. Namun, capaian program 0 persen perlu diverifikasi. Pengendalian perlu difokuskan pada konsistensi antara realisasi anggaran, output pelayanan ketenteraman dan ketertiban, serta capaian indikator program

2.2.5.5 Urusan Sosial

Dinas Sosial memiliki pagu sebesar Rp4.559.626.268,00, dengan capaian program 49,10 persen, capaian subkegiatan 11,81 persen, dan realisasi keuangan 42,03 persen. Capaian program relatif tinggi, namun capaian subkegiatan masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa secara indikator program telah terdapat kemajuan, tetapi pelaksanaan kegiatan operasional belum sepenuhnya mengikuti capaian program tersebut.

Karena urusan sosial berkaitan dengan perlindungan sosial dan penanganan kelompok rentan, evaluasi perlu memastikan bahwa capaian tersebut benar-benar diterjemahkan ke dalam peningkatan pelayanan dan manfaat yang diterima masyarakat. Capaian program cukup baik, tetapi perlu percepatan pada subkegiatan agar pencapaian output tidak tertinggal pada semester II.

2.2.5.6 Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan pagu Rp7.110.882.752,00. Capaian program sebesar 10,89 persen, sedangkan capaian subkegiatan mencapai 100 persen dan realisasi keuangan sebesar 39,34 persen.

Terdapat anomali yang perlu menjadi perhatian karena capaian subkegiatan telah mencapai 100 persen, tetapi capaian program baru 10,89 persen. Hal ini mengindikasikan perlunya pemeriksaan terhadap hubungan logis antara subkegiatan, output, indikator program, dan target program. Dengan demikian, capaian 100 persen pada subkegiatan tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai

keberhasilan program apabila output tersebut belum menghasilkan capaian indikator program yang ditetapkan.

Evaluasi urusan: perlu dilakukan penelusuran *logical framework* antara subkegiatan–output–program–outcome agar capaian tidak hanya bersifat administratif tetapi benar-benar menggambarkan hasil pembangunan.

2.2.5.7 Urusan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup memiliki pagu sebesar Rp40.887.730.122,00, dengan capaian program 0 persen, capaian subkegiatan 11,91 persen, dan realisasi keuangan mencapai Rp32.058.085.748,00 atau 78,41 persen.

Kondisi ini merupakan salah satu temuan evaluasi yang paling perlu mendapat perhatian. Tingkat realisasi keuangan telah mencapai 78,41 persen, sementara capaian program masih 0 persen dan subkegiatan 11,91 persen. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa perlu dilakukan evaluasi mendalam mengenai efektivitas belanja lingkungan hidup dan keterkaitannya dengan output yang dihasilkan. Hal ini menjadi semakin penting karena urusan lingkungan hidup berhubungan dengan pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan kualitas pelayanan lingkungan kepada masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup perlu menjadi salah satu objek prioritas pengendalian Triwulan III, terutama untuk memastikan kesesuaian antara realisasi belanja, output, dan pencapaian indikator lingkungan hidup.

2.2.5.8 Urusan Administrasi Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki pagu sebesar Rp4.257.344.053,00, dengan capaian program 0 persen, capaian subkegiatan 8,50 persen, dan realisasi keuangan 51,84 persen.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penggunaan anggaran dengan capaian kinerja. Mengingat administrasi kependudukan merupakan pelayanan dasar administratif yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, rendahnya capaian

subkegiatan perlu segera ditelusuri. Perlu dilakukan percepatan pelayanan dan verifikasi terhadap indikator output, khususnya untuk memastikan realisasi anggaran telah menghasilkan peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

2.2.5.9 Urusan Perhubungan

Dinas Perhubungan memiliki pagu Rp6.918.615.760,00, dengan capaian program 0 persen, capaian subkegiatan 8,64 persen, dan realisasi keuangan 43,42 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan urusan perhubungan masih relatif rendah pada tingkat kinerja, meskipun hampir setengah anggaran telah direalisasikan. Kondisi ini perlu dikaitkan dengan indikator tingkat pelayanan transportasi dan konektivitas wilayah. Perlu dilakukan identifikasi terhadap subkegiatan yang menjadi penyebab rendahnya capaian program serta percepatan kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap pelayanan transportasi masyarakat.

2.2.5.10 Urusan Komunikasi, Informatika dan Persandian

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian memiliki pagu Rp6.882.996.749,00, dengan capaian program 0 persen, capaian subkegiatan 52,07 persen, dan realisasi keuangan 23,17 persen.

Kondisi ini relatif berbeda dengan beberapa perangkat daerah lainnya. Capaian subkegiatan telah mencapai 52,07 persen sementara realisasi keuangan baru 23,17 persen. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa sebagian output telah dicapai dengan penggunaan anggaran yang relatif rendah.

Namun, capaian program yang masih 0 persen perlu diverifikasi. Evaluasi harus memastikan bahwa output subkegiatan tersebut memang menjadi kontributor terhadap indikator program. Perlu penguatan keterkaitan antara indikator subkegiatan dengan indikator program serta validasi terhadap capaian program.

2.2.5.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM memiliki pagu Rp9.262.915.708,00, dengan capaian program 31,69 persen, capaian subkegiatan 10,48 persen, dan realisasi keuangan 27,69 persen.

Capaian program telah berada di atas rata-rata agregat, namun capaian subkegiatan masih rendah. Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena urusan ini berhubungan langsung dengan penguatan struktur ekonomi daerah, perdagangan, industri, koperasi dan UMKM.

Terlebih lagi, salah satu indikator utama daerah adalah kontribusi sektor perdagangan dan industri pengolahan terhadap PDRB. Oleh karena itu, evaluasi perlu memastikan bahwa pelaksanaan program tidak hanya menghasilkan output administratif, tetapi berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah. Perlu percepatan subkegiatan yang mendukung penguatan UMKM, perdagangan dan industri serta memperjelas kontribusinya terhadap indikator ekonomi daerah.

2.2.5.12 Urusan Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan

Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan memiliki pagu Rp11.158.891.361,00, dengan capaian program 46,59 persen, capaian subkegiatan 30,14 persen, dan realisasi keuangan 50,97 persen. Kinerja urusan ini relatif baik karena capaian program telah mencapai 46,59 persen dan subkegiatan 30,14 persen. Namun, realisasi keuangan sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja.

Urusan ini memiliki keterkaitan langsung dengan indikator ketahanan pangan serta kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa capaian program diterjemahkan menjadi peningkatan produksi, produktivitas, akses pangan, serta kesejahteraan pelaku usaha. Secara umum berkinerja relatif baik, tetapi perlu menjaga keseimbangan antara penyerapan anggaran dan pencapaian output serta outcome.

2.2.5.13 Urusan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata memiliki pagu Rp6.861.431.789,00, dengan capaian program 36,58 persen, subkegiatan 39,75 persen, dan realisasi keuangan 38,71 persen. Kondisi ini menunjukkan hubungan yang relatif seimbang antara capaian kinerja dan realisasi keuangan. Dibandingkan dengan rata-rata keseluruhan, urusan ini menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Pelaksanaan perlu diarahkan pada peningkatan prestasi pemuda dan olahraga serta penguatan sektor pariwisata sebagai bagian dari diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Pelaksanaan relatif baik dan perlu dipertahankan dengan memperkuat orientasi pada outcome dan dampak ekonomi.

2.2.5.14 Urusan Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki pagu Rp7.623.074.456,00, dengan capaian program 62,50 persen, capaian subkegiatan 23,14 persen, dan realisasi keuangan 45,70 persen. Capaian program Bappeda relatif tinggi. Namun demikian, capaian subkegiatan masih 23,14 persen. Kondisi ini perlu dianalisis karena fungsi perencanaan memiliki peran strategis dalam memastikan konsistensi antara RPJMD, RKPK, Renja Perangkat Daerah, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi.

Perlu memastikan bahwa tingginya capaian program perencanaan tercermin pada peningkatan kualitas konsistensi dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan, bukan hanya penyelesaian dokumen administratif.

2.2.5.15 Urusan Keuangan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki pagu Rp141.334.698.847,00, dengan capaian program 60,32 persen, capaian subkegiatan 100 persen, dan realisasi keuangan 26,41 persen. Kondisi ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi dibandingkan realisasi keuangan. Dari perspektif evaluasi, kondisi tersebut dapat menjadi indikasi bahwa output kegiatan telah dicapai dengan penyerapan anggaran yang relatif rendah.

Namun, perlu dipastikan bahwa capaian 100 persen tersebut benar-benar menggambarkan penyelesaian output dan bukan semata-mata penyelesaian administratif. Verifikasi kualitas output tetap diperlukan.

2.2.5.16 Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM memiliki capaian program 0 persen, capaian subkegiatan 20,51 persen, dan realisasi keuangan 33,54 persen. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya percepatan pelaksanaan program pengembangan kapasitas aparatur. Urusan ini memiliki keterkaitan dengan peningkatan profesionalisme ASN dan kualitas tata kelola pemerintahan.

2.2.5.17 Urusan Pengawasan

Inspektorat memiliki capaian program 23,84 persen, capaian subkegiatan 47,44 persen, dan realisasi keuangan 55,50 persen. Capaian subkegiatan relatif baik, tetapi realisasi keuangan lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja. Mengingat fungsi pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu dipastikan bahwa output pengawasan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola, pengendalian internal, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

2.2.5.18 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kecamatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong memiliki capaian program 24,37 persen, subkegiatan 18,94 persen, dan realisasi keuangan 49,50 persen. Sementara itu, Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Satu dan Muara Dua menunjukkan variasi capaian yang cukup besar. Kecamatan Blang Mangat merupakan salah satu yang tertinggi dengan capaian program 66 persen, subkegiatan 35,30 persen, dan realisasi keuangan 64,63 persen.

Sebaliknya, Kecamatan Muara Satu memiliki capaian program 0 persen, subkegiatan 12,19 persen, dan realisasi keuangan 51,07

persen. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan pada tingkat kewilayahan belum sepenuhnya seragam. Evaluasi perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah, jenis kegiatan, serta kewenangan kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan.

2.2.5.19 Urusan Syariat Islam, Pendidikan Dayah dan Kelembagaan Keagamaan

Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah memiliki capaian program 0 persen, capaian subkegiatan 17,74 persen, dan realisasi keuangan 48,77 persen. Sekretariat MPU memiliki capaian program 0 persen, subkegiatan 10,90 persen, dan realisasi keuangan 55,30 persen, sedangkan Sekretariat Baitul Mal memiliki capaian program 0 persen, subkegiatan 25,45 persen, dan realisasi keuangan 16,81 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pengendalian, terutama pada perangkat daerah yang realisasi keuangannya telah cukup tinggi tetapi capaian program masih 0 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Rekapitulasi Capaian Bidang Urusan pada Evaluasi Hasil RKPD
Pemerintah Kota Lhokseumawe
Kondisi Sampai Dengan : Triwulan II Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Bidang Urusan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	228.489.393.111,00	39,07	21,76	78.818.149.541,00	34,5
2	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	125.971.019.886,00	55,96	21,35	59.167.669.609,00	46,97
3	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	53.268.023.958,00	0	25,95	16.219.441.969,00	30,45
4	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11.996.638.997,00	0	11,11	8.250.000,00	0,07
5	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.682.829.012,00	9,59	22,98	13.150.307.846,00	70,39

No.	Kode	Uraian Bidang Urusan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
6	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.559.626.268,00	49,1	11,81	1.916.350.827,00	42,03
7	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.234.508.050,00	0	24,88	3.518.308.324,00	48,63
8	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.084.849.752,00	11,78	55,29	2.553.755.609,00	50,22
9	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	9.422.868.789,00	87,95	37,16	4.373.263.171,00	46,41
10	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	3.542.567.907,00	0	40,44	2.855.061.674,00	80,59
11	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	40.887.730.122,00	0	11,91	32.058.085.748,00	78,41
12	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.257.344.053,00	0	8,5	2.206.832.799,00	51,84
13	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.349.042.182,00	24,37	18,94	2.152.598.644,00	49,5
14	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.026.033.000,00	9,29	216,54	243.886.000,00	12,04
15	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	6.918.615.760,00	0	8,64	3.004.216.339,00	43,42
16	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.792.996.749,00	0	52,21	1.594.710.185,00	23,48
17	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.614.512.553,00	31,49	9,67	2.419.917.442,00	43,1
18	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	275.000.000,00	42,39	16,26	10.445.200,00	3,8
19	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6.319.431.789,00	26,51	50,06	2.652.402.232,00	41,97
20	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	90.000.000,00	0	50	0,00	0

No.	Kode	Uraian Bidang Urusan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
21	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.613.376.406,00	15,71	12,43	942.079.615,00	36,05
22	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.462.957.649,00	7,38	24,85	1.966.097.674,00	56,78
23	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	75.000.000,00	52,1	20	6.111.900,00	8,15
24	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	679.862.278,00	22,14	22,22	28.298.600,00	4,16
25	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	542.000.000,00	50	0	3.420.000,00	0,63
26	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.056.160.294,00	39,82	23,86	1.286.592.600,00	121,82
27	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.375.000.000,00	32,88	10,67	139.368.500,00	4,13
28	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	273.403.155,00	30,31	14,29	5.523.600,00	2,02
29	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	30.226.287.931,00	27,59	33,09	13.515.755.267,00	44,72
30	4.02	SEKRETARIAT DPRD	26.931.623.309,00	54,42	17,08	13.659.936.189,00	50,72
31	5.01	PERENCANAAN	7.219.074.456,00	83,33	25,03	3.479.756.451,00	48,2
32	5.02	KEUANGAN	141.334.698.847,00	60,32	462,19	37.320.357.088,00	26,41
33	5.03	KEPEGAWAIAN	6.786.566.706,00	0	21,79	2.661.397.848,00	39,22
34	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.256.203.200,00	0	0	35.835.000,00	2,85
35	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	404.000.000,00	0	5,56	3.925.600,00	0,97
36	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	7.931.647.243,00	23,84	47,44	4.402.438.970,00	55,5
37	7.01	KECAMATAN	12.085.585.802,00	24,69	27,58	7.106.734.239,00	58,8
38	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.216.004.336,00	0	12	2.046.594.151,00	39,24
39	9.01	KEKHUSUSAN ACEH	19.236.892.591,00	0	20,65	8.352.815.282,00	43,42
	TOTAL		816.489.376.141,00	25,3	44,51	325.886.691.733,00	39,91

Sumber : e Dalev SIPD RI Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II

Berdasarkan keseluruhan hasil evaluasi, dapat diidentifikasi bahwa kinerja pelaksanaan RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II memiliki empat karakteristik utama.

1. urusan dengan kinerja relatif baik. Urusan kesehatan, perencanaan pembangunan, kelautan/ perikanan/ pertanian/ pangan,kepemudaan/ olahraga/pariwisata, serta beberapa fungsi

pengelolaan keuangan menunjukkan capaian program atau subkegiatan yang relatif tinggi.

2. urusan dengan realisasi keuangan tinggi tetapi kinerja rendah. Kondisi ini terutama terlihat pada lingkungan hidup, ketenteraman dan ketertiban, administrasi kependudukan, serta beberapa fungsi pelayanan lainnya. Kelompok ini perlu menjadi prioritas pengendalian, karena terdapat risiko ketidakseimbangan antara input dan output.
3. Urusan dengan capaian program 0 persen. Kondisi tersebut ditemukan pada sejumlah perangkat daerah. Namun, angka 0 persen harus terlebih dahulu diverifikasi untuk membedakan antara kinerja yang memang belum tercapai dengan keterlambatan atau permasalahan pelaporan/pengukuran indikator.
4. Adanya disparitas capaian antar-urusan. Capaian program pada perangkat daerah berada pada rentang 0 persen sampai 66 persen, sedangkan capaian subkegiatan berada pada rentang 4,85 persen sampai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pelaksanaan dan tingkat kemajuan program belum merata.

Secara keseluruhan, temuan paling penting dari evaluasi bukan hanya rendahnya capaian kinerja agregat, tetapi adanya ketidakseimbangan antara realisasi keuangan dengan pencapaian kinerja. Dengan realisasi keuangan mencapai 39,91 persen, sementara capaian program baru 23,20 persen dan subkegiatan 30,12 persen, maka pengendalian pada semester II harus bergeser dari pendekatan berapa besar anggaran telah dibelanjakan menjadi apa hasil yang telah dihasilkan dari anggaran yang telah dibelanjakan.

Dengan pendekatan tersebut, evaluasi RKPK dapat memberikan informasi yang lebih bermakna bagi pengambilan keputusan, terutama dalam menentukan program yang perlu dipercepat, program yang perlu diperbaiki, serta program yang membutuhkan evaluasi lebih mendalam terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Untuk lebih jelas Evaluasi terhadap Hasil RKPK Tahun 2026 sampai dengan Triwuln II dapat dilihat pada tabel berikut.

2.3 Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi RKPK Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II

2.3.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan, pelaksanaan RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan realisasi keuangan sebesar 39,91 persen, tetapi capaian kinerja belum bergerak pada tingkat yang sebanding, yaitu 23,20 persen untuk program dan 30,12 persen untuk subkegiatan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pelaksanaan RKPK bukan hanya terletak pada kemampuan perangkat daerah dalam merealisasikan anggaran, tetapi juga pada kemampuan mengonversi anggaran menjadi output yang terukur dan memberikan kontribusi terhadap outcome serta sasaran pembangunan daerah.

Dengan demikian, hasil evaluasi Triwulan II memberikan sinyal bahwa pengendalian pelaksanaan RKPK pada semester II harus lebih diarahkan pada percepatan pencapaian kinerja, bukan semata-mata percepatan penyerapan anggaran. Perangkat daerah dengan capaian rendah perlu memperoleh intervensi pengendalian secara lebih intensif, sedangkan perangkat daerah dengan serapan tinggi tetapi capaian kinerja rendah perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas dan keterkaitan belanja dengan output yang dihasilkan.

Hasil evaluasi ini selanjutnya perlu dijadikan dasar dalam penyusunan tindak lanjut pengendalian Triwulan III, prognosis pencapaian akhir Tahun 2026, serta bahan penyusunan perencanaan tahun berikutnya, sehingga siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi dapat berjalan secara konsisten dan berorientasi pada hasil pembangunan.

2.3.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, diperlukan beberapa rekomnedasi sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi dan validasi data capaian kinerja antara RKPK, Renja Perangkat Daerah, DPA, dan data realisasi pada e-Dalev SIPD

RI agar tidak terjadi perbedaan antara target dan capaian yang dilaporkan.

2. Melakukan evaluasi khusus terhadap perangkat daerah dengan capaian program 0 persen, terutama perangkat daerah yang telah memiliki realisasi keuangan. Verifikasi perlu diarahkan pada penyebab rendahnya capaian indikator dan mekanisme pengukuran output.
3. Melakukan pengendalian terhadap perangkat daerah dengan realisasi keuangan tinggi tetapi capaian kinerja rendah. Fokus pengendalian diarahkan pada kesesuaian antara belanja yang telah direalisasikan dengan output yang telah dihasilkan.
4. Menyusun rencana percepatan pelaksanaan Triwulan III dan IV untuk program dan subkegiatan dengan capaian di bawah target antara, dengan mencantumkan kegiatan yang harus diselesaikan, target bulanan/triwulanan, penanggung jawab, serta batas waktu penyelesaian.
5. Memberikan perhatian khusus terhadap program strategis dan pelayanan dasar yang memiliki keterkaitan langsung dengan indikator sasaran RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2025–2029.
6. Mengoptimalkan rapat pengendalian secara berkala dengan menggunakan pendekatan berbasis *deviasi*, yaitu mengidentifikasi perangkat daerah/program yang mengalami keterlambatan, penyebab keterlambatan, dampaknya terhadap target tahunan, dan tindakan korektif yang harus dilakukan.
7. Mengintegrasikan evaluasi kinerja dan evaluasi keuangan, sehingga keputusan percepatan anggaran tidak hanya mempertimbangkan kemampuan menyerap anggaran, tetapi juga kemampuan menghasilkan *output* dan *outcome* pembangunan.
8. Memastikan setiap Perangkat Daerah menyusun perkiraan atau prediksi capaian akhir tahun, terutama bagi program/subkegiatan yang sampai dengan Triwulan II memiliki capaian rendah. Prognosis tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah diperlukan percepatan, penjadwalan ulang, perubahan target, atau langkah korektif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN KOTA LHOKSEUMAWE

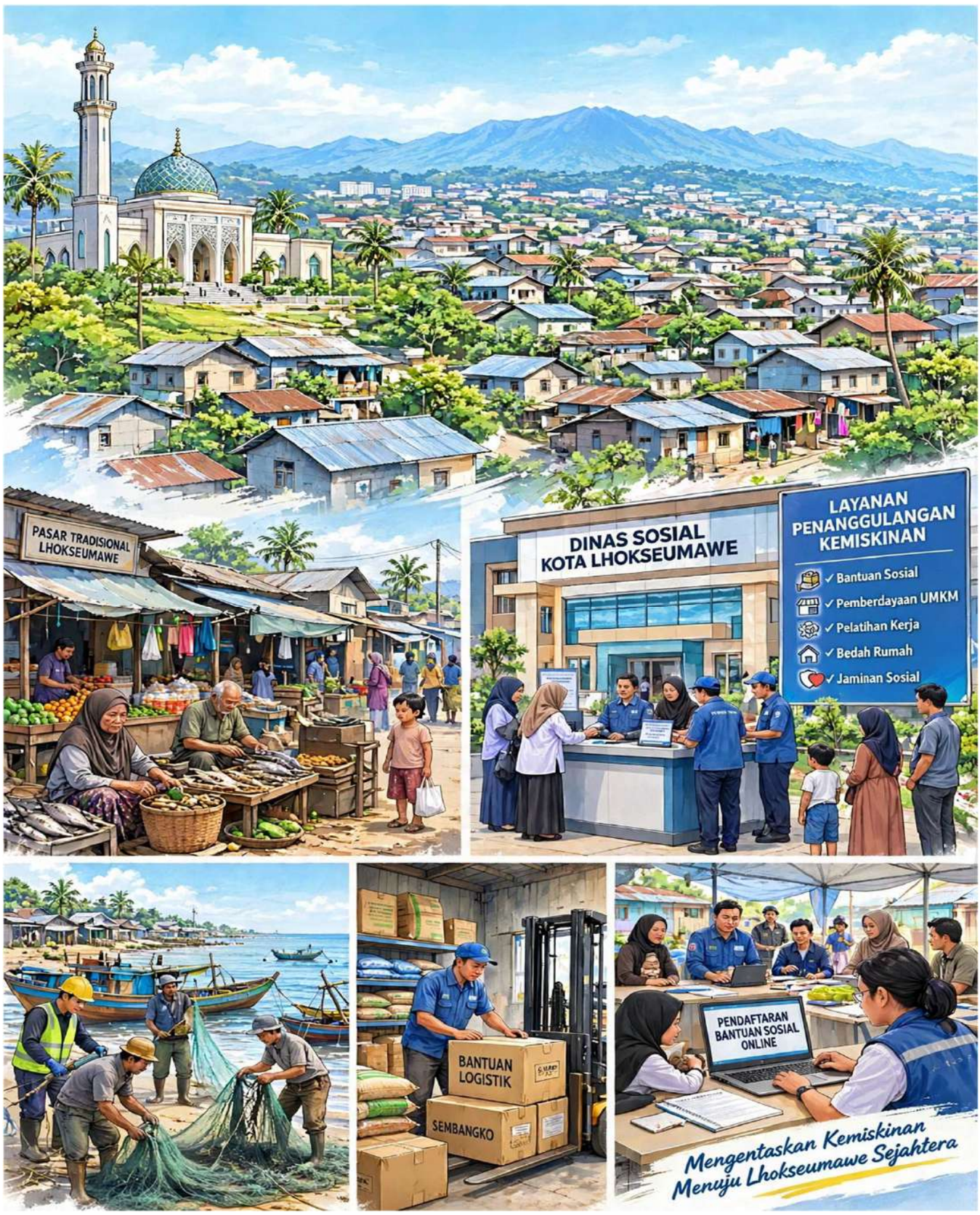

P-RKPK 2026

BAPPEDA KOTA LHOKSEUMAWE

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN KOTA LHOKSEUMAWE

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Global dan Nasional

Memasuki tahun 2026, perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian perdagangan dan eskalasi geopolitik yang meningkatkan volaitilitas pasar keuangan, mengganggu rantai pasok, serta menambah tekanan pada harga komoditas strategis, terutama energi. Di tengah tekanan tersebut, sektor manufaktur global tetap menunjukkan resiliensi, tercermin dari PMI manufaktur global yang masih berada pada zona ekspansif pada Januari-Februari 2026, dengan dukungan utama berasal dari aktivitas produksi kawasan Asia. Sementara itu, proses disinflasi global terus berlanjut namun melambat, sehingga arah kebijakan moneter antarnegara menjadi semakin beragam, dengan bank sentra utama cenderung berhati-hati dalam melanjutkan pelonggaran suku bunga. Secara keseluruhan, proses ekonomi global tetap moderat, dengan pertumbuhan yang semakin ditopang oleh negara berkembang, khususnya Asia. Sementara, risiko utama masih berasal dari proteksionisme, gangguan pasokan, gejolak geopolitik, dan potensi tekanan stagflasi.

Di dalam negeri, perekonomian Indonesia pada 2025 tumbuh kuat di 5,11 persen dengan akselerasi pada triwulan IV mencapai 5,39 persen (yoy). Kinerja ini ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, serta ekspor yang tetap terjaga. Dari sisi produksi, pertumbuhan terutama berasal dari industri pengolahan, perdagangan, pertanian, transportasi, akomodasi dan makanan minuman, serta informasi dan komunikasi, sementara sektor pertambangan masih mengalami kontraksi. Secara spasial, seluruh wilayah tumbuh positif, dengan kinerja tertinggi di Sulawesi sementara Jawa masih menjadi pusat aktivitas manufaktur dan perdagangan.

Memasuki tahun 2026, perekonomian global diwarnai tekanan geopolitik, terutama konflik Timur Tengah yang mendorong lonjakan

harga energi, dispursi logistik, serta ketidakpastian pasar keuangan yang memicu pergeseran ke aset *safe haven* dan arus modal keluar dari negara berkembang. Sinyal perbaikan mulai terlihat menjelang akhir Mei, dengan optimisme terhadap gencatan senjata dan koreksi harga minyak di tengah meskipun risiko ketidakpastian masih tinggi dan aktivitas perdagangan global, manufaktur, dan rantai pasok belum sepenuhnya pulih. Lonjakan komoditas dan tekanan energi turut memperlambat proses disinflasi global, mendorong bank sentral utama masih bersikap wait-and-see dengan kecenderungan suku bunga tinggi akan bertahan lebih lama. Di tengah kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi menunjukkan divergensi, dimana negara berkembang khususnya ASEAN tetap resilien ditopang konsumsi dan investasi, sementara negara maju menghadapi perlambatan akibat tekanan inflasi dan pengetatan moneter, meningkatkan risiko stagflasi di beberapa kawasan. Dengan latar belakang situasi tersebut, risiko geopolitik, inflasi, dan gangguan perdagangan masih menjadi tantangan utama bagi prospek ekonomi global ke depan.

Di tengah ketidakpastian global dan meningkatnya volalitas pasar keuangan, perekonomian Indonesia pada triwulan I 2026 tetap menunjukkan kinerja yang kuat dengan pertumbuhan 5,61 persen (yoy). Kinerja tersebut ditopang konsumsi rumah tangga, percepatan belanja Pemerintah, investasi yang tetap tinggi, serta kinerja sektor usaha yang ekspansif. Inflasi tetap terkendali pada level 3,08 persen (yoy) di bulan Mei sehingga mendukung daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi serta menjaga efektivitas stimulus fiskal. Di sektor keuangan, likuiditas tetap memadai, pertumbuhan kredit terjaga *double digit* di 10 persen (yoy) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 11,4 persen (yoy) pada bulan April, dan ketahanan perbankan tetap kuat didukung permodalan serta kualitas aset yang baik. Stabilitas eksternal juga terjaga melalui surplus perdagangan yang berlanjut dalam 72 bulan dengan akumulasi surpus Januari–April 2026 USD5,64 miliar, mendukung posisi cadangan devisa pada level yang memadai sebagai bantalan menghadapi risiko global.

Hingga Mei 2026, APBN menunjukkan kinerja yang kuat dengan Pendapatan Negara tumbuh signifikan 19,1 persen (yoy) atau 37,6 persen dari APBN, ditopang oleh peningkatan penerimaan perpajakan dan PNBP dengan terjaganya aktivitas ekonomi domestik. Di sisi Belanja Negara, realisasi dilakukan lebih awal dan merata di sepanjang tahun untuk mengoptimalkan dampak pada perekonomian. Belanja dialokasikan untuk mendukung program prioritas, menjaga daya beli masyarakat, memperkuat perlindungan sosial, serta mendorong pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Belanja Negara terealisasi 35,5 persen dari target APBN dan tumbuh 34,4 persen (yoy). Untuk mendukung kebutuhan belanja, pengelolaan pembiayaan tetap dilakukan secara hati-hati, adaptif, dan terukur guna menjaga keberlanjutan fiskal di tengah ketidakpastian global. Kondisi pasar Surat Berharga Negara tetap kondusif dengan minat investor yang terjaga dan *yield* yang relatif stabil, mencerminkan kepercayaan terhadap kredibilitas pengelolaan fiskal Pemerintah.

Prospek ekonomi Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan tetap terjaga didukung masih tingginya ketidakpastian global dan dinamika perdagangan dunia. Permintaan domestik diperkirakan tetap kuat, didukung kebijakan fiskal yang terarah, serta keberlanjutan berbagai program strategis Pemerintah yang ditujukan untuk menopang ekonomi nasional. Berbagai indikator ekonomi terkini juga menunjukkan bahwa perekonomian domestik masih resilien dengan aktivitas konsumsi dan produksi yang tetap terjaga.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkirakan akan meningkat relatif lebih tinggi didukung oleh stabilitas dan perbaikan capaian indikator ekonomi makro. Inflasi dan nilai tukar diarahkan untuk terjaga stabil dan terkendali didukung oleh stabilitas eksternal dan kinerja APBN. Kinerja sektor industri pengolahan yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan meningkatkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB. Sementara itu, pertumbuhan investasi ditargetkan meningkat didukung akselerasi realisasi PMA dan PMDN.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Meskipun di tengah gejolak ekonomi global,

perekonomian Indonesia tahun 2026 ditargetkan mengalami percepatan pertumbuhan menjadi 5,2-5,8 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini diharapkan dapat mendorong GNI per kapita Indonesia ke level US$5.520 serta mempertahankan status Indonesia pada kategori *upper-middle-income country*. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan didorong melalui berbagai kebijakan yang transformatif di sisi pengeluaran dan sisi produksi, peningkatan peran BUMN dan sektor swasta.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Program MBG berperan membentuk ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan serta mengurangi biaya konsumsi harian, sehingga masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk konsumsi barang atau jasa lainnya. Konsumsi pemerintah tahun 2026 ditargetkan meningkat untuk mendukung daya beli masyarakat serta pembiayaan infrastruktur.

PMTB atau investasi diharapkan dapat menjadi pendorong utama perekonomian guna mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2026. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan peningkatan realisasi PMA dan PMDN yang ditargetkan meningkat menjadi 2.041,3-2.125,2 triliun. Upaya lebih lanjut dilakukan dengan meningkatkan investasi berorientasi ekspor dengan target nilai PMA dan PMDN masing-masing menjadi Rp.176,10-190,01 triliun dan Rp.62,99-67,90 triliun, serta dengan meningkatkan kontribusi investasi Luar Jawa menjadi 52,14-52,37 persen terhadap realisasi investasi nasional. Selain itu, tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) diupaya menurun ke kisaran 6,20-5,61.

Upaya strategis dan mendesak untuk meningkatkan investasi difokuskan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif dan kepastian berusaha guna memperkuat transformasi ekonomi, yang mencakup (i) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun di antara kementerian/lembaga; (ii) penyelesaian hambatan pada aspek hukum,

peraturan, prosedur, dan kelembagaan, serta (iii) peningkatan efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor dan wilayah.

Dari sisi sektor keuangan, pada tahun 2026 kebijakan sektor keuangan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut ditempuh melalui upaya untuk menjaga ketahanan sektor keuangan, peningkatan fungsi intermediasi, serta peningkatan inklusi dan literasi keuangan.

Ketahanan sektor keuangan akan ditopang oleh ketahanan sektor perbankan dengan rasio kecukupan modal (*Capital Adeguacy Ratio*/CAR) ditargetkan terjada pada level tinggi berkisar 28,5 persen, serta risiko kredit bermasalah (NPL) yang terkendali rendah berkisar pada 2,0-2,5 persen.

Penguatan sektor keuangan akan terus ditingkatkan, baik perbankan maupun nonbank, mencakup upaya peningkatan fungsi intermediasi, peningkatan inklusi dan literasi keuangan, serta perlindungan konsumen sektor keuangan. Upaya pendalaman sektor keuangan di sisi perbankan dilakukan melalui (i) diversifikasi produk; (ii) peningkatan inovasi, tatakelola, dan efisiensi perbankan, serta (iii) perluasan jangkauan atau akses layanan seluruh segmen masyarakat termasuk masyarakat termarjinalkan, yang salah satunya dengan meningkatkan peran tim percepatan akses keuangan daerah. Sementara untuk sektor keuangan nonbank seperti dana pensiun, asuransi, dan pasar modal, upaya pendalaman akan difokuskan pada (i) peningkatan literasi keuangan; (ii) perlindungan konsumen sektor keuangan; dan (iii) penguatan dukungan lembaga keuangan nonbank pada program prioritas pemerintah.

Presiden menekankan agar berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil

evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 mengangkat tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta mencapai target sasaran pembangunan, ditetapkan prioritas pembangunan nasional (PN) sebagai berikut:

1. PN 1; Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. PN 2; Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. PN 3; Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi;
4. PN 4; Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
5. PN 5; Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. PN 6; Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. PN 7; Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;

8. PN 8; Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Pada tahun 2026, Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Swasembada pangan antara lain dilakukan melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) untuk membangun lumbung pangan nasional dan pangan akuatik (*blue food*) dengan berbagai intervensi strategis yang berfokus pada peningkatan hasil produktivitas perikanan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan, keberlanjutan ekosistem perairan, dan kesejahtaraan pelaku usaha perikanan. Selain itu, swasembada pangan memerlukan penguatan tata kelola sistem pangan, yaitu melalui transformasi dan penguatan kelembagaan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) menjadi lembaga di bawah Presiden, untuk mengelola cadangan pangan nasional secara terpadu, efektif, dan efisien.

Swasembada energi diarahkan melalui peningkatan bauran etanol, biodiesel, serta energi terbarukan, yang difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi *biofuel*, meningkatkan pemanfaatan biodiesel pada sekitar transformasi, dan mendorong perubahan pola konsumsi energi dari sumber energi berbasis fosil menuju energi yang lebih bersih. Sementara itu, swasembada air antara lain dilakukan melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari hulu ke hilir agar meningkatkan rumah tangga yang terlayani akses air minum, disertai dengan pengelolaan dan pengawasan kualitas air minum yang memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, regulasi dan kebijakan, pendanaan, dan masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik.

Gambar 3.1
Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah)

RKP tahun 2026 juga diarahkan untuk menciptakan ekonomi yang produktif dan inklusif. Ekonomi yang produktif didukung oleh sumber daya manusia berkualitas. Upaya untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif, salah satunya dengan mengembangkan lebih lanjut dan meperluas ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini mencakup pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah dari berbagai jenjang pendidikan mulai Pendidikan Anak Usia Dini hingga Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/sederajat. Dampak positif yang diharapkan mencakup peningkatan prestasi siswa, kesejahteraan petani, lapangan kerja, dan pengurangan beban penduduk miskin.

Kebijakan pembangunan tahun 2026 disusun selaras dengan Direktif Presiden untuk memastikan arah kebijakan dan program pembangunan dapat mempercepat pencapaian target RPJMN Tahun 2025-2029 dan menjawab isu strategis yang menjadi perhatian Presiden. Adapun enam Direktif Presiden yaitu (i) ekosistem makan bergizi gratis; (ii) pengelolaan sampah terpadu; (iii) sekolah rakyat; (iv) digitalisasi pendidikan; (v) percepatan pengentasan kemiskinan; serta (vi) koperasi desa/kelurahan merah putih.

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Aceh

Perekonomian Aceh yang dicerminkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh mencapai 66,39 rupiah pada triwulan I 2026 atau naik sebesar 0,04 triliun dari triwulan IV 2025 yang sebesar 66,35 triliun rupiah atas dasar harga berlaku. Sedangkan perekonomian Aceh tanpa migas mengalami penurunan sebesar 0,58 triliun dari 64,74 triliun menjadi 64,15 triliun rupiah.

Gambar 3.2
PDRB Aceh ADHB Tw. I-2025, Tw. IV-2025 dan Tw. I-2026
(Triliun Rupiah)

Sumber: BPS Provinsi Aceh, Juni 2026 (diolah)

Naiknya nilai PDRB ADHB pada triwulan I 2026 disebabkan karena terjadinya kenaikan pada semua lapangan usaha, kecuali 3 (tiga) lapangan usaha yang mengalami penurunan yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan turun sebesar Rp.2.041,12 milyar, disusul Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar Rp.103,81 milyar, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar Rp.17,49 milyar.

Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian nail sebesar Rp.843,96 milyar, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp.736,41 milyar, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar Rp.147,63 milyar dan Konstruksi sebesar Rp.135,59. Transportasi dan Pergudangan naik sebesar Rp.101,95 milyar, Informasi dan Komunikasi sebesar Rp.74,14 milyar, Industri Pengolahan sebesar Rp.53,77 milyar, Jasa Keuangan sebesar Rp.74,14 milyar, dan Jasa Lainnya sebesar Rp.34,97 milyar. Sedangkan lima lapangan usaha lainnya naik di bawah Rp.13,05 milyar.

Sedangkan PDRB Aceh berdasarkan atas dasar harga konstan 2010 (ADHK 2010), PDRB Aceh triwulan I 2026 dengan migas sebesar 39,39 triliun rupiah, turun 0,24 triliun rupiah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 40,20 triliun rupiah. Nilai PDRB ADHK tanpa migas, pada triwulan I 2026 juga mengalami penurunan sebesar 0,47 triliun rupiah dri 39,05 triliun rupiah menjadi 38,58 trililun rupiah.

Gambar 3.3
PDRB Aceh ADHK Tw. I-2025, Tw. IV-2025 dan Tw. I-2026
(Triliun Rupiah)

Sumber: BPS Provinsi Aceh, Juni 2026 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Aceh yang digambarkan oleh perkembangan PDRB ADHK dengan migas pada triwulan I 2026 mengalami kontraksi sebesar 0,61 persen dibandingkan triwulan IV 2025 *(q-to-q)*, pertumbuhan ekonomi tanpa migas juga mengalami penurunan, yaitu sebesar 1,20 persen. Sementara itu, jika dibandingkan dengan nilai PDRB triwulan I 2026 *(y-on-y)*, perekonomian Aceh dengan migas tumbuh 4,09 persen, dan tanpa migas tumbuh sebesar 5,07 persen.

Gambar 3.4
Laju Pertumbuhan PDRB Aceh Tw. I-2026 (Persen)

Sumber: BPS Provinsi Aceh, Juni 2026 (diolah)

Pertumbuhan *(y-on-y)* terjadi pada semua kategori lapangan usaha, kecuali 2 (dua) kategori yang mengalami penurunan yaitu pertambangan dan penggalian sebesar 9,05 persen dan Pangadaan Air sebesar 1,97 persen. Kategori yang mengalami pertumbuhan signifikan yaitu Jasa Keuangan sebesar 17,96 persen, diikuti Konstruksi sebesar 15,95 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,54 persen, Perdagangan Besar, Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,88 persen. Sedangkan kategori Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,67 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,34 persen, Industri Pengolahan sebesar 6,03 persen, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,70 persen. Jasa Pendidikan tumbuh

sebesar 5,18 persen, Jasa Lainnya sebesar 4,24 persen, Real Estate sebesar 3,86 persen.

Sementara itu, lapangan usaha Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 2,24 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 2,21 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,91 persen, dan Pertanian, Kehutanan, Perikanan tumbuh sebesar 0,35 persen.

Perekonomian Aceh secara triwulanan (*q-to-q*) dibandingkan triwulan IV 2025 mengalami kontraksi sebesar 0,61 persen dengan migas, sedangkan PDRB non migas mengalami kontraksi sebesar 1,20 persen. Kontraksi pertumbuhan terjadi pada 5 (lima) kategori Lapangan Usaha (LU). LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami kontraksi sebesar 10,30 persen, diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,13 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 1,09 persen, Jasa Pendidikan sebesar 0,14 persen, dan Reali Estate sebesar 0,01 persen. Kategori Lapangan Usaha yang tumbuh signifikan diantaranya Pertambangan dan Penggalian sebesar 16,64 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,43 persen, dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,24 persen.

Sementara itu, LU Usaha Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepda Motor tumbuh sebesar 6,40 persen, Pengadaan Air sebesar 4,84 persen, serta Informasi dan Komunikasi sebesar 4,25 persen. Kategori Jasa Lainnya tumbuh sebesar 3,88 persen, Jasa Keuangan sebesar 2,71 persen, dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 1,22 persen. Sedangkan Industri Pengolahan tumbuh sebesar 0,74 persen, Jasa Perusahaan sebesar 0,70 persen, serta Konstruksi tumbuh sebesar 0,68 persen.

Struktur perekonomian Aceh menurut Lapangan Usaha masih didominasi oleh LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan baik dengan migas maupun tanpa migas. Pada triwulan I 2026 mendominasi perekonomian dengan peranan sebesar 31,70 persen, diikuti oleh Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan peranan sebesar 15,92 persen. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib menempati urutan ketiga dalam Perekonomian

Aceh dengan peranan sebesar 8,99 persen, sedangkan Konstruksi menempati urutan keempat dengan peranan sebesar 8,72 persen. Transporasi dan Pergudangan; Pertambangan dan Penggalian, serta Industri Pengolahan masing-masing menduduki urutan kelima, keenam dan ketujuh.

Gambar 3.5
Struktur PDRB Aceh (ADHB) Tw. I-2026 dengan Migas Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Sumber: BPS Provinsi Aceh, Juni 2026 (diolah)

Struktur PDRB tanpa migas juga menunjukkan bahwa dua sektor dengan dominasi terbesar tetap berada pada LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 32,81 persen, dan Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,47 persen. Pada urutan ketiga adalah LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,31 persen, diikuti Konstruksi sebesar 9,03 persen serta Transportasi dan Pergudangan dengan peranan sebesar 6,76 persen. Sedangkan kategori Industri Pengolahan, serta Pertambangan dan Penggalian masing-masing memberi kontribusi sebesar 4,26 persen dan 3,56 persen. Informasi beberapa Lapangan Usaha yang mendominasi peranan terhadap PDRB Aceh tanpa migas pada triwulan I 2026 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.6
Struktur PDRB Aceh (ADHB) Tw. I-2026 dengan Tanpa Migas Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Sumber: BPS Provinsi Aceh, Juni 2026 (diolah)

Dari sisi pengeluaran, komponen Ekspor barang dan jasa merupakan yang paling tinggi nilainya mencapai 43,20 triliun rupiah (ADHB) dan berdasarkan ADHK diperoleh sebesar 21,52 triliun rupiah. Selanjutnya Konsumsi Rumah Tangga (ADHB) yang menduduki urutan kedua sebesar 36,61 triliun rupiah dan 21,94 triliun rupiah berdasarkan ADHK. Nilai PDRB terbesar ketiga adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mempunyai nilai ADHB sebesar 21,46 triliun rupiah dan 12,81 triliun rupiah. Komponen berikutnya adalah Konsumsi Pemerintah, dengan nilai PDRB ADHB sebesar 10,38 triliun rupiah dan 5,62 triliun rupiah berdasarkan ADHK.

Adapun komponen Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) mempunyai nilai PDRB ADHB sebesar 1,59 triliun rupiah dan 0,99 triliun rupiah. Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai komponen pengurang terhadap nilai total PDRB mempunyai nilai sebesar 47,44 triliun rupiah berdasarkan ADHB dan 23,21 triliun rupiah berdasarkan ADHK.

Dari sisi kontribusi komponen PDRB pengeluaran, komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan komponen pengurang terhadap PDRB total memberikan kontribusi sebesar 71,45 persen, selanjutnya di urutan kedua komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 65,07 persen, komponen Konsumsi Rumah Tangga menjadi

komponen terbesar ketiga dengan peranan sebesar 55,14 persen. Selanjutnya komponen PMTB sebesar 32,33 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 15,63 persen dan Konsumsi LNPRT sebesar 2,40 persen.

Gambar 3.7
Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen PDRB Aceh Menurut Pengeluaran Tw. I – 2026 (Persen)

Sumber: BPS Provinsi Aceh, Juni 2026 (diolah)

Dari gambar di atas juga dapat dilihat bahwa komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi disumbangkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yaitu sebesar 26,12 persen, selanjutnya Konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 14,81 persen, PMTB sebesar 10,76 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) tumbuh sebesar 2,47 persen dan komponen Impor tumbuh sebesar 0,68 persen. Sedangkan komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi 4,28 persen.

Secara *y-on-y* komponen PK-P mengalami peningkatan yang didorong oleh bertambahnya jumlah ASN, baik PNS mapun PPPK, yang pada triwulan ini meningkat sebanyak 15.281 pegawai atau meningkat sebesar 11,32 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Selain itu, kenaikan juga didukung oleh meningkatnya realisasi belanja pemerintah, terutama Belanja Pegawai APBD yang naik 14 persen. Belanja Pegawai APBN sebesar 18 persen, serta Belanja Barang dan Jasa APBN yang tumbuh signifikan hingga 60 persen. Dari sisi daerah,

Belanja Modal APBD meningkat sangat tinggi hingga 200 persen, terutama untuk mendukung penanganan bencana di tingkat kabupaten/kota. Peningkatan konumsi pemerintah juga diperkuat oleh adanya pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja ke-14 (THR) kepada ASN pada periode tersebut.

Komponen PK-LNPRT juga mengalami peningkatan yang didorong oleh meningkatnya aktivitas lembaga keagamaan selama bulan puasa Ramadan dan perayaan Idulfitri. Selain itu, pada triwulan I 2026 bantuan dari berbagai lembaga non-profit untuk korban bencana banjir di Sumatera masih terus berlangsung, sehingga turut mendorong peningkatan aktivitas konsumsi LNPRT. Kondisi ini juga tercermin dari konsumsi listrik sektor sosial yang meningkat sebesar 0,36 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selanjutnya komponen PMTB mengalami peningkatan yang didorong oleh pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi korban bencana hidrometeorologi, serta adanya kemajuan signifikan dalam proses pemulihan dan pembangunan kembali infrastruktur di wilayah terdampak.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mengalami peningkatan seiring mulai membaiknya kondisi pascabencana banjir di Sumatera pada triwulan I 2026. Beberapa sektor produksi dan konsumsi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan saat periode bencana, didorong oleh berkurangnya jumlah pengungsi, mulai pulihnya rumah tangga terdampak, serta membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, proses pemulihan yang belum sepenuhnya selesai menyebabkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan ini cenderung melambat secara tahunan.

Komponen Ekspor secara *y-on-y* mengalami kontraksi sebesar 4,28 persen pada triwulan I 2026. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas pengiriman barang, yang tercermin dari muat barang di pelabuhan laut turun secara *year-on-year*.

Seiring dengan tema pembangunan nasional, dan merujuk pada arah kebijakan pembangunan tahun 2026 sebagaimana tertuang

dalam RPJMA Tahun 2025-2029, maka tema Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) tahun 2026 adalah *"Swasembada Pangan dan Energi serta Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan untuk Penurunan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja"*. Melalui tema tersebut, fokus pembangunan Aceh tahun 2026 diarahkan untuk (1) mewujudkan kemandirian rakyat melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau dan ekonomi biru dengan sasaran meningkatkan penerapan ekonomi hijau dan pengentasan kemiskinan serta ketimpangan, (2) mewujudkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah SDA dan maritim dengan sasaran peningkatan nilai tambah komoditi unggulan daerah dan stabilitas ekonomi makro, dan (3) mewujudkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, industri pariwisata dan industri halal serta industri kreatif. Adapun target sasaran pembangunan Aceh tahun 2026 sebagai berikut.

Gambar 3.8
Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2026

Sumber: RKPA 2026, Bappeda Aceh, *(diolah)*

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Lhokseumawe

Perekonomian Kota Lhokseumawe hingga akhir tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Aceh. Ekonomi Kota Lhokseumawe tumbuh sebesar 3,39 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan

tahun sebelumnya sebesar 4,46 persen. Meskipun dihadapkan pada ketidakpastian dan tren perlambatan ekonomi global serta tekanan inflasi yang masih terus berlanjut, pengendalian inflasi nasional menjadi agenda yang krusial.

Berdasarkan Lapangan Usaha struktur perekonomian Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 23,72 persen, kemudian lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 15,73 persen, lapangan usaha Konstruksi memberikan kontribusi sebesar 13,35 persen, dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan memberikan kontribusi sebesar 12,73 persen.

Dari sisi aktivitas perekonomian Kota Lhokseumawe yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Dari tahun 2021, PDRB meningkat sebesar 3,29 triliun rupiah dari 9,43 triliun menjadi 12,72 triliun rupiah pada tahun 2025.

Sejalan dengan PDRB memperhitungkan migas, PDRB ADHB tanpa memperhitungkan migas juga mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,74 triliun rupiah per tahun. PDRB ADHB tahun 2025 mencapai 11,11 triliun rupiah. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 0,89 triliun rupiah dari tahun 2024. Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 PDRB ADHB mengalami peningkatan sebesar 3,22 triliun rupiah.

Dari sisi pengeluaran perkembangan PDRB ADHB dengan migas selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Hingga akhir tahun 2025 PDRB menurut pengeluaran sebesar 12.720,91 milyar rupiah, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 9.431,39 milyar rupiah. Peningkatan ini mencerminkan arah ekonomi daerah yang positif yang secara dominan ditopang oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebagai penggerak terbesar yang tumbuh dari 4.894,82 milyar upiah pada tahun 2021 menjadi 6.210,46 milyar rupiah pada tahun 2025.

Selanjutnya dari sisi kemiskinan di Kota Lhokseumawe, jumlah penduduk miskin tahun 2025 sebanyak 19.90 ribu jiwa, turun dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 22,77 ribu jika. Tingkat kemiskinan Kota Lhoskeumawe tahun 2025 sebesar 9,01 persen turun sebanyak 1,43 poin jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan tahun 2024 sebesar 10,44%. Angka ini menjadikan Kota Lhokseumawe berada pada peringkat ketiga penduduk miskin terendah setelah Kota Langsa sebesar 8,59 persen dan Kota Banda Aceh sebesar 5,45 persen.

Sampai dengan Semester II Tahun 2026, data kemiskinan tingkat Kabupaten/Kota terbaru yang tersedia masih mengacu pada hasil pengukuran BPS Tahun 2025. BPS Provinsi Aceh telah merilis kondisi kemiskinan Maret 2026 pada Agustus 2026, tetapi publikasi tersebut hanya menyajikan angka tingkat provinsi dan klasifikasi perkotaan-perdesaan, belum menyajikan angka spesifik kabupaten / kota. Persentase penduduk miskin Aceh meningkat tipis dari 12,22 persen pada September 2025 menjadi 12,34 persen pada Maret 2026, sehingga perkembangan kemiskinan di Kota Lhokseumawe tetap menjadi perhatian utama dalam rangka menjaga tren penurunan yang telah dicapai.

Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Lhokseumawe sangat terlihat jika dibandingkan dengan data pengangguran di tingkat nasional maupun provinsi Aceh. Angka pengangguran Kota Lhokseumawe sebesar 8,24 persen masih berada di atas Tingkat Pengangguran Terbuka Aceh sebesar 5,64 persen dan Nasional sebesar 4,85 persen. Walaupun Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Lhokseumawe turun jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 8,47 persen, namun masih menempatkan Kota Lhokseumawe pada posisi Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi di Aceh.

Memasuki Semester II Tahun 2026, data ketenagakerjaan terbaru yang tersedia masih menunjukkan angka TPT tingkat Provinsi Aceh yaitu sebesar 5,89 persen pada Mei 2026, meningkat tipis dibandingkan Februari 2026. Angka TPT tingkat kabupaten/kota secara spesifik belum dirilis oleh BPS Provinsi Aceh.

3.1.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kota Lhokseumawe atas dasar harga berlaku (ADHB) selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Dari tahun 2021, PDRB meningkat sebesar 3,29 triliun rupiah menjadi 12,72 triliun rupiah pada tahun 2025. Sejalan dengan PDRB memperhitungkan migas, PDRB ADHB tanpa migas juga mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,74 triliun rupiah per thaun. PDRB ADHB tahun 2025 mencapai 11,11 triliun rupiah. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 0,89 triliun rupiah dari tahun 2024. Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 PDRB ADHB mengalami peningkatan sebesar 3,22 triliun rupiah.

Dalam perubahan nilai PDRB atas dasar harga berlaku masih terdapat pengaruh perubahan harga, sehingga untuk melihat perkembangan riil PDRB maka digunakan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010.

Gambar 3.9
PDRB ADHB Lhokseumawe Tahun 2021-2025
(triliun rupiah)

Sumber : PDRB Lhokseumawe (LU), BPS, Tahun 2026 (diolah)

Selanjutnya nilai PDRB ADHK Lhokseumawe tahun 2025 mencapai 8,40 triliun rupiah, mengalami peningkatan sebesar 1,24 triliun rupiah dari tahun 2021. PDRB ADHK tanpa migas pada tahun 2025 juga menunjukkan peningkatan sebesar 1,18 triliun rupiah dari sebesar 6,07 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 7,25 triliun rupiah pada tahun 2025.

Gambar 3.10
PDRB ADHK Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025
(triliun rupiah)

Sumber : PDRB Lhokseumawe (LU), BPS, Tahun 2026 (diolah)

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Sejak tahun 2021, struktur ekonomi Kota Lhokseumawe didominasi oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Peranan kategori ini pada tahun 2021 sebesar 21,35 persen menjadi 23,72 persen pada tahun 2025, mengalami peningkatan nilai peranan sebesar 2,37 persen.

Kategori dengan peranan kedua terbesar hingga akhir tahun 2025 adalah industri pengolahan sebesar 15,73 persen. Kategori konstruksi menempati urutan ketiga pada tahun 2025 dengan peranan sebesar 13,35 persen.

Kategori berikutnya yang cukup besar memberi kontribusi di tahun 2025 adalah kategori transportasi dan pergudangan serta kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dengan kontribusi kategori transportasi dan pergudangan sebesar 12,41 persen dan kontribusi kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 9,30 persen.

Gambar 3.11
Distribusi Persentase PDRB ADHB Lhokseumawe dengan Migas Tahun 2025 (persen)

Sumber : PDRB Lhokseumawe (LU), BPS, Tahun 2026 (diolah)

Jika dipisahkan industri migas dari PDRB maka semakin terlihatlah bahwa kategori yang dominan di Lhokseumawe yaitu kategori perdagangan, disusul kategori konstruksi, serta transportasi dan pergudangan.

Pada tahun 2025 dapat dilihat bahwa kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberi kontribusi mencapai 26,94 persen, lalu kategori konstruksi mencapai 15,02 persen, kategori transportasi dan pergudangan sebesar 14,39 persen. Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 10,78 persen, dan kategori pemerintahan mencapai 5,23 persen.

Gambar 3.12
Distribusi Persentase PDRB ADHB Lhokseumawe Tanpa Migas Tahun 2025 (persen)

Sumber : PDRB Lhokseumawe (LU), BPS, Tahun 2026 (diolah)

Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia Kantor Perwakilan Lhokseumawe, terdapat beberapa Komoditi/Produk/Jasa Unggulan (KPJU) yang berpotensi didorong untuk berkembang di Kota Lhokseumawe seperti toko sembako, jasa fotokopi, warung makan hingga wisata pantai dan kafe. Namun demikian masih terdapat tantangan dan isu yang perlu diatasi agar pengembangan KPJU tersebut dapat semakin terakselerasi. Disamping itu juga Kota Lhokseumawe memiliki potensi kuat dalam pengembangan sektor unggulan utama. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan pemerintah yaitu penguatan investasi dan modal kerja untuk hilirisasi komoditas; penciptaan iklim investasi yang mencakup berbagai dukungan kebijakan; penguatan klaster agroindustri yang didukung dengan pengembangan jaringan infrastruktur; penyediaan dan peningkatan sarana prasarana produksi, penanganan pasca panen, pengolahan maupun sistem logistik; fasilitasi pendampingan usaha; mendorong digitalisasi bagi UMKM; penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani; pelaksanaan dan peningkatan layanan sertifikasi produk hasil usaha; dan percepatan diseminasi teknologi dan peningkatan kapasitas UMKM dalam adopsi teknologi.

Dari sisi pengeluaran, perkembangan nilai PDRB ADHB dengan migas selama tahun 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2021, total PDRB sebesar 9,43 triliun rupiah dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai 12,72 triliun rupiah pada akhir tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan arah ekonomi daerah yang positif yang secara dominan ditopang oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebagai penggerak terbesar yang tumbuh dari 4,89 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 6,21 triliun rupiah pada tahun 2025.

Gambar 3.13
PDRB Lhokseumawe Menurut Pengeluaran Dengan Migas
Tahun 2021-2025 (triliun rupiah)

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2025 (diolah)

Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010) dengan migas juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun selama periode 2021-2025. Secara riil, skala ekonomi Lhokseumawe terus membesar yang ditandai dengan total PDRB bergerak yang ditandai dengan total PDRB bergerak naik dari 7,25 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 8,49 triliun rupiah pada tahun 2025 dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 309 milyar rupiah. Pertumbuhan berkelanjutan ini secara mayoritas ditopang oleh komponen oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang senantiasa meningkat setiap tahunnya, dari 3,54 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 4,03 triliun rupiah pada tahun 2025 meskipun komponen penggerak lainnya seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah menunjukkan pergerakan yang sedikit berfluktuasi.

Jika ditinjau dari sisi pengeluaran, struktur ekonomi Kota Lhokseumawe tahun 2021 dan 2025 didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 51,90 persen dan 48,48 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu lima tahun terakhir masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupkan komponen dengan distribusi terbesar

kedua yaitu sebesar 46,84 persen pada tahun 2021 dan 42,32 persen pada tahun 2021. Nilai PMTB menunjukkan penambahan barang modal di suatu wilayah dalam rangka peningkatan produktivitas.

Gambar 3.14
Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Tahun 2021 dan Tahun 2025

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2026 (diolah)

Konsumsi rumah tangga merupakan komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB Lhokseumawe. Nilai PDRB ADHB komponen konsumsi rumah tangga tahun 2025 sebesar 4,03 triliun rupiah mengalami peningkatan dari tahun 2024 dengan nilai PDRB ADHB sebesar 3,84 triliun rupiah.

Selanjutnya nilai komponen PMTB ADHB tahun 2025 sebesar 3,33 triliun rupiah, mengalami peningkatan dibanding tahun 2024 dengan nilainya sebesar 3,27 triliun rupiah. Secara umum dalam kurun waktu lima tahun terakhir, PMTB merupakan komponen dengan kontribusi terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga.

3.1.3.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi selama kurun waktu setahun.

Gambar 3.15
Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe
Tahun 2021-2025 (persen)

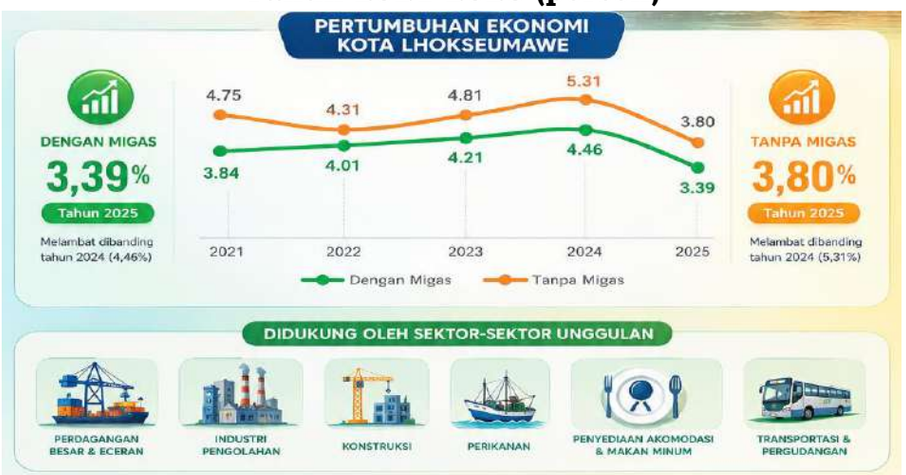

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2026, (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2021-2025 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi dengan migas tumbuh sebesar 3,84 persen mengalami peningkatan hingga tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 4,46 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2025 laju pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 3,39 persen sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas tahun 2025 tumbuh sebesar 3,80 persen.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe dengan migas selama lima tahun terakhir adalah sebesar 3,98 persen per tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan tanpa migas 4,60 persen. Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe dengan migas sebesar 3,39 persen mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,46 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas pada tahun 2025 tumbuh sebesar 3,80 persen mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,31 persen.

Pada tahun 2025 kategori yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah transportasi dan pergudangan (H) tumbuh sebesar 8,37 persen dan kategori yang mengalami pertumbuhan terkecil adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan (A) yang tumbuh sebesar -2,02 persen.

Gambar 3.16
Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2025 (persen)

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2026

Dari sisi pengeluaran, laju pertumbuhan masing-masing komponen PDRB ADHK tumbuh berfluktuasi selama tahun 2021-2025, komponen Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2025 tumbuh sebesar 4,95 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 2,12 persen. Komponen Konsumsi LNPRT pada tahun 2025 tumbuh sebesar 2,96 persen mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 14,32 persen. Komponen Konsumsi Pemerintah pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,47 persen juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 13,04 persen. Komponen PMTB pada tahun 2025 tumbuh sebesar 1,04 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh 7,30 persen..

Gambar 3.17
Laju Pertumbuhan PDRB Lhokseumawe ADHK
Menurut Pengeluaran Tahun 2021-2025 (persen)

	2021	2022	2023	2024	2025
Kons. RT	2.01	2.06	3.33	2.83	4.95
Kons. LNPRT	-2.41	4.31	7.5	14.32	2.96
Kons. Pemerintah	5.36	-5.46	1.43	13.04	5.47
PMTB	0.04	-0.13	0.06	7.3	1.04

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2026 (diolah)

Jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Aceh dan Nasional, pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe masih berada dibawah Aceh dan Nasional, dimana pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2024 sebesar 4,66 persen dan Nasional sebesar 5,02 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan intervensi pada berbagai sektor atau lapangan usaha untuk percepatan pertumbuhan ekonomi serta mencari lapangan usaha alternatif sebagai unggulan untuk pengembangan, serta terus melakukan inovasi melalui diversifikasi produk, ekspansi usaha, meningkatkan daya saing dan keberlanjutan.

3.1.3.3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di suatu daerah.

Gambar 3.18
PDRB Per Kapita Lhokseumawe ADHB Tahun 2021-2025
(juta rupiah)

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2025 (diolah)

Selama lima tahun terakhir (2021-2025) PDRB per kapita Lhokseumawe ADHB terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2025

PDRB per kapita Lhokseumawe sebesar 62,54 juta rupiah setahun, meningkat sebesar 3,42 juta rupiah dari tahun 2024. Sedangkan PDRB per kapita Lhokseumawe tanpa migas tahun 2025 adalah sebesar 54,64 juta rupiah setahun, meningkat sebesar 3,61 juta rupiah dari tahun 2024.

Di sisi PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB per kapita Lhokseumawe juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2025 PDRB per kapita Lhokseumawe ADHK dengan migas adalah sebesar 41,74 juta rupiah setahun, meningkat sebesar 0,77 juta rupiah dari tahun 2024. Sedangkan PDRB per kapita Lhokseumawe ADHK tanpa migas pada tahun 2025 adalah sebesar 35,66 juta rupiah setahun, meningkat sebesar 0,79 juta rupiah dari tahun 2024.

Gambar 3.19
PDRB Per Kapita Lhokseumawe ADHK Tahun 2021-2025
(juta rupiah)

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2026 (diolah)

Di sisi pengeluaran, nilai konsumsi rumah tangga per kapita maupun per-rumah tangga di Lhokseumawe selama kurun waktu 2021-2025 mengalami fluktuatif. Hal ini menunjukkan adanya perubahan daya beli penduduk yang juga indikasi adanya perubahan rata-rata pendapatan. Pada tahun 2025 terjadi peningkatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2024. Nilai konsumsi rumah tangga per kapita meningkat sebesar 4,59 juta rupiah selama kurun waktu 5 tahun, dari 25,94 juta rupiah di tahun 2021 menjadi 30,53 juta rupiah di tahun 2025.

Gambar 3.20
Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita ADHB
Tahun 2021-2025 (juta rupiah)

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2026, (diolah)

3.1.3.4. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Secara umum angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga dan perubahan nilai dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambalan keputusan. Peningkatan inflasi akan berdampak pada penurunan perkembangan ekonomi, dan secara umum akan menurunkan daya saing ekonomi. Dampak lain dari peningkatan inflasi ialah bertambahnya jumlah pengangguran, menurunnya pendapatan riil masyarakat, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang.

Pengendalian inflasi menjadi hal penting dalam upaya memberikan pondasi yang kuat pada perkembangan perekonomian. Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga daya beli masyarakat guna menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Anggaran pemerintah terus berperan meredam sebagian dampak inflasi akibat gejolak harga global serta fluktuasi harga akibat gangguan suplai. Selain itu pengendalian inflasi secara konsisten terus dilakukan melalui penguatan sinergi dengan Bank Indonesia di tingkat pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Strategi-strategi terus

ditempuh melalui kebijakan menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, menjadi dan mengawasi kelancaran distribusi, serta melakukan komunikasi efektif untuk menekan ekspektasi inflasi.

Hingga akhir Desember 2025 terjadi inflasi year on year (yoy) Kota Lhokseumawe sebesar 5,56%. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 10,19%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,1%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1%; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,84%; kelompok kesehatan sebesar 2,02%; kelompok transportasi sebesar 1,3%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 5,04%; kelompok pendidikan sebesar 1,08%; kelompok penyediaan makan dan minuman/restoran sebesar 5,26%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 11,99%. Sementara itu kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar (0,16%).

Gambar 3.21
Inflasi Nasional, Aceh, Lhokseumawe dan Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2025 (persen)

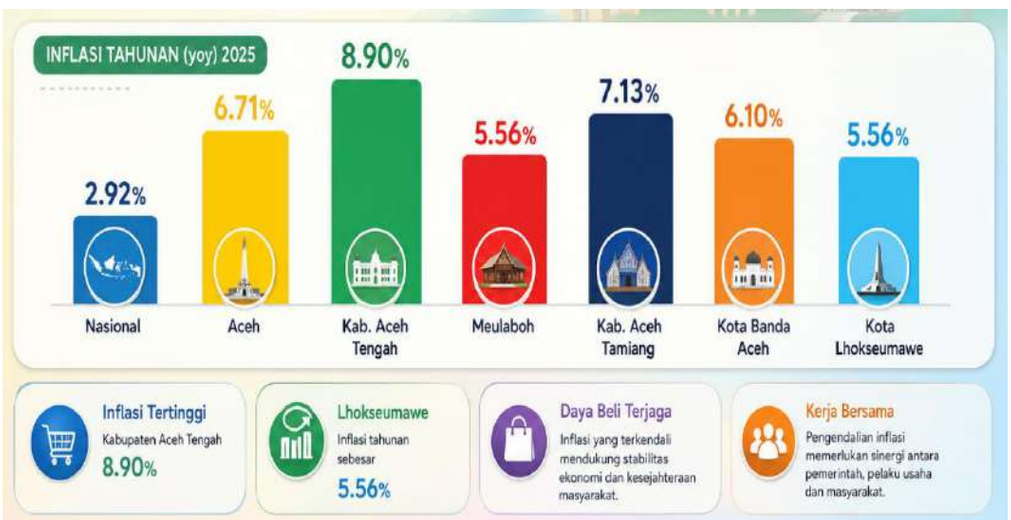

Sumber: https://aceh.bps.go.id/id (diolah)

Jika ditinjau inflasi pada 5 kabupaten/kota di Aceh pada Desember 2025, seluruhnya mengalami inflasi *year to year*. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupten Aceh Tengah sebesar 8,90% dengan IHK

sebesar 117,81 dan terendah terjadi di Meulaboh dan Kota Lhokseumawe sebesar 5,56% persen dengan IHK masing-masing sebesar 114,67 dan 112,20.

Gambar 3.22
Perkembangan Indeks Harga Konsumen
Kota Lhoskeumawe Bulan Juni Tahun 2026

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2026

Pada tahun 2026, bulan Juni terjadi inflasi year on year Kota Lhokseumawe sebesar 5,07 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,65. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok kesehatan, kelompok transportasi, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya, kelompok pendidikan, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran, dan

kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Tingkat inflasi *year to date (y-to-d)* Kota Lhokseumawe bulan Juni 2026 sebesar 1,29 persen. Sedangkan inflasi *month to month (t-to-m)* sebesar 0,28 persen.

Inflasi pada tahun 2026 diperkirakan akan terjaga stabil dan terkendali dalam rentang sasaran. Namun demikian, beberapa risiko yang dapat memberikan tekanan inflasi tetap perlu diwaspadai utamanya fluktuasi harga komoditas global maupun fenomena El Nino yang mendorong panen mundur. Beberapa strategi kebijakan dalam hal pengendalian inflasi yaitu kebijakan moneter *pro-stability* dan kebijakan lain yang *pro-growth*; serta optimalisasi anggaran baik APBN maupun APBD sebagai *shock absorber*. Selain itu juga hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menjaga inflasi agar tetap terkendali yaitu:

- Keterjangkauan harga: peningkatan pelaksanaan operasi pasar murah dan program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP); dan Bantuan pangan dan BLT Mitigasi Risiko Pangan.
- Ketersediaan pasokan: penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP); akses pembiayaan KUR dan kredit alsintan; serta penyediaan pupuk bersubsidi.
- Kelancaran distribusi: perluasan Kerjasama Antardaerah (KAD).
- Komunikasi efektif: pemantauan dan penyediaan data harga serta pasokan yang tepat waktu dan akuntabel; komunikasi upaya pengendalian inflasi termasuk pembinaan dari Kemendagri melalui Rakor Mingguan.

Selanjutnya langkah strategis untuk menjaga konsistensi inflasi dalam kisaran target nasional yaitu:

1. Melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten dengan upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
2. Mengendalikan inflasi kelompok *Volatile Food* agar dapat terkendali di bawah 5 persen, dengan fokus pada komoditas beras, aneka cabai, dan aneka bawang;
3. Menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan untuk memitigasi risiko jangka pendek, termasuk mengantisipasi

pergeseran musim panen dan peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);

4. Memperkuat ketahanan pangan melalui upaya peningkatan produktivitas dan hilirasasi pangan;
5. Memperkuat ketersediaan data pasokan pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi;
6. Memperkuat sinergi TPID-TPID antara lain melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP); serta
7. Memperkuat komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.

3.1.3.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Agenda nasional transformasi ekonomi memberikan dampak positif pada pencapaian tingkat pengangguran terbuka. Pada Agustus 2025, tingkat pengangguran terbuka nasional mengalam penurunan sebesar 0,06 persen dari 4,91 persen di tahun 2024 menjadi 4,85 persen. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2024 sebenyak 152,11 juta orang, naik 4,40 juta orang dibandingkan Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 1,15 persen point dibanding Agustus 2023.

Di Aceh penduduk usia kerja menurut hasil Sakernas bulan Agustus 2025 tercatat sekitar 4,16 juga orang. Bila dirinci menurut jenis kelamin, penduduk usia kerja perempuan tercatat sebanyak 2,08 juta orang atau 50,09 persen dari total penduduk usia kerja di Aceh. Jumlah tersebut lebih banyak bila dibandingkan dengan penduduk usia kerja laki-laki yang tercatat sebanyak 2,07 juta (49,91 persen). Hal ini berarti rasio jenis kelamin penduduk usia kerja sebesar 99,64 persen atau untuk setiap 100 penduduk usia kerja perempuan terdapat sekitar 99 penduduk usia kerja laki-laki.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Aceh pada Agustus 2025 tercatat sebesar 65,32 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 65 orang termasuk angkatan kerja, atau dapat diartikan dari 1.000 orang penduduk usia kerja sekitar 653 orang produktif secara ekonomi. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan

besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah/negara.

Jika dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka di Aceh pada Mei 2026 tercatat 5,89 persen terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi pada Februari 2026 yang tercatat sebesar 5,88 persen yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang yang menganggur. Bila dilihat menurut jenis kelamin, TPT laki-laki lebih rendah dari pada TPT perempuan, tercatat masing-masing sebesar 4,48 persen dan 7,52 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Lhokseumawe sangat terlihat jika dibandingkan dengan data pengangguran di tingkat nasional maupun provinsi Aceh. Angka pengangguran Kota Lhokseumawe masih berada di atas dua digit tahun 2021 sebesar 11,16 persen. Pada tahun 2022 TPT di Kota Lhokseumawe turun menjadi 9,15 persen, dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2025 menjadi 8,24 persen, akan tetapi penurunan tersebut masih menempatkan Kota Lhokseumawe pada posisi Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi di Aceh.

Untuk meningkatkan jumlah pekerja di bidang pekerjaan, pemerintah dapat berupaya untuk mendorong kewirausahaan dalam menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran; memberikan bantuan insentif untuk membuka dan melakukan formalisasi usaha; termasuk gerakan ekonomi kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan guna memperkuat produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah. Mendorong pertumbuhan wirausaha yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan dengan sinkronisasi program kewirausahaan.

3.1.3.6. Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan masih menjadi topik pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan di seluruh wilayah di Aceh tak terkecuali di Lhokseumawe. Dalam *Outcome Document Transforming Our World*: *The 2030 Agenda For Sustainable Development*, mengakhiri

kemiskinan juga menjadi tujuan pertama dari tujuh belas yang disepakati dalam SGDs.

Untuk mengukur tingkat kemiskinan, diperlukan batas/garis kemiskinan. Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan non makanan. Garis kemiskinan di Aceh (Perkotaan+Perdesaan) untuk makanan dan bukan makanan pada Maret 2025 sebesar Rp.676.247,-, meningkat dari tahun sebelumnya (Maret 2024) sebesar Rp.661.227,-. Garis kemiskinan di Kota Lhokseumawe pada Maret 2025 sebesar Rp.529.671,- meningkat dari tahun sebelumnya (Maret 2024) sebesar Rp.522.671,-.

Selanjutnya jika ditinjau dari jumlah penduduk miskin tahun 2025 (Maret) di Aceh berjumlah 704,69 ribu orang atau sebesar 12,33 persen. Angka ini turun dibanding Maret 2024 yang sebesar 804,53 ribu orang (14,23 persen). Selama periode Maret 2024-Maret 2025, penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 16,37 ribu orang, sedangkan di daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 83,47 ribu orang. Di Kota Lhokseumawe jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 berjumlah 19,9 ribu orang atau 9,01 persen. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan jumlah penduduk miskin pada September 2024 berjumlah 22,77 ribu orang atau mencapai 10,44 persen. Angka ini menjadikan Kota Lhokseumawe berada pada peringkat ketiga penduduk miskin terendah setelah Kota Langsa sebesar 8,59 persen dan Kota Banda Aceh sebesar 5,45 persen. Walaupun angka kemiskinan di Kota Lhokseumawe berada di bawah rata-rata kemiskinan Aceh (12,33 persen), namun angka kemiskinan di Kota Lhokseumawe masih berada di atas kemiskinan nasional yang hanya sebesar 8,25 persen.

Dari sisi kemiskinan ekstrem, berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Penyampaian Data Kemiskinan Ekstrem Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024-2025, persentase penduduk miskin ekstrem tahun 2025 di Kota Lhokseumawe sebesar 0,81 persen turun sebesar -0,29 persen jika dibandingkan tahun 2024 sebesar 1,10

persen. Penurunan tersebut tidak terlepas dari upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menangani kemiskinan ekstrem melalui belanja APBK, intervensi langsung bersama pemangku kepentingan terkait dalam memverifikasi data miskin ekstrem tersebut. Selain itu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem diantaranya:

a. Program Keluarga Harapan diprioritaskan di wilayah kantong kemiskinan;
b. Mengupayakan pertumbuhan inklusif;
c. Memanfaatkan program kesehatan untuk memecahkan masalah lokal;
d. Memanfaatkan program Pendidikan Aceh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
e. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat;
f. Meningkatkan efektivitas dana desa;
g. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan kemiskinan ekstrem di daerah.

3.1.3.7. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Perkembangan gini ratio Kota Lhokseumawe selama periode lima tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif. Angka gini ratio Kota Lhokseumawe tahun 2025 sebesar 0,344. Masih berada di atas angka gini ratio Aceh yang sebesar 0,274. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Lhokseumawe masih termasuk dalam "kategori rendah" karena berada pada < 0,4. Pada tahun 2022 gini ratio Kota Lhokseumawe sebesar 0,348, turun pada tahun 2023 menjadi 0,296. Seiring dengan pemulihan ekonomi pasca Covid-19 gini ratio Kota Lhokseumawe mengalami penurunan pada tahun 2023.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi Aceh, arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Lhokseumawe pada tahun 2026 yaitu "pertumbuhan dengan penguatan sektor ekonomi, sumber daya manusia, dan infrastruktur berkelanjutan".

Melalui arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut telah ditetapkan indikator makro ekonomi baik secara nasional, Aceh, dan Kota Lhokseumawe tahun 2026 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Makro Ekonomi Tahun 2026

No.	Indikator	Nasional (2026)	Aceh (2026)	Lhokseumawe			
				Target 2026	Capaian 2025	Capaian s.d Tw II - 2026	P-RKPK 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.80 – 6.30	4.5 – 5.1	4.43 – 4.80	3.39	Belum Ada Data	3.43 – 3.80
2	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	US$ 5.870	53.00 – 55.12	65.48	-	Belum Ada Data	65.48
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota	-	1.075	4.94	4.94	Belum Ada Data	4.95
4	IPM / Modal Manusia	0.57	75.50 – 76.50	81.95 – 82.30	-	Belum Ada Data	81.95 – 82.30
5	Tingkat Kemiskinan (%)	6.5 – 7.5	12-Oct	9.00 – 8.85	9.01	Belum Ada Data	9.00 – 8.85
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.44 – 4.96	5.12 – 5.47	7.75 – 7.85	8.24	Belum Ada Data	7.75 – 7.85
7	Rasio Gini	0.377 – 0.380	0.280 – 0.290	0.295 – 0.322	0.344	Belum Ada Data	0.295 – 0.322
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	73.35 – 73.85	71.54	Belum Ada Data	73.35 – 73.85

Sumber : RKP 2026, RKPA 2026, RPJMK Lhokseumawe 2025-2029 (diolah)

Dalam rangka pencapaian target perekonomian yang telah ditetapkan, maka secara garis besar kerangka kebijakan ekonomi Kota Lhokseumawe yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal dengan mendorong pelaku usaha untuk menciptakan produk yang berdaya saing dan berstandarisasi, serta menyediakan lokasi bagi UMKM untuk memasarkan produk melalui *event Ahad Festival* setiap minggu;
2. Penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui penyaluran bantuan yang tepat sasaran serta memberikan pelatihan ketenagakerjaan kepada warga miskin;
3. Menjaga keseimbangan inflasi melalui pelaksanaan Pasar Murah dan Pasar Tani untuk penyediaan bahan-bahan kebutuhan pokok yang terjangkau oleh masyarakat;
4. Melakukan Kerjasama Antar Daerah dalam rangka pengendalian inflasi dan pengendalian ketersediaan bahan pangan untuk kebutuhan pokok masyarakat;
5. Menjaga ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut perlu diwaspadai beberapa tantangan global dan nasional yang dihadapi oleh Kota Lhokseumawe, antara lain:

a. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi permintaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBP SDA Nonmigas;
b. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain: (1) belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurangnya efesiensinya belanja operasional;
c. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan;
d. Perubahan prilaku dan struktur perekonomian pascabencana hidrometeorologi, antara lain: perubahan bentuk rantai pasok; perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; perubahan tata kerja perusahaan dan pola prilaku masyarakat; serta percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi;
e. Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kota Lhokseumawe masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan air terutama air minum;
f. Melemahnya daya saing Kota Lhokseumawe seiring dengan belum adanya produk unggulan daerah, serta belum memiliki brand produk daerah yang bisa dijadikan unggulan;
g. Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UMKM di Kota Lhokseumawe melalui optimalisasi pengembangan perikanan, dan pengembangan inovasi daerah.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

a. Upaya percepatan pemulihan ekonomi yang diarahkan untuk mengoptimalkan peran UMKM, dan investasi pariwisata melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program

perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, pemulihan perdagangan, serta pembangunan pariwisata;

b. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik;
c. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan;
d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.
e. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM);
f. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis;
g. Pemanfaatan pendanaan dari berbagai sumber untuk pemulihan sarana prasarana dampak bencana hidrometeorologi, terutama infrastuktur pelayanan dasar.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Kota Lhokseumawe

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting. Hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa

dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik.

Prediksi kemampuan keuangan merupakan kapasitas keuangan yang bersifat indikatif, yaitu tidak statis dan disesuaikan dengan kondisi terkini pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Kebijakan Keuangan Kota Lhokseumawe diarahkan untuk mampu membiayai seluruh kebutuhan biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Kondisi keuangan daerah saat ini masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut mengharuskan pihak Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mengupayakan intensifikasi pemungutan pajak-pajak, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk mampu meningkatkan kemampuan pendapatan asli daerah. Pendapatan daerah dialokasikan dengan tetap memperhatikan karakteristik dari sumber-sumber pendapatan dalam rangka memaksimalkan penerimaan daerah.

Pemerintah Kota Lhokseumawe merencanakan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Tahun 2026 dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Nomor 900/1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 Dalam APBD Bagi Daerah Terdampak Bencana di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat; Penambahan subkegiatan yang merupakan penyesuaian dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Bagi Daerah Tertentu Di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.113.622.142.000,-; dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3/143/2026 tentang Penetapan Alokasi Penyesuaian Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2026; serta Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/530/2026 tentang Penetapan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026.

Selain itu perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 dilakukan karena adanya perubahan asumsi pendapatan, belanja, dan perubahan rencana Pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2025 yang harus digunakan pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.47.322.459.261,91. Perubahan rencana pendapatan disebabkan karena adanya perubahan alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan Pendapatan Transfer dari Provinsi. Perubahan rencana belanja daerah meliputi penyesuaian subkegiatan baru sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026, penambahan alokasi belanja maupun pergeseran anggaran baik antar belanja maupun antar program. Sedangkan perubahan rencana pembiayaan daerah meliputi perubahan penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari SiLPA Tahun Sebelumnya.

Target pendapatan, belanja dan pembiayaan Kota Lhokseumawe dalam RKPK mengalami perubahan. Berdasarkan pada analisis kondisi ekonomi daerah, tantangan dan prospek perekonomian daerah serta pencapaian target pada sumber-sumber pendapatan daerah, maka secara umum dapat diperkirakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan untuk membiayai pembangunan daerah.

Secara umum pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.137.331.435.501,- dari target Rp.692.756.169.636,- pada APBK 2026 atau naik sebesar 19,82 persen. Kenaikan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.535.703.501,-; Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.124.971.038.000,-, Pendapatan Transfer dari Provinsi bertambah sebesar Rp.10.724.694.000,- sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah bertambah sebesar Rp.1.100.000.000,-.

Dari sisi belanja daerah, pada tahun 2026 juga mengalami perubahan sebesar Rp.137.331.435.501,- dari target sebesar Rp.718.486.619.382,- menjadi Rp.877.410.064.399,- pada APBK Tahun 2026 atau naik sebesar 22,12 persen. Sedangkan Pembiayaan Daerah terjadi perubahan pada Penerimaan Pembiayaan yang berasal

dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya sebesar Rp.21.592.009.516,- atau naik sebesar 83,92 persen dari target pada APBK 2026 sebesar Rp.25.730.449.746,- menjadi Rp.47.322.459.262,-. Secara umum perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Gambaran Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026

NO.	URAIAN	RKPK 2026	APBK 2026	P-RKPK 2026	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**817,489,376,141**	**692,756,169,636**	**830,087,605,138**	**137,331,435,501**
1.1	Pendapatan Asli Daerah	80,802,475,448	85,778,987,685	86,314,691,187	535,703,501
1.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	690,777,280,000	565,559,789,000	690,530,827,000	124,971,038,000
1.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	31,895,671,958	27,403,444,216	38,128,138,216	10,724,694,000
1.4	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	14,013,948,735	14,013,948,735	15,113,948,735	1,100,000,000
	Jumlah Pendapatan	**817,489,376,141**	**692,756,169,636**	**830,087,605,138**	**137,331,435,501**
2	**BELANJA DAERAH**	**816,489,376,141**	**718,486,619,382**	**877,410,064,399**	**158,923,445,017**
2.1	Belanja Operasi	619,238,614,223	566,647,170,144	605,388,732,111	38,741,561,967
2.2	Belanja Modal	78,636,668,918	50,565,867,938	159,383,725,145	108,817,857,207
2.3	Belanja Tak Terduga	3,435,485,250	9,725,000,000	9,740,129,843	15,129,843
2.4	Belanja Transfer	115,178,607,750	91,548,581,300	102,897,477,300	11,348,896,000
	Jumlah Belanja	**816,489,376,141**	**718,486,619,382**	**877,410,064,399**	**158,923,445,017**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**1,000,000,000**	**(25,730,449,746)**	**(47,322,459,262)**	**(21,592,009,516)**
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**(1,000,000,000)**	**25,730,449,746**	**47,322,459,262**	**21,592,009,516**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	25,730,449,746	47,322,459,262	21,592,009,516
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	1,000,000,000	-	-	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-	-

Sumber: RKPK 2026, APBK 2026-BPKD Kota Lhokseumawe, SIPD-RI.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Kota Lhokseumawe

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan denga meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Daerah berasal dari: (1) Pendapatan Asli Daerah; (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe masih bertumpu pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mencapai 83,19 persen, Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar 4,59 persen, sedangkan PAD menyumbang sebesar 10,40 persen, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah menyumbang sebesar 1,82 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBK perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Seiring dengan pelaksanaan APBK tahun 2026, Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe yang ditargetkan sebesar Rp.692.756.169.636,-, sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp.235.917.118.703,- atau 34,05 persen. Capaian tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.16.149.093.507,- dengan capaian 18,83 persen, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.212.856.872.100,- dengan capaian 37,64 persen, sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah terealisasi sebesar Rp.3.000.000.000,- dengan capaian 10,95 persen, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terealiasi sebesar Rp.3.911.153.096,- atau sebesar 27,91 persen. Untuk mengetahui tentang rincian pendapatan Kota Lhokseumawe tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Tahun 2025 dan Target Perubahan Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2026

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2025	TAHUN 2026			
			RKPK 2026	APBK 2026	P-RKPK 2026	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**794,853,102,370**	**817,489,376,141**	**692,756,169,636**	**830,087,605,138**	**137,331,435,501**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**79,923,174,663**	**80,802,475,448**	**85,778,987,685**	**86,314,691,187**	**535,703,501**
1.1.1	Pajak Daerah	62,744,923,750	55,589,193,344	65,093,285,236	65,093,285,236	-
1.1.2	Retribusi Daerah	2,803,341,402	3,566,500,000	3,566,500,000	3,566,500,000	-
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,928,391,225	10,564,196,625	10,346,145,125	10,346,145,125	-
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	9,446,518,286	11,082,585,479	6,773,057,325	7,308,760,826	535,703,501
1.2	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**635,638,922,698**	**690,777,280,000**	**565,559,789,000**	**690,530,827,000**	**124,971,038,000**
1.2.1	Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dana Tambahan Infrastruktur	-	34,385,907,000	28,371,931,000	29,180,292,000	808,361,000
1.2.2	Dana Desa (DD)	52,451,077,418	60,814,139,000	52,863,492,000	52,863,492,000	-
1.2.3	Insentif Fiskal	7,385,226,000	7,385,226,000	-	-	-
1.2.4	Dana Bagi Hasil (DBH)	22,176,741,000	20,977,415,000	8,038,103,000	24,199,183,000	16,161,080,000
1.2.5	Dana Alokasi Umum (DAU)	453,532,225,134	463,323,358,000	379,925,153,000	487,926,750,000	108,001,597,000
1.2.6	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	6,821,282,450	6,934,508,000	-	-	-
1.2.7	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	93,272,370,696	96,956,727,000	96,361,110,000	96,361,110,000	-
1.3	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**28,333,259,165**	**31,895,671,958**	**27,403,444,216**	**38,128,138,216**	**10,724,694,000**
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (DBH)	25,958,051,440	30,298,976,958	24,403,444,216	24,403,444,216	-
1.3.2	Bantuan Keuangan Provinsi	2,375,207,725	1,596,695,000	3,000,000,000	13,724,694,000	10,724,694,000
1.4	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**50,957,745,844**	**14,013,948,735**	**14,013,948,735**	**15,113,948,735**	**1,100,000,000**
1.4.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	1,100,000,000	1,100,000,000
1.4.2	Dana Darurat	40,185,907,000	-	-	-	-
1.4.3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10,771,838,844	14,013,948,735	14,013,948,735	14,013,948,735	-
	JUMLAH PENDAPATAN	**794,853,102,370**	**817,489,376,141**	**692,756,169,636**	**830,087,605,138**	**137,331,435,501**

Sumber : LRA 2025 Audited, RKPK 2026, APBK 2026, BPKD Lhokseumawe, dan SIPD-RI Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 sebesar Rp.794.853.102.370,- yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.79.923.174.663,-; Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.635.638.922.698,- dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.28.333.259.165,- serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.50.957.745.844,-. Besaran realisasi pendapatan tahun 2025 relaltif lebih besar dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp.792.494.351.407,-. Secara umum kenaikan pendapatan Kota Lhokseumawe tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp.2.358.750.963,-.

Sedangkan Tahun 2026 pendapatan Kota Lhokseumawe pada RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp.817.489.376.141,-, namun saat penyusunan APBK Lhokseumawe Tahun 2026 pendapatan Kota Lhokseumawe ditetapkan sebesar Rp.692.756.169.636,- yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.85.778.987.685,-; Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.565.559.789.000,- Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.27.403.444.216,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.14.013.948.735,-. Pendapatan yang dianggarkan tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Seiring dengan pelaksanaan APBK Lhokseumawe Tahun 2026 pendapatan Kota Lhokseumawe mengalami perubahan menjadi Rp.830.057.605.138,- atau bertambah Rp.137.331.435.501,- dari target sebelumnya atau naik sebesar 19,82 persen. Kenaikan Pendapatan tahun 2026 tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024 Bagi Daerah Tertentu Di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3/143/2026 tentang Penetapan Alokasi

Penyesuaian Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.113.622.142.000,- serta Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.100.000.000,-. Selain itu juga terdapat penambahan pendapatan yang berasal dari pengembalian lebih bayar tahun 2025 berdasarkan hasil audit BPK RI.

Kenaikan pendapatan Kota Lhokseumawe tahun 2026 dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.535.703.501,- yang berasal dari pengembalian lebih bayar belanja pada tahun 2025 berdasarkan hasil audit BPK RI; dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan rincian dari Dana Otonomi Khusus Aceh sebesar Rp.808.361.000,- yang merupakan dana yang ditentukan penggunaannya untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana hidrometeorologi. Selanjutnya kenaikan dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.16.161.080.000,- serta Dana Alokasi Umum (DAU) yang penggunaannya diarahkan untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi sebesar Rp.108.001.597.000,-. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi bertambah sebesar Rp.10.724.694.000,- yang berasal dari Bantuan Keuangan Keuangan Khusus, dan Alokasi TDBH Migas, sedangkan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah Pusat sebesar Rp.1.100.000.000,-. Untuk lebih jelas mengenai rincian komponen perubahan pendapatan Kota Lhokseumawe tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Rincian Perubahan Komponen Pendapatan
Kota Lhokseumawe Tahun 2026

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
4	**PENDAPATAN DAERAH**			**137,331,435,501**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**			**535,703,501**
4.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	6,773,057,325	7,308,760,826	535,703,501
4.2.	**PENDAPATAN TRASFER**			**135,695,732,000**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**			**124,971,038,000**
4.2.01.03	**Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur**			**808,361,000**
	Dana Otonomi Khusus Aceh - Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	*21,428,526,018*	*22,196,469,018*	*767,943,000*

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
	Dana Otonomi Khusus Aceh - Pelaksanaan Keistimewaan Aceh	*1,418,596,550*	*1,459,014,550*	*40,418,000*
4.2.01.07	**Dana Bagi Hasil (DBH)**			**16,161,080,000**
	DBH PBB	*571,335,000*	*2,365,993,000*	*1,794,658,000*
	DBH PPh Pasal 21	*4,406,532,000*	*15,315,688,000*	*10,909,156,000*
	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	-	*314,873,000*	*314,873,000*
	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	*158,795,000*	*289,511,000*	*130,716,000*
	DBH SDA Minyak Bumi	*313,896,000*	*1,040,401,000*	*726,505,000*
	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	*5,339,000*	*13,704,000*	*8,365,000*
	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	*1,355,856,000*	*2,303,133,000*	*947,277,000*
	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalti	-	*1,139,996,000*	*1,139,996,000*
	DBH SDA Kehutanan - IIUPH	*2,768,000*	*4,690,000*	*1,922,000*
	DBH SDA Perikanan	*270,014,000*	*457,626,000*	*187,612,000*
4.2.01.08	**Dana Alokasi Umum (DAU)**			**108,001,597,000**
	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	*367,358,455,000*	*475,360,052,000*	*108,001,597,000*
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**			**10,724,694,000**
4.2.02.02	**Bantuan Keuangan**			**10,724,694,000**
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	*3,000,000,000*	*13,724,694,000*	*10,724,694,000*
4.3.	**LAIN-LAIN PD YANG SAH**			**1,100,000,000**
4.3.01.	**Pendapatan Hibah**			**1,100,000,000**
4.3.01.01	**Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat**			**1,100,000,000**
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	*1,100,000,000*	*1,100,000,000*
	TOTAL PENDAPATAN			**136,795,732,000**

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe, 2026

Pendapatan daerah yang telah ditargetkan harus dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang makin tinggi guna mendukung pendanaan pembangunan daerah. Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan penerimaan daerah, maka perlu adanya usaha meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau laba atas penyertaan modal pada BUMD serta lain-lain PAD yang sah, serta penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan penopang bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Arah kebijakan pendapatan daerah dalam rangka optimalisasi atas pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan sebagai berikut:

1. intensifikasi pajak dan retribusi daerah, ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta memperkuat basis pajak daerah dan retribusi daerah dengan cara sebagai berikut :
   a. melakukan pendekatan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. penyempurnaan landasan hukum serta melakukan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
   c. melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
   d. peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
   e. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit satuan kerja terkait; dan
   f. Peningkatan kualitas aparat pengelola pajak daerah dan retribusi daerah melakukan pendekatan
2. ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan potensi penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan menambah jumlah wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta memperkuat basis pajak daerah dan retribusi daerah. Secara umum proses ini dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut :
   a. menyelenggarakan sosialisasi dan pemberian penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
   b. melakukan pemutakhiran basis data pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;

c. melakukan pendataan ke seluruh objek pajak dan subjek pajak yang dapat dikenakan pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. pengkajian terhadap potensi penerimaan pajak daerah;
e. pemungutan terhadap jenis retribusi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
f. meningkatkan peran seluruh stakeholder yang terkait dengan penerimaan pajak daerah terutama PBB dan BPHTB.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah, kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan asli daerah melalui:

a. pemantauan pajak daerah yang merupakan monitoring secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak daerah berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti *tapping box* dan sejenisnya dengan tujuan antara lain:
   - Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak daerah;
   - Mempermudah Wajib Pajak Daerah dalam menghitung pajak yang harus disetorkan;
   - Meningkatkan efesiensi dan pemungutan pajak daerah;
   - Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak daerah;
   - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak daerah;
   - Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak daerah.
b. Pemberian *Reward*, antara lain:
   - Undian Berhadiah Pajak PBB bagi WP yang telah melunasi Pajak PBB sebelum jatuh tempo melalui non tunai (Action Bank Aceh);
   - Pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan;
   - Pemberian *doorprize*/souvenir bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada event-event yang digelar Pemerintah Kota Lhokseumawe.
c. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah;

d. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verfikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
e. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah.

Dalam rangka optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe, beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk peningkatan Pajak Daerah yaitu:

- Peningkatan promosi pariwisata dan kerjasama dengan industri perhotelan;
- Mengidentifikasi lebih lanjut terkait rumah kos maupun jasa penginapan lainnya yang berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah;
- Pemantauan pemasangan *tapping box*.
- Pendataan yang tepat dan akurat terhadap wajib pajak daerah;
- Melakukan audit rutin penggunaan *tapping box* oleh pihak independen;
- Meningkatkan pengawasan dan dukungan acara hiburan lokal;
- Pemantauan berkelanjutan untuk mengidentifikasi perubahan titik, jumlah dan jenis reklame;
- Melakukan audit menyeluruh terhadap ruang reklame yang ada di wilayah Kota Lhokseumawe;
- Memastikan bahwa semua iklan yang ada telah dikenai pajak dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Pembaharuan peraturan mengenai harga satuan listrik dan nilai jual tenaga listrik atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, dan menaikkan harga satuan listrik untuk klasifikasi industri;
- Menjalin dan menjaga komunikasi dengan baik dan keterbukaan informasi antara industri dan pemerintah;
- Melakukan pemeriksaan secara reguler terhadap perhitungan pajak konsumsi tenaga listrik dari sumber lain;
- Melakukan sosialisasi pajak, terutama pajak MBLB kepada objek pajak dan badan usaha untuk menyusun laporan keuangan yang

memuat penjualan MBLB, sehingga pemerintah dapat memungut pajak MBLB berdasarkan penjualan riil;
- Memastikan kebenaran jumlah pembayaran pajak parkir yang dilaporkan oleh penyelenggara parkir;
- Melakukan pemasangan meteran air pada usaha-usaha menggunakan air tanah, sehingga dasar pajak pajak sesuai dengan nilai perolehan air tanah dan pembagian kelompok yang tertera di dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 tahun 2017;
- Melakukan pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya strategi yang dapat ditempuh untuk pencapaian potensi Retribusi Daerah, yaitu:

- Melakukan diversifikasi layanan;
- Peningkatan kualitas layanan;
- Promosi pelayanan untuk objek retribusi baru;
- Melakukan Kemitraan dengan Pihak Lain;
- Penetapan tarif yang kompetitif dan transparan;
- Peningkatan infrastruktur dan fasilitas pelayanan kebersihan;
- Modernisasi dan integrasi pembayaran retribusi pelayanan kebersihan;
- Melakukan perluasan jangkauan layanan;
- Melakukan penertiban terhadap juru parkir liar dan titik parkir baru;
- Penataan tanda dan rambu parkir (*park signs*);
- Melakukan inovasi skema dan pembayaran parkir di tepi jalan umum;
- Meningkatkan penjualan di pasar melalui pendampingan, pemasaran dan penyediaan fasilitas penunjang yang memadai;
- Mempermudah proses pembayaran retribusi melalui pembayaran elektronik sekaligus mengurangi potensi praktik manipulasi;
- Melakukan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Pendapatan Transfer baik itu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Transfer Antar Daerah diarahkan pada program-program pembangunan yang mendorong perkembangan ekonomi daerah dalam upaya meningkatkan PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa strategi perlu ditempuh dalam hal dana perimbangan diantaranya :

- mengalokasikan dana berdasarkan prioritas pembangunan;
- meningkatkan kesadaran Perangkat Daerah untuk menyusun rencana anggaran yang efisien dan efektif.

Peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah dan menjaga kestabilan politik dan keamanan daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Tujuan dari analisis belanja daerah adalah untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Arah kebijakan belanja Kota Lhokseumawe diarahkan pada pelaksanaan program/kegiatan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran; dan peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan. Selanjutnya alokasi anggaran belanja harus tetap mengedepankan azas efesiensi dan efektivitas dengan mengacu pada penyusunan anggaran berbasar *money follow program*.

Kebijakan pengelolaan belanja Kota Lhokseumawe dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang direncanakan;
2. prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi kewenangan daerah;
3. setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. besaran plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja;
5. penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan perangkat daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra).

Dalam rangka mewujudkan sinergitas program dan kegiatan prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe, maka kebijakan belanja Kota Lhokseumawe diarahkan untuk :

a. pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
b. pemenuhan Dana Bagi Hasil Kepada Desa, serta pemenuhan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa;
c. mengusahakan alokasi belanja fungsi pendidikan sebesar 20% dan dukungan Standar Pelayanan Minimal;
d. mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memproritaskan pembangunan daerah;
e. pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi

sesusi dengan kebijakan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi.

Sesuai dengan arah kebijakan belanja daerah tersebut serta dengan mempertimbangkan realisasi kemampuan keuangan, belanja daerah yang ditargetkan tahun 2026 sebesar Rp.718.486.619.382,- telah dicapai sebesar Rp.162.293.286.130,- atau sebesar 22,59 persen sampai dengan pelaksanaan triwulan I tahun 2026. Realisasi ini berasal dari Belanja Operasi sebesar Rp.151.728.094.425,- atau 26,78 persen, dan Belanja Modal sebesar Rp.4.723.000.000,- atau 9,34 persen, Belanja Transfer sebesar Rp.5.842.191.705,- atau 6,38 persen, sedangkan Belanja Tak Terduga belum terealisasi. Untuk mengetahui gambaran belanja daerah Kota Lhokseumawe dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3.5
Realisasi Belanja Tahun 2025 dan Target Perubahan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2026

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2025	TAHUN 2026			
			RKPK 2026	APBK 2026	P-RKPK 2026	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
2	**BELANJA DAERAH**	**760,165,589,117**	**816,489,376,141**	**718,486,619,382**	**877,410,064,399**	**158,923,445,017**
2.1	**Belanja Operasi**	**579,206,471,002**	**619,238,614,223**	**566,647,170,144**	**605,388,732,111**	**38,741,561,967**
2.1.1	Belanja Pegawai	379,803,151,991	413,636,835,788	414,168,925,358	416,699,223,031	2,530,297,673
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	172,450,479,788	180,399,431,564	140,436,665,594	173,923,781,488	33,487,115,894
2.1.3	Belanja Subsidi	1,021,000,000	1,000,050,000	527,500,000	527,500,000	-
2.1.4	Belanja Hibah	12,236,172,770	11,498,765,637	10,524,646,692	12,870,126,692	2,345,480,000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	13,695,666,453	12,703,531,234	989,432,500	1,368,100,900	378,668,400
2.2	**Belanja Modal**	**74,558,049,324**	**78,636,668,918**	**50,565,867,938**	**159,383,725,145**	**108,817,857,207**
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25,979,699,630	7,687,560,918	4,994,380,846	10,548,420,995	5,554,040,149
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19,538,032,588	24,839,584,283	8,483,337,641	28,699,010,366	20,215,672,725
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24,008,203,106	43,068,298,167	34,612,626,901	117,660,771,234	83,048,144,333
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,032,114,000	3,041,225,550	2,475,522,550	2,475,522,550	-
2.3	**Belanja Tak Terduga**	**390,288,964**	**3,435,485,250**	**9,725,000,000**	**9,740,129,843**	**15,129,843**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	390,288,964	3,435,485,250	9,725,000,000	9,740,129,843	15,129,843
2.4	**Belanja Transfer**	**106,010,779,827**	**115,178,607,750**	**91,548,581,300**	**102,897,477,300**	**11,348,896,000**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	4,629,066,309	5,432,286,550	-	-	-
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	101,381,713,518	109,746,321,200	91,548,581,300	102,897,477,300	11,348,896,000
	JUMLAH BELANJA	**760,165,589,117**	**816,489,376,141**	**718,486,619,382**	**877,410,064,399**	**158,923,445,017**

Sumber : LRAPBK 2025 (Audited), RKPK 2026, APBK 2026, BPKD Lhokseumawe, dan SIPD-RI Tahun 2026.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, realisasi belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.760.165.589.117,-. Realisasi ini terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.579.206.471.002,- Belanja Modal sebesar Rp.74.558.049.324,- Belanja Tak Terduga sebesar Rp.390.288.964,- dan selanjutnya Belanja Transfer sebesar Rp.106.010.779.827,-.

Untuk Tahun Anggaran 2026 total belanja yang direncanakan pada RKPK Tahun 2026 sebesar Rp.816.489.376.141,-, namun pada saat pengesahan APBK Lhokseumawe Tahun 2026 belanja daerah dianggarkan dalam sebesar Rp.718.486.619.382,-. Seiring dengan pelaksanaan APBK Lhokseumawe Tahun 2026 telah dilaksanakan pergeseran anggaran sebanyak empat kali untuk mengakomodir pendapatan yang diterima berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2026 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3/143/2026, belanja daerah Kota Lhokseumawe mengalami kenaikan sebesar Rp.158.923.445.017,- menjadi Rp.877.410.064.399,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.605.388.732.111,-; naik sebesar Rp.38.741.561.957,- dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.566.647.170.144,-; Belanja Modal sebesar Rp.159.383.725.145,- bertambah sebesar Rp.108.817.857.207,- dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.50.565.867.938,-; Belanja Tak Terduga mengalami kenaikan sebesar Rp.15.129.843,- dari anggaran sebelumnya Rp.9.725.000.000,- menjadi Rp.9.740.129.843,-, sedangkan Belanja Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp.11.348.896.000,- dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.91.548.581.300,- menjadi Rp.102.897.477.300,-.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Kota Lhokseumawe

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat

berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pada tahun 2025 realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Lhokseumawe sebesar Rp.12.634.946.009- dan tidak ada Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Sedangkan pada APBK Tahun Anggaran 2026 Penerimaan Pembiayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp.25.730.449.746,- berubah menjadi Rp.47.322.459.262,- atau bertambah sebesar Rp.21.592.009.516,- serta tidak ada Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Adapun gambaran perubahan Pembiayaan Daerah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Realisasi Pembiayaan Tahun 2025 dan Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2026

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2025	TAHUN 2026			
			RKPK 2026	APBK 2026	P-RKPK 2026	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**12,634,946,009**	**(1,000,000,000)**	**25,730,449,746**	**47,322,459,262**	**21,592,009,516**
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**12,634,946,009**	**-**	**25,730,449,746**	**47,322,459,262**	**21,592,009,516**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	12,634,946,009	-	25,730,449,746	47,322,459,262	21,592,009,516
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**-**	**1,000,000,000**	**-**	**-**	**-**
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	-	1,000,000,000	-	-	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**47,322,459,261**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber : LRAPBK 2025 (Audited), RKPK 2026, APBK 2026, BPKD dan SIPD-RI 2026.

Berdasarkan hasil audit laporan keuangan tahun 2025 oleh BPK terdapat kenaikan dari Penerimaan Pembiayaan sebesar

Rp.21.592.009.516,- sehingga penerimaan pembiayaan menjadi Rp.47.322.459.262,-. Gambaran rincian komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
A.	***LABELLING***	**36,614,530,115**
I.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	171,968,445
II.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	2,656,731,495
1	*Tunjangan Profesi Guru PNSD*	*444,758,900*
2	*Tambahan Penghasilan Guru PNSD*	*46,999,891*
3	*Bantuan Operasional Kesehatan*	*1,031,246,010*
4	*BOP Museum*	*35,541,194*
5	*Bantuan Operasional Obat dan Makanan*	*156,292,448*
6	*Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)*	*534,637,162*
7	*PPA*	*206,768,370*
8	*PK2UMK*	*93,810,320*
9	*FPM*	*102,877,200*
10	*KPP*	*3,800,000*
III.	DAU Tambahan (50% THR dan Gaji 13 Guru Sertifikasi)	11,284,250,000
IV.	DAU Spesific Grant	8,035,323,186
V.	Dana Bagi Hasil Sawit	37,672,000
VI.	DBH-CHT	105,619,329
VII.	DBH-Migas	3,593,085
VIII.	OTSUS	1,434,324,804
IX.	Dana Insentif Fiskal	384,907,529
X.	Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bencana Hidrometeorologi	6,294,408,725
XI.	Bantuan Keuangan Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup	4,365,098
XII.	Zakat	2,424,142,884
XIII.	Infak	3,155,026,762
XIV.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	475,504,661
XV.	Kas Dana BOSP	15,661
XVI.	Kas Lainnya (Non Kapitasi JKN)	6,652,100
XVII.	Kas Dana BOK Puskesmas	140,024,351
B.	***NON LABELLING***	**10,707,929,147**
I.	Kas di Bendahara Pengeluaran	216,578,654
II.	Kas di Bendahara Penerimaan	171,876
III.	Kas Lainnya	4,075,504
IV.	Dana yang Ada di RKUD	10,487,103,112
	Total	**47,322,459,262**

Sumber: LRA Tahun Anggaran 2025 (Audited), BPKD Kota Lhokseumawe.

Sisa lebih anggaran sebagaimana tabel di atas berasal dari sumber pendanaan yang ditandai penggunaannya sebesar Rp.36.614.530.115,- dan sumber pendanaan yang tidak ditandai penggunaannya sebesar Rp.10.707.929.147,-. Penggunaan sisa lebih anggaran yang ditandai penggunaanya akan dialokasikan sesuai dengan ketentuan penandaan kegiatan, sedangkan sisa lebih anggaran yang berasal dari sumber pendanaan yang tidak ditandai penggunaannya akan digunakan untuk menganggarkan kembali kewajiban belanja yang belum dibayarkan pada tahun 2025 sebesar Rp.9.233.672.442,- dan belanja lainnya sebessar Rp.1.474.256.704,49 untuk belanja yang timbul pada P-RKPK Lhokseumawe Tahun 2026. Adapun uraian kewajiban belanja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Kewajiban Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2026

NO	URAIAN	KEWAJIBAN DALAM P-RKPK 2026	OPD TUJUAN
1	Belanja Tagihan Listrik 2025 (Mess Diklat Kota Lhokseumawe	56,934,670.00	PK
2	Belanja Modal Mebel - Pengadaan Mobileur Dinas (Lemari Arsip Besi, Kursi Pimpinan Rapat, Kursi Kepala Dinas, Kursi Kabid, Kursi Staff, Meja Staff, Kursi Serba Guna/Susun dan Kursi Anggota Rapat (PAD)	265,407,908.00	PK
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - Perencanaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (PAD)	4,850,000.00	PK
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - Pengawasan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (PAD)	3,207,000.00	PK
5	Belanja Komponen-Komponen Lainnya - Pengadaan Cetak Spanduk/Banner Sosialisasi Pendidikan dan Pengadaan Papan Struktur Dinas (PAD)	48,951,000.00	PK
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - Perencanaan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SMPN 13 Lhokseumawe (DAU)	24,575,400.00	PK
7	Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	22,151,300.00	DINKES
8	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat Snack Peringati Hari Hipertensi Sedunia (PAD) Pada Sub Kegiatan Pengelola Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10,500,000.00	DINKES

NO	URAIAN	KEWAJIBAN DALAM P-RKPK 2026	OPD TUJUAN
9	Pembayaran Lunas 100% Pekerjaan Pengadaan PMT Untuk Prevelansi TBC (PAD) Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuber kolosis	223,159,080.00	DINKES
10	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung -Bangunan Gedung Tempat Kerja -Bangunan Gedung Kantor Sub Kegiata Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya (DAU)	8,791,000.00	DINKES
11	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung -Bangunan Gedung Tempat Kerja -Bangunan Gedung Kantor Sub Kegiata Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya (DAU)	8,066,000.00	DINKES
12	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung -Bangunan Gedung Tempat Kerja -Bangunan Gedung Kantor Sub Kegiata Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya (DAU)	9,398,000.00	DINKES
13	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung -Bangunan Gedung Tempat Kerja -Bangunan Gedung Kantor Sub Kegiata Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya (DAU)	8,743,000.00	DINKES
14	Pembayaran Lunas 95%+5% Pekerjaan Rehab Pustu Gampong Pusong Lama Kec.Banda Sakti (PAD) pd Sub Kegiatan Rehabilitasi da Peme Faskes Lainnya	189,612,000.00	DINKES
15	Pembayaran Lunas 100%Pekerjaan Pengadaan PMT Untuk Anakm Gizi Kurang (PAD) Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	39,928,920.00	DINKES
16	Pembayaran Lunas 100% Pekerjan Pengawas Rehab Puskesmas Pembantu Dalam Wilayah Kecamatan Muara Satu (PAD) pd Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaa Fasilitas Kesehatan Lainnya	11,947,000.00	DINKES
17	Pembayaran Lunas 100% Pekerjaan Pengawas Rehab Postu Dalam Wilayah Kecamata Blang Mangat (DAU KESEHATAN,PAD,DBH-PR) pd Dub Keg Rehab dan Peme faskes Lainnya	27,914,000.00	DINKES
18	Pembayaran Lunas 100% Pekerjaan Pengawasan Rehab Puskesmas Pembantu Dalam Wilayah Kecamatan Muara Dua (DAU KESEHATAN, DBH-PR)pd Sub Keg Rehab dan Peme Faskes Lainnya	15,942,000.00	DINKES
19	Pembayaran Lunas 100% Pekerjaan Pengawas Rehab Puskesmas Pembantu Dalam Wilayah Kecamatan Bnada Sakti(DAU KESEHATAN,PAD) pd Sub Keg Rehab dan Peme FasKes Lainnya	27,917,000.00	DINKES
20	Pembayaran Lunas 100% Pekerjaan Pengad PMT Lansia (PAD) pd Sub Keg Pengelola Kekayaan Kesehatan Pada Lanjut Usia	119,436,000.00	DINKES
21	Pembayaran Lunas 100% Pekerjaan Pengadaan PMT Balita Bermasalah Gizi	159,998,730.00	DINKES

NO	URAIAN	KEWAJIBAN DALAM P-RKPK 2026	OPD TUJUAN
	Kurang (PAD) pd Sub Keg Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
22	Pembayaran Lunas 100% Pekerjaan Pengadaan PMT Ibu Hamil (PAD) pd Sub Keg Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	89,810,100.00	DINKES
23	Pembayaran Lunas 95%+5% Pekrj Pembangunan Rumah Gizi Gampong(RGG) Cut Mamplam (DBH-PR) pd Sub Keg Rehab dan Peme FasKes Lainnya	61,390,000.00	DINKES
24	Pembayaran Lunas 95%+5% Pekrj Pembangunan Rumah Gizi Gampong(RGG) Alue Lim (DBH-PR) pd Sub Keg Rehab dan Peme FasKes Lainnya	54,845,000.00	DINKES
25	Pembayaran Lunas 95%+5% Pekrj Pembangunan Rumah Gizi Gampong(RGG) Ujong Pacu (DBH-PR) pd Sub Keg Rehab dan Peme FasKes Lainnya Pem TCK14033/12/25	61,589,000.00	DINKES
26	Pembayaran Lunas 100% Pekrj Perenc Pembang Rumah Gizi Gampong(RGG) Cut Mamplam (DBH-PR) pd Sub Keg Rehab dan Peme FasKes Lainnya Pem	1,914,000.00	DINKES
27	Pembayaran Lunas 100% Pekrj Perenc Pembang Rumah Gizi Gampong(RGG) Ujong Pacu (DBH-PR) pd Sub Keg Rehab dan Peme FasKes Lainnya Pem	1,914,000.00	DINKES
28	Pembayaran Lunas 100% Pengawas Pembanguna Rumah Gizi Gampong(RGG) Cut Mamplam(PAD) pd Sub Keg rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,276,000.00	DINKES
29	Pembayaran Lunas 100% Pengawas Pembanguna Rumah Gizi Gampong(RGG) Ujong Pacu (PAD) pd Sub Keg rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,143,000.00	DINKES
30	Pembayaran Lunas 100% Pekerjaan Perencana Pembanguna Rumah Gizi Gampong(RGG) Alue Lim (PAD) pd Sub Keg rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,276,000.00	DINKES
31	Pembayaran Lunas 100% Pengawas Pembanguna Rumah Gizi Gampong(RGG) Alue Lim (PAD) pd Sub Keg rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,714,000.00	DINKES
32	Pembayaran Lunas (100%) Pekerjaan DED Pedestrian Jalan Merdeka dan Jalan Merdeka Timur(Paket BM-D.022),Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	298,701,000.00	PUPR
33	Pembayaran Lunas(100%) Pekerjaan Pengawasan Pemb Jalan Muara Satu,Blang Mangat,Muara Dua dan banda Sakti(Paket BM-S.005) Sumber Dana Pendapatan Bagihasil Pajak Rokok, Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya,dan PAD.	19,042,000.00	PUPR

NO	URAIAN	KEWAJIBAN DALAM P-RKPK 2026	OPD TUJUAN
34	Pembayaran Angsuran Ke-I(95%) dan Lunas (5%)Pekerjaan Pembangunan Jalan Tgk.Utoh Puteh Dsn.Tgk.Muhammad Idrus Gp.Jelekat Kec.Blang Mangat,Sumber Dana Opsen PKB.Kontrak No:602/001/SPK.BM/PL-DPPA/2025 Tanggal 25 November 2025	286,180,000.00	PUPR
35	Pembayaran Angsuran Ke - I (95%) dan Lunas (5%) Pekerjaan Pembangunan Jalan Cot Kumbang Gp. Jeulikat Kec. Blang Mangat Sumber Dana: Opsen PKB, Kontrak No : 602/005/SPK.BM/PL-DPPA/2025 Tanggal 28 November 2025	94,536,000.00	PUPR
36	Pembayaran Angsuran Ke - I (95%) dan Lunas (5%) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Lr. Pardede Gp. Kampung Jawa Kec. Banda Sakti. Sumber Dana: Opsen PKB. Kontrak No : 602/002/SPK.BM/PL-DPPA/2025 Tanggal 28 November 2025	94,519,000.00	PUPR
37	Pembayaran Angsuran Ke - I (95%) dan Lunas (5%) Pekerjaan Pembangunan Jalan Gp. Keude Aceh Kec. Banda Sakti. Sumber Dana: Opsen PKB. Kontrak No : 602/009/SPK.BM/PL-DPPA/2025 Tanggal 25 November 2025	189,653,000.00	PUPR
38	Pembayaran Angsuran Ke - I (95%) dan Lunas (5%) Pekerjaan Pembangunan Jalan Cot Lr. Tgk. Amad Dsn. Tanoh Lapang Gp. Ujong Blang Kec. Banda Sakti. Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD). Kontrak No : 602/006/SPK.BM/PL-DPPA/2025	47,276,000.00	PUPR
39	Pembayaran Angsuran Ke - I (95%) dan Lunas (5%) Pekerjaan Pembangunan Talud (Tebing) Penahan Tanah Bukit Dsn. Arongan Gp. Blang Pulo Kec. Muara Satu. Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kontrak No : 602/065/SPK.BM/PL-DPPA/2025	161,102,000.00	PUPR
40	Pembayaran Lunas (100%) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Kec. Banda Sakti, Muara Dua, dan Muara Satu (Paket BM - S.013), Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok. Kontrak No : 760/BM - S.013/SPK/PUPR/APBK/2025	13,701,000.00	PUPR
41	Pembayaran Angsuran Ke - I (95%) dan Lunas (5%) Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Jalan Lhok Itiek Dsn. Datok Gp. Jeulikat Kec. Blang Mangat Sumber Dana: Opsen PKB, Kontrak No : 602/004/SPK.BM/PL-DPPA/2025 Tanggal 28 November 2025	94,480,000.00	PUPR
42	Pembayaran Lunas (100%) Pekerjaan DED Penataan Tepi Sungai Cunda Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	99,870,000.00	PUPR
43	Pembayaran Lunas (100%) Pekerjaan Perencanaan Rehab Berat Kantor DPRK Lhokseumawe Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39,980,000.00	PUPR

NO	URAIAN	KEWAJIBAN DALAM P-RKPK 2026	OPD TUJUAN
44	Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Paving Block Gedung Ex. Kantor DPRK Aceh Utara Kec. Banda Sakti (S.011-CK),Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3,310,000.00	PUPR
45	Pembayaran Lunas (100%) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gapura Jalan Waduk Gp. Mon Geudong Kec. Banda Sakti (Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok) ,(S.014-CK)	1,120,000.00	PUPR
46	Pembayaran Lunas (100%) Pekerjaan Pengawasan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian (S.009-CK),Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7,550,000.00	PUPR
47	Pembayaran Lunas (100%) Pekerjaan Pengawasan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian (S.019-CK) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).	2,820,000.00	PUPR
48	Pembayaran Lunas (100%) Pekerjaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Mushalla Al - Hijrah Komplek Perkantoran PUPR dan BAPPEDA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),(S.004-CK)	3,750,000.00	PUPR
49	Pembayaran Angsuran Ke -I (95%) dan Lunas (5%) Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Mushalla Kp 3 Kec. Banda Sakti Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	93,900,000.00	PUPR
50	Pembayaran Angsuran Ke -I (95%) dan Lunas (5%) Pekerjaan] Lanjutan Pembangunan Mushalla Al - Hijrah Komplek Perkantoran PUPR dan BAPPEDA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	188,550,000.00	PUPR
51	Pembayaran Angsuran Ke -I (95%) dan Lunas (5%) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan / Rehab Meunasah Balee Quis Lr. Tenggiri Kp. Jawa Lama Kec. Banda Sakti Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	47,000,000.00	PUPR
52	Pembayaran Angsuran Ke-1 (95%) dan Lunas (5%) , Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor Gp. Pusong Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe (PAD), Kontrak Nomor : 602/008/SPK-SDA/APBK/2025 Tanggal 21 Juli 2025.	81,000,000.00	PUPR
53	Pemb. Lunas (100%) Perencanaan Survey Kondisi Jaringan Irigasi Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe (Paket :D.SDA-03) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) dan, Kontrak Nomor : 705/SDA-D.03/SPK/APBK/PUPR/2025 Tanggal 02 September 2025.	128,580,000.00	PUPR
54	Pemb.Lunas (100%) Perencanaan DED Master Design Penataan Sistem Jaringan Drainase Kota Lhokseumawe (Paket :D.SDA-01) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan, Kontrak Nomor : 705/SDA-D.03/SPK/APBK/PUPR/2025 Tanggal 02 September 2025.	298,657,000.00	PUPR

NO	URAIAN	KEWAJIBAN DALAM P-RKPK 2026	OPD TUJUAN
55	Pembayaran Angsuran Ke-1 (95%) dan Lunas (5%) , Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor Gp. Blang Pulo Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe .(PAD), Kontrak Nomor : 602/001/SPK-SDA/APBK-P/2025 Tanggal 02 Desember 2025	47,600,000.00	PUPR
56	Pemb.Lunas (100%) Pekerjaan Pengawasan Pemb. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Kec.Muara Satu Kota Lhokseumawe (Paket SDA-SP.01) (PAD), Kontrak Nmr : 760/SDA-SP.01/SPK/APBK-P/PUPR/2025 Tgl 02 Des 2025.	1,487,000.00	PUPR
57	Pemb.Lunas (100%) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Kec. Banda Sakti dan Muara Dua Kota Lhokseumawe (Paket SDA-SP.02) (PAD), Kontrak Nomor : 760/SDA-SP.02/SPK/APBK-P/PUPR/2025 Tanggal 02 Desember 2025	5,372,000.00	PUPR
58	Belanja Makan dan Minum Rapat	30,600,000.00	KESBANGPOL
59	Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu	15,840,000.00	KESBANGPOL
60	Belanja Makan dan Minum Rapat	24,150,000.00	KESBANGPOL
61	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10,000,000.00	KESBANGPOL
62	Belanja Modal Personal Computer	18,481,500.00	DPMPTSPTK
63	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	19,136,400.00	DPMPTSPTK
64	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Hose Use)	6,419,130.00	DPMPTSPTK
65	Pembayaran Lunas (95 dan 5%) Biaya Pekerjaan Paving Blok, Keperluan DKPPP Kota Lhokseumawe Tahun 2025,	13,299,000.00	DKPPP
66	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,387,200.00	DINAS PERTANAHAN
67	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,686,680.00	DINAS PERTANAHAN
68	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,053,600.00	DINAS PERTANAHAN
69	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5,481,000.00	DLH
70	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6,851,250.00	DLH
71	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	130,180,050.00	DLH
72	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung (Pembayaran Lunas 70% Pekerjaan Revitalisasi Sarana dan Prasarana pada TPA Alue Lim	252,282,100.00	DLH
73	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/hanggar(Pembayaran Lunas 100% Pengawasan Pembangunan Gedung penempatan Mesin di TPA	13,209,000.00	DLH
74	Belanja Publikasi Media	42,000,000.00	KOMINFO
75	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	278,340,000.00	DISPERINDAGKOP
76	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	4,440,000.00	DISPERINDAGKOP

NO	URAIAN	KEWAJIBAN DALAM P-RKPK 2026	OPD TUJUAN
77	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung -Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	46,850,000.00	DISPERINDAGKOP
78	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	4,490,000.00	DISPERINDAGKOP
79	Belanja Alat Pendingin	9,999,990.00	DISPERINDAGKOP
80	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Hose Use)	1,998,000.00	DISPERINDAGKOP
81	Belanja Modal Personal Computer	20,979,000.00	DISPERINDAGKOP
82	Belanja Modal Peralatan Computer Lainnya	6,999,660.00	DISPERINDAGKOP
83	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 2025	120,960.00	DISPORAPAR
84	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	151,200.00	DISPORAPAR
85	Belanja Sewa Hotel	45,840,000.00	SETDAKO
86	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	147,800,000.00	SETDAKO
87	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	116,400,000.00	SETDAKO
88	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	42,950,000.00	SETDAKO
89	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	176,100,000.00	SETDAKO
90	Belanja Modal Mebel	117,376,950.00	SETDAKO
91	Belanja Mopdal Alat Pendingin	89,688,000.00	SETDAKO
92	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedunh-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bagunan Gedung Kantor	88,092,000.00	SETDAKO
93	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4,000,000.00	SETDAKO
94	Belanja Jasa Tenaga Ahli	15,500,000.00	SETDAKO
95	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	277,344.00	SETDAKO
96	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,374,009.00	SETDAKO
97	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	656,191.00	SETDAKO
98	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,813,600.00	SETDAKO
99	Belanja Perjalana Dinas Dalam Kota	2,400,000.00	SETDAKO
100	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	127,973,000.00	SETDAKO
101	Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	69,900,000.00	SETWAN
102	Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	229,858,245.00	SETWAN
103	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi telepon,Air,dan Listrik	13,000,000.00	KEC. MUARA SATU
104	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	4,544,000.00	KEC. MUARA SATU
105	Belanja Modal Alat Pendingin	4,995,000.00	KEC. MUARA SATU
106	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	8,506,791.00	BPBD
107	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2,867,456.00	BPBD
108	Belanja Iuran Jamina hari Tua Bagi Non ASN	54,481,696.00	BPBD
109	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	13,600,000.00	INSPEKTORAT
110	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	11,900,000.00	INSPEKTORAT

NO	URAIAN	KEWAJIBAN DALAM P-RKPK 2026	OPD TUJUAN
111	Belanja Modal Personal Computer	26,950,000.00	INSPEKTORAT
112	Honorium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	62,500,000.00	INSPEKTORAT
113	Belanja Modal Taman	74,860,000.00	INSPEKTORAT
114	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	105,900,000.00	INSPEKTORAT
115	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	18,481,500.00	BAPPEDA
116	Belanja Modal Personal Computer	67,732,200.00	BAPPEDA
117	Belanja Modal Peralatan Computer	3,596,400.00	BAPPEDA
118	Pengawasan Pembuatan Kanopi Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3,000,000.00	BPKD
119	Belanja Perjalanan Dinas An.Mawardi	2,635,500.00	BPKD
120	Belanja Perjalanan Dinas An.Noval Andrian	2,973,000.00	BPKD
121	Belanja Perjalanan Dinas An.Iskandar	1,598,000.00	BPKD
122	BPJS	2,038,538,882.00	BPKD
123	Belanja Modal Personal Computer	18,870,000.00	BKPSDM
124	Belanja Modal Personal Computer	59,940,000.00	BKPSDM
125	Pembayaran Lunas 65% dan 5% Pembangunan Sarana dan Jaringan Telepon dan Server Jaringan Wifi Guna Ujian Berbasis Komputer Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Ulum Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah Tahun 2020 Keperluan DSIPD.	228,480,000.00	DSID
126	Pembayaran Biaya Pengawasan Pembangunan Sarana dan Jaringan Telepon dan Server Jaringan Wifi Guna Ujian Berbasis Komputer Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Ulum Tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah Keperluan DSIPD.	7,000,000.00	DSID
127	Pengadan laptop	23,865,000.00	DSID
128	Pengadaan AC	34,632,000.00	DSID
129	Pengadaan Sajadah	107,997,450.00	DSID
130	Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	34,970,000.00	MPU
131	Belanja Komponen- Komponen Lainnya	26,795,400.00	BAITUL MAL
	Total Pemenuhan Kewajiban berdasarkan data dari BPKD	**9,233,672,442.00**	

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe, 2026

Berdasarkan uraian Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diperoleh gambaran struktur Perubahan APBK Lhokseumawe Tahun 2026 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.9
Gambaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2026

NO.	URAIAN	TAHUN 2026			
		RKPK 2026	APBK 2026	P-RKPK 2026	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**817,489,376,141**	**692,756,169,636**	**830,087,605,138**	**137,331,435,501**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**80,802,475,448**	**85,778,987,685**	**86,314,691,187**	**535,703,501**
1.1.1	Pajak Daerah	55,589,193,344	65,093,285,236	65,093,285,236	-
1.1.2	Retribusi Daerah	3,566,500,000	3,566,500,000	3,566,500,000	-
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10,564,196,625	10,346,145,125	10,346,145,125	-
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	11,082,585,479	6,773,057,325	7,308,760,826	535,703,501
1.2	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**690,777,280,000**	**565,559,789,000**	**690,530,827,000**	**124,971,038,000**
1.2.1	Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dana Tambahan Infrastruktur	34,385,907,000	28,371,931,000	29,180,292,000	808,361,000
1.2.2	Dana Desa (DD)	60,814,139,000	52,863,492,000	52,863,492,000	-
1.2.3	Insentif Fiskal	7,385,226,000	-	-	-
1.2.4	Dana Bagi Hasil (DBH)	20,977,415,000	8,038,103,000	24,199,183,000	16,161,080,000
1.2.5	Dana Alokasi Umum (DAU)	463,323,358,000	379,925,153,000	487,926,750,000	108,001,597,000
1.2.6	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	6,934,508,000	-	-	-
1.2.7	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	96,956,727,000	96,361,110,000	96,361,110,000	-
1.3	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**31,895,671,958**	**27,403,444,216**	**38,128,138,216**	**10,724,694,000**
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (DBH)	30,298,976,958	24,403,444,216	24,403,444,216	-
1.3.2	Bantuan Keuangan Provinsi	1,596,695,000	3,000,000,000	13,724,694,000	10,724,694,000

NO.	URAIAN	TAHUN 2026			
		RKPK 2026	APBK 2026	P-RKPK 2026	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4
1.4	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**14,013,948,735**	**14,013,948,735**	**15,113,948,735**	**1,100,000,000**
1.4.1	Pendapatan Hibah	-	-	1,100,000,000	1,100,000,000
1.4.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.4.3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14,013,948,735	14,013,948,735	14,013,948,735	-
	JUMLAH PENDAPATAN	**817,489,376,141**	**692,756,169,636**	**830,087,605,138**	**137,331,435,501**
2	**BELANJA DAERAH**	**816,489,376,141**	**718,486,619,382**	**877,410,064,399**	**158,923,445,017**
2.1	**Belanja Operasi**	**619,238,614,223**	**566,647,170,144**	**605,388,732,111**	**38,741,561,967**
2.1.1	Belanja Pegawai	413,636,835,788	414,168,925,358	416,699,223,031	2,530,297,673
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180,399,431,564	140,436,665,594	173,923,781,488	33,487,115,894
2.1.3	Belanja Subsidi	1,000,050,000	527,500,000	527,500,000	-
2.1.4	Belanja Hibah	11,498,765,637	10,524,646,692	12,870,126,692	2,345,480,000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	12,703,531,234	989,432,500	1,368,100,900	378,668,400
2.2	**Belanja Modal**	**78,636,668,918**	**50,565,867,938**	**159,383,725,145**	**108,817,857,207**
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,687,560,918	4,994,380,846	10,548,420,995	5,554,040,149
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24,839,584,283	8,483,337,641	28,699,010,366	20,215,672,725
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	43,068,298,167	34,612,626,901	117,660,771,234	83,048,144,333
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,041,225,550	2,475,522,550	2,475,522,550	-

NO.	URAIAN	TAHUN 2026			
		RKPK 2026	APBK 2026	P-RKPK 2026	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4
2.3	**Belanja Tak Terduga**	**3,435,485,250**	**9,725,000,000**	**9,740,129,843**	**15,129,843**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	3,435,485,250	9,725,000,000	9,740,129,843	15,129,843
2.4	**Belanja Transfer**	**115,178,607,750**	**91,548,581,300**	**102,897,477,300**	**11,348,896,000**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	5,432,286,550	-	-	-
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	109,746,321,200	91,548,581,300	102,897,477,300	11,348,896,000
	JUMLAH BELANJA	**816,489,376,141**	**718,486,619,382**	**877,410,064,399**	**158,923,445,017**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**1,000,000,000**	**(25,730,449,746)**	**(47,322,459,262)**	**(21,592,009,516)**
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**(1,000,000,000)**	**25,730,449,746**	**47,322,459,262**	**21,592,009,516**
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**-**	**25,730,449,746**	**47,322,459,262**	**21,592,009,516**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	-	25,730,449,746	47,322,459,262	21,592,009,516
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**1,000,000,000**	**-**	**-**	**-**
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	1,000,000,000	-	-	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber : LRAPBK 2025 audited, RKPK 2026, APBK Tahun 2026, BPKD Lhokseumawe, dan SIPD-RI Tahun 2026

3.3. Dukungan Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP) dan Sumber Lainnya

TJSLP atau CSR merupakan suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Organisasi atau perusahaan sebagai suatu sistem diharapkan dapat memiliki tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Semakin besar suatu organisasi atau perusahaan tersebut maka semakin banyak pula tuntutan masyarakat terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL. TJSL ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan TJSL tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Dalam hal perseroan tidak melaksanakan TJSL maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 159 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa setiap pelaku usaha pertambangan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan di Aceh berkewajiban menyiapkan dana pengembangan masyarakarakat. Dana pengembangan masyarakat tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pelaku usaha yang besarnya paling sedikit 1 persen dari harga total produksi yang dijual setiap tahun. Rencana penggunaan dana pengembangan masyarakat guna membiayai program yang disusun bersama dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar kegiatan usaha dan masyarakat di tempat lain

serta mengikutsertakan pelaku usaha yang bersangkutan. Pembiayaan program pengembangan masyarakat dengan dana pengembangan masyarakat dikelola sendiri oleh pelaku usaha. Selanjutnya, pasal 9 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan TJSLP di Aceh, mengamanatkan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP, sementara itu perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya bukan di bidang dan/atau tidak berkaitan dengan sumber daya alam dapat melaksanakan TJSLP.

Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menetapkan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 223 Tahun 2021 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025, dan telah diperbaharui dengan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 100.3.3.3-34 Tahun 2026 tentang Penetapan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Lhokseumawe Periode 2025-2029. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe tersebut, terdapat 40 perusahaan yang termasuk dalam Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan Laporan Renja dan Realisasi Program TJSLP/CSR Tahun 2025 yang disampaikan oleh perusahaan, diketahui bahwa realisasi Renja TJSLP/CSR tahun 2025 mencapai 66,87 persen atau Rp.6,045,472,431.- dari alokasi Renja sebesar Rp.9,040,728,104.-. Terdapat 7 perusahaan dengan realiasi mencapai 100%, 4 perusahaan dengan realisasi antara 80%-99%, 3 perusahaan dengan realisasi antara 50%-79%, dan 1 perusahaan dengan realiasi dibawah 50%.

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi TJLSP/CSR Tahun 2025
Di Kota Lhokseumawe

No	Nama Perusahaan	Anggaran Renja (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	PT. Perta Arun Gas (PAG) Lhokseumawe	935,562,856	630,872,000	67.43%
2	PT Pertamina Hulu Energi (PHE) NSB- NSO Lhokseumawe	925,750,000	480,249,500	51.88%

No	Nama Perusahaan	Anggaran Renja (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
3	PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Persero	4,162,000,000	2,043,009,468	49.09%
4	PT. PELINDO I Canbang Lhokseumawe	327,250,000	327,250,000	100.00%
5	PT. Pertamina Prata Niaga Integrated Terminal Lhokseumawe	350,000,000	314,741,215	89.93%
6	Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Lhokseumawe	293,000,000	248,000,000	84.64%
7	PT. PLN Nusantara Power (PLN NP) Lhokseumawe	411,020,500	411,020,500	100.00%
8	PT. PLN (Persero) Lhokseumawe	947,896,096	947,896,096	100.00%
9	PT. Suriatama Mahkota Kencana Lhokseumawe	6,670,000	6,670,000	100.00%
10	PT. Wings Food Lhokseumawe (Aceh Distribusindo Raya)	73,733,951	43,733,951	59.31%
11	PT. Rumah Sakit Umum Bunga Melati Kota Lhokseumawe	22,380,000	22,380,000	100.00%
12	PT. Rumah Sakit Umum Sakinah Kota Lhokseumawe	86,472,000	86,472,000	100.00%
13	PT. Rumah Sakit Umum Arun Kota Lhokseumawe	275,756,701	275,756,701	100.00%
14	PT. Rumah Sakit Umum Metro Medical Center Lhokseumawe	54,000,000	48,000,000	88.89%
15	PT. Rumah Sakit Ibu dan Anak Abby Lhokseumawe	169,236,000	159,421,000	94.20%
	TOTAL	**9,040,728,104**	**6,045,472,431**	**66.87%**

Sumber: Laporan Renja TJLSP/CSR (Smt.I-2025), 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi program/kegiatan CSR Tahun 2025 sebagai berikut:

1. PT. Perta Arun Gas (PAG) Lhokseumawe tahun 2025 mencapai Rp.630.872.000,- yang terdiri dari 3 (tiga) program/kegiatan yang meliputi: Program Energi Bakti Charity sebesar Rp.471.372.000,-; Program Energi Hayati dan Penangkaran Rusa Totol sebesar Rp.39.500.000,-, dan Santunan Kepedulian Anak Yatim Lingkungan Desa Binaan sebesar Rp.120.000.000,-.
2. PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) NSB-NSO Lhokseumawe mencapai Rp.480.249.500,- yang terdiri atas 11 (sebelas) program/kegiatan yang meliputi: Program Beasiswa "NSO Scholarship" sebesar Rp.19.803.000; Kegiatan "Peulara" pada SMP Negeri 8 Lhokseumawe sebesar Rp.20.527.500,-; Peningkatan Kualitas Kesehatan Balita di Kecamatan Muara Satu sebesar Rp.59.409.000,-; Kegiatan Penyediaan MCK dan Sanitasi di Kecamatan Muara Satu sebagai program untuk dukungan

pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebesar Rp.33.005.000,-; Program Pendidikan "Youth Enterpreneur School" sebesar Rp.30.348.500,-; Program Pengembangan Budidaya Penggemukan Sapi sebesar Rp.24.633.000,-; Program Penghijauan Wilayah Operasional sebesar Rp.38.855.000,-; Program Bantuan Korban Bencana Alam sebesar Rp.30.348.500,-; Kegiatan Kebencanaan Inklusif (Sekolah Aman Bencana) sebesar Rp.30.626.000,-; Kajian Pemetaan Sosial, SROI, SE, IKM dan REA di Wilayah Operasi PHE NSO sebesar Rp.189.152.000,-; dan Kegiatan Penulisan Buku ISBN, Jurnal Nasional, dan Jurnal Internasional sebesar Rp.3.542.000,-.

3. PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Persero dengan realiasi mencapai Rp.2.043.009.468,- yang terdiri atas 20 (dua puluh) program / kegiatan meliputi: Program Tani Sejahtera sebesar Rp.61.730.000,- Bantuan Modal Usaha Pengembangan Ekonomi Masyarakat sebesar Rp.44.800.000,-; Bantuan Pengobatan bagi Masyarakat Kurang Mampu sebesar Rp.5.000.000,-; Program Penanganan dan Pencegahan Stunting sebesar Rp.18.000.000,-; Program Sekolah Adiwiyata sebesar Rp.24.500.000,-; Program Beasiswa Anak Asuh sebesar Rp.46.880.000,-; Program Pelatihan dan Ketrampilan "*Youth Enterpreneurship*" sebesar Rp.107.950.000,-; Program Binaan UMK sebesar Rp.87.117.750.000,-; Program *Local Bussines Development* sebesar Rp.57.123.018,-; Program Rumah Sehat Sederhana sebesar Rp.240.000.000,-; Program Sarana dan Prasarana Umum sebesar Rp.154.655.080,-; Program Bantuan Subsidi Listrik sebesar Rp.365.420.000,-; Kegiatan Bakti Sosial untuk Masyarakat Lingkungan Binaan Perusahaan sebesar Rp.63.050.000,-; Program Hari Besar Keagamaan sebesar Rp.208.050.000,-; Program *Create Share Value* sebesar Rp.75.282.620,-; Program Masyarakat Tanggap Bencana sebesar Rp.3.362.000,-; Program Relawan Bakti BUMN sebesar Rp.352.089.000,-; Program Pelestarian Alam Rp.36.500.000,-; dan Program Pembinaan Usaha Menengah Kecil Rp.75.000.000,-.
4. PT. PELINDO – I Cabang Lhokseumawe dengan realiasi mencapai Rp.327.250.000,- yang terdiri atas 6 program/kegiatan CSR yaitu

Pengadaan Kitab untuk Dayah sebesar Rp.200.000.000,-; Program Aksi Bersih Pantai dan Mewarnai sebesar Rp.20.000.000,-; Santunan Anak Yatim sebesar Rp.30.000.000,-; Kegiatan Pembagian Sembako untuk Masyarakat Kurang Mampu sebesar Rp.15.000.000,-; Kegiatan Berbagi Daging Qurban Rp.50.000.000,- dan Kegiatan Berbagi Takjil Bulan Ramadan Rp.12.250.000,-.

5. PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Lhokseumawe melaksanakan 3 (tiga) program/kegiatan CSR yang meliputi Program Gampong Tangguh Mandiri sebesar Rp.59.900.000,-; Program Gampong Berdikari sebesar Rp.115.950.000,-; dan Program Eduecowisata sebesar Rp.138.891.215,-.
6. Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Lhokseumawe melaksanakan program/kegiatan CSR yang terdiri atas Santunan Anak Yatih sebesar Rp.200.000.000,-; Program Penyaluran Sembako sebesar Rp.32.000.000,-; dan Program Penyaluran Zakat Rp.16.000.000,-.
7. PT. PLN Nusantara Power Lhokseumawe melaksanakan 19 (sembilan belas) program/kegiatan CSR dengan realisasi anggaran sebesar Rp.411.020.500,- yang terdiri atas Bantuan Pelaksanaan Turnamen Volly Bantuan turnamen Voly BPSI; CSR Pelaksannaan Natal Gabungan TNI/POLRI; Bantuan Acara Syukuran KPA Cot Kupula; Bantuan Operasional Balai Pengajian Dususn C Gp Meria Paloh; Bantuan Maulid Lembaga Al-Shaleha; Bantuan Pembangunan Kantor Aliansi Jurnalis Independen; Bantuan Baju Jersey Sepak Bola SSB Paloh Academy; Paket Sembako Murah Ramadan Berkah; Bantuan santunan anak yatim Gp. Meria Paloh; Bantuan santunan anak yatim Batuphat Timur; Bantuan Material Perbaikan Jalan Desa; Bantuan Perbaikan Jalan Desa; Bantuan Khatam Alquran dan Santuan Anak Yatim Desa Padang Sakti; Material Pembangunan Doormeers Pemuda Paloh Mandiri; Sponsor Tim Teknis Polres Lhokseumawe; Sponsor Badminton Kalpores Cup HUT Bhayangkara; Pengadaan Hewan Qurban; Sponsor Keikutsertaan Paloh Academi pada Ajang LSI; dan

Bantuan Khatam Alquran dan Santuan Anak Yatim Desa Meuria Paloh.

8. PT. PLN (Persero) Lhokseumawe melaksanakan program/kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.947.896.096,- meliputi tiga program/kegiatan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sampah sebesar Rp.353.644.080,-; Program UMKM Lhokseumawe sebesar Rp.569.612.016,-, dan Bantuan Listrik Gratis Rp.24.640.000,-.
9. PT. Suriatama Mahkota Kencana Lhokseumawe melaksanakan satu program/kegiatan CSR berupa Bantuan Beasiswa sebesar Rp.6.670.000,-.
10. PT. Wings Food Lhokseumawe (Aceh Distribusindo Raya) melaksanakan 6 program/kegiatan CSR dengan realisasi mencapai Rp.43.733.951,- yang meliputi: Program Pemberdayaan Ekonomi di Kecamatan Blang Mangat sebesar Rp.30.000.000,-; Bantuan Korban Banjir sebesar Rp.2.756.875,-; Program Pencegahan Stunting sebesar Rp.2.679.500,-; Program Hari Raya Idul Adha sebesar Rp.4.460.000,-; Bantuan Masjid Babul Jannah sebesar Rp.588.552,- dan Donor Darah Suzuya Bireuen dan Lhokseumawe sebesar Rp.3.249.024,-.
11. PT. Rumah Sakit Umum Bunga Melati Lhokseumawe melaksanakan tiga program/kegiatan CSR dengan realisasi sebesar Rp.22.380.000,- yang meliputi Bantuan Keagamaan sebesar Rp.7.000.000,-; Pembayaran sebesar Rp.12.500.000,- dan Program Gerakan Orang Tua Asuh sebesar Rp.2.880.000,-.
12. PT. Rumah Sakit Umum Sakinah Lhokseumawe melaksanakan dua program/kegiatan CSR dengan realisasi Rp.86.472.000,- yang terdiri atas Bantuan untuk Masjid sebesar Rp.72.000.000,- dan Bantuan untuk Meunasah sebesar Rp.14.472.000,-.
13. PT. Rumah Sakit Umum Arun Lhokseumawe melaksanakan program/kegiatan CSR dengan realisasi sebesar Rp.275.756.701,- yang terdiri atas 11 program/kegiatan meliputi; Pemeriksaan Kesehatan Gratis Ke Desa-desa; Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dalam Rangka Pembagian sembako; Kegiatan Donor darah dalam rangka donor darah sedunia; Medical Check Up Mahasiswa; Kegiatan Paket Ramadan; Bantuan Korban Kebakaran; Bantuan

Becak Gratis; Bantuan Ambulance Gratis; Bantuan Makanan Pendamping Pasien; Pelayanan Rawat Inap Gratis pada Pasien Kecelakaan, Korban Pengeroyokan, dll; dan Promosi Kesehatan Tentang Pencegahan Penyakit Ginjal Pada Remaja.

14. PT. Rumah Sakit Umum Metro Medical Center Lhokseumawe melaksanakan 6 program/kegiatan CSR dengan realisasi mencapai Rp.48.000.000,- yang meliputi program/kegiatan: Pembagian Susu Gratis; Partisipasi untuk Keude Cunda; Sumbangan Anak Yatim; Sumbangan Keagamaan; Bantuan Hewan Qurban, dan Sumbangan Keude Cunda.
15. PT. Rumah Sakit Ibu dan Anak Abby Lhokseumawe melaksanakan empat program/kegiatan dengan realisasi Rp.159.421.000,- meliputi program/kegiatan Penyediaan MCK di Kecamatan Muara Dua yang merupakan program untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dengan anggaran sebesar Rp.147.000.000,-; Kegiatan Sponsorship Runspeed sebesar Rp.1.000.000,-; Bantuan Token Listrik Meunasah Lancang Garam sebesar Rp.7.021.000,-; Bantuan Kegiatan Keagamaan sebesar Rp.4.400.000,-.

Selain pendanaan dari program CSR perusahaan, Pemerintah Kota Lhokseumawe juga mendapat dukungan pendanaan pembangunan rumah layak huni type 36 dari Islamic Relief dengan skema *cost sharing* dengan Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Adapun besaran *cost sharing* yaitu Rp.65.000.000,-/unit oleh Islamic Relief dan Rp.25.000.000,-/unit dari Baitul Mal Kota Lhokseumawe, sehingga anggaran untuk satu unit rumah sebesar Rp.90.000.000,-. Pada tahun 2025 Islamic Relief dan Baitul Mal Kota Lhokseumawe membangun rumah layak huni sebanyak 50 Unit yang tersebar di empat kecamatan Kota Lhokseumawe dengan total anggaran *sharing* dari Islamic Relief sebesar Rp.3.250.000.000,- dan Baitul Mal Kota Lhokseumawe sebesar Rp.1.250.000.000,-. Adapun rincian penerima bantuan rumah layak huni tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.11
Pembangunan Rumah Layak Huni Islamic Relief dan Baitul Mal
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	No. Rmh	Nama RHs	Desa / Gampong	Pendanaan Islamic Relief	Pendanaan Baitul Mal	Total Pendanaan
A.	**Kecamatan Muara Satu**					
1	278	Abdullah Yahya / Syamsiah	Ujong Pacu	65,000,000	25,000,000	90,000,000
2	279	Tarmizi / Nurazizah	Paloh Punti	65,000,000	25,000,000	90,000,000
3	280	Saiful Ibrahim / Irmawati	Paloh Punti	65,000,000	25,000,000	90,000,000
4	281	Suryani	Paloh Punti	65,000,000	25,000,000	90,000,000
5	282	Safwan Abdullah/ Lindawati	Paloh Punti	65,000,000	25,000,000	90,000,000
6	283	Nurlaili	Paloh Punti	65,000,000	25,000,000	90,000,000
7	284	Muhammaddi / Nurmasyitah	Cot Trieng	65,000,000	25,000,000	90,000,000
B.	**Kecamatran Muara Dua**					
8	285	Muhammad Subhan / Fifi Dian Mayasari	Panggoi	65,000,000	25,000,000	90,000,000
9	286	Mariana	Paya Punteuet	65,000,000	25,000,000	90,000,000
10	287	M Ali / Nurhadijah	Paya Bili	65,000,000	25,000,000	90,000,000
11	288	T Samsul Bahri / Suryanti	Paya Bili	65,000,000	25,000,000	90,000,000
12	289	Zul Fahmi / Juliana Yacob	Paya Bili	65,000,000	25,000,000	90,000,000
13	290	Mustafa / Intan Wahyuni	Meunasah Alue	65,000,000	25,000,000	90,000,000
14	291	Abdurrahman / Fitriani	Meunasah Alue	65,000,000	25,000,000	90,000,000
15	292	Rohani	Meuria Paloh	65,000,000	25,000,000	90,000,000
16	293	Abubakar A Wahab / Syamsiah	Lhok Mon Puteh	65,000,000	25,000,000	90,000,000
17	294	Mahliadi / Putri Sakinah	Lhok Mon Puteh	65,000,000	25,000,000	90,000,000
18	295	Husaini Jalil / Rukayah	Cot Girek Kandang	65,000,000	25,000,000	90,000,000
19	296	Nurbaiti	Cot Girek Kandang	65,000,000	25,000,000	90,000,000
20	297	Summiati	Cot Girek Kandang	65,000,000	25,000,000	90,000,000
21	298	Lailawati	Cot Girek Kandang	65,000,000	25,000,000	90,000,000
22	299	Yusniar	Cot Girek Kandang	65,000,000	25,000,000	90,000,000
23	300	Abdurrahman Husen / Juariah Hanafiah	Blang Crum	65,000,000	25,000,000	90,000,000
24	301	Nasruddin / Nurhalimah	Blang Crum	65,000,000	25,000,000	90,000,000
25	302	Al Rizal / Evayani	Blang Crum	65,000,000	25,000,000	90,000,000
26	303	Fakhrurazi / Griayana M Gade	Meunasah Blang	65,000,000	25,000,000	90,000,000
27	304	Nuriyanti	Meunasah Blang	65,000,000	25,000,000	90,000,000
28	305	M Ali Usman / Mardiah	Alue Awe	65,000,000	25,000,000	90,000,000
29	306	Zakaria / Tilatifah	Cut Mamplam	65,000,000	25,000,000	90,000,000
C.	**Kecamatan Blang Mangat**					
30	307	Suryadi / Riniati	Seuneubok	65,000,000	25,000,000	90,000,000

No	No. Rmh	Nama RHs	Desa / Gampong	Pendanaan Islamic Relief	Pendanaan Baitul Mal	Total Pendanaan
31	308	M Yusuf / Ti Rahmah	Seuneubok	65,000,000	25,000,000	90,000,000
32	309	Nafsiah	Seuneubok	65,000,000	25,000,000	90,000,000
33	310	Safari / Yusra	Seuneubok	65,000,000	25,000,000	90,000,000
34	311	Asnawi / Raliah Abdullah	Blang Weu Panjo	65,000,000	25,000,000	90,000,000
35	312	Ibrahim Umar / Rohani	Blang Weu Panjo	65,000,000	25,000,000	90,000,000
36	313	Fakhruddin / Sapiah	Blang Weu Baroh	65,000,000	25,000,000	90,000,000
37	314	Kasrina Abdullah	Jeulikat	65,000,000	25,000,000	90,000,000
38	315	Syaifullah / Nazarni	Jeulikat	65,000,000	25,000,000	90,000,000
39	316	Muliani	Jeulikat	65,000,000	25,000,000	90,000,000
40	317	Mukri / Habibah	Jeulikat	65,000,000	25,000,000	90,000,000
41	318	Mukhtaruddin Adam / Rahmani	Jeulikat	65,000,000	25,000,000	90,000,000
42	319	Fakhrurrazi / Nuraina	Mesjid Punteueut	65,000,000	25,000,000	90,000,000
43	320	Muhammad Nasir / Hayatun Nufus	Hagu Barat Laut	65,000,000	25,000,000	90,000,000
44	321	Asnawi Taher	Kuala	65,000,000	25,000,000	90,000,000
D.	**Kecamatan Banda Sakti**					
45	322	Asnawi / Jumiati Syafruddin	Uteun Bayi	65,000,000	25,000,000	90,000,000
46	323	M Jamil / Nurmasyitah	Uteun Bayi	65,000,000	25,000,000	90,000,000
47	324	Irwandi / Nurhayati Ismail	Ujong Blang	65,000,000	25,000,000	90,000,000
48	325	Sofyan Samsul Bahri / Nurhayani	Ujong Blang	65,000,000	25,000,000	90,000,000
49	326	Dedi / Lina Mariana	Blang Cut	65,000,000	25,000,000	90,000,000
50	327	Iskandar / Julidar	Hagu Teungoh	65,000,000	25,000,000	90,000,000
		TOTAL		**3,250,000,000**	**1,250,000,000**	**4,500,000,000**

Sumber: Baitul Mal Kota Lhokseumawe, 2026

Selanjutnya untuk tahun 2026 akan dibangun kembali rumah layak huni di Kota Lhokseumawe sebanyak 20 unit yang tersebar di empat kecamatan Kota Lhokseumawe dengan skema *cost sharing* Islamic Relief sebesar Rp.1.300.000.000,- dan Baitul Mal Kota Lhokseumawe sebesar Rp.500.000.000,-. Adapun informasi pembangunan rumah layak huni tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 3.12
Pembangunan Rumah Layak Huni Islamic Relief dan Baitul Mal Kota Lhokseumawe Tahun 2026

No. Urut	No. Rumah	Nama RHs	Desa/Gampong	Kecamatan
1	337	Ramli / Tinauyah	Alue Lim	Blang Mangat
2	338	Hanisah	Alue Lim	Blang Mangat
3	339	Muhammad Nasir / Nuriah Hasbi	Alue Lim	Blang Mangat

No. Urut	No. Rumah	Nama RHs	Desa/Gampong	Kecamatan
4	340	Nurjannah	Alue Lim	Blang Mangat
5	341	Zalikha	Blang Buloh	Blang Mangat
6	342	Darkasyi / Marliah	Mane Kareung	Blang Mangat
7	343	Zulkifli / Ainul Mardhiah	Asan Kareung	Blang Mangat
8	344	Sarmilawati / Hendra Saputra	Asan Kareung	Blang Mangat
9	345	M Thaib Ali / Mulyani	Asan Kareung	Blang Mangat
10	346	Amri Hanafiah / Nurjannah Rasyid	Rayek Kareung	Blang Mangat
11	347	Saian / Juliani	Rayek Kareung	Blang Mangat
12	348	Samsul Bahri / Nurazizah	Blang Crum	Muara Dua
13	349	Eliassyak / Mutia	Blang Weu Panjo	Blang Mangat
14	350	M Iqbal /Rahmawati	Meuria Paloh	Muara Satu
15	351	Khairul Amri / Fitriani	Padang Sakti	Muara Satu
16	352	Sulaiman / Linawati	Cot Trieng	Muara Satu
17	353	Abdullah Ismail / Yusrawati	Cot Trieng	Muara Satu
18	354	Teuku Agus / Rohani	Ujung Pacu	Muara Satu
19	355	Nuriman Lamsyah / Nurmala	Ujung Pacu	Muara Satu
20	356	M. Isa / Nurlinawati	Ujung Pacu	Muara Satu

Sumber: Baitul Mal Kota Lhokseumawe, 2026

Gambar 3.23
Informasi Sebaran Pembangunan Rumah Layak Huni
Kota Lhokseumawe Tahun 2025 dan 2026

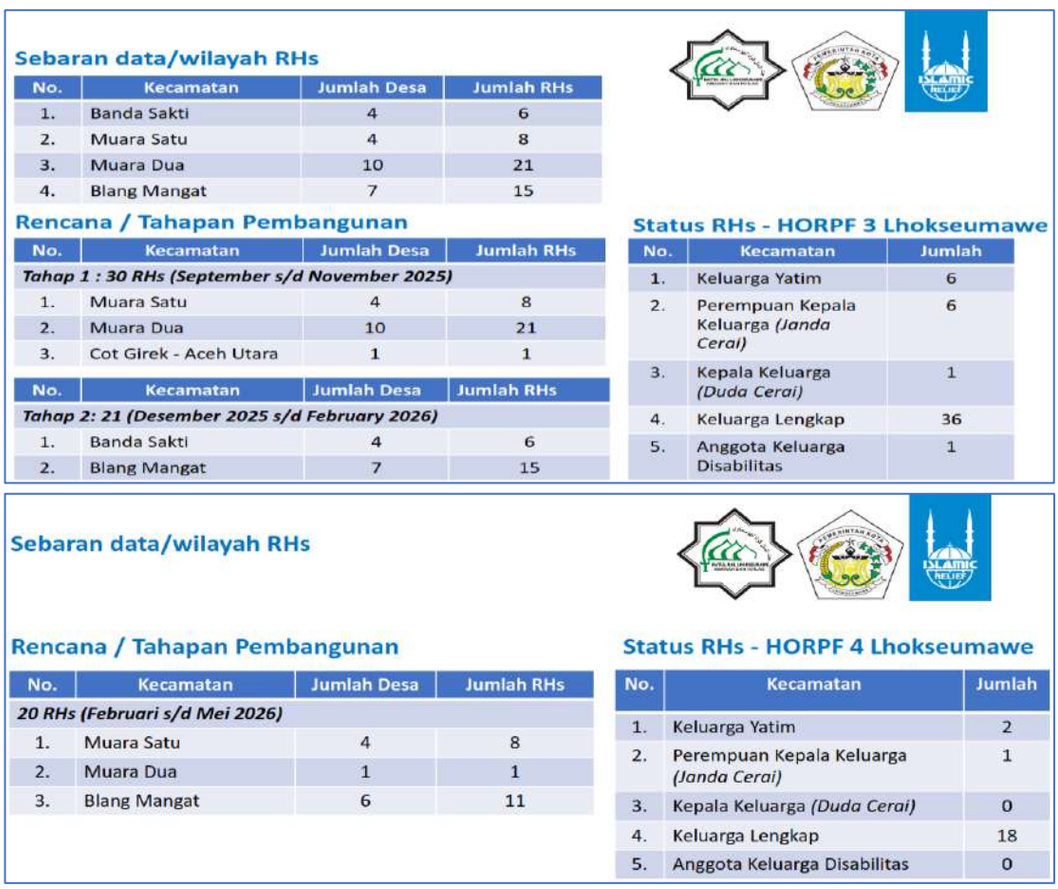

Sebaran data/wilayah RHs

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah RHs
1.	Banda Sakti	4	6
2.	Muara Satu	4	8
3.	Muara Dua	10	21
4.	Blang Mangat	7	15

Rencana / Tahapan Pembangunan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah RHs
Tahap 1 : 30 RHs (September s/d November 2025)			
1.	Muara Satu	4	8
2.	Muara Dua	10	21
3.	Cot Girek - Aceh Utara	1	1

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah RHs
Tahap 2: 21 (Desember 2025 s/d February 2026)			
1.	Banda Sakti	4	6
2.	Blang Mangat	7	15

Status RHs - HORPF 3 Lhokseumawe

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Keluarga Yatim	6
2.	Perempuan Kepala Keluarga *(Janda Cerai)*	6
3.	Kepala Keluarga *(Duda Cerai)*	1
4.	Keluarga Lengkap	36
5.	Anggota Keluarga Disabilitas	1

Sebaran data/wilayah RHs

Rencana / Tahapan Pembangunan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah RHs
20 RHs (Februari s/d Mei 2026)			
1.	Muara Satu	4	8
2.	Muara Dua	1	1
3.	Blang Mangat	6	11

Status RHs - HORPF 4 Lhokseumawe

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Keluarga Yatim	2
2.	Perempuan Kepala Keluarga *(Janda Cerai)*	1
3.	Kepala Keluarga *(Duda Cerai)*	0
4.	Keluarga Lengkap	18
5.	Anggota Keluarga Disabilitas	0

Sumber: Baitul Mal Kota Lhokseumawe, 2026

Gambar 3.24
Potret Kondisi Rumah Sebelum Pembangunan
Tahun 2025 dan 2026

Sumber: Baitul Mal Kota Lhokseumawe, 2026

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA LHOKSEUMAWE

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA LHOKSEUMAWE

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi RKPK Tahun 2026 Triwulan II sebagai pijakan kondisi yang ada untuk merumuskan target sasaran Perubahan RKPK Tahun 2026. Prioritas Daerah yang teruang dalam Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 didasarkan pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
2. Prioritas RKPA Tahun 2026;
3. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029;
4. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045; dan
5. Pokok-pokok pikiran DPRK.

Proses integrasi penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.1
Komponen Penyusunan Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026

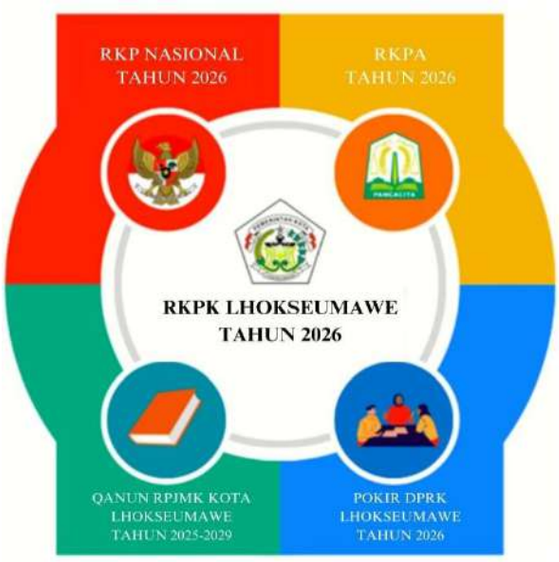

Sumber : Bappeda Kota Lhokseumawe, hasil olahan, 2026

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029. Target tahun pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) diupayakan akan tercapai melalui Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) yang disusun sebagai bentuk penjabaran RPJMK dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan berpedoman juga pada program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Aceh Tahun 2026.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMK merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Sehingga untuk mencapai kesinambungan prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe maka penyusunan Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 harus selaras dan sinergis dengan RPJMK Lhokseumawe 2025-2029.

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 4 (empat) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, dan (4) pendekatan perencanaan dari bawah (bottom up) dan pendekatan perencanaan dari atas (top down).

Penyusunan prioritas pembangunan Perubahan RKPK Lhokseumawe dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembanganuan Kota Lhokseumawe, sebagaimana RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029, (2) Permasalahan dan Isu Strategis

Daerah, dan (3) Prioritas program-program Pembangunan baik di tingkat Pemerintah Aceh maupun Tingkat Nasional. Visi pembangunan daerah sebagaimana RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yaitu '***Terwujudnya Lhokseumawe sebagai Kota Cerdas dan Nyaman Huni***". Perwujudan visi tersebut mengandung makna Kota Lhokseumawe sebagai kota dengan Sember Daya Manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing dengan didukung infrastruktur kota yang terintegrasi dan lingkungan berkelanjutan. Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu:

Misi 1 Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe.

Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter.

Misi 3 Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang berkelanjutan.

Misi 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel.

Misi 5 Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya.

Gambar 4.2
Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029

Sumber: Hasil olah, 2026

Makna dari visi tersebut adalah Kota Lhokseumawe yang cerdas akan meningkatnya sumber daya manusia yang adaptif terhadap peluang di era digital dan ekonomi digital. Terbukti bahwa Kota

Lhokseumawe ini telah dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada lima tahun terakhir, antara lain meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, meningkatkan kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa serta industri terhadap PDRB, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender, serta meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Tataran nyaman huni dapat dimaknai bahwa lima tahun ke depan akan siap menghadapi tantangan global, problematika perkotaan yang lebih heterogen, tuntutan layanan publik yang lebih tinggi serta tetap memperhatikan wawasan lingkungan.

Untuk mencapai Kota cerdas dan nyaman huni, Pemerintah Kota Lhokseumawe bersama masyarakat akan bekerja sama membangun kota dengan tidak mengesampingkan pelaksanaan syariat islam dan pelestarian budaya, sehingga menjadi daerah yang kondusif dan dapat mendukung pengembangan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat yang akhirnya dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Dengan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, pembangunan kota ingin menguatkan berbagai keunggulan sebagai sebuah kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan berdaya saing kota, sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, infrastruktur yang berkualitas dan lingkungan berkelanjutan, serta pelayanan publik yang dinamis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pelaksanaan syariat islam dan budaya.

Tema pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2026 bersumber dari arah kebijakan pembangunan pada RPJMK 2025-2029 yaitu "***Pertumbuhan dengan Penguatan Sektor Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Berkelanjutan***" sebagai pencapaian target-target RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029. Di tahun 2026 ini juga merupakan tahun kedua dari tahap pertama pelaksanaan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045, sehingga di tahun 2026 juga merupakan tahun penguatan modal dasar transformasi menuju pelaksanaan trasformasi di tahun 2025-2045.

Gambar 4.3
Tema Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026-2030

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota Lhokseumawe sebagaimana tertuang dalam RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029, maka target indikator tujuan dan sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel 4.1. Target di tahun 2026 merupakan target di RPJMK Tahun 2025-2029.

Tabel 4.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe
Tahun 2026

Misi/Tujuan		Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian	Target		
					2025	RKPK 2026	P-RKPK 2026	Ket
Misi 1 : Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe								
1	**Meningkatkan Pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi**		**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	3.39	4.53-4.80	3.43-3.80	turun
			Indeks Gini	Angka	0.344	0,295-0,322	0,295-0,322	tetap
1.1		Meningkatnya nilai tambah dan daya saing daerah	Kontribusi PDRB Perdagangan	%	23.72	23.69	23.75	naik
			Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	15.73	16.75	16.75	tetap
			Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	9.37	9.54	9.54	tetap
		Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	%	68.46	85.32	85.32	tetap
1.2		Meningkatnya kemandirian daerah dan menurunnya pengangguran	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%) PDRB)	%	38.91	40.95	40.95	tetap
			Indeks Kemandirian Fiskal	Nilai	0.117	-	1.140	naik
			PDRB per kapita	(Rp. juta)	62.54	65.48	65.48	tetap
			Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2.40	2.42	2.42	tetap
			Total Kredit/PDRB	%	48.26	48.12	48.50	naik
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8.24	7.75-7.85	7.75-7.85	tetap

Misi/Tujuan		Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian	Target		
					2025	RKPK 2026	P-RKPK 2026	Ket
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. juta	142.23	142.60	142.60	tetap
2	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualias dan memiliki daya saing**		**Indeks Pembangunan Manusia**	**Angka**	**81,75**	**81.95-82.30**	**81.95-82.30**	tetap
2.1		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15.56	16.00	16.00	tetap
			Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	11.64	11.58	11.66	naik
			Angka Literasi SD	Angka	53.39	61.72	55.50	turun
			Angka Numerasi SD	Angka	44.77	55.24	47.57	turun
			Angka Literasi SMP	Angka	68.95	70.54	69.35	turun
			Angka Numerasi SMP	Angka	60.49	62.94	61.94	turun
2.2		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75.29	75.12	75.35	naik
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	NA	18.00	17.50	turun
2.3		Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	9,01	9.00-9.81	9.00-8.85	turun
			Pengeluaran Perkapita	Rp.	13.071,-	13.832,	13.832	tetap
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota	%	33.46	48.65	48.65	tetap
2.4		Meningkatnya Kualitas keluarga, Pemberdayaan	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	Angka	72.50	68.00	73.00	naik

Misi/Tujuan		Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian	Target		
					2025	RKPK 2026	P-RKPK 2026	Ket
		masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak serta pembangunan Pemuda						
			Indeks Desa	Angka	71.73	0.7910	77.72	
			Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0.254	0.300	0.252	turun
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	96.82	96.65	96.85	naik
			Nilai Kota Layak Anak	Angka	NA	730	740	naik
			Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi	%	44.52	45.19	47.37	naik
3	**Meningkatkan Penataan Kota yang didukung infrastruktur yang terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan**		**Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**	**%**	**88.19**	**89.03**	**89.03**	tetap
3.1		Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Kota	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	58.00	74.30	60.87	turun
			Tingkat Pelayanan Jalan	Level	C 0.57	C 0.50	C 0.58	naik
3.2		Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	80.16	82.96	84.80	naik
3.3		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan menurunnya risiko bencana	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Angka	71.54	73.35-73.85	73.35-73.85	turun

Misi/Tujuan		Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian	Target		
					2025	RKPK 2026	P-RKPK 2026	Ket
3.4			Indeks Risiko Bencana	Angka	168.97	132.86	132.99	naik
4	**Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang berkualitas dan didukung Inovasi Daerah**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Kategori /Point**	**BB 72.17**	**BB 72.85**	**BB 72.85**	tetap
4.1		Meningkatnya akuntabilitas, profesionalitas dan integritas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Kategori /Point	B 61.76	BB 71.20	BB 71.20	tetap
			Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	tetap
			Indeks Integritas/Survey Penilaian Integritas	Angka	74.31	72.50	75.00	naik
			Indeks Maturitas SPIP	Angka	Level 3 3.037	Level 3 3.300	Level 3 3.300	tetap
			Indeks Profesionalisme ASN	Angka	-	81.67	81.67	tetap
4.2		Meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan penerapan inovasi daerah	Indeks Pelayanan Publik	Angka	A- 4.31	A 4.28	A 4.33	naik
			Indeks SPBE	Angka	2.8	3.10	3.10	tetap
			Indeks Inovasi Daerah (IID)	Angka	29.68	52.36	52.36	tetap
5	**Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya**		**Indeks Pembangunan Syariat**	**Angka**	**80.11**	**84.91**	**84.91**	tetap
		Meningkatnya pembangunan syariat	Indeks Pembangunan Syariat	Angka	80.11	84.91	84.91	tetap

Misi/Tujuan		Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian	Target		
					2025	RKPK 2026	P-RKPK 2026	Ket
5.1		Meningkatnya Pelestarian dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	54.00	40.74	54.40	naik

Sumber : RPJMK Lhokseumawe 2025-2029, BPS Kota Lhokseumawe 2026

Indikator tujuan dan sasaran Tahun 2026 pada RPJMK Lhokseumawe 2025-2029 terdapat beberapa capaian indikator pada tahun 2025 yang telah melebihi target tahun 2026 sehingga harus dilakukan penyesuaian target indikator pada perubahan RKPK tahun 2026, yaitu sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan, capaian tahun 2025 sebesar 3.39%, pada P-RKPK 2026 dilakukan penurunan target menjadi 3.43%-3.80% dikarenakan kondisi Aceh yang mengalami bencana hidrometrologi sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan.
2. Kontribusi PDRB Perdagangan, capaian tahun 2025 sebesar 23.72% melebihi target RKPK 2026 sebesar 23.69% sehingga dilakukan perubahan target menjadi 23.75%.
3. Total Kredit/PDRB, capaian tahun 2025 sebesar 48.26% melebihi target RKPK 2026 48.12% sehingga dilakukan perubahan target menjadi 48.50%.
4. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun, capaian tahun 2025 sebesar 11.64 tahun melebihi target RKPK 2026 sebesar 11.58 tahun sehingga dilakukan perubahan target menjadi 11.66 tahun.
5. Angka Literasi SD, capaian tahun 2025 sebesar 53.59 dari hasil Rakortekrenbang 2026 capaian tahun 2027 dilakukan penurunan target sehingga pada P-RKPK 2026 target 2026 disesuaikan menjadi 55.50 dari target 2026 sebesar 61.72.
6. Angka Numerasi SD, capaian tahun 2025 sebesar 44.77 dari hasil Rakortekrenbang 2026 capaian tahun 2027 dilakukan penurunan target sehingga pada P-RKPK 2026 target 2026 disesuaikan menjadi 47.57 dari target 2026 sebesar 55.24.
7. Angka Literasi SMP, capaian tahun 2025 sebesar 68.95 dari hasil Rakortekrenbang 2026 capaian tahun 2027 dilakukan penurunan target sehingga pada P-RKPK 2026 target 2026 disesuaikan menjadi 69.35 dari target 2026 sebesar 70.54.
8. Angka Numerasi SMP, capaian tahun 2025 sebesar 60.49 dari hasil Rakortekrenbang 2026 capaian tahun 2027 dilakukan

penurunan target sehingga pada P-RKPK 2026 target 2026 disesuaikan menjadi 61.94 dari target 2026 sebesar 62.94.

9. Usia Harapan Hidup (UHH), capaian tahun 2025 sebesar 75.29 tahun melebihi target RKPK 2026 sebesar 75.12 tahun sehingga dilakukan perubahan target menjadi 75.35 tahun.
10. Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga), capaian tahun 2025 sebesar 72.50 melebihi target RKPK 2026 sebesar 68.00 sehingga dilakukan perubahan target menjadi 73.00.
11. Indeks Ketimpangan Gender, capaian tahun 2025 sebesar 0.254 melebihi target RKPK 2026 sebesar 0.300 sehingga dilakukan perubahan target menjadi 0.252.
12. Indeks Pembangunan Gender, capaian tahun 2025 sebesar 96.82 melebihi target RKPK 2026 sebesar 96.65 sehingga dilakukan perubahan target menjadi 96.85.
13. Indeks Integritas/Survey Penilaian Integritas, capaian tahun 2025 sebesar 74.31 melebihi target RKPK 2026 sebesar 72.50 sehingga dilakukan perubahan target menjadi 75.00.
14. Indeks Pelayanan Publik, capaian tahun 2025 sebesar 4.31 (A) melebihi target RKPK 2026 sebesar 4.28 (A) sehingga dilakukan perubahan target menjadi 4.33 (A).

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Pembangunan Kota Lhokseumawe merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Aceh dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe dirumuskan secara bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tabel 4.2
Tema Pembangunan Tahun 2026

Tema RKP Tahun 2026	Tema RKPA Tahun 2026	Tema RKPK Lhokseumawe Tahun 2026
Peningkatan Produktivitas Untuk Swasembada Pangan dan Energi serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Melalui Hilirisasi dan Industrialisasi SDA Dalam Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pertumbuhan dengan Penguatan Sektor Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Sumber: Bappeda Kota Lhokseumawe, 2026

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. Terdapat lima arah kebijakan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional 3 yang tertuang dalam sasaran dan indikator pada tabel di atas, antara lain :
   a. melanjutkan pembangunan infrastruktur
   b. mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya
   c. penguatan koperasi
   d. mengembangkan industri kreatif
   e. pendalaman sektor keuangan
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Sedangkan Arah Kebijakan untuk Prioritas Nasional 6 difokuskan pada :
   a. membangun desa dan membangun dari desa
   b. pemerataan ekonomi
   c. Memberantas kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Sedangkan Arah Kebijakan untuk Prioritas Nasional 8 difokuskan pada :
   a. Masyarakat adil, makmur, dan harmonis
   b. Melestarikan budaya
   c. Penanganan bencana

4.2.2 Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2026

Pembangunan Aceh tahun 2026 diarahkan pada tema "**Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Melalui Hilirisasi dan Industrialisasi SDA Dalam Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**" yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2026 sebagai berikut :

1. Menjalankan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah.
2. Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA.
3. Melaksanakan kemandirian ekonomi Aceh dengan berbasis pada sektor unggulan Aceh.
4. Meningkatkan Infrastruktur Dasar dan Menjamin Konektivitas antar wilayah.

5. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manuasia.
6. Mengoptimalkan Transformasi Tata Kelola Pemerintah Aceh serta membina Stabilitas Politik dan Implementasi Hukum.
7. Memelihara Kelestarian Lingkungan Hidup dan Ekosistemnya.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026

Prioritas pembangunan pada RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Lhokseumawe periode Tahun 2025-2029 yang disusun dengan pendekatan holistik, tematik, spasial dan integratif dengan memerhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2025, perkiraan capaian di tahun 2026 serta isu-isu strategis di tahun 2026.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2026 adalah "***Pertumbuhan dengan Penguatan Sektor Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Berkelanjutan***", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulan Risiko Bencana.
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan.
5. Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro berdasarkan target pada RPJMK. Persandingan target capaian indikator makro dari

Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Lhokseumawe terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Persandingan Target Indikator Makro Nasional, Aceh dan Kota Lhokseumawe Tahun 2026

No	Indikator Makro	Nasional	Aceh	Kota Lhokseumawe	P-RKPK
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.80-6.3	4.5-5.1	4.43-4.80	3.43-3.80
2	PDRB Perkapita	US$ 5.870	53.00-55.12	65.48	65.48
3	Kontribusi PDRB Propinsis/Kabupaten/Kota	-	1.075	4.94	4.95
4	Indeks Pembangunan Manusia/Indeks Modal Manusia	0.57	75.50-76.50	81.95-82.30	81.95-82.30
5	Tingkat Kemiskinan (%)	6.5-7.5	10-12	9.00-8.85	9.00-8.85
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.44-4.96	5.12-5.47	7.75-7.85	7.75-7.85
7	Rasio Gini	0.377-0.380	0.280-0.290	0.295-0.322	0.295-0.322
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	73.35-73.85	73.35-73.85
9	Penurunan Intesitas Emisi GRK %)	27.35	32.91-37.47	-	-

Sumber : Bappeda Kota Lhokseumawe, 2026

Perumusan prioritas RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 dengan mempertimbangkan prioritas nasional, prioritas Aceh serta permasalahan pembangunan/isu strategis Kota Lhokseumawe. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe dengan Prioritas Pembangunan Aceh dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

PRIORITAS NASIONAL 2026	PRIORITAS ACEH 2026	PRIORITAS RKPK LHOKSEUMAWE 2025
Prioritas Nasional 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru **Prioritas Nasional 5** Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri **Prioritas Nasional 6** Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemertaan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan	**Prioritas Aceh 2** Mewujudkan kemandirian rakyat melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru **Prioritas Aceh 3** Mewajudkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah Sumber Daya Alam dan Maritim Aceh **Prioritas Aceh 5** Mewajudkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah Sumber Daya Alam dan Maritim Aceh	**Prioritas Lhokseumawe 1** Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di	**Prioritas Aceh 4** Mewujudkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, industri pariwisata dan industri halal, serta industri kreatif dan prestasi olahraga	**Prioritas Lhokseumawe 2** Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulan Risiko Bencana

PRIORITAS NASIONAL 2026	PRIORITAS ACEH 2026	PRIORITAS RKPK LHOKSEUMAWE 2025
Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	**Prioritas Aceh 7** Menggerakkan transformasi digitalisasi dan teknologi modern untuk semua sektor	
Prioritas Nasional 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	**Prioritas Aceh 6** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan Penguatan kesetaraan gender, hak Perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas	**Prioritas Lhokseumawe 3** Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas dan Berdaya Saing
Prioritas Nasional 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan **Prioritas Nasional 1** Memperkokoh ideology Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	**Prioritas Aceh 8** Mewujudkan reformasi Politik, Hukum dan tata Kelola birokrasi, dan memperkuat pencegahan korupsi, serta berpartisipasi dalam pemberantasan narkoba **Prioritas Aceh 1** Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dan perdamaian melalui Kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA	**Prioritas Lhokseumawe 4** Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan **Prioritas Lhokseumawe 5** Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya
Prioritas 8 Nasional Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi	**Prioritas Aceh 9** Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan untuk Kesejahteran rakyak Aceh	**Prioritas Lhokseumawe 5** Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya

PRIORITAS NASIONAL 2026	PRIORITAS ACEH 2026	PRIORITAS RKPK LHOKSEUMAWE 2025
Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		**Prioritas Lhokseumawe 2** Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulan Risiko Bencana

Sumber : Bappenas, Bappeda Aceh dan Bappeda Kota Lhokseumawe, 2026

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut, terlihat bahwa prioritas pembangunan daerah Kota Lhokseumawe tahun 2026 yang berjumlah 5 prioritas selaras dengan 8 prioritas nasional dan 9 prioritas Aceh. Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah Kota Lhokseumawe dengan prioritas nasional RKP tahun 2026 dapat dinilai 100% (karena keseluruhan prioritas pembangunan daerah selaras dengan prioritas nasional).

Permasalahan pembangunan Kota Lhokseumawe telah diidentifikasi berdasarkan kaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan isu strategis Kota Lhokseumawe memperhatikan gambaran kondisi daerah dan permasalahan, capaian indikator kinerja serta arah kebijakan. Penyusunan prioritas pembangunan daerah Kota Lhokseumawe berdasarkan isu strategis yang ada. Adapun permasalahan pengembangan/isu strategis telah tertuang pada bab II, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Daerah dengan Prioritas Pembangunan Aceh dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Isu Strategis	Prioritas Nasional		Prioritas Aceh		Prioritas Kota Lhokseumawe	
- Memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kemandirian ruang fiskal	PN.1	Memperkokoh ideology Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PA.1	Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dan perdamaian melalui Kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA	PD.4 PD.5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya
- Memaksimalkan dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi dan peningkatan pendapatan perkapita - Penanggulan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	PN.2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	PA.2	Mewujudkan kemandirian rakyat melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD.1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang berkualitas - Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pengurangan risiko bencana	PN.3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PA.4 PA.7	Mewujudkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, industri pariwisata dan industri halal, serta industri kreatif dan prestasi olahraga Menggerakkan transformasi digitalisasi dan teknologi modern untuk semua sektor	PD.2	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulan Risiko Bencana
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan	PN.4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan,	PA.6	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	PD.3	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul,

Isu Strategis	Prioritas Nasional		Prioritas Aceh		Prioritas Kota Lhokseumawe	
pemerataan pendidikan, meningkatkan minat baca masyarakat dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat - Penanggulan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka		Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas		pendidikan, kesehatan Penguatan kesetaraan gender, hak Perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas		Berkualitas dan Berdaya Saing
- Memaksimalkan dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi dan peningkatan pendapatan perkapita - Penanggulan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	PN.5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PA.3	Mewajudkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah Sumber Daya Alam dan Maritim Aceh	PD.1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- Memaksimalkan dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi dan peningkatan pendapatan perkapita - Penanggulan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	PN.6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemertaan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan	PA.5	Meningkatkan keseimbangan dan inklusi regional Aceh melalui pembangunan Infrastruktur kewilayahan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan	PD.1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- Memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kemandirian ruang fiskal	PN.7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PA.8	Mewujudkan reformasi Politik, Hukum dan tata Kelola birokrasi, dan memperkuat pencegahan korupsi, serta berpartisipasi dalam pemberantasan narkoba	PD.4	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan

Isu Strategis	Prioritas Nasional		Prioritas Aceh		Prioritas Kota Lhokseumawe	
- Memperkuat Pelaksanaan nilai-nilai dinul islam dan pembangunan kebudayaan	PN.8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PA.9	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan untuk Kesejahteran rakyak Aceh	PD.5	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya
					PD.2	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulan Risiko Bencana

Sumber : Bappenas, Bappeda Aceh dan Bappeda Kota Lhokseumawe, 2026

Berikut disajikan sandingan Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026 beserta indikator sasaran dan target dengan Prioritas RKPK Lhokseumawe, Prioritas Nasioanl dan Prioritas Aceh Tahun 2026.

Tabel 4.6
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026

Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026					Prioritas RKPK Tahun 2026	Prioritas Nasional dan Aceh yang Terkait
No	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2026**	**Target P-RKPK 2026**		
1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing daerah	Kontribusi PDRB Perdagangan	23.69	23.75	Prioritas Lhokseumawe 1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	**Prioritas Nasional 2** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui wasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru **Prioritas Aceh 2** Mewujudkan kemandirian rakyat melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	16.75	16.75		
		Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9.54	9.54		
2	Meningkatnya Ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	85.32	85.32		
3	Meningkatnya nilai investasi, daya saing dan Lapangan Kerja	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%) PDRB)	40.95	40.95		**Prioritas Nasional 5** Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
		Indeks Kemandirian Fiskal	-	0.140		
		PDRB per kapita	65.48	65.48		
		Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	2.42	2.42		**Prioritas Nasional 6** Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemertaan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan
		Total Kredit/PDRB	48.12	48.50		
		Tingkat Pengangguran Terbuka	7.85-7.75	7.85-7.75		**Prioritas Aceh 3** Mewajudkan hilirisasi dan industrialisasi

Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026					Prioritas RKPK Tahun 2026	Prioritas Nasional dan Aceh yang Terkait
No	Sasaran	Indikator	Target 2026	Target P-RKPK 2026		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	142.60	142.60		untuk meningkatkan nilai tambah Sumber Daya Alam dan Maritim Aceh
4	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	16.00	16.00	Prioritas Lhokseumawe 2 Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas	**Prioritas Nasional 4** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas **Prioritas Aceh 6** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan Penguatan kesetaraan gender, hak Perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas
		Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	11.58	11.66		
		Angka Literasi SD	61.72	55.50		
		Angka Nemerasi SD	55.24	47.57		
		Angka Literasi SMP	70.54	69.35		
		Angka numerasi SMP	62.94	61.94		
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	75.12	75.35		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	18.00	17.50		
6	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Tingkat Kemiskinan	9.00-9.81	9.00-8.85		
		Pengeluaran Riil Perkapita	13.832	13.832		
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	48.65	48.65		
7	Meningkatnya Kualitas keluarga, Pemberdayaan masyarakat,	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	68.00	73.00		

Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026					Prioritas RKPK Tahun 2026	Prioritas Nasional dan Aceh yang Terkait
No	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2026**	**Target P-RKPK 2026**		
	Perempuan dan Perlindungan Anak serta pembangunan Pemuda					
		Indeks Desa Membangun	0.7910	77.72		
		Indeks Ketimpangan Gendr	0.300	0.252		
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96.65	96.85		
		Nilai Kota Layak Anak	730	740		
		Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi	45.19	47.37		
8	Meningkatnya pelayanan Infrastruktur kota	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	74.30	60.87	**Prioritas Lhokseumawe 3** Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulan Risiko Bencana	**Prioritas Nasional 3** Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
		Tingkat Pelayanan	C 0.50	C 0.58		
9	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	82.96	84.80		**Prioritas 8 Nasional** Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	73.35-73.85	73.35-73.85		

Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026					Prioritas RKPK Tahun 2026	Prioritas Nasional dan Aceh yang Terkait
No	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2026**	**Target P-RKPK 2026**		
						Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
11	Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	132.86	132.99		**Prioritas 4 Aceh** Mewujudkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, industri pariwisata dan industri halal, serta industri kreatif dan prestasi olahraga **Prioritas Aceh 7** Menggerakkan transformasi digitalisasi dan teknologi modern untuk semua sektor **Prioritas Aceh 9** Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan untuk Kesejahteran rakyak Aceh
12	Meningkatnya akuntabilitas, profesionalitas dan integritas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	BB 71.20	BB 71.20	Prioritas Lhokseumawe 4 Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	**Prioritas Nasional 1** Memperkokoh ideology Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
		Opni BPK	WTP	WTP		
		Indeks Profesionalisme ASN	81.67	81.67		**Prioritas Nasional 7** Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026					Prioritas RKPK Tahun 2026	Prioritas Nasional dan Aceh yang Terkait
No	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2026**	**Target P-RKPK 2026**		
		Indeks Integritas/Survey Penilaian Integritas	72.50	75.00		**Prioritas Aceh 1** Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dan perdamaian melalui Kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA
		Indeks Maturitas SPIP	Level 3 3.300	Level 3 3.300		**Prioritas Aceh 8** Mewujudkan reformasi Politik, Hukum dan tata Kelola birokrasi, dan memperkuat pencegahan korupsi, serta berpartisipasi dalam pemberantasan narkoba
13	Meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan penerapan inovasi daerah	Indeks Pelayanan Publik	A 4.28	A 4.33		
		Indeks SPBE	3.10	3.10		
		Indeks Inovasi Daerah (IID)	52.36	52.36		
14	Meningkatnya pembangunan syariat	Indeks Pembangunan Syariat	84.91	84.91	**Prioritas Lhokseumawe 5** Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	**Prioritas Nasional 8** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
15	Meningkatnya Pelestarian dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	54.50	54.50		Prioritas Aceh 1 Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dan perdamaian melalui Kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA

Sumber : Bappenas, Bappeda Aceh dan Bappeda Kota Lhokseumawe, 2026

Selanjutnya berikut disajikan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2026 dengan Program Unggulan pada Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029.

Tabel 4.7
Sinkronisasi Priritas Pembangunan Tahun 2026 dengan Program Unggulan pada Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029

No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya		*Highlight* Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1	Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah	1	Peningkatan kualitas produk, akses permodalan dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor	- Pelatihan Peningkatan Mutu bagi UKM Sentra Kerajinan Anyaman Pandan - Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Kerajinan Tenun - Pelatihan Digital Marketing dan Branded Pasar bagi Pelaku UKM untuk meningkatkan nilai produk Unggulan Kota Lhokseumawe	
				2	Pengembangan kewirausahaan baru	- Penuntasan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe beserta Pagar	Ruang kreatif pemuda
				3	Peningkatan peran dan fungsi koperasi		
		2	Peningkatan nilai investasi	4	Pelaksanaan promosi investasi		
				5	Pemberian insentif dan kemudahan perizinan		
		3	Peningkatan sektor pariwisata	6	Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku		

No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya		*Highlight* Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
					wisata yang berdaya saing		
		4	Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi	7	Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa	Rehabilitasi Pasar TPI Pusong	
				8	Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi		
				9	Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi	Penyelenggaraan Pasar Murah	
				10	Peningkatan nilai dan produk		
				11	Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan	Diversifikasi Olahan Ikan Berbasis Potensi	Pemberdayaan Sektor Perikanan
							Pengelolaan hasil laut

No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya		*Highlight* Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
						- Pelatihan Smart Farming Bagi Petani Milenial - Pengadaan Pupuk untuk Petani di Kota Lhokseumawe - Pengadaan Bibit Padi (450 sak) dan Bibit Jagung (150 Box) - Pengadaan Sperma Beku beserta Countainer Sperma Beku	Pemberdayaan Sektor Pertanian yang Modern
		5	Penguatan ketahanan pangan	12	Kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan		
			Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja	13	Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja		
				14	Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja	- Pelatihan K3 Migas - Pelatihan Welding - Pelatihan Electrical Technician - Pelatihan Salon Kecantikan	
				15	Peningkatan upaya antisipasi dampak		

No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya		*Highlight* Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
					disrupsi teknologi terhadap pasar kerja		
				16	Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja		
		6	Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan	17	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah		
				18	Pengembangan alternatif pembiayaan		
				19	Optimalisasi BUMD		
2	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kesiapsiagaan penanggulan risiko bencana	7	Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan	20	Pengembangan kawasan strategis dan cagar budaya	- Penuntasan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe beserta Pagar	Penyelesaian Pembangunan Islamic Center
				21	Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik		
		8	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan	22	Peningkatan jalan, jembatan, pedestrian, penataan kota	- Pedestrian Jalan Merdeka - Lanjutan Pengaspalan Jalan Blang Malo - Peningkatan Jalan Blang Pulo - Peningkatan Jalan Diponegoro	

No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya		*Highlight* Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
						- Penigkatan Jalan Cot Trieng Gp. Paloh Punti - Peningkatan Jalan Pase - Pengaspalan Jalan Lhok Beuramoe Gp. Jeulikat - Peningkatan Jalan Meunasah Blang Muara Dua - Lanjutan Pembangunan Jalan Blang Crum - 'Peningkatan Jalan Cut Mamplam - Peningkatan Jalan Mns Manyang	
				23	Pengembangan kualitas layanan transportasi baik angkungan umum dan angkutan barang	- Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	
		9	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan	24	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	- Pembangunan rumah layak huni - Perbaikan rumah tidak layak huni	
				25	Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh		Penataan Lingkungan Pesisir, Khususnya Desa Pusong

No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya		*Highlight* Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
				26	Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak	- Pembangunan jaringan air minum perpipaan	Pemerataan Jaringan Air Bersih
		10	Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh	27	Penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang publik		Pembangunan Ruang Terbuka Hijau/ Taman Kota
				28	Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian perencanaan lingkungan	- Revitalisasi saluran jalan Perniagaan - Revitalisasi Waduk/Reservoir Pusong	Penanganan Banjir
						- Pengadaan Truk sampah - Pengadaan Bincontainer - Pengadaan Truk Armroll sampah - Edukasi pengolahan sampah berbasis ekonomi	Pengelolaan Sampah (Broh Jeut Keu Peng)
				29	Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana		
		11	Penguatan ketahanan bencana	30	Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat		
				31	Peningkatan kapasitas mitigasi bencana	- Bantuan Masa Panik bagi Korban Bencana	

No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya		*Highlight* Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
3	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas	12	Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknoligi dan informasi	32	Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan		
				33	Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi	- Pelatihan Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Pembelajaran Bagi Guru SMP - Pelatihan Guru Inklusi Tingkat SD	
				34	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP	- Pembangunan Ruang Kelas SDN 3 Muara Satu Kontruksi 2 Lantai - Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SDN 1 Banda Sakti Kontruksi 2 Lantai - Penuntasan Laboratorium Komputer SMPN 1 Lhokseumawe (Lantai 2)	
				35	Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah		Beasiswa untuk Pelajar Berprestasi
				36	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga		Peningkatan Kualitas SDM Dayah

No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya		*Highlight* Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
					kependidikan dayah, pemberdayaan dan pendidikan santri, fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dayah		
				36	Peningkatan pendidikan keagamaan secara optimal		
		13	Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh yang berkualitas dan mudah diakses	37	Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi		
				38	Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan		
				39	Peningkatan layanan kesehatan rujukan		
				40	Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama	- Pengadaan Mobil Box Farmasi	
				41	Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat		
		14	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin	42	Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)		

No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya		*Highlight* Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
				43	Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin	Pengadaan Penyediaan Permakanan untuk disabilitas dan Lansia	Bantuan Sosial Untuk Lansia Miskin
				44	Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan		
		15	Peningkatan pendapatan masyarakat miskin	45	Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin		
				46	Peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		
		16	Peningkatan upaya perlindungan sosial	47	Peningkatan bantuan untuk PPKS		
		17	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	48	Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak		
				49	Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan		
				50	Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan,		

No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya		*Highlight* Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
					ramah anak, disabilitas dan lansia		
		18	Peningkatan upaya pengendalian penduduk	51	Peningkatan kualitas layanan KB		
				52	Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas		
		19	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	53	Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan		
				54	Peningkatan prestasi olahraga		
				55	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat		
4	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	20	Peningkatan kualitas perencanaan daerah	56	Peningkatan kualitas dokumen perencaan daerah		
		21	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	57	Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah		

No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya		*Highlight* Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
				58	Optimalisasi barang milik daerah		
		22	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan	59	Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik	- Pengembangan Aplikasi Lhokseumawe *Single Windows* - Layanan Pengaduan dan Call center 112	Digitalisasi Pelayanan Publik
				60	Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	- Peta Rencana dan Arsitektur SPBE	
				61	Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung decision making system		
				62	Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan		
		23	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	63	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		
				64	Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung		

No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya		*Highlight* Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
					penyelenggaraan tata kelola pemerintahan		
				65	Penguatan Manajemen Risiko		
		25	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	66	Pengembangan budaya inovasi di OPD		
5	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	26	Peningkatan pelaksanaan syariat islam	67	Memaksimalkan peningkatan dimensi indeks pembangunan syariah terutama dimensi aqidah, melek Al Quran, Akhlak dan hukum jinayat	- Pembangunan Mesjid Darul Atiq Gp. Jeulikat - Pembangunan Mesjid An-Nahdhah Gp. Paloh Punti - Pelatihan Takmir Mesjid - Pelatihan Dai dalam Pemanfaatan Media Digital	Peningkatan Kesadaran Spritual para Remaja
				68	pembangunan jati diri masyarakat untuk mewujudkan karakter religius		
		27	Peningkatan pelestarian Budaya	69	Melakukan legalitas cagar budaya		
				70	Memajukan kebudayaan lokal		

Perumusan prioritas pembangunan daerah Kota Lhokseumawe yang akan dilaksanakan Tahun 2026, mempertimbangkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPK Tahun 2026, Target Qanun Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 untuk Tahun 2026, Prioritas Nasional Tahun 2026 dan Prioritas Aceh Tahun 2026. Prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026 yang telah ditetapkan tersebut, dicapai melalui pelaksanaan program-program prioritas. Program prioritas merupakan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang *outcome* nya ditujukan untuk mewujudkan sasaran daerah.

Anggaran untuk program prioritas dimaksud dipenuhi secara optimal sebelum mengalokasikan anggaran untuk program non prioritas atau program yang sifatnya mendukung (*supporting)*. Pada Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam APBD bagi Daerah terdampak Bencana di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat maka pengembalian TKD tersebut diprioritaskan untuk penanganan bencana. Berikut ini adalah Prioritas Pembangunan, dan Program Prioritas yang akan dilaksanakan pada Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.8
Matriks Prioritas dan Program Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	7.04	30.000.000	3.000.000	Disperindagkop
		2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	40.29	10.000.000	8.000.000	Disperindagkop
		2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	10.56	50.000.000	-	Disperindagkop
		2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	7.75	20.000.000	-	Disperindagkop
		2.17.07	Program Pemberdayaan	Persentase Usaha Kecil yang	%	1.57	398.150.000	631.950.000	Disperindagkop

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
			Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	bertransformasi dari informal ke formal					
				Pertumbuhan Wirausaha	%	10.53			Disperindagkop
		2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	2.24	70.000.000	10.000.000	Disperindagkop
		3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	8.00	1.820.000.000	3.044.394.300	Disperindagkop
		3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	60.01	1.070.000.000	506.000.000	Disperindagkop
		3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Barang	Rp. juta	38.92	415.000.000	60.000.000	Disperindagkop
		3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	71.35	70.000.000	13.000.000	Disperindagkop
		3.31.02	Program Perencanaan dan	Persentase Realisasi Investasi	%	5.00	233.403.156	1.758.000.000	Disperindagkop

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
			Pembangunan Industri	sektor industri dan kawasan industri					
		3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	%	5.00	20.000.000	4.000.000	Disperindagkop
		3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	Persen	91.00	20.000.000	4.000.000	Disperindagkop
		2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	84.7	40.000.000	10.960.000	DKPPP
		2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	44.00	10.000.000	4.040.000	DKPPP
		3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	14.809 ,50	529.862.278	114.862.278	DKPPP
		3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2026,7 7	150.000.000	509.750.000	DKPPP

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
		3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi tanaman pangan	%	5.71	308.729.000	1.323.729.000	DKPPP
				Peningkatan Produksi Hortikultura	%	4.50			DKPPP
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	1.58			DKPPP
		3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	%	179.85	280.000.000	1.120.000.000	DKPPP
		3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	100	10.000.000	10.000.000	DKPPP
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	43.75	-	-	DKPPP

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
		3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	20.00	10.000.000	-	DKPPP
				Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap pertanian	%	90.00	-	-	DKPPP
		3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	%	25.00	447.431.294	238.227.600	DKPPP
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan Beroperasi	%	23.5	-	-	DKPPP
		2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	86.49	903.872.000	480.064.011	DPMPTSP
		2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di dalam negeri	%	10.03	130.000.000	-	DPMPTSP

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
		2.07.05	Program Hubungan Industrial	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial	Pekerja	200	65.000.000	32.256.000	DPMPTSP
		2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi total terhadap target investasi	%	98.08	15.000.000	-	DPMPTSP
		2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	%	5.00	30.000.000	-	DPMPTSP
		2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	95.32	120.000.000	45.000.000	DPMPTSP
		2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	%	92.62	90.000.000	25.000.000	DPMPTSP
		2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	40.62	20.000.000	-	DPMPTSP

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
			Penanaman Modal						
		3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	2.00	240.000.000	-	Disporapar
		3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	50.00	267.000.000	20.000.000	Disporapar
		3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	25.00	35.000.000	30.000.000	Disporapar
2	Percepatan pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kesiapsiagaan	1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	%	11.53	3.648.845.785	-	PUPR

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
	penanggulan risiko bencana								
				Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	%	30.00	-	-	PUPR
		1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/ kota	%	4.83	3.400.868.323	130.087.000	PUPR
		1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	%	0.020	700.000.000	4.799.000.000	PUPR
		1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%	76.02	4.455.400.000	17.463.533.200	PUPR
		1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase cakupan infrastruktur	%	35.38	250.000.000	-	

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
				permukiman dalam kondisi baik					
		1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	%	66.67	2.700.000.000	16.902.591.757	PUPR
		1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan	%	61.54	29.512.627.832	82.747.568.034	PUPR
		1.03.11	Program Pengembangan jasa Kontruksi	Persentase Tenaga Kerja Kontruksi Kualifikasi Ahli	%	32.56	82.000.000	-	PUPR
		1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah	%	62.08	278.750.000	40.000.000	PUPR
		1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	%	9.33	678.942.825	-	PUPR
		1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tangga yang memiliki terhadap perumahan layak, pengurangan luasan kawasan kumuh, serta peningkatan	%	0.328	2.626.106.295	100.000.000	PUPR

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
				kualitas infrastruktur, sarana, dan utilitas umum (PSU) di organisasi.					
		1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	65.73	8.691.589.877	17.758.078.724	PUPR
		2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat	%	0.50	2.285.395.980	1.262.941.750	Dishub
				Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal	%	62.50	-	-	Dishub
		2.10.12	Program Pengurusan Hak - Hak Atas Tanah	Ditetapkannya Hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	3.89	25.000.000	23.686.680	Dinas Pertanahan
		2.10.13	Program Survey, Pengukuran dan Pemetaan	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah	%	39.08	25.000.000	-	Dinas Pertanahan

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
		2.10.14	Program Pengembangan dan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pertanahan	Persentase SDM bidang Pertanahan yang ditingkatkan kompetensinya	%	59.65	25.000.000	-	Dinas Pertanahan
		2.10.15	Program Pengaturan Pertanahan di wilayah pesisir, Laut dan Pulau	Persentase pertanahan di wilayah pesisir, laut dan pulau yang tertata	%	61.25	25.000.000	40.000.000	Dinas Pertanahan
		2.10.17	Program Penanganan Konflik, sengketa dan perkara pertanahan	Persentase penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan	%	60.0	50.327.907	44.053.600	Dinas Pertanahan
		2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	1.00	347.250.00	-	DLH
		2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Nilai	71.20	9.183.600.000	8.396.250.000	DLH

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
				Indeks Kualitas Udara	Nilai	92.93	-	-	DLH
		2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH	%	24.46	1.910.900.000	1.700.000.000	DLH
		2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	42.62	170.000.000	-	DLH
		2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH	%	43.00	80.000.000	-	DLH
		2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan	Persentase MHA yang ditingkatkan Kapasitasnya	%	23.50	170.000.000	-	DLH

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
			Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait dengan PPLH						
		2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan Kompetensinya	%	100	189.000.000	-	DLH
		2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengolahan Sampah	Nilai	51.00	6.053.000.000	4.422.809.000	DLH
		1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	100	872.316.000	2.743.170.200	BPBD
				Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100	-	-	BPBD
				Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	-	-	BPBD
		1.05.04	Program Pencegahan,	Cakupan Penyebaran	%	100	152.288.400	-	BPBD

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
			Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran					
				Cakupan Layanan Penyelamatan dan Edukasi Korban Kebakaran	%	100	-	-	BPBD
3	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas dan Berdaya Saing	1.01.02	Program Pegelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6	%	95.73	43.844.747.545	37.472.191.247	Dinas PK
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15	%	99.05	-	-	Dinas PK
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan	%	57.57	-	-	Dinas PK
		1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	100	156.900.000	100.000.000	Dinas PK
		1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru	Nilai	0.60	150.000.000	-	Dinas PK

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
				Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	%	30.16	-	-	Dinas PK
		1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/ diperbarui	%	100	120.000.000	10.000.000	Dinas PK
		1.01.07	Program Pendidikan Dayah	Persentase Dayah dengan type A	%	10.61	5.113.286.894	4.392.030.000	DSI-PD
		1.01.08	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Persentase Rekomendasi yang dihasilkan terkait penyelenggaraan pendidikan Aceh	%	100	100.716.596	80.000.000	Sekretariat MPD
		2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	69.25	140.000.000	480.000.000	Dispursip
		2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang di miliki	%	100	5.000.000	20.000.000	Dispursip
		1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	109	36.167.900.259	26.429.545.677	Dinkes

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
				Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)	%	17.50	-	-	Dinkes
		1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	77.05	446.962.422	549.165.000	Dinkes
				Persentase nakes di fasyankes pemerintah yang memiliki SIP	%	78.46	-	-	Dinkes
				Persentase nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu	%	100	-	-	Dinkes
				Persentase nakes (dokter, drg, bidan, perawat) di fasyankes yang dilakukan kredensialing	%	52.68	-	-	Dinkes
		1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	%	100	456.633.000	550.409.000	Dinkes

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
		1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	%	100	167.844.000	226.603.000	Dinkes
		1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial	%	79.66	145.000.000	-	Dinsos
				Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	%	79.66	-	-	Dinsos

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
				Presentase pekerja sosial/Tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	%	80.00	-	-	Dinsos
				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	59.32	-	-	Dinsos
		1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	80.00	720.000.000	510.000.000	Dinsos
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi	%	80.00	-	-	Dinsos

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
				Kebutuhan Dasarnya					
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	80.00	-	-	Dinsos
				Presentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	60.00	-	-	Dinsos
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	80.00	-	-	Dinsos
		1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	50.00	30.000.000	210.000.000	Dinsos
				Persentase Penerima Manfaat	%	50.00	-	-	Dinsos

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
				yang meningkat kemandirian ekonomi					
				Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	%	79.41	-	-	Dinsos
				Persentase Keluarga Miskin dan rentan Penerima Perlindungan sosial yang tergradusi dari kemiskinan	%	3.18	-	-	Dinsos
		1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	120.000.000	310.000.000	Dinsos
				Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	%	100.00	-	-	Dinsos

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
		1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	%	100.00	25.000.000	10.000.000	Dinsos
		2.07.05	Program Hubungan Industrial	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial	Pekerja	200	65.000.000	32.256.000	DPMPTSP
		2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	14.71	10.000.000	-	DPMG
		2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama	%	17.65	10.000.000	-	DPMG
		2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnyaa Desa	%	19.76	386.500.000	346.700.000	DPMG
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	99.55	-	-	DPMG
		2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga	%	76.47	419.000.000	633.400.000	DPMG

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
			Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kemasyarakatan Desa (LKD)					
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum adat	%	100	-	-	DPMG
		2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	3.50	45.000.000	-	DP3AP2KB
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	50.30	-	-	DP3AP2KB
		2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	215.300.000	278.704.800	DP3AP2KB
		2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak	%	65.63	20.000.000	63.600.000	DP3AP2KB

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
				anak sesuai standar					
		2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	%	44.12	20.000.000	-	DP3AP2KB
		2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Nilai	65.95	116.260.600	86.400.000	DP3AP2KB
		2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	71.43	351.600.000	385.063.570	DP3AP2KB
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Nilai	77.90	-	-	DP3AP2KB
		2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/ TFR*)	Nilai	2.27	179.400.000	88.800.000	DP3AP2KB

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun	Nilai	7.0	-	-	DP3AP2KB
		2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevelensi Kontrasepsi Modern	Nilai	57.10	1.309.233.000	639.074.162	DP3AP2KB
				Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi	%	8.14	-	-	DP3AP2KB
		2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	86.08	537.400.000	643.800.000	DP3AP2KB
		2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	rasio	11.92	460.000.000	50.000.000	DISPORAPAR
		2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang masuk pelatnas	%	1.00	2.253.000.000	1.185.000.000	DISPORAPAR
		2.19.04	Program Pengembangan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	%	95.00	250.000.000	-	DISPORAPAR

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
			Kapasitas Kepramukaan						
4	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	B 64.50	27.968.751.400	29.538.401.790	Setdako
				Indeks Kematangan Organisasi	Nilai	30.00	-	-	Setdako
		4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Efektifitas Kerja Sama Daerah	%	100.00	1.507.536.531	1.090.000.000	Setdako
				Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100.00	-	-	Setdako
				Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100.00	-	-	Setdako
				Persentase Produk Hukum yang DIhasilkan	%	100.00	-	-	Setdako
		4.01.03	Program Perekonomian	Efektivitas Pelaksanaan	%	100	750.000.000	334.021.144	Setdako

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
			dan Pembangunan	Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan					
				Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	%	100.00	-	-	Setdako
				Tingkat Kematangan UKPBJ	Nilai	9.15	-	-	Setdako
		5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dan RKPD	%	100	628.331.095	158.000.000	Bappeda
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan RENSTRA-PD	%	100	-	-	Bappeda
		5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja-PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	493.552.710	187.000.000	Bappeda

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
				Persentase Keselarasan RKPD dengan renja-PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	-	-	Bappeda
				Persentase Keselarasan RKPD dengan renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	-	-	Bappeda
		5.05.03	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	66.67	200.000.000	15.000.000	Bappeda
		5.05.04	Program riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	%	76.00	204.000.000	35.000.000	Bappeda
		6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	82.40	1.300.546.764	1.295.667.614	Inspektorat

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
		6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3 3.300	178.620.447	337.167.447	Inspektorat
				Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3 3,2	-	-	Inspektorat
		5.02.02	Program Pengelolan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	%	41.51	122.863.061.434	113.691.607.143	BPKD
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	20.07	-	-	BPKD
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	95.78	-	-	BPKD
				Persentase Penurunan SILPA	%	-37.50	-	-	BPKD
				Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100	-	-	BPKD

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
		5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan nilai Aset Tetap	%	2.74	1.288.000.000	385.608.500	BPKD
		5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	10.29	1.380.088.800	460.000.000	BPKD
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	%	75.00	-	-	BPKD
				Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	90.14	-	-	BPKD
		5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	%	81.48	1.673.484.523	840.000.000	BKPSDM
				Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	%	14.32	-	-	BKPSDM
				Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai	%	15.00	-	-	BKPSDM

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
				dengan Kompetensinya					
				Persentase Pegawai dengan SKP bernilai Baik	%	68.82	-	-	BKPSDM
		5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	%	1.28	1.256.203.200	722.310.000	BKPSDM
				Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	%	100.00	-	-	BKPSDM
				Persentase ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi	%	13.49	-	-	BKPSDM
				Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	3.60	-	-	BKPSDM
		4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRK	Ketetapan Penetapan Perda Tahun N	Tepat/ Tidak tepat	Tepat	3.328.000.000	1.478.300.000	Sekretariat DPRK

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100	-	-	Sekretariat DPRK
				Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	-	-	Sekretariat DPRK
		2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	52.21	75.000.000	10.000.000	Dispursip
		2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survey)	%	84.72	1.485.000.000	663.834.500	Diskominfo
		2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	Nilai	3.10	1.975.000.000	1.150.803.501	Diskominfo
		2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Nilai	1.01	90.000.000	-	Diskominfo
		8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan	%	25.00	97.180.000	30.600.000	Kesbangpol

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
			dan karakter Kebangsaan	wawasan kebangsaan					
		8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	36.00	1.431.296.328	1.360.750.000	Kesbangpol
		8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	38.89	97.000.000	50.000.0000	Kesbangpol
		8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi	%	77.94	50.000.000	-	Kesbangpol

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
				Kerukunan Umat Beragama dan penghayat kepercayaan di daearah yang dilaksanakan					
		8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi penanganan konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	%	100	600.000.000	50.648.640	Kesbangpol
		2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	10.59	215.000.000	80.000.000	Disdukcapil
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	40.76	-	-	Disdukcapil
		2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melapor	%	100.00	145.000.000	75.000.000	Disdukcapil
				Persentase Akta Kelahiran yang	%	99.66	-	-	Disdukcapil

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
				diterbitkan bagi yang melapor					
				Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melapor	%	100.00	-	-	Disdukcapil
				Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melapor	%	100.00	-	-	Disdukcapil
		2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administarasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	%	100.00	530.000.000	350.000.000	Disdukcapil
		2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100.00	10.000.000	-	Disdukcapil
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	65.00	95.000.000	20.000.000	Kecamatan Banda Sakti
		7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat.	%	100	13.002.932	-	Kecamatan Banda Sakti
		7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan	Persentase kebijakan urusan pemerintahan	%	100	33.200.000	15.000.000	Kecamatan Banda Sakti

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
			Pemerintahan Umum						
		7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	44.000.000	5.000.000	Kecamatan Banda Sakti
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	65.00	85.360.460	20.000.000	Kecamatan Blang Mangat
		7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat.	%	100	11.000.000	-	Kecamatan Blang Mangat
		7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kebijakan urusan pemerintahan	%	100	33.200.000	15.000.000	Kecamatan Blang Mangat
		7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	42.000.000	5.000.000	Kecamatan Blang Mangat
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	90	112.000.000	20.000.000	Kecamatan Muara Satu

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
		7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat.	%	100	10.000.000	-	Kecamatan Muara Satu
		7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kebijakan urusan pemerintahan	%	100	33.200.000	15.000.000	Kecamatan Muara Satu
		7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	44.000.000	5.000.000	Kecamatan Muara Satu
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	104.279.759	20.000.000	Kecamatan Muara Dua
		7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat.	%	100	14.000.000	-	Kecamatan Muara Dua
		7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kebijakan urusan pemerintahan	%	100	25.000.000	15.000.000	Kecamatan Muara Dua
		7.01.06	Program Pembinaan dan	Persentase rekomendasi	%	100	57.180.093	5.000.000	Kecamatan Muara Dua

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
			Pengawasan Pemerintahan Desa	pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					
		1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	95.77	246.350.442	731.058.602	Satpol PP dan WH
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	90.00	-	-	Satpol PP dan WH
				Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	17.28	-	-	Satpol PP dan WH
				Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya	%	50.00	-	-	Satpol PP dan WH
5	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	9.01.02	Program Syariat Islam	Angka Melek Al Quran	Angka	85.41	3.568.508.326	2.707.485.776	DSI-PD
		9.01.03	Program Majelis Permusyarawatan Ulama (MPU) Aceh	Persentase Fatwa yang disosialisasikan	%	85.71	15.455.000	30.000.000	Sekretariat MPU
		9.01.04	Program Baitul Mal	Persentase Peningkatan ZISWAF	%	11.56	5.708.000.000	5.600.000.000	Sekretariat Baitul Mal

Prioritas RKPK 2026		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	RKPK	P-RKPK	Perangkat Daerah
		2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap pengembangan Kebudayaan	%	16.00	210.000.000	-	Dinas PK
		2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	%	60.00	80.000.000	50.000.000	Dinas PK
		2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	%	50.00	65.000.000	-	Dinas PK
		2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	24.52	233.000.000	50.000.000	Dinas PK
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	%	40.70	-	-	Dinas PK
		2.22.06	Program Pengelolaan Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan Ke Museum	%	13.76	45.000.000	610.000.000	Dinas PK
		2.22.08	Program Majelis Adat Aceh	Indeks Adat Istiadat Aceh	Angka	97.44	225.605.120	80.000.000	Sekretariat MAA

Pada tabel matriks prioritas dan program pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2026, beberapa program mengalami perubahan pagu anggaran yang cukup signifikan dari pagu RKPK tahun 2026 ke pagu P-RKPK tahun 2026 hal ini dikarenakan pada saat penyusunan RKPK tahun 2026 masih mempedomani Pendapatan Tahun 2025, namun pada saat dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026, terjadi penurunan penerimaan yang signifikan dikarenakan pemerintah pusat menerapkan strategi efisiensi fiskal yang agresif guna menekan defisit anggaran negara sehingga berdampak langsung pada postur Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Transfer Umum (DTU) seluruh daerah termasuk Kota Lhokseumawe.

Selanjutnya pada beberapa program yang pagu anggarannya meningkat dikarenakan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam APBD bagi Daerah terdampak Bencana di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat maka pengembalian TKD tersebut diprioritaskan untuk penanganan bencana.

4.3 Arah Kebijakan dan *Highlight* Intervensi Proyek Prioritas Nasional untuk Kota Lhokseumawe

Arah kebijakan dan *highlight* Intervensi Proyek Prioritas Nasional untuk Kota Lhokseumawe pada tahun 2026 yang tercantum dalam Rancangan RKP Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Perkotaan Lhokseumawe dan Kawasan Pengembangan Industri Arun -Lhokseumawe dengan highlight intervensi yaitu :
    - Pengembangan SPAM Regional Lhokseumawe-Aceh Utara
    - Pengembangan pelabuhan perikanan PPI Pusong Lhokseumawe
    - Pendampingan Implementasi 4.0 pada sektor industri kimia hulu
    - Fasilitasi hilirisasi investasi strategis di bidang minyak dan gas bumi

- Pembangunan pabrik industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam (olefin dan turunannya)

2. Kawasan Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh
   - Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang tidak mampu atau berada di Daerah 3T dan Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet pada Kecamatan Perbatasan prioritas yaitu:
     - Kota Lhokseumawe : Muara Satu, Muara Dua, Banda Sakti, Blang Mangat.

4.4 Pengembangan Inovasi Daerah

Pengembangan Inovasi Daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 adalah proses pemantapan inovasi daerah yang telah dilaporkan ke dalam Sistem Indeks Inovasi Daerah Kemendagri pada tahun 2024 sejumlah 11 (sebelas) inovasi daerah hasil dari pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Lhokseumawe. Dari hasil monitoring terdapat penambahan 5 (lima) inovasi daerah pada tahun 2025.

Daftar inovasi daerah yang dilakukan pemantapan dengan monitoring dan evaluasi langsung ke masing-masing Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Pengembangan Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe
Tahun 2024-2025

No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah / Inisiator	Nilai Kematangan Inovasi
Tahun 2024			
1	Bidan Ceting (Bidan Dampingi Ibu Cegah Stunting)	Puskesmas Mon Geudong	91.00
2	HKG (Hari Kesehatan Gampong)	Puskesmas Mon Geudong	86.00
3	Ahad Festival (Penyediaan Akses Pasar Lokal Bagi Pelaku UMKM)	Disperindagkop & UKM	85.00
4	Ceudah Brat (Cerdas Elektronik untuk Digital Arsip Berani dan Akurat)	Disperindagkop & UKM	79.00
5	Dasibangsida (Database Hasil Penelitian, Informasi Pembangunan dan Inovasi Daerah)	BAPPEDA	78.00
6	Umbi Kanjai (UMKM Center, Majukan Bisnis Ciptakan Keajaiban)	Disperindagkop & UKM	75.00

No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah / Inisiator	Nilai Kematangan Inovasi
7	Sipentalmu (Aplikasi Presensi Digital SD Muhammadiyah)	SDS Muhammadiyah	73.00
8	Pliek Digata (Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Untuk Anda)	Disdukcapil	72.00
9	Kolaborasi Pemasalan Olahraga Senam Pada Kegiatan Ahad Festival	Disporapar	70.00
10	Peusijuk (Perekaman Untuk Siswa/i Jangkau Usia KTP)	Disdukcapil	70.00
11	Pelataran PBB-P2 (Pelayanan Antar Himbauan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan)	BPKD	63.00
Tahun 2025			
1	Lapak Literasi (Lalat	Dispursip	Pengajuan Penilaian
2	Konsumen Perpus	Dispursip	Pengajuan Penilaian
3	Pasar Tani dan Gerakan Pangan Murah (PastaGakPaRah)	DKPPP	Pengajuan Penilaian
4	Belajar dengan video animasi (Beravsi)	SMP Negeri 3	Pengajuan Penilaian
5	Cerdas dengan Matematika dengan Excello SD Negeri 1 (Cemara exstansa)	SD Negeri 1	Pengajuan Penilaian

Sumber : https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/

Selain itu, yang menjadi fokus pelaksanaan Bidang Riset dan Inovasi daerah pada tahun 2025 adalah menyusun rencana induk dan peta jalan produk unggulan daerah (RIPJ-PUD). Hal ini diperlukan untuk keselarasan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menangah (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang sedang berjalan.

Namun demikian pada tahun 2026 untuk program pengembangan inovasi daerah sesuai dengan isu strategis nasional dan daerah serta program prioritas Kepala Daerah terpilih yaitu digitalisasi pelayanan publik dan pendidikan inklusi. Oleh sebab itu pengembangan inovasi daerah yang direncanakan pada tahun 2026 mengintervensi inovasi-inovasi daerah pada cluster pelayanan publik dan cluster pendidikan.

4.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRK

Pokok-pokok pikiran DPRK dalam kerangka penyusunan RKPK Tahun 2026 berisi saran dan pendapat DPRK yang merupakan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan

kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMK Lhokseumawe 2025-2029. Adapun untuk tahun 2026 berdasarkan Surat Ketua DPRK Lhokseumawe Nomor : 050/93/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal penyampaian Pokok-Pokok Pikiran Dewan terdapat 491 usulan permasalahan yang disampaikan dari 25 anggota DPRK (legislatif) kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe (eksekutif). Selanjutnya melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah-Republik Indonesia (SIPD-RI) terdapat 614 usulan permasalahan yang dilakukan penginputan oleh Operator Dewan masing-masing.

Usulan permasalahan dalam aplikasi SIPD-RI tersebut terbagi menjadi beberapa OPD tujuan yaitu:

1. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan : 37 usulan permasalahan.
2. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata : 7 usulan permasalahan.
3. Dinas Kesehatan : 11 ususlan permasalahan.
4. Dinas Lingkungan Hidup : 12 usulan permasalahan.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat : 311 usulan permasalahan.
6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja : 14 usulan permasalahan.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : 21 usulan permasalahan.
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah : 130 usulan permasalahan.
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan : 4 usulan permasalahan.
10. Dinas Sosial : 11 usulan permasalahan.
11. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah : 56 usulan permasalahan.

Kemudian untuk sinkronisasi dengan program prioritas daerah yakni:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan usulan permasalahan di OPD Dinas

Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

2. Percepatan pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kesiapsiagaan penanggulan risiko bencana merupakan usulan permasalahan di OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Lingkungan Hidup .
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas dan Berdaya Saing merupakan usulan permasalahan di OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Sosial dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan, tidak memiliki usulan permasalahan di OPD.
5. Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya merupakan usulan permasalahan di OPD Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.

4.5.1 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRK dimaksudkan sebagai upaya DPRK Lhokseumawe dalam mengarahkan dan mengawa si strategi pelaksanaan program pembangunan Kota Lhokseumawe, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan di Kota Lhokseumawe. Adapun tujuan disusunnya Pokok Pokok Pikiran DPRK Lhokseumawe Tahun 2026 yaitu:

a. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe, dalam menyusun dokumen awal Rancangan RKPK Tahun Anggaran 2026.
b. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPK, KUA, PPAS, RKA SKPK, dan RAPBK Tahun Anggaran 2026.

c. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian pembangunan Kota Lhokseumawe melalui perencanaan dan penganggaran APBK Tahun Anggaran 2026.
d. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPK dan RPJMK.
e. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kota Lhokseumawe dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRK Lhokseumawe.
f. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat kota Lhokseumawe yang lebih baik.

Pada Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 tidak ada usulan perubahan terhadap pokok-poko pikiran DPRK Lhokseumawe tahun 2026.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KOTA LHOKSEUMAWE

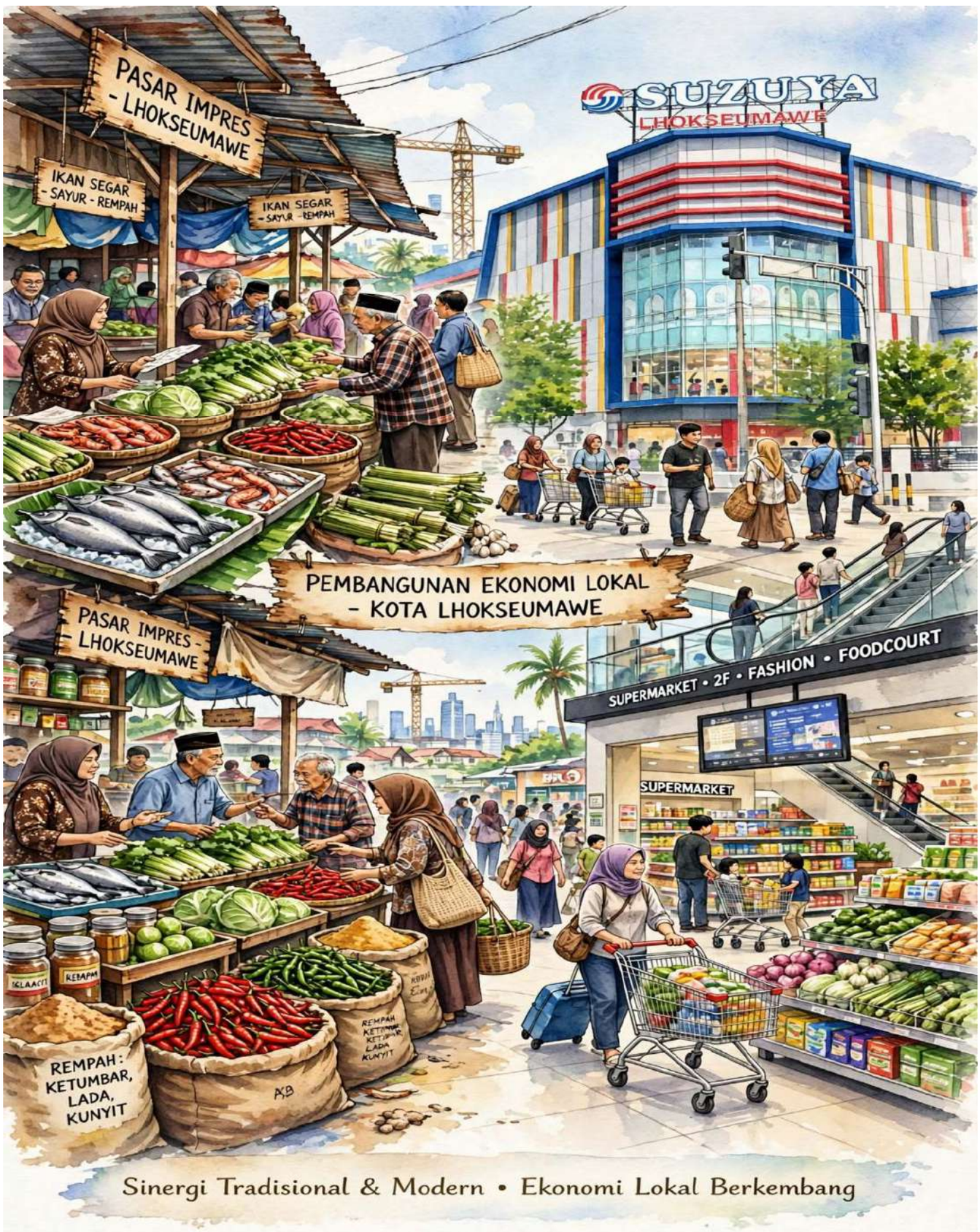

P-RKPK 2026

BAPPEDA KOTA LHOKSEUMAWE

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KOTA LHOKSEUMAWE

Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 disusun berdasarkan pada beberapa hal, sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024 Bagi Daerah Tertentu Di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;
2. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100,3/143/2026 tentang Penetapan Alokasi Penyesuaian Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2026;
3. Keadaan yang Menyebabkan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran Sebelumnya Harus Digunakan untuk Tahun Berjalan,
4. Memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:
    a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan;
    b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
    c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
    d. Pengendalian inflasi di daerah;
    e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
    f. Dukungan swasembada pangan; dan
    g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menangah (UMKM)
5. Pergeseran antar rekening belanja;
6. Penambahan/ pengurangan sasaran kegiatan, dan
7. Pengurangan dan penambahan belanja infrastruktur, berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan aspirasi masyarakat,

Selanjutnya berikut rekapitulasi anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rekapitulasi Anggaran Perangkat Daerah pada Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (5-3)
		RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	1,484,329,412.00	1,160,116,000.00	1,160,116,000.00	(324,213,412.00)
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	222,524,776,805.00	206,596,710,989.00	211,868,899,929.00	(10,655,876,876.00)
3	Dinas Kesehatan	125,971,019,886.00	112,456,054,503.00	115,627,561,037.00	(10,343,458,849.00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	65,264,662,954.69	46,771,283,132.00	148,137,494,465.00	82,872,831,510.31
5	Badan Penanggulan Bencana Daerah	8,337,943,218.00	7,776,399,500.00	10,406,350,643.00	2,068,407,425.00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	10,344,885,794.00	12,733,395,152.00	13,033,395,152.00	2,688,509,358.00
7	Dinas Sosial	4,559,626,268.00	4,053,731,880.00	4,553,731,880.00	(5,894,388.00)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7,110,882,752.00	5,302,463,036.00	6,043,868,568.00	(1,067,014,184.00)
9	Dinas Pertanahan	3,542,567,907.00	3,144,371,280.00	3,361,498,760.00	(181,069,147.00)
10	Dinas Lingkungan Hidup	40,887,730,122.10	43,618,725,162.10	58,330,728,562.10	17,442,998,440.00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,257,344,053.00	4,079,902,200.00	4,179,902,200.00	(77,441,853.00)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	4,349,042,182.00	3,736,059,080.00	4,653,459,080.00	304,416,898.00
13	Dinas Perhubungan	6,918,615,760.00	6,117,226,630.00	6,317,226,630.00	(601,389,130.00)
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	6,882,996,749.00	3,796,329,917.00	4,489,033,418.00	(2,393,963,331.00)
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Teadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	7,509,508,050.00	6,560,434,931.00	6,961,498,961.00	(548,009,089.00)
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	6,861,431,789.00	4,508,716,240.00	4,793,988,400.00	(2,067,443,389.00)
17	Sekretariat Majelis Adat Aceh	1,980,376,406.00	1,692,691,920.00	1,692,691,920.00	(287,684,486.00)
18	Dinas Peustakaan dan Kearsipan	3,537,957,649.00	4,065,662,197.00	4,065,662,197.00	527,704,548.00

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (5-3)
		RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	
1	2	3	4	5	6
19	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	11,158,891,361.00	9,428,758,878.00	12,509,801,878.00	1,350,910,517.00
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	9,262,915,708.00	8,872,147,300.00	11,045,243,950.00	1,782,328,242.00
21	Sekretariat Daerah	30,226,287,931.00	27,211,181,840.00	30,962,422,934.00	736,135,003.00
22	Sekretariat DPRK	26,931,623,309.00	22,771,859,563.00	23,441,401,608.00	(3,490,221,701.00)
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7,623,074,456.32	5,606,119,160.00	5,770,929,260.00	(1,852,145,196.32)
24	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	141,334,698,847.00	116,866,181,035.24	130,598,952,260.23	(10,735,746,586.77)
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8,042,769,906.00	5,430,838,000.00	6,059,648,000.00	(1,983,121,906.00)
26	Inspektorat	7,931,647,243.00	8,439,237,211.00	9,134,947,211.00	1,203,299,968.00
27	Kecamatan Banda Sakti	3,611,794,902.00	3,404,661,720.00	3,404,661,720.00	(207,133,182.00)
28	Kecamatan Blang Mangat	2,899,941,803.00	2,875,486,904.00	2,875,486,904.00	(24,454,899.00)
29	Kecamatan Muara Satu	2,722,511,841.00	2,209,803,800.00	2,232,342,800.00	(490,169,041.00)
30	Kecamatan Muara Dua	2,851,337,256.00	2,511,444,800.00	2,511,444,800.00	(339,892,456.00)
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5,216,004,336.00	4,171,339,640.00	4,512,679,640.00	(703,324,696.00)
32	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	3,260,805,336.00	3,309,202,480.00	3,344,172,480.00	83,367,144.00
33	Sekretariat Baitul Mal	7,575,535,858.00	7,297,601,456.00	7,324,396,856.00	(251,139,002.00)
34	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	13,513,838,291.00	9,910,481,846.00	12,004,424,296.00	(1,509,413,995.00)
Jumlah		**816,489,376,141.11**	**718,486,619,382.34**	**877,410,064,399.33**	**60,920,688,258.22**

Sumber: Aplikasi SIPD-RI, 2026

Pada tabel Rekapitulasi Anggaran Perangkat Daerah pada Perubahan RKPK Lhokseumawe tahun 2026, pada setiap Perangkat Daerah tergambarkan pengurangan pagu anggaran yang cukup signifikan hampir pada seluruh perangkat daerah, hal ini dikarenakan pada saat penyusunan RKPK tahun 2026 masih mempedomani Pendapatan Tahun 2025, namun pada saat dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026, terjadi

penurunan penerimaan yang signifikan dikarenakan pemerintah pusat menerapkan strategi efisiensi fiskal yang agresif guna menekan defisit anggaran negara sehingga berdampak langsung pada postur Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Transfer Umum (DTU) seluruh daerah termasuk Kota Lhokseumawe.

Selanjutnya pada Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 terdapat penambahan anggaran sebesar 158,923,445,016,00,- merupakan penambahan transfer ke daerah sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi Daerah tertentu di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat yang telah tertuang pada Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran APBK Lhokseumawe Tahun 2026, sehingga pada beberapa Perangkat Daerah mengalami penambahan pagu anggaran untuk belanja prioritas penanganan bencana dan pasca bencana.

Selanjutnya Dukungan pendanaan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan teenuhinya hak dasar masyarakat secara merata dan berkeadilan, SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah untuk menjamin kebutuhan esensial warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, Oleh karena itu, dukungan pendanaan SPM diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas pada sektor-sektor pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial.

Melalui pengalokasian anggaran yang memadai dalam RKPK Tahun 2026, Pemerintah Kota Lhokseumawe berupaya memastikan

keberlangsungan layanan publik dasar yang berkualitas, terjangkau, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, Hal ini sekaligus menjadi wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan standar pelayanan minimal yang konsisten, terukur, dan berkesinambungan, Alokasi dukungan anggaran SPM dirincikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.2
Rekapitulasi Pagu Indikatif Dukungan SPM dalam P-RKPK Lhokseumawe Tahun 2026

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD	PAGU P-RKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	159,180,000	-
2	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,149,900,000	-
3	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500,000,000	57,284,132
4	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	500,000,000	98,560,000
5	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	15,000,000,000	17,905,840,000
6	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50,000,000	-

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD	PAGU P-RKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
7	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	50,000,000	-
8	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10,000,000	-
9	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	10,000,000	-
10	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20,000,000	-
11	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	100,000,000	-
12	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	500,000,000	-
13	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	750,000,000	-
14	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2,600,000,000	1,596,500,000

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD	PAGU P-RKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
15	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	450,000,000	-
16	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	50,000,000	20,000,000
17	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2,822,823,000	1,185,466,884
18	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	150,000,000	-
19	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	500,000,000	-
20	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	361,500,000	-
21	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	100,000,000	-
22	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	200,000,000	-
23	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	500,000,000	200,000,000

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD	PAGU P-RKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
24	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	250,000,000	-
25	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	80,000,000	80,000,000
26	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50,000,000	-
27	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	20,000,000	-
28	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	20,000,000	-
29	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10,000,000	-
30	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	20,000,000	-
31	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	50,000,000	-

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD	PAGU P-RKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
32	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	20,000,000	-
33	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	60,000,000	-
34	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	209,950,095	-
35	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	100,000,000	-
36	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100,000,000	-
37	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	50,000,000	2,060,581,171
38	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	145,649,500	-
39	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	50,177,400	-

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD	PAGU P-RKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
40	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	150,000,000	150,000,000
41	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	20,000,000	494,408,725
42	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	50,000,000	-
43	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100,000,000	-
44	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	32,363,200	-
45	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	25,995,000	-
46	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	95,600,000	-

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD	PAGU P-RKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
47	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	100,000,000	-
48	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	15,000,000	820,000,000
49	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	20,000,000	516,020,000
50	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	250,000,000	-
51	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	50,000,000	-
52	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	20,000,000	-
53	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50,000,000	-
54	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	11,000,000	-

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD	PAGU P-RKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
55	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	75,000,000	-
56	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	75,000,000	-
57	SPM Bidang Pekerjaan Umum	Air Minum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Peipaan	475,000,000	130,087,000
58	SPM Bidang Pekerjaan Umum	Air Minum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	200,000,000	-

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD	PAGU P-RKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
59	SPM Bidang Pekerjaan Umum	Air Minum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Peipaan	2,725,868,323	-
60	SPM Bidang Pekerjaan Umum	Air Limbah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Teusat Skala Permukiman	700,000,000	4,599,000,000
61	SPM Bidang Pekerjaan Umum	Air Limbah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Unit Pengolahan Setempat	-	200.000.000
62	SPM Bidang Perumahan Rakyat	Permukiman	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	250,000,000	-
63	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	618,000,000	415,897,600

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD	PAGU P-RKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
64	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	50,000,000	15,000,000
65	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	121,220,000	339,590,000
66	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan balita	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	340,000,000	239,998,730
67	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	232,000,000	164,400,000
68	SPM Bidang Kesehatan	Jumlah pendududk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	40,600,000	20,000,000

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD	PAGU P-RKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
69	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	185,600,000	156,436,000
70	SPM Bidang Kesehatan	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	40,000,000	45,500,000
71	SPM Bidang Kesehatan	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	178,000,000	15,000,000
72	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	204,800,000	132,600,000
73	SPM Bidang Kesehatan	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	196,233,700	1,063,531,580

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD	PAGU P-RKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
74	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	72,000,000	10,000,000
75	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	500,000,000	500,000,000
76	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	30,000,000	-

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD	PAGU P-RKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
77	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	40,000,000	-
78	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10,000,000	-
79	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	25,000,000	-
80	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	30,000,000	-

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD	PAGU P-RKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
81	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	15,000,000	-
82	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	10,000,000	-
83	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	10,000,000	-
84	SPM Bidang Sosial	Bencana/Kedaruratan Pacsca Bencana	DINAS SOSIAL	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	25,000,000	100,000,000

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD	PAGU P-RKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
85	SPM Bidang Sosial	Bencana/Kedaruratan Pacsca Bencana	DINAS SOSIAL	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	20,000,000	100,000,000
86	SPM Bidang Sosial	Bencana/Kedaruratan Pacsca Bencana	DINAS SOSIAL	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	15,000,000	-
87	SPM Bidang Sosial	Bencana/Kedaruratan Pacsca Bencana	DINAS SOSIAL	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	15,000,000	-
88	SPM Bidang Sosial	Bencana/Kedaruratan Pacsca Bencana	DINAS SOSIAL	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	15,000,000	-
89	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	65,000,000	510,000,000
90	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	300,000,000	-

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD	PAGU P-RKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
91	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	41,628,500	650,000,000
92	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	32,875,300	7,000,000
93	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	40,000,000	510,000,000
94	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	31,997,900	-
95	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	13,400,000	-

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD	PAGU P-RKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
				dalam Daerah Kabupaten/Kota			
96	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	25,000,000,00	-
97	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	2,400,000,00	-
TOTAL ANGGARAN SPM						**36,850,761,918**	**35,098,701,822**

Sumber: Aplikasi SIPD-RI, 2026

Sama halnya dengan narasi tabel sebelumnya pada tabel Rekapitulasi Pagu Indikatif Dukungan SPM dalam P-RKPK Lhokseumawe Tahun 2026, beberapa sub kegiatan mengalami perubahan pagu anggaran dari pagu RKPK tahun 2026 ke pagu P-RKPK Tahun 2026 hal ini dikarenakan pada saat penyusunan RKPK tahun 2026 masih mempedomani Pendapatan Tahun 2025, namun pada saat dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026, terjadi penurunan penerimaan yang signifikan dikarenakan pemerintah pusat menerapkan strategi efisiensi fiskal yang agresif guna menekan defisit anggaran negara sehingga berdampak langsung pada postur Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Transfer Umum (DTU) seluruh daerah termasuk Kota Lhokseumawe sehingga berdampak juga pada pagu dukungan SPM dalam P-RKPK Lhokseumawe Tahun 2026.

Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2026 juga memuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional (Pro SN) baik program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 5.3
Dukungan ProSN pada P-RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2026

No	Nama Program Strategis Nasional (ProSN)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 2026 (Indikator Kinerja)	RKPD 2026	P-RKPD 2026	Dinas Pelaksana
Penanggulangan Kemiskinan								
1	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekolah Rakyat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	142,414 Orang	15,000,000	210,000,000	Dinsos
		Program pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	5 Dokumen	40,000,000	-	DLH

No	Nama Program Strategis Nasional (ProSN)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 2026 (Indikator Kinerja)	RKPD 2026	P-RKPD 2026	Dinas Pelaksana
3	Pembangunan Tiga Juta Rumah	Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5 Unit Rumah	150,000,000	-	Dinas PUPR
		Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	20 unit	2,476,106,295	-	Dinas PUPR
Ketahanan Pangan								
1	Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri dan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-
Kesehatan untuk Semua								

No	Nama Program Strategis Nasional (ProSN)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 2026 (Indikator Kinerja)	RKPD 2026	P-RKPD 2026	Dinas Pelaksana
1	Jaminan Kesehatan Nasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	7 Dokumen	13,376,617,843	14,036,100,035	Dinkes
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	142,414 Orang	15,000,000	210,000,000	Dinsos
2	Makan Bergizi Gratis	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	10,000,000	169,956,000	Dinkes
Perluasan Akses Pendidikan								
1	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	10,000,000	-	PK

No	Nama Program Strategis Nasional (ProSN)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 2026 (Indikator Kinerja)	RKPD 2026	P-RKPD 2026	Dinas Pelaksana
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	10,000,000	-	PK
Pertumbuhan Ekonomi								
1	Pengendalian Inflasi	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	20,000,000	2,000,000	Disperindagkop
2	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit usaha	20,000,000	-	Disperindagkop
3	Kemudahan Perizinan di Daerah	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Aplikasi SIPD-RI, 2026

Selain Dukungan pendanaan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM), Asta Cita dan ProSN Kota Lhokseumawe dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi Daerah tertentu di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat juga terdapat dukungan pendanaan untuk penanggulangan bencana pada tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 5.4
Realisasi Anggaran TKD Kebencanaan Kota Lhokseumawe
Tahun 2026

No	Nama PD	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi TKD 2026 Per 28 Agustus 2026 (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1	Badan Penanggulangan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	500,000,000	269,970,000	53.99
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	500,000,000	173,670,000	34.73
		Penyediaan logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100,000,000	99,850,000	99.85
		Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	479,481,000	274,202,800	57.19
		Jumlah	**1,579,481,000**	**817,692,800**	**51.77**
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100,000,000	0	0.00
		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	80,000,000	0	0.00
		Jumlah	**180,000,000**	**0**	**0.00**
3	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	30,000,000	18,975,952	63.25
		Jumlah	**30,000,000**	**18,975,952**	**63.25**
4	Dinas Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1,050,000,000	883,285,000	84.12
		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat Skala Permukiman	3,000,000,000	927,581,000	30.92
		Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	9,146,016,671	1,324,429,000	14.48
		Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4,100,000,000	1,141,882,500	27.85
		Pembangunan Jalan	47,311,426,329	6,855,675,000	14.49
		Rekonstruksi jalan	10,282,057,000	1,291,286,000	12.56

No	Nama PD	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi TKD 2026 Per 28 Agustus 2026 (Rp)	Persentase Realisasi (%)
		Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	7,999,800,000	1,064,922,900	13.31
		Jumlah	**82,889,300,000**	**13,489,061,400**	**16.27**
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	200,000,000	95,600,000	47.80
		Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	50,000,000	0	0.00
		Pelaksanaan Eksekusi Cambuk sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	50,000,000	0	0.00
		Jumlah	**300,000,000**	**95,600,000**	**31.87**
6	Dinas Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000	0	0.00
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan taruna Siaga Bencana	100,000,000	0	0.00
		Jumlah	**300,000,000**	**0**	**0.00**
7	Dinas Lingkungan Hidup	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9,000,000,000	1,578,243,029	17.54
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	100,000,000	0	0.00
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5,180,000,000	463,545,588	8.95
		Jumlah	**14,280,000,000**	**2,041,788,617**	**14.30**

No	Nama PD	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi TKD 2026 Per 28 Agustus 2026 (Rp)	Persentase Realisasi (%)
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	100,000,000	35,944,000	35.94
		Jumlah	**100,000,000**	**35,944,000**	**35.94**
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	440,000,000	0	0.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	330,000,000	0	0.00
		Jumlah	**770,000,000**	**0**	**0.00**
10	Dinas Perhubungan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	200,000,000	0	0.00
		Jumlah	**200,000,000**	**0**	**0.00**
11	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Keikutsertaan Anggota Kontingen Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga	200,000,000	0	0.00
		Jumlah	**200,000,000**	**0**	**0.00**
12	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Pendampingan Pembangunan Sarana Pendukung Pertanian	800,000,000	0	0.00
		Pendampingan Pembangunan Sarana Pendukung Pertanian	200,000,000	0	0.00
		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	1,000,000,000	297,973,600	29.80
		Jumlah	**2,000,000,000**	**297,973,600**	**14.90**
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	90,000,000	0	0.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	200,000,000	0	0.00

No	Nama PD	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi TKD 2026 Per 28 Agustus 2026 (Rp)	Persentase Realisasi (%)
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5,000,000	0	0.00
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	10,000,000	9,917,000	99.17
		Koordinasi, Soinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2,300,000,000	377,997,900	16.43
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta masyarakat	400,000,000	0	0.00
		Jumlah	**3,005,000,000**	**387,914,900**	**12.91**
14	Sekretariat Daerah Kota	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	2,500,000,000	728,382,750	29.14
		Jumlah	**2,500,000,000**	**728,382,750**	**29.14**
15	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	320,000,000	0	0.00
		Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	14,158,896,000	0	0.00
		Jumlah	**14,478,896,000**	**0**	**0.00**
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	400,000,000	0	0.00
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	550,000,000	0	0.00
		Jumlah	**950,000,000**	**0**	**0.00**
17	Inspektorat	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	400,000,000	198,317,313	49.58
		Jumlah	**400,000,000**	**198,317,313**	**49.58**
		Total	**124,162,677,000**	**18,111,651,332**	**14.59**

Sumber : BPKD Lhokseumawe, 2026

Adapun rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan pada Perubahan RKPK Tahun 2026 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai dengan urusan pemerintahan daerah dan Perangkat Daerah, secara rinci disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 5.5
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.0.00.0.00.08.0000	**Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah**							**1,484,329,412**	**1,160,116,000**	**1,160,116,000**	**(324,213,412)**							**1,575,603,824**	**SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1,484,329,412**	**1,160,116,000**	**1,160,116,000**	**(324,213,412)**							**1,575,603,824**	**SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH**
	1 01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1,484,329,412**	**1,160,116,000**	**1,160,116,000**	**(324,213,412)**							**1,575,603,824**	**SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH**
1.	1 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**				**B/62,8 Kategori/Nilai**	**62,9 Point**	**1,383,612,816**	**1,080,116,000**	**1,080,116,000**	**(303,496,816)**					**MPD Kota Lhokseumawe**		**1,425,603,824**	**SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH**
		[Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***65.5***	***62.55***	***62.6***			***1,383,612,816***	***1,080,116,000***	***1,080,116,000***	***(303,496,816)***						***62.8***	***1,425,603,824***	***SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH***
	1 01 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah***				***9 Dokumen***	***10 Dokumen***	***8,000,000***	***2,000,000***	***2,000,000***	***(6,000,000)***							***10,000,000***	***SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH***
	1 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	8,000,000	2,000,000	2,000,000	(6,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			10,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
	1 01 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan Administrasi Keuangan pada Sekretariat MPD***				***12 Laporan***	***12 Dokumen***	***921,696,336***	***940,716,000***	***940,716,000***	***19,019,664***							***879,603,824***	***SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH***
	1 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				168 Orang/bulan	252 Orang/bulan	921,696,336	940,716,000	940,716,000	19,019,664	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			879,603,824	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
	1 01 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah***				***5 Dokumen***	***12 Dokumen***	***60,140,000***	***16,700,000***	***16,700,000***	***(43,440,000)***							***60,000,000***	***SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH***
	1 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				40 Paket	40 Paket	9,000,000	3,700,000	3,700,000	(5,300,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			9,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
	1 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				230 Paket	230 Paket	5,000,000	1,500,000	1,500,000	(3,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			6,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
	1 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	5,000,000	1,500,000	1,500,000	(3,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			5,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
	1 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				360 Dokumen	360 Dokumen	1,140,000	-	-	(1,140,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
	1 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				37 Laporan	37 Laporan	40,000,000	10,000,000	10,000,000	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			40,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
	1 01 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***2 Dokumen***	***12 Dokumen***	***330,176,480***	***87,900,000***	***87,900,000***	***(242,276,480)***							***351,000,000***	***SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				2 Laporan	2 Laporan	1,000,000	500,000	500,000	(500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			1,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
	1 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				372 Laporan	372 Laporan	329,176,480	87,400,000	87,400,000	(241,776,480)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			350,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
	1 01 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***19 Unit***	***19 Unit***	***63,600,000***	***32,800,000***	***32,800,000***	***(30,800,000)***							***125,000,000***	***SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH***
	1 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	33,100,000	17,300,000	17,300,000	(15,800,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			40,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
	1 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				3 Unit	3 Unit	25,500,000	13,500,000	13,500,000	(12,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			80,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
	1 01 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				16 Unit	16 Unit	5,000,000	2,000,000	2,000,000	(3,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			5,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
2.	**1 01 08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH**	**Persentase Rekomendasi yang Dihasilkan Terkait Penyelenggaraan Pendidikan Aceh**				**100 Persen**	**100.00 Persen 100 Persen**	**100,716,596**	**80,000,000**	**80,000,000**	**(20,716,596)**					**Pendidikan di Kota Lhokseumawe Satuan Pendidikan di Kota Lhokseumawe**		**150,000,000**	**SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH**
		[Meningkatnya mutu pendidikan dengan kebijakan/rekomendasi yang dihasilkan terkait Penyelenggaraan Pendidikan Aceh]	***Persentase rekomendasi yang dihasilkan terkait Penyelenggaraan Pendidikan Aceh***	***100***	***0***	***50***			***100,716,596***	***80,000,000***	***80,000,000***	***(20,716,596)***						***100***	***150,000,000***	***SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH***
	1 01 08 7.01	***Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh***	***Jumlah Rekomendasi di Bidang Pendidikan yang Dihasilkan***				***2 Rekomendasi***	***2 Rekomendasi***	***40,000,000***	***20,000,000***	***20,000,000***	***(20,000,000)***							***45,000,000***	***SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH***
	1 01 08 7.01 0002	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Telah Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh*				3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	40,000,000	20,000,000	20,000,000	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			45,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
	1 01 08 7.03	***Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh***	***Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh***				***30 Persen***	***1 Dokumen***	***5,716,596***	***20,000,000***	***20,000,000***	***14,283,404***							***35,000,000***	***SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH***
	1 01 08 7.03 0002	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	*Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah*				1 Dokumen	1 Dokumen	5,716,596	20,000,000	20,000,000	14,283,404	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			35,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
	1 01 08 7.05	***Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh***	***Jumlah Satuan Pendidikan yang Dilakukan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh yang diselenggarakan***				***60 Persen***	***74 Satuan Pendidikan***	***55,000,000***	***40,000,000***	***40,000,000***	***(15,000,000)***							***70,000,000***	***SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH***
	1 01 08 7.05 0002	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	*Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh*				2 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	35,000,000	20,000,000	20,000,000	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			35,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 01 08 7.05 0003	Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh	*Jumlah Satuan Pendidikan di Aceh yang Dievaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya*				3 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			35,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
	1.01.2.22.0.00.02.0000	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**							**222,524,776,805**	**206,596,710,989**	**211,868,899,929**	**(10,655,876,876)**							**161,153,000,000**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**221,891,776,805**	**206,046,710,989**	**211,158,899,929**	**(10,732,876,876)**							**160,892,000,000**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
	1 01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**221,891,776,805**	**206,046,710,989**	**211,158,899,929**	**(10,732,876,876)**							**160,892,000,000**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
3.	**1 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI SAKIP OPD**				**61.65 Persen**	**B (66.32) Kategori/Nilai**	**177,620,129,260**	**172,667,986,558**	**173,576,708,682**	**(4,043,420,578)**					**ADM BMD Dinas P dan K Kota Lhokseumawe ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe Meningkatnya Kualitas Pendidikan**		**132,707,000,000**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		[Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Perangkat Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***61.85***	***0***	***61.60***			***177,620,129,260***	***172,667,986,558***	***173,576,708,682***	***(4,043,420,578)***						***61.65***	***132,707,000,000***	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	1 01 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah***				***10 Dokumen***	***10 Dokumen***	***215,204,780***	***29,071,678***	***66,684,433***	***(148,520,347)***							***50,000,000***	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	1 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	185,704,780	29,071,678	66,684,433	(119,020,347)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*				15 Dokumen	15 Dokumen	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*				15 Dokumen	15 Dokumen	2,500,000	-	-	(2,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*				15 Dokumen	15 Dokumen	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*				15 Dokumen	15 Dokumen	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				5 Laporan	5 Laporan	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				5 Laporan	5 Laporan	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.01 0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000	-	-	(1,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 01 01 2.01 0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	*Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun*				2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000	-	-	(1,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN***				***1500 Orang/bulan***	***1500 Orang/bulan***	***175,939,797,000***	***169,274,804,000***	***169,766,562,791***	***(6,173,234,209)***							***123,950,000,000***	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	1 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				1300 Orang/bulan	1300 Orang/bulan	175,902,797,000	169,274,804,000	169,766,562,791	(6,136,234,209)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD SISA DAK NON FISIK-TPG PNSD SISA DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			123,950,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				5 Dokumen	5 Dokumen	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*				4 Dokumen	4 Dokumen	4,000,000	-	-	(4,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*				4 Dokumen	4 Dokumen	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				5 Laporan	5 Laporan	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.02 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*				3 Dokumen	3 Dokumen	3,000,000	-	-	(3,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*				16 Laporan	16 Laporan	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia***				***5 Paket***	***5 Paket***	***35,000,000***	-	-	***(35,000,000)***							-	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 01 01 2.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*				4 Dokumen	4 Dokumen	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*				4 Dokumen	4 Dokumen	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.03 0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*				4 Laporan	4 Laporan	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*				4 Laporan	4 Laporan	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*				4 Laporan	4 Laporan	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*				4 Laporan	4 Laporan	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.03 0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*				4 Dokumen	4 Dokumen	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***				***2 Dokumen***	***2 Dokumen***	***55,313,100***	-	-	***(55,313,100)***							-	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	1 01 01 2.05 0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*				10 Unit	10 Unit	12,504,600	-	-	(12,504,600)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*				5 Dokumen	5 Dokumen	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*				20 Dokumen	20 Dokumen	2,808,500	-	-	(2,808,500)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 01 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*				20 Orang	20 Orang	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				20 Orang	20 Orang	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan***				***4 Paket***	***4 Paket***	***172,000,000***	***74,000,000***	***74,000,000***	***(98,000,000)***							***160,000,000***	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	1 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	40,000,000	5,000,000	5,000,000	(35,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			40,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	20,000,000	5,000,000	5,000,000	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				10 Laporan	10 Laporan	2,000,000	-	-	(2,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				80 Laporan	80 Laporan	100,000,000	64,000,000	64,000,000	(36,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*				100 Dokumen	100 Dokumen	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan***				***3 Unit***	***3 Unit***	***152,105,000***	-	***314,358,908***	***162,253,908***							-	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	1 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.07 0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan*				3 Unit	3 Unit	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				3 Unit	3 Unit	87,105,000	-	-	(87,105,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				25 Unit	25 Unit	25,000,000	-	314,358,908	289,358,908	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat***				***4 Laporan***	***4 Laporan***	***895,709,380***	***3,257,610,880***	***3,314,545,550***	***2,418,836,170***							***8,422,000,000***	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	1 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				4 Laporan	4 Laporan	7,500,000	1,500,000	1,500,000	(6,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			2,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				3 Laporan	3 Laporan	127,000,000	127,000,000	183,934,670	56,934,670	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			260,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				4 Laporan	4 Laporan	26,398,500	-	-	(26,398,500)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				5 Laporan	5 Laporan	734,810,880	3,129,110,880	3,129,110,880	2,394,300,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			8,160,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya***				***2 Unit***	***2 Unit***	***155,000,000***	***32,500,000***	***40,557,000***	***(114,443,000)***							***125,000,000***	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	1 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				2 Unit	2 Unit	25,000,000	22,500,000	22,500,000	(2,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			25,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				5 Unit	5 Unit	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*				200 Unit	200 Unit	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 01 01 2.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*				5 Unit	5 Unit	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				3 Unit	3 Unit	50,000,000	5,000,000	5,000,000	(45,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				50 Unit	50 Unit	50,000,000	5,000,000	13,057,000	(36,943,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**1 01 02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun**				**57,57 Persen 95,73 Persen 99,05 Persen**	**57,57 Angka 95,73 Angka 99,05 Angka**	**43,844,747,545**	**33,378,724,431**	**37,472,191,247**	**(6,372,556,298)**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe**		**28,105,000,000**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		[Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah]	***Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun***	***100 72.08 99.25***	***0***	***51.08 93.18 99***			***43,844,747,545***	***33,378,724,431***	***37,472,191,247***	***(6,372,556,298)***						***57.57 95.73 99.05***	***28,105,000,000***	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	1 01 02 2.01	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	***Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun***				***2 Unit***	***2 Unit***	***27,316,994,000***	***21,038,335,706***	***21,387,241,151***	***(5,929,752,849)***							***17,800,000,000***	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	1 01 02 2.01 0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*				2 Ruang	2 Ruang	159,180,000	-	-	(159,180,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun*				2 Ruang	2 Ruang	150,000,000	-	-	(150,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun*				1 Ruang	1 Ruang	100,000,000	-	357,570,335	257,570,335	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*				2 Unit	2 Unit	1,149,900,000	-	-	(1,149,900,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				5 Ruang	5 Ruang	99,790,000	-	-	(99,790,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				5 Ruang	5 Ruang	80,000,000	-	-	(80,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 01 02 2.01 0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				5 Ruang	5 Ruang	61,550,000	-	-	(61,550,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0014	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia*				100 Paket	100 Paket	250,000,000	-	-	(250,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*				200 Paket	200 Paket	70,175,200	-	-	(70,175,200)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	500,000,000	200,000,000	166,019,800	(333,980,200)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*				200 Orang	200 Orang	500,000,000	57,284,132	57,284,132	(442,715,868)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah*				110 Satuan Pendidikan	110 Satuan Pendidikan	500,000,000	48,560,000	48,560,000	(451,440,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*				110 Satuan Pendidikan	110 Satuan Pendidikan	15,000,000,000	17,905,840,000	17,905,840,000	2,905,840,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			15,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar*				110 Orang	110 Orang	57,525,800	-	-	(57,525,800)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	*Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun*				1 Ruang	1 Ruang	206,050,000	-	-	(206,050,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	*Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				3 Ruang	3 Ruang	270,000,000	-	-	(270,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan*				200 Unit	200 Unit	100,000,000	-	-	(100,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 01 02 2.01 0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan*				100 Orang	100 Orang	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan*				100 Orang	100 Orang	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	*Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi*				2 Komunitas	2 Komunitas	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	*Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,000,000	-	50,000,000	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	*Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik*				250 Buku	250 Buku	500,000,000	-	-	(500,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*				300 Paket	300 Paket	750,000,000	-	-	(750,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*				5 Ruang	5 Ruang	2,600,000,000	1,596,500,000	1,596,500,000	(1,003,500,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				5 Unit	5 Unit	450,000,000	-	-	(450,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*				110 Satuan Pendidikan	110 Satuan Pendidikan	50,000,000	20,000,000	20,000,000	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 01 02 2.01 0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				5 Ruang	5 Ruang	2,822,823,000	1,210,151,574	1,185,466,884	(1,637,356,116)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*				50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	150,000,000	-	-	(150,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.01 0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia*				50 Paket	50 Paket	500,000,000	-	-	(500,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	***Jumlah sarana dan prasarana pendidikan smp yang dikelola***				***36 Satuan Pendidikan***	***36 Satuan Pendidikan***	***12,607,115,645***	***9,305,050,000***	***11,449,611,371***	***(1,157,504,274)***							***8,000,000,000***	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	1 01 02 2.02 0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*				2 Ruang	2 Ruang	500,000,000	-	-	(500,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun*				1 Ruang	1 Ruang	300,000,000	-	-	(300,000,000)	Kota Lhoksemawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun*				2 Ruang	2 Ruang	200,000,000	-	-	(200,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0006	Pembangunan Laboratorium	*Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun*				1 Ruang	1 Ruang	500,000,000	-	-	(500,000,000)	Kota Lhoksemawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	*Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun*				1 Ruang	1 Ruang	300,000,000	-	-	(300,000,000)	Kota Lhoksemawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	*Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun*				1 Unit	1 Unit	109,350,000	-	-	(109,350,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	*Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun*				2 Unit	2 Unit	200,000,000	-	-	(200,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 01 02 2.02 0011	Pembangunan Kantin Sekolah	*Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun*				1 Unit	1 Unit	48,800,000	-	-	(48,800,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*				5 Unit	5 Unit	361,500,000	-	-	(361,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				5 Ruang	5 Ruang	100,000,000	-	-	(100,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				3 Ruang	3 Ruang	150,000,000	-	-	(150,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				5 Ruang	5 Ruang	100,000,000	-	-	(100,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	*Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				2 Ruang	2 Ruang	200,000,000	-	-	(200,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	*Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat*				1 Ruang	1 Ruang	200,000,000	-	-	(200,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	*Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				1 Unit	1 Unit	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	*Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat*				1 Unit	1 Unit	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				2 Unit	2 Unit	200,000,000	-	-	(200,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0025	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia*				150 Paket	150 Paket	363,715,550	-	-	(363,715,550)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 01 02 2.02 0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	*Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia*				100 Paket	100 Paket	100,000,000	-	-	(100,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*				100 Paket	100 Paket	100,000,000	-	-	(100,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	500,000,000	200,000,000	197,126,800	(302,873,200)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*				150 Orang	150 Orang	250,000,000	-	-	(250,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan*				25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	80,000,000	30,000,000	66,853,400	(13,146,600)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			80,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*				25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	6,700,000,000	9,075,050,000	9,075,050,000	2,375,050,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			7,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama*				60 Orang	60 Orang	25,000,000	-	-	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan*				200 Unit	200 Unit	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan*				60 Orang	60 Orang	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	*Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan*				4 Konten Digtal	4 Konten Digital	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan*				5 Orang	5 Orang	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 01 02 2.02 0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*				4 Dokumen	4 Dokumen	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*				5 Dokumen	5 Dokumen	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	*Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi*				4 Komunitas	4 Komunitas	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	*Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	20,000,000	-	50,000,000	30,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*				115 Satuan Pendidikan	115 Satuan Pendidikan	60,000,000	-	-	(60,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*				2 Ruang	2 Ruang	209,950,095	-	-	(209,950,095)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	*Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik*				25000 Buku	25000 Buku	100,000,000	-	-	(100,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*				500 Paket	500 Paket	100,000,000	-	-	(100,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				2 Ruang	2 Ruang	58,800,000	-	-	(58,800,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia*				400 Paket	400 Paket	50,000,000	-	2,060,581,171	2,010,581,171	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			400,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.02 0068	Penyediaan infrastruktur TIK	*Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia*				20 Paket	20 Paket	100,000,000	-	-	(100,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 01 02 2.03	***Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)***	***Jumlah sarana dan prasarana pendidikan PAUD yang dikelola***				***129 Satuan Pendidikan***	***129 Satuan Pendidikan***	***3,195,637,900***	***2,499,318,725***	***3,299,318,725***	***103,680,825***							***2,270,000,000***	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	1 01 02 2.03 0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun*				2 Unit	2 Unit	145,649,500	-	-	(145,649,500)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.03 0007	Pengadaan Mebel PAUD	*Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia*				250 Paket	250 Paket	100,000,000	-	-	(100,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.03 0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	*Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia*				250 Paket	250 Paket	20,852,800	-	-	(20,852,800)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.03 0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	*Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia*				100 Paket	100 Paket	100,000,000	-	300,000,000	200,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.03 0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	50,177,400	-	-	(50,177,400)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.03 0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*				80 Orang	80 Orang	150,000,000	50,000,000	150,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.03 0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*				76 Satuan Pendidikan	76 Satuan Pendidikan	20,000,000	94,408,725	494,408,725	474,408,725	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.03 0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP*				150 Satuan Pendidikan	150 Satuan Pendidikan	2,000,000,000	2,354,910,000	2,354,910,000	354,910,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			2,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.03 0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD*				300 Orang	300 Orang	100,000,000	-	-	(100,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.03 0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara*				20 Unit	20 Unit	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 01 02 2.03 0032	Penataan Ruang/Sudut Baca	*Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata*				5 Ruang	5 Ruang	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.03 0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				3 Ruang	3 Ruang	150,000,000	-	-	(150,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.03 0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	*Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.03 0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*				100 Paket	100 Paket	100,000,000	-	-	(100,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.03 0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				5 Unit	5 Unit	32,363,200	-	-	(32,363,200)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.03 0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia*				250 Paket	250 Paket	25,995,000	-	-	(25,995,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.03 0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar*				115 Satuan Pendidikan	115 Satuan Pendidikan	25,000,000	-	-	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.03 0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				2 Ruang	2 Ruang	95,600,000	-	-	(95,600,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.04	***Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan***	***Jumlah sarana dan prasarana pendidikan non formal yang dikelola***				***2 Satuan Pendidikan***	***2 Satuan Pendidikan***	***725,000,000***	***536,020,000***	***1,336,020,000***	***611,020,000***							***35,000,000***	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	1 01 02 2.04 0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*				60 Peserta Didik	60 Peserta Didik	100,000,000	-	-	(100,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.04 0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*				50 Orang	50 Orang	100,000,000	-	-	(100,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 01 02 2.04 0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*				5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	15,000,000	20,000,000	820,000,000	805,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			15,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.04 0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP*				2 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	20,000,000	516,020,000	516,020,000	496,020,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.04 0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan*				10 Orang	10 Orang	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.04 0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan*				220 Unit	220 Unit	250,000,000	-	-	(250,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.04 0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*				2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.04 0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	*Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.04 0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				2 Unit	2 Unit	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 02 2.04 0057	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun*				1 Ruang	1 Ruang	100,000,000	-	-	(100,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	**1 01 03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal**				**100 Persen**	**100 Persen**	**156,900,000**	**-**	**100,000,000**	**(56,900,000)**					**Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe**		**50,000,000**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		[Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan]	***Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal***	***100***	***0***	***100***			***156,900,000***	-	***100,000,000***	***(56,900,000)***						***100***	***50,000,000***	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	1 01 03 2.01	***Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar***	***Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun***				***2 Dokumen***	***2 Dokumen***	***126,000,000***	-	***100,000,000***	***(26,000,000)***							***50,000,000***	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	1 01 03 2.01 0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun*				4 Dokumen	4 Dokumen	50,000,000	-	100,000,000	50,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 01 03 2.01 0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia*				100 Buku	100 Buku	11,000,000	-	-	(11,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 03 2.01 0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya*				110 Orang	110 Orang	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 03 2.01 0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	*Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun*				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 03 2.01 0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun*				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 03 2.02	***Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal***	***Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia***				***2 Paket***	***2 Paket***	***30,900,000***	-	-	***(30,900,000)***							-	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	1 01 03 2.02 0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia*				300 Buku	300 Buku	30,900,000	-	-	(30,900,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6.	**1 01 04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Indeks Pemerataan Guru**				**0,60 Persen**	**0,60 Nilai**	**150,000,000**	**-**	**-**	**(150,000,000)**					**Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe**		**-**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		[Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan]	**Indeks Pemerataan Guru** ***Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik***	***0.70*** ***31***	***0***	***0.57*** ***29.96***			***150,000,000***	-	-	***(150,000,000)***						***0.60*** ***30.16***	-	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	1 01 04 2.01	***Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan***	***Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan***				***4 Dokumen***	***4 Dokumen***	***150,000,000***	-	-	***(150,000,000)***							-	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	1 01 04 2.01 0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*				4 Dokumen	4 Dokumen	75,000,000	-	-	(75,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 04 2.01 0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*				1 Laporan	1 Laporan	75,000,000	-	-	(75,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7.	**1 01 05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui**				**100 Persen**	**100 Persen**	**120,000,000**	**-**	**10,000,000**	**(110,000,000)**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe**		**30,000,000**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		[Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan]	***Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui***	***100***	***0***	***100***			***120,000,000***	-	***10,000,000***	***(110,000,000)***						***100***	***30,000,000***	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	1 01 05 2.01	***Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat***	***Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat***				***4 Dokumen***	***4 Dokumen***	***60,000,000***	-	-	***(60,000,000)***							-	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	1 01 05 2.01 0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*				4 Dokumen	4 Dokumen	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 01 05 2.01 0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*				4 Dokumen	4 Dokumen	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 05 2.02	***Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat***	***Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat***				***2 Dokumen***	***2 Dokumen***	***60,000,000***	-	***10,000,000***	***(50,000,000)***							***30,000,000***	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	1 01 05 2.02 0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*				4 Dokumen	4 Dokumen	30,000,000	-	10,000,000	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			30,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 05 2.02 0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**633,000,000**	**550,000,000**	**710,000,000**	**77,000,000**							**261,000,000**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
	2 22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**633,000,000**	**550,000,000**	**710,000,000**	**77,000,000**							**261,000,000**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
8.	**2 22 02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan**				**16 Persen 60 Persen**	**16 Persen 60 Persen**	**210,000,000**	**-**	**-**	**(210,000,000)**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe**		**80,000,000**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
	2 22 02 2.02	***Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional***				***1 Laporan***	***1 Laporan***	***195,000,000***	-	-	***(195,000,000)***							-	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	2 22 02 2.02 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan*				15 Objek	15 Objek	165,000,000	-	-	(165,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2 22 02 2.02 0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	*Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional*				3 Laporan	3 Laporan	25,000,000	-	-	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2 22 02 2.02 0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	*Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan*				10 Sertifikat	10 Sertifikat	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan]	***Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan***	***38***	***0***	***15***			***15,000,000***	-	-	***(15,000,000)***						***16***	***80,000,000***	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	2 22 02 2.01	***Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional***				***1 Laporan***	***1 Laporan***	***15,000,000***	-	-	***(15,000,000)***							***80,000,000***	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	2 22 02 2.01 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*				3 Objek	3 Objek	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			80,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9.	**2 22 03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan**				**60 Persen**	**60 Persen**	**80,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**	**(30,000,000)**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe**		**50,000,000**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		[Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional]	***Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan***	***83.33***	***0***	***75***			***80,000,000***	***50,000,000***	***50,000,000***	***(30,000,000)***						***60***	***50,000,000***	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	2 22 03 2.01	***Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional***				***1 Laporan***	***1 Laporan***	***80,000,000***	***50,000,000***	***50,000,000***	***(30,000,000)***							***50,000,000***	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	2 22 03 2.01 0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)*				100 Orang	100 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 22 03 2.01 0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				10 Lembaga	10 Lembaga	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10.	**2 22 04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal**				**50 Persen**	**50 Persen**	**65,000,000**	**-**	**-**	**(65,000,000)**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe**		**-**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah]	***Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal***	***80***	***0***	***46.67***			***65,000,000***	-	-	***(65,000,000)***						***50***	-	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	2 22 04 2.01	***Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah tempat bersejarah yang dilestarikan***				***10 Objek***	***10 Objek***	***65,000,000***	-	-	***(65,000,000)***							-	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	2 22 04 2.01 0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan*				20 Orang	20 Orang	25,000,000	-	-	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2 22 04 2.01 0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah*				20 Unit	20 Unit	40,000,000	-	-	(40,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
11.	**2 22 05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**.Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan**				**24,52 Persen 40,7 Persen 68.18 Persen**	**24,52 Persen 40,7 Persen 68.18 Persen**	**233,000,000**	**-**	**50,000,000**	**(183,000,000)**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe**		**61,000,000**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		[Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan]	***Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan***	***100 55.15***	***0***	***24.52 26.9***			***233,000,000***	-	***50,000,000***	***(183,000,000)***						***24.52 40.7***	***61,000,000***	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	2 22 05 2.01	***Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota***	***Jumlah Cagar Budaya yang tersedia***				***3 Objek***	***3 Objek***	***55,000,000***	-	***50,000,000***	***(5,000,000)***							***61,000,000***	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	2 22 05 2.01 0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	*Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan*				2 Objek	2 Objek	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2 22 05 2.01 0002	Penetapan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan*				5 Objek	5 Objek	25,000,000	-	50,000,000	25,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			61,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2 22 05 2.02	***Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota***	***Jumlah Cagar Budaya yang di kelola***				***3 Objek***	***3 Objek***	***100,000,000***	-	-	***(100,000,000)***							-	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	2 22 05 2.02 0001	Pelindungan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi*				5 Objek	5 Objek	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2 22 05 2.02 0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan*				5 Objek	5 Objek	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2 22 05 2.03	***Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah objek cagar budaya yang diterbitkan lainnya***				***2 Objek***	***2 Objek***	***78,000,000***	-	-	***(78,000,000)***							-	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	2 22 05 2.03 0001	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi*				5 Objek	5 Objek	48,000,000	-	-	(48,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2 22 05 2.03 0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi*				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
12.	**2 22 06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum**				**13,76 Persen**	**13,76 Persen**	**45,000,000**	**500,000,000**	**610,000,000**	**565,000,000**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe**		**70,000,000**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		[Persentase Museum yang dilestarikan]	***Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum***	***13.84***	***0***	***13.76***			***45,000,000***	***500,000,000***	***610,000,000***	***565,000,000***						***13.76***	***70,000,000***	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	2 22 06 2.01	***Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota***	***Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara***				***20 Unit***	***20 Unit***	***45,000,000***	***500,000,000***	***610,000,000***	***565,000,000***							***70,000,000***	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 22 06 2.01 0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	*Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu*				300 Unit	300 Unit	-	500,000,000	580,000,000	580,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2 22 06 2.01 0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	*Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum*				2 Unit	2 Unit	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2 22 06 2.01 0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara*				20 Unit	20 Unit	20,000,000	-	30,000,000	10,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2 22 06 2.01 0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi*				20 Unit	20 Unit	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.02.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kesehatan**							**125,971,019,886**	**112,456,054,503**	**115,627,561,037**	**(10,343,458,849)**							**93,031,571,036**	**DINAS KESEHATAN**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**125,971,019,886**	**112,456,054,503**	**115,627,561,037**	**(10,343,458,849)**							**93,031,571,036**	**DINAS KESEHATAN**
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**125,971,019,886**	**112,456,054,503**	**115,627,561,037**	**(10,343,458,849)**							**93,031,571,036**	**DINAS KESEHATAN**
13.	**1 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**				**68,94 Nilai**	**B (68,94) Katagori/Nilai**	**88,731,680,205**	**87,836,840,360**	**87,871,838,360**	**(859,841,845)**					**OPD**		**63,171,245,188**	**DINAS KESEHATAN**
	1 02 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	-				-	-	***50,000,000***	-	-	***(50,000,000)***							-	***DINAS KESEHATAN***
	1 02 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				4 Unit	4 Unit	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS KESEHATAN
	[Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Perangkat Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***68.98***	***0***	***68.92***			***88,681,680,205***	***87,836,840,360***	***87,871,838,360***	***(809,841,845)***						***68.94***	***63,171,245,188***	***DINAS KESEHATAN***
	1 02 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***				***3 Dokumen***	***3 Dokumen***	***10,000,000***	***2,500,000***	***2,500,000***	***(7,500,000)***							***25,000,000***	***DINAS KESEHATAN***
	1 02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	2,500,000	2,500,000	(7,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			25,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Periode Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***				***12 Bulan***	***12 Bulan***	***85,795,020,845***	***86,310,711,000***	***86,310,711,000***	***515,690,155***							***55,174,369,188***	***DINAS KESEHATAN***
	1 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				11100 Orang/bulan	11100 Orang/bulan	85,795,020,845	86,310,711,000	86,310,711,000	515,690,155	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			55,174,369,188	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	-				-	-	***20,000,000***	-	-	***(20,000,000)***							-	***DINAS KESEHATAN***
	1 02 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*				10 Dokumen	10 Dokumen	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				30 Orang	30 Orang	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	-				-	-	***187,280,000***	***80,000,000***	***80,000,000***	***(107,280,000)***							***520,000,000***	***DINAS KESEHATAN***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	40,000,000	10,000,000	10,000,000	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			250,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	20,000,000	5,000,000	5,000,000	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			50,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	50,000,000	15,000,000	15,000,000	(35,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			100,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				2 Dokumen	2 Dokumen	2,280,000	-	-	(2,280,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				40 Laporan	40 Laporan	75,000,000	50,000,000	50,000,000	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			120,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	-				-	-	***1,891,079,360***	***966,729,360***	***966,729,360***	***(924,350,000)***							***6,591,876,000***	***DINAS KESEHATAN***
	1 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				30 Laporan	30 Laporan	1,500,000	750,000	750,000	(750,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			1,500,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				250 Laporan	250 Laporan	749,400,000	725,560,000	725,560,000	(23,840,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			650,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				10000 Laporan	10000 Laporan	1,140,179,360	240,419,360	240,419,360	(899,760,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			5,940,376,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				-	***12 Bulan***	***778,300,000***	***476,900,000***	***511,898,000***	***(266,402,000)***							***860,000,000***	***DINAS KESEHATAN***
	1 02 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	63,300,000	17,200,000	17,200,000	(46,100,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			35,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				35 Unit	35 Unit	660,000,000	449,700,000	449,700,000	(210,300,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			595,000,000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				4 Unit	1 Unit	35,000,000	5,000,000	39,998,000	4,998,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			150,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				30 Unit	30 Unit	20,000,000	5,000,000	5,000,000	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			80,000,000	DINAS KESEHATAN
14.	**1 02 02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek pada balita)**				**100 Persen 17,5 195,74 persentase per 100.000 KH**	**109.00 17,50 Angka Persen**	**36,167,900,259**	**23,293,037,143**	**26,429,545,677**	**(9,738,354,582)**					**Masyarakat Puskesmas dan Jaringannya Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan**		**29,095,600,000**	**DINAS KESEHATAN**
	1 02 02 2.02	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	-				-	-	***22,190,847,069***	***20,436,082,735***	***22,127,698,269***	***(63,148,800)***							***21,750,250,000***	***DINAS KESEHATAN***
	1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*				1 Dokumen	1 Dokumen	90,152,000	-	-	(90,152,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				1 Dokumen	1 Dokumen	401,731,000	185,495,000	185,495,000	(216,236,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			410,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*				1 Dokumen	1 Dokumen	62,600,000	-	-	(62,600,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	182,600,000	251,600,000	251,600,000	69,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			185,000,000	DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	***Angka Kematian Ibu (AKI) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita***	***139.82 14.2***	***0***	***18.8 223.71***			***35,430,817,259***	***22,855,942,143***	***25,992,450,677***	***(9,438,366,582)***						***17.5 195.74***	***28,500,600,000***	***DINAS KESEHATAN***
	1 02 02 2.01	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Faskes Yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***				***7 Faskes***	***7 Faskes***	***13,771,393,190***	***2,732,754,408***	***4,177,647,408***	***(9,593,745,782)***							***7,065,000,000***	***DINAS KESEHATAN***
	1 02 02 2.01 0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	*Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000*				1 Unit	1 Unit	164,628,061	-	-	(164,628,061)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.01 0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas*				7 Unit	7 Unit	681,070,500	55,234,408	55,234,408	(625,836,092)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			1,250,000,000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 02 02 2.01 0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya*				20 Unit	5 Unit	4,450,000,000	80,000,000	590,393,000	(3,859,607,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			1,500,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.01 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*				50 Unit	50 Unit	2,602,000,000	15,000,000	599,500,000	(2,002,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN SISA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			1,500,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.01 0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*				100 Unit	100 Unit	350,872,000	135,854,000	185,854,000	(165,018,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA SISA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			105,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.01 0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*				250 Paket	250 Paket	5,404,822,629	2,314,388,000	2,614,388,000	(2,790,434,629)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			2,500,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.01 0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	*Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan*				250 Paket	250 Paket	118,000,000	132,278,000	132,278,000	14,278,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			210,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	-				-	-	***22,190,847,069***	***20,436,082,735***	***22,127,698,269***	***(63,148,800)***							***21,750,250,000***	***DINAS KESEHATAN***
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				4476 Orang	4054 Orang	618,000,000	296,087,500	415,897,600	(202,102,400)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			262,500,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				4272 Orang	4003 Orang	50,000,000	15,000,000	15,000,000	(35,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			105,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				4069 Orang	3769 Orang	121,220,000	286,790,000	339,590,000	218,370,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			84,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				19613 Orang	17968 Orang	340,000,000	80,000,000	239,998,730	(100,001,270)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			367,500,000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				51512 Orang	30882 Orang	232,000,000	164,400,000	164,400,000	(67,600,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			262,500,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				152964 Orang	19876 Orang	40,600,000	20,000,000	20,000,000	(20,600,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			231,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				15281 Orang	15281 Orang	185,600,000	15,000,000	156,436,000	(29,164,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			315,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				41837 Orang	13411 Orang	40,000,000	35,000,000	45,500,000	5,500,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			210,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				4566 Orang	4437 Orang	178,000,000	15,000,000	15,000,000	(163,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			367,500,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				448 Orang	432 Orang	204,800,000	102,600,000	132,600,000	(72,200,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			63,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				5205 Orang	4437 Orang	196,233,700	840,372,500	1,063,531,580	867,297,880	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			420,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				8805 Orang	8004 Orang	72,000,000	10,000,000	10,000,000	(62,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			210,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar*				10 Dokumen	10 Dokumen	25,000,000	2,000,000	2,000,000	(23,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			52,500,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar*				100 Dokumen	100 Dokumen	75,000,000	10,000,000	10,000,000	(65,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			100,000,000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				10 Dokumen	10 Dokumen	367,091,305	1,459,034,000	1,498,962,920	1,131,871,615	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			367,500,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*				10 Dokumen	10 Dokumen	125,300,000	5,000,000	5,000,000	(120,300,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			63,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				10 Dokumen	10 Dokumen	630,359,489	710,230,000	956,980,000	326,620,511	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN SISA DAK NON FISIK-BOK-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			73,500,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*				90 Dokumen	90 Dokumen	216,921,000	102,660,000	102,660,000	(114,261,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			199,500,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya*				10 Dokumen	10 Dokumen	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				10 Dokumen	10 Dokumen	202,310,000	123,700,000	123,700,000	(78,610,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			52,500,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				100 Orang	100 Orang	80,850,000	36,120,000	36,120,000	(44,730,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			52,500,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	*Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				50 Orang	50 Orang	720,000,000	20,000,000	20,000,000	(700,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			105,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				10 Dokumen	10 Dokumen	688,160,000	564,900,000	564,900,000	(123,260,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			525,000,000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*				7 Dokumen	7 Dokumen	13,376,617,843	14,013,948,735	14,036,100,035	659,482,192	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			12,950,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	*Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan*				100 Paket	100 Paket	30,000,000	44,045,000	44,045,000	14,045,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			26,250,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	-	-	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				7 Dokumen	7 Dokumen	1,040,531,000	594,500,000	733,292,946	(307,238,054)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS SISA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			2,850,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*				2 Dokumen	2 Dokumen	1,487,169,732	432,600,000	938,888,458	(548,281,274)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN SISA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA SISA DAK NON FISIK-BOK-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			840,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*				2 Laporan	2 Laporan	25,000,000	-	-	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah*				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	*Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)*				1 Unit	1 Unit	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.03	***Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi***	***Jumlah Faskes yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi***				***7 Faskes***	***7 Faskes***	***180,660,000***	***114,200,000***	***114,200,000***	***(66,460,000)***							***236,250,000***	***DINAS KESEHATAN***
	1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	180,660,000	114,200,000	114,200,000	(66,460,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			236,250,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.04	***Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Faskes yang memperoleh Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***				***10 Faskes***	***10 Faskes***	***25,000,000***	***10,000,000***	***10,000,000***	***(15,000,000)***							***44,100,000***	***DINAS KESEHATAN***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 02 02 2.04 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	*Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya*				10 Unit	10 Unit	25,000,000	10,000,000	10,000,000	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			44,100,000	DINAS KESEHATAN
15.	**1 02 03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**1. Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan 2. Persentase Nakes di Fasyankes Pemerintah yang memiliki SIP 3. Persentase Nakes di Fasyankes Pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu 4. Persentase Nakes (dokter,drg.bidan,perawat) di fasyankes yang dilakukan kredensialing**				**6.96 Persen**	**52,68 78,46 100 77.05 Persen Persen Persen Persen**	**446,962,422**	**549,165,000**	**549,165,000**	**102,202,578**					**Puskesmas dan Jaringannya Tenaga Kesehatan**		**283,955,542**	**DINAS KESEHATAN**
		[Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan]	***Persentase nakes di fasyankes pemerintah yang memiliki SIP Persentase nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu Persentase nakes (dokter, drg, bidan, perawat) di fasyankes yang dilakukan kredensialing Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan***	***100 63.14 87.19 98.44***	***0***	***50.57 66.13 72.58 75.25***			***446,962,422***	***549,165,000***	***549,165,000***	***102,202,578***						***100 52.68 77.05 78.46***	***283,955,542***	***DINAS KESEHATAN***
	1 02 03 2.01	***Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Dokumen Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota***				***2 Dokumen***	***2 Dokumen***	***30,000,000***	***5,000,000***	***5,000,000***	***(25,000,000)***							***41,000,000***	***DINAS KESEHATAN***
	1 02 03 2.01 0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 03 2.01 0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	5,000,000	5,000,000	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			41,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 03 2.02	***Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota***				***2 Dokumen***	***2 Dokumen***	***67,371,000***	***138,437,000***	***138,437,000***	***71,066,000***							***46,500,000***	***DINAS KESEHATAN***
	1 02 03 2.02 0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 03 2.02 0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	57,371,000	138,437,000	138,437,000	81,066,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			46,500,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 03 2.03	***Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Peserta Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***				***40 SDMK***	***40 SDMK***	***349,591,422***	***405,728,000***	***405,728,000***	***56,136,578***							***196,455,542***	***DINAS KESEHATAN***
	1 02 03 2.03 0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*				40 Orang	40 Orang	349,591,422	405,728,000	405,728,000	56,136,578	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			196,455,542	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
16.	1 02 04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Cakupan Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman**				**100 Persen**	**100 Persen**	**456,633,000**	**550,409,000**	**550,409,000**	**93,776,000**					**Industri Rumah tangga Masyarakat Masyarakat Pengusaha Makanan Jajanan Sarana Produksi Alkes Kelas I dan Industri Rumah tangga Tempat Pengolahan Makanan (TPM)**		**245,100,000**	**DINAS KESEHATAN**
		[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	***Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman***	***100***	***0***	***100***			***456,633,000***	***550,409,000***	***550,409,000***	***93,776,000***						***100***	***245,100,000***	***DINAS KESEHATAN***
	1 02 04 2.01	***Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)***	***Jumlah Sarana Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)***				***10 Tempat***	***10 Tempat***	***108,543,000***	***71,079,000***	***71,079,000***	***(37,464,000)***							***90,100,000***	***DINAS KESEHATAN***
	1 02 04 2.01 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*				1 Dokumen	1 Dokumen	108,543,000	71,079,000	71,079,000	(37,464,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			90,100,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 04 2.02	***Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga***	***Jumlah Dokumen Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga***				***2 Dokumen***	***2 Dokumen***	***5,000,000***	-	-	***(5,000,000)***							-	***DINAS KESEHATAN***
	1 02 04 2.02 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga*				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 04 2.03	***Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga***	***Jumlah Dokumen Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga***				***1 Dokumen***	***1 Dokumen***	***98,000,000***	***174,166,000***	***174,166,000***	***76,166,000***							***25,000,000***	***DINAS KESEHATAN***
	1 02 04 2.03 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*				1 Dokumen	1 Dokumen	98,000,000	174,166,000	174,166,000	76,166,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			25,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 04 2.04	***Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)***	***Jumlah Dokumen Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)***				***1 Dokumen***	***1 Dokumen***	***10,000,000***	***169,956,000***	***169,956,000***	***159,956,000***							***60,000,000***	***DINAS KESEHATAN***
	1 02 04 2.04 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	169,956,000	169,956,000	159,956,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			60,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 04 2.05	***Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan***	***Jumlah Dokumen Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan***				***1 Dokumen***	***1 Dokumen***	***10,000,000***	-	-	***(10,000,000)***							-	***DINAS KESEHATAN***
	1 02 04 2.05 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan*				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS KESEHATAN
	1 02 04 2.06	***Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga***	***Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga***				***10 Produk***	***10 Produk***	***225,090,000***	***135,208,000***	***135,208,000***	***(89,882,000)***							***70,000,000***	***DINAS KESEHATAN***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 02 04 2.06 0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	*Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan*				10 Unit	10 Unit	225,090,000	135,208,000	135,208,000	(89,882,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing				70,000,000	DINAS KESEHATAN
17.	**1 02 05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan**				**100.00 Persen**	**78,10 Persen**	**167,844,000**	**226,603,000**	**226,603,000**	**58,759,000**					**Masyarakat**		**235,670,306**	**DINAS KESEHATAN**
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	***Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan***	***100***	***0***	***93.17***			***167,844,000***	***226,603,000***	***226,603,000***	***58,759,000***						***100***	***235,670,306***	***DINAS KESEHATAN***
	1 02 05 2.01	***Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***				***1 Dokumen***	***1 Dokumen***	***30,000,000***	***49,095,000***	***49,095,000***	***19,095,000***							***80,000,000***	***DINAS KESEHATAN***
	1 02 05 2.01 0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	49,095,000	49,095,000	19,095,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing				80,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 05 2.02	***Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Keluarga yang berprilaku Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***				***20 Keluarga***	***20 Keluarga***	***40,000,000***	***10,000,000***	***10,000,000***	***(30,000,000)***							***95,670,306***	***DINAS KESEHATAN***
	1 02 05 2.02 0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat*				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	5,000,000	5,000,000	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing				55,670,306	DINAS KESEHATAN
	1 02 05 2.02 0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat*				20 Keluarga	20 Keluarga	20,000,000	5,000,000	5,000,000	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing				40,000,000	DINAS KESEHATAN
	1 02 05 2.03	***Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***				***1 Dokumen***	***1 Dokumen***	***97,844,000***	***167,508,000***	***167,508,000***	***69,664,000***							***60,000,000***	***DINAS KESEHATAN***
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				1 Dokumen	1 Dokumen	97,844,000	167,508,000	167,508,000	69,664,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing				60,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.03.1.04.0.00.10.0000	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**							**65,264,662,955**	**46,771,283,132**	**148,137,494,465**	**82,872,831,510**							**16,433,999,050**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**65,264,662,955**	**46,771,283,132**	**148,137,494,465**	**82,872,831,510**							**16,433,999,050**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
	1 03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**53,268,023,958**	**39,268,574,408**	**130,279,415,741**	**77,011,391,783**							**15,383,999,050**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
18.	**1 03 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI SAKIP OPD**				-	**B (67,20) Predikat/Nilai**	**8,239,532,018**	**6,846,635,740**	**8,196,635,740**	**(42,896,278)**					**Aparatur**		**7,630,246,872**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
	1 03 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***6 Unit***	***6 Unit***	***897,449,861***	-	-	***(897,449,861)***							-	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***
	1 03 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				11 Unit	11 Unit	133,962,708	-	-	(133,962,708)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		[Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***70.55***	***0***	***66.05***			***8,105,569,310***	***6,846,635,740***	***8,196,635,740***	***91,066,430***						***66.55***	***7,630,246,872***	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***
	1 03 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah***				***5 Dokumen***	***5 Dokumen***	***131,031,767***	***11,000,000***	***11,000,000***	***(120,031,767)***							***135,378,355***	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 03 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	128,931,767	11,000,000	11,000,000	(117,931,767)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			135,378,355	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	2,100,000	-	-	(2,100,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***				***12 Bulan***	***12 Bulan***	***5,936,627,038***	***6,142,951,000***	***6,142,951,000***	***206,323,962***							***6,181,038,847***	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***
	1 03 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				101 Orang/bulan	101 Orang/bulan	5,936,627,038	6,142,951,000	6,142,951,000	206,323,962	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			6,181,038,847	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***				***12 Bulan***	***12 Bulan***	***211,197,000***	***93,000,000***	***93,000,000***	***(118,197,000)***							***220,500,000***	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***
	1 03 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				41 Paket	41 Paket	36,750,000	10,000,000	10,000,000	(26,750,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			38,587,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				833 Paket	833 Paket	21,000,000	5,000,000	5,000,000	(16,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			22,050,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	15,750,000	3,000,000	3,000,000	(12,750,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			16,537,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				365 Dokumen	365 Dokumen	1,197,000	-	-	(1,197,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				56 Laporan	56 Laporan	136,500,000	75,000,000	75,000,000	(61,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			143,325,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***6 Unit***	***6 Unit***	***897,449,861***	-	-	***(897,449,861)***							-	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***
	1 03 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	763,487,153	-	-	(763,487,153)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***12 Bulan***	***12 Bulan***	***793,361,352***	***501,102,240***	***501,102,240***	***(292,259,112)***							***833,029,420***	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 03 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				24 Laporan	24 Laporan	2,100,000	500,000	500,000	(1,600,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			2,205,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				60 Laporan	60 Laporan	378,000,000	288,720,000	288,720,000	(89,280,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			396,900,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				852 Laporan	852 Laporan	413,261,352	211,882,240	211,882,240	(201,379,112)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			433,924,420	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***9 Unit***	***9 Unit***	***269,865,000***	***98,582,500***	***1,448,582,500***	***1,178,717,500***							***260,300,250***	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***
	1 03 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	34,965,000	18,682,500	18,682,500	(16,282,500)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			36,713,250	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				5 Unit	5 Unit	129,900,000	69,900,000	69,900,000	(60,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			113,337,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				2 Unit	2 Unit	84,000,000	5,000,000	1,355,000,000	1,271,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			88,200,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				4 Unit	4 Unit	21,000,000	5,000,000	5,000,000	(16,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			22,050,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
19.	**1 03 02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir**				**11.53 Persen**	**11.53 Persen**	**3,648,845,785**	**-**	**-**	**(3,648,845,785)**					**Masyarakat**		**-**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
	1 03 02 2.01	***Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Luasan Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan Abrasi Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai***				***74.2 Persen***	***74.2 Persen***	***2,129,011,111***	-	-	***(2,129,011,111)***							-	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***
	1 03 02 2.01 0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	*Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara*				1 Unit	1 Unit	1,300,000,000	-	-	(1,300,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 02 2.01 0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	*Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun*				2 Titik	2 Titik	200,000,000	-	-	(200,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	***Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas*** ***Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir***	***31.53*** ***50.00***	***.*** ***0***	***25.00*** ***6.53***			***2,148,845,785***	-	-	***(2,148,845,785)***						***11.53*** ***30.00***	-	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 03 02 2.01	***Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Luasan Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan Abrasi Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai***				***74.2 Persen***	***74.2 Persen***	***2,129,011,111***	-	-	***(2,129,011,111)***							-	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***
	1 03 02 2.01 0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	*Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun*				1 Unit	1 Unit	629,011,111	-	-	(629,011,111)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 02 2.02	***Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	-				-	-	***1,519,834,674***	-	-	***(1,519,834,674)***							-	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***
	1 03 02 2.02 0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	*Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun*				0,5 KM	0,5 KM	819,834,674	-	-	(819,834,674)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 02 2.02 0005	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	*Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun*				0,5 KM	0,5 KM	700,000,000	-	-	(700,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
20.	**1 03 03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota**				**24.06 67.33 Persen Persen**	**4.83 Persen**	**3,400,868,323**	**-**	**130,087,000**	**(3,270,781,323)**					**Masyarakat**		**-**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]	***Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui pengaturan air minum curah lintas Kabupaten/ Kota***	***0.30***	***0***	***120.13***			***3,400,868,323***	-	***130,087,000***	***(3,270,781,323)***						***62.69***	-	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***
	1 03 03 2.01	***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum melalui SPAM Jaringan Pipa dan Bukan Jaringan Pipa***				***16.39 Persen***	***16.39 Persen***	***3,400,868,323***	-	***130,087,000***	***(3,270,781,323)***							-	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***
	1 03 03 2.01 0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	*Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun*				26 Unit	26 Unit	475,000,000	-	-	(475,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 03 2.01 0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	*Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun*				-	2 Unit	-	-	130,087,000	130,087,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 03 2.01 0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijkan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	-	-	(200,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 03 2.01 0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun*				350 Liter/Detik	350 Liter/Detik	2,725,868,323	-	-	(2,725,868,323)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
21.	**1 03 05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (AirLimbah Domestik Layak dan Aman)**				**93.89 Persen**	**0.20 Persen**	**700,000,000**	**1,599,000,000**	**4,799,000,000**	**4,099,000,000**					**Masyarakat**		**816,000,000**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah]	***Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)***	***0.20***	***0***	***0***			***700,000,000***	***1,599,000,000***	***4,799,000,000***	***4,099,000,000***						***0.20***	***816,000,000***	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***
	1 03 05 2.01	***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Jumlah Rumah Tangga Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik***				***69.28 Persen***	***69.28 Persen***	***700,000,000***	***1,599,000,000***	***4,799,000,000***	***4,099,000,000***							***816,000,000***	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 03 05 2.01 0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	*Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan*				133 M³/Hari	133 M³/Hari	700,000,000	1,599,000,000	4,599,000,000	3,899,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			816,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 05 2.01 0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat	*Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/ sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob*				-	50 Rumah Tangga	-	-	200,000,000	200,000,000	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Alue Lim	SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
22.	**1 03 06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik**				**76.02 Persen**	**76.02 Persen**	**4,455,400,000**	**7,575,000,000**	**17,463,533,200**	**13,008,133,200**					**Masyarakat**		**583,664,400**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
		[Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan]	***Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik***	***78.69***	***0***	***75.45***			***4,455,400,000***	***7,575,000,000***	***17,463,533,200***	***13,008,133,200***						***76.02***	***583,664,400***	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***
	1 03 06 2.01	***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dikelola dan Dikembangkan Persentase Drainase dalam Kondisi Baik***				***104.501 Km 70.60 Persen***	***104.501 Km 70.60 Persen***	***4,455,400,000***	***7,575,000,000***	***17,463,533,200***	***13,008,133,200***							***583,664,400***	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***
	1 03 06 2.01 0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi*				4 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	861,000,000	7,575,000,000	16,721,016,671	15,860,016,671	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			583,664,400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 06 2.01 0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun*				10 Sistem Drainase Perkotaan	10 Sistem Drainase Perkotaan	3,294,400,000	-	-	(3,294,400,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 06 2.01 0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun*				-	1 Sistem Drainase Perkotaan	-	-	315,279,529	315,279,529	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PKB SISA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 06 2.01 0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	-	-	(300,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 06 2.01 0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun*				-	2 Dokumen	-	-	427,237,000	427,237,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
23.	**1 03 07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik**				**35.38 Persen**	**35.38 Persen**	**250,000,000**	-	-	**(250,000,000)**					**Masyarakat**		-	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
	1 03 07 2.01	***Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Infrastruktur pada Permukiman yang baik***				***35.38 Persen***	***35.38 Persen***	***250,000,000***	-	-	***(250,000,000)***							-	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***
	1 03 07 2.01 0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar*				18 Rumah Tangga	18 Rumah Tangga	250,000,000	-	-	(250,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
24.	**1 03 08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik**				**83.33 Persen**	**66.67 Persen**	**2,700,000,000**	**2,570,311,767**	**16,902,591,767**	**14,202,591,767**					**Masyarakat**		**1,183,362,778**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
		[Meningkatnya kualitas bangunan gedung]	***Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik***	***77.78***	***0***	***72.22***			***2,700,000,000***	***2,570,311,767***	***16,902,591,767***	***14,202,591,767***						***83.33***	***1,183,362,778***	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 03 08 2.01	***Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung***	***"Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung"***				***11.54 Persen***	***11.54 Persen***	***2,700,000,000***	***2,570,311,767***	***16,902,591,767***	***14,202,591,767***							***1,183,362,778***	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***
	1 03 08 2.01 0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan*				3 Bangunan Gedung	3 Bangunan Gedung	2,700,000,000	2,570,311,767	16,902,591,767	14,202,591,767	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1,183,362,778	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
25.	**1 03 10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Tingkat Kemantapan Jalan**				**66.40 Persen**	**61.54 Persen**	**29,512,627,832**	**20,637,626,901**	**82,747,568,034**	**53,234,940,202**					**Masyarakat**		**5,115,600,000**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
		[Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman]	***Tingkat Kemantapan Jalan***	***77.90***	***0***	***64.40***			***29,512,627,832***	***20,637,626,901***	***82,747,568,034***	***53,234,940,202***						***68.90***	***5,115,600,000***	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***
	1 03 10 2.01	***Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota***	***Panjang Jaringan Jalan Kota dalam Kondisi Mantap Persentase Tingkat Kemantapan Jalan***				***284.19 Km 78.91 Persen***	***284.19 Km 78.91 Persen***	***29,512,627,832***	***20,637,626,901***	***82,747,568,034***	***53,234,940,202***							***5,115,600,000***	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***
	1 03 10 2.01 0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	-	-	(500,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 10 2.01 0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun*				-	1 Dokumen	-	-	298,701,000	298,701,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 10 2.01 0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	*Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya*				412,47 KM	412,47 KM	450,500,000	-	-	(450,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 10 2.01 0053	Pembangunan Jalan	*Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan*				3,696 KM	3,696 KM	7,130,857,152	-	-	(7,130,857,152)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 10 2.01 0053	Pembangunan Jalan	*Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan*				-	12.416 KM	-	1,355,000,000	50,581,915,329	50,581,915,329	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 10 2.01 0055	Rehabilitasi Jalan	*Panjang Jalan yang Direhabilitasi*				1 KM	1 KM	1,000,000,000	3,062,854,400	2,662,854,400	1,662,854,400	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB DBH SAWIT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-				1,015,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 03 10 2.01 0057	Penggantian Jembatan	*Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian*				33,33 Meter	33,33 Meter	311,498,179	-	-	(311,498,179)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 10 2.01 0059	Rekonstruksi Jalan	*Panjang Jalan yang Direkonstruksi*				2,3 KM	2,46 KM	20,119,772,501	16,219,772,501	29,204,097,305	9,084,324,804	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SISA DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SISA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			4,100,600,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
26.	**1 03 11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli**				**32.56 Persen**	**32.56 Persen**	**82,000,000**	**-**	**-**	**(82,000,000)**					**Masyarakat**		**-**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
	1 03 11 2.01	***Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi***	***Persentase Peningkatan Kompetensi Tenaga Terampil Konstruksi***				***2 Persen***	***2 Persen***	***82,000,000***	-	-	***(82,000,000)***							-	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***
	1 03 11 2.01 0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	*Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih*				50 Orang	50 Orang	82,000,000	-	-	(82,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
27.	**1 03 12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi**				**62.08 Persen**	**62.08 Persen**	**278,750,000**	**40,000,000**	**40,000,000**	**(238,750,000)**					**Pemko Lhokseumawe**		**55,125,000**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang]	***Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi***	***73.24***	***0***	***57.67***			***278,750,000***	***40,000,000***	***40,000,000***	***(238,750,000)***						***62.08***	***55,125,000***	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***
	1 03 12 2.01	***Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota***	***Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota***				***2 Dokumen***	***2 Dokumen***	***176,250,000***	-	-	***(176,250,000)***							-	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***
	1 03 12 2.01 0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	-	-	(150,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 12 2.01 0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	*Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.*				1 Laporan	1 Laporan	26,250,000	-	-	(26,250,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 03 12 2.03	***Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota***				***1 Dokumen***	***1 Dokumen***	***102,500,000***	***40,000,000***	***40,000,000***	***(62,500,000)***							***55,125,000***	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***
	1 03 12 2.03 0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	*Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang*				1 Dokumen	1 Dokumen	102,500,000	40,000,000	40,000,000	(62,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			55,125,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**11,996,638,997**	**7,502,708,724**	**17,858,078,724**	**5,861,439,727**							**1,050,000,000**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
28.	**1 04 03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani**				**9.33 Persen**	**9.33 Persen**	**678,942,825**	**-**	**-**	**(678,942,825)**					**Masyarakat**		**-**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
		[Meningkatnya kualitas kawasan permukiman]	***Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani***	***18.37***	***0***	***18.24***			***678,942,825***	***-***	***-***	***(678,942,825)***						***18.27***	***-***	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***
	1 04 03 2.03	***Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha***	***Jumlah Sarana Prasarana yang Terbangun di Kawasan Kumuh*** ***Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni***				***18.27 Persen*** ***29.58 Persen***	***18.27 Persen*** ***29.58 Persen***	***678,942,825***	***-***	***-***	***(678,942,825)***							***-***	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***
	1 04 03 2.03 0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki*				4 Unit Rumah	4 Unit Rumah	90,000,000	-	-	(90,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 04 03 2.03 0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	*Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan*				15.43 Ha	15.43 Ha	200,000,000	-	-	(200,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 04 03 2.03 0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*				5 Unit	5 Unit	388,942,825	-	-	(388,942,825)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
29.	**1 04 04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Peningkatan Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh**				**81.96 Persen**	**0.328 Persen**	**2,626,106,295**	**-**	**100,000,000**	**(2,526,106,295)**					**Masyarakat**		**-**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
		[Meningkatnya kualitas kawasan permukiman]	***persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap perumahan layak, pengurangan luasan kawasan kumuh, serta peningkatan kualitas infrastruktur, sarana, dan utilitas umum (PSU) di organisasi.***	***0.341***	***0***	***0.324***			***2,626,106,295***	***-***	***100,000,000***	***(2,526,106,295)***						***0.328***	***-***	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***
	1 04 04 2.01	***Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni***				***29.58 Persen***	***29.58 Persen***	***2,626,106,295***	***-***	***100,000,000***	***(2,526,106,295)***							***-***	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***
	1 04 04 2.01 0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki*				5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	150,000,000	-	-	(150,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 04 04 2.01 0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	*Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh*				20 Unit	20 Unit	2,476,106,295	-	-	(2,476,106,295)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 04 04 2.01 0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	*Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh*				-	1 Unit	-	-	100,000,000	100,000,000	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Ulee Jalan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
30.	**1 04 05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)**				**47.55 Persen**	**65.73 Persen**	**8,691,589,877**	**7,502,708,724**	**17,758,078,724**	**9,066,488,847**					**Masyarakat**		**1,050,000,000**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
	1 04 05 2.01	***Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan***	***Persentase Unit Rumah Terfasilitasi PSU***				***73.28 Persen***	***73.28 Persen***	***8,691,589,877***	***7,502,708,724***	***17,758,078,724***	***9,066,488,847***							***1,050,000,000***	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***
	1 04 05 2.01 0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	*Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan*				1 Lokasi	1 Lokasi	100,000,000	-	-	(100,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		[Meningkatnya penyediaan PSU permukiman]	***Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum)***	***68.48***	***0***	***65.06***			***8,591,589,877***	***7,502,708,724***	***17,758,078,724***	***9,166,488,847***						***65.73***	***1,050,000,000***	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***
	1 04 05 2.01	***Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan***	***Persentase Unit Rumah Terfasilitasi PSU***				***73.28 Persen***	***73.28 Persen***	***8,691,589,877***	***7,502,708,724***	***17,758,078,724***	***9,066,488,847***							***1,050,000,000***	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 04 05 2.01 0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan*				1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	-	-	(80,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 04 05 2.01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan*				5 Laporan	5 Laporan	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1 04 05 2.01 0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	*Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum*				4 Lokasi	4 Lokasi	8,481,589,877	7,502,708,724	17,758,078,724	9,276,488,847	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1,050,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.05.0.00.0.00.04.0000	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**							**8,337,943,218**	**7,776,399,500**	**10,406,350,643**	**2,068,407,425**							**2,284,358,000**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8,337,943,218**	**7,776,399,500**	**10,406,350,643**	**2,068,407,425**							**2,284,358,000**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	1 05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**8,337,943,218**	**7,776,399,500**	**10,406,350,643**	**2,068,407,425**							**2,284,358,000**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
31.	**1 05 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**				**B/61,00 Predikat/Nilai**	**B/62,50 Predikat/Nilai**	**7,313,338,818**	**7,597,324,500**	**7,663,180,443**	**349,841,625**					**Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe BPBD Kota Lhokseumawe**		**1,964,358,000**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		[Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***61.40***	***0***	***60.90***			***7,313,338,818***	***7,597,324,500***	***7,663,180,443***	***349,841,625***						***61***	***1,964,358,000***	***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***
	1 05 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***				***15 Dokumen***	***5 Dokumen***	***10,000,000***	***1,500,000***	***1,500,000***	***(8,500,000)***							***15,000,000***	***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***
	1 05 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				15 Dokumen	15 Dokumen	10,000,000	1,500,000	1,500,000	(8,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			15,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah***				***12 Laporan***	***100 Persen***	***5,940,580,418***	***6,761,421,000***	***6,761,421,000***	***820,840,582***							-	***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***
	1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				250 Orang/bulan	250 Orang/bulan	5,940,580,418	-	-	(5,940,580,418)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	250 Orang/bulan	-	6,761,421,000	6,761,421,000	6,761,421,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***				***2 Laporan***	***2 Laporan***	***87,000,000***	-	-	***(87,000,000)***							-	***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***
	1 05 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				1 Paket	1 Paket	77,000,000	-	-	(77,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				2 Orang	2 Orang	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah***				***5 Laporan***	***5 Laporan***	***406,682,300***	***192,200,000***	***192,200,000***	***(214,482,300)***							***512,500,000***	***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 05 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	15,000,000	3,500,000	3,500,000	(11,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			17,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	3,142,300	-	-	(3,142,300)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	302,400,000	151,200,000	151,200,000	(151,200,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			380,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	10,000,000	2,500,000	2,500,000	(7,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			15,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	1,140,000	-	-	(1,140,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				20 Laporan	20 Laporan	75,000,000	35,000,000	35,000,000	(40,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			100,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah***				***2 Jenis***	***2 Jenis***	***56,420,100***	-	-	***(56,420,100)***							-	***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***
	1 05 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	16,852,500	-	-	(16,852,500)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	39,567,600	-	-	(39,567,600)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah***				***3 Laporan***	***3 Laporan***	***329,356,000***	***245,556,000***	***311,411,943***	***(17,944,057)***							***888,178,000***	***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***
	1 05 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	500,000	500,000	(1,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			2,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				3 Laporan	3 Laporan	125,000,000	115,400,000	115,400,000	(9,600,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			130,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				2 Laporan	2 Laporan	202,856,000	129,656,000	195,511,943	(7,344,057)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			756,178,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah***				***4 Jenis***	***4 Jenis***	***483,300,000***	***396,647,500***	***396,647,500***	***(86,652,500)***							***548,680,000***	***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***
	1 05 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	33,300,000	15,760,000	15,760,000	(17,540,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			36,630,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				10 Unit	10 Unit	380,000,000	370,887,500	370,887,500	(9,112,500)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			402,050,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 05 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				2 Unit	2 Unit	50,000,000	5,000,000	5,000,000	(45,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			75,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				5 Unit	5 Unit	20,000,000	5,000,000	5,000,000	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			35,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
32.	**1 05 03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Persentase Penanganan Pasca Bencana Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana**				**100 Persen**	**100 Persen**	**872,316,000**	**179,075,000**	**2,743,170,200**	**1,870,854,200**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe**		**320,000,000**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		[Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan]	***Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Persentase Penanganan Pasca Bencana Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana***	***100***	***0***	***100***			***872,316,000***	***179,075,000***	***2,743,170,200***	***1,870,854,200***						***100***	***320,000,000***	***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***
	1 05 03 2.01	***Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota***	***Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana***				***100 Persen***	***100 Persen***	***365,000,000***	***10,000,000***	***510,000,000***	***145,000,000***							***95,000,000***	***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***
	1 05 03 2.01 0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun*				50 Orang	50 Orang	65,000,000	10,000,000	510,000,000	445,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			95,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.01 0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*				1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	-	-	(300,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.02	***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana***	***Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana***				***100 Persen***	***100 Persen***	***236,036,300***	***32,000,000***	***1,182,000,000***	***945,963,700***							***150,000,000***	***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***
	1 05 03 2.02 0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	*Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya*				10 Unit	10 Unit	41,628,500	-	-	(41,628,500)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.02 0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	*Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya*				-	1 Unit	-	-	650,000,000	650,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.02 0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam*				20 Keluarga	20 Keluarga	40,303,300	-	-	(40,303,300)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.02 0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	*Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana*				1 Kawasan	1 Kawasan	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.02 0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana*				20 Orang	20 Orang	31,229,200	15,000,000	15,000,000	(16,229,200)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			50,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.02 0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya*				1 laporan	1 laporan	32,875,300	7,000,000	7,000,000	(25,875,300)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			50,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.02 0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana*				1 Kawasan	1 Kawasan	40,000,000	10,000,000	510,000,000	470,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			50,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 05 03 2.03	***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	***Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana***				***100 Persen***	***100 Persen***	***164,997,900***	***129,075,000***	***289,075,000***	***124,077,100***							***75,000,000***	***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***
	1 05 03 2.03 0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana*				50 Orang	50 Orang	31,997,900	-	-	(31,997,900)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.03 0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana*				-	50 Orang	-	-	60,000,000	60,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.03 0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*				50 Orang	50 Orang	133,000,000	129,075,000	229,075,000	96,075,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-SOSIAL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			75,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.04	***Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana***	***Persentase Penanganan Pasca Bencana***				***100 Persen***	***100 Persen***	***106,281,800***	***8,000,000***	***762,095,200***	***655,813,400***							-	***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***
	1 05 03 2.04 0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi*				30 Orang	30 Orang	39,136,000	-	-	(39,136,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.04 0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	*Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	36,955,000	-	-	(36,955,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.04 0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	*Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan*				-	1 Kegiatan	-	8,000,000	762,095,200	762,095,200	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.04 0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	*Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*				1 Dokumen	1 Dokumen	30,190,800	-	-	(30,190,800)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
33.	**1 05 04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**				**100 Persen**	**100 Persen**	**152,288,400**	-	-	**(152,288,400)**					**Kota Lhokseumawe Masyarakat Kota Lhokseumawe**		-	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		[Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran]	***Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran*** ***Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran***	***100***	***0***	***100***			***152,288,400***	-	-	***(152,288,400)***						***100***	-	***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***
	1 05 04 2.01	***Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelematan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah***				***3 Kegiatan***	***3 Kegiatan***	***143,988,400***	-	-	***(143,988,400)***							-	***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***
	1 05 04 2.01 0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	13,400,000	-	-	(13,400,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 04 2.01 0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	*Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran*				7 Orang	7 Orang	75,000,000	-	-	(75,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 04 2.01 0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	*Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait*				2 Unit	2 Unit	55,588,400	-	-	(55,588,400)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 04 2.02	***Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran***	***Jumlah Laporan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran***				***1 Laporan***	***1 Laporan***	***8,300,000***	-	-	***(8,300,000)***							-	***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 05 04 2.02 0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	*Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran*				1 Dokumen	1 Dokumen	8,300,000	-	-	(8,300,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.0.00.0.00.06.0000	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah**							**10,344,885,794**	**12,733,395,152**	**13,033,395,152**	**2,688,509,358**							**6,523,084,861**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10,344,885,794**	**12,733,395,152**	**13,033,395,152**	**2,688,509,358**							**6,523,084,861**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**
	1 05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**10,344,885,794**	**12,733,395,152**	**13,033,395,152**	**2,688,509,358**							**6,523,084,861**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**
34.	**1 05 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**				-	**63,00 B Persen**	**10,098,535,352**	**12,302,336,550**	**12,302,336,550**	**2,203,801,198**					**Aparatur dan personel Satpol PP-WH Kota Lhokseumawe Semua Masyarakat Dalam Kota Lhokseumawe**		**5,900,173,778**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**
		[Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***61.83***	***0***	***61.78***			***10,098,535,352***	***12,302,336,550***	***12,302,336,550***	***2,203,801,198***						***61.79***	***5,900,173,778***	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH***
	1 05 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah***				-	***5 Dokumen***	***10,700,000***	***1,500,000***	***1,500,000***	***(9,200,000)***							***12,000,000***	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH***
	1 05 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	10,000,000	1,500,000	1,500,000	(8,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			12,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				5 Laporan	5 Laporan	700,000	-	-	(700,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***				-	***14 Orang/Bulan***	***9,230,764,052***	***11,556,848,000***	***11,556,848,000***	***2,326,083,948***							***4,330,594,000***	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH***
	1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	9,230,764,052	11,556,848,000	11,556,848,000	2,326,083,948	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			4,330,594,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 01 2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Tersusunnya Data dan Laporan Administrasi Kepegawaian***				-	***12 Dokumen***	***5,981,000***	-	-	***(5,981,000)***							-	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH***
	1 05 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				350 Paket	350 Paket	2,981,000	-	-	(2,981,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*				12 Dokumen	12 Dokumen	1,000,000	-	-	(1,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				17 Orang	17 Orang	1,000,000	-	-	(1,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*				55 Orang	55 Orang	1,000,000	-	-	(1,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah***				-	***12 Dokumen***	***11,015,000***	***39,500,000***	***39,500,000***	***28,485,000***							***188,000,000***	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH***
	1 05 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				50 Paket	50 Paket	2,875,000	2,500,000	2,500,000	(375,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			33,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				500 Paket	500 Paket	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			7,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			28,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 05 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				12 Dokumen	12 Dokumen	1,140,000	-	-	(1,140,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				30 Laporan	30 Laporan	5,000,000	35,000,000	35,000,000	30,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			120,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				-	***5 Unit***	***9,308,600***	-	-	***(9,308,600)***							-	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH***
	1 05 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	4,430,760	-	-	(4,430,760)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				3 Unit	3 Unit	4,877,840	-	-	(4,877,840)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				-	***12 Laporan***	***817,106,500***	***575,528,550***	***575,528,550***	***(241,577,950)***							***1,117,579,778***	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH***
	1 05 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	2,088,900	500,000	500,000	(1,588,900)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			3,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	122,500,000	122,500,000	122,500,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			135,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	692,517,600	452,528,550	452,528,550	(239,989,050)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			979,579,778	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				-	***18 Unit***	***13,660,200***	***128,960,000***	***128,960,000***	***115,299,800***							***252,000,000***	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH***
	1 05 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	4,775,000	14,340,000	14,340,000	9,565,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			40,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				5 Unit	5 Unit	5,313,200	107,200,000	107,200,000	101,886,800	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			170,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				2 Unit	2 Unit	1,152,000	5,000,000	5,000,000	3,848,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			22,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				5 Unit	5 Unit	2,420,000	2,420,000	2,420,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			20,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
35.	**1 05 02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas** **Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat** **Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan** **Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya**				**100 Persen**	**50 Persen** **90** **17,28 Persen** **Persen** **95,77 Persen**	**246,350,442**	**431,058,602**	**731,058,602**	**484,708,160**					**Aparatur dan personel Satpol PP-WH Kota Lhokseumawe** **Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe** **Masyarakat Dalam Kota Lhokseumawe**		**622,911,083**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**
		[Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada]	***Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat*** ***Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas*** ***Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan*** ***Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya***	***100*** ***1.735*** ***97.30***	***0***	***1.726*** ***20*** ***68*** ***95.71***			***246,350,442***	***431,058,602***	***731,058,602***	***484,708,160***						***1.728*** ***50*** ***95*** ***95.77***	***622,911,083***	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH***
	1 05 02 2.01	***Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***				***12 Bulan***	***50 Laporan***	***176,549,850***	***239,558,602***	***439,558,602***	***263,008,752***							***370,893,162***	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 05 02 2.01 0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	7,207,850	30,000,000	30,000,000	22,792,150	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			20,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 02 2.01 0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*				12 laporan	12 laporan	169,342,000	209,558,602	409,558,602	240,216,602	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			350,893,162	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 02 2.02	***Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota***	***Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota***				-	***50 Laporan***	***2,900,000***	***43,500,000***	***43,500,000***	***40,600,000***							-	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH***
	1 05 02 2.02 0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP*				60 Laporan	60 Laporan	1,400,000	43,500,000	43,500,000	42,100,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 02 2.02 0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				2 Laporan	2 Laporan	1,500,000	-	-	(1,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 02 2.03	***Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota***	***Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota***				-	***5 Orang***	***27,600,000***	-	-	***(27,600,000)***							-	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH***
	1 05 02 2.03 0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	200,000	-	-	(200,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 02 2.03 0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	*Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah*				5 Laporan	5 Laporan	25,000,000	-	-	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 02 2.03 0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	*Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda*				5 Laporan	5 Laporan	2,400,000	-	-	(2,400,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 02 7.04	***Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh***	***Terlaksananya Laporan Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh***				-	***30 Laporan***	***39,300,592***	***148,000,000***	***248,000,000***	***208,699,408***							***252,017,921***	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH***
	1 05 02 7.04 0002	Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam*				1 Laporan	1 Laporan	21,545,292	78,000,000	128,000,000	106,454,708	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			252,017,921	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 02 7.04 0003	Pengawasan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam*				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	20,000,000	20,000,000	19,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 02 7.04 0004	Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan dan sosialisasi Qanun dan peraturan Perundang-undangan Syariat Islam*				30 Laporan	30 Laporan	4,000,000	-	-	(4,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 02 7.04 0007	Pelaksanaan Eksekusi Cambuk sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku*				1 Laporan	1 Laporan	2,755,300	50,000,000	100,000,000	97,244,700	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 02 7.04 0009	Pemberdayaan untuk Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim*				30 Laporan	30 Laporan	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1 05 02 7.04 0010	Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi*				30 Doumen	30 Doumen	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
	1.06.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Sosial**							**4,559,626,268**	**4,053,731,880**	**4,553,731,880**	**(5,894,388)**							**3,847,500,000**	**DINAS SOSIAL**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4,559,626,268**	**4,053,731,880**	**4,553,731,880**	**(5,894,388)**							**3,847,500,000**	**DINAS SOSIAL**
	1 06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**4,559,626,268**	**4,053,731,880**	**4,553,731,880**	**(5,894,388)**							**3,847,500,000**	**DINAS SOSIAL**
36.	**1 06 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**				**B (65.50) Kategori (Nilai)**	**B (65.50) Predikat/Nilai**	**3,519,626,268**	**3,513,731,880**	**3,513,731,880**	**(5,894,388)**					**Dinas Sosial Kota Lhokseumawe**		**3,682,500,000**	**DINAS SOSIAL**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		/ Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah /	***Nilai SAKIP OPD***	***65.70***	***0***	***65.50***			***3,519,626,268***	***3,513,731,880***	***3,513,731,880***	***(5,894,388)***						***65.5***	***3,682,500,000***	***DINAS SOSIAL***
	1 06 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah***				***20 Dokumen***	***11 Dokumen***	***17,170,274***	***191,500,000***	***191,500,000***	***174,329,726***							***20,000,000***	***DINAS SOSIAL***
	1 06 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				8 Dokumen	8 Dokumen	13,000,000	191,500,000	191,500,000	178,500,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			20,000,000	DINAS SOSIAL
	1 06 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	4,170,274	-	-	(4,170,274)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SOSIAL
	1 06 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)***				***12 Bulan***	***12 Dokumen***	***3,009,015,994***	***3,035,449,000***	***3,035,449,000***	***26,433,006***							***3,000,000,000***	***DINAS SOSIAL***
	1 06 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				300 Orang/bulan	300 Orang/bulan	3,009,015,994	3,035,449,000	3,035,449,000	26,433,006	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			3,000,000,000	DINAS SOSIAL
	1 06 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dokumen)***				***12 Bulan***	***12 Dokumen***	***106,140,000***	***44,000,000***	***44,000,000***	***(62,140,000)***							***180,000,000***	***DINAS SOSIAL***
	1 06 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				10 Paket	10 Paket	4,000,000	1,000,000	1,000,000	(3,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			20,000,000	DINAS SOSIAL
	1 06 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				50 Paket	50 Paket	15,000,000	2,500,000	2,500,000	(12,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			30,000,000	DINAS SOSIAL
	1 06 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				100 Paket	100 Paket	8,000,000	3,500,000	3,500,000	(4,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SOSIAL
	1 06 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				20 Paket	20 Paket	8,000,000	2,000,000	2,000,000	(6,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SOSIAL
	1 06 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				360 Dokumen	360 Dokumen	1,140,000	-	-	(1,140,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SOSIAL
	1 06 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				30 Laporan	30 Laporan	70,000,000	35,000,000	35,000,000	(35,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			130,000,000	DINAS SOSIAL
	1 06 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***17 Unit***	***17 Unit***	***30,000,000***	-	-	***(30,000,000)***							-	***DINAS SOSIAL***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 06 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SOSIAL
	1 06 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)***				***12 Bulan***	***12 Bulan***	***257,500,000***	***199,882,880***	***199,882,880***	***(57,617,120)***							***302,500,000***	***DINAS SOSIAL***
	1 06 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				20 Laporan	20 Laporan	1,500,000	500,000	500,000	(1,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			2,500,000	DINAS SOSIAL
	1 06 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	56,000,000	50,800,000	50,800,000	(5,200,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			70,000,000	DINAS SOSIAL
	1 06 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				48 Laporan	48 Laporan	200,000,000	148,582,880	148,582,880	(51,417,120)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			230,000,000	DINAS SOSIAL
	1 06 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)***				***60 Unit***	***41 Unit***	***99,800,000***	***42,900,000***	***42,900,000***	***(56,900,000)***							***180,000,000***	***DINAS SOSIAL***
	1 06 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	34,600,000	18,800,000	18,800,000	(15,800,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			40,000,000	DINAS SOSIAL
	1 06 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				3 Unit	3 Unit	25,200,000	14,100,000	14,100,000	(11,100,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			40,000,000	DINAS SOSIAL
	1 06 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				20 Unit	20 Unit	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SOSIAL
	1 06 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				3 Unit	3 Unit	20,000,000	5,000,000	5,000,000	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			75,000,000	DINAS SOSIAL
	1 06 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				7 Unit	7 Unit	10,000,000	5,000,000	5,000,000	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			25,000,000	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
37.	1 06 02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**(1) Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (4) Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA (3) Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (2) Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten/Kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar**				**59.32 80.00 79.66 70.00 Persen Persen Persen Persen**	**(1) 59.32 (4) 79.66 (3) 79.66 (2) 80.00 Persen Persen Persen Persen**	**145,000,000**	**-**	**-**	**(145,000,000)**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe**		**-**	**DINAS SOSIAL**
		[Meningkatnya pemberdayaan sosial]	***Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial***	***59.32 70 79.66 80***	***0***	***59.32 70 79.66 80***			***145,000,000***	***-***	***-***	***(145,000,000)***						***59.32 70 79.66 80***	***-***	***DINAS SOSIAL***
	1 06 02 2.03	***Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial***				***78.72 Persen***	***78.72 Persen***	***145,000,000***	***-***	***-***	***(145,000,000)***							***-***	***DINAS SOSIAL***
	1 06 02 2.03 0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota*				20 Keluarga	20 Keluarga	60,000,000	-	-	(60,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SOSIAL
	1 06 02 2.03 0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota*				2 Lembaga	2 Lembaga	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SOSIAL
	1 06 02 2.03 0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	*Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota*				10 Orang	10 Orang	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SOSIAL
	1 06 02 2.03 0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	*Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi*				15 Orang	15 Orang	25,000,000	-	-	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 06 02 2.03 0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis*				20 orang	20 orang	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SOSIAL
38.	**1 06 04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 4. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 5. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 2. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya**				**100 Persen**	**3. 80 4. 80 1. 80 5. 80 2. 60 Persen Persen Persen Persen Persen**	**720,000,000**	**510,000,000**	**510,000,000**	**(210,000,000)**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe**		**50,000,000**	**DINAS SOSIAL**
		[Meningkatnya rehabilitasi sosial]	***Indeks Kesejahateraan Sosial Penyandang Disabilitas Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Indeks Peranan Sosial Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya***	***60 66.67 79.66 80***	***0***	***60 66.67 79.66 80***			***720,000,000***	***510,000,000***	***510,000,000***	***(210,000,000)***						***60 66.67 79.66 80***	***50,000,000***	***DINAS SOSIAL***
	1 06 04 2.01	***Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial***	***Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Yang memperoleh Bantuan Sosial***				***100 Persen***	***100 Orang***	***670,000,000***	***500,000,000***	***500,000,000***	***(170,000,000)***							***30,000,000***	***DINAS SOSIAL***
	1 06 04 2.01 0001	Penyediaan Permakanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota*				10 Orang	10 Orang	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			30,000,000	DINAS SOSIAL
	1 06 04 2.01 0002	Penyediaan Sandang	*Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota*				10 Orang	10 Orang	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SOSIAL
	1 06 04 2.01 0003	Penyediaan Alat Bantu	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota*				15 Orang	15 Orang	40,000,000	-	-	(40,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SOSIAL
	1 06 04 2.01 0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*				15 Orang	15 Orang	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 06 04 2.01 0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota*				50 Orang	50 Orang	25,000,000	-	-	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SOSIAL
	1 06 04 2.01 0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	*Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*				50 Orang	50 Orang	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SOSIAL
	1 06 04 2.01 0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*				10 Orang	10 Orang	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SOSIAL
	1 06 04 2.01 0012	Pemberian Layanan Rujukan	*Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota*				10 Orang	10 Orang	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SOSIAL
	1 06 04 2.01 0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota*				10 Orang	10 Orang	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SOSIAL
	1 06 04 2.02	***Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial***	***Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial***				***100 Persen***	***15 Orang***	***50,000,000***	***10,000,000***	***10,000,000***	***(40,000,000)***							***20,000,000***	***DINAS SOSIAL***
	1 06 04 2.02 0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota*				15 Orang	15 Orang	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			20,000,000	DINAS SOSIAL
	1 06 04 2.02 0005	Penyediaan Alat Bantu	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota*				5 Orang	5 Orang	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SOSIAL
	1 06 04 2.02 0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	*Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota*				50 Orang	50 Orang	25,000,000	-	-	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SOSIAL
39.	**1 06 05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**3. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan** **1. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi** **2. Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data** **4. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan**				**50.56 Persen**	**3. 3,18** **1. 50** **2. 79,41** **4. 50 Persen** **Persen** **Persen** **Persen**	**30,000,000**	**10,000,000**	**210,000,000**	**180,000,000**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe**		**25,000,000**	**DINAS SOSIAL**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial]	***Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin*** ***Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan*** ***Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi*** ***Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar***	***3.18*** ***50*** ***79.41***	***0***	***3.18*** ***50*** ***79.41***			***30,000,000***	***10,000,000***	***210,000,000***	***180,000,000***						***3.18*** ***50*** ***79.41***	***25,000,000***	***DINAS SOSIAL***
	1 06 05 2.02	***Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Laporan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota***				***142414 Orang***	***142414 Orang***	***30,000,000***	***10,000,000***	***210,000,000***	***180,000,000***							***25,000,000***	***DINAS SOSIAL***
	1 06 05 2.02 0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata*				93996 Orang	93996 Orang	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SOSIAL
	1 06 05 2.02 0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Usulan Pendndaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan*				1000 Usulan	1000 Usulan	15,000,000	10,000,000	210,000,000	195,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			25,000,000	DINAS SOSIAL
40.	**1 06 06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**2. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial** **1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana**				**100 Persen** **60** **100 Persen** **Persen**	**2. 100** **1. 100** **Persen** **Persen**	**120,000,000**	**10,000,000**	**310,000,000**	**190,000,000**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe**		**30,000,000**	**DINAS SOSIAL**
		[Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana]	***Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana*** ***Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial*** ***Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya***	***100*** ***60***	***0***	***100*** ***60***			***120,000,000***	***10,000,000***	***310,000,000***	***190,000,000***						***100*** ***60***	***30,000,000***	***DINAS SOSIAL***
	1 06 06 2.01	***Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota***	***Jumlah Laporan Penyediaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kabupaten/Kota***				-	***5 Laporan***	***90,000,000***	-	***200,000,000***	***110,000,000***							-	***DINAS SOSIAL***
	1 06 06 2.01 0001	Penyediaan Makanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota*				10 Orang	30 Orang	25,000,000	-	100,000,000	75,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SOSIAL
	1 06 06 2.01 0002	Penyediaan Sandang	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota*				10 Orang	30 Orang	20,000,000	-	100,000,000	80,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SOSIAL
	1 06 06 2.01 0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota*				10 Orang	10 Orang	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SOSIAL
	1 06 06 2.01 0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota*				10 Orang	10 Orang	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 06 06 2.01 0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	*Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota*				10 Orang	10 Orang	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SOSIAL
	1 06 06 2.02	***Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota***	***Jumlah Laporan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)***				***100 Persen***	***3 Laporan***	***30,000,000***	***10,000,000***	***110,000,000***	***80,000,000***							***30,000,000***	***DINAS SOSIAL***
	1 06 06 2.02 0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	*Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota*				20 Orang	20 Orang	30,000,000	10,000,000	110,000,000	80,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			30,000,000	DINAS SOSIAL
41.	**1 06 07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik**				**100 Persen**	**100 Persen**	**25,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**	**(15,000,000)**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe**		**60,000,000**	**DINAS SOSIAL**
		[Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan]	***Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik***	***100***	***0***	***100***			***25,000,000***	***10,000,000***	***10,000,000***	***(15,000,000)***						***100***	***60,000,000***	***DINAS SOSIAL***
	1 06 07 2.01	***Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota***	***Jumlah Laporan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)***				***100 Persen***	***3 Laporan***	***25,000,000***	***10,000,000***	***10,000,000***	***(15,000,000)***							***60,000,000***	***DINAS SOSIAL***
	1 06 07 2.01 0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota*				1 Makam	1 Makam	25,000,000	10,000,000	10,000,000	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			60,000,000	DINAS SOSIAL
	2.08.2.14.0.00.02.0000	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							**7,110,882,752**	**5,302,463,036**	**6,043,868,568**	**(1,067,014,184)**							**7,151,300,000**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7,110,882,752**	**5,302,463,036**	**6,043,868,568**	**(1,067,014,184)**							**7,151,300,000**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	2 08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**5,084,849,752**	**4,465,426,036**	**4,672,194,406**	**(412,655,346)**							**5,107,500,000**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
42.	**2 08 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD (Angka)**				**68.50 Nilai - Prediket**	**B (68.50) Predikat/Nilai**	**4,316,689,152**	**3,858,426,036**	**3,858,426,036**	**(458,263,116)**					**DP3AP2KB Kota Lhokseumawe**		**4,471,500,000**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	2 08 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah pengadaan barang milik daerah***				***7 Unit***	***1 Unit***	***30,000,000***	-	-	***(30,000,000)***							-	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 08 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				3 Unit	3 Unit	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***68.54***	***0***	***65.50***			***4,286,689,152***	***3,858,426,036***	***3,858,426,036***	***(428,263,116)***						***68.50***	***4,471,500,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 08 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***umlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah***				***7 Dokumen***	***7 Dokumen***	***15,000,000***	***1,500,000***	***1,500,000***	***(13,500,000)***							***20,000,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 08 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				14 Dokumen	14 Dokumen	15,000,000	1,500,000	1,500,000	(13,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 08 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah***				***12 Laporan***	***12 Laporan***	***3,811,028,472***	***3,622,309,476***	***3,622,309,476***	***(188,718,996)***							***3,890,000,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 08 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3,811,028,472	3,622,309,476	3,622,309,476	(188,718,996)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			3,890,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 01 2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah***				***1 Dokumen***	***1 Dokumen***	***8,000,000***	-	-	***(8,000,000)***							-	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 08 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				3 Orang	3 Orang	8,000,000	-	-	(8,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah***				***1 Dokumen***	***1 Dokumen***	***102,140,000***	***41,500,000***	***41,500,000***	***(60,640,000)***							***125,000,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 08 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	20,000,000	2,500,000	2,500,000	(17,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	6,000,000	2,000,000	2,000,000	(4,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	10,000,000	2,000,000	2,000,000	(8,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			15,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	1,140,000	-	-	(1,140,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				20 Laporan	20 Laporan	65,000,000	35,000,000	35,000,000	(30,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			70,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah***				***1 Dokumen***	***1 Dokumen***	***202,420,680***	***115,166,560***	***115,166,560***	***(87,254,120)***							***261,500,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 08 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	1,200,000	500,000	500,000	(700,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			1,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 08 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	46,000,000	46,000,000	46,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				3 Laporan	3 Laporan	155,220,680	68,666,560	68,666,560	(86,554,120)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			210,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah***				***5 Unit***	***10 Unit***	***148,100,000***	***77,950,000***	***77,950,000***	***(70,150,000)***							***175,000,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 08 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	33,300,000	18,050,000	18,050,000	(15,250,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			40,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				4 Unit	4 Unit	84,800,000	49,900,000	49,900,000	(34,900,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			90,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	20,000,000	5,000,000	5,000,000	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				8 Unit	8 Unit	10,000,000	5,000,000	5,000,000	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			15,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
43.	**2 08 02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%) Persentase Anggaran Responsif Gender(ARG) (%) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Persentase Anggaran Responsif Gender(ARG)**				**2 96.04 Persen Persen 96.04 2 Persen Persen**	**50.30 3.50 Persen Persen 50.30 3.50 Persen Persen**	**45,000,000**	**-**	**-**	**(45,000,000)**					**OPD Kota Lhokseumawe Organisasi Perempuan**		**70,000,000**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	2 08 02 2.03	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota***	***Jumlah lembaga yang ikut dalam Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan***				***1 Dokumen***	***17 Lembaga***	***20,000,000***	-	-	***(20,000,000)***							-	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 08 02 2.03 0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan*				1 dokumen	1 dokumen	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan]	***Persentase Anggaran Responsif Gender(ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan***	***3.50 50.42***	***0***	***2.00 50.27***			***25,000,000***	-	-	***(25,000,000)***						***2.00 50.30***	***70,000,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 08 02 2.01	***Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota***	***Jumlah OPD yang mendampatkan pendampingan PUG dan PPRG***				***34 OPD***	***15 OPD***	***10,000,000***	-	-	***(10,000,000)***							-	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 08 02 2.01 0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan*				15 Lembaga	15 Lembaga	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 02 2.02	***Pemberdayaan Perempuan Bidang Politk, HUkm, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota***	***Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi***				***30 Orang***	***17 Orang***	***15,000,000***	-	-	***(15,000,000)***							***70,000,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 08 02 2.02 0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politk, hukum, sosial, ekonomi*				15 orang	33 orang	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			70,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
44.	**2 08 03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)**				**74.29 Persen**	**100 Persen**	**215,300,000**	**251,304,800**	**278,704,800**	**63,404,800**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe OPD terkait dan masyarakat Kota Lhokseumawe,**		**211,000,000**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	2 08 03 2.02	***Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota***	***Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan***				***50 Layanan***	***40 Orang***	***120,500,000***	***169,410,000***	***196,810,000***	***76,310,000***							***121,000,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 08 03 2.02 0003	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	*Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota*				-	4 Orang	-	16,000,000	16,000,000	16,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 03 2.02 0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota*				-	4 Orang	-	4,830,000	4,830,000	4,830,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 03 2.02 0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota*				-	25 orang	-	34,180,000	34,180,000	34,180,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 03 2.02 0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota*				-	8 Orang	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 03 2.02 0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota*				-	6 orang	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 03 2.02 0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota*				-	40 orang	-	22,100,000	22,100,000	22,100,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Menurunnya kekerasan terhadap perempuan]	***Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif***	***34.62***	***0***	***48.57***			***215,300,000***	***160,394,800***	***187,794,800***	***(27,505,200)***						***46.67***	***211,000,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 08 03 2.01	***Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Dokumen pelaksanaan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan***				***90 Orang***	***1 Dokumen***	***65,000,000***	***52,348,400***	***52,348,400***	***(12,651,600)***							***55,000,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 08 03 2.01 0003	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota*				1 laporan	1 laporan	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 03 2.01 0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota*				20 Lembaga	20 Lembaga	50,000,000	52,348,400	52,348,400	2,348,400	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			55,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 08 03 2.02	***Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota***	***Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan***				***50 Layanan***	***40 Orang***	***120,500,000***	***169,410,000***	***196,810,000***	***76,310,000***							***121,000,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 08 03 2.02 0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota*				40 orang	40 orang	120,500,000	78,500,000	105,900,000	(14,600,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SISA DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			121,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 03 2.03	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)***				***50 Layanan***	***35 Orang***	***29,800,000***	***29,546,400***	***29,546,400***	***(253,600)***							***35,000,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 08 03 2.03 0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek*				35 orang	35 orang	29,800,000	29,546,400	29,546,400	(253,600)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			35,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
45.	**2 08 04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)**				**26.5 Persen**	**65.63 Persen**	**20,000,000**	**-**	**63,600,000**	**43,600,000**					**PUSPAGA Gampong**		**-**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	2 08 04 2.02	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Lembaga yang terlibat dalam Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak***				***1 Laporan***	***16 Lembaga***	***20,000,000***	***-***	***63,600,000***	***43,600,000***							***-***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 08 04 2.02 0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas*				7 Lembaga	7 Lembaga	20,000,000	-	63,600,000	43,600,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN SISA DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
46.	**2 08 05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)**				**44.12 Persen**	**44.12 Persen**	**20,000,000**	**-**	**-**	**(20,000,000)**					**Instansi terkait**		**-**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
		[Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak]	***Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan***	***64.71***	***0***	***35.29***			***20,000,000***	***-***	***-***	***(20,000,000)***						***44.12***	***-***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 08 05 2.01	***Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***JJumlah Dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia***				***1 Dokumen***	***1 Dokumen***	***20,000,000***	***-***	***-***	***(20,000,000)***							***-***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 08 05 2.01 0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia*				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
47.	**2 08 06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Angka)**				**65.95 Persen**	**65.95 Nilai**	**116,260,600**	**-**	**86,400,000**	**(29,860,600)**					**Anak Kota Lhokseumawe Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dunia Usaha, Media Massa, LSM, Lembaga Vertikal**		**-**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
		[Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif]	***Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)***	***66.90***	***0***	***65.80***			***116,260,600***	***-***	***86,400,000***	***(29,860,600)***						***65.95***	***-***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 08 06 2.01	***Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota***	***Jumlah Laporan pelembagaan PHA kewenangan kabupaten/kota***				***26 Organisasi***	***1 Laporan***	***96,260,600***	-	-	***(96,260,600)***							-	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 08 06 2.01 0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*				6 Lembaga	6 Lembaga	38,059,700	-	-	(38,059,700)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 06 2.01 0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*				30 Orang	30 Orang	15,095,300	-	-	(15,095,300)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN SISA DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 06 2.01 0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*				6 Lembaga	6 Lembaga	30,105,600	-	-	(30,105,600)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 06 2.01 0006	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	13,000,000	-	-	(13,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 06 2.02	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota***	***Jumlah Lembaga yang terlibat dalam Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak***				***3 Layanan***	***7 Lembaga***	***20,000,000***	-	***86,400,000***	***66,400,000***							-	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 08 06 2.02 0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan*				6 Lembaga	6 Lembaga	20,000,000	-	86,400,000	66,400,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN SISA DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
48.	**2 08 07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)**				**68.75 71.43 Persen Persen 71.43 68.50 Persen Persen**	**71.43 77.9 Persen Nilai 77.9 71.43 Nilai Persen**	**351,600,000**	**355,695,200**	**385,063,570**	**33,463,570**					**Anak Korban Kekerasan OPD terkait dan masyarakat Kota Lhokseumawe, OPD terkait, lembaga terkait dan masyarakat Kota Lhokseumawe,**		**355,000,000**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	2 08 07 2.02	***Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah anak yang mendapatkan layanan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota***				***50 Anak AMPK***	***40 Orang***	***200,000,000***	***224,650,000***	***254,018,370***	***54,018,370***							***210,000,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 08 07 2.02 0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota*				-	40 Orang	-	22,100,000	22,100,000	22,100,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 07 2.02 0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota*				-	25 Orang	-	52,520,000	52,520,000	52,520,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 07 2.02 0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota*				-	10 Orang	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 08 07 2.02 0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota*				-	4 Orang	-	11,700,000	11,700,000	11,700,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 07 2.02 0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota*				-	8 Orang	-	14,930,000	14,930,000	14,930,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 07 2.02 0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				-	4 Orang	-	16,000,000	16,000,000	16,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 07 2.02 0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota*				-	30 Orang	-	70,000,000	99,368,370	99,368,370	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SISA DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak&]	***Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)*** ***Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif***	***69.20*** ***80.00***	***0***	***68.65*** ***70***			***351,600,000***	***165,445,200***	***165,445,200***	***(186,154,800)***						***68.75*** ***71.43***	***355,000,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 08 07 2.01	***Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah lembaga yang terlibat dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak***				***1 Kegiatan***	***17 Lembaga***	***93,000,000***	***74,401,600***	***74,401,600***	***(18,598,400)***							***85,000,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 08 07 2.01 0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	80,000,000	74,401,600	74,401,600	(5,598,400)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			85,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 07 2.01 0008	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	13,000,000	-	-	(13,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 07 2.02	***Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah anak yang mendapatkan layanan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota***				***50 Anak AMPK***	***40 Orang***	***200,000,000***	***224,650,000***	***254,018,370***	***54,018,370***							***210,000,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 08 07 2.02 0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota*				40 Orang	40 Orang	200,000,000	34,400,000	34,400,000	(165,600,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			210,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 07 2.03	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah SDM Lembaga yang terlibat dalam penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak***				***50 Orang***	***30 Lembaga***	***58,600,000***	***56,643,600***	***56,643,600***	***(1,956,400)***							***60,000,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 08 07 2.03 0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	*jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek*				30 Orang	30 Orang	58,600,000	56,643,600	56,643,600	(1,956,400)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			60,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**2,026,033,000**	**837,037,000**	**1,371,674,162**	**(654,358,838)**							**2,043,800,000**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
49.	2 14 02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**AAngka Kelahiran Remaja Umur 15- 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15- 19) (Angka) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) (Angka) Angka Kelahiran Remaja Umur 15- 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15- 19) (Angka) Angka Kelahiran Total (Total**				**12.90 2.28 Bayi Bayi**	**7 2.27 Angka Angka**	**179,400,000**	**76,800,000**	**88,800,000**	**(90,600,000)**					**Guru Bimbingan Kesiswaan Masyarakat Kota Lhokseumawe**		**175,000,000**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
		[Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk]	***Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15- 19) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)***	***2.25 5.0***	***0***	***2.28 7.7***			***179,400,000***	***76,800,000***	***88,800,000***	***(90,600,000)***						***2.27 7.0***	***175,000,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 14 02 2.01	***Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk***	***Jumlah pelaksanaan kegiatan Pendidikan Kependudukan untuk pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kualitas penduduk***				***1 Kebijakan***	***1 Kegiatan***	***15,000,000***	-	-	***(15,000,000)***							-	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 14 02 2.01 0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	*Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 02 2.02	***Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah dokumen pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota***				***1 Dokumen***	***1 Dokumen***	***164,400,000***	***76,800,000***	***88,800,000***	***(75,600,000)***							***175,000,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 14 02 2.02 0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	*Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga*				1 Laporan	1 Laporan	116,400,000	40,800,000	40,800,000	(75,600,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			120,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 02 2.02 0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	*Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB*				1 Dokumen	1 Dokumen	48,000,000	36,000,000	48,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB SISA DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			55,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
50.	2 14 03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contracetive (mCPR) Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contracetive (mCPR) Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contracetive (mCPR)**				**57.12 8.41 Persen Persen 8.41 57.12 Persen Persen**	**57.10 8.41 Angka Persen 8.41 57.10 Persen Angka**	**1,309,233,000**	**311,437,000**	**639,074,162**	**(670,158,838)**					**Kampung KB Kota Lhokseumawe Masyarakat Kota Lhokseumawe Pasangan Usia Subur PKKBD dan Sub PKKBD**		**1,180,000,000**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
		[Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)]	***Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modem Contraceptive (mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Needs)***	***8.11 90***	***0***	***84 8.47***			***1,309,233,000***	***311,437,000***	***639,074,162***	***(670,158,838)***						***8.41 86***	***1,180,000,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 14 03 2.01	***Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal***	***Jumlah Laporan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal***				***1 Laporan***	***1 Laporan***	***661,000,000***	***100,000,000***	***248,046,653***	***(412,953,347)***							***575,000,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 14 03 2.01 0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*				1 Laporan	1 Laporan	196,000,000	60,000,000	69,600,000	(126,400,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB SISA DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			200,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 14 03 2.01 0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	*Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakoramj, Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)*				1 Laporan	1 Laporan	80,000,000	-	20,000,000	(60,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB SISA DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.01 0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	*Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang*				1 Dokumen	1 Dokumen	135,000,000	-	80,446,653	(54,553,347)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB SISA DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			85,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.01 0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	*Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja*				21 Organisasi	21 Organisasi	250,000,000	40,000,000	78,000,000	(172,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB SISA DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			260,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.02	***Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)***	***Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD***				***238 Orang***	***238 Orang***	***294,000,000***	***51,000,000***	***195,200,000***	***(98,800,000)***							***300,000,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 14 03 2.02 0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)*				238 Orang	238 Orang	294,000,000	51,000,000	195,200,000	(98,800,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB SISA DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			300,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.03	***Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya***				***29 Laporan***	***29 Laporan***	***151,133,000***	***107,937,000***	***143,327,509***	***(7,805,491)***							***115,000,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 14 03 2.03 0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*				1 Laporan	1 Laporan	26,100,000	27,000,000	27,000,000	900,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.03 0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*				700 Orang	700 Orang	43,483,000	80,937,000	80,937,000	37,454,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			45,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.03 0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*				1 Laporan	1 Laporan	56,550,000	-	35,390,509	(21,159,491)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB SISA DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			40,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.03 0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*				20 Orang	20 Orang	25,000,000	-	-	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.04	***Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB***	***Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB***				***68 Kampung***	***68 Kampung***	***203,100,000***	***52,500,000***	***52,500,000***	***(150,600,000)***							***190,000,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 14 03 2.04 0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	*Jumlah DASHAT di Kampung KB*				-	52 Unit	-	52,500,000	52,500,000	52,500,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			190,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 14 03 2.04 0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	*Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*				52 Kampung	52 Kampung	183,100,000	-	-	(183,100,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.04 0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	*Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB*				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
51.	**2 14 04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga**				**28.89 Persen**	**86.08 Persen**	**537,400,000**	**448,800,000**	**643,800,000**	**106,400,000**					**Keluarga Berisiko Stunting Masyarakat Kota Lhokseumawe**		**688,800,000**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
		[Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)]	***Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga***	***91.89***	***0***	***75.56***			***537,400,000***	***448,800,000***	***643,800,000***	***106,400,000***						***86.08***	***688,800,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 14 04 2.01	***Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga***	***Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk***				***19 Kelompok***	***19 Kelompok***	***88,600,000***	-	***195,000,000***	***106,400,000***							***200,000,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 14 04 2.01 0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	*Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)*				1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	9,600,000	-	-	(9,600,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 04 2.01 0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia*				4 Unit	15 Unit	39,000,000	-	195,000,000	156,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			200,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 04 2.01 0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)*				1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	-	-	(40,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 04 2.02	***Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga***	***Jumlah Tenaga Penyuluh PKB/PLKB***				***15 Orang***	***15 Orang***	***448,800,000***	***448,800,000***	***448,800,000***	-							***488,800,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2 14 04 2.02 0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	*Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)*				1 laporan	1 laporan	204,000,000	204,000,000	204,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			224,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 04 2.02 0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	*Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan*				1 laporan	1 laporan	244,800,000	244,800,000	244,800,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			264,800,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.10.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pertanahan**							**3,542,567,907**	**3,144,371,280**	**3,361,498,760**	**(181,069,147)**							**4,105,000,000**	**DINAS PERTANAHAN**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3,542,567,907**	**3,144,371,280**	**3,361,498,760**	**(181,069,147)**							**4,105,000,000**	**DINAS PERTANAHAN**
	2 10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**3,542,567,907**	**3,144,371,280**	**3,361,498,760**	**(181,069,147)**							**4,105,000,000**	**DINAS PERTANAHAN**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
52.	2 10 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**				**61.86/B Nilai/Predikat**	**B (61,86) Nilai**	**3,392,240,000**	**3,044,371,280**	**3,253,758,480**	**(138,481,520)**					**ASN Dinas Pertanahan Kepala Bidang Dinas Pertanahan**		**3,905,000,000**	**DINAS PERTANAHAN**
		[Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***63.11***	***0***	***61.55***			***3,392,240,000***	***3,044,371,280***	***3,253,758,480***	***(138,481,520)***						***61.86***	***3,905,000,000***	***DINAS PERTANAHAN***
	2 10 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD***				***2 Dokumen***	***2 Dokumen***	***10,000,000***	***1,500,000***	***1,500,000***	***(8,500,000)***							***15,000,000***	***DINAS PERTANAHAN***
	2 10 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	1,500,000	1,500,000	(8,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			15,000,000	DINAS PERTANAHAN
	2 10 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Pada Dinas Pertanahan***				***Laporan 2***	***Laporan 2***	***2,915,796,347***	***2,868,638,000***	***2,868,638,000***	***(47,158,347)***							***3,500,000,000***	***DINAS PERTANAHAN***
	2 10 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				490 Orang/bulan	490 Orang/bulan	2,915,796,347	2,868,638,000	2,868,638,000	(47,158,347)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			3,500,000,000	DINAS PERTANAHAN
	2 10 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah***				***5 Dokumen***	***5 Dokumen***	***151,140,000***	***42,500,000***	***45,887,200***	***(105,252,800)***							***160,000,000***	***DINAS PERTANAHAN***
	2 10 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				30 Paket	30 Paket	20,000,000	2,500,000	2,500,000	(17,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			20,000,000	DINAS PERTANAHAN
	2 10 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				200 Paket	200 Paket	20,000,000	2,500,000	2,500,000	(17,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			20,000,000	DINAS PERTANAHAN
	2 10 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				9 Paket	9 Paket	20,000,000	2,500,000	2,500,000	(17,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			20,000,000	DINAS PERTANAHAN
	2 10 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				365 Dokumen	365 Dokumen	1,140,000	-	-	(1,140,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PERTANAHAN
	2 10 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				32 Laporan	32 Laporan	90,000,000	35,000,000	38,387,200	(51,612,800)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			100,000,000	DINAS PERTANAHAN
	2 10 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***6 Unit***	***6 Unit***	***43,203,653***	-	-	***(43,203,653)***							-	***DINAS PERTANAHAN***
	2 10 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				10 Unit	10 Unit	43,203,653	-	-	(43,203,653)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PERTANAHAN
	2 10 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***3 Dokumen***	***3 Dokumen***	***160,500,000***	***106,233,280***	***106,233,280***	***(54,266,720)***							***168,000,000***	***DINAS PERTANAHAN***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 10 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				5 Laporan	5 Laporan	2,000,000	500,000	500,000	(1,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			2,000,000	DINAS PERTANAHAN
	2 10 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				24 Laporan	24 Laporan	65,500,000	48,400,000	48,400,000	(17,100,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			66,000,000	DINAS PERTANAHAN
	2 10 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				2 Laporan	2 Laporan	93,000,000	57,333,280	57,333,280	(35,666,720)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			100,000,000	DINAS PERTANAHAN
	2 10 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***12 Unit***	***12 Unit***	***111,600,000***	***25,500,000***	***231,500,000***	***119,900,000***							***62,000,000***	***DINAS PERTANAHAN***
	2 10 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	33,300,000	17,500,000	17,500,000	(15,800,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			35,000,000	DINAS PERTANAHAN
	2 10 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				2 Unit	2 Unit	44,800,000	-	-	(44,800,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PERTANAHAN
	2 10 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	23,500,000	5,000,000	211,000,000	187,500,000	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			17,000,000	DINAS PERTANAHAN
	2 10 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				10 Unit	10 Unit	10,000,000	3,000,000	3,000,000	(7,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			10,000,000	DINAS PERTANAHAN
53.	**2 10 12**	**PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH**	**Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah**				**3.20 Persen**	**3.89 Persen**	**25,000,000**	**20,000,000**	**23,686,680**	**(1,313,320)**					**Organisasi Perangkat Daerah**		**50,000,000**	**DINAS PERTANAHAN**
		[Meningkatnya kejelasan hak- hak atas tanah bagi pemerintah dan masyarakat miskin]	***Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah***	***0.61***	***0***	***0.48***			***25,000,000***	***20,000,000***	***23,686,680***	***(1,313,320)***						***0.50***	***50,000,000***	***DINAS PERTANAHAN***
	2 10 12 7.01	***Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah***	***Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah***				***3.89 Persen***	***1 Kegiatan***	***25,000,000***	***20,000,000***	***23,686,680***	***(1,313,320)***							***50,000,000***	***DINAS PERTANAHAN***
	2 10 12 7.01 0001	Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	*Jumlah Data Aset Tanah Pemerintah*				3 dokumen Laporan	3 dokumen Laporan	25,000,000	20,000,000	23,686,680	(1,313,320)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			50,000,000	DINAS PERTANAHAN
54.	**2 10 13**	**PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN**	**Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah**				**39.08 Persen**	**39.08 Persen**	**25,000,000**	**-**	**-**	**(25,000,000)**					**Organisasi Perangkat Daerah**		**-**	**DINAS PERTANAHAN**
		[Meningkatnya kejelasan hak milik atas tanah]	***Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah***	***47.51***	***0***	***37.22***			***25,000,000***	-	-	***(25,000,000)***						***39.08***	-	***DINAS PERTANAHAN***
	2 10 13 7.01	***Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong***	***Jumlah Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda***				***75 Persil***	***75 Persil***	***25,000,000***	-	-	***(25,000,000)***							-	***DINAS PERTANAHAN***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 10 13 7.01 0001	Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda*				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	-	-	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PERTANAHAN
55.	**2 10 14**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN**	**Persentase SDM Bidang Pertanahan yang Ditingkatkan Kompetensinya**				**59.65 Persen**	**59.65 Persen**	**25,000,000**	**-**	**-**	**(25,000,000)**					**Aparatur Sipil Negara**		**-**	**DINAS PERTANAHAN**
		[Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM bidang pertanahan]	***Persentase SDM Bidang Pertanahan yang Ditingkatkan Kompetensinya***	***59.65***	***0***	***52.63***			***25,000,000***	***-***	***-***	***(25,000,000)***						***59.65***	***-***	***DINAS PERTANAHAN***
	2 10 14 7.01	***Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten***	***Jumlah SDM Pertanahan yang mengikuti Pembinaan Pertanahan***				***3 Orang***	***3 Orang***	***25,000,000***	***-***	***-***	***(25,000,000)***							***-***	***DINAS PERTANAHAN***
	2 10 14 7.01 0001	Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan	*Jumlah Dokumen Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan*				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	-	-	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PERTANAHAN
56.	**2 10 15**	**PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU**	**Persentase Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau yang Tertata**				**61.25 Persen**	**61.25 Persen**	**25,000,000**	**40,000,000**	**40,000,000**	**15,000,000**					**Masyarakat**		**50,000,000**	**DINAS PERTANAHAN**
		[Meningkatnya tata kelola pertanahan di wilayah pesisir, laut dan pulau]	***Persentase Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau yang Tertata***	***63.81***	***0***	***58.33***			***25,000,000***	***40,000,000***	***40,000,000***	***15,000,000***						***61.25***	***50,000,000***	***DINAS PERTANAHAN***
	2 10 15 7.01	***Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil***	***Jumlah Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil***				***62.30 Persen***	***62.30 Persen***	***25,000,000***	***40,000,000***	***40,000,000***	***15,000,000***							***50,000,000***	***DINAS PERTANAHAN***
	2 10 15 7.01 0001	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir	*Jumlah Data Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Teridentifikasi dan Teriventarisasi di Wilayah Pesisir*				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	40,000,000	40,000,000	15,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			50,000,000	DINAS PERTANAHAN
57.	**2 10 17**	**PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN**	**Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Dan Konflik Pertanahan**				**60 Persen**	**60.00 Persen 60 Persen**	**50,327,907**	**40,000,000**	**44,053,600**	**(6,274,307)**					**Masyarakat**		**100,000,000**	**DINAS PERTANAHAN**
		[Meningkatnya penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanahan]	***Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan***	***66.67***	***0***	***60***			***50,327,907***	***40,000,000***	***44,053,600***	***(6,274,307)***						***60***	***100,000,000***	***DINAS PERTANAHAN***
	2 10 17 7.01	***Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan***	***Jenis Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Konflik - konflik Pertanahan***				***4 Kali***	***2 Jenis 4 Kali***	***50,327,907***	***40,000,000***	***44,053,600***	***(6,274,307)***							***100,000,000***	***DINAS PERTANAHAN***
	2 10 17 7.01 0001	Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				-	1 Dokumen	-	-	4,053,600	4,053,600	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PERTANAHAN
	2 10 17 7.01 0002	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	*Jumlah Layanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan*				1 Layanan	1 Layanan	25,000,000	20,000,000	20,000,000	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			50,000,000	DINAS PERTANAHAN
	2 10 17 7.01 0004	Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	*Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*				1 Berita Acara	1 Berita Acara	25,327,907	20,000,000	20,000,000	(5,327,907)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			50,000,000	DINAS PERTANAHAN
	2.11.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Lingkungan Hidup**							**40,887,730,122**	**43,618,725,162**	**58,330,728,562**	**17,442,998,440**							**38,077,485,796**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**40,887,730,122**	**43,618,725,162**	**58,330,728,562**	**17,442,998,440**							**38,077,485,796**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
	2 11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**40,887,730,122**	**43,618,725,162**	**58,330,728,562**	**17,442,998,440**							**38,077,485,796**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
58.	**2 11 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**				**100 Persen**	**B (63.10) Predikat/Nilai**	**22,783,980,122**	**34,416,875,162**	**43,811,669,562**	**21,027,689,440**							**26,215,304,967**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
		[Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***69.90***	***0***	***62.90***			***22,783,980,122***	***34,416,875,162***	***43,811,669,562***	***21,027,689,440***						***63.10***	***26,215,304,967***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2 11 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah***				-	***30 dokumen***	***61,100,000***	***1,500,000***	***1,500,000***	***(59,600,000)***							***35,000,000***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 11 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				15 Dokumen	15 Dokumen	61,100,000	1,500,000	1,500,000	(59,600,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			35,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN***				-	***434 ob***	***3,668,368,305***	***3,653,826,000***	***3,653,826,000***	***(14,542,305)***							***4,000,000,000***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2 11 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	3,668,368,305	3,653,826,000	3,653,826,000	(14,542,305)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4,000,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	-				-	-	***10,000,000***	-	-	***(10,000,000)***							-	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2 11 01 2.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***periode pelaksanaan***				-	***12 bulan***	***403,780,000***	-	-	***(403,780,000)***							-	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2 11 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				423 Paket	423 Paket	363,780,000	-	-	(363,780,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				10 Orang	10 Orang	40,000,000	-	-	(40,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Periode Pelaksanaan***				***12 bulan***	***12 bulan***	***1,364,849,300***	***1,217,500,000***	***1,217,500,000***	***(147,349,300)***							***362,241,651***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2 11 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				80 Paket	80 Paket	36,644,300	5,000,000	5,000,000	(31,644,300)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			52,710,200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1150 Paket	1150 Paket	1,199,460,000	1,160,000,000	1,160,000,000	(39,460,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			44,581,451	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				30 Paket	30 Paket	26,465,000	2,500,000	2,500,000	(23,965,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			30,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				730 Dokumen	730 Dokumen	2,280,000	-	-	(2,280,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				60 Laporan	60 Laporan	100,000,000	50,000,000	50,000,000	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			234,950,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***terbagnunnya Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan***						***162,787,100***	-	-	***(162,787,100)***							-	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2 11 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	54,751,400	-	-	(54,751,400)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				4 Unit	4 Unit	108,035,700	-	-	(108,035,700)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	-				-	-	***13,761,397,177***	***27,344,843,562***	***36,487,355,862***	***22,725,958,685***							***19,342,441,716***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 11 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				30 Laporan	30 Laporan	5,000,000	500,000	500,000	(4,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			5,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				2878 Laporan	2878 Laporan	13,074,248,019	26,721,594,404	35,721,594,404	22,647,346,385	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			18,655,292,516	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				367 Laporan	367 Laporan	682,149,158	622,749,158	765,261,458	83,112,300	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			682,149,200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***periode pelaksanaan***				-	***12 bulan***	***3,351,698,240***	***2,199,205,600***	***2,451,487,700***	***(900,210,540)***							***2,475,621,600***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2 11 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	43,460,000	17,500,000	17,500,000	(25,960,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			47,916,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				34 Unit	34 Unit	3,028,312,000	2,171,705,600	2,171,705,600	(856,606,400)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			2,147,705,600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	100,026,240	5,000,000	5,000,000	(95,026,240)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			100,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				6 Unit	6 Unit	179,900,000	5,000,000	257,282,100	77,382,100	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			180,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
59.	**2 11 02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Yang ditindaklanjuti**				**Ada**	**100 Persen**	**347,250,000**	-	-	**(347,250,000)**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe**		-	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
		[Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP]	***Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti***	***1***	***0***	***2***			***347,250,000***	-	-	***(347,250,000)***						***1***	-	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2 11 02 2.01	***Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota***	***Jumlah dokumen Lingkungan Hdup***				***3 Dokumen***	***3 Dokumen***	***95,000,000***	-	-	***(95,000,000)***							-	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2 11 02 2.01 0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	-	-	(40,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 02 2.01 0005	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	*Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan*				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	-	-	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 02 2.01 0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	*jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi*				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 02 2.02	***Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota***	***Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Restko Lingkungan Hidup yang Disusun***				-	***0 dok***	***252,250,000***	-	-	***(252,250,000)***							-	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 11 02 2.02 0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	*Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	41,000,000	-	-	(41,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 02 2.02 0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	*Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi*				2 Dokumen	2 Dokumen	85,000,000	-	-	(85,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 02 2.02 0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	*Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun*				3 Dokumen	3 Dokumen	26,250,000	-	-	(26,250,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 02 2.02 0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	*Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun*				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	-	-	(100,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
60.	**2 11 03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas Air Indek Kualitas Udara Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air**				-	**0.712 92.93 Indeks Indeks 92.93 0.712 Indeks**	**9,183,600,000**	**8,372,250,000**	**8,396,250,000**	**(787,350,000)**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe**		**40,000,000**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
	2 11 03 2.02	***Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***	***Jumlah Dokumen Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan***				-	***1 dokumen***	***285,000,000***	-	-	***(285,000,000)***							-	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2 11 03 2.02 0004	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	*Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan*				7 Laporan	7 Laporan	35,000,000	-	-	(35,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		[Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup]	***Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air***	***28.82 40.12***	***0***	***26.32 37.62***			***9,148,600,000***	***8,372,250,000***	***8,396,250,000***	***(752,350,000)***						***26.82 38.12***	***40,000,000***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2 11 03 2.01	***Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***	***Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut***				-	***1 dokumen***	***8,646,600,000***	***8,372,250,000***	***8,396,250,000***	***(250,350,000)***							***40,000,000***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2 11 03 2.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	*Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut*				3 Dokumen	3 Dokumen	8,354,600,000	8,372,250,000	8,396,250,000	41,650,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				40,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.01 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	-	-	(70,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.01 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	*Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	17,000,000	-	-	(17,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.01 0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	*Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK*				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.01 0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	*Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)*				4 Lokasi	4 Lokasi	60,000,000	-	-	(60,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 11 03 2.01 0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	*Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.01 0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	*Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan*				4 Paket	4 Paket	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.01 0019	Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup	*Jumlah laporan pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup*				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.02	***Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***	***Jumlah Dokumen Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan***				-	***1 dokumen***	***285,000,000***	-	-	***(285,000,000)***							-	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2 11 03 2.02 0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	*Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi*				3 Lokasi	3 Lokasi	100,000,000	-	-	(100,000,000)	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.02 0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	*Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan*				0 0	0 Titik	150,000,000	-	-	(150,000,000)	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.03	***Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***	-				-	-	***252,000,000***	-	-	***(252,000,000)***							-	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2 11 03 2.03 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan*				0 0	0 Dokumen	40,000,000	-	-	(40,000,000)	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.03 0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	*jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.03 0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	*jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	47,000,000	-	-	(47,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.03 0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	*jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	45,000,000	-	-	(45,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.03 0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	*jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan*				0 0	0 Kegiatan	50,000,000	-	-	(50,000,000)	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.03 0014	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	*Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan*				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
61.	**2 11 04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase RTH**				-	**24,46 Persen**	**1,910,900,000**	-	**1,700,000,000**	**(210,900,000)**							-	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
		[Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati]	***Persentase RTH***	***27.107***	***0***	***24***			***1,910,900,000***	-	***1,700,000,000***	***(210,900,000)***						***24.46***	-	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2 11 04 2.01	***Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota***	***Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati***				-	***5 ha***	***1,910,900,000***	-	***1,700,000,000***	***(210,900,000)***							-	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2 11 04 2.01 0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	*Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	-	-	(80,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 11 04 2.01 0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	*Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota*				2 Ha	2 Ha	40,000,000	-	-	(40,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 04 2.01 0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	*Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati*				12 Orang	12 Orang	60,000,000	-	-	(60,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 04 2.01 0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	*Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola*				2 Unit	1 Unit	1,620,900,000	-	-	(1,620,900,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 04 2.01 0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	*Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota*				1 Unit	1 Unit	70,000,000	-	1,700,000,000	1,630,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 04 2.01 0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	*Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota*				1 Unit	1 Unit	40,000,000	-	-	(40,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
62.	**2 11 05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase limbah B3 yang terkelola**				-	**42.62 Persen**	**170,000,000**	**-**	**-**	**(170,000,000)**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe**		**-**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
		[Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)&]	***Persentase Limbah B3 yang Terkelola***	***55.22***	***0***	***40.68***			***170,000,000***	-	-	***(170,000,000)***						***42.62***	-	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2 11 05 2.01	***Penyimpanan sementara Limbah B3***	***Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik***				-	***1 dokumen***	***80,000,000***	-	-	***(80,000,000)***							-	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2 11 05 2.01 0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	*Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)*				1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	-	-	(80,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 05 2.02	***Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	-				-	-	***90,000,000***	-	-	***(90,000,000)***							-	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2 11 05 2.02 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya*				1 Dokumen	1 Dokumen	90,000,000	-	-	(90,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
63.	**2 11 06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan PPLH dan PUU LH**				-	**0.43 Persen**	**80,000,000**	**-**	**-**	**(80,000,000)**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe**		**-**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
		[Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan]	***Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota***	***0***	***0***	***0***			***80,000,000***	-	-	***(80,000,000)***						***0***	-	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2 11 06 2.01	***Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD***				-	***20 dokumen***	***80,000,000***	-	-	***(80,000,000)***							-	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2 11 06 2.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	*Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan*				5 Dokumen	5 Dokumen	40,000,000	-	-	(40,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 11 06 2.01 0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	*Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD*				3 Orang	3 Orang	40,000,000	-	-	(40,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
64.	**2 11 07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya**				-	**23.50 Persen**	**170,000,000**	**-**	**-**	**(170,000,000)**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe**		**-**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
		[Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH]	***Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya***	***19.12***	***0***	***0***			***170,000,000***	-	-	***(170,000,000)***						***23.53***	-	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2 11 07 2.01	***Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH***	-				-	-	***70,000,000***	-	-	***(70,000,000)***							-	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2 11 07 2.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH*				1 Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	-	-	(70,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 07 2.02	***Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH***	-				-	-	***100,000,000***	-	-	***(100,000,000)***							-	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2 11 07 2.02 0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	*Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan*				3 Dokumen	3 Dokumen	100,000,000	-	-	(100,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
65.	**2 11 08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya**				-	**100 Persen**	**189,000,000**	**-**	**-**	**(189,000,000)**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe**		**-**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
		[Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup]	***Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya***	***0***	***0***	***0***			***189,000,000***	-	-	***(189,000,000)***						***0***	-	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2 11 08 2.01	***Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH***				-	***1 lembaga***	***189,000,000***	-	-	***(189,000,000)***							-	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2 11 08 2.01 0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	*Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan*				204 Dokumen	204 Dokumen	61,000,000	-	-	(61,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 08 2.01 0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat*				68 Keluarga	68 Keluarga	68,000,000	-	-	(68,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 08 2.01 0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	*Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH*				3 Lembaga	3 Lembaga	60,000,000	-	-	(60,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
66.	**2 11 11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah** **Persentase jumlah sampah yang ditangani**				-	**51 Angka** **51 Persen**	**6,053,000,000**	**829,600,000**	**4,422,809,000**	**(1,630,191,000)**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe**		**11,822,180,829**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
		[Meningkatnya tata kelola persampahan]	***Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah***	***58***	***0***	***48***			***6,053,000,000***	***829,600,000***	***4,422,809,000***	***(1,630,191,000)***						***51***	***11,822,180,829***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2 11 11 2.01	***Pengelolaan Sampah***	***Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota***				-	***51 Angka***	***5,933,000,000***	***829,600,000***	***4,422,809,000***	***(1,510,191,000)***							***11,822,180,829***	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2 11 11 2.01 0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	*Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*				68 Kelompok	68 Kelompok	120,000,000	-	-	(120,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.01 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada*				2 Dokumen	2 Dokumen	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 11 11 2.01 0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir*				5 Unit	5 Unit	4,692,350,000	829,600,000	4,422,809,000	(269,541,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			11,822,180,829	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.01 0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	*Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan*				1 Dokumen	1 Dokumen	90,000,000	-	-	(90,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.01 0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	*Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik*				8 Unit	8 Unit	200,000,000	-	-	(200,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.01 0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	*Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.01 0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	*jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional*				20000 Ton	20000 Ton	130,650,000	-	-	(130,650,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.01 0023	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	*Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah*				8 Dokumen	8 Dokumen	80,000,000	-	-	(80,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.01 0027	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada kondisi khusus	*Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus*				1 Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	-	-	(70,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.01 0028	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan*				10 Unit	10 Unit	500,000,000	-	-	(500,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.03	***Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta***	-				-	-	***120,000,000***	-	-	***(120,000,000)***							-	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2 11 11 2.03 0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah*				3 Laporan	3 Laporan	80,000,000	-	-	(80,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.03 0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	-	-	(40,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.12.0.00.0.00.03.0000	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							**4,257,344,053**	**4,079,902,200**	**4,179,902,200**	**(77,441,853)**							**4,260,100,000**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4,257,344,053**	**4,079,902,200**	**4,179,902,200**	**(77,441,853)**							**4,260,100,000**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
	2 12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4,257,344,053**	**4,079,902,200**	**4,179,902,200**	**(77,441,853)**							**4,260,100,000**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
67.	**2 12 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI SAKIP OPD**				**100 68,85 Persen Persen 68,85 100 Persen Persen 68,85 Persen**	**64.00 B Prediket/Nilai**	**3,357,344,053**	**3,574,902,200**	**3,674,902,200**	**317,558,147**					**Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong**		**3,520,100,000**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		[Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***76***	***0***	***66.65***			***3,357,344,053***	***3,574,902,200***	***3,674,902,200***	***317,558,147***						***68.85***	***3,520,100,000***	***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***
	2 12 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah***				***7 Dokumen***	***7 Dokumen***	***20,000,000***	***1,500,000***	***1,500,000***	***(18,500,000)***							***25,000,000***	***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 12 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				7 Dokumen	7 Dokumen	20,000,000	1,500,000	1,500,000	(18,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			25,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***				***1260 Laporan 1 Tahun***	***1260 Laporan 1 Tahun***	***2,566,054,853***	***3,194,303,000***	***3,194,303,000***	***628,248,147***							***2,800,000,000***	***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***
	2 12 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				1120 Orang/bulan	1120 Orang/bulan	2,566,054,853	3,194,303,000	3,194,303,000	628,248,147	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			2,800,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan Adminisrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***				***12 Bulan 1 Laporan***	***12 Bulan 1 Laporan***	***26,000,000***	-	-	***(26,000,000)***							-	***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***
	2 12 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				120 Paket	120 Paket	1,000,000	-	-	(1,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				10 Orang	10 Orang	25,000,000	-	-	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***				***12 Bulan 1 Laporan***	***12 Bulan 1 Laporan***	***104,140,000***	***45,000,000***	***50,000,000***	***(54,140,000)***							***170,000,000***	***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***
	2 12 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				80 Paket	80 Paket	20,000,000	5,000,000	10,000,000	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			35,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1000 Paket	1000 Paket	8,000,000	2,500,000	2,500,000	(5,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			10,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				30 Paket	30 Paket	15,000,000	7,500,000	7,500,000	(7,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			25,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				2 Dokumen	2 Dokumen	1,140,000	-	-	(1,140,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				60 Laporan	60 Laporan	50,000,000	30,000,000	30,000,000	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			100,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 12 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*				5 Dokumen	5 Dokumen	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***7 Jenis***	***7 Jenis***	***153,049,200***	-	-	***(153,049,200)***							-	***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***
	2 12 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				15 Unit	15 Unit	133,049,200	-	-	(133,049,200)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Periode Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah***				***12 Bulan 1 Laporan***	***12 Bulan 1 Laporan***	***345,700,000***	***274,499,200***	***274,499,200***	***(71,200,800)***							***346,000,000***	***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***
	2 12 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				30 Laporan	30 Laporan	1,500,000	500,000	500,000	(1,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			1,800,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				10 Laporan	10 Laporan	144,200,000	125,600,000	125,600,000	(18,600,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			144,200,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				5 Laporan	5 Laporan	200,000,000	148,399,200	148,399,200	(51,600,800)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			200,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***12 Bulan 23 unit***	***12 Bulan 23 unit***	***142,400,000***	***59,600,000***	***154,600,000***	***12,200,000***							***179,100,000***	***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***
	2 12 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	33,300,000	17,500,000	17,500,000	(15,800,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			40,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				4 Unit	4 Unit	59,100,000	32,100,000	32,100,000	(27,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			59,100,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 12 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	30,000,000	5,000,000	100,000,000	70,000,000	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			55,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				9 Unit	9 Unit	20,000,000	5,000,000	5,000,000	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			25,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
68.	**2 12 02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital**				**20,00 47,00 Persen Persen 47,00 71,07 20,00 Persen Persen Persen 47,00 71.07 20,00 Persen Persen Persen 71,07 20,00 47,00 Persen Persen**	**0.47 20,00% Persen Persen 20,00 71.07 47,00 Persen Persen Persen 71,07 20,00 47,00 Persen Persen Persen**	**215,000,000**	**80,000,000**	**80,000,000**	**(135,000,000)**					**Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong**		**125,000,000**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		[Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk]	***Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital***	***40.00 60***	***0***	***13.00 43.00***			***215,000,000***	***80,000,000***	***80,000,000***	***(135,000,000)***						***20.00 47.00***	***125,000,000***	***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***
	2 12 02 2.01	***Pelayanan Pendaftaran Penduduk***	***Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan***				***5 Dokumen 8 Dokumen***	***5 Dokumen 8 Dokumen***	***55,000,000***	-	-	***(55,000,000)***							-	***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***
	2 12 02 2.01 0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	*Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan*				3 Dokumen	3 Dokumen	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 02 2.01 0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk*				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	-	-	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 02 2.01 0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	*Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk*				3 Dokumen	3 Dokumen	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 02 2.02	***Penataan Pendaftaran Penduduk***	***Jumlah Dokumen Penataan Pendaftaran Penduduk***				***3 Dokumen***	***3 Dokumen***	***105,000,000***	***40,000,000***	***40,000,000***	***(65,000,000)***							***90,000,000***	***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***
	2 12 02 2.02 0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun*				2 Dokumen	2 Dokumen	25,000,000	-	-	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 02 2.02 0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	*Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia*				1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	40,000,000	40,000,000	(40,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			90,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 02 2.03	***Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk***	***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk***				***5 Laporan 8 Dokumen***	***5 Laporan 8 Dokumen***	***44,500,000***	***40,000,000***	***40,000,000***	***(4,500,000)***							***35,000,000***	***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 12 02 2.03 0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk*				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	40,000,000	40,000,000	10,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			35,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 02 2.03 0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Laporan Hasil Sosialisi Pendaftaran Penduduk*				1 Laporan	1 Laporan	500,000	-	-	(500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 02 2.03 0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia*				3 Dokumen	3 Dokumen	14,000,000	-	-	(14,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 02 2.04	***Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk***	***Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Periode Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk***				***12 Bulan 1 Laporan***	***12 Bulan 1 Laporan***	***10,500,000***	-	-	***(10,500,000)***							-	***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***
	2 12 02 2.04 0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk*				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 02 2.04 0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk*				20 Laporan	20 Laporan	500,000	-	-	(500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
69.	**2 12 03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan bagi Yang Melaporkan Persentase Akta Kelahiran Yang diterbitkan Bagi Yang Melaporkan Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan bagi Yang Melaporkan Persentase Akta Kelahiran Yang diterbitkan Bagi Yang Melaporkan Persentase Akta Perceraian Yang diterbitkan Bagi Yang Melaporkan Persentase Akta Perkawinan Yang diterbitkan Bagi Yang Melaporkan Persentase Akta Perceraian Yang diterbitkan Bagi Yang Melaporkan Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan bagi Yang Melaporkan Persentase Akta Kelahiran Yang diterbitkan Bagi Yang Melaporkan Persentase Akta Perkawinan Yang diterbitkan Bagi Yang**				**100 99,18 Persen Persen 99,18 100 Persen Persen**	**100% 1 99,80% 100% Persen Persen Persen 100 99,18 Persen Persen 1 99,80% 100.00% 100.00% Persen Persen Persen Persen**	**145,000,000**	**75,000,000**	**75,000,000**	**(70,000,000)**					**Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong**		**75,000,000**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		[Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil]	***Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan***	***100 99.42***	***0***	***100 99.06***			***145,000,000***	***75,000,000***	***75,000,000***	***(70,000,000)***						***100 99.18***	***75,000,000***	***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***
	2 12 03 2.01	***Pelayanan Pencatatan Sipil***	***Jumlah Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil***				***5 Dokumen***	***5 Dokumen***	***65,000,000***	***55,000,000***	***55,000,000***	***(10,000,000)***							***45,000,000***	***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 12 03 2.01 0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan*				5 Layanan	5 Layanan	40,000,000	55,000,000	55,000,000	15,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			45,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 03 2.01 0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	*Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil*				5 Dokumen	5 Dokumen	25,000,000	-	-	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 03 2.02	***Penyelenggaraan Pencatatan Sipil***	***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil***				***11 Laporan 1 Laporan***	***11 Laporan 1 Laporan***	***75,000,000***	***20,000,000***	***20,000,000***	***(55,000,000)***							***30,000,000***	***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***
	2 12 03 2.02 0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil*				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	20,000,000	20,000,000	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			30,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 03 2.02 0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil*				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	-	-	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 03 2.02 0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil*				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	-	-	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 03 2.03	***Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil***	***Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil***				***1 Laporan 4 Laporan***	***1 Laporan 4 Laporan***	***5,000,000***	-	-	***(5,000,000)***							-	***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***
	2 12 03 2.03 0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil*				20 Laporan	20 Laporan	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
70.	**2 12 04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan**				**100 Persen 1 Laporan**	**100 Persen 100% Persen 1 Laporan**	**530,000,000**	**350,000,000**	**350,000,000**	**(180,000,000)**					**Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong**		**540,000,000**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		[Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan]	***Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan***	***100***	***0***	***100***			***530,000,000***	***350,000,000***	***350,000,000***	***(180,000,000)***						***100***	***540,000,000***	***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***
	2 12 04 2.01	***Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan***	***Jumlah Dokumen Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan***				***1 Dokumen 4 Dokumen***	***1 Dokumen 4 Dokumen***	***10,000,000***	-	-	***(10,000,000)***							-	***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***
	2 12 04 2.01 0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah*				2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 12 04 2.03	***Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan***	***Jumlah Laporan Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan***				***5 Laporan 8 Laporan***	***5 Laporan 8 Laporan***	***480,000,000***	***350,000,000***	***350,000,000***	***(130,000,000)***							***540,000,000***	***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***
	2 12 04 2.03 0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*				5 Laporan	5 Laporan	455,000,000	350,000,000	350,000,000	(105,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			540,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 04 2.03 0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*				7 Laporan	7 Laporan	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 04 2.03 0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat*				12 Laporan	12 Laporan	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 04 2.03 0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	*Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan*				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 04 2.04	***Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan***	***Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan***				***2 Laporan 3 Laporan***	***2 Laporan 3 Laporan***	***40,000,000***	-	-	***(40,000,000)***							-	***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***
	2 12 04 2.04 0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 04 2.04 0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan*				6 Laporan	6 Laporan	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
71.	**2 12 05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Kependudukan Ketersediaan Profil Perkembangan Kependudukan**				**1 Ada Dokumen Ada**	**1 Ada Dokumen Ada**	**10,000,000**	**-**	**-**	**(10,000,000)**					**Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Mon Geudong**		**-**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		[Meningkatnya kualitas profil kependudukan]	***Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan***	***100***	***0***	***100***			***10,000,000***	-	-	***(10,000,000)***						***100***	-	***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***
	2 12 05 2.01	***Penyusunan Profil Kependudukan***	***Jumlah Buku Profil Kependudukan Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Kependudukan***				***1 Dokumen 2 Dokumen***	***1 Dokumen 2 Dokumen***	***10,000,000***	-	-	***(10,000,000)***							-	***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***
	2 12 05 2.01 0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	*Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.0.00.0.00.02.0000	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong**							**4,349,042,182**	**3,736,059,080**	**4,653,459,080**	**304,416,898**							**3,872,017,347**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4,349,042,182**	**3,736,059,080**	**4,653,459,080**	**304,416,898**							**3,872,017,347**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG**
	2 13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**4,349,042,182**	**3,736,059,080**	**4,653,459,080**	**304,416,898**							**3,872,017,347**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG**
72.	**2 13 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**				**B / 62,70 Persen B / 62.70 Persen**	**B / 62.80 Angka**	**3,523,542,182**	**3,343,359,080**	**3,673,359,080**	**149,816,898**					**Aparatur DPMG**		**3,274,517,347**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 13 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***12 Unit***	***12 Unit***	***59,612,364***	-	-	***(59,612,364)***							-	***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG***
	2 13 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				3 Unit	0 Unit	59,612,364	-	-	(59,612,364)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
		[Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***63.00***	***0***	***62.60***			***3,463,929,818***	***3,343,359,080***	***3,673,359,080***	***209,429,262***						***62.70***	***3,274,517,347***	***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG***
	2 13 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***				***15 Dokumen***	***15 Dokumen***	***10,000,000***	***1,500,000***	***1,500,000***	***(8,500,000)***							***15,000,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG***
	2 13 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				15 Dokumen	15 Dokumen	10,000,000	1,500,000	1,500,000	(8,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			15,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2 13 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Serta Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah***				***12 Laporan***	***12 Dokumen***	***3,006,423,738***	***3,053,653,000***	***3,053,653,000***	***47,229,262***							***2,660,195,890***	***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG***
	2 13 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				643 Orang/bulan	643 Orang/bulan	3,006,423,738	3,053,653,000	3,053,653,000	47,229,262	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			2,660,195,890	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2 13 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah***				***12 Laporan***	***12 Dokumen***	***97,280,000***	***36,900,000***	***36,900,000***	***(60,380,000)***							***145,000,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG***
	2 13 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	15,000,000	2,500,000	2,500,000	(12,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			15,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2 13 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	15,000,000	2,500,000	2,500,000	(12,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			15,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2 13 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	15,000,000	2,500,000	2,500,000	(12,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			15,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2 13 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				235 Dokumen	0 Dokumen	2,280,000	-	-	(2,280,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2 13 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				30 Laporan	10 Laporan	50,000,000	29,400,000	29,400,000	(20,600,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2 13 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***12 Laporan***	***12 Laporan***	***274,546,080***	***209,566,080***	***209,566,080***	***(64,980,000)***							***371,073,457***	***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG***
	2 13 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	1,980,000	500,000	500,000	(1,480,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			2,420,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 13 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	96,000,000	96,000,000	96,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			108,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2 13 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	176,566,080	113,066,080	113,066,080	(63,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			260,653,457	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2 13 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***12 Bulan***	***12 Laporan***	***75,680,000***	***41,740,000***	***371,740,000***	***296,060,000***							***83,248,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG***
	2 13 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	36,630,000	21,465,000	21,465,000	(15,165,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			40,293,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2 13 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				1 Unit	1 Unit	28,050,000	14,775,000	14,775,000	(13,275,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			30,855,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2 13 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				10 Unit	10 Unit	11,000,000	5,500,000	335,500,000	324,500,000	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			12,100,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
73.	**2 13 02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Meningkatnya Kualitas Penataan Desa**				**14,71 Persen**	**14,71 Persen**	**10,000,000**	**-**	**-**	**(10,000,000)**					**Pemerintah Gampong**		**-**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG**
		[Meningkatnya kualitas penataan desa]	***Persentase Fasilitasi Penataan Desa***	***32.35***	***0***	***7.35***			***10,000,000***	-	-	***(10,000,000)***						***7.35***	-	***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG***
	2 13 02 2.01	***Penyelenggaraan Penataan Desa***	***Terselenggaranya Penataan Desa***				***10 Desa***	***10 Desa***	***10,000,000***	-	-	***(10,000,000)***							-	***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG***
	2 13 02 2.01 0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi*				68 Unit	0 Unit	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
74.	**2 13 03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa**				**7,35 Persen**	**7,35 Persen**	**10,000,000**	**-**	**-**	**(10,000,000)**					**Pemerintah Gampong**		**-**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG**
		[Meningkatnya efektivitas kerja sama desa]	***Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa***	***32.35***	***0***	***7.35***			***10,000,000***	-	-	***(10,000,000)***						***7.35***	-	***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG***
	2 13 03 2.01	***Fasilitasi Kerja Sama antar Desa***	***Terlaksananya Kerja Sama Antar Desa***				***5 Desa***	***5 Desa***	***10,000,000***	-	-	***(10,000,000)***							-	***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG***
	2 13 03 2.01 0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota*				4 Dokumen	0 Dokumen	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
75.	**2 13 04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya**				**95,00 51,47 68 Persen Persen Desa**	**99,55 14,52 Persen Persen**	**386,500,000**	**292,700,000**	**346,700,000**	**(39,800,000)**					**Pemerintahan Gampong dan Aparatur Gampong**		**168,900,000**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG**
		[Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]	***Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa***	***100 95***	***0***	***14.71 95***			***386,500,000***	***292,700,000***	***346,700,000***	***(39,800,000)***						***51.47 95***	***168,900,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG***
	2 13 04 2.01	***Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa***	***Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa***				***68 Desa***	***68 Desa***	***386,500,000***	***292,700,000***	***346,700,000***	***(39,800,000)***							***168,900,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 13 04 2.01 0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa*				3 Dokumen	0 Dokumen	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2 13 04 2.01 0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa*				5 Dokumen	5 Dokumen	75,000,000	115,000,000	115,000,000	40,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			108,900,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2 13 04 2.01 0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	*Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas*				68 Orang	0 Orang	40,000,000	-	-	(40,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2 13 04 2.01 0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa*				1 Dokumen	0 Dokumen	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2 13 04 2.01 0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*				1 Laporan	1 Laporan	169,500,000	-	-	(169,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2 13 04 2.01 0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*				-	2 Laporan	-	177,700,000	231,700,000	231,700,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			60,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2 13 04 2.01 0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*				1 Laporan	1 Laporan	7,000,000	-	-	(7,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2 13 04 2.01 0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa*				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2 13 04 2.01 0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	*Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas*				68 Orang	0 Orang	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2 13 04 2.01 0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	*Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa*				68 Desa	68 Desa	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2 13 04 2.01 0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan*				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
76.	2 13 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**				**54,10 76,47 Persen Persen**	**100 76,47 Persen Persen**	**419,000,000**	**100,000,000**	**633,400,000**	**214,400,000**					**Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)**		**428,600,000**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG**
		[Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan]	***Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)***	***66.18 86.27***	***0***	***29.41 73.53***			***419,000,000***	***100,000,000***	***633,400,000***	***214,400,000***						***36.76 76.47***	***428,600,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG***
	2 13 05 2.01	***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan***				***68 Desa***	***68 Desa***	***419,000,000***	***100,000,000***	***633,400,000***	***214,400,000***							***428,600,000***	***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG***
	2 13 05 2.01 0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*				1 Dokumen	0 Dokumen	33,000,000	-	-	(33,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2 13 05 2.01 0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*				-	3 Dokumen	-	-	43,400,000	43,400,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			84,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2 13 05 2.01 0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				1 Lembaga	1 Lembaga	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2 13 05 2.01 0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				-	68 Lembaga	-	-	50,000,000	50,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2 13 05 2.01 0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*				1 Laporan	1 Laporan	70,000,000	-	-	(70,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2 13 05 2.01 0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga*				1 Dokumen	2 Dokumen	286,000,000	100,000,000	540,000,000	254,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			314,600,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2.15.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Perhubungan**							**6,918,615,760**	**6,117,226,630**	**6,317,226,630**	**(601,389,130)**							**1,928,300,000**	**DINAS PERHUBUNGAN**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6,918,615,760**	**6,117,226,630**	**6,317,226,630**	**(601,389,130)**							**1,928,300,000**	**DINAS PERHUBUNGAN**
	2 15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**6,918,615,760**	**6,117,226,630**	**6,317,226,630**	**(601,389,130)**							**1,928,300,000**	**DINAS PERHUBUNGAN**
77.	**2 15 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI SAKIP OPD**				**B (60,90) Kategori (Nilai) B (60,90) Kategori (Nilai)**	**B (60,90) Kategori (Nilai)**	**4,633,219,780**	**4,854,284,880**	**5,054,284,880**	**421,065,100**					**ASN Dinas Perhubungan**		**1,654,300,000**	**DINAS PERHUBUNGAN**
		[Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***63.11***	***0***	***61.55***			***4,633,219,780***	***4,854,284,880***	***5,054,284,880***	***421,065,100***						***61.86***	***1,654,300,000***	***DINAS PERHUBUNGAN***
	2 15 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah***				***2 Dokumen***	***2 Dokumen***	***65,000,000***	***1,500,000***	***1,500,000***	***(63,500,000)***							***75,000,000***	***DINAS PERHUBUNGAN***
	2 15 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	65,000,000	1,500,000	1,500,000	(63,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			75,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***				***12 Bulan***	***12 Bulan***	***2,650,000,000***	***4,148,907,000***	***4,148,907,000***	***1,498,907,000***							-	***DINAS PERHUBUNGAN***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 15 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				14 Bulan Orang/bulan	14 Bulan Orang/bulan	2,650,000,000	4,148,907,000	4,148,907,000	1,498,907,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.04	***Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Administrasi pendapatan pada Perangkat Daerah***				***1 Dokumen***	***1 Dokumen***	***5,000,000***	-	-	***(5,000,000)***							-	***DINAS PERHUBUNGAN***
	2 15 01 2.04 0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***				***12 Bulan***	***12 Bulan***	***101,000,000***	-	-	***(101,000,000)***							-	***DINAS PERHUBUNGAN***
	2 15 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				1 Paket	1 Paket	51,000,000	-	-	(51,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				1 Orang	1 Orang	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***				***12 Bulan***	***12 Bulan***	***251,200,000***	***48,650,000***	***48,650,000***	***(202,550,000)***							***228,000,000***	***DINAS PERHUBUNGAN***
	2 15 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	30,000,000	2,500,000	2,500,000	(27,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			25,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	15,000,000	2,500,000	2,500,000	(12,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	35,000,000	8,650,000	8,650,000	(26,350,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			38,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	1,200,000	-	-	(1,200,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				50 Laporan	50 Laporan	150,000,000	35,000,000	35,000,000	(115,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 15 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***2 Unit***	***2 Unit***	***86,408,500***	-	-	***(86,408,500)***							-	***DINAS PERHUBUNGAN***
	2 15 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	26,408,500	-	-	(26,408,500)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				15 Unit	15 Unit	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***12 Bulan***	***12 Bulan***	***806,311,280***	***307,216,080***	***307,216,080***	***(499,095,200)***							***713,000,000***	***DINAS PERHUBUNGAN***
	2 15 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	500,000	500,000	(2,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			3,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	120,000,000	98,060,000	98,060,000	(21,940,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			130,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	683,311,280	208,656,080	208,656,080	(474,655,200)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			580,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***56 Unit***	***56 Unit***	***668,300,000***	***348,011,800***	***548,011,800***	***(120,288,200)***							***638,300,000***	***DINAS PERHUBUNGAN***
	2 15 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	33,300,000	17,500,000	17,500,000	(15,800,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			33,300,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				15 Unit	15 Unit	595,000,000	325,511,800	325,511,800	(269,488,200)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			590,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				10 Unit	10 Unit	10,000,000	5,000,000	5,000,000	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	30,000,000	-	200,000,000	170,000,000	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
78.	**2 15 02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Konektivitas Darat. Konektivitas Laut. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal.**				**0 62.50 2.28 Persen Persen Indeks**	**62.50 0 2.28 Persen Indeks Persen**	**2,285,395,980**	**1,262,941,750**	**1,262,941,750**	**(1,022,454,230)**					**Perusahaan Angkutan Umum Masyarakat Pengguna Terminal Masyarakat Penguna Jalan Masyarakat sebagai**		**274,000,000**	**DINAS PERHUBUNGAN**
		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat]	***Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal***	***2.28 75.00***	***0***	***2.28 62.50***			***2,285,395,980***	***1,262,941,750***	***1,262,941,750***	***(1,022,454,230)***						***2.28 62.50***	***274,000,000***	***DINAS PERHUBUNGAN***
	2 15 02 2.01	***Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota***	***Jumlah dokumen rencana induk jaringan LLAJ Kota***				***1 Dokumen***	***1 Dokumen***	***100,000,000***	-	-	***(100,000,000)***							-	***DINAS PERHUBUNGAN***
	2 15 02 2.01 0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	-	-	(100,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.02	***Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota***	***Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia***				***131 Unit***	***131 Unit***	***1,728,591,500***	***1,162,941,750***	***1,162,941,750***	***(565,649,750)***							-	***DINAS PERHUBUNGAN***
	2 15 02 2.02 0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun*				1 Unit	1 Unit	75,000,000	-	-	(75,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.02 0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia*				20 Unit	20 Unit	1,573,591,500	1,132,941,750	1,132,941,750	(440,649,750)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.02 0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	*Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara*				1 Unit	1 Unit	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.02 0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara*				15 Unit	15 Unit	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.03	***Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C***	***Jumlah terminal yang dikelola***				***2 Unit***	***2 Unit***	***100,000,000***	-	-	***(100,000,000)***							-	***DINAS PERHUBUNGAN***
	2 15 02 2.03 0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	*Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara*				1 Unit	1 Unit	100,000,000	-	-	(100,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.04	***Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir***	***Jumlah dokumen penerbitan izin penyelenggaran dan pembangunan fasilitas parkir***				***1 Dokumen***	***1 Dokumen***	***50,000,000***	-	-	***(50,000,000)***							-	***DINAS PERHUBUNGAN***
	2 15 02 2.04 0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	*Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.05	***Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor***	***Periode penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor***				***12 Bulan***	***12 Bulan***	***65,000,000***	-	-	***(65,000,000)***							-	***DINAS PERHUBUNGAN***
	2 15 02 2.05 0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia*				1 Unit	1 Unit	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 15 02 2.05 0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara*				1 Unit	1 Unit	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.05 0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	-	-	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.08	***Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan***	***Periode pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan***				***12 Bulan***	***12 Bulan***	***241,804,480***	***100,000,000***	***100,000,000***	***(141,804,480)***							***274,000,000***	***DINAS PERHUBUNGAN***
	2 15 02 2.08 0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	*Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum*				12 Laporan	12 Laporan	241,804,480	100,000,000	100,000,000	(141,804,480)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			274,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.16.2.21.0.00.03.0000	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**							**6,882,996,749**	**3,796,329,917**	**4,489,033,418**	**(2,393,963,331)**							**7,145,000,000**	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6,882,996,749**	**3,796,329,917**	**4,489,033,418**	**(2,393,963,331)**							**7,145,000,000**	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
	2 16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**6,792,996,749**	**3,796,329,917**	**4,489,033,418**	**(2,303,963,331)**							**7,145,000,000**	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
79.	**2 16 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**				**100 Persen B (61,02) Indeks B (61,02) Nilai**	**B (62,60) Nilai**	**3,332,996,749**	**2,671,229,917**	**2,674,395,417**	**(658,601,332)**					**Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe**		**3,195,000,000**	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
		[Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***62.00***	***0***	***61.00***			***3,332,996,749***	***2,671,229,917***	***2,674,395,417***	***(658,601,332)***						***61.02***	***3,195,000,000***	***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN***
	2 16 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah***				***7 Dokumen***	***7 Dokumen***	***57,000,000***	***1,500,000***	***15,500,000***	***(41,500,000)***							***14,000,000***	***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN***
	2 16 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				7 Dokumen	7 Dokumen	7,000,000	1,500,000	15,500,000	8,500,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			14,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 01 2.01 0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***				***1 laporan***	***1 laporan***	***2,265,133,709***	***2,350,768,000***	***2,350,768,000***	***85,634,291***							***2,500,000,000***	***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN***
	2 16 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				420 Orang/bulan	420 Orang/bulan	2,265,133,709	2,350,768,000	2,350,768,000	85,634,291	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			2,500,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 01 2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***				***1 Laporan***	***1 Laporan***	***50,000,000***	-	-	***(50,000,000)***							-	***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN***
	2 16 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				5 Orang	5 Orang	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia***				***1 Laporan***	***1 Laporan***	***219,480,000***	***53,545,437***	***56,012,437***	***(163,467,563)***							***280,000,000***	***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 16 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	39,480,000	7,000,000	8,767,000	(30,713,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			40,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	20,000,000	9,800,000	10,500,000	(9,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			25,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	10,000,000	4,245,437	4,245,437	(5,754,563)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			15,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				20 Laporan	20 Laporan	150,000,000	32,500,000	32,500,000	(117,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			200,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan***				***1 Laporan***	***1 Laporan***	***350,000,000***	-	-	***(350,000,000)***							-	***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN***
	2 16 01 2.07 0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	250,000,000	-	-	(250,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				3 Unit	3 Unit	100,000,000	-	-	(100,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***26 Laporan***	***26 Laporan***	***272,783,040***	***216,116,480***	***196,116,480***	***(76,666,560)***							***281,000,000***	***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN***
	2 16 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	1,700,000	1,700,000	(3,300,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			6,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	100,000,000	108,500,000	108,500,000	8,500,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			100,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	157,783,040	105,916,480	85,916,480	(71,866,560)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			175,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***7 Unit***	***7 Unit***	***118,600,000***	***49,300,000***	***55,998,500***	***(62,601,500)***							***120,000,000***	***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 16 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				2 Unit	2 Unit	33,600,000	17,800,000	19,800,000	(13,800,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan				35,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				1 Unit	1 Unit	25,000,000	13,250,000	15,948,500	(9,051,500)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			25,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				4 Unit	4 Unit	25,000,000	13,250,000	15,250,000	(9,750,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			30,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 01 2.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*				1 Unit	1 Unit	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				30 Unit	30 Unit	25,000,000	5,000,000	5,000,000	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			30,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
80.	**2 16 02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualtas Informas Publik Pemerintah Daerah(survei)**				**84,72 Persen**	**84,72 Persen**	**1,485,000,000**	**125,000,000**	**663,834,500**	**(821,165,500)**					**Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe, OPD dan Masyarakat**		**2,150,000,000**	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
		[Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah]	***Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)***	***85.08***	***0***	***84.63***			***1,485,000,000***	***125,000,000***	***663,834,500***	***(821,165,500)***						***84.72***	***2,150,000,000***	***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN***
	2 16 02 2.01	***Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***				***1 Laporan***	***1 Laporan***	***1,485,000,000***	***125,000,000***	***663,834,500***	***(821,165,500)***							***2,150,000,000***	***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN***
	2 16 02 2.01 0017	Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan*				30 Permohonan	30 Permohonan	100,000,000	25,000,000	21,834,500	(78,165,500)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			150,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 02 2.01 0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	*Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah*				5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	300,000,000	-	-	(300,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 02 2.01 0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis*				10 Media	10 Media	1,085,000,000	100,000,000	642,000,000	(443,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			2,000,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
81.	**2 16 03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Indeks SPBE**				**3,10 Indeks 3.10 Indeks**	**3,10 Indeks**	**1,975,000,000**	**1,000,100,000**	**1,150,803,501**	**(824,196,499)**					**Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dan OPD**		**1,800,000,000**	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
		[Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika]	***Indeks SPBE***	***3.30***	***0***	***3.00***			***1,975,000,000***	***1,000,100,000***	***1,150,803,501***	***(824,196,499)***						***3.10***	***1,800,000,000***	***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN***
	2 16 03 2.01	***Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***				***1 Dokumen***	***1 Dokumen***	***20,000,000***	-	-	***(20,000,000)***							-	***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 16 03 2.01 0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa*				2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 03 2.02	***Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Laporan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***				***1 Laporan***	***1 Laporan***	***1,955,000,000***	***1,000,100,000***	***1,150,803,501***	***(804,196,499)***							***1,800,000,000***	***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN***
	2 16 03 2.02 0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	*Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota*				34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	1,300,000,000	1,000,100,000	1,000,100,000	(299,900,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			1,500,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 03 2.02 0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	*Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional*				4 Layanan	4 Layanan	80,000,000	-	-	(80,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 03 2.02 0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	*Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE*				1 Aplikasi	1 Aplikasi	225,000,000	-	-	(225,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 03 2.02 0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	*Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	-	-	(300,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 03 2.02 0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	*Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah*				-	2 Dokumen	-	-	150,703,501	150,703,501	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			300,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 03 2.02 0039	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	*Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**90,000,000**	**-**	**-**	**(90,000,000)**							**-**	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
82.	**2 21 02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**				**1,01 Nilai**	**1,01 Nilai**	**90,000,000**	**-**	**-**	**(90,000,000)**					**Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dan OPD**		**-**	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
		[Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah]	***Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah***	***1.10***	***0***	***1.00***			***90,000,000***	***-***	***-***	***(90,000,000)***						***1.01***	***-***	***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN***
	2 21 02 2.01	***Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***				***1 Laporan***	***1 Laporan***	***90,000,000***	***-***	***-***	***(90,000,000)***							***-***	***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN***
	2 21 02 2.01 0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian*				34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	40,000,000	-	-	(40,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 21 02 2.01 0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	*Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian*				34 Dokumen	34 Dokumen	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.18.2.07.0.00.23.0000	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja**							**7,509,508,050**	**6,560,434,931**	**6,961,498,961**	**(548,009,089)**							**6,600,640,221**	**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7,509,508,050**	**6,560,434,931**	**6,961,498,961**	**(548,009,089)**							**6,600,640,221**	**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**
	2 07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**7,234,508,050**	**6,490,434,931**	**6,891,498,961**	**(343,009,089)**							**6,520,640,221**	**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**
83.	**2 07 03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya**				**86,49 Persen**	**86,49 Persen**	**903,872,000**	**155,293,011**	**480,064,011**	**(423,807,989)**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe**		-	**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**
		[Meningkatnya produktivitas tenaga kerja]	***Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya***	***88.10***	***0***	***85.71***			***903,872,000***	***155,293,011***	***480,064,011***	***(423,807,989)***						***86.49***	-	***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA***
	2 07 03 2.01	***Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi***	***Jumlah Pelaksanaan Pelatihan***				***2 Pelatihan***	***2 Pelatihan***	***883,872,000***	***155,293,011***	***480,064,011***	***(403,807,989)***							-	***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA***
	2 07 03 2.01 0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n*				40 Orang	75 Orang	868,872,000	155,293,011	480,064,011	(388,807,989)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 07 03 2.01 0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	*Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n*				15 Lembaga	15 Lembaga	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 07 03 2.02	***Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta***	***Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta***				***15 Lembaga***	***15 Lembaga***	***20,000,000***	-	-	***(20,000,000)***							-	***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA***
	2 07 03 2.02 0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina*				15 Lembaga	15 Lembaga	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
84.	**2 07 04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri**				**10,03 Persen**	**10,03 Persen**	**130,000,000**	-	-	**(130,000,000)**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe**		-	**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**
		[Meningkatnya penempatan tenaga kerja]	***Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri***	***13.36***	***0***	***10.00***			***130,000,000***	-	-	***(130,000,000)***						***10.03***	-	***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA***
	2 07 04 2.01	***Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Layanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota***				***40 Orang***	***40 Orang***	***40,000,000***	-	-	***(40,000,000)***							-	***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA***
	2 07 04 2.01 0002	Pelayanan antar Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL*				40 Orang	40 Orang	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 07 04 2.01 0005	Perluasan Kesempatan Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja*				20 Orang	20 Orang	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 07 04 2.02	***Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah izin LPTKS yang Diterbitkan***				***1 Lembaga***	***1 Lembaga***	***25,000,000***	-	-	***(25,000,000)***							-	***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA***
	2 07 04 2.02 0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	*Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku*				5 Lembaga	5 Lembaga	25,000,000	-	-	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 07 04 2.03	***Pengelolaan Informasi Pasar Kerja***	***Jumlah Data dan Informasi Pasar Kerja yang tersedia***				***1 Dokumen***	***1 Dokumen***	***65,000,000***	-	-	***(65,000,000)***							-	***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 07 04 2.03 0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	*Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)*				425 Orang	425 Orang	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 07 04 2.03 0003	Job Fair/Bursa Kerja	*Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja*				50 Orang	50 Orang	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
85.	**2 07 05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial**				**200 Orang**	**200 Orang**	**65,000,000**	**-**	**32,256,000**	**(32,744,000)**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe**		**35,000,000**	**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**
		[Meningkatnya pekerja yang terlindungi]	***Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial***	***450***	***0***	***200***			***65,000,000***	***-***	***32,256,000***	***(32,744,000)***						***200***	***35,000,000***	***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA***
	2 07 05 2.01	***Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Perusahaan yang menerapkan PP dan PKB***				***5 Perusahaan***	***5 Perusahaan***	***35,000,000***	***-***	***-***	***(35,000,000)***							***-***	***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA***
	2 07 05 2.01 0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	*Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online*				10 Perusahaan	10 Perusahaan	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 07 05 2.01 0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	*Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan*				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 07 05 2.02	***Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah penyelesaian kasus perselisihan hubungan Industrial***				***20 Kasus***	***20 Kasus***	***30,000,000***	***-***	***32,256,000***	***2,256,000***							***35,000,000***	***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA***
	2 07 05 2.02 0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan*				15 Perkara	15 Perkara	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 07 05 2.02 0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	*Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja*				-	160 Orang	-	-	32,256,000	32,256,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			35,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
86.	**2 18 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI SAKIP OPD**				**B / 68,22 Predikat/nilai**	**B / 68,95 Predikat/nilai**	**6,135,636,050**	**6,335,141,920**	**6,379,178,950**	**243,542,900**					**DPMPTSPTK**		**6,485,640,221**	**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**
	2 18 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah***				***5 Dokumen***	***5 Dokumen***	***20,000,000***	***1,500,000***	***1,500,000***	***(18,500,000)***							***22,000,000***	***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA***
	2 18 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	20,000,000	1,500,000	1,500,000	(18,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			22,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 18 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Pada DPMPTSPTK***				***12 Laporan***	***12 Laporan***	***5,202,580,926***	***5,848,816,000***	***5,848,816,000***	***646,235,074***							***5,488,674,301***	***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA***
	2 18 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				696 Orang/bulan	696 Orang/bulan	5,202,580,926	5,848,816,000	5,848,816,000	646,235,074	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			5,488,674,301	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 18 01 2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***				***1 Dokumen***	***1 Dokumen***	***16,000,000***	-	-	***(16,000,000)***							-	***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA***
	2 18 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				5 Orang	5 Orang	16,000,000	-	-	(16,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 18 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah***				***5 Dokumen***	***5 Dokumen***	***193,262,984***	***45,000,000***	***45,000,000***	***(148,262,984)***							***206,100,000***	***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA***
	2 18 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	61,122,984	17,500,000	17,500,000	(43,622,984)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			44,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 18 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	11,000,000	2,500,000	2,500,000	(8,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			12,100,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 18 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	40,000,000	5,000,000	5,000,000	(35,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			40,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 18 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	1,140,000	-	-	(1,140,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 18 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				120 Laporan	120 Laporan	80,000,000	20,000,000	20,000,000	(60,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			110,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 18 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***10 Unit***	***10 Unit***	***100,000,000***	-	***44,037,030***	***(55,962,970)***							-	***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA***
	2 18 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				10 Unit	1 Unit	100,000,000	-	44,037,030	(55,962,970)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 18 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***3 Dokumen***	***3 Dokumen***	***454,492,140***	***267,325,920***	***267,325,920***	***(187,166,220)***							***618,065,920***	***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA***
	2 18 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	500,000	500,000	(1,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			2,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 18 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	211,426,220	90,000,000	90,000,000	(121,426,220)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			231,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 18 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	241,065,920	176,825,920	176,825,920	(64,240,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			385,065,920	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 18 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***25 Unit***	***25 Unit***	***149,300,000***	***172,500,000***	***172,500,000***	***23,200,000***							***150,800,000***	***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA***
	2 18 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	33,300,000	17,500,000	17,500,000	(15,800,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			33,300,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 18 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				2 Unit	2 Unit	51,000,000	30,000,000	30,000,000	(21,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			51,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 18 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				20 Unit	20 Unit	15,000,000	5,000,000	5,000,000	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			16,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 18 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				2 Unit	1 Unit	50,000,000	120,000,000	120,000,000	70,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			50,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**275,000,000**	**70,000,000**	**70,000,000**	**(205,000,000)**							**80,000,000**	**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**
87.	**2 18 02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Realisasi Total terhadap Target Investasi**				**525 Milyar**	**98.08 Persen**	**15,000,000**	-	-	**(15,000,000)**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe**		-	**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**
		[Meningkatnya kemudahan berinvestasi]	***Realisasi Total terhadap Target Investasi***	***532000000000***	***0***	***500000000000***			***15,000,000***	-	-	***(15,000,000)***						***525000000000***	-	***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA***
	2 18 02 2.01	***Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Penetapan Kerjasama Kemitraan Dibidang Penanaman Modal***				***15 Kegiatan Usaha***	***15 Kegiatan Usaha***	***15,000,000***	-	-	***(15,000,000)***							-	***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA***
	2 18 02 2.01 0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	*Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*				5 Dokumen	5 Dokumen	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
88.	**2 18 03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi**				**5,0 Persen**	**5,0 Persen**	**30,000,000**	-	-	**(30,000,000)**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe**		-	**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**
		[Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal]	***Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi***	***4.2***	***0***	***5.3***			***30,000,000***	-	-	***(30,000,000)***						***5.0***	-	***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA***
	2 18 03 2.01	***Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal***				***2 Dokumen***	***2 Dokumen***	***30,000,000***	-	-	***(30,000,000)***							-	***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA***
	2 18 03 2.01 0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota*				4 Dokumen	4 Dokumen	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 18 03 2.01 0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
89.	**2 18 04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**				**95,32 Persen**	**95,32 Persen**	**120,000,000**	**45,000,000**	**45,000,000**	**(75,000,000)**					**DPMPTSPTK**		**47,000,000**	**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko]	***Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan***	***96.76***	***0***	***94.74***			***120,000,000***	***45,000,000***	***45,000,000***	***(75,000,000)***						***95.32***	***47,000,000***	***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA***
	2 18 04 2.01	***Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota***	***Jumlah Laporan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota***				***4 Laporan***	***4 Laporan***	***120,000,000***	***45,000,000***	***45,000,000***	***(75,000,000)***							***47,000,000***	***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA***
	2 18 04 2.01 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	*Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota*				6 Dokumen	6 Dokumen	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 18 04 2.01 0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*				450 Pelaku Usaha	450 Pelaku Usaha	25,000,000	20,000,000	20,000,000	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			25,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 18 04 2.01 0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*				200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	45,000,000	25,000,000	25,000,000	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			22,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 18 04 2.01 0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha*				320 Kegiatan Usaha	320 Kegiatan Usaha	40,000,000	-	-	(40,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
90.	**2 18 05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha**				**46,31 Persen**	**92,62 Persen**	**90,000,000**	**25,000,000**	**25,000,000**	**(65,000,000)**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe**		**33,000,000**	**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**
		[Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal]	***Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha***	***45.58***	***0***	***48.75***			***90,000,000***	***25,000,000***	***25,000,000***	***(65,000,000)***						***46.31***	***33,000,000***	***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA***
	2 18 05 2.01	***Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal***				***3 Laporan***	***3 Laporan***	***90,000,000***	***25,000,000***	***25,000,000***	***(65,000,000)***							***33,000,000***	***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA***
	2 18 05 2.01 0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	*Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya*				55 Kegiatan Usaha.	55 Kegiatan Usaha.	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 18 05 2.01 0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*				225 Pelaku Usaha	225 Pelaku Usaha	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2 18 05 2.01 0006	Pengawasan Penanaman Modal	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha*				220 Kegiatan Usaha	35 Kegiatan Usaha	30,000,000	25,000,000	25,000,000	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			33,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
91.	**2 18 06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**				**44,07 Persen**	**40,62 Persen**	**20,000,000**	**-**	**-**	**(20,000,000)**					**DPMPTSPTK**		**-**	**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**
		[Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal]	***Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal***	***44.30***	***0***	***44.02***			***20,000,000***	-	-	***(20,000,000)***						***44.07***	-	***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA***
	2 18 06 2.01	***Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Dokumen data dan informasi penanaman modal oleh masyarakat***				***6 Dokumen***	***6 Dokumen***	***20,000,000***	-	-	***(20,000,000)***							-	***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA***
	2 18 06 2.01 0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan*				6 Dokumen	6 Dokumen	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.19.3.26.0.00.02.0000	**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**							**6,861,431,789**	**4,508,716,240**	**4,793,988,400**	**(2,067,443,389)**							**9,181,220,968**	**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6,319,431,789**	**4,458,716,240**	**4,743,988,400**	**(1,575,443,389)**							**9,051,220,968**	**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
	2 19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**6,319,431,789**	**4,458,716,240**	**4,743,988,400**	**(1,575,443,389)**							**9,051,220,968**	**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
92.	**2 19 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**				**B/65,75 Predikat/Nilai**	**B/65,75 Predikat/Nilai**	**3,356,431,789**	**3,508,716,240**	**3,508,988,400**	**152,556,611**					**Disporapar Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan**		**3,536,220,968**	**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
	2 19 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***10 Unit***	***10 Unit***	***91,800,000***	***41,000,000***	***41,000,000***	***(50,800,000)***							***101,180,000***	***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 19 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	15,000,000	5,000,000	5,000,000	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			16,500,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		[Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***67.2***	***0***	***65.61***			***3,341,431,789***	***3,503,716,240***	***3,503,988,400***	***162,556,611***						***65.75***	***3,519,720,968***	***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA***
	2 19 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah***				***13 Dokumen***	***13 Dokumen***	***45,000,000***	***2,000,000***	***2,000,000***	***(43,000,000)***							***50,000,000***	***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA***
	2 19 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				13 Dokumen	13 Dokumen	45,000,000	2,000,000	2,000,000	(43,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			50,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan Administrasi Keuangan***				***14 Bulan***	***14 Bulan***	***2,821,902,147***	***3,266,230,000***	***3,266,230,000***	***444,327,853***							***3,005,393,104***	***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA***
	2 19 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	2,821,902,147	3,266,230,000	3,266,230,000	444,327,853	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			3,005,393,104	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah***				***5 Dokumen***	***5 Dokumen***	***106,140,000***	***37,500,000***	***37,500,000***	***(68,640,000)***							***115,500,000***	***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA***
	2 19 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				25 Paket	25 Paket	35,000,000	2,500,000	2,500,000	(32,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			38,500,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				20 Paket	20 Paket	5,000,000	2,500,000	2,500,000	(2,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			5,500,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				10 Paket	10 Paket	5,000,000	2,500,000	2,500,000	(2,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			5,500,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				12 Dokumen	12 Dokumen	1,140,000	-	-	(1,140,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				15 Laporan	15 Laporan	60,000,000	30,000,000	30,000,000	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			66,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***5 Unit***	***5 Unit***	***45,000,000***	-	-	***(45,000,000)***							-	***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA***
	2 19 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	45,000,000	-	-	(45,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***3 Kegiatan***	***3 Kegiatan***	***246,589,642***	***161,986,240***	***162,258,400***	***(84,331,242)***							***264,147,864***	***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA***
	2 19 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	500,000	500,000	(1,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			1,650,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	79,400,000	63,520,000	63,520,000	(15,880,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			87,340,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	165,689,642	97,966,240	98,238,400	(67,451,242)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			175,157,864	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***10 Unit***	***10 Unit***	***91,800,000***	***41,000,000***	***41,000,000***	***(50,800,000)***							***101,180,000***	***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA***
	2 19 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	33,300,000	17,500,000	17,500,000	(15,800,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			36,630,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 19 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				1 Unit	1 Unit	25,500,000	13,500,000	13,500,000	(12,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			28,050,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	18,000,000	5,000,000	5,000,000	(13,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			20,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
93.	**2 19 02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Rasio Wirausaha Pemuda**				**5 Persen**	**11,92 Persen 5 Persen**	**460,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**	**(410,000,000)**					**Pemuda dan Organisasi Kepemudaan (OKP) Kota Lhokseumawe Wirausaha muda dalam kota Lhokseumawe**		**-**	**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
	2 19 02 2.01	***Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota***	***Rasio jumlah Pemuda, Pemuda pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang terperdayakan dan berkembang***				***8 Persen***	***8 Persen***	***360,000,000***	***50,000,000***	***50,000,000***	***(310,000,000)***							***-***	***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA***
	2 19 02 2.01 0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	*Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	90,000,000	-	-	(90,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		[Meningkatnya daya saing kepemudaan]	***Rasio Wirausaha Pemuda***	***15***	***0***	***10***			***370,000,000***	***50,000,000***	***50,000,000***	***(320,000,000)***						***10***	***-***	***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA***
	2 19 02 2.01	***Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota***	***Rasio jumlah Pemuda, Pemuda pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang terperdayakan dan berkembang***				***8 Persen***	***8 Persen***	***360,000,000***	***50,000,000***	***50,000,000***	***(310,000,000)***							***-***	***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA***
	2 19 02 2.01 0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	*Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda*				50 Orang	50 Orang	85,000,000	-	-	(85,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 02 2.01 0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	*Jumlah yang menerima penghargaan pemuda*				5 Orang	5 Orang	100,000,000	50,000,000	50,000,000	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 02 2.01 0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	*Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda*				50 Orang	50 Orang	85,000,000	-	-	(85,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 02 2.02	***Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Kegiatan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan dan berkembang***				***2 Kegiatan***	***2 Kegiatan***	***100,000,000***	-	-	***(100,000,000)***							***-***	***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA***
	2 19 02 2.02 0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*				16 Organisasi	16 Organisasi	100,000,000	-	-	(100,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
94.	**2 19 03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Atlet yang berasal dari kab/Kota yang masuk Pelatda Propinsi Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas Presentase Atlet yang Masuk Pelatnas**				**1 persen 1 Persen**	**1 persen 1 Persen**	**2,253,000,000**	**900,000,000**	**1,185,000,000**	**(1,068,000,000)**					**Atlit Olahraga Kota Lhokseumawe Masyarakat Kota Lhokseumawe**		**5,515,000,000**	**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		[Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga]	***Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas***	***1***	***0***	***1***			***2,253,000,000***	***900,000,000***	***1,185,000,000***	***(1,068,000,000)***						***1***	***5,515,000,000***	***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA***
	2 19 03 2.01	***Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan yang difasilitasi Melalui Pengedaan Sarana dan Prasarana***				***8 Unit***	***8 Unit***	***50,000,000***	-	***85,000,000***	***35,000,000***							***1,365,000,000***	***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 19 03 2.01 0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	*Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia*				2 Unit	2 Unit	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing				-	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 03 2.01 0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	*Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia*				-	1 Unit	-	-	85,000,000	85,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			1,365,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 03 2.02	***Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Kejuaraan Olahraga pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***				***2 Kegiatan***	***2 Kegiatan***	***1,253,000,000***	***500,000,000***	***700,000,000***	***(553,000,000)***							***3,550,000,000***	***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA***
	2 19 03 2.02 0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	153,000,000	-	-	(153,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing				-	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 03 2.02 0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota*				-	4 Kegiatan	-	-	225,315,000	225,315,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			2,250,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 03 2.02 0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	*Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota*				200 Orang	200 Orang	1,100,000,000	500,000,000	474,685,000	(625,315,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing				1,300,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 03 2.03	***Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi***	***Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi***				***90 Orang***	***90 Orang***	***200,000,000***	-	-	***(200,000,000)***							-	***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA***
	2 19 03 2.03 0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	*Jumlah penerima Penghargaan olahraga*				50 Orang	50 Orang	200,000,000	-	-	(200,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing				-	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 03 2.04	***Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga***	***Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina dan dikembangkan tingkat kabupaten/kota***				***1 Organisasi***	***1 Organisasi***	***700,000,000***	***400,000,000***	***400,000,000***	***(300,000,000)***							***600,000,000***	***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA***
	2 19 03 2.04 0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	700,000,000	400,000,000	400,000,000	(300,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing				600,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2 19 03 2.05	***Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi***	***Jumlah Olahraga Rekreasi yang dibina dan dikembangkan tingkat kabupaten/kota***				***1 Lembaga***	***1 Lembaga***	***50,000,000***	-	-	***(50,000,000)***							-	***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA***
	2 19 03 2.05 0010	Pemasaalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	*Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi*				1 Lembaga	1 Lembaga	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing				-	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
95.	**2 19 04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan**				**100 Persen**	**95 Persen**	**250,000,000**	-	-	**(250,000,000)**					**Gugus depan tingkat SMP dan SMA di Kota Lhokseumawe**		-	**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
	2 19 04 2.01	***Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan***	***Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan***				***5 Kegiatan***	***5 Kegiatan***	***250,000,000***	-	-	***(250,000,000)***							-	***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA***
	2 19 04 2.01 0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan*				1 Unit	1 Unit	200,000,000	-	-	(200,000,000)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing				-	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	[Meningkatnya kualitas kepramukaan]	***Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan***	***100***	***0***	***95***			***50,000,000***	-	-	***(50,000,000)***						***95***	-	***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 19 04 2.01	***Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan***	***Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan***				***5 Kegiatan***	***5 Kegiatan***	***250,000,000***	-	-	***(250,000,000)***							-	***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA***
	2 19 04 2.01 0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	*Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan*				0 Organisasi	0 Organisasi	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**542,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**	**(492,000,000)**							**130,000,000**	**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
	3 26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**542,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**	**(492,000,000)**							**130,000,000**	**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
96.	**3 26 02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan**				**2 Persen**	**2 Persen**	**240,000,000**	-	-	**(240,000,000)**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe**		-	**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		[Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata]	***Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan***	***6***	***0***	***1***			***240,000,000***	-	-	***(240,000,000)***						***2***	-	***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA***
	3 26 02 2.03	***Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota***	***Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota***				***3 Kegiatan***	***3 Kegiatan***	***240,000,000***	-	-	***(240,000,000)***							-	***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA***
	3 26 02 2.03 0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	90,000,000	-	-	(90,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3 26 02 2.03 0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	-	-	(100,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3 26 02 2.03 0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
97.	**3 26 03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata**				**50 Persen**	**50 Persen**	**267,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**	**(247,000,000)**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe**		**130,000,000**	**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		[Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata]	***Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata***	***94.12***	***0***	***0***			***267,000,000***	***20,000,000***	***20,000,000***	***(247,000,000)***						***50.00***	***130,000,000***	***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA***
	3 26 03 2.01	***Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota***	***Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota***				***3 Kegiatan***	***3 Kegiatan***	***267,000,000***	***20,000,000***	***20,000,000***	***(247,000,000)***							***130,000,000***	***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA***
	3 26 03 2.01 0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*				2 Dokumen	2 Dokumen	82,000,000	20,000,000	20,000,000	(62,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			130,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3 26 03 2.01 0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	160,000,000	-	-	(160,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3 26 03 2.01 0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*				4 Promosi	4 Promosi	25,000,000	-	-	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
98.	**3 26 05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi**				**25 Persen**	**25 Persen**	**35,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**	**(5,000,000)**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe**		-	**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		[Meningkatnya kapasitas SDM parwisata dan ekonomi kreatif]	***Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi***	***35.71***	***0***	***0***			***35,000,000***	***30,000,000***	***30,000,000***	***(5,000,000)***						***25***	-	***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA***
	3 26 05 2.01	***Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar***	***Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekraf yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata***				***25 Orang***	***25 Orang***	***35,000,000***	***30,000,000***	***30,000,000***	***(5,000,000)***							-	***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3 26 05 2.01 0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	*Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif*				20 Orang	20 Orang	35,000,000	30,000,000	30,000,000	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.22.0.00.0.00.05.0000	**Sekretariat Majelis Adat Aceh**							**1,980,376,406**	**1,692,691,920**	**1,692,691,920**	**(287,684,486)**							**1,735,803,046**	**SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1,980,376,406**	**1,692,691,920**	**1,692,691,920**	**(287,684,486)**							**1,735,803,046**	**SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH**
	2 22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**1,980,376,406**	**1,692,691,920**	**1,692,691,920**	**(287,684,486)**							**1,735,803,046**	**SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH**
99.	**2 22 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip OPD**				**100 Persen**	**B 62,15 Kategori/Nilai**	**1,754,771,286**	**1,612,691,920**	**1,612,691,920**	**(142,079,366)**					**Aparatur Sekretariat Majelis Adat Aceh kota Lhokseumawe Aparatur Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe**		**1,675,803,046**	**SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH**
	2 22 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan***				***5 Unit***	***5 Unit***	***26,858,000***	-	-	***(26,858,000)***							-	***SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH***
	2 22 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				6 Unit	6 Unit	26,858,000	-	-	(26,858,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
		[Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***60.75***	***0***	***60.75***			***1,727,913,286***	***1,612,691,920***	***1,612,691,920***	***(115,221,366)***						***60.75***	***1,675,803,046***	***SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH***
	2 22 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah***				***6 Dokumen***	***6 Dokumen***	***7,000,000***	***1,500,000***	***1,500,000***	***(5,500,000)***							***7,000,000***	***SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH***
	2 22 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				7 Dokumen	7 Dokumen	7,000,000	1,500,000	1,500,000	(5,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			7,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2 22 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN***				***12 Bulan***	***12 Bulan***	***1,184,023,286***	***1,194,342,000***	***1,194,342,000***	***10,318,714***							***1,185,753,286***	***SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH***
	2 22 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				294 Orang/bulan	294 Orang/bulan	1,184,023,286	1,194,342,000	1,194,342,000	10,318,714	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			1,185,753,286	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2 22 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan***				***6 Paket***	***6 Paket***	***62,390,000***	***26,500,000***	***33,500,000***	***(28,890,000)***							***21,400,000***	***SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH***
	2 22 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	10,000,000	2,500,000	7,000,000	(3,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			10,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2 22 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	6,250,000	2,500,000	5,000,000	(1,250,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			4,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2 22 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	5,000,000	1,500,000	1,500,000	(3,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			2,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2 22 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	1,140,000	-	-	(1,140,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2 22 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				10 Laporan	10 Laporan	40,000,000	20,000,000	20,000,000	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			5,400,000	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2 22 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan***				***134 Laporan***	***134 Laporan***	***395,300,000***	***357,649,920***	***341,800,000***	***(53,500,000)***							***400,849,760***	***SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 22 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	500,000	500,000	(500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			1,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2 22 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				134 Laporan	134 Laporan	394,300,000	357,149,920	341,300,000	(53,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			399,849,760	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2 22 01 2.09	***Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya***				***1 Unit***	***1 Unit***	***79,200,000***	***32,700,000***	***41,549,920***	***(37,650,080)***							***60,800,000***	***SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH***
	2 22 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	29,600,000	15,600,000	15,600,000	(14,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			33,200,000	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2 22 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				1 Unit	1 Unit	25,600,000	13,600,000	15,749,920	(9,850,080)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			25,600,000	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2 22 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	15,000,000	1,500,000	5,000,000	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2 22 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				10 Unit	10 Unit	9,000,000	2,000,000	5,200,000	(3,800,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			2,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
100.	**2 22 07**	**PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)**	**Indeks Adat Istiadat Aceh Indeks Adat Istiadat Aceh**				**100 persen**	**97,44 Nilai**	**225,605,120**	**80,000,000**	**80,000,000**	**(145,605,120)**					**Kemukiman dalam wilayah kota Lhokseumawe Kemukiman dalam wilayah Kota Lhokseumawe Masyarakat dan Tokoh Adat**		**60,000,000**	**SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH**
		[Meningkatnya peran Majelis Adat Aceh (MAA) untuk Fasilitasi sengketa adat]	***Persentase Fasilitasi sengketa adat***	***99.00***	***0***	***97.43***			***225,605,120***	***80,000,000***	***80,000,000***	***(145,605,120)***						***97.44***	***60,000,000***	***SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH***
	2 22 07 7.01	***Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat***	***Meningkatnya Jumlah Kaderisasi Adat Aceh***				***5 Jenis***	***5 Jenis***	***120,000,000***	***40,000,000***	***40,000,000***	***(80,000,000)***							***40,000,000***	***SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH***
	2 22 07 7.01 0001	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	*Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional*				1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	-	-	(40,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2 22 07 7.01 0003	Sosialisasi Adat Istiadat	*Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat*				50 Orang	50 Orang	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2 22 07 7.01 0003	Sosialisasi Adat Istiadat	*Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat*				-	50 Orang	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			20,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2 22 07 7.01 0006	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang	*Jumlah Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang Dipublikasikan*				10 0	10 0	30,000,000	20,000,000	20,000,000	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			20,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2 22 07 7.02	***Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat***	***Meningkatnya Jumlah penggunaan Hukum Kearifan Lokal***				***3 Jenis***	***3 Jenis***	***45,000,000***	***20,000,000***	***20,000,000***	***(25,000,000)***							***20,000,000***	***SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH***
	2 22 07 7.02 0001	Penguatan Peradilan Adat	*Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat*				30 Orang	30 Orang	25,000,000	20,000,000	20,000,000	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			20,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2 22 07 7.02 0004	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	*Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat*				50 Orang	50 Orang	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 22 07 7.03	***Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat***	***Meningkatnya Jumlah pemahaman Adat Istiadat***				***5 Jenis***	***5 Jenis***	***60,605,120***	***20,000,000***	***20,000,000***	***(40,605,120)***							***-***	***SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH***
	2 22 07 7.03 0004	Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat	*Jumlah Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan*				150 Eksemplar	150 Eksemplar	35,000,000	-	-	(35,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2 22 07 7.03 0007	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat	*Jumlah Pakaian dan Perlengkapan Adat*				25 Unit	25 Unit	25,605,120	20,000,000	20,000,000	(5,605,120)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.23.2.24.0.00.02.0000	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**							**3,537,957,649**	**4,065,662,197**	**4,065,662,197**	**527,704,548**							**6,645,750,000**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3,537,957,649**	**4,065,662,197**	**4,065,662,197**	**527,704,548**							**6,645,750,000**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	2 23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3,462,957,649**	**4,055,662,197**	**4,055,662,197**	**592,704,548**							**6,620,750,000**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
101.	**2 23 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**				**100 Persen**	**61,95 B Nilai/Predikat**	**3,317,957,649**	**3,555,662,197**	**3,555,662,197**	**237,704,548**					**Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe**		**6,548,750,000**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		[Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***60.81***	***0***	***60.76***			***3,317,957,649***	***3,555,662,197***	***3,555,662,197***	***237,704,548***						***60.77***	***6,548,750,000***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN***
	2 23 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***				***3 Dokumen/Laporan***	***9 Dokumen/Laporan***	***20,000,000***	***1,500,000***	***1,500,000***	***(18,500,000)***							***25,000,000***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN***
	2 23 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	9 Dokumen	20,000,000	1,500,000	1,500,000	(18,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			25,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***				***3 Dokumen***	***3 Dokumen***	***2,747,233,877***	***3,260,924,000***	***3,260,924,000***	***513,690,123***							***2,367,750,000***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN***
	2 23 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				336 Orang/bulan	336 Orang/bulan	2,747,233,877	3,260,924,000	3,260,924,000	513,690,123	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			2,367,750,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah***				***9 Dokumen***	***9 Dokumen***	***77,200,000***	***27,500,000***	***27,500,000***	***(49,700,000)***							***172,000,000***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN***
	2 23 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	25,000,000	2,500,000	2,500,000	(22,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			30,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	7,000,000	-	-	(7,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	10,000,000	2,500,000	2,500,000	(7,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			12,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	9,000,000	2,500,000	2,500,000	(6,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			10,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	1,200,000	-	-	(1,200,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				15 Laporan	15 Laporan	25,000,000	20,000,000	20,000,000	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			120,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***				***1 Unit***	***1 Unit***	***83,348,923***	***-***	***-***	***(83,348,923)***							***-***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN***
	2 23 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	83,348,923	-	-	(83,348,923)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Pada Perangkat Daerah***				***4 Dokumen***	***4 Dokumen***	***254,574,849***	***200,765,840***	***200,765,840***	***(53,809,009)***							***3,836,000,000***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 23 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	500,000	500,000	(2,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			3,500,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	150,407,649	121,000,000	121,000,000	(29,407,649)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			160,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	2,500,000	2,500,000	(12,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			16,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	86,167,200	76,765,840	76,765,840	(9,401,360)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			160,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***				***13 Unit***	***13 Unit***	***135,600,000***	***64,972,357***	***64,972,357***	***(70,627,643)***							***148,000,000***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN***
	2 23 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	33,700,000	17,700,000	17,700,000	(16,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			40,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				3 Unit	3 Unit	76,900,000	40,900,000	40,900,000	(36,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			78,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				10 Unit	10 Unit	25,000,000	6,372,357	6,372,357	(18,627,643)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			30,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
102.	**2 23 02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat**				**13.09 Persen**	**69.25 Nilai**	**140,000,000**	**480,000,000**	**480,000,000**	**340,000,000**					**Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat**		**67,000,000**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		[Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan]	***Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat***	***68.40***	***0***	***68.19***			***140,000,000***	***480,000,000***	***480,000,000***	***340,000,000***						***68.22***	***67,000,000***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN***
	2 23 02 2.01	***Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Dokumen Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***				***10 Dokumen***	***10 Dokumen***	***80,000,000***	***165,199,920***	***165,199,920***	***85,199,920***							***32,000,000***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN***
	2 23 02 2.01 0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	*Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan*				25 Perpustakaan	25 Perpustakaan	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.01 0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya*				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	15,000,000	45,199,920	45,199,920	30,199,920	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			16,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.01 0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi*				3 Layanan	3 Layanan	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.01 0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan*				15 Perpustakaan	15 Perpustakaan	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.01 0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				4 Orang	4 Orang	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 23 02 2.01 0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	*Jumlah Data dan informasi Perpustakaan*				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.01 0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan*				10 Eksemplar	10 Eksemplar	-	120,000,000	120,000,000	120,000,000	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			16,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.02	***Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Dokumen Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***				***4 Dokumen***	***4 Dokumen***	***60,000,000***	***314,800,080***	***314,800,080***	***254,800,080***							***35,000,000***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN***
	2 23 02 2.02 0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya*				6 Orang	6 Orang	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.02 0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	*Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan*				2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.02 0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota*				10 Orang	10 Orang	10,000,000	172,800,000	172,800,000	162,800,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			15,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.02 0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	*Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat*				80 Lokus	80 Lokus	15,000,000	142,000,080	142,000,080	127,000,080	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			20,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
103.	**2 23 03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Persentase koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang di miliki**				-	**100 Persen**	**5,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**	**15,000,000**							**5,000,000**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	2 23 03 2.01	***Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota yang Dilestarikan***				-	***1 Naskah***	***5,000,000***	***20,000,000***	***20,000,000***	***15,000,000***							***5,000,000***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN***
	2 23 03 2.01 0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	*Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan*				3 Eksemplar	3 Eksemplar	5,000,000	20,000,000	20,000,000	15,000,000	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**75,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**	**(65,000,000)**							**25,000,000**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
104.	**2 24 02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Tingkat Ketersediaan Arsip**				**17.54 Persen**	**52.21 Persen**	**75,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**	**(65,000,000)**					**OPD, Bagian Setdako dan Lembaga Kearsipan Kota Lhokseumawe**		**25,000,000**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		[Persentase Pengelolaan arsip sesuai standar]	***Tingkat Ketersediaan Arsip***	***64.71***	***0***	***51.10***			***75,000,000***	***10,000,000***	***10,000,000***	***(65,000,000)***						***52.21***	***25,000,000***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN***
	2 24 02 2.01	***Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Dokumen Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota***				***3 Dokumen***	***3 Dokumen***	***30,000,000***	***10,000,000***	***10,000,000***	***(20,000,000)***							***25,000,000***	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN***
	2 24 02 2.01 0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	*Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan*				1 Berkas	1 Berkas	15,000,000	10,000,000	10,000,000	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			25,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 02 2.01 0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	*Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan*				1 Berkas	1 Berkas	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 02 2.03	***Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota***	***Jumlah Dokumen Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota***				***2 Dokumen***	***2 Dokumen***	***45,000,000***	-	-	***(45,000,000)***							-	***DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 24 02 2.03 0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	*Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN*				1 Pengguna	1 Pengguna	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 02 2.03 0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	3.25.3.27.2.09.02.0000	**Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan**							**11,158,891,361**	**9,428,758,878**	**12,509,801,878**	**1,350,910,517**							**9,415,497,000**	**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9,422,868,789**	**8,654,684,000**	**9,193,233,000**	**(229,635,789)**							**8,365,497,000**	**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN**
	2 09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**9,422,868,789**	**8,654,684,000**	**9,193,233,000**	**(229,635,789)**							**8,365,497,000**	**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN**
105.	**2 09 03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor Pola Pangan Harapan**				**84.7 Persen**	**78,00 Aangka 84.7 Persen**	**40,000,000**	**10,000,000**	**10,960,000**	**(29,040,000)**							**20,000,000**	**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN**
	2 09 03 2.01	***Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan***	-				-	-	***20,000,000***	***10,000,000***	***10,960,000***	***(9,040,000)***							***20,000,000***	***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN***
	2 09 03 2.01 0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	*Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya*				2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	5,000,000	7,240,000	(2,760,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			20,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	2 09 03 2.01 0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga*				1 Keluarga	1 Keluarga	10,000,000	5,000,000	3,720,000	(6,280,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	2 09 03 2.04	***Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi***	-				-	-	***20,000,000***	-	-	***(20,000,000)***							-	***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN***
	2 09 03 2.04 0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	*Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun*				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	2 09 03 2.04 0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*				2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
106.	**2 09 04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**				**44.00 Persen**	**20,58 Persen**	**10,000,000**	**5,000,000**	**4,040,000**	**(5,960,000)**							**-**	**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN**
	2 09 04 2.01	***Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan***	***Jumlah Informasi Kerawanan Pangan yang Didata***				***1 Kali***	***1 Kali***	***10,000,000***	***5,000,000***	***4,040,000***	***(5,960,000)***							-	***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN***
	2 09 04 2.01 0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan*				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	5,000,000	4,040,000	(5,960,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
107.	**3 25 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**				**B/64.50 Katagori/Poin**	**B/64.50 Katagori/Poin**	**9,372,868,789**	**8,639,684,000**	**9,178,233,000**	**(194,635,789)**							**8,345,497,000**	**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN**
	3 25 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah***				***15 Dokumen***	***15 Dokumen***	***50,000,000***	***37,000,000***	***12,000,000***	***(38,000,000)***							***65,000,000***	***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN***
	3 25 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				15 Dokumen	15 Dokumen	50,000,000	37,000,000	12,000,000	(38,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			65,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3 25 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***				***12 Bulan***	***12 Bulan***	***8,179,868,789***	***8,041,984,000***	***8,041,984,000***	***(137,884,789)***							***7,000,000,000***	***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN***
	3 25 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				840 Orang/bulan	840 Orang/bulan	8,179,868,789	8,041,984,000	8,041,984,000	(137,884,789)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			7,000,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3 25 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***				***12 Bulan***	***12 Bulan***	***226,500,000***	***42,500,000***	***78,880,000***	***(147,620,000)***							***280,000,000***	***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN***
	3 25 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				80 Paket	80 Paket	25,000,000	2,500,000	7,880,000	(17,120,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			30,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3 25 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1150 Paket	1150 Paket	20,000,000	2,500,000	5,500,000	(14,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			25,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3 25 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				30 Paket	30 Paket	20,000,000	2,500,000	10,500,000	(9,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			25,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3 25 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				730 Dokumen	730 Dokumen	1,500,000	-	-	(1,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3 25 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	160,000,000	35,000,000	55,000,000	(105,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			200,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3 25 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***13 Unit***	***13 Unit***	***71,000,000***	-	***25,000,000***	***(46,000,000)***							***35,497,000***	***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN***
	3 25 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				3 Unit	3 Unit	71,000,000	-	-	(71,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3 25 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				-	2 Unit	-	-	25,000,000	25,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			35,497,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3 25 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***12 Bulan***	***12 Bulan***	***605,000,000***	***389,600,000***	***311,800,000***	***(293,200,000)***							***723,000,000***	***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN***
	3 25 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				30 Laporan	30 Laporan	2,500,000	500,000	500,000	(2,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			3,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3 25 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				84 Laporan	84 Laporan	205,000,000	166,000,000	103,000,000	(102,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			220,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3 25 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				708 Laporan	708 Laporan	397,500,000	223,100,000	208,300,000	(189,200,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			500,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3 25 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***45 Unit***	***45 Unit***	***240,500,000***	***128,600,000***	***708,569,000***	***468,069,000***							***242,000,000***	***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN***
	3 25 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				12 Unit	12 Unit	33,500,000	17,600,000	23,300,000	(10,200,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			35,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3 25 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				24 Unit	24 Unit	157,000,000	86,000,000	106,520,000	(50,480,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			160,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3 25 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	30,000,000	10,000,000	548,549,000	518,549,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			35,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3 25 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				8 Unit	8 Unit	20,000,000	15,000,000	30,200,000	10,200,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			12,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1,736,022,572**	**774,074,878**	**3,316,568,878**	**1,580,546,306**							**1,050,000,000**	**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN**
	3 25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**679,862,278**	**149,862,278**	**624,612,278**	**(55,250,000)**							**660,000,000**	**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN**
108.	**3 25 03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**				**14809.50 Ton**	**14809.50 Ton**	**529,862,278**	**114,862,278**	**114,862,278**	**(415,000,000)**							**515,000,000**	**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN**
	3 25 03 2.01	***Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota***	-				-	-	***10,000,000***	-	-	***(10,000,000)***							-	***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN***
	3 25 03 2.01 0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	*Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia*				12 Dokumen	12 Dokumen	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3 25 03 2.02	***Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Pemberdayaan Nelayan yang Terfasilitasi***				***11 Kelompok***	***11 Kelompok***	***509,862,278***	***104,862,278***	***104,862,278***	***(405,000,000)***							***500,000,000***	***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN***
	3 25 03 2.02 0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	*Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya*				200 Orang	200 Orang	499,862,278	79,862,278	79,862,278	(420,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			470,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3 25 03 2.02 0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	*Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya*				8 Kelompok	8 Kelompok	10,000,000	25,000,000	25,000,000	15,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			30,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3 25 03 2.04	***Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	-				-	-	***10,000,000***	***10,000,000***	***10,000,000***	-							***15,000,000***	***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3 25 03 2.04 0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	*Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan*				300 Rekomendasi	300 Rekomendasi	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			15,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
109.	**3 25 04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**				**2026.77 Kg**	**2026,77 Ton 2026.77 Ton**	**150,000,000**	**35,000,000**	**509,750,000**	**359,750,000**							**145,000,000**	**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN**
	3 25 04 2.02	***Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil***	-				-	-	***10,000,000***	***10,000,000***	***11,036,500***	***1,036,500***							***15,000,000***	***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN***
	3 25 04 2.02 0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas*				12 Kelompok	12 Kelompok	10,000,000	10,000,000	11,036,500	1,036,500	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			15,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3 25 04 2.04	***Pengelolaan Pembudidayaan Ikan***	-				-	-	***140,000,000***	***25,000,000***	***498,713,500***	***358,713,500***							***130,000,000***	***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN***
	3 25 04 2.04 0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				10 Dokumen	10 Dokumen	10,000,000	5,000,000	4,426,400	(5,573,600)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			10,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3 25 04 2.04 0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				1 Unit	1 Unit	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3 25 04 2.04 0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				177 Unit	177 Unit	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3 25 04 2.04 0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	*Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan*				2 Dokumen	2 Dokumen	110,000,000	20,000,000	494,287,100	384,287,100	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			120,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3 27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**1,056,160,294**	**624,212,600**	**2,691,956,600**	**1,635,796,306**							**390,000,000**	**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN**
110.	**3 27 02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Peningkatan Produksi Hortikultura Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Peningkatan Produksi Hortikultura Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Peningkatan Produksi Hortikultura Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Peningkatan Produksi**				**172415.25 20834.42 3.00 Ha/Ton Ha/Ton Persen 20834.42 172415.25 3.00 Ha/Ton Ha/Ton Persen 3.00 172415.25 20834.42 Persen Ha/Ton Ha/Ton 3.00 20834.42 172415.25 Persen Ha/Ton Ha/Ton**	**1,58 5,71 4,50 Persen Persen Persen 3.00 172415.25 20834.42 Persen Ha/Ton Ha/Ton 5,71 1,58 4,50 Persen Persen Persen 5,71 4,50 1,58 Persen Persen Persen**	**308,729,000**	**323,729,000**	**1,323,729,000**	**1,015,000,000**							**300,000,000**	**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN**
	3 27 02 2.01	***Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian***	-				-	-	***5,000,000***	***75,000,000***	***1,075,000,000***	***1,070,000,000***							***80,000,000***	***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN***
	3 27 02 2.01 0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*				5 Laporan	5 Laporan	-	75,000,000	1,075,000,000	1,075,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3 27 02 2.01 0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*				10 Laporan	10 Laporan	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3 27 02 2.02	***Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota***	-				-	-	***194,300,000***	***149,300,000***	***149,300,000***	***(45,000,000)***							***100,000,000***	***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN***
	3 27 02 2.02 0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman*				2 Dokumen	2 Dokumen	194,300,000	149,300,000	149,300,000	(45,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT	-	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			100,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3 27 02 2.05	***Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota***	-				-	-	***10,000,000***	-	-	***(10,000,000)***							-	***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN***
	3 27 02 2.05 0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	*Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak*				6 Dokumen	6 Dokumen	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3 27 02 2.06	***Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain***	-				-	-	***99,429,000***	***99,429,000***	***99,429,000***	-							***120,000,000***	***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN***
	3 27 02 2.06 0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain*				5130 Dosis	5130 Dosis	99,429,000	99,429,000	99,429,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT	-	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			120,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
111.	**3 27 03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Meniadi LP2B**				**179.85 Ha**	**179.85 Ha**	**280,000,000**	**20,000,000**	**1,120,000,000**	**840,000,000**							**25,000,000**	**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN**
	3 27 03 2.02	***Pembangunan Prasarana Pertanian***	-				-	-	***95,000,000***	-	-	***(95,000,000)***							-	***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN***
	3 27 03 2.02 0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	*Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*				1 Unit	1 Unit	95,000,000	-	-	(95,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3 27 03 2.03	***Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota***	-				-	-	***185,000,000***	***20,000,000***	***1,120,000,000***	***935,000,000***							***25,000,000***	***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN***
	3 27 03 2.03 0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	*Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan*				7 Laporan	7 Laporan	185,000,000	20,000,000	1,120,000,000	935,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			25,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
112.	**3 27 04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)**				**10000 43.75 Ekor Persen**	**43.75 100 Persen Persen**	**10,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**	-							**15,000,000**	**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN**
	3 27 04 2.03	***Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota***	-				-	-	***10,000,000***	***10,000,000***	***10,000,000***	-							***15,000,000***	***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN***
	3 27 04 2.03 0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	*Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner*				5 Laporan	5 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			15,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
113.	**3 27 05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian Persentase Penanganan Bencana Pertanian**				**90 20 Persen Persen**	**90 20 Persen Persen**	**10,000,000**	-	-	**(10,000,000)**							-	**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3 27 05 2.01	***Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota***	-				-	-	***10,000,000***	-	-	***(10,000,000)***							-	***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN***
	3 27 05 2.01 0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*				2 Ha	2 Ha	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
114.	**3 27 07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan**				**23.5 25.00 Persen Persen**	**23.5 25.00 Jumlah Persen**	**447,431,294**	**270,483,600**	**238,227,600**	**(209,203,694)**							**50,000,000**	**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN**
	3 27 07 2.01	***Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian***	-				-	-	***447,431,294***	***270,483,600***	***238,227,600***	***(209,203,694)***							***50,000,000***	***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN***
	3 27 07 2.01 0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				3 Unit	3 Unit	360,000,000	10,000,000	10,000,000	(350,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			15,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3 27 07 2.01 0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				3 Unit	3 Unit	82,431,294	260,483,600	228,227,600	145,796,306	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			35,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3 27 07 2.01 0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*				4 Unit	4 Unit	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana			-	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	3.31.3.30.2.17.12.0000	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**							**9,262,915,708**	**8,872,147,300**	**11,045,243,950**	**1,782,328,242**							**6,736,735,250**	**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5,614,512,553**	**5,005,873,000**	**5,655,849,650**	**41,337,097**							**5,570,735,250**	**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**
	2 17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**5,614,512,553**	**5,005,873,000**	**5,655,849,650**	**41,337,097**							**5,570,735,250**	**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**
115.	**2 17 03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**				**7.04 Persen**	**7.04 Persen**	**30,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**	**(27,000,000)**					**Koperasi**		**22,000,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**
	2 17 03 2.01	***Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota***	***Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan***				***15 Koperasi***	***15 Koperasi***	***30,000,000***	***3,000,000***	***3,000,000***	***(27,000,000)***							***22,000,000***	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	2 17 03 2.01 0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan*				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi]	***Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi***	***10.56***	***0***	***5.28***			***20,000,000***	***3,000,000***	***3,000,000***	***(17,000,000)***						***7.04***	***22,000,000***	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	2 17 03 2.01	***Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota***	***Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan***				***15 Koperasi***	***15 Koperasi***	***30,000,000***	***3,000,000***	***3,000,000***	***(27,000,000)***							***22,000,000***	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	2 17 03 2.01 0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	*Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi*				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	20,000,000	3,000,000	3,000,000	(17,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			22,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
116.	**2 17 04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi Aktif**				**7.27 Persen**	**40,29 Persen**	**10,000,000**	**3,000,000**	**8,000,000**	**(2,000,000)**					**Koperasi**		**12,000,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi]	***Persentase Koperasi Aktif***	***8.04***	***0***	***7.27***			***10,000,000***	***3,000,000***	***8,000,000***	***(2,000,000)***						***7.27***	***12,000,000***	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	2 17 04 2.01	***Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Koperasi yang mendapat Penilaian Sehat***				***15 Koperasi***	***15 Koperasi***	***10,000,000***	***3,000,000***	***8,000,000***	***(2,000,000)***							***12,000,000***	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	2 17 04 2.01 0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan*				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	10,000,000	3,000,000	8,000,000	(2,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			12,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
117.	**2 17 05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan**				**10.56 Persen**	**10.56 Persen**	**50,000,000**	**-**	**-**	**(50,000,000)**					**Pengurus Koperasi**		**-**	**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		[Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian]	***Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan***	***17.61***	***0***	***8.80***			***50,000,000***	-	-	***(50,000,000)***						***10.56***	-	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	2 17 05 2.01	***Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Pengurus Koperasi yang Mendapat Bekal Pelatihan SDM Perkoperasian***				***25 orang***	***25 orang***	***50,000,000***	-	-	***(50,000,000)***							-	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	2 17 05 2.01 0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian*				10 Orang	10 Orang	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
118.	**2 17 06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas**				**7,75 Persen**	**7,75 Persen**	**20,000,000**	**-**	**-**	**(20,000,000)**					**Pengurus Koperasi**		**-**	**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		[Meningkatnya produktivitas koperasi]	***Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas***	***10.56***	***0***	***7.04***			***20,000,000***	-	-	***(20,000,000)***						***7.75***	-	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	2 17 06 2.01	***Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Koperasi yang mendapat Fasilitasi/Pendampingan Usaha***				***20 Koperasi***	***20 Koperasi***	***20,000,000***	-	-	***(20,000,000)***							-	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	2 17 06 2.01 0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	*Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota*				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
119.	**2 17 07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Pertumbuhan Wirausaha Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (NIB)**				**1.57 Persen**	**10,53 1.57 Persen Persen**	**398,150,000**	**631,950,000**	**631,950,000**	**233,800,000**					**UMKM**		**170,500,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		[Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri]	***Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal*** ***Pertumbuhan Wirausaha***	***1.97*** ***1.99***	***0***	***1.44*** ***1.47***			***398,150,000***	***631,950,000***	***631,950,000***	***233,800,000***						***1.57***	***170,500,000***	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	2 17 07 2.01	***Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan***	***Jumlah UMKM yang Melakukan tranformasi usaha formal (NIB)***				***100 UMKM***	***100 UMKM***	***398,150,000***	***631,950,000***	***631,950,000***	***233,800,000***							***170,500,000***	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	2 17 07 2.01 0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro*				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	50,000,000	20,000,000	20,000,000	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			55,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2 17 07 2.01 0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro*				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	178,150,000	104,950,000	104,950,000	(73,200,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			5,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2 17 07 2.01 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	*Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro*				20 Orang	20 Orang	50,000,000	503,000,000	503,000,000	453,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			55,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 17 07 2.01 0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	*Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi*				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2 17 07 2.01 0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata*				500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	50,000,000	4,000,000	4,000,000	(46,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			55,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2 17 07 2.01 0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan*				25 Orang	25 Orang	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
120.	**2 17 08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor**				**2,24 Persen**	**2,24 Persen**	**70,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**	**(60,000,000)**					**Pelaku UMKM**		**60,000,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		[Meningkatnya daya saing UMKM]	***Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor***	***2.36***	***0***	***2.17***			***70,000,000***	***10,000,000***	***10,000,000***	***(60,000,000)***						***2.24***	***60,000,000***	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	2 17 08 2.01	***Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil***	***Jumlah UMKM yang difasilitasi***				***100 UMKM***	***100 UMKM***	***70,000,000***	***10,000,000***	***10,000,000***	***(60,000,000)***							***60,000,000***	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	2 17 08 2.01 0002	Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi*				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	50,000,000	10,000,000	10,000,000	(40,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			60,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2 17 08 2.01 0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	*Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi*				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
121.	**3 31 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Disperindagkop dan UKM**				**B (65.9) Predikat**	**B (65.9) Predikat**	**5,036,362,553**	**4,357,923,000**	**5,002,899,650**	**(33,462,903)**					**Disperindagkop dan UKM Kota Lhokseumawe Kendaraan Dinas Kantor pegawai Disperindagkop**		**5,306,235,250**	**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**
	3 31 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah***				***7 Dokumen***	***7 Dokumen***	***55,000,000***	***4,500,000***	***4,500,000***	***(50,500,000)***							***60,500,000***	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	3 31 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	55,000,000	4,500,000	4,500,000	(50,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			60,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3 31 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN***				***63 orang***	***63 orang***	***3,562,022,553***	***3,863,773,000***	***3,863,773,000***	***301,750,447***							***4,389,815,250***	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	3 31 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				59 Orang/bulan	59 Orang/bulan	3,562,022,553	3,863,773,000	3,863,773,000	301,750,447	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			4,389,815,250	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3 31 01 2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD***				***1 Dokumen***	***1 Dokumen***	***20,000,000***	-	-	***(20,000,000)***							-	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	3 31 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3 31 01 2.04	***Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Administrasi Pendapaan Daerah***				***1 Dokumen***	***1 Dokumen***	***10,000,000***	***2,000,000***	***92,000,000***	***82,000,000***							***12,000,000***	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	3 31 01 2.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	2,000,000	92,000,000	82,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			12,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3 31 01 2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Daerah***				***1 Laporan***	***1 Laporan***	***15,000,000***	-	-	***(15,000,000)***							-	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	3 31 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				2 Orang	2 Orang	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3 31 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah SPJ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah***				***1 Laporan***	***1 Laporan***	***167,140,000***	***42,500,000***	***42,500,000***	***(124,640,000)***							***177,000,000***	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	3 31 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				8 Paket	8 Paket	25,000,000	2,500,000	2,500,000	(22,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			27,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3 31 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	15,000,000	2,500,000	2,500,000	(12,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			17,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3 31 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	11,000,000	2,500,000	2,500,000	(8,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			13,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3 31 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	1,140,000	-	-	(1,140,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3 31 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	35,000,000	35,000,000	(65,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			120,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3 31 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3 31 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pengadaaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Jumlah Pengadaan Alat Modal Kantor***				***1 Unit 5 Unit***	***1 Unit 5 Unit***	***590,000,000***	-	***39,976,650***	***(550,023,350)***							-	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	3 31 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	300,000,000	-	-	(300,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3 31 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	40,000,000	-	-	(40,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3 31 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	200,000,000	-	-	(200,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3 31 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				4 Unit	4 Unit	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3 31 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				-	7 Unit	-	-	39,976,650	39,976,650	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Uteunkot	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3 31 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Pengadaan Alat Barang Jasa kegiatan kantor Jumlah Tenaga Pelayanan Pengelola Keuangan Yang Diberikan Honorarium***				***115 Unit 15 orang***	***115 Unit 15 orang***	***421,500,000***	***365,800,000***	***365,800,000***	***(55,700,000)***							***451,650,000***	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	3 31 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	500,000	500,000	(1,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			1,650,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3 31 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	220,000,000	194,000,000	194,000,000	(26,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			230,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3 31 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	171,300,000	171,300,000	(28,700,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			220,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3 31 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***30 Unit***	***30 Unit***	***195,700,000***	***79,350,000***	***594,350,000***	***398,650,000***							***215,270,000***	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	3 31 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	36,600,000	20,800,000	20,800,000	(15,800,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			40,260,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3 31 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				3 Unit	3 Unit	79,100,000	48,550,000	48,550,000	(30,550,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			87,010,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3 31 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	30,000,000	5,000,000	520,000,000	490,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			33,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3 31 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				15 Unit	15 Unit	50,000,000	5,000,000	5,000,000	(45,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			55,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**3,648,403,155**	**3,866,274,300**	**5,389,394,300**	**1,740,991,145**							**1,166,000,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**
	3 30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**3,375,000,000**	**3,750,274,300**	**3,623,394,300**	**248,394,300**							**950,000,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**
122.	**3 30 03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya**				**8 Persen**	**8 Persen**	**1,820,000,000**	**3,181,274,300**	**3,044,394,300**	**1,224,394,300**					**Pasar Tradisional yang Terdata dalam KIB Pedagang Pasar**		**250,000,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		[Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi]	***Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya***	***16.00***	***0***	***8.00***			***1,820,000,000***	***3,181,274,300***	***3,044,394,300***	***1,224,394,300***						***8.00***	***250,000,000***	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	3 30 03 2.01	***Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan***	***Jumlah Pasar yang direhab/Pemeliharaan***				***2 unit***	***2 unit***	***1,800,000,000***	***3,181,274,300***	***3,044,394,300***	***1,244,394,300***							***250,000,000***	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	3 30 03 2.01 0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan*				1 Unit	1 Unit	1,800,000,000	3,181,274,300	3,044,394,300	1,244,394,300	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			250,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3 30 03 2.02	***Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya***	***Jumlah Pedagang Pasar yang disosialisasikan terhadap ketertiban, kebersihan, serta kepatuhan terhadap pembayaran retribusi pasar***				***30 orang***	***30 orang***	***20,000,000***	-	-	***(20,000,000)***							-	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	3 30 03 2.02 0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan*				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
123.	**3 30 04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**				**60.01 Persen**	**60.01 Persen**	**1,070,000,000**	**506,000,000**	**506,000,000**	**(564,000,000)**					**9 Bahan Pokok dan Barang Penting**		**145,000,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		[Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting]	***Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting***	***60.55***	***0***	***59.98***			***1,070,000,000***	***506,000,000***	***506,000,000***	***(564,000,000)***						***60.01***	***145,000,000***	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	3 30 04 2.02	***Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota***	***Jumlah Laporan Harga 9 Bahan Pokok dan Barang Penting Jumlah Laporan Kegiatan Operasi Pasar Murah Yang Dilaksanakan***				***20 Laporan 52 Laporan***	***20 Laporan 52 Laporan***	***1,070,000,000***	***506,000,000***	***506,000,000***	***(564,000,000)***							***145,000,000***	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	3 30 04 2.02 0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	*Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan*				12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	2,000,000	2,000,000	(18,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			25,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3 30 04 2.02 0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*				10 Laporan	10 Laporan	1,050,000,000	504,000,000	504,000,000	(546,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			120,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
124.	**3 30 05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Nilai Ekspor Barang**				**0.1 Juta USD**	**38,92 Rp. Juta**	**415,000,000**	**60,000,000**	**60,000,000**	**(355,000,000)**					**Pedagang Pasar, Masyarakat Kota Lhokseumawe**		**500,000,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		[Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor]	***Nilai Ekspor Barang***	***0.30***	***0***	***0.1***			***415,000,000***	***60,000,000***	***60,000,000***	***(355,000,000)***						***0.1***	***500,000,000***	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	3 30 05 2.01	***Pengelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Event Pameran dagang dan promosi dagang yang dilkuti Laporan Promosi Produk Ekspor Kota Lhokseumawe***				***1 Laporan 8 Kegiatan/kali***	***1 Laporan 8 Kegiatan/kali***	***415,000,000***	***60,000,000***	***60,000,000***	***(355,000,000)***							***500,000,000***	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	3 30 05 2.01 0002	Pameran Dagang Nasional	*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang*				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	200,000,000	5,000,000	5,000,000	(195,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			250,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3 30 05 2.01 0003	Pameran Dagang Lokal	*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal*				30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	200,000,000	55,000,000	55,000,000	(145,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			250,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3 30 05 2.01 0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan*				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
125.	**3 30 06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen**				**71.35 Persen**	**71.35 Persen**	**70,000,000**	**3,000,000**	**13,000,000**	**(57,000,000)**					**Pedagang Pasar**		**55,000,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		[Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk]	***Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen***	***77.71***	***0***	***74.07***			***70,000,000***	***3,000,000***	***13,000,000***	***(57,000,000)***						***71.35***	***55,000,000***	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	3 30 06 2.01	***Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan***	***Jumlah Laporan Penanganan Pengaduan Konsumen Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan***				***1 Laporan 9 Kali***	***1 Laporan 9 Kali***	***70,000,000***	***3,000,000***	***13,000,000***	***(57,000,000)***							***55,000,000***	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	3 30 06 2.01 0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang*				50 Unit	50 Unit	40,000,000	3,000,000	13,000,000	(27,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			55,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3 30 06 2.01 0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	*Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina*				20 Orang	20 Orang	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3 30 06 2.01 0003	Penyidikan Metrologi Legal	*Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal*				2 Unit	2 Unit	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3 31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**273,403,155**	**116,000,000**	**1,766,000,000**	**1,492,596,845**							**216,000,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**
126.	**3 31 02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri**				**5.27 Persen**	**5.27 Persen**	**233,403,155**	**108,000,000**	**1,758,000,000**	**1,524,596,845**					**Pelaku IKM, masyarakat Kota Lhokseumawe, Disperindagkop Lhokseumawe**		**177,000,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		[Meningkatnya realisasi pembangunan industri]	***Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri***	***6.27***	***0***	***5.00***			***233,403,155***	***108,000,000***	***1,758,000,000***	***1,524,596,845***						***5.27***	***177,000,000***	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	3 31 02 2.01	***Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota***	***Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota Lhokseumawe Jumlah Laporan Kegiatan Peranan Masyarakat Terhadap IKM***				***1 Dokumen 1 Laporan***	***1 Dokumen 1 Laporan***	***233,403,155***	***108,000,000***	***1,758,000,000***	***1,524,596,845***							***177,000,000***	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	3 31 02 2.01 0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri*				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	-	-	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3 31 02 2.01 0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri*				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	4,000,000	1,254,000,000	1,229,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			30,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3 31 02 2.01 0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri*				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			-	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3 31 02 2.01 0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	108,403,155	100,000,000	500,000,000	391,596,845	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			120,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3 31 02 2.01 0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	*- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat dizwasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan*				2 Dokumen	2 Dokumen	25,000,000	4,000,000	4,000,000	(21,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			27,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
127.	**3 31 03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan**				**5 Persen**	**5 Persen**	**20,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**	**(16,000,000)**					**pelaku IKM**		**22,000,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		[Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri]	***Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan***	***5.65***	***0***	***5.00***			***20,000,000***	***4,000,000***	***4,000,000***	***(16,000,000)***						***5.00***	***22,000,000***	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3 31 03 2.01	***Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota***	***Jumlah IKM yang difasilitasi untuk penerbitan izin***				***20 IKM***	***20 IKM***	***20,000,000***	***4,000,000***	***4,000,000***	***(16,000,000)***							***22,000,000***	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	3 31 03 2.01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat*				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	4,000,000	4,000,000	(16,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			22,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
128.	**3 31 04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini**				**ada tersedia**	**91 Persen**	**20,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**	**(16,000,000)**					**pelaku IKM**		**17,000,000**	**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN MENENGAH**
		[Meningkatnya pemanfaatan informasi industri]	***Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini***	***100***	***100***	***100***			***20,000,000***	***4,000,000***	***4,000,000***	***(16,000,000)***						***100***	***17,000,000***	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	3 31 04 2.01	***Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota***	***Tersedia Data informasi terkait perizinan industri***				***1 Dokumen***	***1 Dokumen***	***20,000,000***	***4,000,000***	***4,000,000***	***(16,000,000)***							***17,000,000***	***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH***
	3 31 04 2.01 0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)*				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	4,000,000	4,000,000	(16,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			17,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	4.01.0.00.0.00.01.0000	**Sekretariat Daerah**							**30,226,287,931**	**27,211,181,840**	**30,962,422,934**	**736,135,003**							**33,620,105,000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**30,226,287,931**	**27,211,181,840**	**30,962,422,934**	**736,135,003**							**33,620,105,000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
	4 01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**30,226,287,931**	**27,211,181,840**	**30,962,422,934**	**736,135,003**							**33,620,105,000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
129.	**4 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kematangan Organisasi (KOD) Indeks Kematangan Organisasi (KOD) Nilai Sakip Sekretariat Daerah Nilai Sakip Sekretariat Daerah Nilai Sakip Sekretariat Daerah Indeks Kematangan Organisasi (KOD)**				**2,5% (± 1) B/64,50 Deviasi Inflasi Predikat/Nilai 29,50 2,5% (± 1) Nilai Deviasi Inflasi 29,50 B/64,50 Nilai Predikat/Nilai B/64,50 29,50 Predikat/Nilai Nilai B/64,50 Predikat/Nil**	**30 B/64,50 Nilai Level/Point 30 Nilai B/64,50 30 Level/Point Nilai B/64,50 Level/Point B/64,50 Predikat/Nilai**	**27,968,751,400**	**25,886,181,840**	**29,538,401,790**	**1,569,650,390**					**Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pegawai ASN dan PPPK di Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe Pemerintah Kota Lhokseumawe Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe**		**31,017,105,000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
		[Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***65.55***	***63.55***	***64.00***			***27,398,751,400***	***25,746,181,840***	***29,398,401,790***	***1,999,650,390***						***64.50***	***30,357,105,000***	***SEKRETARIAT DAERAH***
	4 01 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***				***6 Dokumen***	***6 Dokumen***	***21,500,000***	***1,500,000***	***1,500,000***	***(20,000,000)***							***25,000,000***	***SEKRETARIAT DAERAH***
	4 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				8 Dokumen	8 Dokumen	21,500,000	1,500,000	1,500,000	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			25,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***				***12 Laporan***	***12 Laporan***	***14,529,000,000***	***15,188,307,000***	***15,188,307,000***	***659,307,000***							***15,000,000,000***	***SEKRETARIAT DAERAH***
	4 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				4494 Orang/bulan	4494 Orang/bulan	14,529,000,000	15,188,307,000	15,188,307,000	659,307,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			15,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***				***2 Dokumen***	***2 Dokumen***	***125,000,000***	***125,000,000***	***125,000,000***	-							***235,000,000***	***SEKRETARIAT DAERAH***
	4 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				5 Paket	5 Paket	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				8 Orang	8 Orang	25,000,000	25,000,000	25,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			35,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah***				***6 Dokumen***	***6 Dokumen***	***5,370,000,000***	***4,320,000,000***	***4,680,040,000***	***(689,960,000)***							***5,519,000,000***	***SEKRETARIAT DAERAH***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	170,000,000	170,000,000	170,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			1,350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	80,000,000	80,000,000	80,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			153,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				3 Laporan	3 Laporan	320,000,000	320,000,000	630,040,000	310,040,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			416,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				100 Laporan	100 Laporan	3,000,000,000	1,950,000,000	2,000,000,000	(1,000,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			3,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***7 Unit***	***7 Unit***	***600,000,000***	***250,000,000***	***457,064,950***	***(142,935,050)***							***1,200,000,000***	***SEKRETARIAT DAERAH***
	4 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	150,000,000	-	-	(150,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			450,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				6 Unit	6 Unit	400,000,000	200,000,000	407,064,950	7,064,950	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			750,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***12 Laporan***	***12 Laporan***	***2,817,146,400***	***2,653,046,400***	***2,653,046,400***	***(164,100,000)***							***2,512,000,000***	***SEKRETARIAT DAERAH***
	4 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			12,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	700,000,000	700,000,000	700,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			850,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Laporan	2 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	2,057,146,400	1,893,046,400	1,893,046,400	(164,100,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			1,300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***5 Unit***	***5 Unit***	***2,052,000,000***	***1,959,223,440***	***4,894,338,440***	***2,842,338,440***							***3,550,000,000***	***SEKRETARIAT DAERAH***
	4 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				19 Unit	19 Unit	756,000,000	663,149,684	839,249,684	83,249,684	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			950,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				8 Unit	8 Unit	376,000,000	376,000,000	376,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				5 Unit	5 Unit	400,000,000	400,000,000	3,116,065,000	2,716,065,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			850,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				4 Unit	4 Unit	200,000,000	200,000,000	242,950,000	42,950,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				4 Unit	4 Unit	320,000,000	320,073,756	320,073,756	73,756	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			750,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.11	***Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***	***Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***				***12 Laporan***	***12 Laporan***	***649,105,000***	***649,105,000***	***749,105,000***	***100,000,000***							***719,105,000***	***SEKRETARIAT DAERAH***
	4 01 01 2.11 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	179,105,000	179,105,000	179,105,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			189,105,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.11 0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				2 Orang	4 Orang	70,000,000	70,000,000	170,000,000	100,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			80,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.11 0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			450,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.12	***Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah***	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah***				***3 Laporan***	***3 Laporan***	***300,000,000***	***300,000,000***	***300,000,000***	-							***347,000,000***	***SEKRETARIAT DAERAH***
	4 01 01 2.12 0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	130,000,000	130,000,000	130,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			135,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.12 0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			127,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.12 0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	70,000,000	70,000,000	70,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			85,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.14	***Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan***	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan***				***3 Laporan***	***3 Laporan***	***935,000,000***	***300,000,000***	***350,000,000***	***(585,000,000)***							***1,250,000,000***	***SEKRETARIAT DAERAH***
	4 01 01 2.14 0001	Fasilitasi Keprotokolan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan*				1 Laporan	1 Laporan	215,000,000	116,700,000	136,700,000	(78,300,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.14 0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan*				1 Laporan	1 Laporan	550,000,000	115,700,000	145,700,000	(404,300,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			750,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.14 0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	*Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan*				1 Laporan	1 Laporan	170,000,000	67,600,000	67,600,000	(102,400,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah]	***Indeks Kematangan Organisasi (KOD)***	***35.00***	***0.00***	***28.50***			***570,000,000***	***140,000,000***	***140,000,000***	***(430,000,000)***						***30.00***	***660,000,000***	***SEKRETARIAT DAERAH***
	4 01 01 2.13	***Penataan Organisasi***	***Jumlah Dokumen Penataan Organisasi***				***9 Dokumen***	***9 Dokumen***	***570,000,000***	***140,000,000***	***140,000,000***	***(430,000,000)***							***660,000,000***	***SEKRETARIAT DAERAH***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4 01 01 2.13 0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*				6 Dokumen	6 Dokumen	120,000,000	45,000,000	45,000,000	(75,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			160,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.13 0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*				7 Laporan	7 Laporan	285,000,000	50,000,000	50,000,000	(235,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.13 0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*				5 Dokumen	5 Dokumen	165,000,000	45,000,000	45,000,000	(120,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
130.	**4 01 02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan** **Efektivitas Kerjasama Daerah** **Persentase Produk Hukum Yang Dihasilkan** **Persentase Produk Hukum Yang Dihasilkan**				**100 Persen**	**100** **100 Persen** **Persen** **100 Persen**	**1,507,536,531**	**1,020,000,000**	**1,090,000,000**	**(417,536,531)**					**Pemerintah Kota Lhokseumawe**		**1,735,000,000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
		[Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat]	***Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat***	***100***	***100***	***100***			***472,536,531***	***640,000,000***	***640,000,000***	***167,463,469***						***100***	***475,000,000***	***SEKRETARIAT DAERAH***
	4 01 02 2.02	***Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat***	***Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat***				***3 Dokumen***	***3 Dokumen***	***472,536,531***	***640,000,000***	***640,000,000***	***167,463,469***							***475,000,000***	***SEKRETARIAT DAERAH***
	4 01 02 2.02 0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*				1 Dokumen	1 Dokumen	195,000,000	60,000,000	60,000,000	(135,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.02 0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB*				1 Dokumen	1 Dokumen	152,536,531	550,000,000	550,000,000	397,463,469	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.02 0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas*				6 Dokumen	6 Dokumen	125,000,000	30,000,000	30,000,000	(95,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			125,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah]	***Efektivitas Kerja Sama Daerah*** ***Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan***	***100***	***100***	***100***			***530,000,000***	***200,000,000***	***270,000,000***	***(260,000,000)***						***100***	***630,000,000***	***SEKRETARIAT DAERAH***
	4 01 02 2.01	***Administrasi Tata Pemerintahan***	***Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan***				***8 Dokumen***	***3 Dokumen***	***530,000,000***	***200,000,000***	***270,000,000***	***(260,000,000)***							***630,000,000***	***SEKRETARIAT DAERAH***
	4 01 02 2.01 0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan*				3 Dokumen	3 Dokumen	210,000,000	97,400,000	97,400,000	(112,600,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			230,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.01 0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan*				4 Dokumen	4 Dokumen	110,000,000	55,150,000	55,150,000	(54,850,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.01 0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	210,000,000	47,450,000	117,450,000	(92,550,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan]	***Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan***	***100***	***100***	***100***			***505,000,000***	***180,000,000***	***180,000,000***	***(325,000,000)***						***100***	***630,000,000***	***SEKRETARIAT DAERAH***
	4 01 02 2.03	***Fasilitasi dan Koordinasi Hukum***	***Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum***				***25 Dokumen***	***25 Dokumen***	***505,000,000***	***180,000,000***	***180,000,000***	***(325,000,000)***							***630,000,000***	***SEKRETARIAT DAERAH***
	4 01 02 2.03 0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun*				6 Dokumen	6 Dokumen	180,000,000	57,137,500	57,137,500	(122,862,500)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			230,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.03 0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum*				16 Kasus	16 Kasus	260,000,000	90,206,500	90,206,500	(169,793,500)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4 01 02 2.03 0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	*Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi*				70 Dokumen	70 Dokumen	65,000,000	32,656,000	32,656,000	(32,344,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
131.	**4 01 03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan Tingkat Kematangan UKPBJ**				**100 3 2,5% (± 1) Persen Level Deviasi Inflasi 3 100 2,5% (± 1) Level Persen Deviasi Inflasi 3 2,5% (± 1) 100 Level Deviasi Inflasi**	**100 100 Persen Persen 100 Persen 9,15 Nilai**	**750,000,000**	**305,000,000**	**334,021,144**	**(415,978,856)**					**Pemerintah Kota Lhokseumawe**		**868,000,000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
		[Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan]	***Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan***	***100***	***100***	***100***			***220,000,000***	***90,000,000***	***90,000,000***	***(130,000,000)***						***100***	***255,000,000***	***SEKRETARIAT DAERAH***
	4 01 03 2.02	***Pelaksanaan Administrasi Pembangunan***	***Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan***				***42 Dokumen***	***3 Dokumen***	***220,000,000***	***90,000,000***	***90,000,000***	***(130,000,000)***							***255,000,000***	***SEKRETARIAT DAERAH***
	4 01 03 2.02 0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	35,000,000	17,500,000	17,500,000	(17,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			45,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.02 0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan*				4 Laporan	4 Laporan	100,000,000	35,000,000	35,000,000	(65,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			110,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.02 0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan*				12 Laporan	12 Laporan	85,000,000	37,500,000	37,500,000	(47,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan]	***Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan***	***100***	***100***	***100***			***300,000,000***	***115,000,000***	***144,021,144***	***(155,978,856)***						***100***	***373,000,000***	***SEKRETARIAT DAERAH***
	4 01 03 2.01	***Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian***	***Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian***				***11 Dokumen***	***11 Dokumen***	***300,000,000***	***115,000,000***	***144,021,144***	***(155,978,856)***							***373,000,000***	***SEKRETARIAT DAERAH***
	4 01 03 2.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD*				4 Dokumen	4 Dokumen	140,000,000	55,000,000	72,874,009	(67,125,991)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			170,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.01 0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*				5 Laporan	5 Laporan	110,000,000	40,000,000	48,747,135	(61,252,865)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.01 0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil*				2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	20,000,000	22,400,000	(27,600,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			53,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa]	***Tingkat Kematangan UKPBJ***	***3***	***2***	***3***			***230,000,000***	***100,000,000***	***100,000,000***	***(130,000,000)***						***3***	***240,000,000***	***SEKRETARIAT DAERAH***
	4 01 03 2.03	***Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa***	***Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa***				***8 Dokumen***	***8 Dokumen***	***230,000,000***	***100,000,000***	***100,000,000***	***(130,000,000)***							***240,000,000***	***SEKRETARIAT DAERAH***
	4 01 03 2.03 0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*				5 Dokumen	5 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			240,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.03 0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik*				5 Dokumen	5 Dokumen	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4 01 03 2.03 0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*				5 Orang	5 Orang	80,000,000	-	-	(80,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	SEKRETARIAT DAERAH
	4.02.0.00.0.00.02.0000	**Sekretariat DPRK**							**26,931,623,309**	**22,771,859,563**	**23,441,401,608**	**(3,490,221,701)**							**26,355,932,563**	**SEKRETARIAT DPRK**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**26,931,623,309**	**22,771,859,563**	**23,441,401,608**	**(3,490,221,701)**							**26,355,932,563**	**SEKRETARIAT DPRK**
	4 02	**SEKRETARIAT DPRD**							**26,931,623,309**	**22,771,859,563**	**23,441,401,608**	**(3,490,221,701)**							**26,355,932,563**	**SEKRETARIAT DPRK**
132.	**4 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**				**65,50 Poin**	**65,50 Poin**	**23,603,623,309**	**21,493,559,563**	**21,963,101,608**	**(1,640,521,701)**							**23,423,932,563**	**SEKRETARIAT DPRK**
		[Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***75.00***	***0***	***63.60***			***23,603,623,309***	***21,493,559,563***	***21,963,101,608***	***(1,640,521,701)***						***65.50***	***23,423,932,563***	***SEKRETARIAT DPRK***
	4 02 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	-				-	-	***10,000,000***	***500,000***	***500,000***	***(9,500,000)***							***11,000,000***	***SEKRETARIAT DPRK***
	4 02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	10,000,000	500,000	500,000	(9,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			11,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	-				-	-	***7,913,800,746***	***7,694,597,000***	***7,694,597,000***	***(219,203,746)***							***7,000,000,000***	***SEKRETARIAT DPRK***
	4 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				756 Orang/bulan	756 Orang/bulan	7,913,800,746	7,694,597,000	7,694,597,000	(219,203,746)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			7,000,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	-				-	-	***592,640,000***	***140,500,000***	***140,500,000***	***(452,140,000)***							***512,000,000***	***SEKRETARIAT DPRK***
	4 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				20 Paket	20 Paket	15,000,000	500,000	500,000	(14,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			16,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				20 Paket	20 Paket	88,000,000	16,500,000	16,500,000	(71,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			89,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	8,000,000	500,000	500,000	(7,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			9,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	230,000,000	17,500,000	17,500,000	(212,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			231,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				20 Paket	20 Paket	65,000,000	20,000,000	20,000,000	(45,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			66,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				12 Dokumen	12 Dokumen	86,640,000	500,000	500,000	(86,140,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	85,000,000	85,000,000	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			101,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	-				-	-	***25,000,000***	-	***319,542,045***	***294,542,045***							-	***SEKRETARIAT DPRK***
	4 02 01 2.07 0011	Penggadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	25,000,000	-	319,542,045	294,542,045	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	-				-	-	***1,470,159,563***	***1,115,659,563***	***1,115,659,563***	***(354,500,000)***							***1,674,159,563***	***SEKRETARIAT DPRK***
	4 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				5000 Laporan	5000 Laporan	5,000,000	350,000	350,000	(4,650,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			6,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	221,847,243	221,847,243	221,847,243	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			422,847,243	SEKRETARIAT DPRK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4 02 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Laporan	2 Laporan	15,000,000	500,000	500,000	(14,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			16,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	1,228,312,320	892,962,320	892,962,320	(335,350,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			1,229,312,320	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	-				-	-	***1,184,100,000***	***736,380,000***	***736,380,000***	***(447,720,000)***							***1,187,600,000***	***SEKRETARIAT DPRK***
	4 02 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				12 Unit	12 Unit	872,600,000	733,880,000	733,880,000	(138,720,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			873,600,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				6 Unit	6 Unit	76,500,000	1,500,000	1,500,000	(75,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			77,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	20,000,000	500,000	500,000	(19,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			21,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				6 Unit	6 Unit	215,000,000	500,000	500,000	(214,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			216,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 01 2.14	***Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan***	-				-	-	***1,005,000,000***	***1,500,000***	***1,500,000***	***(1,003,500,000)***							***1,658,000,000***	***SEKRETARIAT DPRK***
	4 02 01 2.14 0001	Fasilitasi Keprotokolan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan*				20 Laporan	20 Laporan	330,000,000	500,000	500,000	(329,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			481,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 01 2.14 0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan*				30 Laporan	30 Laporan	375,000,000	500,000	500,000	(374,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			626,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 01 2.14 0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	*Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan*				10 Laporan	10 Laporan	300,000,000	500,000	500,000	(299,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			551,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 01 2.15	***Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD***	-				-	-	***11,162,923,000***	***10,458,923,000***	***10,608,923,000***	***(554,000,000)***							***11,039,173,000***	***SEKRETARIAT DPRK***
	4 02 01 2.15 0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD*				300 Orang/Bulan	300 Orang/Bulan	10,771,673,000	10,192,673,000	10,192,673,000	(579,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			10,771,673,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 01 2.15 0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan*				25 Paket	25 Paket	266,250,000	266,250,000	266,250,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			267,500,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 01 2.15 0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD*				1 Orang	25 Orang	125,000,000	-	150,000,000	25,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 01 2.16	***Layanan Administrasi DPRD***	-				-	-	***240,000,000***	***1,345,500,000***	***1,345,500,000***	***1,105,500,000***							***342,000,000***	***SEKRETARIAT DPRK***
	4 02 01 2.16 0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD*				3 Laporan	3 Laporan	20,000,000	500,000	500,000	(19,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			21,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 01 2.16 0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*				1 Laporan	1 Laporan	220,000,000	1,345,000,000	1,345,000,000	1,125,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			321,000,000	SEKRETARIAT DPRK
133.	**4 02 02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Penetapan Perda APBD Tahun N** **Persentase Penetapan Ranperda Tahun N** **Ketetapan Penetapan Perda APBD Tahun N**				**100 Persen**	**100** **100** **Tepat** **Persen** **Persen** **Tepat/Tidak Tepat**	**3,328,000,000**	**1,278,300,000**	**1,478,300,000**	**(1,849,700,000)**							**2,932,000,000**	**SEKRETARIAT DPRK**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan]	***Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan***	*100*	*100*	*100*			***1,467,000,000***	***980,000,000***	***1,180,000,000***	***(287,000,000)***						*100*	***1,395,000,000***	***SEKRETARIAT DPRK***
	4 02 02 2.02	***Pembahasan Kebijakan Anggaran***	-				-	-	***245,000,000***	***22,500,000***	***222,500,000***	***(22,500,000)***							***250,000,000***	***SEKRETARIAT DPRK***
	4 02 02 2.02 0001	Pembahasan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS*				12 Dokumen	12 Dokumen	25,000,000	1,500,000	1,500,000	(23,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			26,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 02 2.02 0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*				12 Dokumen	12 Dokumen	25,000,000	2,500,000	2,500,000	(22,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			26,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 02 2.02 0003	Pembahasan APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD*				12 Dokumen	12 Dokumen	70,000,000	500,000	500,000	(69,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			71,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 02 2.02 0004	Pembahasan APBD Perubahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan*				12 Dokumen	12 Dokumen	25,000,000	2,500,000	2,500,000	(22,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			26,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 02 2.02 0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD*				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	15,500,000	215,500,000	115,500,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			101,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 02 2.03	***Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan***	-				-	-	***815,000,000***	***46,600,000***	***46,600,000***	***(768,400,000)***							***923,000,000***	***SEKRETARIAT DPRK***
	4 02 02 2.03 0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum*				10 Laporan	10 Laporan	150,000,000	7,250,000	7,250,000	(142,750,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			251,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 02 2.03 0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur*				20 Laporan	20 Laporan	270,000,000	7,250,000	7,250,000	(262,750,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			271,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 02 2.03 0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat*				10 Laporan	10 Laporan	210,000,000	7,250,000	7,250,000	(202,750,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			211,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 02 2.03 0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian*				1 Laporan	1 Laporan	120,000,000	7,250,000	7,250,000	(112,750,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			121,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 02 2.03 0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam*				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	1,000,000	1,000,000	(9,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			11,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 02 2.03 0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan*				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1,500,000	1,500,000	(8,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			11,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 02 2.03 0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran*				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	3,600,000	3,600,000	(16,400,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			21,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 02 2.03 0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	*Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	11,500,000	11,500,000	(13,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			26,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 02 2.05	***Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat***	-				-	-	***255,000,000***	***900,900,000***	***900,900,000***	***645,900,000***							***201,000,000***	***SEKRETARIAT DPRK***
	4 02 02 2.05 0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD*				2 Laporan	2 Laporan	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 02 2.05 0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	*Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	SEKRETARIAT DPRK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4 02 02 2.05 0003	Pelaksanaan Reses	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses*				12 Dokumen	12 Dokumen	200,000,000	900,900,000	900,900,000	700,900,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			201,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 02 2.06	***Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD***	-				-	-	***105,000,000***	-	-	***(105,000,000)***							-	***SEKRETARIAT DPRK***
	4 02 02 2.06 0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD*				1 Laporan	1 Laporan	105,000,000	-	-	(105,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 02 2.08	***Fasilitasi Tugas DPRD***	-				-	-	***47,000,000***	***10,000,000***	***10,000,000***	***(37,000,000)***							***21,000,000***	***SEKRETARIAT DPRK***
	4 02 02 2.08 0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	*Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun*				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 02 2.08 0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah*				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	10,000,000	10,000,000	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			21,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 02 2.08 0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD*				20 Dokumen	20 Dokumen	17,000,000	-	-	(17,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	SEKRETARIAT DPRK
		[Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan]	***Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N*** ***Persentase Penetapan Ranperda Tahun N***	***100***	***100***	***100***			***1,861,000,000***	***298,300,000***	***298,300,000***	***(1,562,700,000)***						***100***	***1,537,000,000***	***SEKRETARIAT DPRK***
	4 02 02 2.01	***Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD***	-				-	-	***275,000,000***	***51,500,000***	***51,500,000***	***(223,500,000)***							***201,000,000***	***SEKRETARIAT DPRK***
	4 02 02 2.01 0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 02 2.01 0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*				30 Dokumen	30 Dokumen	200,000,000	51,500,000	51,500,000	(148,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			201,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 02 2.01 0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	*Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan*				22 Dokumen	22 Dokumen	60,000,000	-	-	(60,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 02 2.04	***Peningkatan Kapasitas DPRD***	-				-	-	***1,436,000,000***	***246,300,000***	***246,300,000***	***(1,189,700,000)***							***1,235,000,000***	***SEKRETARIAT DPRK***
	4 02 02 2.04 0002	Pendalaman Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD*				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	-	-	(200,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 02 2.04 0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	*Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli*				12 Orang	12 Orang	150,000,000	60,500,000	60,500,000	(89,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			151,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 02 2.04 0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	*Jumlah Tenaga Ahli Fraksi*				12 Orang	12 Orang	181,000,000	60,500,000	60,500,000	(120,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			182,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 02 2.04 0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*				12 Dokumen	12 Dokumen	700,000,000	500,000	500,000	(699,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			701,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 02 2.04 0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	*Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD*				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 02 2.04 0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	*Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD*				12 Dokumen	12 Dokumen	200,000,000	124,800,000	124,800,000	(75,200,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			201,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 02 2.07	***Pembahasan Kerja Sama Daerah***	-				-	-	***150,000,000***	***500,000***	***500,000***	***(149,500,000)***							***101,000,000***	***SEKRETARIAT DPRK***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4 02 02 2.07 0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	SEKRETARIAT DPRK
	4 02 02 2.07 0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	*Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	500,000	500,000	(99,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			101,000,000	SEKRETARIAT DPRK
	5.01.5.05.0.00.03.0000	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**							**7,623,074,456**	**5,606,119,160**	**5,770,929,260**	**(1,852,145,196)**							**6,911,179,787**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7,623,074,456**	**5,606,119,160**	**5,770,929,260**	**(1,852,145,196)**							**6,911,179,787**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
	5 01	**PERENCANAAN**							**7,219,074,456**	**5,556,119,160**	**5,720,929,260**	**(1,498,145,196)**							**6,889,179,787**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
134.	**5 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**				**B (69,10) Predikat (Nilai)**	**B (69,10) Predikat (Nilai)**	**6,097,190,651**	**5,276,119,160**	**5,375,929,260**	**(721,261,391)**					**Aparatur Bappeda Bappeda Kota Lhokseumawe**		**5,805,933,348**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
		(Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah)	***Nilai SAKIP OPD***	***77.50***	***66.95***	***67.15***			***6,097,190,651***	***5,276,119,160***	***5,375,929,260***	***(721,261,391)***						***69.10***	***5,805,933,348***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***
	5 01 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah***				***9 Dokumen***	***9 Dokumen***	***13,700,000***	***2,000,000***	***2,000,000***	***(11,700,000)***							***15,070,000***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***
	5 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				9 Dokumen	9 Dokumen	13,700,000	2,000,000	2,000,000	(11,700,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			15,070,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Pada Bappeda***				***12 Laporan***	***12 Laporan***	***5,203,438,491***	***4,872,203,000***	***4,872,203,000***	***(331,235,491)***							***4,968,227,188***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***
	5 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				840 Orang/bulan	840 Orang/bulan	5,203,438,491	4,872,203,000	4,872,203,000	(331,235,491)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			4,968,227,188	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 01 2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***				***2 Dokumen***	***2 Dokumen***	***40,000,000***	-	-	***(40,000,000)***							-	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***
	5 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				42 Orang	42 Orang	40,000,000	-	-	(40,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah***				***5 Dokumen***	***5 Dokumen***	***185,140,000***	***72,500,000***	***82,500,000***	***(102,640,000)***							***196,900,000***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***
	5 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				80 Paket	80 Paket	35,000,000	17,500,000	22,500,000	(12,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			33,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1150 Paket	1150 Paket	24,000,000	2,500,000	2,500,000	(21,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			26,400,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				30 Paket	30 Paket	25,000,000	2,500,000	7,500,000	(17,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			27,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				730 Dokumen	730 Dokumen	1,140,000	-	-	(1,140,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				60 Laporan	60 Laporan	100,000,000	50,000,000	50,000,000	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			110,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***9 Unit***	***9 Unit***	***95,196,000***	-	***89,810,100***	***(5,385,900)***							***75,000,000***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***
	5 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	95,196,000	-	-	(95,196,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				-	5 Unit	-	-	89,810,100	89,810,100	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			75,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5 01 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***3 Dokumen***	***3 Dokumen***	***377,116,160***	***246,116,160***	***246,116,160***	***(131,000,000)***							***393,876,160***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***
	5 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				30 Laporan	30 Laporan	3,000,000	500,000	500,000	(2,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			3,300,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				84 Laporan	84 Laporan	164,600,000	133,600,000	133,600,000	(31,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			181,060,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				708 Laporan	708 Laporan	209,516,160	112,016,160	112,016,160	(97,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			209,516,160	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***13 Unit***	***13 Unit***	***182,600,000***	***83,300,000***	***83,300,000***	***(99,300,000)***							***156,860,000***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***
	5 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	49,600,000	26,300,000	26,300,000	(23,300,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			38,060,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				3 Unit	3 Unit	78,000,000	42,000,000	42,000,000	(36,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			85,800,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				8 Unit	8 Unit	35,000,000	15,000,000	15,000,000	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			33,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
135.	**5 01 02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD.**				**100 100 Persen Persen**	**100 100 Persen Persen**	**628,331,095**	**130,000,000**	**158,000,000**	**(470,331,095)**					**Pemerintah Kota Lhokseumawe**		**550,000,000**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
		[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah]	***Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD***	***100***	***100***	***100***			***628,331,095***	***130,000,000***	***158,000,000***	***(470,331,095)***						***100***	***550,000,000***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***
	5 01 02 2.01	***Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan***	***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Daerah***				***2 Dokumen 7 Dokumen***	***2 Dokumen***	***406,197,905***	***110,000,000***	***138,000,000***	***(268,197,905)***							***445,500,000***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***
	5 01 02 2.01 0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)*				2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 02 2.01 0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	*Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	25,000,000	-	-	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 02 2.01 0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	*Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik*				1 Berita Acara	1 Berita Acara	55,000,000	6,113,600	5,363,600	(49,636,400)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			60,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 02 2.01 0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah*				12 Berita Acara	12 Berita Acara	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 02 2.01 0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota*				1 Berita Acara	1 Berita Acara	56,780,105	8,725,200	7,375,200	(49,404,905)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			165,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 02 2.01 0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	*Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan*				204 Usulan	204 Usulan	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5 01 02 2.01 0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)*				2 Dokumen	2 Dokumen	229,417,800	95,161,200	125,261,200	(104,156,600)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			220,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 02 2.03	***Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***	***Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah***				***2 Dokumen***	***2 Dokumen***	***180,639,290***	***20,000,000***	***20,000,000***	***(160,639,290)***							***104,500,000***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***
	5 01 02 2.03 0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan*				2 Laporan	2 Laporan	145,639,290	10,000,000	10,000,000	(135,639,290)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			66,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 02 2.03 0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah*				2 Laporan	1 Laporan	35,000,000	10,000,000	10,000,000	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			38,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 02 2.04	***Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah***	***Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah***				***3 Dokumen***	***3 Dokumen***	***41,493,900***	-	-	***(41,493,900)***							-	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***
	5 01 02 2.04 0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	41,493,900	-	-	(41,493,900)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
136.	**5 01 03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.**				**100 100 100 Persen Persen Persen**	**100 100 100 persen persen Persen**	**493,552,710**	**150,000,000**	**187,000,000**	**(306,552,710)**					**Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe**		**533,246,439**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
		[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan]	***Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan***	***100***	***100***	***100***			***155,769,490***	***50,000,000***	***57,000,000***	***(98,769,490)***						***100***	***138,346,439***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***
	5 01 03 2.03	***Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan***	***Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan***				***21 Dokumen***	***21 Dokumen***	***155,769,490***	***50,000,000***	***57,000,000***	***(98,769,490)***							***138,346,439***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***
	5 01 03 2.03 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 03 2.03 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*				5 Laporan	1 Laporan	10,000,000	5,000,000	5,000,000	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			11,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 03 2.03 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*				4 Laporan	1 Laporan	32,800,000	5,000,000	5,000,000	(27,800,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			36,080,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 03 2.03 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur*				3 Laporan	1 Laporan	62,969,490	20,000,000	20,000,000	(42,969,490)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			69,266,439	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 03 2.03 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			11,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 03 2.03 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan*				3 Laporan	3 Laporan	10,000,000	10,000,000	17,000,000	7,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			11,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 03 2.03 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan*				3 Laporan	3 Laporan	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 03 2.03 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan*				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia]	***Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***	***100***	***100***	***100***			***159,283,220***	***50,000,000***	***75,000,000***	***(84,283,220)***						***100***	***223,300,000***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***
	5 01 03 2.01	***Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***	***Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***				***10 Dokumen***	***10 Dokumen***	***159,283,220***	***50,000,000***	***75,000,000***	***(84,283,220)***							***223,300,000***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***
	5 01 03 2.01 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	2,000,000	2,000,000	(8,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			11,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 03 2.01 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan*				1 Laporan	1 Laporan	6,500,000	2,000,000	2,000,000	(4,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			7,150,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 03 2.01 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan*				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	6,000,000	6,000,000	(4,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			11,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 03 2.01 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan*				1 Laporan	1 Laporan	19,283,220	15,000,000	35,000,000	15,716,780	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			33,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 03 2.01 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*				2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	2,000,000	2,000,000	(18,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			22,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 03 2.01 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*				1 Laporan	1 Laporan	6,500,000	2,000,000	2,000,000	(4,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			7,150,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 03 2.01 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	6,000,000	6,000,000	(14,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			22,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 03 2.01 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia*				1 Laporan	1 Laporan	67,000,000	15,000,000	20,000,000	(47,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			110,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA]	***Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA***	***100***	***100***	***100***			***178,500,000***	***50,000,000***	***55,000,000***	***(123,500,000)***						***100***	***171,600,000***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***
	5 01 03 2.02	***Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)***	***Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)***				***9 Dokumen***	***9 Dokumen***	***178,500,000***	***50,000,000***	***55,000,000***	***(123,500,000)***							***171,600,000***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***
	5 01 03 2.02 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*				2 Dokumen	2 Dokumen	40,000,000	10,000,000	10,000,000	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			72,600,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 03 2.02 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	5,000,000	5,000,000	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			22,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 03 2.02 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	7,500,000	7,500,000	(12,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			22,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 03 2.02 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian*				1 Laporan	1 Laporan	53,500,000	20,000,000	25,000,000	(28,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			44,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 03 2.02 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 03 2.02 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA*				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5 01 03 2.02 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA*				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	7,500,000	7,500,000	(2,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			11,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 01 03 2.02 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA*				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**404,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**	**(354,000,000)**							**22,000,000**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
137.	**5 05 02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah.** **Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah.** **Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan.** **Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah.** **Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan** **Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah.** **Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian,**				**66.67 100 33.33 66.67 Persen Persen Persen 66.67 100 66.67 33.33 Persen Persen Persen 66.67 33.33 100 66.67 Persen Persen Persen**	**33.33 100 66.67 66.67 Persen Persen Persen 66.67 33.33 66.67 100 Persen Persen Persen 66.67 Persen**	**200,000,000**	**10,000,000**	**15,000,000**	**(185,000,000)**					**Pemerintah Kota Lhokseumawe Pemko Lhokseumawe**		**22,000,000**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
	5 05 02 2.03	***Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan***	***Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan***				***1 Dokumen***	***1 Dokumen***	***75,000,000***	-	-	***(75,000,000)***							-	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***
	5 05 02 2.03 0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan*				1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	-	-	(75,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		[Meningkatnya pemanfaatan hasil Kelitbangan dalam perencanaan pembangunan]	***Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah*** ***Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah*** ***Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah*** ***Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan***	***100 42.86 85.71***	***0 100***	***100 25.00 50.00***			***125,000,000***	***10,000,000***	***15,000,000***	***(110,000,000)***					***100 33.33 66.67***	***22,000,000***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***
	5 05 02 2.01	***Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan***	***Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan***				***4 Dokumen***	***1 Dokumen***	***50,000,000***	***10,000,000***	***15,000,000***	***(35,000,000)***							***22,000,000***	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***
	5 05 02 2.01 0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	*Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik*				3 Laporan	3 Laporan	50,000,000	10,000,000	15,000,000	(35,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			22,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 05 02 2.04	***Pengembangan Inovasi dan Teknologi***	***Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi***				***3 Dokumen***	***3 Dokumen***	***75,000,000***	-	-	***(75,000,000)***							-	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***
	5 05 02 2.04 0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif*				1 Laporan	1 Laporan	75,000,000	-	-	(75,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
138.	5 05 03	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	**Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah. Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan. Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan**				**100 76 Persen Persen 76 100 Persen Persen**	**100 76 Persen Persen 76.00 Persen**	**204,000,000**	**40,000,000**	**35,000,000**	**(169,000,000)**					**Pemerintah Kota Lhokseumawe**		**-**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
		[Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan]	***Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan***	***100 83.78***	***0 100***	***100 72.73***			***204,000,000***	***40,000,000***	***35,000,000***	***(169,000,000)***						***100 76.00***	**-**	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***
	5 05 03 2.01	***Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan***	***Jumlah Dokumen Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan***				***1 Dokumen***	***1 Dokumen***	***60,000,000***	-	-	***(60,000,000)***							**-**	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***
	5 05 03 2.01 0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	*Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan*				1 Pelatihan	1 Pelatihan	60,000,000	-	-	(60,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 05 03 2.02	***Invensi dan Inovasi***	***Jumlah Dokumen Invensi dan Inovasi***				***1 Dokumen***	***1 Dokumen***	***144,000,000***	***40,000,000***	***35,000,000***	***(109,000,000)***							**-**	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH***
	5 05 03 2.02 0003	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	*Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi*				1 Laporan	- Laporan	60,000,000	40,000,000	-	(60,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 05 03 2.02 0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	*Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi*				1 Laporan	1 Laporan	84,000,000	-	-	(84,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5 05 03 2.02 0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	*Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi*				-	1 Laporan	-	-	35,000,000	35,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.02.0.00.0.00.05.0000	**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**							**141,334,698,847**	**116,866,181,035**	**130,598,952,260**	**(10,735,746,587)**							**148,819,256,362**	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**141,334,698,847**	**116,866,181,035**	**130,598,952,260**	**(10,735,746,587)**							**148,819,256,362**	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**
	5 02	**KEUANGAN**							**141,334,698,847**	**116,866,181,035**	**130,598,952,260**	**(10,735,746,587)**							**148,819,256,362**	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**
139.	**5 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP BPKD Kota Lhokseumawe**				**B (65,00) Point**	**B (65,00) Point B (66,25) Point**	**15,803,548,613**	**13,698,599,735**	**16,061,736,617**	**258,188,004**					**Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe**		**14,016,954,613**	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**
	5 02 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah***				***12 Unit***	***6 Unit***	***695,000,000***	-	-	***(695,000,000)***							**-**	***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH***
	5 02 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				6 Unit	6 Unit	120,000,000	-	-	(120,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		[Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***67.00***	***64.85***	***64.95***			***15,683,548,613***	***13,698,599,735***	***16,061,736,617***	***378,188,004***						***65.00***	***14,016,954,613***	***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH***
	5 02 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***				***8 Dokumen***	***8 Dokumen***	***25,200,000***	***2,000,000***	***2,000,000***	***(23,200,000)***							***25,300,000***	***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH***
	5 02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				8 Dokumen	8 Dokumen	25,200,000	2,000,000	2,000,000	(23,200,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			25,300,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***				***100 %***	***14 Dokumen***	***12,754,300,000***	***12,597,657,882***	***14,636,196,764***	***1,881,896,764***							***11,800,000,000***	***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH***
	5 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	12,754,300,000	12,597,657,882	14,636,196,764	1,881,896,764	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			11,800,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***				***100 %***	***100 %***	***140,000,000***	-	-	***(140,000,000)***							**-**	***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH***
	5 02 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				1 Paket	1 Paket	120,000,000	-	-	(120,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5 02 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				5 Orang	5 Orang	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah***				***100 %***	***9 Dokumen***	***567,394,000***	***277,000,000***	***278,598,000***	***(288,796,000)***							***570,000,000***	***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH***
	5 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	15,000,000	2,000,000	2,000,000	(13,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			15,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	75,000,000	64,741,600	64,741,600	(10,258,400)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			75,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	80,000,000	40,000,000	40,000,000	(40,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			80,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	15,000,000	15,258,400	15,258,400	258,400	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			15,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				2 Dokumen	2 Dokumen	2,394,000	-	-	(2,394,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				4 Laporan	4 Laporan	170,000,000	50,000,000	51,598,000	(118,402,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			170,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*				4 Dokumen	2 Dokumen	210,000,000	105,000,000	105,000,000	(105,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			215,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah***				***12 Unit***	***6 Unit***	***695,000,000***	-	-	***(695,000,000)***							-	***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH***
	5 02 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	450,000,000	-	-	(450,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	125,000,000	-	-	(125,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***100 %***	***5 Laporan***	***1,434,654,613***	***642,221,853***	***642,221,853***	***(792,432,760)***							***1,434,654,613***	***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH***
	5 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	9,000,000	2,500,000	2,500,000	(6,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			9,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				2 Laporan	2 Laporan	440,500,000	284,241,853	284,241,853	(156,258,147)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			440,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				2 Laporan	2 Laporan	985,154,613	355,480,000	355,480,000	(629,674,613)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			985,154,613	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara***				***42 Unit***	***42 Unit***	***187,000,000***	***179,720,000***	***502,720,000***	***315,720,000***							***187,000,000***	***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH***
	5 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				8 Unit	8 Unit	45,000,000	134,720,000	134,720,000	89,720,000	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			45,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				2 Unit	2 Unit	100,000,000	25,000,000	348,000,000	248,000,000	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			100,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				30 Unit	30 Unit	21,000,000	15,000,000	15,000,000	(6,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			21,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				2 Unit	2 Unit	21,000,000	5,000,000	5,000,000	(16,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			21,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
140.	**5 02 02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Alokasi Belanja Insfrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Penurunan SILPA Persentase Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang di Alokasikan melalui TKD Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang di Alokasikan melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Insfrastruktur Pelayanan Publik Persentase Penurunan SILPA Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Insfrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang di Alokasikan melalui TKD**				**37,50 20,07 41,51 95,78 100,00 Persen Persen Persen Persen Persen 41,51 100,00 20,07 37,50 95,78 Persen Persen Persen Persen Persen 41,51 37,50 95,78 20,07 100,00 Persen Persen Persen Persen Persen 41,51 95,78 100,00**	**100,00 95,78 -37,50 20,07 41,51 Persen Persen Persen Persen Persen 100,00 95,78 41,51 20,07 -37,50 Persen Persen Persen Persen Persen 20,07 95,78 100,00 -37,50 41,51 Persen Persen Persen Persen Persen -37,50 100,00 20,07**	**122,863,061,434**	**102,327,581,300**	**113,691,607,143**	**(9,171,454,291)**					**Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe Desa/Gampong Dalam Lingkup Kota Lhokseumawe Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe**		**132,115,486,749**	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**
		[Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akutansi dan pelaporan]	***Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Penurunan SILPA Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar***	***100.00 16.67 21.17 40.85 97.87***	***100.00 38.50 40.00 65.88 96.60***	***100.00 19.86 36.68 41.58 98.75***			***122,863,061,434***	***102,327,581,300***	***113,691,607,143***	***(9,171,454,291)***						***100.00 20.07 37.50 41.51 95.78***	***132,115,486,749***	***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH***
	5 02 02 2.01	***Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah***	***Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah***				***17 Dokumen***	***17 Dokumen***	***2,756,698,434***	***642,000,000***	***642,000,000***	***(2,114,698,434)***							***2,575,834,223***	***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH***
	5 02 02 2.01 0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*				2 Dokumen	2 Dokumen	73,500,000	40,000,000	40,000,000	(33,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			81,033,750	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun*				2 Dokumen	2 Dokumen	73,500,000	40,000,000	40,000,000	(33,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			74,963,854	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.01 0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	48,120,000	-	-	(48,120,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.01 0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	48,185,934	-	-	(48,185,934)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.01 0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	*Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	48,120,000	-	-	(48,120,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5 02 02 2.01 0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	48,120,000	-	-	(48,120,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.01 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*				2 Dokumen	2 Dokumen	241,500,000	80,000,000	80,000,000	(161,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			242,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.01 0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*				2 Dokumen	2 Dokumen	241,500,000	70,000,000	70,000,000	(171,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			242,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.01 0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*				4 Dokumen	4 Dokumen	205,747,500	75,000,000	75,000,000	(130,747,500)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			206,836,619	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.01 0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*				44 Orang	44 Orang	1,728,405,000	337,000,000	337,000,000	(1,391,405,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			1,729,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.02	***Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah***	***Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah***				***283 Dokumen***	***283 Dokumen***	***870,000,000***	***200,000,000***	***200,000,000***	***(670,000,000)***							***975,000,000***	***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH***
	5 02 02 2.02 0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	35,000,000	7,389,000	7,389,000	(27,611,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			40,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.02 0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD*				170 Dokumen	170 Dokumen	200,000,000	5,044,800	5,044,800	(194,955,200)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			210,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.02 0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*				29 Dokumen	29 Dokumen	150,000,000	30,184,800	30,184,800	(119,815,200)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			170,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.02 0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*				4 Dokumen	4 Dokumen	35,000,000	3,581,100	3,581,100	(31,418,900)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			40,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	*Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)*				12 Laporan	12 Laporan	40,000,000	17,172,800	17,172,800	(22,827,200)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			55,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.02 0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait*				68 Dokumen	68 Dokumen	180,000,000	71,453,900	71,453,900	(108,546,100)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			200,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.02 0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	*Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan*				5 Dokumen	5 Dokumen	60,000,000	10,959,400	10,959,400	(49,040,600)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			70,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.02 0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*				272 Orang	272 Orang	170,000,000	54,214,200	54,214,200	(115,785,800)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			190,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03	***Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah***	***Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah***				***21 Dokumen***	***21 Dokumen***	***598,270,000***	***200,000,000***	***200,000,000***	***(398,270,000)***							***564,652,526***	***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH***
	5 02 02 2.03 0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah*				72 Laporan	72 Laporan	31,080,000	10,710,000	10,710,000	(20,370,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			34,265,700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5 02 02 2.03 0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban*				4 Dokumen	4 Dokumen	31,920,000	9,800,000	9,800,000	(22,120,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			35,191,800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*				4 Laporan	4 Laporan	52,920,000	10,810,000	10,810,000	(42,110,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			58,344,300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*				40 Laporan	40 Laporan	103,530,000	60,000,000	60,000,000	(43,530,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			114,141,825	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*				4 Dokumen	4 Dokumen	184,590,000	63,000,000	63,000,000	(121,590,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			203,510,475	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	*Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD*				1 Dokumen	1 Dokumen	59,850,000	-	-	(59,850,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	25,095,000	-	-	(25,095,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	*Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	28,035,000	9,200,000	9,200,000	(18,835,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			30,908,588	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	28,750,000	7,100,000	7,100,000	(21,650,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			30,408,588	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota*				140 Orang	140 Orang	52,500,000	29,380,000	29,380,000	(23,120,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			57,881,250	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.04	***Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah***	***Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan***				***272 Laporan***	***272 Laporan***	***118,638,093,000***	***101,285,581,300***	***112,649,607,143***	***(5,988,485,857)***							***128,000,000,000***	***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH***
	5 02 02 2.04 0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*				272 Laporan	272 Laporan	118,638,093,000	101,285,581,300	112,649,607,143	(5,988,485,857)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			128,000,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
141.	**5 02 03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap**				**2,74 Persen**	**2,74 Persen**	**1,288,000,000**	**380,000,000**	**385,608,500**	**(902,391,500)**					**Pemerintah Kota Lhokseumawe**		**1,256,000,000**	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**
		[Meningkatnya tata kelola aset daerah]	***Persentase Penambahan Nilai Aset tetap***	***2.20***	***1.58***	***2.49***			***1,288,000,000***	***380,000,000***	***385,608,500***	***(902,391,500)***						***2.74***	***1,256,000,000***	***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH***
	5 02 03 2.01	***Pengelolaan Barang Milik Daerah***	***Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah***				***10 Dokumen***	***10 Dokumen***	***1,288,000,000***	***380,000,000***	***385,608,500***	***(902,391,500)***							***1,256,000,000***	***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH***
	5 02 03 2.01 0001	Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang Disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	52,500,000	-	-	(52,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	*Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	62,500,000	15,500,000	15,500,000	(47,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			65,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	52,500,000	11,000,000	11,000,000	(41,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			55,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5 02 03 2.01 0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah*				5 Laporan	5 Laporan	230,000,000	175,484,500	181,093,000	(48,907,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			235,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	153,000,000	17,500,000	17,500,000	(135,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			156,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*				10 Laporan	10 Laporan	550,000,000	56,015,500	56,015,500	(493,984,500)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			550,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	52,500,000	8,500,000	8,500,000	(44,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			55,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*				34 Laporan	34 Laporan	62,500,000	21,000,000	21,000,000	(41,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			65,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun*				1 Laporan	1 Laporan	72,500,000	75,000,000	75,000,000	2,500,000	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			75,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
142.	**5 02 04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital**				**90,14 78,25 8,37 Persen Persen Persen**	**10,29 75,00 90,14 Persen Persen Persen**	**1,380,088,800**	**460,000,000**	**460,000,000**	**(920,088,800)**					**Masyarakat dan Para Pelaku Usaha**		**1,430,815,000**	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**
		[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	***Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital***	***100.00 10.19 91.41***	***100.00 90.31 9.78***	***100.00 8.25 90.31***			***1,380,088,800***	***460,000,000***	***460,000,000***	***(920,088,800)***						***75.00 8.37 90.14***	***1,430,815,000***	***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH***
	5 02 04 2.01	***Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah***	***Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah***				***70.39 Milyar***	***62598 Dokumen***	***1,380,088,800***	***460,000,000***	***460,000,000***	***(920,088,800)***							***1,430,815,000***	***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH***
	5 02 04 2.01 0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	27,049,999	27,049,999	(22,950,001)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			55,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah*				10 Laporan	10 Laporan	15,000,000	9,119,999	9,119,999	(5,880,001)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			20,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah*				5 Unit	5 Unit	332,438,800	54,018,279	54,018,279	(278,420,521)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			335,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*				10 Laporan	10 Laporan	200,000,000	48,167,999	48,167,999	(151,832,001)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			200,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah*				10 Laporan	10 Laporan	82,350,000	38,827,879	38,827,879	(43,522,121)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			85,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	*Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya*				5000 Obyek Pajak	61648 Obyek Pajak	60,000,000	25,239,999	25,239,999	(34,760,001)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			65,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah*				100 Dokumen	62068 Dokumen	100,000,000	17,633,999	17,633,999	(82,366,001)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			100,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5 02 04 2.01 0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	*Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi*				10 Dokumen	10 Dokumen	30,000,000	9,941,847	9,941,847	(20,058,153)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			35,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0011	Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*				500 Dokumen	500 Dokumen	189,000,000	115,130,700	115,130,700	(73,869,300)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			198,450,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	66,150,000	17,935,300	17,935,300	(48,214,700)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			69,457,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	189,000,000	42,940,000	42,940,000	(146,060,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			198,450,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.01 0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah*				6 Laporan	6 Laporan	66,150,000	53,994,000	53,994,000	(12,156,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			69,457,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.03.5.04.0.00.02.0000	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**							**8,042,769,906**	**5,430,838,000**	**6,059,648,000**	**(1,983,121,906)**							**8,439,075,894**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8,042,769,906**	**5,430,838,000**	**6,059,648,000**	**(1,983,121,906)**							**8,439,075,894**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
	5 03	**KEPEGAWAIAN**							**6,786,566,706**	**4,708,528,000**	**5,337,338,000**	**(1,449,228,706)**							**5,558,615,894**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
143.	**5 03 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nilai SAKIP OPD**				**B-63.5 Nilai/Kategori**	**B-63.5 Nilai/Kategori**	**5,113,082,183**	**4,418,528,000**	**4,497,338,000**	**(615,744,183)**					**Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe**		**5,425,615,894**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		[Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***67.2***	***62.75***	***62.75***			***5,113,082,183***	***4,418,528,000***	***4,497,338,000***	***(615,744,183)***						***63.5***	***5,425,615,894***	***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA***
	5 03 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***				***10 Dokumen***	***10 Dokumen***	***20,000,000***	***1,500,000***	***1,500,000***	***(18,500,000)***							***27,000,000***	***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA***
	5 03 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	20,000,000	1,500,000	1,500,000	(18,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			27,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***				***12 Bulan***	***2 Laporan***	***4,494,542,823***	***4,159,928,000***	***4,159,928,000***	***(334,614,823)***							***4,410,000,000***	***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA***
	5 03 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				97 Orang/bulan	97 Orang/bulan	4,494,542,823	4,159,928,000	4,159,928,000	(334,614,823)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			4,410,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***				***12 Bulan***	***12 Bulan***	***10,000,000***	-	-	***(10,000,000)***							-	***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA***
	5 03 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				15 Orang	15 Orang	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah***				***12 Bulan***	***6 Laporan***	***110,140,000***	***45,000,000***	***45,000,000***	***(65,140,000)***							***275,255,000***	***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA***
	5 03 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				80 Paket	80 Paket	20,000,000	5,000,000	5,000,000	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			88,200,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1650 Paket	1650 Paket	9,000,000	2,500,000	2,500,000	(6,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			34,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5 03 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				40 Paket	40 Paket	10,000,000	2,500,000	2,500,000	(7,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			24,255,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				365 Dokumen	365 Dokumen	1,140,000	-	-	(1,140,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				40 Laporan	40 Laporan	70,000,000	35,000,000	35,000,000	(35,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			128,800,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***2 Jenis 7 Unit***	***2 Laporan***	***60,000,000***	-	***78,810,000***	***18,810,000***							-	***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA***
	5 03 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				20 Unit	20 Unit	60,000,000	-	-	(60,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				-	8 Unit	-	-	78,810,000	78,810,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah***				***12 Bulan***	***3 Laporan***	***313,799,360***	***145,300,000***	***145,300,000***	***(168,499,360)***							***531,448,394***	***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA***
	5 03 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				40 Laporan	40 Laporan	3,000,000	500,000	500,000	(2,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			3,858,750	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				36 Laporan	36 Laporan	116,000,000	92,800,000	92,800,000	(23,200,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			170,887,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				2 Laporan	2 Laporan	194,799,360	52,000,000	52,000,000	(142,799,360)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			356,702,144	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***12 Unit 4 Jenis***	***12 Unit***	***104,600,000***	***66,800,000***	***66,800,000***	***(37,800,000)***							***181,912,500***	***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA***
	5 03 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	34,100,000	18,300,000	18,300,000	(15,800,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			38,587,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				1 Unit	1 Unit	25,500,000	13,500,000	13,500,000	(12,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			38,587,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				5 Unit	5 Unit	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			66,150,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				5 Unit	5 Unit	15,000,000	5,000,000	5,000,000	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			38,587,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
144.	5 03 02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik Skor Pengembangan karir ASN dalam penilaian Sistem Merit Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik Skor pengembangan Karir ASN dalam penilaian Sistem Merit Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi**				**15 15 62.44 26.24 Poin/Nilai Poin/Nilai Persen Persen 15 26.24 62.44 Poin/Nilai Persen Persen 15 62.44 26.24 Poin/Nilai Persen Persen 26.24 62.44 15 Persen Persen Poin/Nilai**	**14.32 81.48 68.82 15 Persen Persen Persen skor 26.24 62.44 15 Persen Persen Poin/Nilai 62.44 15 15 26.24 Persen Poin/Nilai Poin/Nilai Persen 68.82 15 81.48 14.32 Persen Skor Persen Persen**	**1,673,484,523**	**290,000,000**	**840,000,000**	**(833,484,523)**					**Aparatur Pemko Lhokseumawe**		**133,000,000**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		[Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian]	***Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi***	***30 30.2 60 68.35***	***0 25.89 5 60.64***	***12.5 2.5 25.89 62.44***			***1,673,484,523***	***290,000,000***	***840,000,000***	***(833,484,523)***						***15 26.64 62.44***	***133,000,000***	***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA***
	5 03 02 2.01	***Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN***	***Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN***				***7 Jenis***	***7 Laporan***	***320,000,000***	***120,000,000***	***120,000,000***	***(200,000,000)***							***22,000,000***	***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA***
	5 03 02 2.01 0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN*				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.01 0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN*				1 Laporan	1 Laporan	180,000,000	-	-	(180,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.01 0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	*Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi*				1 Lembaga	1 Lembaga	100,000,000	-	-	(100,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.01 0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian*				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	120,000,000	120,000,000	100,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			22,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.01 0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian*				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.02	***Mutasi dan Promosi ASN***	***Jumlah Laporan Pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN***				***12 Bulan***	***3 Laporan***	***200,000,000***	***170,000,000***	***720,000,000***	***520,000,000***							***111,000,000***	***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA***
	5 03 02 2.02 0001	Pengelolaan Mutasi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah*				100 Dokumen	100 Dokumen	50,000,000	25,000,000	25,000,000	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			28,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.02 0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN*				1000 Dokumen	1000 Dokumen	80,000,000	145,000,000	695,000,000	615,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			83,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.02 0003	Pengelolaan Promosi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN*				10 Dokumen	10 Dokumen	70,000,000	-	-	(70,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.03	***Pengembangan Kompetensi ASN***	***Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN***				***6 Jenis***	***6 Jenis***	***923,484,523***	-	-	***(923,484,523)***							-	***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5 03 02 2.03 0002	Pengelolaan Assessment Center	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center*				1 Dokumen	1 Dokumen	715,956,335	-	-	(715,956,335)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.03 0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN*				1 Dokumen	1 Dokumen	47,528,188	-	-	(47,528,188)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.03 0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan*				100 Orang	100 Orang	120,000,000	-	-	(120,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.03 0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan*				50 Orang	50 Orang	40,000,000	-	-	(40,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.04	***Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur***	***Periode Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur***				***12 Bulan***	***12 Bulan***	***230,000,000***	-	-	***(230,000,000)***							-	***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA***
	5 03 02 2.04 0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	-	-	(150,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.04 0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	*Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan*				250 Orang	250 Orang	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.04 0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	*Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa*				150 Orang	150 Orang	25,000,000	-	-	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.04 0010	Evaluasi Disiplin ASN	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN*				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	-	-	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**1,256,203,200**	**722,310,000**	**722,310,000**	**(533,893,200)**							**2,880,460,000**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
145.	**5 04 02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan**				**100 1.28 Persen Persen 3.60 13.49 1.28 100 Persen Persen Persen Persen**	**1.28 100 Persen Persen 4.33 1.59 Persen Persen**	**1,256,203,200**	**722,310,000**	**722,310,000**	**(533,893,200)**					**Aparatur Pemko Lhokseumawe**		**2,880,460,000**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		[Persentase pejabat yang telah mengikuti diklat struktural]	***Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan***	***100 16.32 2.31 4.75***	***0***	***100 1.28 13.49 3.60***			***1,256,203,200***	***722,310,000***	***722,310,000***	***(533,893,200)***						***100 1.28 13.49 3.60***	***2,880,460,000***	***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA***
	5 04 02 2.01	***Pengembangan Kompetensi Teknis***	***Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis***				***1 Jenis***	***1 Jenis***	***165,000,000***	-	-	***(165,000,000)***							-	***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA***
	5 04 02 2.01 0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi*				477 Orang	477 Orang	165,000,000	-	-	(165,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 04 02 2.02	***Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional***	***Jumlah Pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional***				***1 Jenis***	***1 Jenis***	***1,091,203,200***	***722,310,000***	***722,310,000***	***(368,893,200)***							***2,880,460,000***	***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5 04 02 2.02 0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan*				5 Laporan	5 Laporan	1,091,203,200	722,310,000	722,310,000	(368,893,200)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			2,880,460,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	6.01.0.00.0.00.01.0000	**Inspektorat**							**7,931,647,243**	**8,439,237,211**	**9,134,947,211**	**1,203,299,968**							**13,567,480,878**	**INSPEKTORAT**
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**7,931,647,243**	**8,439,237,211**	**9,134,947,211**	**1,203,299,968**							**13,567,480,878**	**INSPEKTORAT**
	6 01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**7,931,647,243**	**8,439,237,211**	**9,134,947,211**	**1,203,299,968**							**13,567,480,878**	**INSPEKTORAT**
146.	**6 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**				**100 Persen**	**B/68,30 Nilai/Kategori**	**6,452,480,032**	**6,746,830,000**	**7,502,112,150**	**1,049,632,118**					**Inspektorat Kota Lhokseumawe**		**7,868,581,595**	**INSPEKTORAT**
		[Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***68.1***	***0***	***67.7***			***6,452,480,032***	***6,746,830,000***	***7,502,112,150***	***1,049,632,118***						***67.8***	***7,868,581,595***	***INSPEKTORAT***
	6 01 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***				***7 Dokumen***	***5 Dokumen***	***5,000,000***	***1,500,000***	***3,000,000***	***(2,000,000)***							***15,018,000***	***INSPEKTORAT***
	6 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	5,000,000	1,500,000	3,000,000	(2,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			15,018,000	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan***				***12 Bulan***	***12 Dokumen***	***5,905,307,072***	***6,275,910,000***	***6,275,910,000***	***370,602,928***							***6,079,669,512***	***INSPEKTORAT***
	6 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	5,905,307,072	6,275,910,000	6,275,910,000	370,602,928	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			6,079,669,512	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***				***100 Persen***	***2 Dokumen***	***35,000,000***	***146,760,000***	***146,760,000***	***111,760,000***							***350,420,000***	***INSPEKTORAT***
	6 01 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				4 Orang	4 Orang	30,000,000	146,760,000	146,760,000	116,760,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			350,420,000	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah***				***12 Bulan***	***7 Dokumen***	***61,280,000***	***59,500,000***	***171,409,250***	***110,129,250***							***412,511,781***	***INSPEKTORAT***
	6 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	15,000,000	2,500,000	7,000,000	(8,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			33,048,851	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	10,000,000	5,000,000	10,500,000	500,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			20,029,607	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	4,000,000	2,000,000	6,000,000	2,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			9,013,323	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				2 Dokumen	2 Dokumen	2,280,000	-	-	(2,280,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				8 Laporan	8 Laporan	30,000,000	50,000,000	147,909,250	117,909,250	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			350,420,000	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan***				***12 Bulan***	***6 Unit***	***30,000,000***	-	***158,350,000***	***128,350,000***							-	***INSPEKTORAT***
	6 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				6 Unit	6 Unit	30,000,000	-	158,350,000	128,350,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***12 Bulan***	***4 Dokumen***	***219,092,960***	***167,160,000***	***175,822,900***	***(43,270,060)***							***328,778,784***	***INSPEKTORAT***
	6 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	2,000,000	500,000	500,000	(1,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			2,002,961	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	95,960,000	95,960,000	110,960,000	15,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			96,102,053	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	111,132,960	70,700,000	64,362,900	(46,770,060)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			230,673,770	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara***				***12 Bulan***	***27 Unit***	***196,800,000***	***96,000,000***	***570,860,000***	***374,060,000***							***682,183,518***	***INSPEKTORAT***
	6 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	33,300,000	17,500,000	17,500,000	(15,800,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			33,349,295	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				5 Unit	5 Unit	128,500,000	68,500,000	68,500,000	(60,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			128,690,223	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	20,000,000	5,000,000	405,000,000	385,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			400,000,000	INSPEKTORAT
	6 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				12 Unit	12 Unit	15,000,000	5,000,000	79,860,000	64,860,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			120,144,000	INSPEKTORAT
147.	**6 01 02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1**				**82,4 Persen 83,56 82,4 Persen Persen**	**82,4 Persen**	**1,300,546,764**	**1,420,546,764**	**1,295,667,614**	**(4,879,150)**					**OPD, Sekolah, Puskesmas, dan Gampoeng yang dilakukan pengawasan**		**4,561,643,812**	**INSPEKTORAT**
		[Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan]	***Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1***	***85.3***	***0***	***8.11***			***1,300,546,764***	***1,420,546,764***	***1,295,667,614***	***(4,879,150)***						***8.24***	***4,561,643,812***	***INSPEKTORAT***
	6 01 02 2.01	***Penyelenggaraan Pengawasan Internal***	***Jumlah Laporan Pengawasan Internal***				***88 Laporan***	***93 Laporan***	***1,030,483,764***	***1,130,483,764***	***995,604,614***	***(34,879,150)***							***3,710,587,769***	***INSPEKTORAT***
	6 01 02 2.01 0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah*				7 Laporan	7 Laporan	116,619,400	126,619,400	145,799,400	29,180,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			469,481,503	INSPEKTORAT
	6 01 02 2.01 0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*				15 Laporan	15 Laporan	106,102,300	116,102,300	123,622,300	17,520,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			420,909,086	INSPEKTORAT
	6 01 02 2.01 0003	Reviu Laporan Kinerja	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja*				10 Laporan	10 Laporan	141,885,000	151,885,000	123,465,000	(18,420,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			466,729,404	INSPEKTORAT
	6 01 02 2.01 0004	Reviu Laporan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan*				25 Laporan	25 Laporan	268,335,000	278,335,000	230,455,000	(37,880,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			841,278,324	INSPEKTORAT
	6 01 02 2.01 0005	Pengawasan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa*				25 Laporan	25 Laporan	289,043,564	299,043,564	191,783,564	(97,260,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			888,444,856	INSPEKTORAT
	6 01 02 2.01 0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	*Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk*				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	20,000,000	50,000,000	50,000,000	30,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			200,240,000	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6 01 02 2.01 0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP*				10 Dokumen	10 Dokumen	88,498,500	108,498,500	130,479,350	41,980,850	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			423,504,596	INSPEKTORAT
	6 01 02 2.02	***Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu***	***Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu***				***16 Laporan***	***16 Laporan***	***270,063,000***	***290,063,000***	***300,063,000***	***30,000,000***							***851,056,043***	***INSPEKTORAT***
	6 01 02 2.02 0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	*Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani*				1 Laporan	1 Laporan	26,120,000	36,120,000	36,120,000	10,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			133,750,308	INSPEKTORAT
	6 01 02 2.02 0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*				15 Laporan	15 Laporan	243,943,000	253,943,000	263,943,000	20,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			717,305,735	INSPEKTORAT
148.	**6 01 03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemeritah (APIP)** **Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**				**Level 3/3,3** **Level 3/3,2** **Level/Point** **Level/Point**	**Level 3/3,2** **Level 3/3,3** **Level/Point** **Level/Point**	**178,620,447**	**271,860,447**	**337,167,447**	**158,547,000**					**OPD Kota Lhokseumawe OPD, Sekolah, Puskesmas, dan Gampoeng yang dilakukan**		**1,137,255,471**	**INSPEKTORAT**
		[Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi]	***Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)*** ***Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)***	***3.5*** ***3.6***	***0***	***3.2***			***178,620,447***	***271,860,447***	***337,167,447***	***158,547,000***						***3.2*** ***3.3***	***1,137,255,471***	***INSPEKTORAT***
	6 01 03 2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan***	***Jumlah Rekomendasi yang Dihasilkan***				***11 Rekomendasi***	***11 Rekomendasi***	***69,190,447***	***119,190,447***	***121,997,447***	***52,807,000***							***607,770,851***	***INSPEKTORAT***
	6 01 03 2.01 0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun*				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	31,035,000	81,035,000	81,035,000	50,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			343,387,571	INSPEKTORAT
	6 01 03 2.01 0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun*				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	38,155,447	38,155,447	40,962,447	2,807,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			264,383,280	INSPEKTORAT
	6 01 03 2.02	***Pendampingan dan Asistensi***	***Persentase Pendampingan dan Asistensi***				***100 Persen***	***100 Persen***	***109,430,000***	***152,670,000***	***215,170,000***	***105,740,000***							***529,484,620***	***INSPEKTORAT***
	6 01 03 2.02 0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah*				34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	41,760,000	50,000,000	112,500,000	70,740,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			200,240,000	INSPEKTORAT
	6 01 03 2.02 0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi*				34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	21,245,000	41,245,000	41,245,000	20,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			102,612,988	INSPEKTORAT
	6 01 03 2.02 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	21,425,000	31,425,000	31,425,000	10,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			102,973,420	INSPEKTORAT
	6 01 03 2.02 0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas*				34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	25,000,000	30,000,000	30,000,000	5,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			123,658,212	INSPEKTORAT
	7.01.0.00.0.00.01.0000	**Kecamatan Banda Sakti**							**3,611,794,902**	**3,404,661,720**	**3,404,661,720**	**(207,133,182)**							**2,964,983,868**	**KECAMATAN BANDA SAKTI**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3,611,794,902**	**3,404,661,720**	**3,404,661,720**	**(207,133,182)**							**2,964,983,868**	**KECAMATAN BANDA SAKTI**
	7 01	**KECAMATAN**							**3,611,794,902**	**3,404,661,720**	**3,404,661,720**	**(207,133,182)**							**2,964,983,868**	**KECAMATAN BANDA SAKTI**
149.	**7 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Kecamatan Banda Sakti** **Nilai SAKIP OPD**				**B Predikat**	**B 62.28 Nilai/Predikat B Predikat**	**3,426,591,970**	**3,364,661,720**	**3,364,661,720**	**(61,930,250)**					**Kantor Camat Banda Sakti** **Pegawai Kantor Camat Banda Sakti**		**2,879,146,368**	**KECAMATAN BANDA SAKTI**
		[Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***62.40***	***0***	***62.20***			***3,426,591,970***	***3,364,661,720***	***3,364,661,720***	***(61,930,250)***						***62.28***	***2,879,146,368***	***KECAMATAN BANDA SAKTI***
	7 01 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***				***7 Dokumen***	***7 Dokumen***	***12,000,000***	***1,000,000***	***1,000,000***	***(11,000,000)***							***20,000,000***	***KECAMATAN BANDA SAKTI***
	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				7 Dokumen	7 Dokumen	10,000,000	1,000,000	1,000,000	(9,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			20,000,000	KECAMATAN BANDA SAKTI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7 01 01 2.01 0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	-	-	(2,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7 01 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia***				***392 OB***	***392 OB***	***2,938,368,070***	***3,130,579,000***	***3,130,579,000***	***192,210,930***							***2,202,484,675***	***KECAMATAN BANDA SAKTI***
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				364 Orang/bulan	364 Orang/bulan	2,938,368,070	3,130,579,000	3,130,579,000	192,210,930	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			2,202,484,675	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7 01 01 2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana***				***3 Jenis***	***3 Jenis***	***27,082,500***	-	-	***(27,082,500)***							-	***KECAMATAN BANDA SAKTI***
	7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				80 Paket	80 Paket	20,082,500	-	-	(20,082,500)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7 01 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*				3 Dokumen	3 Dokumen	2,000,000	-	-	(2,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7 01 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				5 Orang	5 Orang	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7 01 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana***				***5 Jenis***	***5 Jenis***	***98,140,000***	***24,500,000***	***24,500,000***	***(73,640,000)***							***158,025,473***	***KECAMATAN BANDA SAKTI***
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				48 Paket	48 Paket	25,000,000	1,500,000	1,500,000	(23,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			32,025,473	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				8 Paket	8 Paket	15,000,000	1,500,000	1,500,000	(13,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			15,750,000	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				7 Paket	7 Paket	15,000,000	1,500,000	1,500,000	(13,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			15,750,000	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				365 Dokumen	365 Dokumen	1,140,000	-	-	(1,140,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				40 Laporan	40 Laporan	42,000,000	20,000,000	20,000,000	(22,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			94,500,000	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7 01 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***3 Unit***	***3 Unit***	***52,941,400***	-	-	***(52,941,400)***							-	***KECAMATAN BANDA SAKTI***
	7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	24,246,300	-	-	(24,246,300)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	28,695,100	-	-	(28,695,100)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7 01 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***3 Laporan***	***3 Laporan***	***227,200,000***	***183,582,720***	***183,582,720***	***(43,617,280)***							***398,833,720***	***KECAMATAN BANDA SAKTI***
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				400 Laporan	400 Laporan	3,000,000	500,000	500,000	(2,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			5,250,000	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				48 Laporan	48 Laporan	46,200,000	46,200,000	46,200,000	-	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			60,000,000	KECAMATAN BANDA SAKTI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7 01 01 2.09 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	178,000,000	136,882,720	136,882,720	(41,117,280)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			333,583,720	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7 01 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***35 Unit***	***35 Unit***	***70,860,000***	***25,000,000***	***25,000,000***	***(45,860,000)***							***99,802,500***	***KECAMATAN BANDA SAKTI***
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	33,800,000	18,000,000	18,000,000	(15,800,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			40,740,000	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	22,000,000	3,000,000	3,000,000	(19,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			31,500,000	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				15 Unit	15 Unit	5,000,000	1,500,000	1,500,000	(3,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			11,025,000	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7 01 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				15 Unit	15 Unit	10,060,000	2,500,000	2,500,000	(7,560,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			16,537,500	KECAMATAN BANDA SAKTI
150.	**7 01 03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** **Persentase Pemberdayaan Mukim** **Persentase PKK Gampong Aktif**				**100 Persen**	**100 Persen** **65.00 Persen**	**95,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**	**(75,000,000)**					**Aparatur Mukim dalam Kecamatan Banda Sakti** **Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Banda Sakti** **Tim Penggerak PKK Gampong dalam Kecamatan Banda Sakti**		**31,500,000**	**KECAMATAN BANDA SAKTI**
		[Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan]	***Persentase Partisipasi Masyarakat Forum Pembangunan*** ***Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan*** ***Persentase Pemberdayaan Mukim*** ***Persentase PKK Gampong Aktif***	***10*** ***100*** ***70***	***0***	***100*** ***63*** ***7*** ***82***			***95,000,000***	***20,000,000***	***20,000,000***	***(75,000,000)***						***100*** ***65*** ***8*** ***86***	***31,500,000***	***KECAMATAN BANDA SAKTI***
	7 01 03 2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Pembangunan***				***100 Orang***	***100 Orang***	***75,000,000***	***20,000,000***	***20,000,000***	***(55,000,000)***							***31,500,000***	***KECAMATAN BANDA SAKTI***
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000	20,000,000	20,000,000	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			31,500,000	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7 01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7 01 03 2.03	***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***Jumlah PKK Gampong yang aktif***				***18 Gampong***	***18 Gampong***	***10,000,000***	-	-	***(10,000,000)***							-	***KECAMATAN BANDA SAKTI***
	7 01 03 2.03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7 01 03 7.04	***Pemberdayaan Mukim***	***Jumlah Mukim yang ditingkatkan Kapasitasnya***				***2 Mukim***	***2 Mukim***	***10,000,000***	-	-	***(10,000,000)***							-	***KECAMATAN BANDA SAKTI***
	7 01 03 7.04 0002	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	*Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				12 Orang	12 Orang	8,000,000	-	-	(8,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7 01 03 7.04 0004	Pelantikan Imeum Mukim	*Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim*				2 Laporan	2 Laporan	2,000,000	-	-	(2,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BANDA SAKTI
151.	**7 01 04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat**				**100 Persen**	**100 Persen**	**13,002,932**	-	-	**(13,002,932)**					**Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Banda Sakti**		-	**KECAMATAN BANDA SAKTI**
		[Meningkatnya lingkungan yang aman, tertib, dan tentram]	***Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat.***	***100***	***0***	***100***			***13,002,932***	-	-	***(13,002,932)***						***100***	-	***KECAMATAN BANDA SAKTI***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7 01 04 2.01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan pada tahun berjalan***				***5 Kali***	***5 Kali***	***13,002,932***	-	-	***(13,002,932)***							-	***KECAMATAN BANDA SAKTI***
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*				10 Laporan	10 Laporan	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7 01 04 2.01 0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*				1 Laporan	1 Laporan	3,002,932	-	-	(3,002,932)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BANDA SAKTI
152.	**7 01 05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kebijakan urusan pemerintahan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**33,200,000**	**15,000,000**	**15,000,000**	**(18,200,000)**					**Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Banda Sakti**		**38,587,500**	**KECAMATAN BANDA SAKTI**
		[Meningkatnya Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam]	***Persentase kebijakan urusan pemerintahan***	***100***	***0***	***100***			***33,200,000***	***15,000,000***	***15,000,000***	***(18,200,000)***						***100***	***38,587,500***	***KECAMATAN BANDA SAKTI***
	7 01 05 2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah penanganan Urusan Pemerintahan di Kecamatan***				***18 Kasus***	***18 Kasus***	***33,200,000***	***15,000,000***	***15,000,000***	***(18,200,000)***							***38,587,500***	***KECAMATAN BANDA SAKTI***
	7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	33,200,000	15,000,000	15,000,000	(18,200,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			38,587,500	KECAMATAN BANDA SAKTI
153.	**7 01 06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**				**100 Persen**	**100 Persen**	**44,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**	**(39,000,000)**					**Aparatur Gampong dalam Kecamatan Banda Sakti**		**15,750,000**	**KECAMATAN BANDA SAKTI**
		[Meningkatnya Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong]	***persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa***	***100***	***0***	***100***			***44,000,000***	***5,000,000***	***5,000,000***	***(39,000,000)***						***100***	***15,750,000***	***KECAMATAN BANDA SAKTI***
	7 01 06 2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Jumlah Pengawasan Dokumen Gampong***				***18 Dokumen***	***18 Dokumen***	***44,000,000***	***5,000,000***	***5,000,000***	***(39,000,000)***							***15,750,000***	***KECAMATAN BANDA SAKTI***
	7 01 06 2.01 0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*				18 Dokumen	18 Dokumen	10,000,000	5,000,000	5,000,000	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			15,750,000	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7 01 06 2.01 0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*				18 Dokumen	18 Dokumen	22,000,000	-	-	(22,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7 01 06 2.01 0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*				18 Dokumen	18 Dokumen	2,000,000	-	-	(2,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7 01 06 2.01 0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*				18 Laporan	18 Laporan	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BANDA SAKTI
	7.01.0.00.0.00.02.0000	**Kecamatan Blang Mangat**							**2,899,941,803**	**2,875,486,904**	**2,875,486,904**	**(24,454,899)**							**2,921,472,024**	**KECAMATAN BLANG MANGAT**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2,899,941,803**	**2,875,486,904**	**2,875,486,904**	**(24,454,899)**							**2,921,472,024**	**KECAMATAN BLANG MANGAT**
	7 01	**KECAMATAN**							**2,899,941,803**	**2,875,486,904**	**2,875,486,904**	**(24,454,899)**							**2,921,472,024**	**KECAMATAN BLANG MANGAT**
154.	**7 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI SAKIP OPD**				**CC Predikat**	**B 60,20 Nilai/Predikat**	**2,728,381,343**	**2,835,486,904**	**2,835,486,904**	**107,105,561**					**Aparatur Kecamatan Kantor Camat Blang Mangat**		**2,841,472,024**	**KECAMATAN BLANG MANGAT**
		[Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***60.42***	***0***	***59.80***			***2,728,381,343***	***2,835,486,904***	***2,835,486,904***	***107,105,561***						***60.20***	***2,841,472,024***	***KECAMATAN BLANG MANGAT***
	7 01 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah***				***7 Dokumen***	***7 Dokumen***	***9,000,000***	***1,000,000***	***1,000,000***	***(8,000,000)***							***20,000,000***	***KECAMATAN BLANG MANGAT***
	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	8,000,000	1,000,000	1,000,000	(7,000,000)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			20,000,000	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7 01 01 2.01 0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	-	-	(1,000,000)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7 01 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersedia***				***264 Orang***	***264 Orang***	***2,324,192,799***	***2,585,639,000***	***2,585,639,000***	***261,446,201***							***1,977,598,000***	***KECAMATAN BLANG MANGAT***
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				204 Orang/bulan	204 Orang/bulan	2,324,192,799	2,585,639,000	2,585,639,000	261,446,201	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			1,977,598,000	KECAMATAN BLANG MANGAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7 01 01 2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana***				***3 Jenis***	***3 Jenis***	***8,000,000***	-	-	***(8,000,000)***							-	***KECAMATAN BLANG MANGAT***
	7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				26 Paket	26 Paket	4,000,000	-	-	(4,000,000)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7 01 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*				3 Dokumen	3 Dokumen	1,000,000	-	-	(1,000,000)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7 01 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				5 Orang	5 Orang	3,000,000	-	-	(3,000,000)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7 01 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana***				***5 Jenis***	***5 Jenis***	***71,140,000***	***24,500,000***	***24,500,000***	***(46,640,000)***							***226,210,200***	***KECAMATAN BLANG MANGAT***
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				70 Paket	70 Paket	15,000,000	1,500,000	1,500,000	(13,500,000)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			51,710,200	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				600 Paket	600 Paket	15,000,000	1,500,000	1,500,000	(13,500,000)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			44,500,000	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				30 Paket	30 Paket	10,000,000	1,500,000	1,500,000	(8,500,000)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			30,000,000	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				365 Dokumen	365 Dokumen	1,140,000	-	-	(1,140,000)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				30 Laporan	30 Laporan	30,000,000	20,000,000	20,000,000	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			100,000,000	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7 01 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***14 Unit***	***14 Unit***	***22,000,000***	-	-	***(22,000,000)***							-	***KECAMATAN BLANG MANGAT***
	7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	2,000,000	-	-	(2,000,000)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7 01 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***3 Laporan***	***3 Laporan***	***238,298,544***	***199,347,904***	***199,347,904***	***(38,950,640)***							***408,863,824***	***KECAMATAN BLANG MANGAT***
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				30 Laporan	30 Laporan	2,000,000	500,000	500,000	(1,500,000)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			5,000,000	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				72 Laporan	72 Laporan	45,298,544	45,298,544	45,298,544	-	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			45,298,544	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				312 Laporan	312 Laporan	191,000,000	153,549,360	153,549,360	(37,450,640)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			358,565,280	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7 01 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***28 Unit***	***28 Unit***	***55,750,000***	***25,000,000***	***25,000,000***	***(30,750,000)***							***208,800,000***	***KECAMATAN BLANG MANGAT***
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	33,800,000	18,000,000	18,000,000	(15,800,000)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			63,800,000	KECAMATAN BLANG MANGAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	10,000,000	3,000,000	3,000,000	(7,000,000)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			100,000,000	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	5,000,000	1,500,000	1,500,000	(3,500,000)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			10,000,000	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7 01 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				15 Unit	15 Unit	6,950,000	2,500,000	2,500,000	(4,450,000)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			35,000,000	KECAMATAN BLANG MANGAT
155.	**7 01 03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** **Persentase Pemberdayaan Mukim** **Persentase PKK Gampong Aktif**				**100 Persen**	**100 Persen** **65,00%** **Persen**	**85,360,460**	**20,000,000**	**20,000,000**	**(65,360,460)**					**Aparatur Mukim Masyarakat**		**25,000,000**	**KECAMATAN BLANG MANGAT**
		[Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan]	***Persentase Partisipasi Masyarakat Forum Pembangunan*** ***Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan*** ***Persentase Pemberdayaan Mukim*** ***Persentase PKK Gampong Aktif***	***10*** ***100*** ***70***	***0***	***100*** ***63*** ***7*** ***82***			***85,360,460***	***20,000,000***	***20,000,000***	***(65,360,460)***						***100*** ***65*** ***8*** ***86***	***25,000,000***	***KECAMATAN BLANG MANGAT***
	7 01 03 2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Jumlah masyarakat yang Berpatisipasi dalam Forum pembangunan***				***100 Orang***	***100 Orang***	***70,360,460***	***20,000,000***	***20,000,000***	***(50,360,460)***							***25,000,000***	***KECAMATAN BLANG MANGAT***
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				0 0	0 0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			25,000,000	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7 01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				1 Laporan	1 Laporan	50,360,460	-	-	(50,360,460)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7 01 03 2.03	***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***Jumlah PKK Gampong yang aktif***				***22 Gampong***	***22 Gampong***	***9,000,000***	-	-	***(9,000,000)***							-	***KECAMATAN BLANG MANGAT***
	7 01 03 2.03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	9,000,000	-	-	(9,000,000)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7 01 03 7.04	***Pemberdayaan Mukim***	***Jumlah Mukim yang diTingkatkan Kapasitasnya***				***3 Mukim***	***3 Mukim***	***6,000,000***	-	-	***(6,000,000)***							-	***KECAMATAN BLANG MANGAT***
	7 01 03 7.04 0002	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	*Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				12 Orang	12 Orang	5,000,000	-	-	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7 01 03 7.04 0004	Pelantikan Imeum Mukim	*Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim*				3 Laporan	3 Laporan	1,000,000	-	-	(1,000,000)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BLANG MANGAT
156.	**7 01 04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat.**				**100 Persen**	**100 Persen**	**11,000,000**	**-**	**-**	**(11,000,000)**					**Masyarakat**		**-**	**KECAMATAN BLANG MANGAT**
		[Meningkatnya lingkungan yang aman, tertib, dan tentram]	***Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat.***	***100***	***0***	***100***			***11,000,000***	-	-	***(11,000,000)***						***100***	-	***KECAMATAN BLANG MANGAT***
	7 01 04 2.01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan pada tahun berjalan***				***5 Kali***	***5 Kali***	***11,000,000***	-	-	***(11,000,000)***							-	***KECAMATAN BLANG MANGAT***
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7 01 04 2.01 0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	-	-	(1,000,000)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BLANG MANGAT
157.	**7 01 05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kebijakan urusan pemerintahan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**33,200,000**	**15,000,000**	**15,000,000**	**(18,200,000)**					**Pimpinan Kecamatan Blang Mangat**		**35,000,000**	**KECAMATAN BLANG MANGAT**
		[Meningkatnya Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam]	***Persentase kebijakan urusan pemerintahan***	***100***	***0***	***100***			***33,200,000***	***15,000,000***	***15,000,000***	***(18,200,000)***						***100***	***35,000,000***	***KECAMATAN BLANG MANGAT***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7 01 05 2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah penanganan Urusan Pemerintahan di Kecamatan***				***22 Kasus***	***22 Kasus***	***33,200,000***	***15,000,000***	***15,000,000***	***(18,200,000)***							***35,000,000***	***KECAMATAN BLANG MANGAT***
	7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	33,200,000	15,000,000	15,000,000	(18,200,000)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			35,000,000	KECAMATAN BLANG MANGAT
158.	**7 01 06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**				**100 Persen**	**100 Persen**	**42,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**	**(37,000,000)**					**Masyarakat**		**20,000,000**	**KECAMATAN BLANG MANGAT**
		[Meningkatnya Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong]	***persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa***	***100***	***0***	***100***			***42,000,000***	***5,000,000***	***5,000,000***	***(37,000,000)***						***100***	***20,000,000***	***KECAMATAN BLANG MANGAT***
	7 01 06 2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Jumlah Pengawasan Dokumen Gampong***				***22 Dokumen***	***22 Dokumen***	***42,000,000***	***5,000,000***	***5,000,000***	***(37,000,000)***							***20,000,000***	***KECAMATAN BLANG MANGAT***
	7 01 06 2.01 0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	5,000,000	5,000,000	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			20,000,000	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7 01 06 2.01 0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*				22 Dokumen	22 Dokumen	21,000,000	-	-	(21,000,000)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7 01 06 2.01 0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*				22 Dokumen	22 Dokumen	1,000,000	-	-	(1,000,000)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7 01 06 2.01 0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN BLANG MANGAT
	7.01.0.00.0.00.03.0000	**Kecamatan Muara Satu**							**2,722,511,841**	**2,209,803,800**	**2,232,342,800**	**(490,169,041)**							**2,051,872,291**	**KECAMATAN MUARA SATU**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2,722,511,841**	**2,209,803,800**	**2,232,342,800**	**(490,169,041)**							**2,051,872,291**	**KECAMATAN MUARA SATU**
	7 01	**KECAMATAN**							**2,722,511,841**	**2,209,803,800**	**2,232,342,800**	**(490,169,041)**							**2,051,872,291**	**KECAMATAN MUARA SATU**
159.	**7 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI SAKIP OPD**				**B Predikat**	**B 60,25 Nilai/predikat**	**2,523,311,841**	**2,169,803,800**	**2,192,342,800**	**(330,969,041)**					**Kantor Camat Muara Satu Pegawai Kecamatan Muara Satu**		**1,949,872,291**	**KECAMATAN MUARA SATU**
	7 01 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***10 Unit***	***10 Unit***	***23,962,700***	***-***	***9,539,000***	***(14,423,700)***							***-***	***KECAMATAN MUARA SATU***
	7 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				12 Unit	12 Unit	23,962,700	-	-	(23,962,700)	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN MUARA SATU
	7 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				-	2 Unit	-	-	9,539,000	9,539,000	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN MUARA SATU
		[Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah]	-	-	-	-			***2,499,349,141***	***2,169,803,800***	***2,182,803,800***	***(316,545,341)***						-	***1,949,872,291***	***KECAMATAN MUARA SATU***
	7 01 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***				***6 Dokumen***	***6 Dokumen***	***12,000,000***	***1,000,000***	***1,000,000***	***(11,000,000)***							***20,000,000***	***KECAMATAN MUARA SATU***
	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				8 Dokumen	8 Dokumen	10,000,000	1,000,000	1,000,000	(9,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			20,000,000	KECAMATAN MUARA SATU
	7 01 01 2.01 0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	-	-	(2,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN MUARA SATU
	7 01 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia***				***238 OB***	***238 OB***	***2,064,110,329***	***1,958,521,000***	***1,958,521,000***	***(105,589,329)***							***1,387,618,291***	***KECAMATAN MUARA SATU***
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				204 Orang/bulan	204 Orang/bulan	2,064,110,329	1,958,521,000	1,958,521,000	(105,589,329)	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			1,387,618,291	KECAMATAN MUARA SATU
	7 01 01 2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana***				***3 Jenis***	***3 Jenis***	***31,500,000***	***-***	***-***	***(31,500,000)***							***-***	***KECAMATAN MUARA SATU***
	7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				40 Paket	40 Paket	29,500,000	-	-	(29,500,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN MUARA SATU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7 01 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*				3 Dokumen	3 Dokumen	2,000,000	-	-	(2,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN MUARA SATU
	7 01 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana***				***4 Jenis***	***4 Jenis***	***82,880,000***	***24,500,000***	***24,500,000***	***(58,380,000)***							***180,000,000***	***KECAMATAN MUARA SATU***
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				80 Paket	80 Paket	20,000,000	1,500,000	1,500,000	(18,500,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			40,000,000	KECAMATAN MUARA SATU
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1100 Paket	1100 Paket	15,000,000	1,500,000	1,500,000	(13,500,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			15,000,000	KECAMATAN MUARA SATU
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				10 Paket	10 Paket	15,000,000	1,500,000	1,500,000	(13,500,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			15,000,000	KECAMATAN MUARA SATU
	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				2 Dokumen	2 Dokumen	2,880,000	-	-	(2,880,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN MUARA SATU
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				40 Laporan	40 Laporan	30,000,000	20,000,000	20,000,000	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			110,000,000	KECAMATAN MUARA SATU
	7 01 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***3 Laporan***	***3 Laporan***	***239,843,215***	***165,282,800***	***178,282,800***	***(61,560,415)***							***307,254,000***	***KECAMATAN MUARA SATU***
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				30 Laporan	30 Laporan	8,400,000	500,000	500,000	(7,900,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			8,820,000	KECAMATAN MUARA SATU
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				84 Laporan	84 Laporan	86,700,000	60,000,000	73,000,000	(13,700,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			88,434,000	KECAMATAN MUARA SATU
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				708 Laporan	708 Laporan	144,743,215	104,782,800	104,782,800	(39,960,415)	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			210,000,000	KECAMATAN MUARA SATU
	7 01 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***40 Unit***	***40 Unit***	***69,015,597***	***20,500,000***	***20,500,000***	***(48,515,597)***							***55,000,000***	***KECAMATAN MUARA SATU***
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	40,000,000	18,000,000	18,000,000	(22,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			40,000,000	KECAMATAN MUARA SATU
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	24,015,597	-	-	(24,015,597)	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN MUARA SATU
	7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	5,000,000	2,500,000	2,500,000	(2,500,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			15,000,000	KECAMATAN MUARA SATU
160.	**7 01 03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase gampong unggulan aktif Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**9 Laporan**	**90,00% Persen 9 Laporan**	**112,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**	**(92,000,000)**					**Aparatur Desa, Masyarakat Masyarakat dan Aparatur Gampong**		**45,000,000**	**KECAMATAN MUARA SATU**
	7 01 03 2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Jumlah Gampong dalam kecamatan***				***11 Laporan***	***11 Laporan***	***75,000,000***	***20,000,000***	***20,000,000***	***(55,000,000)***							***45,000,000***	***KECAMATAN MUARA SATU***
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000	20,000,000	20,000,000	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			45,000,000	KECAMATAN MUARA SATU
		[Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan]	***Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan***	***100***	***0***	***80***			***87,000,000***	-	-	***(87,000,000)***						***90***	-	***KECAMATAN MUARA SATU***
	7 01 03 2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Jumlah Gampong dalam kecamatan***				***11 Laporan***	***11 Laporan***	***75,000,000***	***20,000,000***	***20,000,000***	***(55,000,000)***							***45,000,000***	***KECAMATAN MUARA SATU***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7 01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				5 Laporan	5 Laporan	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN MUARA SATU
	7 01 03 2.03	***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***Jumlah Gampong yang aktif***				***11 Laporan***	***11 Laporan***	***10,000,000***	-	-	***(10,000,000)***							-	***KECAMATAN MUARA SATU***
	7 01 03 2.03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN MUARA SATU
	7 01 03 7.04	***Pemberdayaan Mukim***	***Jumlah Gampong dalam kecamatan***				***11 Laporan***	***11 Laporan***	***27,000,000***	-	-	***(27,000,000)***							-	***KECAMATAN MUARA SATU***
	7 01 03 7.04 0002	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	*Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				8 Orang	8 Orang	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN MUARA SATU
	7 01 03 7.04 0003	Peresmian Mukim	*Jumlah Dokumen Hasil Peresmian Mukim*				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN MUARA SATU
	7 01 03 7.04 0004	Pelantikan Imeum Mukim	*Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim*				2 Laporan	2 Laporan	2,000,000	-	-	(2,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN MUARA SATU
161.	**7 01 04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat.**				**100 Persen**	**100 Persen**	**10,000,000**	**-**	**-**	**(10,000,000)**					**Masyarakat dan Aparatur Gampong**		**-**	**KECAMATAN MUARA SATU**
	7 01 04 7.03	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan pada tahun berjalan***				***5 Dokumen***	***5 Dokumen***	***10,000,000***	-	-	***(10,000,000)***							-	***KECAMATAN MUARA SATU***
	7 01 04 7.03 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN MUARA SATU
162.	**7 01 05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kebijakan urusan pemerintahan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**33,200,000**	**15,000,000**	**15,000,000**	**(18,200,000)**					**Kantor Camat Muara Satu**		**42,000,000**	**KECAMATAN MUARA SATU**
		[Meningkatnya Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam]	***Persentase kebijakan urusan pemerintahan***	***100***	***0***	***100***			***33,200,000***	***15,000,000***	***15,000,000***	***(18,200,000)***						***100***	***42,000,000***	***KECAMATAN MUARA SATU***
	7 01 05 2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah penanganan di Kec***				***11 Laporan***	***11 Laporan***	***33,200,000***	***15,000,000***	***15,000,000***	***(18,200,000)***							***42,000,000***	***KECAMATAN MUARA SATU***
	7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*				12 Dokumen	12 Dokumen	33,200,000	15,000,000	15,000,000	(18,200,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			42,000,000	KECAMATAN MUARA SATU
163.	**7 01 06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**				**100 Persen**	**100 Persen**	**44,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**	**(39,000,000)**					**Masyarakat dan Aparatur Gampong**		**15,000,000**	**KECAMATAN MUARA SATU**
	7 01 06 2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Jumlah Pengawasan Dokumen Gampong***				***11 Dokumen***	***11 Dokumen***	***44,000,000***	***5,000,000***	***5,000,000***	***(39,000,000)***							***15,000,000***	***KECAMATAN MUARA SATU***
	7 01 06 2.01 0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*				1 Dokumen	1 Dokumen	22,000,000	-	-	(22,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN MUARA SATU
		[Meningkatnya Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong]	***persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa***	***100***	***0***	***100***			***22,000,000***	***5,000,000***	***5,000,000***	***(17,000,000)***						***100***	***15,000,000***	***KECAMATAN MUARA SATU***
	7 01 06 2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Jumlah Pengawasan Dokumen Gampong***				***11 Dokumen***	***11 Dokumen***	***44,000,000***	***5,000,000***	***5,000,000***	***(39,000,000)***							***15,000,000***	***KECAMATAN MUARA SATU***
	7 01 06 2.01 0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*				4 Dokumen	4 Dokumen	10,000,000	5,000,000	5,000,000	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			15,000,000	KECAMATAN MUARA SATU
	7 01 06 2.01 0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*				3 Dokumen	3 Dokumen	2,000,000	-	-	(2,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN MUARA SATU
	7 01 06 2.01 0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*				3 Laporan	3 Laporan	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN MUARA SATU
	7.01.0.00.0.00.04.0000	**Kecamatan Muara Dua**							**2,851,337,256**	**2,511,444,800**	**2,511,444,800**	**(339,892,456)**							**2,570,998,120**	**KECAMATAN MUARA DUA**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2,851,337,256**	**2,511,444,800**	**2,511,444,800**	**(339,892,456)**							**2,570,998,120**	**KECAMATAN MUARA DUA**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7 01	**KECAMATAN**							**2,851,337,256**	**2,511,444,800**	**2,511,444,800**	**(339,892,456)**							**2,570,998,120**	**KECAMATAN MUARA DUA**
164.	**7 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Kecamatan Muara Dua**				**B Predikat**	**B 60.60 Predikat B Predikat**	**2,650,877,404**	**2,471,444,800**	**2,471,444,800**	**(179,432,604)**					**Kantor Camat Muara Dua Pegawai Kecamatan Muara Dua**		**2,495,998,120**	**KECAMATAN MUARA DUA**
	7 01 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***11 Unit***	***11 Unit***	***120,750,000***	-	-	***(120,750,000)***							-	***KECAMATAN MUARA DUA***
	7 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				10 Unit	10 Unit	120,750,000	-	-	(120,750,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN MUARA DUA
		[Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***60.15***	***0***	***59.80***			***2,530,127,404***	***2,471,444,800***	***2,471,444,800***	***(58,682,604)***						***59.85***	***2,495,998,120***	***KECAMATAN MUARA DUA***
	7 01 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***				***7 Dokumen***	***7 Dokumen***	***30,000,000***	***1,000,000***	***1,000,000***	***(29,000,000)***							***20,000,000***	***KECAMATAN MUARA DUA***
	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				8 Dokumen	8 Dokumen	20,000,000	1,000,000	1,000,000	(19,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			20,000,000	KECAMATAN MUARA DUA
	7 01 01 2.01 0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN MUARA DUA
	7 01 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersedia***				***350 OB***	***350 OB***	***2,007,825,356***	***2,232,112,000***	***2,232,112,000***	***224,286,644***							***1,713,555,028***	***KECAMATAN MUARA DUA***
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				308 Orang/bulan	308 Orang/bulan	2,007,825,356	2,232,112,000	2,232,112,000	224,286,644	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			1,713,555,028	KECAMATAN MUARA DUA
	7 01 01 2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana***				***3 Jenis***	***3 Jenis***	***28,335,000***	-	-	***(28,335,000)***							-	***KECAMATAN MUARA DUA***
	7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				60 Paket	60 Paket	28,335,000	-	-	(28,335,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN MUARA DUA
	7 01 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana***				***5 Jenis***	***5 Jenis***	***131,140,000***	***34,500,000***	***34,500,000***	***(96,640,000)***							***165,000,000***	***KECAMATAN MUARA DUA***
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				80 Paket	80 Paket	30,000,000	6,000,000	6,000,000	(24,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			35,000,000	KECAMATAN MUARA DUA
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1.150 Paket	1.150 Paket	15,000,000	7,000,000	7,000,000	(8,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			15,000,000	KECAMATAN MUARA DUA
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				10 Paket	10 Paket	15,000,000	1,500,000	1,500,000	(13,500,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			15,000,000	KECAMATAN MUARA DUA
	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				2 Dokumen	2 Dokumen	1,140,000	-	-	(1,140,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN MUARA DUA
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				45 Laporan	45 Laporan	70,000,000	20,000,000	20,000,000	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			100,000,000	KECAMATAN MUARA DUA
	7 01 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***3 Laporan***	***3 Laporan***	***221,315,048***	***180,332,800***	***180,332,800***	***(40,982,248)***							***423,820,612***	***KECAMATAN MUARA DUA***
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				45 Laporan	45 Laporan	5,250,000	500,000	500,000	(4,750,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			5,512,500	KECAMATAN MUARA DUA
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				84 Laporan	84 Laporan	48,365,000	40,000,000	40,000,000	(8,365,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			88,434,000	KECAMATAN MUARA DUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7 01 01 2.09 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				708 Laporan	708 Laporan	167,700,048	139,832,800	139,832,800	(27,867,248)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			329,874,112	KECAMATAN MUARA DUA
	7 01 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***43 Unit***	***43 Unit***	***111,512,000***	***23,500,000***	***23,500,000***	***(88,012,000)***							***173,622,480***	***KECAMATAN MUARA DUA***
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	46,512,000	18,000,000	18,000,000	(28,512,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			48,372,480	KECAMATAN MUARA DUA
	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	50,000,000	3,000,000	3,000,000	(47,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			110,250,000	KECAMATAN MUARA DUA
	7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	15,000,000	2,500,000	2,500,000	(12,500,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			15,000,000	KECAMATAN MUARA DUA
165.	**7 01 03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Gampong Aktif Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan Mukim**				**100 persen**	**100 persen 65% persen**	**104,279,759**	**20,000,000**	**20,000,000**	**(84,279,759)**					**Masyarakat Dalam Kecamatan Muara Dua Melakukan Pembinaan PKK**		**35,000,000**	**KECAMATAN MUARA DUA**
		[Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan]	***Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan***	***100***	***0***	***100***			***104,279,759***	***20,000,000***	***20,000,000***	***(84,279,759)***						***100***	***35,000,000***	***KECAMATAN MUARA DUA***
	7 01 03 2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Forum Pembangunan***				***100 Orang***	***100 Orang***	***80,000,000***	***20,000,000***	***20,000,000***	***(60,000,000)***							***35,000,000***	***KECAMATAN MUARA DUA***
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000	20,000,000	20,000,000	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			35,000,000	KECAMATAN MUARA DUA
	7 01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				5 Laporan	5 Laporan	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN MUARA DUA
	7 01 03 2.03	***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***Jumlah PKK Gampong yang aktif***				***17 Laporan***	***17 Laporan***	***10,000,000***	-	-	***(10,000,000)***							-	***KECAMATAN MUARA DUA***
	7 01 03 2.03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN MUARA DUA
	7 01 03 7.04	***Pemberdayaan Mukim***	***Jumlah Mukim yang ditingkatkan kapasitasnya***				***2 Mukim***	***2 Mukim***	***14,279,759***	-	-	***(14,279,759)***							-	***KECAMATAN MUARA DUA***
	7 01 03 7.04 0002	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	*Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				8 Orang	8 Orang	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN MUARA DUA
	7 01 03 7.04 0004	Pelantikan Imeum Mukim	*Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim*				2 Laporan	2 Laporan	4,279,759	-	-	(4,279,759)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN MUARA DUA
166.	**7 01 04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat.**				**100 Persen**	**100 Persen**	**14,000,000**	**-**	**-**	**(14,000,000)**					**Masyarakat Gampong Dalam Wilayah Kecamatan Muara Dua**		**-**	**KECAMATAN MUARA DUA**
	7 01 04 2.01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan pada tahun berjalan***				***5 Dokumen***	***5 Dokumen***	***14,000,000***	-	-	***(14,000,000)***							-	***KECAMATAN MUARA DUA***
	7 01 04 2.01 0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*				4 Laporan	4 Laporan	4,000,000	-	-	(4,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN MUARA DUA
		[Meningkatnya lingkungan yang aman, tertib, dan tentram]	***Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat.***	***100***	***0***	***100***			***10,000,000***	-	-	***(10,000,000)***						***100***	-	***KECAMATAN MUARA DUA***
	7 01 04 2.01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan pada tahun berjalan***				***5 Dokumen***	***5 Dokumen***	***14,000,000***	-	-	***(14,000,000)***							-	***KECAMATAN MUARA DUA***
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN MUARA DUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
167.	7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kebijakan urusan pemerintahan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**25,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**	**(10,000,000)**					**Masyarakat Gampong Dalam Wilayah Kecamatan Muara Dua**		**30,000,000**	**KECAMATAN MUARA DUA**
		[Meningkatnya Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam]	***Persentase kebijakan urusan pemerintahan***	***100***	***0***	***100***			***25,000,000***	***15,000,000***	***15,000,000***	***(10,000,000)***						***100***	***30,000,000***	***KECAMATAN MUARA DUA***
	7 01 05 2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah penanganan di Kec***				***17 Laporan***	***17 Laporan***	***25,000,000***	***15,000,000***	***15,000,000***	***(10,000,000)***							***30,000,000***	***KECAMATAN MUARA DUA***
	7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*				12 Dokumen	12 Dokumen	25,000,000	15,000,000	15,000,000	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			30,000,000	KECAMATAN MUARA DUA
168.	7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**				**100 Persen**	**100 Persen**	**57,180,093**	**5,000,000**	**5,000,000**	**(52,180,093)**					**Masyarakat Gampong Dalam Wilayah Kecamatan Muara Dua**		**10,000,000**	**KECAMATAN MUARA DUA**
		[Meningkatnya Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong]	***persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa***	***100***	***0***	***100***			***57,180,093***	***5,000,000***	***5,000,000***	***(52,180,093)***						***100***	***10,000,000***	***KECAMATAN MUARA DUA***
	7 01 06 2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Jumlah Pengawasan Dokumen Gampong***				***17 Dokumen***	***17 Dokumen***	***57,180,093***	***5,000,000***	***5,000,000***	***(52,180,093)***							***10,000,000***	***KECAMATAN MUARA DUA***
	7 01 06 2.01 0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*				4 Dokumen	4 Dokumen	10,000,000	5,000,000	5,000,000	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			10,000,000	KECAMATAN MUARA DUA
	7 01 06 2.01 0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN MUARA DUA
	7 01 06 2.01 0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*				1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	-	-	(4,000,000)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN MUARA DUA
	7 01 06 2.01 0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*				3 Laporan	3 Laporan	13,180,093	-	-	(13,180,093)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	KECAMATAN MUARA DUA
	8.01.0.00.0.00.01.0000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**							**5,216,004,336**	**4,171,339,640**	**4,512,679,640**	**(703,324,696)**							**4,963,600,000**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**5,216,004,336**	**4,171,339,640**	**4,512,679,640**	**(703,324,696)**							**4,963,600,000**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
	8 01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**5,216,004,336**	**4,171,339,640**	**4,512,679,640**	**(703,324,696)**							**4,963,600,000**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
169.	**8 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI SAKIP OPD**				**100 Persen**	**61,00 B Nilai/Predikat**	**2,940,527,208**	**3,010,681,000**	**3,020,681,000**	**80,153,792**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Gaji ASN Kegiatan Bagian Umum Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**2,988,600,000**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
	8 01 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***12 Bulan***	***12 Bulan***	***226,632,480***	***127,580,000***	***127,580,000***	***(99,052,480)***							***228,000,000***	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
	8 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				-	0 Laporan	-	500,000	500,000	500,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	75,000,000	60,480,000	60,480,000	(14,520,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			76,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	151,632,480	66,600,000	66,600,000	(85,032,480)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			152,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		[Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***60.95***	***0***	***60.85***			***2,713,894,728***	***2,883,101,000***	***2,893,101,000***	***179,206,272***						***60.89***	***2,760,600,000***	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
	8 01 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***				***15 Dokumen***	***15 Dokumen***	***20,000,000***	***1,500,000***	***1,500,000***	***(18,500,000)***							***21,000,000***	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				15 Dokumen	15 Dokumen	20,000,000	1,500,000	1,500,000	(18,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			21,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Periode Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***				***12 Bulan***	***12 Bulan***	***2,478,704,728***	***2,818,101,000***	***2,818,101,000***	***339,396,272***							***2,463,000,000***	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
	8 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				306 Orang/bulan	306 Orang/bulan	2,478,704,728	2,818,101,000	2,818,101,000	339,396,272	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			2,463,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Periode Administrasi Umum Perangkat Daerah***				***12 Bulan***	***12 Bulan***	***98,590,000***	***32,500,000***	***32,500,000***	***(66,090,000)***							***114,000,000***	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
	8 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	15,000,000	2,500,000	2,500,000	(12,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			16,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	10,000,000	2,500,000	2,500,000	(7,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			11,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	25,000,000	2,500,000	2,500,000	(22,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			26,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	1,140,000	-	-	(1,140,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	47,450,000	25,000,000	25,000,000	(22,450,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			61,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	-				-	-	***28,000,000***	-	-	***(28,000,000)***							-	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
	8 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				10 Unit	10 Unit	28,000,000	-	-	(28,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***12 Bulan***	***12 Bulan***	***88,600,000***	***31,000,000***	***41,000,000***	***(47,600,000)***							***162,600,000***	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
	8 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	33,300,000	13,500,000	23,500,000	(9,800,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			85,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				1 Unit	1 Unit	26,500,000	12,500,000	12,500,000	(14,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			26,600,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	28,800,000	5,000,000	5,000,000	(23,800,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			51,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
170.	**8 01 02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan**				**2.21 Persen**	**25,00% Persen**	**97,180,800**	**-**	**30,600,000**	**(66,580,800)**					**Kebijakan teknis dan pemantapan kegiatan Paskibra**		**24,000,000**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		[Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan]	***Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***	***32***	***0***	***22***			***97,180,800***	-	***30,600,000***	***(66,580,800)***						***25***	***24,000,000***	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
	8 01 02 2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***	***Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan***				***221 Persen***	***221 Persen***	***97,180,800***	-	***30,600,000***	***(66,580,800)***							***24,000,000***	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
	8 01 02 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*				40 Orang	40 Orang	77,180,800	-	-	(77,180,800)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8 01 02 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*				2 Laporan	2 Laporan	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 02 2.01 0008	Pembentukan Paskibraka	*Jumlah Paskibraka*				-	78 Orang	-	-	30,600,000	30,600,000	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			24,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
171.	**8 01 03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik**				**0.82 Rasio**	**36,00% Persen**	**1,431,296,328**	**1,150,000,000**	**1,360,750,000**	**(70,546,328)**					**Kebijakan teknis dan pemantapan kegiatan bidang politik, bantuan parpol**		**1,710,000,000**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		[Meningkatnya etika dan budaya politik]	***Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik***	***52***	***0***	***24***			***1,431,296,328***	***1,150,000,000***	***1,360,750,000***	***(70,546,328)***						***36***	***1,710,000,000***	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
	8 01 03 2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik***	***Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik***				***8198 Persen***	***8198 Persen***	***1,431,296,328***	***1,150,000,000***	***1,360,750,000***	***(70,546,328)***							***1,710,000,000***	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
	8 01 03 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*				21 Orang	21 Orang	550,000,000	550,000,000	550,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			610,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 03 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 03 2.01 0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka	*Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	861,296,328	600,000,000	810,750,000	(50,546,328)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			1,100,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
172.	**8 01 04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Presentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif**				**20.27 Persen**	**38.89% Persen**	**97,000,000**	**-**	**50,000,000**	**(47,000,000)**					**Kebijakan Teknis dan Pemantapan bantuan hibah ormas**		**-**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
	8 01 04 2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***	***Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***				***2 Laporan***	***2 Laporan***	***97,000,000***	-	***50,000,000***	***(47,000,000)***							-	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
	8 01 04 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*				3 Orang	3 Orang	97,000,000	-	50,000,000	(47,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
173.	**8 01 05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya danFasilitasiPencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan**				**4.37 Persen**	**77,94 Persen**	**50,000,000**	**-**	**-**	**(50,000,000)**					**Kegiatan Narkoba**		**-**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		[Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat]	***Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan***	***100***	***0***	***74***			***50,000,000***	-	-	***(50,000,000)***						***78***	-	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
	8 01 05 2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya***	***Jumlah Laporan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya***				***2 Laporan***	***2 Laporan***	***50,000,000***	-	-	***(50,000,000)***							-	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8 01 05 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*				30 Orang	30 Orang	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
174.	**8 01 06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase konflik sosial yang tertangani**				**100 Persen**	**100 Persen**	**600,000,000**	**10,658,640**	**50,648,640**	**(549,351,360)**					**Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Kegiatan Kewaspadaan nasional**		**241,000,000**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		[Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan]	***Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan***	***100***	***0***	***50***			***600,000,000***	***10,658,640***	***50,648,640***	***(549,351,360)***						***100***	***241,000,000***	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
	8 01 06 2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial***	***Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial***				***5 Laporan***	***5 Laporan***	***600,000,000***	***10,658,640***	***50,648,640***	***(549,351,360)***							***241,000,000***	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
	8 01 06 2.01 0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun*				2 Dokumen	2 Dokumen	40,000,000	10,658,640	10,658,640	(29,341,360)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			41,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 06 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*				20 Orang	20 Orang	150,000,000	-	-	(150,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 06 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*				20 Orang	20 Orang	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 06 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	60,000,000	-	-	(60,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 06 2.01 0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	-	39,990,000	(260,010,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			200,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	9.01.0.00.0.00.08.0000	**Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama**							**3,260,805,336**	**3,309,202,480**	**3,344,172,480**	**83,367,144**							**3,259,210,336**	**SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA**
	9	**UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN**							**3,260,805,336**	**3,309,202,480**	**3,344,172,480**	**83,367,144**							**3,259,210,336**	**SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA**
	9 01	**KEKHUSUSAN ACEH**							**3,260,805,336**	**3,309,202,480**	**3,344,172,480**	**83,367,144**							**3,259,210,336**	**SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA**
175.	**9 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI SAKIP OPD**				-	**B (61,72) Katagori/Nilai**	**3,245,350,336**	**3,279,202,480**	**3,314,172,480**	**68,822,144**							**3,244,210,336**	**SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA**
		[Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***60.76***	***60.70***	***60.71***			***3,245,350,336***	***3,279,202,480***	***3,314,172,480***	***68,822,144***						***60.72***	***3,244,210,336***	***SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA***
	9 01 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah***				-	***3 Dokumen***	***10,000,000***	***1,500,000***	***1,500,000***	***(8,500,000)***							***10,000,000***	***SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA***
	9 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	10,000,000	1,500,000	1,500,000	(8,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
	9 01 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***				-	***12 Bulan***	***1,782,493,856***	***1,899,586,000***	***1,899,586,000***	***117,092,144***							***1,782,493,856***	***SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA***
	9 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				228 Orang/bulan	228 Orang/bulan	1,782,493,856	1,899,586,000	1,899,586,000	117,092,144	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1,782,493,856	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
	9 01 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	-				-	-	***37,140,000***	***24,000,000***	***24,000,000***	***(13,140,000)***							***36,000,000***	***SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	9 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	9,000,000	2,500,000	2,500,000	(6,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
	9 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	4,000,000	2,000,000	2,000,000	(2,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
	9 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	5,000,000	1,500,000	1,500,000	(3,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
	9 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	1,140,000	-	-	(1,140,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			-	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
	9 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				0 Laporan	0 Laporan	18,000,000	18,000,000	18,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
	9 01 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Dearah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				-	***10 Unit***	-	-	***34,970,000***	***34,970,000***							-	***SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA***
	9 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				-	3 Unit	-	-	34,970,000	34,970,000	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
	9 01 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				-	***12 Bulan***	***1,299,166,480***	***1,297,116,480***	***1,297,116,480***	***(2,050,000)***							***1,299,166,480***	***SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA***
	9 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	500,000	500,000	(500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
	9 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				5 Laporan	5 Laporan	1,298,166,480	1,296,616,480	1,296,616,480	(1,550,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1,298,166,480	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
	9 01 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	-				-	-	***116,550,000***	***57,000,000***	***57,000,000***	***(59,550,000)***							***116,550,000***	***SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA***
	9 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				4 Unit	4 Unit	109,800,000	54,000,000	54,000,000	(55,800,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			109,800,000	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
	9 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				10 Unit	10 Unit	6,750,000	3,000,000	3,000,000	(3,750,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6,750,000	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
176.	**9 01 03**	**PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH**	**Persentase Fatwa yang disosialisasikan Persentase Fatwa yang diSosialisasikan**				-	**85,71% Persen**	**15,455,000**	**30,000,000**	**30,000,000**	**14,545,000**							**15,000,000**	**SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA**
	9 01 03 7.01	***Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama***	***Jumlah Laporan Peningkatan Sumber Daya Ulama dan Lembaga Keagamaan***				-	***4 Laporan***	***10,455,000***	***20,000,000***	***20,000,000***	***9,545,000***							***10,000,000***	***SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA***
	9 01 03 7.01 0003	Pendidikan Kader Ulama	*Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan*				10 Orang	10 Orang	5,455,000	10,000,000	10,000,000	4,545,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
	9 01 03 7.02	***Silaturahmi Ulama-Ulama***	***Jumlah Syiar Keagamaan Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe***				-	***3 Kali***	***5,000,000***	***10,000,000***	***10,000,000***	***5,000,000***							***5,000,000***	***SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	9 01 03 7.02 0002	Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	*Jumlah Ulama yang Berperan dalam Pembangunan Daerah*				20 Orang	20 Orang	5,000,000	10,000,000	10,000,000	5,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
		[Meningkatnya Fatwa yang tersebarluaskan]	***Persentase Fatwa yang di sosialisasikan***	***94***	***0***	***63***			***5,000,000***	***10,000,000***	***10,000,000***	***5,000,000***						***86***	***5,000,000***	***SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA***
	9 01 03 7.01	***Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama***	***Jumlah Laporan Peningkatan Sumber Daya Ulama dan Lembaga Keagamaan***				-	***4 Laporan***	***10,455,000***	***20,000,000***	***20,000,000***	***9,545,000***							***10,000,000***	***SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA***
	9 01 03 7.01 0005	Muzakarah Masalah Keagamaan	*Jumlah Laporan Hasil Muzakarah Masalah Keagamaan*				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	10,000,000	10,000,000	5,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
	9.01.0.00.0.00.09.0000	**Sekretariat Baitul Mal**							**7,575,535,858**	**7,297,601,456**	**7,324,396,856**	**(251,139,002)**							**8,200,859,636**	**SEKRETARIAT BAITUL MAL**
	9	**UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN**							**7,575,535,858**	**7,297,601,456**	**7,324,396,856**	**(251,139,002)**							**8,200,859,636**	**SEKRETARIAT BAITUL MAL**
	9 01	**KEKHUSUSAN ACEH**							**7,575,535,858**	**7,297,601,456**	**7,324,396,856**	**(251,139,002)**							**8,200,859,636**	**SEKRETARIAT BAITUL MAL**
177.	**9 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**				**100 Persen**	**61,95 B Kategori/Poi nt**	**1,867,535,858**	**1,697,601,456**	**1,724,396,856**	**(143,139,002)**					**Sekretariat Baitul Mal**		**2,081,519,011**	**SEKRETARIAT BAITUL MAL**
		[Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***62.15***	***0***	***61.90***			***1,867,535,858***	***1,697,601,456***	***1,724,396,856***	***(143,139,002)***						***61.95***	***2,081,519,011***	***SEKRETARIAT BAITUL MAL***
	9 01 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***				***100 Prosen***	***100 Prosen***	***10,000,000***	***1,500,000***	***1,500,000***	***(8,500,000)***							***13,400,000***	***SEKRETARIAT BAITUL MAL***
	9 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	10,000,000	1,500,000	1,500,000	(8,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			13,400,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9 01 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN***				***100 Prosen 28 Orang/bula n***	***100 Prosen 28 Orang/bula n***	***1,110,131,802***	***1,280,821,000***	***1,280,821,000***	***170,689,198***							***1,248,223,511***	***SEKRETARIAT BAITUL MAL***
	9 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	1,110,131,802	1,280,821,000	1,280,821,000	170,689,198	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			1,248,223,511	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9 01 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Periode Administrasi Umum Perangkat Daerah***				***100 Persen 100 Prosen***	***100 Persen 100 Prosen***	***100,140,000***	***26,000,000***	***26,000,000***	***(74,140,000)***							***155,000,000***	***SEKRETARIAT BAITUL MAL***
	9 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				50 Paket	50 Paket	24,000,000	2,500,000	2,500,000	(21,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			30,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1000 Paket	1000 Paket	20,000,000	2,000,000	2,000,000	(18,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			20,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	5,000,000	1,500,000	1,500,000	(3,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			5,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				12 Dokumen	12 Dokumen	1,140,000	-	-	(1,140,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				40 Laporan	40 Laporan	50,000,000	20,000,000	20,000,000	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			100,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9 01 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Nilai SAKIP OPD***				***100 Prosen 15 Unit***	***61,95 B Kategori/Poi nt***	***30,000,000***	-	***26,795,400***	***(3,204,600)***							***26,795,500***	***SEKRETARIAT BAITUL MAL***
	9 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				10 Unit	10 Unit	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	SEKRETARIAT BAITUL MAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	9 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				-	64 Unit	-	-	26,795,400	26,795,400	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			26,795,500	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9 01 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Periode Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor***				***100 Persen 100 Prosen***	***100 Persen 100 Prosen***	***538,664,056***	***354,780,456***	***354,780,456***	***(183,883,600)***							***553,000,000***	***SEKRETARIAT BAITUL MAL***
	9 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				100 Laporan	100 Laporan	2,600,000	500,000	500,000	(2,100,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			3,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	536,064,056	354,280,456	354,280,456	(181,783,600)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			550,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9 01 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi***				***14 Unit***	***14 Unit***	***78,600,000***	***34,500,000***	***34,500,000***	***(44,100,000)***							***85,100,000***	***SEKRETARIAT BAITUL MAL***
	9 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	33,100,000	19,100,000	19,100,000	(14,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			35,100,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				1 Unit	1 Unit	27,500,000	13,900,000	13,900,000	(13,600,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			30,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				50 Unit	50 Unit	18,000,000	1,500,000	1,500,000	(16,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			20,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL
178.	**9 01 04**	**PROGRAM BAITUL MAL**	**Persentase Peningkatan ZISWAF Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan Periode Penyusunan Perencanaan ZISWAF**				**100 100 Persen Persen 100 Persen**	**100 100 Persen Persen 100 Persen 11,56 Persen**	**5,708,000,000**	**5,600,000,000**	**5,600,000,000**	**(108,000,000)**					**Masyarakat Kota Lhokseumawe**		**6,119,340,625**	**SEKRETARIAT BAITUL MAL**
		[Meningkat Pengumpulan ZISWAF]	***Persentase Peningkatan ZISWAF***	***15.24***	***0***	***11.39***			***5,708,000,000***	***5,600,000,000***	***5,600,000,000***	***(108,000,000)***						***11.56***	***6,119,340,625***	***SEKRETARIAT BAITUL MAL***
	9 01 04 7.01	***Pengelolaan ZISWAF***	***Jumlah Perencanaan Ziswaf yang Disusun Periode Penyusunan Perencanaan ZISWAF***				***1 Dokumen***	***1 Dokumen***	***53,000,000***	-	-	***(53,000,000)***							-	***SEKRETARIAT BAITUL MAL***
	9 01 04 7.01 0001	Penyusunan Perencanaan ZISWAF	*Jumlah Perencanaan Ziswaf yang Disusun*				10 Dokumen	10 Dokumen	53,000,000	-	-	(53,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9 01 04 7.02	***Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal***	***Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf Periode Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal***				***100 Prosen 50 Orang***	***100 Prosen 50 Orang***	***55,000,000***	-	-	***(55,000,000)***							-	***SEKRETARIAT BAITUL MAL***
	9 01 04 7.02 0001	Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF	*Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf*				50 Orang	50 Orang	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9 01 04 7.02 0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM*				6 Dokumen	6 Dokumen	15,000,000	-	-	(15,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9 01 04 7.02 0004	Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	*Jumlah Dokumen tentang Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal*				5 Dokumen	5 Dokumen	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	SEKRETARIAT BAITUL MAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	9 01 04 7.03	***Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf***	***Jumlah Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF Periode Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF***				***100 Persen 100 Prosen***	***100 Persen 100 Prosen***	***5,600,000,000***	***5,600,000,000***	***5,600,000,000***	-							***6,119,340,625***	***SEKRETARIAT BAITUL MAL***
	9 01 04 7.03 0001	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	*Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir*				705 Orang	705 Orang	1,305,000,000	1,020,000,000	1,020,000,000	(285,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			1,500,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9 01 04 7.03 0002	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	*Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Miskin*				88 Orang	88 Orang	2,200,000,000	2,862,000,000	2,862,000,000	662,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			2,400,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9 01 04 7.03 0003	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	*Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Amil*				110 Orang	110 Orang	550,000,000	248,000,000	248,000,000	(302,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			600,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9 01 04 7.03 0004	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	*Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Muallaf*				10 Orang	10 Orang	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			35,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9 01 04 7.03 0005	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	*Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Gharimin*				6 Orang	6 Orang	15,000,000	25,000,000	25,000,000	10,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			28,940,625	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9 01 04 7.03 0006	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	*Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fisabilillah*				84 Orang	84 Orang	108,000,000	158,000,000	158,000,000	50,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			110,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9 01 04 7.03 0007	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	*Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir*				135 Orang	135 Orang	192,000,000	57,000,000	57,000,000	(135,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			195,400,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9 01 04 7.03 0008	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	*Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Infaq*				78 Orang	78 Orang	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			1,250,000,000	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	9.01.1.01.0.00.07.0000	**Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah**							**13,513,838,291**	**9,910,481,846**	**12,004,424,296**	**(1,509,413,995)**							**9,352,087,465**	**DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5,113,286,894**	**3,602,500,000**	**4,392,030,000**	**(721,256,894)**							**3,620,241,600**	**DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH**
	1 01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**5,113,286,894**	**3,602,500,000**	**4,392,030,000**	**(721,256,894)**							**3,620,241,600**	**DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH**
179.	**1 01 07**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH**	**Persentase Dayah dengan Type A**				**10.94 Persen**	**10.61 Persen**	**5,113,286,894**	**3,602,500,000**	**4,392,030,000**	**(721,256,894)**					**Dayah, Balai Pengajian, Pimpinan Dayah, Pimpinan Balai Pengajian, Santri, Tenaga Pendidik**		**3,620,241,600**	**DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH**
		[Meningkatnya Jumlah Dayah yang ber Type A]	***Persentase Dayah dengan Type A***	***23.44***	-	***7.81***			***5,113,286,894***	***3,602,500,000***	***4,392,030,000***	***(721,256,894)***						***10.94***	***3,620,241,600***	***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH***
	1 01 07 7.01	***Pengelolaan Pendidikan Dayah***	***Jumlah Pengelolaan Pendidikan Dayah***				***12 Bulan***	***64 Dayah***	***5,113,286,894***	***3,602,500,000***	***4,392,030,000***	***(721,256,894)***							***3,620,241,600***	***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH***
	1 01 07 7.01 0001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Dibangun*				15 Unit	15 Unit	1,168,190,500	-	-	(1,168,190,500)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	1 01 07 7.01 0001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Dibangun*				-	1 Unit	-	-	235,480,000	235,480,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 01 07 7.01 0003	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah yang Meningkat Mutunya*				2297 Orang	2297 Orang	3,543,241,600	3,542,500,000	4,096,550,000	553,308,400	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			3,500,241,600	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	1 01 07 7.01 0004	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	*Jumlah Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan*				25 Peserta Didik	25 Peserta Didik	243,606,300	60,000,000	60,000,000	(183,606,300)	Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			120,000,000	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	1 01 07 7.01 0005	Pembinaan Manajemen Dayah	*Jumlah Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan*				30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	19,205,800	-	-	(19,205,800)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	1 01 07 7.01 0006	Penelitian dan Pengembangan Dayah	*Jumlah Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan*				65 Satuan Pendidikan	65 Satuan Pendidikan	37,000,000	-	-	(37,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	1 01 07 7.01 0007	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah	*Jumlah Dayah yang Meningkat Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya*				66 Satuan Pendidikan	66 Satuan Pendidikan	50,042,694	-	-	(50,042,694)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	1 01 07 7.01 0008	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah	*Jumlah Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia*				10 Buku	10 Buku	10,000,000	-	-	(10,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	1 01 07 7.01 0011	Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren	*Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren yang Terakreditasi*				7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	22,000,000	-	-	(22,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	1 01 07 7.01 0014	Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah	*Jumlah Kurikulum Dayah Salafiah Tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	-	-	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9	**UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN**							**8,400,551,397**	**6,307,981,846**	**7,612,394,296**	**(788,157,101)**							**5,731,845,865**	**DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH**
	9 01	**KEKHUSUSAN ACEH**							**8,400,551,397**	**6,307,981,846**	**7,612,394,296**	**(788,157,101)**							**5,731,845,865**	**DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH**
180.	**9 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah**				**61.15 Persen**	**B.61.45 Katagori/Poin**	**4,832,043,071**	**4,846,411,520**	**4,904,908,520**	**72,865,449**					**SKPD**		**4,622,845,865**	**DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH**
	9 01 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah***				***7 Dokumen***	***7 Dokumen***	***21,500,000***	***2,500,000***	***2,500,000***	***(19,000,000)***							***13,000,000***	***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH***
	9 01 01 2.01 0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	*Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun*				5 Dokumen	5 Dokumen	8,500,000	-	-	(8,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
		[Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***61.35***	***0***	***61.10***			***4,823,543,071***	***4,846,411,520***	***4,904,908,520***	***81,365,449***						***61.15***	***4,622,845,865***	***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH***
	9 01 01 2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah***				***7 Dokumen***	***7 Dokumen***	***21,500,000***	***2,500,000***	***2,500,000***	***(19,000,000)***							***13,000,000***	***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	9 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				8 Dokumen	8 Dokumen	13,000,000	2,500,000	2,500,000	(10,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			13,000,000	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 01 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***				***651 Orang/bln***	***651 Orang/bln***	***3,920,503,551***	***4,311,812,000***	***4,311,812,000***	***391,308,449***							***3,745,796,345***	***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH***
	9 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				490 Orang/bulan	490 Orang/bulan	3,920,503,551	4,311,812,000	4,311,812,000	391,308,449	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			3,745,796,345	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 01 2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan Adminisrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***				***1 Laporan***	***1 Laporan***	***25,000,000***	-	-	***(25,000,000)***							-	***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH***
	9 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				5 Orang	5 Orang	25,000,000	-	-	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 01 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah***				***1 Laporan***	***1 Laporan***	***124,140,000***	***42,000,000***	***42,000,000***	***(82,140,000)***							***135,500,000***	***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH***
	9 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				50 Paket	50 Paket	18,000,000	2,500,000	2,500,000	(15,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			19,000,000	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				420 Paket	420 Paket	8,000,000	2,500,000	2,500,000	(5,500,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			11,500,000	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	7,000,000	2,000,000	2,000,000	(5,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			10,000,000	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				365 Dokumen	365 Dokumen	1,140,000	-	-	(1,140,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				85 Laporan	85 Laporan	90,000,000	35,000,000	35,000,000	(55,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			95,000,000	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 01 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***18 Unit***	***18 Unit***	***100,000,000***	-	***58,497,000***	***(41,503,000)***							-	***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH***
	9 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				-	9 Unit	-	-	58,497,000	58,497,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				12 Unit	12 Unit	100,000,000	-	-	(100,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				***256 Laporann***	***256 Laporann***	***521,999,520***	***445,799,520***	***445,799,520***	***(76,200,000)***							***524,149,520***	***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH***
	9 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				250 Laporan	250 Laporan	2,700,000	500,000	500,000	(2,200,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			2,850,000	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	370,500,000	359,100,000	359,100,000	(11,400,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			370,500,000	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	9 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				4 Laporan	4 Laporan	148,799,520	86,199,520	86,199,520	(62,600,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			150,799,520	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***57 Unit***	***57 Unit***	***118,900,000***	***44,300,000***	***44,300,000***	***(74,600,000)***							***204,400,000***	***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH***
	9 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				12 Unit	12 Unit	37,100,000	15,500,000	15,500,000	(21,600,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			47,100,000	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				12 Unit	12 Unit	39,800,000	18,800,000	18,800,000	(21,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			40,800,000	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				3 Unit	3 Unit	25,000,000	5,000,000	5,000,000	(20,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			98,000,000	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				22 Unit	22 Unit	17,000,000	5,000,000	5,000,000	(12,000,000)	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			18,500,000	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
181.	**9 01 02**	**PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH**	**Angka Melek Al-Qu'an**				**61.15 undefined 85.41 Persen**	**61.15 undefined 85.41 Angka**	**3,568,508,326**	**1,461,570,326**	**2,707,485,776**	**(861,022,550)**					**Masyarakat Masyarakat, Pelajar, Imum Masjid, Qari-qariah dan Hafizh-Hafizhah Masyarakat, Pelajar, Majlis Taklim, Takmir Masjid,Warga Binaan, Para Khatib Masyarakat, Pelajar, Tokoh Masyarakat, Pendidik**		**1,109,000,000**	**DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH**
	9 01 02 7.07	***Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah***	***Persentase Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah***				***95 Persen***	***95 Persen***	***80,000,000***	-	-	***(80,000,000)***							-	***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH***
	9 01 02 7.07 0001	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Agung Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman*				2 Lembaga	2 Lembaga	80,000,000	-	-	(80,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
		[Meningkatnya Pembinaan Syariat Islam]	***Angka Melek Al-Qur'an***	***88.87***	***0***	***84.56***			***3,488,508,326***	***1,461,570,326***	***2,707,485,776***	***(781,022,550)***						***85.41***	***1,109,000,000***	***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH***
	9 01 02 7.01	***Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam***	***Jumlah Masyarakat yang mendapat Pelatihan Wawasan Keislaman***				***350 Orang***	***350 Orang***	***175,000,000***	***30,000,000***	***30,000,000***	***(145,000,000)***							-	***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH***
	9 01 02 7.01 0001	Pelatihan Mawaris	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Mawaris*				25 Orang	25 Orang	25,000,000	-	-	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 02 7.01 0003	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam	*Jumlah Tokoh Masyarakat yang Dibina dan Ditingkatan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam*				30 Orang	30 Orang	35,000,000	-	-	(35,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 02 7.01 0005	Seminar Problematika Syariat Islam	*Jumlah Peserta yang Mengikuti Seminar Problematika Syariat Islam*				25 Orang	25 Orang	75,000,000	15,000,000	15,000,000	(60,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 02 7.01 0006	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat	*Jumlah Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat yang Terbina Mental Spiritualnya*				100 Orang	100 Orang	40,000,000	15,000,000	15,000,000	(25,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 02 7.02	***Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran***	***Persentase Masyarakat yang mendapat Pemahaman Al-Qur'an***				***95 Persen***	***95 Persen***	***980,000,000***	-	***974,000,000***	***(6,000,000)***							-	***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	9 01 02 7.02 0001	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	*Jumlah Lembaga Tilawah Quran yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan*				2 Lembaga	2 Lembaga	100,000,000	-	-	(100,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 02 7.02 0004	Pelaksanaan MTQ	*Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ*				100 Orang	100 Orang	880,000,000	-	-	(880,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 02 7.02 0004	Pelaksanaan MTQ	*Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ*				-	232 Orang	-	-	974,000,000	974,000,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 02 7.04	***Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam***	***Jumlah laporan Peningkatan Toleransi Umat Beragama Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam***				***12 Bulan 2 Laporan***	***12 Bulan 2 Laporan***	***658,570,326***	***243,570,326***	***401,567,776***	***(257,002,550)***							***221,000,000***	***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH***
	9 01 02 7.04 0001	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam*				1 Dokumen	1 Dokumen	130,000,000	30,000,000	80,000,000	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			138,000,000	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 02 7.04 0003	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan	*Jumlah Dai dan Koordinator Lapangan yang Dibina dan Meningkat Kualitasnya*				25 Orang	25 Orang	105,409,387	105,409,387	105,409,387	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PELAKSANAAN KEISTIMEWAAN ACEH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			38,000,000	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 02 7.04 0004	Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan	*Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan yang Mengikuti Pembinaan*				100 Orang	100 Orang	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 02 7.04 0005	Pelatihan Takmir Mesjid	*Jumlah Takmir Masjid yang Mengikuti Pelatihan*				66 Orang	66 Orang	108,160,939	108,160,939	108,160,939	-	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PELAKSANAAN KEISTIMEWAAN ACEH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			45,000,000	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 02 7.04 0007	Pembinaan Gampong Percontohan Syariat	*Jumlah Gampong Percontohan Syariat yang Dibina*				6 Gampong	6 Gampong	200,000,000	-	-	(200,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 02 7.04 0011	Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan	*Jumlah Unit Sarana Peribadatan yang Didistribusikan dan Diawasi*				5 Unit	5 Unit	35,000,000	-	-	(35,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 02 7.04 0011	Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan	*Jumlah Unit Sarana Peribadatan yang Didistribusikan dan Diawasi*				-	54 Unit	-	-	107,997,450	107,997,450	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 02 7.04 0013	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	*Jumlah Sarana dan Prasarana Agama yang Ditingkatkan Pembangunannya*				3 Unit	3 Unit	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 02 7.05	***Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam***	***Jumlah Pengkajian Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam***				***5 Laporan***	***5 Laporan***	***1,083,000,000***	***1,188,000,000***	***1,255,418,000***	***172,418,000***							***888,000,000***	***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH***
	9 01 02 7.05 0001	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	*Jumlah Laporan Hasil Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman*				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	-	-	(30,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 02 7.05 0004	Pembinaan Keluarga Islami	*Jumlah Keluarga Islam yang Mengikuti Pembinaan*				20 Keluarga	20 Keluarga	40,000,000	-	-	(40,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	9 01 02 7.05 0006	Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat*				45 Orang	45 Orang	75,000,000	-	-	(75,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 02 7.05 0007	Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla*				30 Orang	30 Orang	888,000,000	1,188,000,000	1,255,418,000	367,418,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DANA OTONOMI KHUSUS-ACEH-PELAKSANAAN KEISTIMEWAAN ACEH SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			888,000,000	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 02 7.05 0008	Pembinaan Qari Qariah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Qari Qariah*				25 Orang	25 Orang	50,000,000	-	-	(50,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 02 7.06	***Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam***	***Persenatse Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam***				***12 Bulan***	***12 Bulan***	***591,938,000***	-	***46,500,000***	***(545,438,000)***							-	***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH***
	9 01 02 7.06 0006	Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam*				1 Laporan	1 Laporan	57,500,000	-	-	(57,500,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 02 7.06 0007	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam*				6 Laporan	6 Laporan	240,000,000	-	-	(240,000,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 02 7.06 0007	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam*				-	1 Laporan	-	-	46,500,000	46,500,000	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	9 01 02 7.06 0009	Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Ibadah Haji Daerah*				350 Orang	350 Orang	294,438,000	-	-	(294,438,000)	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			-	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
	J U M L A H								**816,489,376,141**	**718,486,619,382**	**877,410,064,399**	**60,920,688,258**							**665,702,080,623**	

BAB VI

PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Perubahan RKPK Tahun 2026 dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2026 maka diperlukan perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi Triwulan II Tahun 2026 serta memperhatikan Visi, Misi dan Program Wali Kota terpilih.

Perubahan RKPK Tahun 2026 sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 menjadi pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2026 yang akan akan disepakati bersama antara Wali Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (P-APBK) Tahun Anggaran 2026.

WALI KOTA LHOKSEUMAWE

SAYUTI ABUBAKAR

LAMPIRAN

P-RKPK 2026

BAPPEDA KOTA LHOKSEUMAWE

Lampiran 1

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2026

Seluruh nilai pada kolom Rp dikalikan 1.000

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5																13		14 = 13/6 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
				K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			963.462.963		218.649.425		228.489.393		35.476.628		43.341.521						78.818.150	21,76	34,5		78.818.150	3,03	8,18		
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.756.382		1.105.751		1.383.613		326.274		337.029						663.303	55,35	47,94		663.303	9,72	9,82	Sekretariat Majelis	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	64		62,7		62,90		0		0						0		0		0		0			
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			48.000		6.547		8.000		714		-						714	60	8,92		714	12	1,49		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	50		10		10		4		2						6		60		6		12			
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			48.000		6.547		8.000		714		-						714	60	8,92		714	12	1,49		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	50		10		10		4		2						6		60		6		12			
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.417.278		817.711		921.696		305.177		297.007						602.184	80,95	65,33		602.184	12,14	13,63		
		Terlaksananya Administrasi keuangan Pada Sekretariat MPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1120		168		168		72		64						136		80,95		136		12,14			
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.417.278		817.711		921.696		305.177		297.007						602.184	80,95	65,33		602.184	12,14	13,63		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1120		168		168		72		64						136		80,95		136		12,14			
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	90		0		0		0		0						0		0		0		0			
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	90		0		0		0		0						0		0		0		0			
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			300.928		69.616		60.140		1.432		8.277						9.708	37,78	16,14		9.708	7,56	3,23		
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	200		40		40		10		10						20		50		20		10			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1150		230		230		0		77						77		33,48		77		6,7			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	15		3		3		0		3						3		100		3		20			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1840		365		360		0		0						0		0		0		0			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	185		37		37		0		2						2		5,41		2		1,08			
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			41.000		12.162		9.000		1.432		2.267						3.698	50	41,09		3.698	10	9,02		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	200		40		40		10		10						20		50		20		10			
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			29.000		5.300		5.000		-		680						680	33,48	13,6		680	6,7	2,34		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1150		230		230		0		77						77		33,48		77		6,7			
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			25.000		5.000		5.000		-		1.500						1.500	100	30		1.500	20	6		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	15		3		3		0		3						3		100		3		20			
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5.928		1.140		1.140		-		-						-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1840		365		360		0		0						0		0		0		0			
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			200.000		46.015		40.000		-		3.830						3.830	5,41	9,58		3.830	1,08	1,92		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	185		37		37		0		2						2		5,41		2		1,08			
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			120.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			120.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.504.176		150.463		330.176		14.992		21.750						36.742	33,87	11,13		36.742	4,52	2,44		
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	10		2		2		1		0						1		50		1		10			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1860		372		372		33		33						66		17,74		66		3,55			
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.000		997		1.000		492		-						492	50	49,21		492	10	9,84		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	10		2		2		1		0						1		50		1		10			
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.497.176		149.466		329.176		14.500		21.750						36.250	17,74	11,01		36.250	3,55	2,42		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1860		372		372		33		33						66		17,74		66		3,55			
		1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			326.000		61.413		63.600		3.960		9.995						13.955	88,89	21,94		13.955	20	4,28		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		1		1						2		200		2		40			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		1		3		1		1						2		66,67		2		40			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	80		16		16		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			165.500		32.360		33.100		2.160		5.745						7.905	200	23,88		7.905	40	4,78		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		1		1						2		200		2		40			
		1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			127.500		21.662		25.500		1.800		4.250						6.050	66,67	23,73		6.050	40	4,75		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		1		3		1		1						2		66,67		2		40			
		1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			4.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			29.000		7.392		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	80		16		16		0		0						0		0		0		0			
		1.01.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH**			**1.220.717**		**36.059**		**100.717**		**-**		**40.000**						**40.000**	**626,67**	**39,72**		**40.000**	**4,34**	**3,28**	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	
			Meningkatnya mutu pendidikan dengan kebijakan/rekomendasi yang dihasilkan terkait Penyelenggaraan Pendidikan Aceh	Persentase rekomendasi yang dihasilkan terkait Penyelenggaraan Pendidikan Aceh (%)	100		100		100				100						100		100		100		100			
		1.01.08.7.01	Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh			300.000		-		40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan	Jumlah Standar Pendidikan Aceh Tersusun (Dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Telah Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh (Satuan Pendidikan)	11		0		3		0		0						0		0		0		0			
		1.01.08.7.01.0001	Penetapan Standar Pendidikan Aceh			100.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Standar Pendidikan Aceh Tersusun	Jumlah Standar Pendidikan Aceh Tersusun (Dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.08.7.01.0002	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh			200.000		-		40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan yang Telah Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh (Satuan Pendidikan)	11		0		3		0		0						0		0		0		0			
		1.01.08.7.03	Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh			305.717		3.615		5.717		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh	Jumlah Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Tersusun (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Aceh yang Islami (Satuan Pendidikan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.08.7.03.0001	Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah			140.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Tersusun (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.08.7.03.0002	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah			145.717		3.615		5.717		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.08.7.03.0003	Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terimplementasi Kurikulum Aceh yang Islami	Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Aceh yang Islami (Satuan Pendidikan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.08.7.04	Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh			180.000				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Salafiah dan Diniyah yang Meningkat Kompetensinya (Orang)	101		0		30		0		0						0		0		0		0			
		1.01.08.7.04.0001	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah			180.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Salafiah dan Diniyah yang Meningkat Kompetensinya (Orang)	101		0		30		0		0						0		0		0		0			
		1.01.08.7.05	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh			435.000		32.444		55.000		-		40.000						40.000	1566,67	72,73		40.000	13,03	9,2		
			Terselenggaranya Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh (Satuan Pendidikan)	200		40		2		0		40						40		2000		40		20			
				Jumlah Satuan Pendidikan di Aceh yang Dievaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya (Satuan Pendidikan)	178		34		3		0		34						34		1133,33		34		19,1			
				Jumlah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Telah Dilakukan Penilaian Terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal (Satuan Pendidikan)	12		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.08.7.05.0002	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh			195.000		19.722		35.000		-		20.000						20.000	2000	57,14		20.000	20	10,26		
			Terlaksananya Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh (Satuan Pendidikan)	200		40		2		0		40						40		2000		40		20			
		08.7.05.0003	Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh			160.000		12.722		20.000		-		20.000						20.000	1133,33	100		20.000	19,1	12,5		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Satuan Pendidikan di Aceh yang Dievaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya	Jumlah Satuan Pendidikan di Aceh yang Dievaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya (Satuan Pendidikan)	178		34		3		0		34						34		1133,33		34		19,1			
		1.01.08.7.05.0004	Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			80.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Telah Dilakukan Penilaian Terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Telah Dilakukan Penilaian Terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal (Satuan Pendidikan)	12		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**714.156.129**		**163.841.398**		**177.620.129**		**34.495.954**		**42.141.750**						**76.637.704**	**10,13**	**43,15**		**76.637.704**	**2,58**	**10,73**	Dinas Pendidikan dan	
			Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	66,43		66,3		66,32		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			543.205		205.266		215.205		-		3.270						3.270	1,11	1,52		3.270	0,77	0,6		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengaggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		10		10		0		1						1		10		1		10			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	15		0		15		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	15		0		15		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	15		0		15		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	15		0		15		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang diusun (Dokumen)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			325.705		205.266		185.705		-		3.270						3.270	10	1,76		3.270	10	1		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		10		10		0		1						1		10		1		10			
		1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			25.000		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	15		0		15		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			22.500		-		2.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	15		0		15		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			25.000		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	15		0		15		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			25.000		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	15		0		15		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			25.000		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.000		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			5.000		-		1.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			10.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			5.000		-		1.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang diusun (Dokumen)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.01.0012	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan			10.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			671.887.797		162.465.755		175.939.797		33.727.488		41.531.254						75.258.741	8,23	42,78		75.258.741	1,45	11,2		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7400		1.300		1300		428		428						856		65,85		856		11,57			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	16		0		16		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			671.702.797		162.465.755		175.902.797		33.727.488		41.531.254						75.258.741	65,85	42,78		75.258.741	11,57	11,2		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7400		1.300		1300		428		428						856		65,85		856		11,57			
		1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			25.000		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			20.000		-		4.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			25.000		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			25.000		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			15.000		-		3.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4		0		3		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			50.000		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	16		0		16		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			25.000		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			175.000		-		35.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			25.000		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			25.000		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			25.000		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			25.000		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			25.000		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			25.000		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV																	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			25.000		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.555.313		-		55.313		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	10		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1400		0		1300		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5		0		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20		0		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20		0		20		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			212.505		-		12.505		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	10		0		10		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			1.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1400		0		1300		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			25.000		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			42.809		-		2.809		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5		0		20		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			80.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			75.000		-		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20		0		20		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			100.000		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20		0		20		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			908.000		65.108		172.000		-		16.401						16.401	18.33	9,54		16.401	3.67	1,81		
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		0		1						1		25		1		5			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		0		3						3		75		3		15			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	10		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	400		80		80		0		8						8		10		8		2			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			240.000		15.101		40.000		-		1.375						1.375	25	3,44		1.375	5	0,57		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		0		1						1		25		1		5			
		1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			100.000		12.000		20.000		-		4.537						4.537	75	22.69		4.537	15	4,54		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		4		0		3						3		75		3		15			
		1.01.01.2.06.0008	Fasiltasi Kunjungan Tamu			10.000		-		2.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	10		0		10		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			500.000		38.007		100.000		-		10.489						10.489	10	10,49		10.489	2	2,1		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	400		80		80		0		8						8		10		8		2			
		1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			33.000		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			25.000		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.436.105		191.525		152.105		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	2		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		6		25		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.480.000		59.440		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			280.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			14.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	2		0		3		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			150.000		-		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			50.000		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			600.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			687.105		29.735		87.105		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			135.000		102.351		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		6		25		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			34.875.709		878.729		895.709		768.467		582.391						1.350.857	82,92	150,81		1.350.857	16,58	3,87		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		1		4		0		1						1		25		1		5			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15		3		3		0		8						8		266,67		8		53,33			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	25		5		5		1		1						2		40		2		8			
		1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			27.500		8.817		7.500		-		1.430						1.430	25	19,07		1.430	5	5,2		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		1		4		0		1						1		25		1		5			
		1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.167.000		117.825		127.000		-		59.785						59.785	266,67	47,08		59.785	53,33	5,12		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15		3		3		0		8						8		266,67		8		53,33			
		1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			226.399				26.399		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			33.454.811		752.086		734.811		768.467		521.175						1.289.642	40	175,51		1.289.642	8	3,85		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	25		5		5		1		1						2		40		2		8			
		1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			775.000		35.016		155.000		-		8.435						8.435	7,14	5,44		8.435	7,14	1,09		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		0		2		0		1						1		50		1		50			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV																	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	200		0		200		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	50		0		50		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			125.000		-		25.000		-		8.435						8.435	50	33,74		8.435	50	6,75		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		0		2		0		1						1		50		1		50			
		1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			75.000		20.016		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			25.000		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	200		0		200		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			25.000		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			25.000		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			250.000		15.000		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			250.000		-		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	50		0		50		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**218.792.667**		**48.945.441**		**43.844.748**		**-**		**162.643**						**162.643**	**3,85**	**0,37**		**162.643**	**3,07**	**0,07**	Dinas Pendidikan dan	
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun (Persentase)	72,08		51,08		57,57		0		30,86						30,86		53,6		30,86		42,81			
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun (Persentase)	100		93,18		95,73				89,19						89,19		93,17		89,19		89,19			
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun (Persentase)	99,25		99		99,05				98,75						98,75		99,7		98,75		99,5			
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			98.882.833		30.685.556		27.316.994		-		83.879						83.879	7,89	0,31		83.879	7,69	0,08		
			Terkelolanya Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	100		1		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	200		0		200		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	100		1.352		100		0		100						100		100		100		100			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	200		1.000		200		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	200		0		200		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	110		74		110		0		110						110		100		110		100			
				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	110		0		110		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	110		75		110		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	3		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	200		0		200		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	50		0		50		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	250		0		250		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	300		5		300		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	110		35		110		0		110						110		100		110		100			
				Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		10		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	50		0		50		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	50		4		50		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			2.400.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			1.759.180		573.136		159.180		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			1.050.000		-		150.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			1.600.000				100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			2.749.900		167.640		1.149.900		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			800.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			899.790		-		99.790		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			880.000		-		80.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			761.550				61.550		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah			1.050.000		4.028.118		250.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	100		1		100		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			470.175				70.175		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	200		0		200		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			1.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			2.300.000		95.680		500.000		-		50.238						50.238	100	10,05		50.238	100	2,18		
			Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	100		1.352		100		0		100						100		100		100		100			
		1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			1.995.839		2.890.098		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	200		1.000		200		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			2.500.000				500.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	200		0		200		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			1.100.000		135.105		500.000		-		13.641						13.641	100	2,73		13.641	100	1,24		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	110		74		110		0		110						110		100		110		100			
		1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			55.000.000		17.789.540		15.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	110		0		110		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			497.526		2.675		57.526		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	110		75		110		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar			2.586.050				206.050		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	3		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar			1.350.000		-		270.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah			500.000		-		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	200		0		200		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			250.000		-		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			250.000		-		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			50.000		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			50.000		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			100.000		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK			400.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	50		0		50		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			500.000		-		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0044	Penataan Ruang/Sudut Baca			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			700.000		-		500.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	250		0		250		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			1.030.000		284.042		750.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	300		5		300		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru			3.700.000		-		2.600.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2		0		5		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			1.450.000		-		450.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			40.000				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			210.000		8.990		50.000		-		20.000						20.000	100	40		20.000	100	9,52		
			Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	110		35		110		0		110						110		100		110		100			
		1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			3.772.823		4.248.400		2.822.823		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		10		5		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			750.000		-		150.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	50		0		50		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			1.600.000		462.132		500.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	50		4		50		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			80.709.196		14.398.256		12.607.116		-		66.014						66.014	2,13	0,52		66.014	2,08	0,08		
			Terkelolanya Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	150		18		150		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	100		0		100		0		100						100		100		100		100			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	100		600		215		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	200		200		150		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	25		0		25		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	25		35		25		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	60		35		60		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	2000		0		200		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	60		0		60		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	2		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	115		35		115		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	25000		0		25000		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	500		0		500		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	400		2		400		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	20		0		20		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			2.792.080		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			2.100.000				500.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			1.900.000		-		300.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			2.700.000		-		200.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium			3.000.000		-		500.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula			1.800.000		-		300.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah			1.950.000				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			1.109.350		-		109.350		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir			1.000.000		-		200.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah			848.800		-		48.800		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			4.361.500		-		361.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			2.100.000		1.818.114		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			750.000		-		150.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			2.100.000		-		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			1.000.000		-		200.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula			1.000.000		-		200.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			400.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir			250.000		-		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah			250.000		-		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			1.000.000		-		200.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah			1.363.716		1.382.406		363.716		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	150		18		150		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah			500.000		-		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			500.000		-		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			800.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			400.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			2.500.000		97.769		500.000		-		66.014						66.014	100	13,2		66.014	100	2,64		
			Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	100		0		100		0		100						100		100		100		100			
		1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			200.000		1.121.391		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	100		600		215		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			2.250.000		33.608		250.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	200		200		150		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			400.000		17.079		80.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	25		0		25		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			26.700.000		9.270.050		6.700.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	25		35		25		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			125.000		2.570		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	60		35		60		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah			250.000		-		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	2000		0		200		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			250.000		-		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	60		0		60		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			100.000		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			100.000		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			50.000		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			100.000		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			250.000		-		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	2		0		4		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			100.000		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0056	Penataan Ruang/Sudut Baca			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			220.000		5.672		60.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	115		35		115		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru			2.649.950		319.888		209.950		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			4.100.000		112.815		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	25000		0		25000		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			500.000		-		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	500		0		500		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah			800.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Asrama Sekolah yang terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			858.800		-		58.800		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			1.650.000		216.895		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	400		2		400		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK			500.000		-		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	20		0		20		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			29.895.638		3.552.904		3.195.638		-		12.750						12.750	4	0,4		12.750	2,63	0,04		
			Terkelolanya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	250		0		250		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)	250		0		250		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	100		10		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	50		37		33		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	100		0		80		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	76		76		76		0		76						76		100		76		100			
				Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	150		156		150		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	300		0		300		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara (Unit)	30		0		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	250		0		250		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	115		0		115		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			1.745.650		-		145.650		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD			1.100.000				100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	250		0		250		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD			420.853		-		20.853		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)	250		0		250		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD			500.000		567.500		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	100		10		100		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			850.177		-		50.177		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			400.000		178.800		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	50		37		33		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			950.000		-		150.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	100		0		80		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			100.000		51.104		20.000		-		12.750						12.750	100	63,75		12.750	100	12,75		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	76		76		76		0		76						76		100		76		100			
		1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD			8.000.000		2.755.500		2.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	150		156		150		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			500.000		-		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	300		0		300		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah			100.000		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpeliharanya Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara (Unit)	30		0		20		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			100.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			40.000		-		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			80.000				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			1.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			60.000				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru			1.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0031	Penyediaan infrastruktur TIK			120.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0032	Penataan Ruang/Sudut Baca			50.000		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			1.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Perpustakaan Sekolah yang terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik			400.000				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			750.000		-		150.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			250.000		-		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula			200.000				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			2.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			500.000		-		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			80.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			1.032.363		-		32.363		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD			2.025.995		-		25.995		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	250		0		250		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			125.000		-		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	115		0		115		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			1.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			1.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			1.200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			895.600		-		95.600		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			9.305.000		308.725		725.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	60		0		60		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	2		2		22		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	300		0		50		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	10		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	220		0		220		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	200		0		200		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	200		0		200		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			500.000		-		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	60		0		60		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			80.000		97.294		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	2		2		22		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			300.000		-		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	300		0		50		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			75.000		211.432		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			100.000		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			100.000		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	10		0		10		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			970.000		-		250.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	220		0		220		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			250.000		-		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			100.000		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0032	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0033	Penyediaan infrastruktur TIK			120.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0034	Penataan Ruang/Sudut Baca			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik			120.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			100.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			100.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			800.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru			400.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			250.000		-		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium			400.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			400.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah			100.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			800.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	200		0		200		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium			800.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah			100.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			80.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal			400.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan			300.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	200		0		200		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0056	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0057	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			500.000		-		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0060	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			400.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**			**2.376.900**		**-**		**156.900**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	100		100		100				0						0		0		0		0			
		1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			1.386.000		-		126.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	450		0		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang)	110		0		110		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah (Buku)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar			250.000		-		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
		1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar			731.000		-		11.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	450		0		100		0		0						0		0		0		0			
		1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			250.000		-		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang)	110		0		110		0		0						0		0		0		0			
		1.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar			80.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah (Buku)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar			50.000		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Tersiusnnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar			25.000		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			990.900		-		30.900		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dan PNF yang ditetapkan	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	300		0		300		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai (Buku)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			160.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
		1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			630.900		-		30.900		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	300		0		300		0		0						0		0		0		0			
		1.01.03.2.02.0004	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai (Buku)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			80.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			80.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**390.000**		**16.695**		**150.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Angka)	0,7		0,57		0,60				0,5						0,5		83,33		0,5		71,43			
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	31		91,94		30,16				0						0		0		0		0			
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			390.000		16.695		150.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	4		4		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			195.000		-		75.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
		1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			195.000		16.695		75.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	4		4		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**			**720.222**		**15.819**		**120.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)	100		29,96		100				0						0		0		0		0			
		1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			300.222		-		60.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
		1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			150.000		-		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
		1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			150.222		-		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
		1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			420.000		15.819		60.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	4		4		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	4		4		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			150.000		7.910		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	4		4		4		0		0						0		0		0		0			
		1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			120.000		7.910		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	4		4		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			150.000		-		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.07	**PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH**			**19.049.945**		**4.688.262**		**5.113.287**		**654.400**		**660.100**						**1.314.500**	**3,44**	**25,71**		**1.314.500**	**0,39**	**6,9**	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan	
			Meningkatnya Jumlah Dayah yang ber Type A	Persentase Dayah dengan Type A (%)	15,15		5		10,61				0						0		0		0		0			
		1.01.07.7.01	Pengelolaan Pendidikan Dayah			19.049.945		4.688.262		5.113.287		654.400		660.100						1.314.500	3,44	25,71		1.314.500	0,39	6,9		
			Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Dayah	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Dibangun (Unit)	10		30		15		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah yang Meningkat Mutunya (Orang)	11490		2.346		2297		712		712						712		31		712		6,2			
				Jumlah Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan (Peserta Didik)	25		55		25		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan (Satuan Pendidikan)	66		0		30		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan (Satuan Pendidikan)	70		88		65		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dayah yang Meningkat Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya (Satuan Pendidikan)	66		10		66		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia (Buku)	20		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren yang Terakreditasi (Satuan Pendidikan)	10		8		7		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya (Satuan Pendidikan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Satuan Pendidikan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kurikulum Dayah Salafiah Tersusun (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar (Peserta Didik)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.07.7.01.0001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah			1.968.191		177.935		1.168.191		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sarana dan Prasarana Dayah Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Dibangun (Unit)	10		30		15		0		0						0		0		0		0			
		1.01.07.7.01.0002	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sarana dan Prasarana Dayah Terehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.07.7.01.0003	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah			14.779.900		4.189.462		3.543.242		654.400		660.100						1.314.500	31	37,1		1.314.500	6,2	8,89		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Meningkat Mutunya	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah yang Meningkat Mutunya (Orang)	11490		2.346		2297		712		712						712		31		712		6,2			
		1.01.07.7.01.0004	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri			703.606		288.006		243.606		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan	Jumlah Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan (Peserta Didik)	25		55		25		0		0						0		0		0		0			
		1.01.07.7.01.0005	Pembinaan Manajemen Dayah			159.206		-		19.206		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Manajemen Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan	Jumlah Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan (Satuan Pendidikan)	66		0		30		0		0						0		0		0		0			
		1.01.07.7.01.0006	Penelitian dan Pengembangan Dayah			177.000		17.350		37.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan	Jumlah Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan (Satuan Pendidikan)	70		88		65		0		0						0		0		0		0			
		1.01.07.7.01.0007	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah			330.043		8.600		50.043		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Dayah yang Meningkat Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya	Jumlah Dayah yang Meningkat Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya (Satuan Pendidikan)	66		10		66		0		0						0		0		0		0			
		1.01.07.7.01.0008	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah			210.000		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia	Jumlah Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia (Buku)	20		0		10		0		0						0		0		0		0			
		1.01.07.7.01.0009	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah			80.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Terehabilitasi	Jumlah Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.07.7.01.0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah			80.000				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.07.7.01.0011	Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren			82.000		6.910		22.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren	Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren yang Terakreditasi (Satuan Pendidikan)	10		8		7		0		0						0		0		0		0			
		1.01.07.7.01.0012	Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian			100.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya (Satuan Pendidikan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.07.7.01.0013	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Satuan Pendidikan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.07.7.01.0014	Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah			100.000		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Kurikulum Dayah Salafiah Tersusun	Jumlah Kurikulum Dayah Salafiah Tersusun (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.07.7.01.0015	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Jumlah Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar (Peserta Didik)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.07.7.01.0016	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Jumlah Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**495.007.216**		**120.507.079**		**125.971.020**		**28.088.778**		**31.078.892**						**59.167.670**	**21,35**	**46,97**		**59.167.670**	**2,69**	**11,95**		
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**358.069.184**		**88.218.671**		**88.731.680**		**27.943.597**		**26.547.548**						**54.491.145**	**14,57**	**61,41**		**54.491.145**	**2,74**	**15,22**	Dinas Kesehatan	
			Meningkatnya Akuntabilitasi Penyelenggaraan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	68,98		0		68,94		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			110.000		6.748		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	50		3		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			110.000		6.748		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	50		3		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			321.586.521		86.394.726		85.795.021		27.733.012		26.190.634						53.923.646	51,33	62,85		53.923.646	10	16,77		
			Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai serta Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	56980		11.100		11100		2.849		2.849						5.698		51,33		5.698		10			
		1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			321.586.521		86.394.726		85.795.021		27.733.012		26.190.634						53.923.646	51,33	62,85		53.923.646	10	16,77		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	56980		11.100		11100		2.849		2.849						5.698		51,33		5.698		10			
		1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			760.000		3.325		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Data dari Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	11100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	10		10		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	80		0		30		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			400.000				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	11100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			105.000		3.325		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	10		10		10		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			255.000		-		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	80		0		30		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.277.280		121.445		187.280		-		36.346						36.346	12,5	19,41		36.346	2,5	1,6		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	40		3		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200		40		40		0		25						25		62,5		25		12,5			
		1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.040.000		24.468		40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	40		3		3		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			220.000		14.000		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			450.000		29.204		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12.280		1.590		2.280		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			555.000		52.184		75.000		-		36.346						36.346	62,5	48,46		36.346	12,5	6,55		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200		40		40		0		25						25		62,5		25		12,5			
		1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			310.000		-		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		4		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			310.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		4		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			28.858.583		1.150.297		1.891.079		180.055		206.742						386.797	33,2	20,45		386.797	6,64	1,34		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	400		30		30		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1250		250		250		62		62						124		49,6		124		9,92			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	50000		10.000		10000		2.500		2.500						5.000		50		5.000		10			
		1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			7.500		1.200		1.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	400		30		30		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.949.400		714.827		749.400		149.205		168.217						317.422	49,6	42,36		317.422	9,92	8,04		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1250		250		250		62		62						124		49,6		124		9,92			
		1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			24.901.683		434.270		1.140.179		30.850		38.525						69.375	50	6,08		69.375	10	0,28		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	50000		10.000		10000		2.500		2.500						5.000		50		5.000		10			
		1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.166.800		542.130		778.300		30.530		113.826						144.356	8,57	18,55		144.356	1,71	3,46		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	175		35		35		2		10						12		34,29		12		6,86			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	150		30		30		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			171.800		50.039		63.300		-		5.400						5.400	0	8,53		5.400	0	3,14		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			3.040.000		472.091		660.000		30.530		108.426						138.956	34,29	21,05		138.956	6,86	4,57		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	175		35		35		2		10						12		34,29		12		6,86			
		1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			615.000		-		35.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20		0		4		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			340.000		20.000		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	150		30		30		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**131.741.584**		**31.564.569**		**36.167.900**		**145.180**		**4.526.144**						**4.671.325**	**31,25**	**12,92**		**4.671.325**	**3,45**	**3,55**	Dinas Kesehatan	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (Angka)	13,34		4,8		17,50		4,6		4,5						4,5		25,71		4,5		33,73			
				Angka Kematian Ibu (AKI) (Angka)	77		181,7		109,00		136,2		64						64		58,72		64		83,12			
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			44.632.058		13.768.544		13.771.393		-		934.439						934.439	0,4	6,79		934.439	1,43	2,09		
			Terpenuhi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	35		7		7		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	100		20		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	5		50		50		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)	7		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	500		100		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	35		250		250		0		7						7		2,8		7		20			
				Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	200		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	35		250		250		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			12.885.293		-		164.628		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			2.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			2.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			2.681.071		571.763		681.071		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	35		7		7		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			6.130.000		4.296.732		4.450.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	100		20		20		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			80.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			5.002.000		2.636.310		2.602.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	5		50		50		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			3.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)	7		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			770.872		218.978		350.872		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	500		100		100		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			7.524.823		5.932.143		5.404.823		-		934.439						934.439	2,8	17,29		934.439	20	12,42		
			Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	35		250		250		0		7						7		2,8		7		20			
		1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			80.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	200		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			2.238.000		112.618		118.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	35		250		250		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			86.195.166		17.638.267		22.190.847		145.180		3.578.576						3.723.757	19,2	16,78		3.723.757	3,95	4,32		
			Terpenuhinya Layanan Kesehatan untuk Perorangan dan Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	24042		5.247		4476		0		1.571						1.571		35,1		1.571		6,53			
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	22954		0		4272		0		1.586						1.586		37,13		1.586		6,91			
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	21855		0		4069		0		1.517						1.517		37,28		1.517		6,94			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	93888		50		19613		0		7.974						7.974		40,66		7.974		8,49			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	158790		15.400		51512		0		20.445						20.445		39,69		20.445		12,88			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	755048		11.000		152964		0		58.891						58.891		38,5		58.891		7,8			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	91569		10.000		15281		0		10.483						10.483		68,6		10.483		11,45			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	243055		30.000		41837		0		6.080						6.080		14,53		6.080		2,5			
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	26486		500		4566		0		2.518						2.518		55,15		2.518		9,51			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	2602		400		448		0		310						310		69,2		310		11,91			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	11844		2.700		5205		0		2.433						2.433		46,74		2.433		20,54			
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	29363		2.000		8805		0		4.268						4.268		48,47		4.268		14,54			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	15		3		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	500		100		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	50		10		10		0		1						1		10		1		2			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	40		10		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	50		10		10		0		1						1		10		1		2			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	50		10		90		0		1						1		1,11		1		2			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	10		10		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	50		10		10		0		1						1		10		1		2			
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	258957		100		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	334		50		50		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	50		10		10		0		1						1		10		1		2			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	35		7		7		0		7						7		100		7		20			
				Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	750		1		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	7		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	35		7		7		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	12		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	12		2		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1		2		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			1.923.150		355.950		618.000		-		12.800						12.800	35,1	2,07		12.800	6,53	0,67		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	24042		5.247		4476		0		1.571						1.571		35,1		1.571		6,53			
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			572.060		-		50.000		-		-						-	37,13	0		-	6,91	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	22954		0		4272		0		1.586						1.586		37,13		1.586		6,91			
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			538.868		-		121.220		-		1.049						1.049	37,28	0,87		1.049	6,94	0,19		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	21855		0		4069		0		1.517						1.517		37,28		1.517		6,94			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			2.167.213		700		340.000		-		-						-	40,66	0		-	8,49	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	93888		50		19613		0		7.974						7.974		40,66		7.974		8,49			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			1.537.150		150.500		232.000		-		8.800						8.800	39,69	3,79		8.800	12,88	0,57		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	158790		15.400		51512		0		20.445						20.445		39,69		20.445		12,88			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			881.831		24.000		40.600		-		-						-	38,5	0		-	7,8	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	755048		11.000		152964		0		58.891						58.891		38,5		58.891		7,8			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			1.751.780		62.751		185.600		-		-						-	68,6	0		-	11,45	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	91569		10.000		15281		0		10.483						10.483		68,6		10.483		11,45			
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			840.000		13.342		40.000		-		-						-	14,53	0		-	2,5	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	243055		30.000		41837		0		6.080						6.080		14,53		6.080		2,5			
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			1.761.925		4.500		178.000		-		-						-	55,15	0		-	9,51	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	26486		500		4566		0		2.518						2.518		55,15		2.518		9,51			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			479.380		157.000		204.800		-		14.312						14.312	69,2	6,99		14.312	11,91	2,99		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	2602		400		448		0		310						310		69,2		310		11,91			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			1.786.234		111.751		196.234		-		728.112						728.112	46,74	371,04		728.112	20,54	40,76		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	11844		2.700		5205		0		2.433						2.433		46,74		2.433		20,54			
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			867.000		10.175		72.000		-		-						-	48,47	0		-	14,54	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	29363		2.000		8805		0		4.268						4.268		48,47		4.268		14,54			
		1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			320.000		4.200		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	15		3		10		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			385.000		38.310		75.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	500		100		100		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2.194.301		823.249		367.091		-		11.800						11.800	10	3,21		11.800	2	0,54		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	50		10		10		0		1						1		10		1		2			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			472.698		76.360		125.300		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	40		10		10		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.035.657		331.201		630.359		-		9.800						9.800	10	1,55		9.800	2	0,95		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	50		10		10		0		1						1		10		1		2			
		1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			1.853.445		442.950		216.921		-		4.022						4.022	1,11	1,85		4.022	2	0,22		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	50		10		90		0		1						1		1,11		1		2			
		1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			346.000		6.070		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	10		10		10		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			592.810		110.791		202.310		-		4.200						4.200	10	2,08		4.200	2	0,71		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	50		10		10		0		1						1		10		1		2			
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			307.125		40.800		80.850		-		1.000						1.000	0	1,24		1.000	0	0,33		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	258957		100		100		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			1.813.865		471.201		720.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	334		50		50		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			210.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			3.248.160		358.647		688.160		-		43.100						43.100	10	6,26		43.100	2	1,33		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	50		10		10		0		1						1		10		1		2			
		1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			38.287.933		11.515.684		13.376.618		8.347		2.641.381						2.649.729	100	19,81		2.649.729	20	6,92		
			Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	35		7		7		0		7						7		100		7		20			
		1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			156.000		800		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	750		1		100		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			430.297		-		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			336.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	7		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			12.440.531		889.931		1.040.531		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	35		7		7		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			4.847.170		1.348.190		1.487.170		136.833		82.000						218.833	0	14,71		218.833	0	4,51		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			336.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			265.500		-		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	12		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			233.000		7.230		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	12		2		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			240.000		-		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			90.152		68.315		90.152		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			401.731		18.268		401.731		-		400						400	0	0,1		400	0	0,1		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			62.600		49.800		62.600		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			182.600		145.600		182.600		-		15.800						15.800	0	8,65		15.800	0	8,65		
			Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1		2		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			580.660		145.758		180.660		-		13.129						13.129	700	7,27		13.129	20	2,26		
			Tersedianya Faskes yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	35		7		1		0		7						7		700		7		20			
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			580.660		145.758		180.660		-		13.129						13.129	700	7,27		13.129	20	2,26		
			Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	35		7		1		0		7						7		700		7		20			
		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			333.700		12.000		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbitnya Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	50		10		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya			201.400		12.000		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	50		10		10		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			132.300		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**1.790.785**		**577.289**		**446.962**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Kesehatan	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase nakes (dokter, drg, bidan, perawat) di fasyankes yang dilakukan kredensialing (%)	63,14		50,57		52,68		0		0						0		0		0		0			
				Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	87,19		12,79		77,05		57,58		57,51						57,51		74,64		57,51		65,96			
				Persentase nakes di fasyankes pemerintah yang memiliki SIP (%)	98,44		75,25		78,46		85,24		85,02						85,02		108,36		85,02		86,37			
				Persentase nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu (%)	100		72,58		100		87,5		87,5						87,5		87,5		87,5		87,5			
		1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			298.000		9.040		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehan di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			114.000		9.040		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			184.000		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			357.371		24.044		67.371		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			114.000		4.946		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			243.371		19.098		57.371		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.135.414		544.206		349.591		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peserta Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	200		40		40		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.135.414		544.206		349.591		-		-							0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	200		40		40		0		0						0		0		0		0			
		1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**2.244.727**		**113.536**		**456.633**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Kesehatan	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (%)	100		71		100		78,46		76,88						76,88		76,88		76,88		76,88			
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			579.995		76.778		108.543		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbitnya Izin Apotek dan Toko Obat Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			579.995		76.778		108.543		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			199.105				5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbitnya Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			199.105		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			274.250		2.953		98.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbitnya Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			274.250		2.953		98.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			348.855		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbitnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			348.855		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			305.713		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbitnya Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			305.713		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			536.809		33.804		225.090		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Hasil Pemeriksaan Post Market yang Sesuai Standar	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	50		10		10		0		0						0		0		0		0			
		1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			536.809		33.804		225.090		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	50		10		10		0		0						0		0		0		0			
		1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**1.160.937**		**33.014**		**167.844**		**-**		**5.200**						**5.200**	**0**	**3,1**		**5.200**	**0**	**0,45**	Dinas Kesehatan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	100		60,2		78,10		56,1		56,1						56,1		71,83		56,1		56,1			
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			447.235		-		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			282.561		-		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.05.2.01.0002	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman			164.675		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			191.935				40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tercapainya Keluarga yang berprilaku Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat (Keluarga)	5		0		20		0		0						0		0		0		0			
		1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			110.000		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			81.935		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat (Keluarga)	5		0		20		0		0						0		0		0		0			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			521.767		33.014		97.844		-		5.200						5.200	0	5,31		5.200	0	1		
			Tersuunnya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			521.767		33.014		97.844		-		5.200						5.200	0	5,31		5.200	0	1		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**221.206.952**		**23.982.724**		**53.268.024**		**7.043.328**		**9.176.114**						**16.219.442**	**25,95**	**30,45**		**16.219.442**	**18,35**	**7,33**		
		1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**43.537.014**		**6.574.270**		**8.239.532**		**2.308.397**		**1.474.785**						**3.783.182**	**44,65**	**45,92**		**3.783.182**	**45,53**	**8,69**	Dinas Pekerjaan Umum dan	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	70,55		66,9		67,20				0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			719.844		60.407		131.032		-		3.998						3.998	25	3,05		3.998	12,5	0,56		
			Tersuunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		2		0		1						1		50		1		50			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			608.362		59.093		128.932		-		3.998						3.998	50	3,1		3.998	50	0,66		
			Tersuunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		2		0		1						1		50		1		50			
		1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			50.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			50.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			11.482		1.314		2.100		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			32.236.947		5.364.362		5.936.627		2.239.643		1.327.627						3.567.270	100	60,09		3.567.270	1,44	11,07		
			Terpenuhinya Administrasi Keuangan Dinas PUPR	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7000		958		101		101		101						101		100		101		1,44			
		1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			32.236.947		5.364.362		5.936.627		2.239.643		1.327.627						3.567.270	100	60,09		3.567.270	1,44	11,07		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7000		958		101		101		101						101		100		101		1,44			
		1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			646.775		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			446.775				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.274.772		193.696		211.197		19.471		55.519						74.991	25,81	35,51		74.991	36,82	5,88		
			Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		41		10		10						10		24,39		10		200			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	800		1		833		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	25		5		5		1		3						3		60		3		12			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	365		365		365		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	280		56		56		23		25						25		44,64		25		8,93			
		1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			120.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			200.940		35.058		36.750		2.534		4.596						7.130	24,39	19,4		7.130	200	3,55		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		41		10		10						10		24,39		10		200			
		01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			114.823		14.000		21.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	800		1		833		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			86.117		8.999		15.750		1.715		1.715						3.430	60	21,78		3.430	12	3,98		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	25		5		5		1		3						3		60		3		12			
		1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			6.545		760		1.197		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	365		365		365		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			746.348		134.879		136.500		15.222		49.209						64.431	44,64	47,2		64.431	8,93	8,63		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	280		56		56		23		25						25		44,64		25		8,93			
		1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.645.326		121.340		897.450		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Pengadaan Barang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		14		11		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			600.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.273.487		-		763.487		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			771.839		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		121.340		133.963		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		14		11		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.052.749		525.196		793.361		36.709		73.059						109.768	50	13,84		109.768	166,82	2,71		
			Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100		128		24		0		24						24		100		24		24			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	480		12		60		15		15						15		25		15		3,13			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	45		9		852		213		213						213		25		213		473,33			
		1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			11.482		1.600		2.100		-		492						492	100	23,43		492	24	4,29		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100		128		24		0		24						24		100		24		24			
		1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.066.810		147.007		378.000		23.109		31.767						54.876	25	14,52		54.876	3,13	2,66		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	480		12		60		15		15						15		25		15		3,13			
		1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.974.457		376.589		413.261		13.600		40.800						54.400	25	13,16		54.400	473,33	2,76		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	45		9		852		213		213						213		25		213		473,33			
		1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.960.601		309.269		269.865		12.573		14.581						27.154	82,5	10,06		27.154	68,61	1,39		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		4		5		4		4						4		80		4		80			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		1		2		0		1						1		50		1		50			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9		16		4		0		4						4		100		4		44,44			
		1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			191.180		27.333		34.965		5.073		2.839						7.912	100	22,63		7.912	100	4,14		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			612.149		83.557		129.900		7.500		8.292						15.792	80	12,16		15.792	80	2,58		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		4		5		4		4						4		80		4		80			
		1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.042.449		178.930		84.000		-		1.000						1.000	50	1,19		1.000	50	0,1		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		1		2		0		1						1		50		1		50			
		1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			114.823		19.450		21.000		-		2.450						2.450	100	11,67		2.450	44,44	2,13		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9		16		4		0		4						4		100		4		44,44			
		1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			**17.113.750**		**-**		**3.648.846**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pekerjaan Umum dan	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	31,53		0		11,53				0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	50		0		30,00				0						0		0		0		0			
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			4.375.386		-		2.129.011		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	3		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Titik)	1		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			450.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya			1.300.000		-		1.300.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	3		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku			200.000		-		200.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Titik)	1		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya			1.975.386		-		629.011		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.02.2.01.0129	Rehabilitasi Embung			450.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terehabilitasinya embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			12.738.365		-		1.519.835		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM)	1		0		0.5		0		0						0		0		0		0			
				Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun (KM)	0.5		0		0.5		0		0						0		0		0		0			
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	0.3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0.3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan			1.850.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.02.2.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa			3.928.354		-		819.835		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM)	1		0		0,5		0		0						0		0		0		0			
		1.03.02.2.02.0005	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak			1.507.951		-		700.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun (KM)	0.5		0		0.5		0		0						0		0		0		0			
		1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			800.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	0.3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			880.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0.3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			520.000				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa			502.059		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.02.2.02.0053	Rehabilitasi Bendung Irigasi			2.750.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**21.492.754**		**6.217.823**		**3.400.868**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pekerjaan Umum dan	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/ Kota (%)	4,97		4,77		4,83				0						0		0		0		0			
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			21.492.754		6.217.823		3.400.868		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	2	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terkelola dan Berkembang nya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	24		14		26		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	51.66		350		350		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	108		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan			5.903.113		872.581		475.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	24		14		26		0		0						0		0		0		0			
		1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			800.000		-		200.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			10.361.185		5.345.242		2.725.868		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	51.66		350		350		0		0						0		0		0		0			
		1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			4.428.456		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	108		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**14.176.453**		**285.429**		**700.000**		**851.931**		**1.470.913**						**2.322.843**	**100**	**331,83**		**2.322.843**	**8,02**	**16,39**	Dinas Pekerjaan Umum dan	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (%)	1,26		0		0,20				0						0		0		0		0			
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			14.176.453		285.429		700.000		851.931		1.470.913						2.322.843	100	331,83		2.322.843	8,02	16,39		
			Terkelola dan Berkembangnya Sistem Air Limbah Domestik	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan (M^3/Hari)	553		553		133		133		133						133		100		133		24,05			
				Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan	195		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.05.2.01.0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman			2.520.612		285.429		700.000		851.931		1.470.913						2.322.843	100	331,83		2.322.843	24,05	92,15		
			Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan (M^3/Hari)	553		553		133		133		133						133		100		133		24,05			
		1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat			9.941.665		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan	195		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			1.714.176		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**			**12.969.317**		**4.096.842**		**4.455.400**		**3.358.000**		**5.627.270**						**8.985.270**	**33,33**	**201,67**		**8.985.270**	**33,33**	**69,28**	Dinas Pekerjaan Umum dan	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	78,69		75,16		76,02				0						0		0		0		0			
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			12.969.317		4.096.842		4.455.400		3.358.000		5.627.270						8.985.270	33,33	201,67		8.985.270	33,33	69,28		
			Terkelola dan Berkembangnya Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	3		4		4		1		4						4		100		4		133,33			
				Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	5		13		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	3		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan			3.300.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan			2.532.411		547.978		861.000		3.358.000		5.627.270						8.985.270	100	1043,59		8.985.270	133,33	354,81		
			Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	3		4		4		1		4						4		100		4		133,33			
		1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan			5.937.875		3.349.316		3.294.400		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	5		13		10		0		0						0		0		0		0			
		1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			1.199.031		199.549		300.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	3		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**			**250.000**		**-**		**250.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pekerjaan Umum dan	
			Meningkatnya Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (%)	0		0		84,44				0						0		0		0		0			
		1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			250.000				250.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar (Rumah Tangga)	17		0		18		0		0						0		0		0		0			
		1.03.07.2.01.0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota			250.000		-		250.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar (Rumah Tangga)	17		0		18		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			**12.011.939**		**5.564.408**		**2.700.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pekerjaan Umum dan	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	86,67		84,28		66,67				0						0		0		0		0			
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			12.011.939		5.564.408		2.700.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	5		3		3		0		0						0		0		0		0			
		1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			12.011.939		5.564.408		2.700.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	5		3		3		0		0						0		0		0		0			
		1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**91.714.437**		**1.152.713**		**29.512.628**		**525.000**		**603.147**						**1.128.147**	**17,51**	**3,82**		**1.128.147**	**12,25**	**1,23**	Dinas Pekerjaan Umum dan	
			Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	71,54		59,54		61,54				0						0		0		0		0			
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			91.714.437		1.152.713		29.512.628		525.000		603.147						1.128.147	17,51	3,82		1.128.147	12,25	1,23		
			Terselenggaranya Pelayanan Jalan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	312.61		0		412.47		0		0						0		0		0		0			
				Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	20424		0		3696		181		188						188		5,09		188		0,92			
				Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03		0		1		0		1						1		100		1		97,09			
				Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	1		0		33.33		0		0						0		0		0		0			
				Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	2.3		0		2.3		0		0						0		0		0		0			
				Panjang Jembatan yang dibangun (Meter)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			2.756.383		1.103.353		500.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			2.850.500		49.360		450.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	312.61		0		412.47		0		0						0		0		0		0			
		1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan			4.467.846		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan			22.909.324		-		7.130.857		525.000		546.949						1.071.949	5,09	15,03		1.071.949	0,92	4,68		
			Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	20424		0		3696		181		188						188		5,09		188		0,92			
		1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan			6.914.090		-		1.000.000		-		56.198						56.198	100	5,62		56.198	97,09	0,81		
			Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03		0		1		0		1						1		100		1		97,09			
		1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan			2.852.642		-		311.498		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	1		0		33.33		0		0						0		0		0		0			
		1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan			43.711.152		-		20.119.773		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	2.3		0		2.3		0		0						0		0		0		0			
		1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan			5.252.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun (Meter)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			**314.000**		**-**		**82.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pekerjaan Umum dan	
			Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kontruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)	38,46		0		32,31				0						0		0		0		0			
		1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			222.000		-		82.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kompetensi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	20		0		50		0		0						0		0		0		0			
		1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis			14.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpantau dan Tervaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis			208.000		-		82.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	20		0		50		0		0						0		0		0		0			
		1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			92.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Dokumen Ketersediaan Informasi Jasa Kostruksi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota			92.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			**7.627.288**		**91.239**		**278.750**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pekerjaan Umum dan	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan KKPR (Persentase)	73,24		52,71		62,08				0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			4.041.332		60.840		176.250		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota			817.927		46.500		150.000		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang			900.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota			842.555		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota			500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang			980.850		14.340		26.250		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang			500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1.685.956		30.399		102.500		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terslaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang			1.115.672		30.399		102.500		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			570.284		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1.400.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK			600.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.04.0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan			500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR			300.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**54.468.470**		**3.782.156**		**11.996.639**		**-**		**8.250**						**8.250**	**11,11**	**0,07**		**8.250**	**5,26**	**0,02**			
		1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**2.500.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pekerjaan Umum dan	
			Meningkatnya Persentase Warga Negara yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	1,25		0		0,25				0						0		0		0		0			
				Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (%)	100		0		25,00				0						0		0		0		0			
		1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			125.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			125.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			125.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			125.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			2.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Dokumen Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			100.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			475.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			1.425.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Progaram Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**17.346.533**		**-**		**678.943**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pekerjaan Umum dan	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (%)	18,37		76,56		18,27				0						0		0		0		0			
		1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			900.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kawasan yang Aman dan Nyaman	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP			900.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			16.446.533		-		678.943		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	25		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)	1.5		0		15.43		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	8		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			4.090.000		-		90.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	25		0		4		0		0						0		0		0		0			
		1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh			90.826		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh			7.676.764		-		200.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)	1.5		0		15.43		0		0						0		0		0		0			
		1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			4.588.943		-		388.943		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	8		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**			**10.626.106**		**3.782.156**		**2.626.106**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pekerjaan Umum dan	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Persentase Peningkatan Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh (%)	0,341		0,32		0,328				0						0		0		0		0			
		1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			10.626.106		3.782.156		2.626.106		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terhindarnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Direhabilitasi Rumah	10		0		5		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	6		39		20		0		0						0		0		0		0			
		1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			6.026.106		-		150.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang	10		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru			4.600.000		3.782.156		2.476.106		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	6		39		20		0		0						0		0		0		0			
		1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**23.995.830**		**-**		**8.691.590**		**-**		**8.250**						**8.250**	**25**	**0,09**		**8.250**	**20**	**0,03**	Dinas Pekerjaan Umum dan	
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum) (%)	68,48		65,06		65,73				0						0		0		0		0			
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			23.995.830		-		8.691.590		-		8.250						8.250	25	0.09		8.250	20	0,03		
			Terselenggara nya PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	4		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	4		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	4		0		4		0		4						4		100		4		100			
		1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			1.280.000		-		80.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			230.000		-		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	4		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang			280.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			100.000		-		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	4		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			22.105.830		-		8.481.590		-		8.250						8.250	100	0,1		8.250	100	0,04		
			Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	4		0		4		0		4						4		100		4		100			
		1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**129.618.448**		**18.281.212**		**18.682.829**		**6.866.764**		**6.283.544**						**13.150.308**	**22,98**	**70,39**		**13.150.308**	**21,59**	**10,15**		
		1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**42.177.959**		**6.314.304**		**7.313.339**		**2.611.141**		**1.698.741**						**4.309.882**	**57,25**	**58,93**		**4.309.882**	**67,41**	**10,22**	Badan Penanggulangan	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	63,8		62		62,50				0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			530.000		6.136		10.000		-		-						-	26.67	0		-	7,27	0		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		7		15		3		4						4		26.67		4		80			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			110.000		6.136		10.000		-		-						-	26.67	0		-	80	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		7		15		3		4						4		26.67		4		80			
		1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			60.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.362.024		4.064.057		5.940.580		2.611.141		1.487.055						4.098.196	161,6	68,99		4.098.196	8,24	26,68		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2450		735		250		202		202						404		161,6		404		16,49			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.242.024		4.064.057		5.940.580		2.611.141		1.487.055						4.098.196	161,6	68,99		4.098.196	16,49	26,89		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2450		735		250		202		202						404		161,6		404		16,49			
		1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			120.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeiteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.427.000		76.398		87.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3		80		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			600.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			617.000		76.398		77.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3		80		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			170.000		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.771.242		326.159		406.682		-		34.162						34.162	65	8,4		34.162	288,1	0,91		
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		2		0		2						2		100		2		66,67			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		3		0		3						3		100		3		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		1		0		1						1		100		1		50			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		0		1		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		20		0		18						18		90		18		1800			
		1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			120.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			215.000		9.541		15.000		-		-						-	100	0		-	66,67	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		2		0		2						2		100		2		66,67			
		1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			203.142		-		3.142		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2.302.400		279.195		302.400		-		-						-	100	0		-	100	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		3		0		3						3		100		3		100			
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			50.000		7.804		10.000		-		-						-	100	0		-	50	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		1		0		1						1		100		1		50			
		1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5.700		570		1.140		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			875.000		29.049		75.000		-		34.162						34.162	90	45,55		34.162	1800	3,9		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		20		0		18						18		90		18		1800			
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8.856.420		49.151		56.420		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		2		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			2.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			400.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.000.000		22.633		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		2		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.016.853		26.518		16.853		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			439.568				39.568		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.207.972		1.373.863		329.356		-		79.823						79.823	88,89	24,24		79.823	83,33	0,87		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		0		3		2		2						2		66,67		2		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		4		2		0		2						2		100		2		50			
		1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			21.500		2.000		1.500		-		-						-	100	0		-	100	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			925.000		109.499		125.000		-		50.823						50.823	66,67	40,66		50.823	100	5,49		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		0		3		2		2						2		66,67		2		100			
		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			8.261.472		1.262.363		202.856		-		29.000						29.000	100	14,3		29.000	50	0,35		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		4		2		0		2						2		100		2		50			
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.003.300		418.539		483.300		-		97.700						97.700	75	20,22		97.700	47,62	3,25		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15		10		10		0		10						10		100		10		66,67			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		3		5		0		5						5		100		5		166,67			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			173.300		27.770		33.300		-		8.000						8.000	100	24,02		8.000	100	4.62		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
		1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.900.000		362.899		380.000		-		88.300						88.300	100	23,24		88.300	66,67	4,65		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15		10		10		0		10						10		100		10		66,67			
		1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			60.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			120.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			170.000		17.950		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			380.000		9.920		20.000		-		1.400						1.400	100	7		1.400	166,67	0,37		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		3		5		0		5						5		100		5		166,67			
		1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			**18.757.316**		**327.226**		**872.316**		**-**		**232.491**						**232.491**	**36,15**	**26,65**		**232.491**	**10,57**	**1,24**	Badan	
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	100		100		100				0						0		0		0		0			
				Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100		100		100				0						0		0		0		0			
				Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	100		100		100				0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			765.000		55.346		365.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Layanan Informasi Rawan Bencana Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada	1000		0		50		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			465.000		55.346		65.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada	1000		0		50		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			300.000				300.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			9.336.036		107.517		236.036		-		-						-	16,67	0		-	11,11	0		
			Terlaksananya Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	10		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis	200		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	50		0		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	50		15		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
				Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	4		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota			400.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			841.629		29.957		41.629		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	10		0		10		0		0						0		0		0		0			
		3.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			1.200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis	200		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			840.303		-		40.303		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	50		0		20		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			1.650.000		-		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			431.229		50.097		31.229		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	50		15		20		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota			1.200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			432.875		11.431		32.875		-		-						-	100	0		-	100	0		
			Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
		1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			1.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			840.000		16.032		40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	4		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			5.084.998		148.123		164.998		-		99.766						99.766	85	60,47		99.766	2,43	1.96		
			Terlaksananya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	100		43		50		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	40		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	500		44		50		0		85						85		170		85		17			
				Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas			650.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			470.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			831.998		106.959		31.998		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	100		43		50		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota			530.000				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	40		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			1.658.000		41.164		133.000		-		99.766						99.766	170	75.01		99.766	17	6,02		
			Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	500		44		50		0		85						85		170		85		17			
		1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit			610.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			335.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			3.571.282		16.239		106.282		-		132.725						132.725	66.67	124.88		132.725	16.67	3.72		
			Tertatanya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan	50		0		30		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1		1		1		0		2						2		200		2		200			
				Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			325.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			600.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			800.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota			389.136		-		39.136		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan	50		0		30		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			336.955		16.239		36.955		-		132.725						132.725	200	359.15		132.725	200	39.39		
			Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1		1		1		0		2						2		200		2		200			
		1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			160.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota			130.000				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota			140.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota			230.191		-		30.191		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota			60.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			**7.802.288**		**62.178**		**152.288**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Badan	
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	100		100		100				0						0		0		0		0			
				Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	100		100		100				0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			5.293.988		62.178		143.988		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksanannya Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	1		0		7		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV																	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
				jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			100.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			113.400		6.120		13.400		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			300.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran			425.000		-		75.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	1		0		7		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)			500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)			300.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0012	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran			300.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0014	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0015	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan			50.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0016	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			1.405.588		56.058		55.588		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan,	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga			600.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			408.300		-		8.300		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran di instansi pemerintahan dan Non Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			208.300		-		8.300		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Investigasi Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			850.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran			300.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana			350.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			1.050.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia			125.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi			125.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi			150.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi			150.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.05.0006	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran			150.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.05.0007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar			150.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.05.0009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**39.338.090**		**8.577.711**		**10.098.535**		**4.175.923**		**4.165.280**						**8.341.203**	**8,92**	**82,6**		**8.341.203**	**2,97**	**21,2**	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kesbangpol	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	64,1		62,7		63,00				0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			53.500		5.783		10.700		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		10		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			50.000		5.507		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		10		5		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3.500		277		700		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			27.369.140		7.152.632		9.230.764		4.046.346		4.005.963						8.052.309	28,57	87,23		8.052.309	28,57	29,42		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14		14		14		4		4						4		28,57		4		28,57			
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			27.369.140		7.152.632		9.230.764		4.046.346		4.005.963						8.052.309	28,57	87,23		8.052.309	28,57	29,42		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14		14		14		4		4						4		28,57		4		28,57			
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.623.481		11.512		5.981		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	350		0		350		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12		4		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	17		1		17		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	55		20		55		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			4.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			3.396.481		-		2.981		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	350		0		350		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			21.000		3.210		1.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12		4		12		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			101.000		6.117		1.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	17		1		17		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			81.000		2.185		1.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	55		20		55		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			493.575		74.909		11.015		7.449		16.677						24.126	5,56	219,02		24.126	1,11	4,89		
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	50		55		50		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	500		1.050		500		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		12		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	150		10		30		7		10						10		33,33		10		6,67			
		1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			122.875		25.614		2.875		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	50		55		50		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			39.000		5.580		1.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	500		1.050		500		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			101.000		2.939		1.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5.700		798		1.140		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		12		12		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			205.000		39.978		5.000		7.449		16.677						24.126	33,33	482,51		24.126	6,67	11,77		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	150		10		30		7		10						10		33,33		10		6,67			
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.185.309		88.700		9.309		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		3		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			204.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			208.431		-		4.431		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			688.878		-		4.878		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			80.000		88.700		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		3		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.241.426		1.081.585		817.107		98.778		116.030						214.808	12,5	26,29		214.808	7,5	4,1		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						3		25		3		5			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		12		3		3						3		25		3		25			
		1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			8.089		1.104		2.089		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		12		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			602.500		110.872		122.500		18.295		22.030						40.325	25	32.92		40.325	5	6.69		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						3		25		3		5			
		1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4.610.837		969.610		692.518		80.483		94.000						174.483	25	25,2		174.483	25	3,78		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		12		3		3						3		25		3		25			
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.371.660		162.590		13.660		23.350		26.611						49.961	30	365.74		49.961	4	3,64		
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25		5		5		1		1						1		20		1		4			
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	16		16		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			137.975		22.688		4.775		6.200		3.925						10.125	100	212.04		10.125	20	7,34		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
		1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			622.113		119.902		5.313		17.150		22.686						39.836	20	749,75		39.836	4	6,4		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25		5		5		1		1						1		20		1		4			
		1.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			4.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			141.152		15.000		1.152		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		2		2		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.000		5.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	16		16		0		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			366.420		-		2.420		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**21.542.795**		**2.999.794**		**246.350**		**79.700**		**187.032**						**266.732**	**11,9**	**108,27**		**266.732**	**11,54**	**1,24**	Satuan Polisi Pamong	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100		100		90,00		22,5		50						50		55,56		50		50			
				Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan (%)	97,3		100		95,77		23,9		47,8						47,8		49,91		47,8		49,13			
				Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%)	17,35		17,25		17,28		0		0						0		0		0		0			
				Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	100				50,00		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			4.160.122		329.054		176.550		50.900		92.004						142.904	8,93	80,94		142.904	7	3,44		
			Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
				Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	12		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	30		0		30		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	8		0		8		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	50		0		50		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang)	7		0		7		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	534		0		534		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	54		0		54		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	60		3		12		3		3						3		25		3		5			
				Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan	30		0		30		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	30		0		30		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	1		0		1173		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			87.208		10.779		7.208		-		26.804						26.804	100	371,88		26.804	100	30,74		
			Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
		1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			600.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	12		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	30		0		30		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	8		0		8		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional			120.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	50		0		50		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.01.0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP			60.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Melakukan Penilaian terhadap kinerja Pejabat Fungsional	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.01.0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan			120.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			meningkatnya Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang)	7		0		7		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat			600.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	534		0		534		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas			120.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	54		0		54		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			1.472.915		318.275		169.342		50.900		65.200						116.100	25	68,56		116.100	5	7,88		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	60		3		12		3		3						3		25		3		5			
		1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			80.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peruran kepala daerah			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan	30		0		30		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	30		0		30		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.01.0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	1		0		1173		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja			60.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			702.900		79.616		2.900		9.600		16.581						26.181	0,37	902,79		26.181	3,7	3,72			
			Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	50		0		50		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	50		0		50		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	6		0		6		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	6		60		60		2		2						2		3,33		2		33,33			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			80.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)			140.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			80.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	50		0		50		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah			80.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah			80.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	50		0		50		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			60.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	6		0		6		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			81.400		79.616		1.400		9.600		16.581						26.181	3,33	1870,07		26.181	33,33	32,16			
			Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	6		60		60		2		2						2		3,33		2		33,33			
		1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			61.500		-		1.500		-		-						-	0	0		-	0	0			
			TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			887.600				27.600		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	6		0		6		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah			80.200		-		200		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	6		0		6		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah			725.000		-		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			82.400		-		2.400		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.7.04	Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh			15.792.172		2.591.124		39.301		19.200		78.446						97.646	30	248,46		97.646	27,27	0,62		
			Terlaksananya Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Telah Disusun dan Ditetapkan (Dokumen)	6		0		6		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam (Laporan)	1		12		1		1		1						1		100		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam (Laporan)	1		12		1		0		1						1		100		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan dan sosialisasi Qanun dan peraturan Perundang-undangan Syariat Islam (Laporan)	30		0		30		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota (Laporan)	30		0		30		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota (Laporan)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku (Laporan)	1		6		1		0		1						1		100		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi Dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam (Laporan)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim (Laporan)	30		0		30		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi (Doumen)	30		0		30		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.7.04.0001	Penyusunan Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam			80.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Disusun dan Ditetapkan	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Telah Disusun dan Ditetapkan (Dokumen)	6		0		6		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.7.04.0002	Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam			1.189.617		260.425		21.545		19.200		20.847						40.047	100	185,87		40.047	100	3,37		
			Terlaksananya Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam (Laporan)	1		12		1		1		1						1		100		1		100			
		1.05.02.7.04.0003	Pengawasan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam			101.000		56.043		1.000		-		14.600						14.600	100	1460		14.600	100	14,46		
			Terlaksananya Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam (Laporan)	1		12		1		0		1						1		100		1		100			
		1.05.02.7.04.0004	Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam			204.000		-		4.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan dan sosialisasi Qanun dan peraturan Perundang-undangan Syariat Islam (Laporan)	30		0		30		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.7.04.0005	Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota, yang Telah Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota (Laporan)	30		0		30		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.7.04.0006	Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota			140.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota (Laporan)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.7.04.0007	Pelaksanaan Eksekusi Cambuk sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku			142.755		55.023		2.755		-		42.999						42.999	100	1560,6		42.999	100	30,12		
			Terlaksananya Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku (Laporan)	1		6		1		0		1						1		100		1		100			
		1.05.02.7.04.0008	Konsultasi dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam			80.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Konsultasi dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi Dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam (Laporan)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.7.04.0009	Pemberdayaan untuk Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim			205.000		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim (Laporan)	30		0		30		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.7.04.0010	Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi			205.000		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi (Doumen)	30		0		30		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.7.04.0011	Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam			13.244.800		2.219.633		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**47.887.609**		**4.416.258**		**4.559.626**		**948.238**		**968.113**						**1.916.351**	**11,81**	**42,03**		**1.916.351**	**4,16**	**4**		
		1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**27.353.257**		**3.218.056**		**3.519.626**		**948.238**		**963.313**						**1.911.551**	**25,86**	**54,31**		**1.911.551**	**9,81**	**6,99**	Dinas Sosial	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	66,7				66,45				0						0		0		0		0			
		01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			257.937		3.200		17.170		-		-						-	12,5	0		-	1,9	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Tersiuunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	35		7		8		4		2						2		25		2		5,71			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			133.384		3.200		13.000		-		-						-	25	0		-	5,71	0		
			Tersiuunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	35		7		8		4		2						2		25		2		5,71			
		1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			64.362		-		4.170		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			60.192		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.040.979		2.786.623		3.009.016		948.238		859.633						1.807.871	25	60,08		1.807.871	5	13,86		
			Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang selesai Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1500		300		300		75		75						75		25		75		5			
		1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.040.979		2.786.623		3.009.016		948.238		859.633						1.807.871	25	60,08		1.807.871	5	13,86		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1500		300		300		75		75						75		25		75		5			
		1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			240.767		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang selesai tepat Waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			160.511		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			40.128		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			40.128		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.297.831		61.949		106.140		-		33.771						33.771	43	31,82		33.771	20,86	2,6		
			Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang selesai Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		0		10		0		10						10		100		10		50			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	40		25		50		0		5						5		10		5		12,5			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	200		80		100		0		23						23		23		23		11,5			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	35		15		20		0		15						15		75		15		42,86			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	365		365		360		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30		30		30		0		15						15		50		15		50			
		1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			204.639		-		4.000		-		998						998	100	24,95		998	50	0,49		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		0		10		0		10						10		100		10		50			
		1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			215.639		8.987		15.000		-		1.855						1.855	10	12,37		1.855	12,5	0,86		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	40		25		50		0		5						5		10		5		12,5			
		1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			60.192		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			68.192		5.600		8.000		-		1.850						1.850	23	23,13		1.850	11,5	2,71		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	200		80		100		0		23						23		23		23		11,5			
		1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			106.313		3.607		8.000		-		1.630						1.630	75	20,37		1.630	42,86	1,53		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	35		15		20		0		15						15		75		15		42,86			
		1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			8.764		798		1.140		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	365		365		360		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			30.096		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			603.995		42.957		70.000		-		27.438						27.438	50	39,2		27.438	50	4,54		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30		30		30		0		15						15		50		15		50			
		1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			9.560.365		29.526		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang selesai Tepat Waktu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		0		6		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		3		2		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			2.006.393		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			300.959		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			401.279		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			401.279		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		0		6		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			401.279		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.006.393		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.006.393		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.036.393		29.526		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		3		2		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.772.126		260.737		257.500		-		56.509						56.509	16,67	21,95		56.509	1,01	3,19		
			Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang selesai Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	30		30		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	150		30		12		3		3						3		25		3		2			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1150		420		48		12		12						12		25		12		1,04			
		1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			11.331		958		1.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	30		30		20		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			356.959		48.867		56.000		-		23.909						23.909	25	42,69		23.909	2	6,7		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	150		30		12		3		3						3		25		3		2			
		1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.403.836		210.911		200.000		-		32.600						32.600	25	16.3		32.600	1,04	2,32		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1150		420		48		12		12						12		25		12		1,04			
		1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.183.252		76.021		99.800		-		13.400						13.400	26,67	13,43		13.400	22,22	1,13		
			Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang selesai Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		4		1		0		1						1		100		1		100			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		8		3		0		1						1		33,33		1		33,33			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		0		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		27		7		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			195.111		27.039		34.600		-		10.700						10.700	100	30,92		10.700	100	5,48		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		4		1		0		1						1		100		1		100			
		1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			265.967		19.900		25.200		-		2.700						2.700	33,33	10,71		2.700	33,33	1,02		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		8		3		0		1						1		33,33		1		33,33			
		1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			170.511		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		0		20		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			60.128		20.000		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		3		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			90.256		9.082		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		27		7		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			401.279		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			**3.469.447**		**509.079**		**145.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Sosial	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial (%)	79,66				79,66		80		80						80		100,43		80		100,43			
				Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/ AIDS	79,66				79,66		80		80						80		100,43		80		100,43			
				Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	80		0		80		80		80						80		100		80		100			
				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	59,32				59,32				0						0		0		0		0			
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			3.469.447		509.079		145.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Terhadap Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan Kemiskinan	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	50		64		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	5		1		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan	10		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)	30		0		15		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti (Laporan)	12		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)	10		0		20		0		0						0		0		0		0			
		1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			160.111		481.539		60.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	50		64		20		0		0						0		0		0		0			
		1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			1.289.676		27.540		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	5		1		2		0		0						0		0		0		0			
		1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			143.481		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan	10		0		10		0		0						0		0		0		0			
		1.06.02.2.03.0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota			401.279		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya peran Puskesos sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota			617.343		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi			426.279		-		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)	30		0		15		0		0						0		0		0		0			
		1.06.02.2.03.0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial			200.639		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti (Laporan)	12		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			230.639				30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)	10		0		20		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**10.141.203**		**650.763**		**720.000**		**-**		**4.800**						**4.800**	**3,33**	**0,67**		**4.800**	**1,54**	**0,05**	Dinas Sosial	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	80				80				0						0		0		0		0			
				Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	80		0		80				30						30		37,5		30		37,5			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	80		0		80				20						20		25		20		25			
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	80		0		80				18						18		22,5		18		22,5			
				Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	60		0		60				30						30		50		30		50			
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			6.692.055		631.787		670.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100		100		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20		2		15		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		15		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		50		50		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50		70		50		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15		10		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		9		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		10		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan			2.206.393		-		500.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100		0		10		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang			1.736.393		496.300		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100		100		10		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu			1.746.393		78.344		40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20		2		15		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			82.230		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		15		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			97.230		16.301		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		50		50		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			230.639		27.482		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		70		50		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			72.230		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			72.230				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan			52.166		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			135.384		7.832		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15		10		10		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan			130.384		5.528		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		9		10		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota			130.384		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan	10		0		10		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			3.449.149		18.976		50.000		-		4.800						4.800	13,33	9,6		4.800	2,86	0,14		
			Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Kepada PMKS lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15		10		15		0		6						6		40		6		40			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20		4		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		50		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			110.320		5.539		10.000		-		4.800						4.800	40	48		4.800	40	4,35		
			Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15		10		15		0		6						6		40		6		40			
		1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan			100.320		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan			1.103.836		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang			401.279		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu			616.918		13.437		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20		4		5		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti			401.279		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			40.128		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA			225.639		-		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		50		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			40.128		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah,	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			60.192		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			80.256		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			68.217		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan			100.320		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			100.320		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			**3.440.867**		**5.255**		**30.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Sosial	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	79,41		0		79,41				0						0		0		0		0			
				Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)	3,18		0		3,18				0						0		0		0		0			
				Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	50		0		50				99,46						99,46		198,92		99,46		198,92			
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (%)	50		0		50				0						0		0		0		0			
		1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			1.003.196		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			terlaksananya Pemeliharaan terhadap Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar			321.279		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar			321.279		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar			200.639		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.05.2.01.0004	Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi			160.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			2.437.671		5.255		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	93996		93.996		93996		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	28439		0		1000		0		0						0		0		0		0			
		1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			215.639		5.255		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	93996		93.996		93996		0		0						0		0		0		0			
		1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			802.557		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			1.203.836		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			215.639		-		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	28439		0		1000		0		0						0		0		0		0			
		1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			**2.591.876**		**9.231**		**120.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Sosial	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100		0		100		100		100						100		100		100		100			
				Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	100		0		100		100		100						100		100		100		100			
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			2.136.520		-		90.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		10		0		0						0		0		0		0			
		1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan			827.557		-		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		10		0		0						0		0		0		0			
		1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang			822.557		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		10		0		0						0		0		0		0			
		1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			155.447		-		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		10		0		0						0		0		0		0			
		1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial			115.320		-		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		10		0		0						0		0		0		0			
		1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			215.639		-		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		10		0		0						0		0		0		0			
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			455.355		9.231		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pemberdayaan Organisasi dalam Kesiapsigaan Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15		10		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana			112.358		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			142.358		9.231		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15		10		20		0		0						0		0		0		0			
		1.06.06.2.02.0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda			200.639		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**			**890.959**		**23.874**		**25.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Sosial	
			Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			890.959		23.874		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			464.681		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			225.639		23.874		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			200.639		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**31.285.449**		**7.051.198**		**7.234.508**		**1.781.704**		**1.736.604**						**3.518.308**	**24,88**	**48,63**		**3.518.308**	**9,58**	**11,25**		
		2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**27.691.577**		**5.806.827**		**6.135.636**		**1.781.704**		**1.736.604**						**3.518.308**	**41,98**	**57,34**		**3.518.308**	**19,16**	**12,71**	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	69,25		68,85		68,95				0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			110.000		6.077		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	25		13		5		3		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			110.000		6.077		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	25		13		5		3		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			23.060.793		5.147.058		5.202.581		1.712.580		1.629.543						3.342.122	36,64	64,24		3.342.122	7,33	14,49		
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3480		700		696		255		255						255		36,64		255		7,33			
		2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			23.060.793		5.147.058		5.202.581		1.712.580		1.629.543						3.342.122	36,64	64,24		3.342.122	7,33	14,49		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3480		700		696		255		255						255		36,64		255		7,33			
		2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			106.000		-		16.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	340		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7		0		5		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			22.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	340		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			2.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			82.000		-		16.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7		0		5		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.076.823		104.826		193.263		-		19.504						19.504	41	10,09		19.504	34,17	1,81		
			Meningkatnya efektivitas dan efisiensi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		3		0		3						3		100		3		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		3		5		0		5						5		100		5		100			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	120		33		120		0		6						6		5		6		5			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			329.123		19.004		61.123		-		10.569						10.569	100	17.29		10.569	100	3,21		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		3		0		3						3		100		3		100			
		2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			64.000		7.700		11.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			186.000		15.644		40.000		-		1.737						1.737	100	4,34		1.737	100	0,93		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		3		5		0		5						5		100		5		100			
		2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5.700		798		1.140		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			480.000		61.680		80.000		-		7.198						7.198	5	9		7.198	5	1,5		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	120		33		120		0		6						6		5		6		5			
		2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			12.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			319.000		5.939		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya penggunaan BMD secara efektif dan efesien dalam mendukung urusan pemerintahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	40		7		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			4.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			108.000		-		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		10		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			207.000		5.939		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	40		7		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.270.461		434.784		454.492		64.425		65.208						129.633	66,67	28,52		129.633	40	5,71		
			Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		2		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		2		12		3		3						6		50		6		10			
		2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			8.000		1.200		2.000		-		500						500	100	25		500	100	6,25		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
		2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.057.131		137.026		211.426		27.858		29.458						57.316	50	27,11		57.316	10	5,42		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		2		12		3		3						6		50		6		10			
		2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.205.330		296.558		241.066		36.567		35.250						71.817	50	29,79		71.817	10	5,96		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		2		12		3		3						6		50		6		10			
		2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			748.500		108.143		149.300		4.700		22.349						27.049	57,5	18,12		27.049	17,5	3,61		
			Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		2		2		2		2						2		100		2		20			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		15		20		0		6						6		30		6		30			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			169.500		26.890		33.300		1.800		7.699						9.499	100	28,53		9.499	20	5,6		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
		2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			257.000		51.353		51.000		2.900		9.750						12.650	100	24,8		12.650	20	4,92		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		2		2		2		2						2		100		2		20			
		2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			55.000		9.900		15.000		-		4.900						4.900	30	32,67		4.900	30	8,91		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		15		20		0		6						6		30		6		30			
		2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			267.000		20.000		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**			**85.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan	
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja (%)	50				0		0								0		0		0		0			
		2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			85.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya kualitas penyusunan Dokumen Rencana Makro (RTK) Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			85.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersuunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			**1.873.872**		**1.150.693**		**903.872**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya (%)	88,1		89,87		86,49				0						0		0		0		0			
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			1.748.872		1.144.869		883.872		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya kualitas tenaga kerja berdasarkan kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	60		204		40		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	20		12		15		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n (Kesepakatan)	66		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			1.583.872		1.142.849		868.872		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	60		204		40		0		0						0		0		0		0			
		2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			90.000		2.019		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	20		12		15		0		0						0		0		0		0			
		2.07.03.2.01.0006	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas			75.000				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n (Kesepakatan)	66		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			105.000		5.824		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya kualitas lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	20		12		15		0		0						0		0		0		0			
		2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			105.000		5.824		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	20		12		15		0		0						0		0		0		0			
		2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			**917.000**		**18.539**		**130.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (%)	13,36		3,77		10,03		16,67		0						0		0		0		0			
		2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			343.000		-		40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Pelayanan Antar Kerja di daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	40		0		40		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	380		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	20		0		20		0		0						0		0		0		0			
		2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja			47.000				10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	40		0		40		0		0						0		0		0		0			
		2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			65.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	380		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja			191.000		-		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	20		0		20		0		0						0		0		0		0			
		2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			102.000		13.609		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya penerbitan Izin LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga)	1		11		5		0		0						0		0		0		0			
		2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS			102.000		13.609		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga)	1		11		5		0		0						0		0		0		0			
		2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			472.000		4.929		65.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Meningkatnya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2350		179		425		30		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	100		0		50		0		0						0		0		0		0			
		2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			72.000		4.929		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2350		179		425		30		0						0		0		0		0			
		2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja			380.000		-		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	100		0		50		0		0						0		0		0		0			
		2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			**718.000**		**75.140**		**65.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan	
			Meningkatnya pekerja yang terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	450				200		209		0						0		0		0		0			
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			519.000		-		35.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya penerapan PP dan PKB oleh perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	60		0		10		1		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			162.000		-		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	60		0		10		1		0						0		0		0		0			
		2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan			137.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			220.000		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			199.000		75.140		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya pencegahan kasus perselisihan hubungan Industrial	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	16		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	65		9		15		1		0						0		0		0		0			
				Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	16		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	16		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	16		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			127.000		75.140		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	65		9		15		1		0						0		0		0		0			
		2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	16		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			12.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	16		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**35.320.250**		**3.688.733**		**5.084.850**		**1.196.006**		**1.357.750**						**2.553.756**	**55,29**	**50,22**		**2.553.756**	**15,04**	**7,23**		
		2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**28.425.089**		**3.661.158**		**4.316.689**		**1.196.006**		**1.213.866**						**2.409.872**	**99,37**	**55,83**		**2.409.872**	**29,32**	**8,48**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	68,54		0		68,50		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			127.000		4.197		15.000		-		990						990	35,71	6,6		990	14,29	0,78		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	35		7		14		3		2						5		35,71		5		14,29			
		2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			127.000		4.197		15.000		-		990						990	35,71	6,6		990	14,29	0,78		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	35		7		14		3		2						5		35,71		5		14,29			
		2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			23.542.028		3.187.488		3.811.028		1.167.332		1.170.708						2.338.040	750	61,35		2.338.040	9,69	9,93		
			Terlaksananya Administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3095		410		40		150		150						300		750		300		9,69			
		2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			23.542.028		3.187.488		3.811.028		1.167.332		1.170.708						2.338.040	750	61,35		2.338.040	9,69	9,93		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3095		410		40		150		150						300		750		300		9,69			
		2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			453.000		12.414		8.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	58		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			210.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			110.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			133.000		12.414		8.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	58		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			974.040		88.177		102.140		1.846		10.491						12.337	25	12,08		12.337	17,13	1,27		
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		3		3		3						3		100		3		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	178		25		20		0		5						5		25		5		2,81			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			185.000		12.414		20.000		1.846		-						1.846	100	9,23		1.846	100	1		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		3		3		3						3		100		3		100			
		2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			106.000		4.200		6.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			110.000		5.783		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			13.040		285		1.140		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			475.000		65.495		65.000		-		10.491						10.491	25	16,14		10.491	2,81	2,21		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	178		25		20		0		5						5		25		5		2,81			
		2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			85.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			440.000		40.401		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Milik Daerah Sebagai Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		4		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			440.000		40.401		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		4		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.909.921		250.832		202.421		18.457		23.877						42.334	155,56	20,91		42.334	83,33	2,22		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3		0		1		0		3						3		300		3		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		2		1		1		1						1		100		1		50			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		2		3		2		2						2		66,67		2		100			
		2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			13.700		950		1.200		-		370						370	300	30,83		370	100	2,7		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3		0		1		0		3						3		300		3		100			
		2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			376.000		45.616		46.000		8.247		14.324						22.571	100	49,07		22.571	50	6		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		2		1		1		1						1		100		1		50			
		2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.520.221		204.266		155.221		10.210		9.183						19.393	66,67	12,49		19.393	100	1,28		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		2		3		2		2						2		66,67		2		100			
		2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			979.100		77.649		148.100		8.370		7.801						16.171	53,13	10,92		16.171	45,09	1,65		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		4		4		3		3						3		75		3		75			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	56		8		8		0		3						3		37,5		3		5,36			
		2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			210.300		23.837		33.300		4.821		3.102						7.923	100	23,79		7.923	100	3,77		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			435.800		43.812		84.800		3.550		3.299						6.849	75	8,08		6.849	75	1,57		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		4		4		3		3						3		75		3		75			
		2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			250.000		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			83.000		10.000		10.000		-		1.400						1.400	37,5	14		1.400	5,36	1,69		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	56		8		8		0		3						3		37,5		3		5,36			
		2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			**730.000**		**21.575**		**45.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender(ARG) (%)	3,9		3,1		3,50		0		0						0		0		0		0			
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	50,42		50,27		50,30		0		0						0		0		0		0			
		2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			365.000		21.575		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Mengintegrasikan PUG dalam kebijakan dan program pemerintah kabupaten/kota.	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	28		0		15		0		0						0		0		0		0			
				jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	150		34		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			135.000		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	28		0		15		0		0						0		0		0		0			
		2.08.02.2.01.0014	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			230.000		21.575		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	150		34		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			180.000				15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatkan akses perempuan ke sumber daya ekonomi, sosial, dan politik	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	20		0		15		0		0						0		0		0		0			
		2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			180.000		-		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	20		0		15		0		0						0		0		0		0			
		2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			185.000		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui layanan pemberdayaan perempuan yang efektif.	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota			185.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.02.2.03.0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota			-		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**1.595.300**		**6.000**		**215.300**		**-**		**45.165**						**45.165**	**45,63**	**20,98**		**45.165**	**15,7**	**2,83**	Dinas Pemberdayaan	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	500		100		100		25		25						50		50		50		10			
		2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			590.000		-		65.000		-		26.415						26.415	37,5	40,64		26.415	37,5	4,48		
			Meningkatkan perlindungan dan dukungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan.	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	20		0		20		0		15						15		75		15		75			
		2.08.03.2.01.0003	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota			140.000		-		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota			450.000				50.000		-		26.415						26.415	75	52,83		26.415	75	5,87		
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	20		0		20		0		15						15		75		15		75			

No	2	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			635.500		-		120.500		-		18.150						18.150	7,5	15,06		18.150	0,6	2,86		
			Meningkatkan kualitas layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	215		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota (Orang)	220		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	220		0		0		0		3						3		0		3		1,36			
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	220		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	220		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	220		0		0		0		3						3		0		3		1,36			
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	200		0		40		0		3						3		7,5		3		1,5			
		2.08.03.2.02.0003	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&			91.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			&Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat [illegible]	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	215		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			92.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota (Orang)	220		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			92.000		-		-		-		4.400						4.400	0	0		4.400	1,36	4,78		
			Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	220		0		0		0		3						3		0		3		1,36			
		2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			90.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	220		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota			90.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	220		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			90.000		-		-		-		2.080						2.080	0	0		2.080	1,36	2,31		
			Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	220		0		0		0		3						3		0		3		1,36			
		2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			90.000		-		120.500		-		11.670						11.670	7,5	9,68		11.670	1,5	12,97		
			Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	200		0		40		0		3						3		7,5		3		1,5			
		2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			369.800		6.000		29.800		-		600						600	100	2,01		600	77,78	0,16		
			Meningkatkan kinerja lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	45		35		35		0		35						35		100		35		77,78			
		2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			369.800		6.000		29.800		-		600						600	100	2,01		600	77,78	0,16		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	45		35		35		0		35						35		100		35		77,78			
		2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			**230.000**		**-**		**20.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)	72,22		0		65,63		0		0						0		0		0		0			
		2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			75.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatkan kualitas hubungan keluarga yang berbasis pada KG dan hak anak	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, [illegible]	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			75.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan [illegible]	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, [illegible]	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			75.500		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	25		0		7		0		0						0		0		0		0			
		2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			75.500		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	25		0		7		0		0						0		0		0		0			
		2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			79.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.04.2.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota			79.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**			**260.000**		**-**		**20.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)	64,71		35,29		44,12		0		0						0		0		0		0			
		2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			260.000		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Menyajikan data gender dan anak yang informatif dan mudah dipaham	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota			260.000		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			**1.261.261**		**-**		**116.261**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Angka)	66,9		80		65,95		0		0						0		0		0		0			
		2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			956.261		-		96.261		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha dalam melaksanakan PHA	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	26		0		6		0		0						0		0		0		0			
				jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	30		0		30		0		0						0		0		0		0			
				jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	5		0		6		0		0						0		0		0		0			
				jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			323.060		-		38.060		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	26		0		6		0		0						0		0		0		0			
		2.08.06.2.01.0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			315.095		-		15.095		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	30		0		30		0		0						0		0		0		0			
		2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			200.106		-		30.106		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	5		0		6		0		0						0		0		0		0			
		2.08.06.2.01.0006	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			118.000		-		13.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			305.000		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatkan kualitas layanan peningkatan kualitas hidup anak	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	7		0		6		0		0						0		0		0		0			
		2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			305.000		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	7		0		6		0		0						0		0		0		0			
		2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**2.818.600**		**-**		**351.600**		**-**		**98.719**						**98.719**	**26,88**	**28,08**		**98.719**	**7,55**	**3,5**	Dinas Pemberdayaan	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak&	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	383,83		100		71,43		20		20						40		56		40		10,42			
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Angka)	78,25		78		77,90		0		0						0		0		0		0			
		2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			755.000		-		93.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
				jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota			660.000		-		80.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.08.07.2.01.0008	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota			95.000		-		13.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.485.000		-		200.000		-		89.479						89.479	7,5	44,74		89.479	1	6,03		
			Meningkatkan kualitas layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	200		0		0		0		3						3		0		3		1,5			
				Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	200		0		0		0		3						3		0		3		1,5			
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	200		0		0		0		2						2		0		2		1			
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	200		0		0		0		2						2		0		2		1			
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	40		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	200		0		40		0		3						3		7,5		3		1,5			
				Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	40		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	200		0		0		0		3						3		0		3		1,5			
		2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			185.625		-		-		-		4.570						4.570	0	0		4.570	1,5	2,46		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	200		0		0		0		3						3		0		3		1,5			
		2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			185.625		-		-		-		8.380						8.380	0	0		8.380	1,5	4,51		
			Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	200		0		0		0		3						3		0		3		1,5			
		2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			185.625		-		-		-		529						529	0	0		529	1	0,28		
			Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	200		0		0		0		2						2		0		2		1			
		2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			185.625		-		-		-		1.800						1.800	0	0		1.800	1	0,97		
			layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	200		0		0		0		2						2		0		2		1			
		2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			185.625		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	40		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			185.625		-		200.000		-		13.910						13.910	7,5	6,96		13.910	1,5	7,49		
			Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	200		0		40		0		3						3		7,5		3		1,5			
		2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			185.625		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	40		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			185.625		-		-		-		60.290						60.290	0	0		60.290	1,5	32,48		
			Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	200		0		0		0		3						3		0		3		1,5			
		2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			578.600		-		58.600		-		9.240						9.240	100	15,77		9.240	75	1,6		
			Meningkatkan kualitas layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	40		0		30		0		30						30		100		30		75			
		2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai			578.600		-		58.600		-		9.240						9.240	100	15,77		9.240	75	1,6		
			terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	40		0		30		0		30						30		100		30		75			
		2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**45.161.620**		**7.901.012**		**9.422.869**		**2.161.736**		**2.211.527**						**4.373.263**	**37,16**	**46,41**		**4.373.263**	**5,44**	**9,68**		
		2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**43.727.326**		**7.840.424**		**9.372.869**		**2.161.736**		**2.208.414**						**4.370.150**	**39,21**	**46,63**		**4.370.150**	**6,91**	**9,99**	Dinas Kelautan,	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	66,65		0		64,50				50,88						50,88		78,88		50,88		76,34			
		2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			183.666		20.886		50.000		-		10.050						10.050	33,33	20,1		10.050	6,67	5,47		
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	75		15		15		0		5						5		33,33		5		6,67			
		2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			183.666		20.886		50.000		-		10.050						10.050	33,33	20,1		10.050	6,67	5,47		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	75		15		15		0		5						5		33,33		5		6,67			
		2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			38.124.150		6.651.525		8.179.869		2.107.120		2.059.119						4.166.239	50	50,93		4.166.239	5,07	10,93		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8280		840		840		210		210						420		50		420		5,07			
		2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			38.124.150		6.651.525		8.179.869		2.107.120		2.059.119						4.166.239	50	50,93		4.166.239	5,07	10,93		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8280		840		840		210		210						420		50		420		5,07			
		2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			54.110		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			24.604		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			29.506		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			302.332		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			54.278		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			198.222		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			49.833		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			811.991		128.432		226.500		11.891		23.255						35.146	47,5	15,52		35.146	6,81	4,33		
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	80		80		80		0		30						30		37,5		30		37,5			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5750		1.150		1150		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	150		30		30		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3650		730		730		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		60		1		1		1						2		200		2		3,33			
		2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			136.389		16.304		25.000		-		1.743						1.743	37,5	6,97		1.743	37,5	1,28		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	80		80		80		0		30						30		37,5		30		37,5			
		2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			66.833		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			109.111		13.550		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5750		1.150		1150		0		0						0		0		0		0			
		2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			109.111		10.778		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	150		30		30		0		0						0		0		0		0			
		2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.770		760		1.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3650		730		730		0		0						0		0		0		0			
		2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			382.777		87.040		160.000		11.891		21.512						33.403	200	20,88		33.403	3,33	8,73		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		60		1		1		1						2		200		2		3,33			
		2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			827.696		176.661		71.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		3		3		0		0						0		0		0		0			
		2.09.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			222.777		30.625		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			178.222		105.404		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			110.641		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			89.111		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			226.944		40.632		71.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		3		3		0		0						0		0		0		0			
		2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.343.902		658.259		605.000		33.525		80.510						114.035	39,12	18,85		114.035	16,71	4,87		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	30		30		30		0		10						10		33,33		10		33,33			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	420		84		84		15		20						35		41,67		35		8,33			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3540		708		708		100		200						300		42,37		300		8,47			
		2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			9.183		2.000		2.500		-		500						500	33,33	20		500	33,33	5,44		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	30		30		30		0		10						10		33,33		10		33,33			
		2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			650.555		141.917		205.000		11.625		20.619						32.244	41,67	15,73		32.244	8,33	4,96		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	420		84		84		15		20						35		41,67		35		8,33			
		2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.684.164		514.342		397.500		21.900		59.391						81.291	42,37	20,45		81.291	8,47	4,83		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3540		708		708		100		200						300		42,37		300		8,47			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV																	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.079.479		204.661		240.500		9.200		35.480						44.680	37,5	18,58		44.680	17,5	4,14		
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	120		24		24		6		6						12		50		12		10			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8		8		8		0		4						4		50		4		50			
		2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			181.870		30.625		33.500		2.000		6.005						8.005	50	23,9		8.005	10	4,4		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			602.555		105.404		157.000		7.200		25.875						33.075	50	21,07		33.075	10	5,49		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	120		24		24		6		6						12		50		12		10			
		2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			163.666		28.000		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			131.389		40.632		20.000		-		3.600						3.600	50	18		3.600	50	2,74		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8		8		8		0		4						4		50		4		50			
		2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**			**1.151.572**		**54.796**		**40.000**		**-**		**2.276**						**2.276**	**33,75**	**5,69**		**2.276**	**3,69**	**0,2**	Dinas Kelautan, Pertanian, Peternakan	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Angka)	79,25		0		78,00				84,7						84,7		108,59		84,7		106,88			
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			559.938		31.708		20.000		-		2.276						2.276	67,5	11,38		2.276	8,61	0,41		
			Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	2		2		2		0		0,7						0,7		35		0,7		35			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	6		1		1		0		1						1		100		1		16,67			
				Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			205.725		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			63.218		5.491		10.000		-		1.017						1.017	35	10,17		1.017	35	1,61		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	2		2		2		0		0,7						0,7		35		0,7		35			
		2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			124.435		26.217		10.000		-		1.259						1.259	100	12,59		1.259	16,67	1,01		
			Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	6		1		1		0		1						1		100		1		16,67			
		2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			88.790		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota			23.697						-		-						-	0	0		-	0	0		
			Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis			54.074		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			237.401		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	13		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	13		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	14		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)	13		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal			62.218		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	13		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			111.183		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	13		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota			22.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	14		0		0		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota			42.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)	13		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi			62.218				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal (Laporan)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal			62.218		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal (Laporan)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			292.015		23.088		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	5		1		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			43.145		5.206		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			205.725		17.882		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	5		1		2		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun			43.145		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**			**210.490**		**5.792**		**10.000**		**-**		**837**						**837**	**20**	**8,37**		**837**	**2**	**0,4**	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	10,29		0		20,58				33,82						33,82		164,33		33,82		328,67			
		2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			85.103		5.792		10.000		-		837						837	20	8,37		837	4	0,98		
			Terlaksananya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	5		1		1		0		0,2						0,2		20		0,2		4			
		2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			85.103		5.792		10.000		-		837						837	20	8,37		837	4	0,98		
			Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	5		1		1		0		0,2						0,2		20		0,2		4			
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			125.387		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			125.387		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**			**72.232**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	100		0		86,00				0						0		0		0		0			
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			72.232				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	7		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			72.232		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	7		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**25.482.349**		**3.159.866**		**3.542.568**		**919.531**		**1.935.530**						**2.855.062**	**40,44**	**80,59**		**2.855.062**	**16,15**	**11,2**		
		2.10.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**22.532.021**		**3.074.144**		**3.392.240**		**912.812**		**1.908.892**						**2.821.703**	**47,25**	**83,18**		**2.821.703**	**17,96**	**12,52**	Dinas Pertanahan	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	63,11		0		61,86		0		0						0		0		0		0			
		2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			207.000		14.167		10.000		-		1.499						1.499	50	14,99		1.499	10	0,72		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		8		2		0		2						2		100		2		20			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			135.000		14.167		10.000		-		1.499						1.499	100	14,99		1.499	20	1,11		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		8		2		0		2						2		100		2		20			
		2.10.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			72.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.565.904		2.761.613		2.915.796		873.416		1.821.200						2.694.616	45,71	92,41		2.694.616	10,67	14,51		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Pada Dinas Pertanahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2100		420		490		672		672						672		137,14		672		32			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			18.378.801		2.761.613		2.915.796		873.416		1.821.200						2.694.616	137,14	92,41		2.694.616	32	14,66		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2100		420		490		672		672						672		137,14		672		32			
		2.10.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			93.426		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.10.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			93.677		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			612.960		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	60		0		60		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		0		4		0		0						0		0		0		0			
		2.10.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			205.653		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	60		0		60		0		0						0		0		0		0			
		2.10.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			90.513		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.10.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			90.513		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
		2.10.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			226.282		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		0		4		0		0						0		0		0		0			
		2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			903.044		69.452		151.140		15.379		30.866						46.245	73,13	30,6		46.245	11,83	5,12		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	150		30		30		13		17						30		100		30		20			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3325		200		200		200		200						200		100		200		6,02			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	45		9		9		4		5						9		100		9		20			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	365		365		365		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	160		20		32		11		10						21		65,63		21		13,13			
		2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			133.141		12.334		20.000		1.039		2.500						3.539	100	17,7		3.539	20	2,66		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	150		30		30		13		17						30		100		30		20			
		2.10.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			110.513		4.446		20.000		1.215		2.490						3.705	100	18,53		3.705	6,02	3,35		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3325		200		200		200		200						200		100		200		6,02			
		2.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			110.513		8.999		20.000		1.250		2.500						3.749	100	18,75		3.749	20	3,39		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	45		9		9		4		5						9		100		9		20			
		2.10.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			6.299		798		1.140		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	365		365		365		0		0						0		0		0		0			
		2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			542.578		42.875		90.000		11.875		23.377						35.252	65,63	39,17		35.252	13,13	6,5		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	160		20		32		11		10						21		65,63		21		13,13			
		2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			495.767		11.940		43.204		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		1		10		0		0						0		0		0		0			
		2.10.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			135.769		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.10.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			359.998		11.940		43.204		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		1		10		0		0						0		0		0		0			
		2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			942.872		154.323		160.500		14.767		40.726						55.493	55,56	34,58		55.493	4,78	5,89		
			Tersedianya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	500		61		5		5		0						5		100		5		1			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	120		12		24		0		4						4		16,67		4		3,33			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10		8		2		1		1						1		50		1		10			
		01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			11.341		800		2.000		492		-						492	100	24,61		492	1	4,34		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	500		61		5		5		0						5		100		5		1			
		2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			370.019		60.149		65.500		-		16.106						16.106	16,67	24,59		16.106	3,33	4,35		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	120		12		24		0		4						4		16,67		4		3,33			
		2.10.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			561.512		93.374		93.000		14.275		24.620						38.895	50	41,82		38.895	10	6,93		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10		8		2		1		1						1		50		1		10			
		2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			804.474		62.649		111.600		9.250		14.600						23.850	67,5	21,37		23.850	71,88	2,96		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		4		1		1		1						1		100		1		100			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		4		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8		0		10		3		7						7		70		7		87,5			
		2.10.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			184.004		26.977		33.300		3.400		7.700						11.100	100	33,33		11.100	100	6,03		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		4		1		1		1						1		100		1		100			
		2.10.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			247.908		6.212		44.800		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		4		2		0		0						0		0		0		0			
		2.10.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			249.782		20.000		23.500		4.900		4.900						9.800	100	41,7		9.800	100	3,92		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		2.10.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			122.781		9.460		10.000		950		2.000						2.950	70	29,5		2.950	87,5	2,4		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8		0		10		3		7						7		70		7		87,5			
		2.10.12	**PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH**			**665.000**		**-**		**25.000**		**2.240**		**-**						**2.240**	**33,33**	**8,96**		**2.240**	**10**	**0,34**	Dinas Pertanahan	
			Meningkatnya kejelasan hak- hak atas tanah bagi pemerintah dan masyarakat miskin	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (Angka)	4,73		0		3,89		0		0						0		0		0		0			
		2.10.12.7.01	Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah			345.000		-		25.000		2.240		-						2.240	33,33	8,96		2.240	20	0,65		
			Tersedianya Data Aset Tanah Pemerintah	Jumlah Data Aset Tanah Pemerintah (Laporan)	5		0		3		1		0						1		33,33		1		20			
		2.10.12.7.01.0001	Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah			345.000		-		25.000		2.240		-						2.240	33,33	8,96		2.240	20	0,65		
			Terinventarisasinya Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Jumlah Data Aset Tanah Pemerintah (Laporan)	5		0		3		1		0						1		33,33		1		20			
		2.10.12.7.02	Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Milik Masyarakat Miskin			320.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Data Aset Tanah Milik Masyarakat Miskin	Jumlah Data Tanah Milik Masyarakat Miskin (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.10.12.7.02.0001	Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin			320.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terinventarisasinya Tanah-Tanah Milik Masyarakat Miskin	Jumlah Data Tanah Milik Masyarakat Miskin (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.10.13	**PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN**			**245.000**		**4.500**		**25.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pertanahan	
			Meningkatnya kejelasan hak milik atas tanah	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah (%)	36,63		0		30,14		0		0						0		0		0		0			
		2.10.13.7.01	Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong			245.000		4.500		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.10.13.7.01.0001	Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda			245.000		4.500		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersurveinya dan Terukurnya Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.10.14	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN**			**665.000**		**28.756**		**25.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pertanahan	
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM bidang pertanahan	Persentase SDM Bidang Pertanahan yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	59,65		0		59,65		0		0						0		0		0		0			
		2.10.14.7.01	Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten			665.000		28.756		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Jumlah Dokumen Pembinaan Kerjasama Pendidikan Terlaksananya SDM Pertanahan yang mengikuti Pembinaan Pertanahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan (Dokumen)	1		4		1		0		0						0		0		0		0			
		2.10.14.7.01.0001	Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan			345.000		-		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.10.14.7.01.0002	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan			320.000		28.756		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan (Dokumen)	1		4		1		0		0						0		0		0		0			
		2.10.15	**PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU**			**255.000**		**-**		**25.000**		**2.240**		**2.240**						**4.480**	**0**	**17,92**		**4.480**	**0**	**1,76**	Dinas Pertanahan	
			Meningkatnya tata kelola pertanahan di wilayah pesisir, laut dan pulau	Persentase Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau yang Tertata (%)	63,81		0		61,25		0		0						0		0		0		0			
		2.10.15.7.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil			255.000		-		25.000		2.240		2.240						4.480	0	17,92		4.480	0	1,76		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil	Jumlah Data Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi di Wilayah Pesisir (Dokumen)	1		0		1		1		0						0		0		0		0			
		2.10.15.7.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir			255.000		-		25.000		2.240		2.240						4.480	0	17,92		4.480	0	1,76		
			Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir	Jumlah Data Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi di Wilayah Pesisir (Dokumen)	1		0		1		1		0						0		0		0		0			
		2.10.16	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN**			**230.000**		**28.924**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pertanahan	
			Meningkatnya tata kelola sistem informasi manajemen pertanahan	Persentase Informasi Pertanahan yang Dimanfaatkan (%)	0		87,85		0		0		0						0		0		0		0			
		2.10.16.7.01	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)			230.000		28.924		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya data Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) (Dokumen)	1		2		0		0		0						0		0		0		0			
		2.10.16.7.01.0001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)			230.000		28.924		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) (Dokumen)	1		2		0		0		0						0		0		0		0			
		2.10.17	**PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN**			**890.328**		**23.542**		**50.328**		**2.240**		**24.399**						**26.639**	**50**	**52,93**		**26.639**	**33,33**	**2,99**	Dinas Pertanahan	
			Meningkatnya penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan (%)	66,67		0		60		0		0						0		0		0		0			
		2.10.17.7.01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			890.328		23.542		50.328		2.240		24.399						26.639	50	52,93		26.639	33,33	2,99		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Konflik	konflik Pertanahan	Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		2		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Layanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan (Layanan)	1		0		1		1		1						1		100		1		100			
				Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.10.17.7.01.0001	Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			330.000		23.542		-		-		19.879						19.879	0	0		19.879	0	6,02		
			Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		2		0		0		0						0		0		0		0			
		2.10.17.7.01.0002	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan			325.000		-		25.000		2.240		4.520						6.759	100	27,04		6.759	100	2,08		
			Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	Jumlah Layanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan (Layanan)	1		0		1		1		1						1		100		1		100			
		2.10.17.7.01.0004	Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota			235.328		-		25.328		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Konflik, Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**163.312.984**		**47.905.718**		**40.887.730**		**22.648.574**		**9.409.512**						**32.058.086**	**11,91**	**78,41**		**32.058.086**	**9,84**	**19,63**		
		2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**128.515.234**		**7.274.320**		**22.783.980**		**21.295.399**		**6.959.897**						**28.255.296**	**39,97**	**124,01**		**28.255.296**	**36,06**	**21,99**	Dinas Lingkungan	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	63,8		0		63,10		31,84		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			316.100		8.915		61.100		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		5		15		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			316.100		8.915		61.100		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		5		15		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.668.368		3.247.253		3.668.368		1.163.197		1.208.654						2.371.851	0	64,66		2.371.851	4,98	12,06		
			Tersedianya Gaji dan Tunjanga ASN dan PPPK	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2250		435		0		112		112						112		0		112		4,98			
		2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			19.668.368		3.247.253		3.668.368		1.163.197		1.208.654						2.371.851	0	64,66		2.371.851	4,98	12,06		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2250		435		0		112		112						112		0		112		4,98			
		2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			50.000		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			50.000		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.993.780		-		403.780		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	450		0		423		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5		0		10		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			1.663.780		-		363.780		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	450		0		423		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			330.000		-		40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5		0		10		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.616.460		1.291.680		1.364.849		214.142		243.233						457.374	63,98	33,51		457.374	46,64	6,01		
			Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100		1		80		0		80						80		100		80		80			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	500		26,81		1150		287		287						574		49,91		574		114,8			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	100		100		30		0		30						30		100		30		30			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	100		1		730		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	500		62,9		60		8		42						42		70		42		8,4			
		2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			329.355		61.461		36.644		-		5.000						5.000	100	13,64		5.000	80	1,52		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100		1		80		0		80						80		100		80		80			
		2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.288.360		1.161.090		1.199.460		210.000		214.995						424.995	49,91	35,43		424.995	114,8	6,76		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	500		26,81		1150		287		287						574		49,91		574		114,8			
		2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			206.465		2.928		26.465		-		2.499						2.499	100	9,44		2.499	30	1,21		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	100		100		30		0		30						30		100		30		30			
		2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			42.280		798		2.280		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	100		1		730		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			750.000		65.404		100.000		4.142		20.739						24.881	70	24,88		24.881	8,4	3,32		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	500		62,9		60		8		42						42		70		42		8,4			
		2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			862.787		-		162.787		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			404.751		-		54.751		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			458.036		-		108.036		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			83.422.041		593.989		13.761.397		19.618.709		5.026.463						24.645.173	66,52	179,09		24.645.173	110	29,54		
			Tersedianya Pembayaran Tagihan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	500		2		30		30		0						30		100		30		6			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	500		4		2878		719		719						1.438		49,97		1.438		287,6			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	500		1		367		91		91						182		49,59		182		36,4			
		2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			34.000		1.000		5.000		500		-						500	100	10		500	6	1,47		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	500		2		30		30		0						30		100		30		6			
		2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			79.665.892		62.952		13.074.248		19.608.459		5.013.038						24.621.498	49,97	188,32		24.621.498	287,6	30,91		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	500		4		2878		719		719						1.438		49,97		1.438		287,6			
		2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.722.149		530.037		682.149		9.750		13.425						23.175	49,59	3,4		23.175	36,4	0,62		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	500		1		367		91		91						182		49,59		182		36,4			
		2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14.585.698		2.132.483		3.351.698		299.351		481.547						780.898	50	23,3		780.898	29,25	5,35		
			terpeliharanya kendaraan dinas Jabatan dan terpeliharanya kendaraan operasional lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	200		23		34		13		21						34		100		34		17			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	500		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	30		0		6		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			167.460		21.999		43.460		3.000		4.500						7.500	100	17,26		7.500	100	4,48		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			13.228.312		2.110.484		3.028.312		296.351		477.047						773.398	100	25,54		773.398	17	5,85		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	200		23		34		13		21						34		100		34		17			
		2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			250.026		-		100.026		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	500		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			939.900		-		179.900		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	30		0		6		0		0						0		0		0		0			
		2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**			**857.250**		**55.479**		**347.250**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	1		0		1				0						0		0		0		0			
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			413.000		-		95.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	25		0		1		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan (Dokumen)	25		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	25		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota			120.000		-		40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	25		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.02.2.01.0004	Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota			60.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.02.2.01.0005	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH			105.000		-		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan (Dokumen)	25		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota			128.000		-		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			RPPLH kabupaten/kota yang disusun	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	25		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			444.250		55.479		252.250		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang tersusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	25		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	15		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	10		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD			61.000		55.479		41.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	25		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS			165.000		-		85.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	15		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang			86.250		-		26.250		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	10		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup			132.000		-		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			**10.331.600**		**26.662.915**		**9.183.600**		**1.353.175**		**2.449.615**						**3.802.790**	**4,76**	**41,41**		**3.802.790**	**0,78**	**36,81**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	72		0		71,20		16,16		0						0		0		0		0			
				Indeks Kualitas Udara (Indeks)	93		0		92,93		16,16		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			9.374.600		26.662.915		8.646.600		1.353.175		2.449.615						3.802.790	8,33	43,98		3.802.790	1,67	40,56		
			Jumlah Dokumentasi Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	15		3		3		1		1						2		66,67		2		13,33			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan (Kegiatan)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	20		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	20		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			8.434.600		26.662.915		8.354.600		1.353.175		2.449.615						3.802.790	66,67	45,52		3.802.790	13,33	45,09		
			Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	15		3		3		1		1						2		66,67		2		13,33			
		2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			190.000		-		70.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			85.000		-		17.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan (Kegiatan)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK			170.000		-		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			140.000		-		60.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	20		0		4		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah			150.000		-		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan			130.000		-		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	20		0		4		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.01.0019	Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup			75.000		-		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Laporan pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup	Jumlah laporan pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			365.000		-		285.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			terlaksanaya penanggulangan pencemaran lingkungan hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi (Lokasi)	15		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)	7		0		7		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			140.000		-		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Area Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi (Lokasi)	15		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			190.000		-		150.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.02.0004	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan			35.000		-		35.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)	7		0		7		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			592.000		-		252.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
				jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
				jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota (Kegiatan)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
				jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran			80.000		-		40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.03.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi			110.000		-		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.03.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi			87.000		-		47.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota			85.000		-		45.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota (Kegiatan)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi			90.000		-		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.03.0014	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan			140.000		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut,	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			**6.190.900**		**2.211.449**		**1.910.900**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (%)	27,1		0		24,46				0						0		0		0		0			
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			6.190.900		2.211.449		1.910.900		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
				Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			1.764.000		-		80.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			346.000		21.875		40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			320.000		-		60.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
		2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati			3.170.900		2.179.574		1.620.900		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
		2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya			390.000		10.000		70.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan			200.000		-		40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**			**850.000**		**-**		**170.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)&	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	55,22		0		42,62				0						0		0		0		0			
		2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3			400.000		-		80.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedinya Penyimpanan Limbah B3	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.05.2.01.0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)			400.000		-		80.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			450.000		-		90.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Limbah B3	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan			450.000		-		90.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			**240.000**		**-**		**80.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	60		0		43,00				0						0		0		0		0			
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			240.000		-		80.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD (Orang)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			120.000		-		40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		2.11.06.2.01.0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup			120.000				40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD (Orang)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.11.07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**			**850.000**		**-**		**170.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	19,12		0		23,50				0						0		0		0		0			
		2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			350.000		-		70.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen dan Data Informasi MHA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH			350.000		-		70.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			500.000		-		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Kelembagaan MHA	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH			500.000		-		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan,	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**945.000**		**-**		**189.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	100		0		100				0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			945.000		-		189.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			tersedianya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan penyuluhan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	200		0		204		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (Keluarga)	68		0		68		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup			305.000		-		61.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	200		0		204		0		0						0		0		0		0			
		2.11.08.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat			340.000		-		68.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (Keluarga)	68		0		68		0		0						0		0		0		0			
		2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat			300.000		-		60.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			**14.533.000**		**11.701.555**		**6.053.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Lingkungan	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Angka)	58		0		51		0		0						0		0		0		0			
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			13.933.000		11.701.555		5.933.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tertangani Pengolahan Timbulan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	68		0		68		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	5		1		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	8		0		8		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2000		0		20000		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah (Dokumen)	8		0		8		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan (Unit)	10		0		10		0		0						0		0		0		0			
		2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			600.000		6.567		120.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	68		0		68		0		0						0		0		0		0			
		2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan			150.000		212.894		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
		2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			7.701.700		11.473.094		4.692.350		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	5		1		5		0		0						0		0		0		0			
		2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota			450.000		-		90.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah			1.000.000		-		200.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	8		0		8		0		0						0		0		0		0			
		2.11.11.2.01.0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota			100.000		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya laporan pemantauaan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional			681.300		9.000		130.650		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2000		0		20000		0		0						0		0		0		0			
		2.11.11.2.01.0023	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan			400.000		-		80.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kerja Sama pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah (Dokumen)	8		0		8		0		0						0		0		0		0			
		2.11.11.2.01.0027	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada kondisi khusus			350.000		-		70.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.11.2.01.0028	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah			2.500.000		-		500.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan,	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan (Unit)	10		0		10		0		0						0		0		0		0			
		2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta			600.000		-		120.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah (Laporan)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.11.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah			400.000		-		80.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah (Laporan)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah			200.000		-		40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**43.331.904**		**3.860.074**		**4.257.344**		**442.838**		**1.763.995**						**2.206.833**	**8,5**	**51,84**		**2.206.833**	**6,46**	**5,09**		
		2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**31.638.944**		**3.314.727**		**3.357.344**		**442.838**		**1.550.032**						**1.992.871**	**20,86**	**59,36**		**1.992.871**	**15,33**	**6,3**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	65.6		0		64,00				0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			120.000		6.065		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7		6		7		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			120.000		6.065		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7		6		7		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.634.855		2.561.439		2.566.055		338.631		1.469.594						1.808.225	28,13	70,47		1.808.225	5	10,87		
			Tersedianya Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6300		30		1120		315		315						315		28,13		315		5			
		2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.634.855		2.561.439		2.566.055		338.631		1.469.594						1.808.225	28,13	70,47		1.808.225	5	10,87		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6300		30		1120		315		315						315		28,13		315		5			
		2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			486.000		1.694		26.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Adminisrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	120		0		120		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		5		10		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			351.000		-		1.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	120		0		120		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			135.000		1.694		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		5		10		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.735.540		66.362		104.140		-		16.553						16.553	11,11	15,89		16.553	11,11	0,95		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	80		3		80		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1000		2		1000		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30		1		30		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	720		4		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		60		60		0		60						60		100		60		100			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			70.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			364.400		10.888		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	80		3		80		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			168.000		6.180		8.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1000		2		1000		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			160.000		9.000		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30		1		30		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			13.140		798		1.140		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	720		4		2		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			780.000		39.496		50.000		-		16.553						16.553	100	33,11		16.553	100	2,12		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		60		60		0		60						60		100		60		100			
		2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			120.000				10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8.862.449		149.372		153.049		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		20		15		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.789.400		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			4.745.000		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			120.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			635.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			550.000		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			983.049		149.372		133.049		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		20		15		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.457.700		406.329		345.700		99.407		47.504						146.912	86,67	42,5		146.912	48,83	5,98		
			Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	150		2		30		18		0						18		60		18		12			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	10		4		10		10		10						10		100		10		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6		4		5		5		5						5		100		5		83,33			
		2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			31.500		1.200		1.500		300		-						300	60	20		300	12	0,95		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	150		2		30		18		0						18		60		18		12			
		2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			816.200		114.196		144.200		28.991		28.329						57.320	100	39,75		57.320	100	7,02		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	10		4		10		10		10						10		100		10		100			
		2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.570.000		290.934		200.000		70.117		19.175						89.292	100	44,65		89.292	83,33	5,69		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6		4		5		5		5						5		100		5		83,33			
		2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.342.400		123.467		142.400		4.800		16.381						21.181	29,17	14,87		21.181	25	1,58		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		3		4		3		3						3		75		3		75			
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		45		9		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			193.300		26.678		33.300		1.800		7.700						9.500	100	28,53		9.500	100	4,91		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			334.100		46.908		59.100		3.000		8.681						11.681	75	19,76		11.681	75	3,5		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		3		4		3		3						3		75		3		75			
		2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			50.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			395.000		29.882		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			200.000		19.999		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		45		9		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			150.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			**3.572.408**		**141.732**		**215.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	40		0		20,00				0						0		0		0		0			
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	60		0		47,00				0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			1.066.802		35.207		55.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	3		2		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	5		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)	1200		0		1200		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	5		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk (Dokumen)	5		20.160		3		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			179.076		12.331		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	3		2		3		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			109.384		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	5		0		4		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk			109.384		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlasaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)	1200		0		1200		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			243.768		13.318		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			109.384		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	5		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.01.0006	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			82.038		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan			82.038		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.01.0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk			151.730		9.559		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk (Dokumen)	5		20.160		3		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk			679.266		71.381		105.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun (Dokumen)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk			107.038		-		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun (Dokumen)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan			572.228		71.381		80.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			1.515.034		29.023		44.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2		2		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk (Orang)	68		0		68		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggunglawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia (Dokumen)	5		46.800		3		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk			248.768		19.504		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2		2		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			191.422		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk			136.730		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk			136.730		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk			189.662		-		500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk			187.532		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk			273.460		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk (Orang)	68		0		68		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggunglawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk			150.730		9.519		14.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tesedianya Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggunglawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggunglawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia (Dokumen)	5		46.800		3		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			311.306		6.120		10.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	1		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	5		0		20		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.04.0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk			64.692		6.120		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	1		2		2		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk			109.384		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbinanya dan Terawasinya Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk			137.230		-		500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	5		0		20		0		0						0		0		0		0			
		03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			**3.548.350**		**80.843**		**145.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100		0		100				0						0		0		0		0			
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100		0		100				0						0		0		0		0			
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100		0		100				0						0		0		0		0			
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100		0		99,80				0						0		0		0		0			
		2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			875.761		37.292		65.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	5		1		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun (Dokumen)	10		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	5000		0		5000		0		0						0		0		0		0			
		2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			154.457		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			204.076		24.318		40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	5		1		5		0		0						0		0		0		0			
		2.12.03.2.01.0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil			216.422		12.974		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			
		2.12.03.2.01.0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil			136.730		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun (Dokumen)	10		0		10		0		0						0		0		0		0			
		2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan			164.076		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	5000		0		5000		0		0						0		0		0		0			
		2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			1.874.555		43.552		75.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	1		5		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1		12		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1		5		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil (Orang)	37		0		37		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam			164.076		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota			109.384		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil			161.730		13.478		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	1		5		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil			161.730		12.722		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1		12		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.03.2.02.0005	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil			163.844		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil			136.730		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.03.2.02.0007	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil			218.768		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil			243.768		17.352		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1		5		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.03.2.02.0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil			218.768		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.12.03.2.02.0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil			218.768		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil (Orang)	37		0		37		0		0						0		0		0		0			
		2.12.03.2.02.0011	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil			76.989		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			798.034		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil (Dokumen)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1		0		20		0		0						0		0		0		0			
		2.12.03.2.03.0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil			218.768		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil (Dokumen)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil			82.038		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.03.2.03.0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil			164.076		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil			333.152		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1		0		20		0		0						0		0		0		0			
		2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			**4.425.472**		**316.397**		**530.000**		**-**		**213.962**						**213.962**	**7,14**	**40,37**		**213.962**	**6,67**	**4,83**	Dinas Kependudukan	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (%)	100		0		100				0						0		0		0		0			
		2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			214.450		10.000		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Data Kependudukan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			84.200		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
		2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			72.150		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah			58.100		10.000		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			96.200		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			96.200		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			3.627.669		295.899		480.000		-		213.962						213.962	14.29	44.58		213.962	12.5	5.9		
			Tersedianya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri (Dokumen)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	5		12		5		0		5						5		100		5		100			
				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	4		0		7		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi (Dokumen)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	12		4		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			175.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
		2.12.04.2.03.0002	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri			141.300		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri (Dokumen)	4		0		4		0		0						0		0		0		0			
		2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			2.715.919		284.099		455.000		-		213.962						213.962	100	47,02		213.962	100	7,88		
			Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	5		12		5		0		5						5		100		5		100			
		2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			78.150		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			193.400		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	4		0		7		0		0						0		0		0		0			
		2.12.04.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi			141.300		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi (Dokumen)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat			77.100		5.486		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	12		4		12		0		0						0		0		0		0			
		2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan			105.000		6.315		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			487.154		10.498		40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	6		0		6		0		0						0		0		0		0			
		2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			124.105		10.498		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.04.2.04.0002	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan			182.896		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			180.153		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	6		0		6		0		0						0		0		0		0			
		2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**			**146.730**		**6.373**		**10.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	100		0		100				0						0		0		0		0			
		2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan			146.730		6.373		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Profil Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota			82.038						-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain			64.692		6.373		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**29.847.771**		**3.876.880**		**4.349.042**		**1.085.657**		**1.066.941**						**2.152.599**	**18,94**	**49,5**		**2.152.599**	**5,99**	**7,21**		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**22.356.122**		**3.334.790**		**3.523.542**		**1.085.657**		**1.015.517**						**2.101.175**	**40,47**	**59,63**		**2.101.175**	**14,08**	**9,4**	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	315,6		62,7		62,80				0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			70.000		6.355		10.000		-		1.067						1.067	53,33	10,67		1.067	10,67	1,52		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	75		15		15		0		8						8		53,33		8		10,67			
		2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			70.000		6.355		10.000		-		1.067						1.067	53,33	10,67		1.067	10,67	1,52		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	75		15		15		0		8						8		53,33		8		10,67			
		2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.044.832		2.641.831		3.006.424		1.062.358		945.111						2.007.468	68,9	66,77		2.007.468	11,64	11,12		
			Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Serta Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3806		322		643		243		200						443		68,9		443		11,64			
		2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			18.044.832		2.641.831		3.006.424		1.062.358		945.111						2.007.468	68,9	66,77		2.007.468	11,64	11,12		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3806		322		643		243		200						443		68,9		443		11,64			
		2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			300.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Data dan Laporan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	65		0		71		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			210.000				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	65		0		71		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			90.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			666.400		109.002		97.280		5.922		14.053						19.975	49,33	20,53		19.975	10,24	3		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0		12						12		100		12		20			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0		12						12		100		12		20			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	235		235		235		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	125		26		30		2		12						14		46,67		14		11,2			
		2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			75.000		20.582		15.000		-		2.499						2.499	100	16,66		2.499	20	3,33		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0		12						12		100		12		20			
		2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			75.000		14.900		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			75.000		8.177		15.000		-		2.500						2.500	100	16,66		2.500	20	3,33		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0		12						12		100		12		20			
		2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			11.400		760		2.280		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	235		235		235		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			430.000		64.583		50.000		5.922		9.054						14.976	46,67	29,95		14.976	11,2	3,48		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	125		26		30		2		12						14		46,67		14		11,2			
		2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			827.612		221.813		59.612		-		2.960						2.960	0	4,97		2.960	50	0,36		
			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		3						3		0		3		100			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		4		3		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			368.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			459.612		110.907		-		-		2.960						2.960	0	0		2.960	100	0,64		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		3						3		0		3		100			
		2.13.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		110.907		59.612		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		4		3		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.420.878		271.447		274.546		15.321		39.141						54.462	66,67	19,84		54.462	13,33	3,83		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12		0		12						12		100		12		20			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.580		2.188		1.980		-		492						492	100	24,85		492	20	4,65		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12		0		12						12		100		12		20			
		2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			528.000		37.996		96.000		9.400		11.554						20.954	50	21,83		20.954	10	3,97		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			882.298		231.263		176.566		5.922		27.095						33.017	50	18,7		33.017	10	3,74		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.026.400		84.342		75.680		2.057		13.186						15.242	40	20,14		15.242	10	1,49		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		22		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	22		0		10		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			183.150		38.922		36.630		1.244		6.980						8.224	100	22,45		8.224	20	4,49		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
		2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			140.250		35.568		28.050		813		3.246						4.059	100	14,47		4.059	20	2,89		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
		2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			650.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		9.853		-		-		2.960						2.960	0	0		2.960	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		22		10		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			53.000		-		11.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	22		0		10		0		0						0		0		0		0			
		2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**			**392.844**		**-**		**10.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan	
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	38,24		8,82		14,71		0		0						0		0		0		0			
		2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			392.844		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Penataan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	26		0		68		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	26		0		68		0		0						0		0		0		0			
		2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa			59.664		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	26		0		68		0		0						0		0		0		0			
		2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa			333.180		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	26		0		68		0		0						0		0		0		0			
		2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**			**474.076**		**-**		**10.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan	
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (%)	36,76		14,71		17,65		0		0						0		0		0		0			
		2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			474.076		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kerjasama Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	25		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	8		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			303.300		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	25		0		4		0		0						0		0		0		0			
		2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota			170.776		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	8		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			**2.902.332**		**123.450**		**386.500**		**-**		**51.424**						**51.424**	**8,24**	**13,31**		**51.424**	**1,65**	**1,77**	Dinas Pemberdayaan	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	23,79		192,62		19,76		0		20,16						20,16		102,02		20,16		84,74			
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	498,25		66,65		99,55		29,47		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			2.902.332		123.450		386.500		-		51.424						51.424	8,24	13,31		51.424	1,65	1,77		
			Terlaksannya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV															
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	3		4		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	25		5		5		0		2						2		40		2		8			
				Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	68		68		68		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	68		68		68		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	5		0		68		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			60.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			60.000		2.820		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			128.000		9.360		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	3		4		3		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			545.000		47.731		75.000		-		22.188						22.188	40	29,58		22.188	8	4,07		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	25		5		5		0		2						2		40		2		8			
		2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			440.000		2.716		40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	68		68		68		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa			40.000		5.219		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			255.000		2.715		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			272.000		14.724		169.500		-		29.236						29.236	100	17,25		29.236	20	10,75		
			Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
		2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			68.600		5.199		7.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa			82.500		6.705		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa			61.500		2.685		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			71.500		5.274		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			326.732		5.086		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	68		68		68		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa			235.000		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	5		0		68		0		0						0		0		0		0			
		04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa			61.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			155.000		13.214		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			**3.722.397**		**418.641**		**419.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	406,85		73,53		76,47		33,33		33,33						33,33		43,59		33,33		8,19			
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	500		25		100		25		25						25		25		25		5			
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			3.722.397		418.641		419.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5		0		68		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			412.680		66.101		33.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			165.600		17.336		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			226.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5		0		68		0		0						0		0		0		0			
		2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			90.400		6.807		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			748.000		83.293		70.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			67.800		4.912		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa			67.800		5.273		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			1.944.117		234.919		286.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**13.203.033**		**1.418.971**		**2.026.033**		**-**		**243.886**						**243.886**	**216,54**	**12,04**		**243.886**	**32,05**	**1,85**		
		2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			**907.400**		**159.838**		**179.400**		**-**		**8.700**						**8.700**	**33,33**	**4,85**		**8.700**	**33,33**	**0,96**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) (Angka)	2,25		2,28		2,27		0		0						0		0		0		0			
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19) (Angka)	5		9,6		7		0		0						0		0		0		0			
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			123.000		3.297		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kualitas penduduk yang efektif.	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)	2		4		1		0		0						0		0		0		0			
		2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan			123.000		3.297		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)	2		4		1		0		0						0		0		0		0			
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			784.400		156.540		164.400		-		8.700						8.700	50	5,29		8.700	50	1,11		
			Meningkatkan efektivitas program pengendalian penduduk	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	4		4		1		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
		2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			628.400		116.400		116.400		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	4		4		1		0		0						0		0		0		0			
		2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			156.000		40.140		48.000		-		8.700						8.700	100	18,13		8.700	100	5,58		
			Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
		2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			**8.811.233**		**788.749**		**1.309.233**		**-**		**100.546**						**100.546**	**292,21**	**7,68**		**100.546**	**31,16**	**1,14**	Dinas Pemberdayaan	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR) (%)	58,2		48,7		57,10		0		0						0		0		0		0			
				Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Needs) (%)	8,11		16,1		8,41		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			4.326.000		358.992		661.000		-		34.000						34.000	53,57	5,14		34.000	49	0,79		
			Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang metode KB yang efektif dan sesuai dengan kearifan budaya lokal.	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
				Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	25		22		21		0		24						24		114,29		24		96			
		2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana			1.091.000		193.476		196.000		-		25.000						25.000	100	12,76		25.000	100	2,29		
			Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
		2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			400.000		7.400		80.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			935.000		132.458		135.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			1.900.000		25.658		250.000		-		9.000						9.000	114,29	3,6		9.000	96	0,47		
			Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	25		22		21		0		24						24		114,29		24		96			
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			1.584.000		224.995		294.000		-		41.990						41.990	100	14,28		41.990	100	2,65		
			Meningkatkan kualitas layanan KB yang diberikan kepada masyarakat	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	238		238		238		0		238						238		100		238		100			
		2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			1.584.000		224.995		294.000		-		41.990						41.990	100	14,28		41.990	100	2,65		
			Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	238		238		238		0		238						238		100		238		100			
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			1.811.133		90.443		151.133		-		9.000						9.000	725	5,96		9.000	20	0,5		
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KB dan meningkatkan penggunaan metode KB	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	29		29		1		0		29						29		2900		29		100			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	3000		0		700		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	100		40		20		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			206.100		26.100		26.100		-		9.000						9.000	2900	34,48		9.000	100	4,37		
			Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	29		29		1		0		29						29		2900		29		100			
		2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			473.483		36.285		43.483		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	3000		0		700		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			400.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			426.550		24.908		56.550		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			305.000		3.150		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	100		40		20		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			1.090.100		114.320		203.100		-		15.556						15.556	0	7,66		15.556	3,03	1,43		
			Meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	55		0		0		0		5						5		0		5		9,09			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	68		68		52		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas			140.000		-		-		-		15.556						15.556	0	0		15.556	9,09	11,11		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	55		0		0		0		5						5		0		5		9,09			
		2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			733.100		114.320		183.100		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	68		68		52		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.04.0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			217.000		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**3.484.400**		**470.384**		**537.400**		**-**		**134.640**						**134.640**	**160**	**25,05**		**134.640**	**33,33**	**3,86**	Dinas Pemberdayaan	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	451,22		91		86,08		20		20						40		46,47		40		8,86			
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			1.058.600		21.584		88.600		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	10		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)			179.600		5.000		9.600		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))			239.000				-		-								-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			400.000		-		39.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	10		0		4		0		0						0		0		0		0			
		2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			240.000		16.584		40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			2.425.800		448.800		448.800		-		134.640						134.640	400	30		134.640	100	5,55		
			Meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	4		4		1		0		4						4		400		4		100			
				Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	4		4		1		0		4						4		400		4		100			
		2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			1.205.000		204.000		204.000		-		61.200						61.200	400	30		61.200	100	5,08		
			Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	4		4		1		0		4						4		400		4		100			
		2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			1.220.800		244.800		244.800		-		73.440						73.440	400	30		73.440	100	6,02		
			Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	4		4		1		0		4						4		400		4		100			
		2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**34.448.136**		**5.694.518**		**6.918.616**		**1.567.255**		**1.436.961**						**3.004.216**	**8,64**	**43,42**		**3.004.216**	**0,88**	**8,72**		
		2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**25.007.240**		**4.338.182**		**5.042.020**		**1.537.024**		**1.405.081**						**2.942.105**	**13,57**	**58,35**		**2.942.105**	**2,04**	**11,77**	Dinas Perhubungan	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	64,11		62		62,80		15,7		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			363.000		40.069		20.000		1.238		-						1.238	0	6,19		1.238	0	0,34		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	13		2		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			350.000		40.069		20.000		1.238		-						1.238	0	6,19		1.238	0	0,35		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	13		2		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.000						-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.627.500		2.899.679		3.644.427		1.410.760		1.280.892						2.691.652	0	73,86		2.691.652	0	17,22		
			Tersedianya Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1440		83,38		14		72		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.617.500		2.899.679		3.644.427		1.410.757		1.280.892						2.691.649	0	73,86		2.691.649	0	17,23		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1440		83,38		14		72		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			10.000		-		-		3		-						3	0	0		3	0	0,03		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			36.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2		2		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			19.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2		2		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			17.500				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			30.500		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumentasi Administrasi Pendapatan Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			30.500		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			650.000		115.307		75.400		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			436.000		102.852		50.400		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			4.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			210.000		12.454		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.606.720		109.985		151.200		14.341		9.849						24.190	0	16		24.190	0	1,51		
			Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		2		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		2		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250		10		50		12		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			84.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			300.000		24.330		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		2		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			165.000		6.950		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			235.000		22.577		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		2		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12.720		285		1.200		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			810.000		55.843		80.000		14.341		9.849						24.190	0	30,24		24.190	0	2,99		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250		10		50		12		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.981.409		29.350		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9		2		15		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			246.409		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar			900.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			245.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			360.000		11.350		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9		2		15		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			230.000		18.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.763.311		858.782		545.669		67.816		63.211						131.027	8,33	24,01		131.027	1,67	4,74		
			Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		3		12		3		0						3		25		3		5			
		2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			15.000		1.200		3.000		400		100						500	0	16,67		500	0	3,33		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			680.000		86.726		114.122		14.901		19.439						34.340	0	30,09		34.340	0	5,05		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.068.311		770.856		428.546		52.515		43.672						96.187	25	22,44		96.187	5	4,65		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		3		12		3		0						3		25		3		5			
		2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.948.300		285.010		600.324		42.869		51.128						93.997	65	15,66		93.997	13	4,82		
			Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		3		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	75		12		15		39		0						39		260		39		52			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	170		0		10		7		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			173.300		26.551		33.300		1.771		4.519						6.290	0	18,89		6.290	0	3,63		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		3		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.415.000		258.459		557.024		38.998		46.609						85.607	260	15,37		85.607	52	6,05		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	75		12		15		39		0						39		260		39		52			
		2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			60.000		-		10.000		2.100		-						2.100	0	21		2.100	0	3,5		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	170		0		10		7		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			300.000						-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**7.905.896**		**1.356.336**		**1.876.596**		**30.231**		**31.880**						**62.111**	**0**	**3,31**		**62.111**	**0**	**0,79**	Dinas Perhubungan	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Indeks)	1		0,48		0,5		0,2		0						0		0		0		0			
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)	87,5		62,5		62,50		22		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			200.000				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			135.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0										0		0			
		2.15.02.2.01.0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota			25.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusun Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			3.648.592		48.448		1.633.792		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Perlengkapan Jalan Yang Tersedia	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	110		0		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	19		19		15		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			385.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			2.573.592		-		1.573.592		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	110		0		20		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan			270.000		8.292		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			420.000		40.156		30.200		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	19		19		15		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			1.263.000		977.772		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Terminal Yang Dikelola	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. (Orang)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C			48.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)			875.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C			60.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. (Orang)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)			280.000		977.772		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			190.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			120.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			70.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			664.000		23.121		55.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	3000		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	8		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			120.000		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			100.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			190.000		15.300		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	3000		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			110.000		4.046		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	8		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			29.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			115.000		3.775		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			741.500		74.500		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	3000		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan (Laporan)	3000		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi (Laporan)	3000		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	3000		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	3000		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	3000		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			8.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	3000		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.06.0007	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan			6.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan (Laporan)	3000		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.06.0009	Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi (Laporan)	3000		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.06.0010	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)			7.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			330.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	3000		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			260.000		74.500		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	3000		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			110.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	3000		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			154.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	3000		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			15.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin			100.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin			39.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	3000		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			491.804		232.495		187.804		30.231		31.880						62.111	0	33,07		62.111	0	12,63		
			Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	3000		0		0		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	5		1		12		3		0						0		0		0		0			
				Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal			70.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	3000		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.08.0006	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C			105.000		-		-		1		-						1	0	0		1	0	0		
			Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			271.804		232.495		187.804		30.230		31.880						62.110	0	33.07		62.110	0	22,85		
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	5		1		12		3		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			45.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			362.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan orang/barang	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			362.000				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			191.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota			101.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			90.000				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**			**1.535.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perhubungan	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut (%)	0				0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			1.535.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal Yang Dibangun	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal			1.535.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**21.775.357**		**5.171.811**		**6.792.997**		**796.312**		**798.398**						**1.594.710**	**52,21**	**23,48**		**1.594.710**	**64,01**	**7,32**		
		2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**17.735.357**		**2.206.531**		**3.332.997**		**749.611**		**716.210**						**1.465.821**	**62,21**	**43,98**		**1.465.821**	**99,13**	**8,26**	Dinas Komunikasi,	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	63,4		0		62,60				0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			313.000		54.144		57.000		-		-						-	85,71	0		-	57,14	0		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	35		6		7		0		5						5		71,43		5		14,29			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			63.000		54.144		7.000		-		-						-	71,43	0		-	14,29	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	35		6		7		0		5						5		71,43		5		14,29			
		2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			250.000		-		50.000		-		-						-	100	0		-	100	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.246.294		1.826.003		2.265.134		669.055		653.512						1.322.567	69,52	58,39		1.322.567	59,29	10,8		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	420		117		420		152		292						292		69,52		292		69,52			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0		0		1						1		0		1		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12		1		0		0		1						1		0		1		8,33			
		2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.220.294		1.826.003		2.265.134		669.055		653.512						1.322.567	69,52	58,39		1.322.567	69,52	10,82		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	420		117		420		152		292						292		69,52		292		69,52			
		2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			13.000															0	0		-	100	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0		0		1						1		0		1		100			
		2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			13.000		-		-		-		-						-	0	0		-	8,33	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12		1		0		0		1						1		0		1		8,33			
		2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			390.000		7.443		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			140.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			250.000		7.443		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.061.980		61.943		219.480		22.872		21.974						44.845	66,5	20,43		44.845	31	4,22		
			Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		2		2		0		2						2		100		2		20			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0,41		0,64						0,64		64		0,64		64			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		0,22						0,22		22		0,22		22			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		20		20		11		16						16		80		16		80			
		2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			18.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			199.480		7.956		39.480		-		3.857						3.857	100	9,77		3.857	20	1,93		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		2		2		0		2						2		100		2		20			
		2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			120.000		6.990		20.000		4.000		2.290						6.290	64	31,45		6.290	64	5,24		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0,41		0,64						0,64		64		0,64		64			
		2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			70.000		2.998		10.000		-		2.200						2.200	22	22		2.200	22	3,14		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		0,22						0,22		22		0,22		22			
		2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			650.000		44.000		150.000		18.872		13.627						32.499	80	21,67		32.499	80	5		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		20		20		11		16						16		80		16		80			
		2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.590.000		-		350.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	12		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			300.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			750.000		-		250.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			540.000		-		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	12		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.369.783		185.836		272.783		38.309		34.035						72.344	25	26,52		72.344	25	5,28		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		6						6		50		6		50			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		6						6		50		6		50			
		2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			29.000		3.713		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			500.000		48.717		100.000		18.625		22.885						41.510	50	41,51		41.510	50	8,3		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		6						6		50		6		50			
		2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			90.000		7.856		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			750.783		125.550		157.783		19.684		11.150						30.834	50	19,54		30.834	50	4,11		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		6						6		50		6		50			
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			764.300		71.162		118.600		19.375		6.689						26.064	115	21,98		26.064	271,43	3,41		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		2		1		1						1		50		1		100			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		0		4		15		17						17		425		17		1700			
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		23		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		0		30		0		0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			169.400		27.196		33.600		8.375		2.789						11.164	50	33,23		11.164	100	6,59		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		2		1		1						1		50		1		100			
		2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			125.000		28.260		25.000		5.000		1.500						6.500	100	26		6.500	100	5,2		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			130.000		-		25.000		6.000		2.400						8.400	425	33,6		8.400	1700	6,46		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		0		4		15		17						17		425		17		1700			
		2.16.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			75.000		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			60.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			49.900		15.706		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		23		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			155.000		-		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		0		30		0		0						0		0		0		0			
		2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			**1.871.000**		**1.921.281**		**1.485.000**		**29.750**		**44.938**						**74.688**	**10**	**5,03**		**74.688**	**2,7**	**3,99**	Dinas Komunikasi, Informatika dan	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) (%)	85,08		85,96		84,72				0						0		0		0		0			
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.871.000		1.921.281		1.485.000		29.750		44.938						74.688	10	5,03		74.688	2,7	3,99		
			Terlaksananya pengelolaan informasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	70		4		30		1		3						3		10		3		4,29			
				Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	80		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	10		22		10		2		2						2		20		2		20			
				Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.02.2.01.0014	Relasi Media			52.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			30.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik			204.000		43.375		100.000		4.950		4.976						9.926	10	9,93		9.926	4,29	4,87		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	70		4		30		1		3						3		10		3		4,29			
		2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik			340.000		12.518		300.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi			30.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	80		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			1.125.000		1.865.389		1.085.000		24.800		39.962						64.762	20	5,97		64.762	20	5,76		
			Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	10		22		10		2		2						2		20		2		20			
		2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik			30.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten			30.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik			30.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			**2.169.000**		**1.043.999**		**1.975.000**		**16.952**		**37.250**						**54.202**	**41,67**	**2,74**		**54.202**	**27,78**	**2,5**	Dinas Komunikasi,	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE (Indeks)	3,3		2,8		3,10				0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			44.125		10.150		20.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	2		100		2		0		1						1		50		1		50			
		2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa			44.125		10.150		20.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	2		100		2		0		1						1		50		1		50			
		2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.124.875		1.033.849		1.955.000		16.952		37.250						54.202	40	2,77		54.202	25	2,55		
			Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah yang efisiensi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui pemanfaatan	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	34		100		34		34		34						34		100		34		100			
				Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	4		5		4		0		4						4		100		4		100			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	1		2		1		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			1.320.000		999.899		1.300.000		16.952		37.250						54.202	100	4,17		54.202	100	4,11		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	34		100		34		34		34						34		100		34		100			
		2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi			100.000		15.070		80.000		-		-						-	100	0		-	100	0		
			Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	4		5		4		0		4						4		100		4		100			
		2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo			24.125		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE			249.125		-		225.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah			324.125		-		300.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas			13.375		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02.0039	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi			74.125		18.880		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksanaya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	1		2		1		0		0						0		0		0		0			
		7	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**36.182.957**		**5.392.154**		**5.614.513**		**1.261.095**		**1.158.822**						**2.419.917**	**9,67**	**43,1**		**2.419.917**	**19,6**	**6,69**		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**30.508.579**		**4.561.676**		**5.036.363**		**1.261.095**		**1.153.822**						**2.414.917**	**10,84**	**47,95**		**2.414.917**	**6,29**	**7,92**	Dinas Perindustrian, Perdagangan	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	68,2		0		66,95				67,3						67,3		100,52		67,3		98,68			
		2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			666.000		53.340		55.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	40		3		3		3		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			666.000		53.340		55.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	40		3		3		3		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21.469.238		3.511.273		4.102.023		1.175.794		1.072.374						2.248.168	106,78	54,81		2.248.168	20	10,47		
			Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	315		420		59		63		63						63		106,78		63		20			
		2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			21.469.238		3.511.273		4.102.023		1.175.794		1.072.374						2.248.168	106,78	54,81		2.248.168	20	10,47		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	315		420		59		63		63						63		106,78		63		20			
		2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			246.000		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			246.000				20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			59.720		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			59.720		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			97.038		6.837		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	47		1		2		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			97.038		6.837		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	47		1		2		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			677.080		67.605		167.140		9.142		14.063						23.204	20,83	13,88		23.204	3,54	3,43		
			Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	42		0		8		8		2						2		25		2		4,76			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		0		1		1		1						1		100		1		20			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		0		1		1		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			99.580		9.473		25.000		2.500		-						2.500	25	10		2.500	4,76	2,51		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	42		0		8		8		2						2		25		2		4,76			
		2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			39.860		3.500		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			40.832		3.587		11.000		2.500		-						2.500	100	22,73		2.500	20	6,12		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		0		1		1		1						1		100		1		20			
		2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			6.808		1.140		1.140		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			452.400		49.905		100.000		4.142		14.063						18.204	0	18,2		18.204	0	4,02		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		0		1		1		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			15.000				15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			22.600		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.009.137		43.586		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		4		4		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			850.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			543.403		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			200.000				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			365.734		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			50.000		43.586		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		4		4		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.501.817		441.640		421.500		67.253		54.959						122.211	0	28,99		122.211	0	4,88		
			Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	75		0		1		5		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	420		21		1		21		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3540		177		1		3		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			8.958		1.200		1.500		500		-						500	0	33,33		500	0	5,58		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	75		0		1		5		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.110.982		140.575		220.000		29.853		22.209						52.061	0	23,66		52.061	0	4,69		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	420		21		1		21		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.381.876		299.865		200.000		36.900		32.750						69.650	0	34,83		69.650	0	5,04		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3540		177		1		3		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.782.549		437.395		195.700		8.907		12.427						21.334	1,67	10,9		21.334	25	0,77		
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	70		6		1		1		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	120		6		3		6		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		15		0		1						1		6,67		1		100			
		2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			202.032		27.955		36.600		1.771		2.689						4.460	0	12,19		4.460	0	2,21		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	70		6		1		1		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			489.968		61.775		79.100		7.136		4.788						11.923	0	15,07		11.923	0	2,43		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	120		6		3		6		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.990.829		337.665		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			99.720		10.000		50.000		-		4.950						4.950	6,67	9,9		4.950	100	4,96		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		15		0		1						1		6,67		1		100			
		2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**			**50.000**		**5.862**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perindustrian, Perdagangan	
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	27,8				26,90				10						10		37,17		10		35,97			
		2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			50.000		5.862		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			50.000		5.862		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**			**129.440**		**4.918**		**30.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perindustrian, Perdagangan	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	10,56		5,28		7,04				2						2		28,41		2		18,94			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			129.440		4.918		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	20		0		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	20		20		20		0		0						0		0		0		0			
		2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			119.440				20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	20		0		20		0		0						0		0		0		0			
		2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			10.000		4.918		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	20		20		20		0		0						0		0		0		0			
		2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**			**109.440**		**5.133**		**10.000**		**-**		**5.000**						**5.000**	**100**	**50**		**5.000**	**100**	**4,57**	Dinas Perindustrian, Perdagangan	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	44,18		39,4		40,29				10						10		24,82		10		22,63			
		2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			109.440		5.133		10.000		-		5.000						5.000	100	50		5.000	100	4,57		
			Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	20		20		20		0		20						20		100		20		100			
		2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			109.440		5.133		10.000		-		5.000						5.000	100	50		5.000	100	4,57		
			Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	20		20		20		0		20						20		100		20		100			
		2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**			**290.500**		**-**		**50.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perindustrian, Perdagangan	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (%)	17,61		0		10,56				2						2		18,94		2		11,36			
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			290.500		-		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	25		0		10		0		0						0		0		0		0			
		2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			290.500		-		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	25		0		10		0		0						0		0		0		0			
		2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**			**310.500**		**-**		**20.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perindustrian, Perdagangan	
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	10,56		0		7,75				1,5						1,5		19,35		1,5		14,2			
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			310.500		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	12		0		20		0		0						0		0		0		0			
		2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota			310.500				20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	12		0		20		0		0						0		0		0		0			
		2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			**4.107.298**		**755.300**		**398.150**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**71,43**	**0**	Dinas Perindustrian, Perdagangan	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	0,9		0		0,76				0,2						0,2		26,32		0,2		22,22			
				Pertumbuhan Wirausaha (%)	13,42		0		10,53				2						2		18,99		2		14,9			
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			4.107.298		755.300		398.150		-		-						-	0	0		-	71,43	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan UMKM	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	20		100		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	20		20		50		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	20		30		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	25		0		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	20		0		0		0		100						100		0		100		500			
				Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	20		0		500		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	25		0		25		0		0						0		0		0		0			
		2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro			323.410		21.541		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	20		100		100		0		0						0		0		0		0			
		2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			1.724.478		21.879		178.150		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	20		20		50		0		0						0		0		0		0			
		2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			596.920		711.880		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	20		30		20		0		0						0		0		0		0			
		2.17.07.2.01.0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil			268.600		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	25		0		20		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik			348.040		-		-		-		-						-	0	0		-	500	0		
			Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun,	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	20		0		0		0		100						100		0		100		500			
		2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro			298.600		-		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	20		0		500		0		0						0		0		0		0			
		2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan			547.250		-		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	25		0		25		0		0						0		0		0		0			
		2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**			**677.200**		**59.265**		**70.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perindustrian, Perdagangan	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	2,36				2,24				0,2						0,2		8,93		0,2		8,47			
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			677.200		59.265		70.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	100		50		25		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	100		0		25		0		0						0		0		0		0			
		2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro			353.700		59.265		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi,	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	100		50		25		0		0						0		0		0		0			
		2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			323.500		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	100		0		25		0		0						0		0		0		0			
		2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**5.168.551**		**114.441**		**275.000**		**-**		**10.445**						**10.445**	**16,26**	**3,8**		**10.445**	**2,72**	**0,2**		
		2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			**1.321.778**		**1.149**		**15.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	99,17		260		98,08		10,58		0						0		0		0		0			
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			810.891		1.149		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Jumlah Penetapan Kerjasama Kemitraan Dibidang Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	5		1		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	95		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			479.891		1.149		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	5		1		5		0		0						0		0		0		0			
		2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota			331.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	95		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			510.887		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peta Potensi Penanaman Modal	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)			248.287		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			262.600		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**			**121.773**		**11.890**		**30.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	4,2		45,4		5,00				0						0		0		0		0			
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			121.773		11.890		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Jumlah Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	6		1		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			62.576		3.855		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksanaya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	6		1		4		0		0						0		0		0		0			
		2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota			59.197		8.035		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersuunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			**1.510.000**		**51.266**		**120.000**		**-**		**5.467**						**5.467**	**43**	**4,56**		**5.467**	**7,96**	**0,36**	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	96,76		99,5		95,32		98,11		104,02						104,02		109,13		104,02		107,5			
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			1.510.000		51.266		120.000		-		5.467						5.467	43	4,56		5.467	7,96	0,36		
			Meningkatnya jumlah pelayanan perizinan kepada pelaku usaha penanaman modal	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	6		3		6		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2600		4.497		450		150		0					0		0		0		0			
				Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	1080		180		200		150		194					344		172		344		31,85			
				Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	1790		360		320		648		0					0		0		0		0			
		2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			360.000		6.736		10.000		-		-				-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	6		3		6		0		0					0		0		0		0			
		2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			340.000		13.245		25.000		-		-				-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2600		4.497		450		150		0					0		0		0		0			
		2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			435.000		11.562		45.000		-		5.467						5.467	172	12,15		5.467	31,85	1,26		
			Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	1080		180		200		150		194					344		172		344		31,85			
		2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko			375.000		19.722		40.000		-		-				-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	1790		360		320		648		0					0		0		0		0			
		2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			**2.090.000**		**43.722**		**90.000**		**-**		**4.978**						**4.978**	**2,27**	**5,53**		**4.978**	**2,08**	**0,24**	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	91,15		75,94		92,62		93,81		95,24					95,24		102,83		95,24		104,49			
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2.090.000		43.722		90.000		-		4.978						4.978	2,27	5,53		4.978	2,08	0,24		
			Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	325		25		55		8		0					0		0		0		0			
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	180		18		225		0		0					0		0		0		0			
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kemudahan Berusaha Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	240		30		220		0		15					15		6,82		15		6,25			
		2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			300.000		10.715		30.000		-		-				-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	325		25		55		8		0					0		0		0		0			
		2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			1.251.400		19.759		30.000		-		-				-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	180		18		225		0		0					0		0		0		0			
		2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal			538.600		13.249		30.000		-		4.978						4.978	6,82	16,59		4.978	6,25	0,92		
			Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kemudahan Berusaha Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kemudahan Berusaha Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	240		30		220		0		15					15		6,82		15		6,25			
		2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			**125.000**		**6.414**		**20.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	40,53		100		40,62		18,81		0					0		0		0		0			
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			125.000		6.414		20.000		-		-				-	0	0		-	0	0			
			Meningkatnya kemudahan mengakses data dan informasi penanaman modal oleh masyarakat	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	6		0		6		0		0					0		0		0		0			
		2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			125.000		6.414		20.000		-		-				-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	6		0		6		0		0					0		0		0		0			
		2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**37.055.996**		**6.000.591**		**6.319.432**		**709.464**		**1.942.939**						**2.652.402**	**50,06**	**41,97**		**2.652.402**	**11,73**	**7,16**		
		2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**18.632.996**		**3.209.253**		**3.356.432**		**709.464**		**1.681.239**						**2.390.702**	**76,77**	**71,23**		**2.390.702**	**22,63**	**12,83**	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	67,2		65,5		65,75				0					0		0		0		0			
		2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			125.000		30.551		45.000		-		991						991	61,54	2,2		991	15,09	0,79		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	53		8		13		4		4					8		61,54		8		15,09			
		2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			125.000		30.551		45.000		-		991						991	61,54	2,2		991	15,09	0,79		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	53		8		13		4		4					8		61,54		8		15,09			
		2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.002.027		2.742.639		2.821.902		664.891		1.590.943						2.255.834	200	79,94		2.255.834	3,77	17,35		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Disporapar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1750		47		33		33		33					66		200		66		3,77			
		2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.002.027		2.742.639		2.821.902		664.891		1.590.943						2.255.834	200	79,94		2.255.834	3,77	17,35		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1750		47		33		33		33					66		200		66		3,77			
		2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			80.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0					0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	48		0		0		0		0					0		0		0		0			
		2.19.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0					0		0		0		0			
		2.19.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	48		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			302.760		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	125		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			75.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	125		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			160.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			67.760				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.002.140		70.219		106.140		7.756		12.320						20.075	38	18,91		20.075	5,05	2		
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	155		4		25		0		15						15		60		15		9,68			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	100		12		20		0		10						10		50		10		10			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	50		5		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	92		12		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	215		15		15		10		2						12		80		12		5,58			
		2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			210.000		23.557		35.000		-		1.188						1.188	60	3,39		1.188	9,68	0,57		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	155		4		25		0		15						15		60		15		9,68			
		2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			80.000		4.000		5.000		-		1.240						1.240	50	24,8		1.240	10	1,55		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	100		12		20		0		10						10		50		10		10			
		2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			45.000		2.973		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	50		5		10		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.140		760		1.140		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	92		12		12		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			660.000		38.930		60.000		7.756		9.892						17.648	80	29,41		17.648	5,58	2,67		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	215		15		15		10		2						12		80		12		5,58			
		2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.085.214		63.055		45.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Milik Daerah Sebagai Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	16		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	25		4		5		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			800.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	16		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			540.214		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			345.000		63.055		45.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	25		4		5		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.498.855		225.925		246.590		25.520		57.470						82.990	66,67	33,65		82.990	7,21	5,54		
			Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	61		3		1		0		1						1		100		1		1,64			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			13.500		1.191		1.500		-		492						492	100	32.81		492	1,64	3,65		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	61		3		1		0		1						1		100		1		1,64			
		2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			397.000		37.863		79.400		6.295		17.728						24.023	50	30,26		24.023	10	6,05		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.088.355		186.872		165.690		19.225		39.250						58.475	50	35,29		58.475	10	5,37		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			537.000		76.865		91.800		11.298		19.515						30.812	125	33,56		30.812	100	5,74		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		1		1		1		1						2		200		2		200			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		1		1						1		100		1		100			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			166.500		28.980		33.300		7.406		10.106						17.512	100	52,59		17.512	100	10,52		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			127.500		18.000		25.500		917		2.737						3.653	200	14,33		3.653	200	2,87		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		1		1		1		1						2		200		2		200			
		2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			218.000		29.885		18.000		-		2.997						2.997	100	16,65		2.997	100	1,37		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
		2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			21.000		-		15.000		2.975		3.675						6.650	100	44,33		6.650	100	31,67		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		1		1						1		100		1		100			
		2.19.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**2.080.000**		**802.143**		**460.000**		**-**		**10.800**						**10.800**	**20**	**2,35**		**10.800**	**2,75**	**0,52**	Dinas Kepemudaan,	
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (%)	11,78		12,02		11,92		8,12		8,75						8,75		73,41		8,75		74,28			
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			1.420.000		392.627		360.000		-		10.800						10.800	25	3		10.800	3,85	0,76		
			Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kota Lhokseumawe	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	275		100		50		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	26		0		5		0		5						5		100		5		19,23			
				Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	150		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	70		0		50		0		0						0		0		0		0			
		2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkroniasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota			425.000		375.793		85.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkroniasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	275		100		50		0		0						0		0		0		0			
		2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda			180.000		16.834		100.000		-		10.800						10.800	100	10,8		10.800	19,23	6		
			Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	26		0		5		0		5						5		100		5		19,23			
		2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota			250.000		-		90.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	150		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota			160.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota			405.000		-		85.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	70		0		50		0		0						0		0		0		0			
		2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			660.000		409.516		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kota Lhokseumawe	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	5		1		16		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota			500.000		409.516		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	5		1		16		0		0						0		0		0		0			
		2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota			160.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**14.403.000**		**1.866.113**		**2.253.000**		**-**		**250.900**						**250.900**	**16,67**	**11,14**		**250.900**	**1,79**	**1,74**		
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Propinsi (%)	1		1,15		1,00		0		0,25						0,25		25		0,25		25		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan	
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			4.865.000		172.945		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	34		1		2		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota			4.865.000		172.945		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	34		1		2		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			6.153.000		314.013		1.253.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	91		5		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota (Kegiatan)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	610		0		200		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			4.703.000		314.013		153.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	91		5		3		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota (Kegiatan)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga			1.250.000		-		1.100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	610		0		200		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			455.000		198.204		200.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	300		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	180		100		50		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah			130.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	300		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga			225.000		198.204		200.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	180		100		50		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota			25.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota			75.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			2.354.400		1.145.493		700.000		-		250.900						250.900	100	35,84		250.900	25	10,66		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		1		1		0		1						1		100		1		25			
		2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait			2.354.400		1.145.493		700.000		-		250.900						250.900	100	35,84		250.900	25	10,66		
			Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		1		1		0		1						1		100		1		25			
		2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			575.600		35.459		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	2		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	3		1		1		0		0						0		0		0		0			
		03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi			100.000		18.503		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	2		1		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan			45.600		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat			100.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan			120.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.05.0010	Pemasalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan Internasional			210.000		16.956		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	3		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**			**1.940.000**		**123.081**		**250.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**		
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (%)	100		95		95		6,75		7,25						7,25		7,63		7,25		7,25			
		2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			1.940.000		123.081		250.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kota Lhokseumawe	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	250		25		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	10		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan (Organisasi)	4		1		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah			350.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah			290.000		72.790		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	250		25		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah			500.000		33.350		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	10		1		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.04.2.01.0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah			460.000		3.940		200.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah			90.000		5.445		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan			250.000		7.555		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan (Organisasi)	4		1		0		0		0						0		0		0		0			
		2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**450.000**		**25.072**		**90.000**		**-**		**-**						**-**	**50**	**0**		**-**	**33,33**	**0**		
		2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			**450.000**		**25.072**		**90.000**		**-**		**-**						**-**	**50**	**0**		**-**	**33,33**	**0**	Dinas Komunikasi,	
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	1,1		1		1,01		0		0						0		0		0		0			
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			360.000		25.072		90.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	34		34		34		0		34						34		100		34		100			
				Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	34		34		34		0		0						0		0		0		0			
		2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			175.000		11.780		40.000		-		-						-	100	0		-	100	0		
			Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	34		34		34		0		34						34		100		34		100			
		2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			185.000		13.292		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	34		34		34		0		0						0		0		0		0			
		2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			90.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ditetapkannya Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	34		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.21.02.2.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			90.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	34		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**16.262.372**		**2.834.019**		**2.613.376**		**445.402**		**496.678**						**942.080**	**12,43**	**36,05**		**942.080**	**4,98**	**5,79**		
		2.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**2.590.000**		**446.488**		**210.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pendidikan dan	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	40		15		33,33				0						0		0		0		0			
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.555.000		-		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	1		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	50		0		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			195.000		-		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	1		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			160.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	50		0		100		0		0						0		0		0		0			
		2.22.02.2.01.0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota			400.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.02.2.01.0004	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan			400.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.02.2.01.0005	Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan			400.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.035.000		446.488		195.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Objek keseinian tradisional yang dilestarikan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	1		13		15		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	50		1		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	1		0		10		0		0						0		0		0		0			
		2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			825.000		307.077		165.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	1		13		15		0		0						0		0		0		0			
		2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			125.000		139.410		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	50		1		3		0		0						0		0		0		0			
		2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan			85.000		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	1		0		10		0		0						0		0		0		0			
		2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**			**415.000**		**117.671**		**80.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	66,67		75		40,00				0						0		0		0		0			
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			415.000		117.671		80.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Objek keseinian tradisional yang dilestarikan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	50		100		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1		0		10		0		0						0		0		0		0			
		2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			250.000		117.671		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	50		100		100		0		0						0		0		0		0			
		2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan			65.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			100.000		-		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1		0		10		0		0						0		0		0		0			
		2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**			**525.244**		**-**		**65.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (%)	83,33		46,67		66,67				0						0		0		0		0			
		2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			525.244		-		65.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Tempat Bersejarah yang dilestarikan	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	20		0		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit)	20		0		20		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota			125.000		-		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	20		0		20		0		0						0		0		0		0			
		2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah			200.244		-		40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit)	20		0		20		0		0						0		0		0		0			
		2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**3.449.000**		**14.546**		**203.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (%)	100		40,7		40,70				0						0		0		0		0			
				Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	55,15		24,52		24,52				0						0		0		0		0			
		2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			551.000		-		103.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	5		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			242.000		-		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	5		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya			229.000		-		73.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		2.22.05.2.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda			80.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			2.500.000		14.546		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Cagar Budaya yang dikelola	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	5		1		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya			250.000		14.546		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	5		1		5		0		0						0		0		0		0			
		2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya			1.800.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya			250.000		-		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		2.22.05.2.02.0004	Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.05.2.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			398.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi (Objek)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.22.05.2.03.0001	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			248.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbitnya Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi (Objek)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		2.22.05.2.03.0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			150.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**			**625.000**		**562.866**		**75.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (%)	13,84		13,76		13,76				0						0		0		0		0			
		2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			625.000		562.866		75.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	20		1		300		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	15		0		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	1		0		2		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1		0		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)	1		0		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola (Unit)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Layanan Operasional Museum (Layanan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu			60.000		562.866		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	20		1		300		0		0						0		0		0		0			
		2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman			60.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	15		0		20		0		0						0		0		0		0			
		2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum			65.000		-		35.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	1		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			100.000		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1		0		20		0		0						0		0		0		0			
		2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum			100.000		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)	1		0		20		0		0						0		0		0		0			
		2.22.06.2.01.0013	Pengelolaan Koleksi Museum			160.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Koleksi Museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola (Unit)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.06.2.01.0014	Pengelolaan Operasional Museum			80.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Operasional Museum	Jumlah Layanan Operasional Museum (Layanan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.457.201**		**1.526.640**		**1.754.771**		**445.402**		**469.883**						**915.285**	**25,15**	**52,16**		**915.285**	**2,5**	**12,27**	Sekretariat Majelis	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	64		88,68		62,15		27,62		56,76						56,76		91,33		56,76		88,69			
		2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			37.316		4.353		7.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		17		7		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			34.400		4.353		7.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		17		7		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			916		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.486.446		992.992		1.184.023		385.142		368.502						753.643	7,48	63,65		753.643	1,31	16,8		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	560		112		294		22		22						22		7,48		22		3,93			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.485.446		992.992		1.184.023		385.142		368.502						753.643	7,48	63,65		753.643	3,93	16,8		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	560		112		294		22		22						22		7,48		22		3,93			
		2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Data dan Laporan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	12		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	12		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			311.500		50.726		62.390		990		7.851						8.841	4	14,17		8.841	2,86	2,84		
			Tersedianya Dokumen administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		6		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25		5		2		2		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		5		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		14		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10		10		10		0		2						2		20		2		20			
		2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			52.000		6.419		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		6		4		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			25.000		7.455		6.250		990		-						990	0	15,84		990	0	3,96		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25		5		2		2		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			37.000		2.993		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		5		2		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5.700		798		1.140		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		14		1		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			190.800		33.061		40.000		-		7.851						7.851	20	19,63		7.851	20	4,11		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10		10		10		0		2						2		20		2		20			
		2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			131.200		-		26.858		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		6		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			30.400		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			31.200		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			30.200															0	0			0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			38.900		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		26.858		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		6		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.098.949		421.219		395.300		54.150		85.450						139.600	62,31	35,31		139.600	4,03	6,65		
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	9		1		1		1		1						1		100		1		11,11			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	660		134		134		33		33						33		24,63		33		5			
		2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.000		800		1.000		250		250						500	100	50		500	11,11	5		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	9		1		1		1		1						1		100		1		11,11			
		2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			30.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			60.200		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.998.749		420.419		394.300		53.900		85.200						139.100	24,63	35,28		139.100	5	6,96		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	660		134		134		33		33						33		24,63		33		5			
		2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			390.790		57.350		79.200		5.120		8.080						13.200	50	16,67		13.200	8	3,38		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		10		1		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			157.100		26.863		29.600		2.250		2.250						4.500	100	15,2		4.500	20	2,86		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
		2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			137.100		20.800		25.600		2.250		5.830						8.080	100	31,56		8.080	20	5,89		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
		2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			30.623		-		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			32.959		9.687		9.000		620		-						620	0	6,89		620	0	1,88		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		10		1		0						0		0		0		0			
		2.22.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			33.009		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.07	**PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)**			**1.200.927**		**165.809**		**225.605**		**-**		**26.795**						**26.795**	**24,29**	**11,88**		**26.795**	**18,45**	**2,23**	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
			Meningkatnya pembinaan adat istiadat	Indeks Adat Istiadat Aceh (Nilai)	99		97,43		97,44				33,49						33,49		34,37		33,49		33,83			
		2.22.07.7.01	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat			538.047		63.379		120.000		-		6.880						6.880	23,33	5,73		6.880	33,33	1,28		
			Terlaksananya Pembinaan Adat Istiadat yang dilestarikan	Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional (Laporan)	3		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lembaga Pemasyarakatan Adat Do Da Idi (Lembaga)	2		9		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat (Orang)	25		20		50		0		25						25		50		25		100			
				Jumlah Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan yang Dibina (Keluarga)	2		10		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh (Buku)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang Dipublikasikan (Dokumen)	2		2		10		0		2						2		20		2		100			
		2.22.07.7.01.0001	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional			113.000		16.217		40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional (Laporan)	3		0		1		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		2.22.07.7.01.0002	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi			76.000		11.137		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianyan Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	Jumlah Lembaga Pemasyarakatan Adat Do Da Idi (Lembaga)	2		9		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.07.7.01.0003	Sosialisasi Adat Istiadat			145.000		11.313		50.000		-		1.280						1.280	50	2,56		1.280	100	0,88		
			Terfasilitasinya Sosialisasi Adat Istiadat	Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat (Orang)	25		20		50		0		25						25		50		25		100			
		2.22.07.7.01.0004	Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan			57.212		6.742		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan	Jumlah Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan yang Dibina (Keluarga)	2		10		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.07.7.01.0005	Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh			46.835		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh	Jumlah Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh (Buku)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.07.7.01.0006	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang			100.000		17.970		30.000		-		5.600						5.600	20	18,67		5.600	100	5,6		
			Terlaksananya Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang	Jumlah Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang Dipublikasikan (Dokumen)	2		2		10		0		2						2		20		2		100			
		2.22.07.7.02	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat			316.100		90.830		45.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Pengembangan hukum adat yang dibina	Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat (Orang)	50		20		30		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pembinaan Mediasi Adat (Laporan)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat (Orang)	50		40		50		0		0						0		0		0		0			
		2.22.07.7.02.0001	Penguatan Peradilan Adat			110.000		11.413		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelatihan Peradilan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat (Orang)	50		20		30		0		0						0		0		0		0			
		2.22.07.7.02.0002	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)			85.000		6.742		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.07.7.02.0003	Pembinaan Mediasi Adat			25.100		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Mediasi Adat	Jumlah Laporan Pembinaan Mediasi Adat (Laporan)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.07.7.02.0004	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat			96.000		72.675		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat (Orang)	50		40		50		0		0						0		0		0		0			
		2.22.07.7.03	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat			346.781		11.600		60.605		-		19.915						19.915	50	32,86		19.915	16,23	5,74		
			Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Jumlah Peserta Pembinaan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan (Orang)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat (Orang)	50		20		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Rapat Kerja MAA (Dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan (Eksemplar)	100		0		150		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pemuda Pelopor Adat yang Dibina (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kasus Sengketa Adat yang Terdata dan Terdokumentasi (Kasus)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pakaian dan Perlengkapan Adat (Unit)	22		0		25		0		25						25		100		25		113,64			
		2.22.07.7.03.0001	Pembinaan Kapasitas MAA			30.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan	Jumlah Peserta Pembinaan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan (Orang)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.07.7.03.0002	Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat			66.381		11.600		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat (Orang)	50		20		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.07.7.03.0003	Rapat Kerja MAA			40.400		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Rapat Kerja MAA	Jumlah Laporan Hasil Rapat Kerja MAA (Dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.07.7.03.0004	Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat			120.000		-		35.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbitnya Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat	Jumlah Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan (Eksemplar)	100		0		150		0		0						0		0		0		0			
		2.22.07.7.03.0005	Pembinaan Pemuda Pelopor Adat			30.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Pemuda Pelopor Adat	Jumlah Pemuda Pelopor Adat yang Dibina (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.07.7.03.0006	Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat			30.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Dokumentasi Kasus Sengketa Adat	Jumlah Kasus Sengketa Adat yang Terdata dan Terdokumentasi (Kasus)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.07.7.03.0007	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat			30.000		-		25.605		-		19.915						19.915	100	77,78		19.915	113,64	66,38		
			Tersedianya Pakaian dan Perlengkapan Adat	Jumlah Pakaian dan Perlengkapan Adat (Unit)	22		0		25		0		25						25		100		25		113,64			
		2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**22.792.796**		**3.058.548**		**3.462.958**		**995.855**		**970.243**						**1.966.098**	**24,85**	**56,78**		**1.966.098**	**6,8**	**8,63**		
		2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**20.828.354**		**2.946.133**		**3.317.958**		**995.855**		**970.243**						**1.966.098**	**42,79**	**59,26**		**1.966.098**	**10,38**	**9,44**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	63,9		61,2		61,95		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			101.975		6.244		20.000		-		1.290						1.290	100	6,45		1.290	10	1,26		
			Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		2		2		0		2						2		100		2		20			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			87.381		6.244		20.000		-		1.290						1.290	100	6,45		1.290	20	1,48		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		2		2		0		2						2		100		2		20			
		2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.594		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.480.329		2.325.209		2.747.234		977.083		874.549						1.851.631	28,57	67,4		1.851.631	1,9	10,59		
			Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1680		336		336		96		96						96		28,57		96		5,71			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	35		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			17.456.423		2.325.209		2.747.234		977.083		874.549						1.851.631	28,57	67,4		1.851.631	5,71	10,61		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1680		336		336		96		96						96		28,57		96		5,71			
		2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			10.270						-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			13.636		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	35		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20.770		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			6.420		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			14.350		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			142.967		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangakat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			26.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			9.167		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			62.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			45.800		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			770.804		57.556		77.200		-		26.618						26.618	55,56	34,48		26.618	16,3	3,45		
			Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0		1						1		100		1		20			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		1						1		100		1		100			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	75		1		15		0		5						5		33,33		5		6,67			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			65.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			154.000		14.839		25.000		-		2.499						2.499	100	10		2.499	20	1,62		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
		2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			42.721		-		7.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			95.325		2.800		10.000		-		2.500						2.500	100	25		2.500	20	2,62		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0		1						1		100		1		20			
		2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			58.010		4.200		9.000		-		2.500						2.500	100	27,78		2.500	100	4,31		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		1						1		100		1		100			
		2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			11.893		760		1.200		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			315.200		34.958		25.000		-		19.119						19.119	33,33	76,48		19.119	6,67	6,07		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	75		1		15		0		5						5		33,33		5		6,67			
		2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			14.752				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			13.903		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.197.800		49.288		83.349		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		10		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			293.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			383.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			120.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			203.000		49.288		83.349		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		10		5		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			177.000				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			21.800		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			805.478		397.371		254.575		15.616		56.328						71.944	43,75	28,26		71.944	20,35	8,93		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3		0		1		0		1						1		100		1		33,33			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24		12		12		3		3						6		50		6		25			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	13		6		12		3		3						3		25		3		23,08			
		2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			950		790		3.000		-		-						-	100	0		-	33,33	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3		0		1		0		1						1		100		1		33,33			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			526.000		112.441		150.408		6.907		34.953						41.861	50	27,83		41.861	25	7,96		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24		12		12		3		3						6		50		6		25			
		2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			960		3.202		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			277.568		280.939		86.167		8.708		21.375						30.083	25	34,91		30.083	23,08	10,84		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	13		6		12		3		3						3		25		3		23,08			
		2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			308.232		110.464		135.600		3.157		11.458						14.614	44,44	10,78		14.614	20	4,74		
			Tersusunnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		1		3		0		1						1		33,33		1		20			
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		10		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			3.682		26.393		33.700		3.157		2.696						5.853	100	17,37		5.853	100	158,98		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			60.000		68.392		76.900		-		8.761						8.761	33,33	11,39		8.761	20	14,6		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		1		3		0		1						1		33,33		1		20			
		2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			15.050		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			41.500		15.680		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		10		10		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			105.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			83.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**			**1.887.442**		**112.415**		**140.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Angka)	71,15		0		69,25		0		15,33						15,33		22,14		15,33		21,55			
		2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.526.392		76.439		80.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	226.6		25		25		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	98,1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)	6		3		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	56		15		15		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)	90		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi (Dokumen)	34483		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	128.6		4		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	290.2		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	3089		10		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	1		10		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	45		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			138.493		11.999		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	226.6		25		25		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			145.993		11.148		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	98.1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota			138.493		11.135		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)	6		3		3		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota			138.493		10.965		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	56		15		15		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat			138.493		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)	90		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.01.0015	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi			142.493		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi (Dokumen)	34483		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			138.493		13.676		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	128.6		4		4		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan			128.493		7.194		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	290.2		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan			137.993		10.322		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	3089		10		1		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpuitakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota			138.493		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	1		10		10		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			140.464		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	45		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			361.049		35.976		60.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terciptanya Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	40		6		6		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	50		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	3166		6		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	62766		80		80		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			90.263		-		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	40		6		6		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			90.263		15.009		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	50		2		2		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			90.261		8.972		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	3166		6		10		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat			90.263		11.995		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	62766		80		80		0		0						0		0		0		0			
		2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**			**77.000**		**-**		**5.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Meningkatnya Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang di milki (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			37.300		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Naskah Kuno Milik Daerah	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	1		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			18.800				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			18.500		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	1		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			39.700		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			terlaksananya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara			21.038		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.03.2.02.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara			18.663		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**1.271.240**		**8.894**		**75.000**		**-**		**6.112**						**6.112**	**20**	**8,15**		**6.112**	**1,18**	**0,48**		
		2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**			**637.937**		**8.894**		**75.000**		**-**		**6.112**						**6.112**	**25**	**8,15**		**6.112**	**2,5**	**0,96**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (%)	64,71		4,12		52,21		0		54,4						54,4		104,19		54,4		84,07			
		2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			271.073		-		30.000		-		6.112						6.112	50	20,37		6.112	5	2,25		
			Terlaksananya pengelola arsip dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	5		0		1		0		1						1		100		1		20			
				Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			74.304				15.000		-		6.112						6.112	100	40,75		6.112	20	8,23		
			Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	5		0		1		0		1						1		100		1		20			
		2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			68.049		-		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			75.641		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.24.02.2.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis			53.079		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			140.946		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengelola arsip statis	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip (Naskah)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.24.02.2.02.0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip			70.473		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip (Naskah)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			70.474		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			225.918		8.894		45.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			70.574		-		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			155.344		8.894		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**			**633.304**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Penyelamatan Arsip (%)	60		7,69		40		0		0						0		0		0		0			
		2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			76.530		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			76.530		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota			167.421		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana			97.534		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana			69.887		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			200.681		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Arsip)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			95.118		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			105.563		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Arsip)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota			100.051		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			58.479		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			41.573		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang			88.620		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang			45.718		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)			42.902		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**7.057.558**		**529.944**		**679.862**		**2.300**		**25.999**						**28.299**	**22,22**	**4,16**		**28.299**	**3,24**	**0,4**		
		3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			**4.261.855**		**462.503**		**529.862**		**-**		**13.172**						**13.172**	**23,33**	**2,49**		**13.172**	**8,33**	**0,31**	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	15.906,44		0		14809,50				3494						3.494		23,59		3.494		21,97			
		3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			150.451		2.871		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan Penangkapan ikan di Wilayah Sungai,Danau,Waduk dan Genangan Air lainnya yang dapat di Usahakan dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	60		12		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	75		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			25.064		2.871		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	60		12		12		0		0						0		0		0		0			
		3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			125.387		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	75		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			4.001.081		450.108		509.862		-		10.955						10.955	30	2,15		10.955	20	0,27		
			Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	200		200		200		0		70						70		35		70		35			
				Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	40		8		8		0		2						2		25		2		5			
		3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			3.900.823		419.587		499.862		-		8.675						8.675	35	1,74		8.675	35	0,22		
			Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	200		200		200		0		70						70		35		70		35			
		3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil			100.258		30.521		10.000		-		2.280						2.280	25	22,8		2.280	5	2,27		
			Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	40		8		8		0		2						2		25		2		5			
		3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			110.322		9.524		10.000		-		2.218						2.218	33,33	22,18		2.218	5	2,01		
			Terlaksananya Penerbitan Tasnda daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai,DanauWaduk,rawa dan Genangan Air Lainnya	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	40		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)	1000		200		300		0		100						100		33,33		100		10			
		3.25.03.2.04.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT			25.064		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	40		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT			85.258		9.524		10.000		-		2.218						2.218	33,33	22,18		2.218	10	2,6		
			Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)	1000		200		300		0		100						100		33,33		100		10			
		3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**2.198.671**		**67.441**		**150.000**		**2.300**		**12.826**						**15.126**	**21,33**	**10,08**		**15.126**	**1,94**	**0,69**	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.067,61		0		2026,77				1316,64						1.316,64		64,96		1.316,64		63,68			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			120.322		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1	38		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.04.2.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing			70.193		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1	38		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.04.2.01.0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing			50.129		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlayaninya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			290.903		46.583		10.000		2.300		4.700						7.000	41.67	70		7.000	4,17	2,41		
			Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	60		12		12		0		5						5		41.67		5		8,33			
				Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	120		30		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			210.645		16.062		10.000		2.300		4.700						7.000	41.67	70		7.000	8,33	3,32		
			Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	60		12		12		0		5						5		41.67		5		8,33			
		3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil			80.258		30.521		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	120		30		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			87.450		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Rekomendasi)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi)	9		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.04.2.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			25.064		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Rekomendasi)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			62.385		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlayaninya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi)	9		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			1.699.996		20.858		140.000		-		8.126						8.126	16,25	5,8		8.126	2,6	0,48		
			Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	50		10		10		0		5						5		50		5		10			
				Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	585		117		177		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen)	10		0		2		0		0,3						0,3		15		0,3		3			
		3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			50.129		2.858		10.000		-		4.126						4.126	50	41,26		4.126	10	8,23		
			Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	50		10		10		0		5						5		50		5		10			
		3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			210.645		10.267		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			90.258		7.732		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	585		117		177		0		0						0		0		0		0			
		3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			150.451		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat			1.198.513		-		110.000		-		4.000						4.000	15	3,64		4.000	3	0,33		
			Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen)	10		0		2		0		0,3						0,3		15		0,3		3			
		3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**276.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Kelautan,	
			Meningkatnya kelestarianlaut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi (Ha)	1		0		0,00				0						0		0		0		0			
		3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			276.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	128		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	183		0		0		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV																	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota			139.000		-		-		-		-		-				-	0	0		-	0	0		
			Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	128		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota			137.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	183		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**			**321.032**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	72,78		0		72,35				0						0		0		0		0			
		3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			100.322		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko			100.322		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			220.709		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	154		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			120.387		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			100.322		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	154		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**4.847.000**		**118.804**		**542.000**		**-**		**3.420**						**3.420**	**0**	**0,63**		**3.420**	**0**	**0,07**		
		3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			**2.600.000**		**25.985**		**240.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	6		3		2,00		0,5		1						1		50		1		16,67			
		3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			943.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Kota Lhokseumawe	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	80		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			400.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			350.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			115.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			78.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	80		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			903.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Kota Lhokseumawe	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			253.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			100.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			100.000				-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			150.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			100.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			754.000		25.985		240.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Destinasi Pariwisata Kota Lhokseumawe	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota (Dokumen)	3		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			160.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			220.000		-		90.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			55.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			105.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			10.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota			104.000		25.985		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota (Dokumen)	3		1		1		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			60.000		-		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			**1.417.000**		**57.860**		**267.000**		**-**		**3.420**						**3.420**	**0**	**1,28**		**3.420**	**0**	**0,24**	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	94,12				50,00		0		0						0		0		0		0			
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			1.417.000		57.860		267.000		-		3.420						3.420	0	1,28		3.420	0	0,24		
			Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	6		3		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	16		3		4		0		0						0		0		0		0			
		3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			257.000		19.897		82.000		-		3.420						3.420	0	4,17		3.420	0	1,33		
			Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	6		3		2		0		0						0		0		0		0			
		3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			157.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			760.000		22.963		160.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV																	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			242.500		15.000		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	16		3		4		0		0						0		0		0		0			
		3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			**830.000**		**34.959**		**35.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan	
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	35,71				25,00		0		25						25		100		25		70,01			
		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			710.000		34.959		35.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	140		25		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			190.000		34.959		35.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	140		25		20		0		0						0		0		0		0			
		3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			120.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			120.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	80		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			120.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	80		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**13.840.168**		**624.333**		**1.056.160**		**529.966**		**756.627**						**1.286.593**	**23,86**	**121,82**		**1.286.593**	**1,56**	**9,3**		
		3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**3.892.053**		**126.108**		**308.729**		**15.000**		**160.709**						**175.709**	**28**	**56,91**		**175.709**	**1,33**	**4,51**	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	3		0		1,58				0						0		0		0		0			
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	5,83		0		5,71				3,18						3,18		55,69		3,18		54,55			
				Peningkatan Produksi Hortikultura (%)	4,58		0		4,5				2,75						2,75		61,11		2,75		60,04			
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			2.463.037		118.596		5.000		15.000		11.431						26.431	12	528.63		26.431	12	1,07		
			Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	10		2		10		1		0,2						1,2		12		1,2		12			
		3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			2.463.037		118.596		5.000		15.000		11.431						26.431	12	528.63		26.431	12	1.07		
			Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	10		2		10		1		0,2						1.2		12		1,2		12			
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			150.308		-		194.300		-		149.278						149.278	100	76,83		149.278	0	99,31		
			Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	0		0		2		0		2						2		100		2		0			
		3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			150.308		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			-		-		194.300		-		149.278						149.278	100	76.83		149.278	0	0		
			Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	0		0		2		0		2						2		100		2		0			
		3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			125.307		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			75.184		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak			50.123		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			250.855		7.512		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak (Dokumen)	6		6		6		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.05.0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak			75.184		7.512		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak (Dokumen)	6		6		6		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan			50.324		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak			125.347		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			902.545		-		99.429		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	0		0		5130		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			802.073		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			100.472		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			-		-		99.429		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	0		0		5130		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**4.678.970**		**25.794**		**280.000**		**509.810**		**593.359**						**1.103.169**	**28,57**	**393,99**		**1.103.169**	**2,29**	**23,58**	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	179,85		0		179,85				179,85						179,85		100		179,85		100			
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			3.518.754		-		95.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian			263.147		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			663.294		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit			538.331		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air			678.316		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya			293.147		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			1.082.519		-		95.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota			1.160.216		25.794		185.000		509.810		593.359						1.103.169	57,14	596,31		1.103.169	16	95,08		
			Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	25		5		7		1		3						4		57,14		4		16			
		3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak			1.160.216		25.794		185.000		509.810		593.359						1.103.169	57,14	596,31		1.103.169	16	95,08		
			Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	25		5		7		1		3						4		57,14		4		16			
		3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**812.459**		**8.587**		**10.000**		**2.856**		**2.559**						**5.415**	**60**	**54,15**		**5.415**	**2,4**	**0,67**	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	100		0		100				90						90		90		90		90			
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (%)	93,75		0		43,75				40						40		91,43		40		42,67			
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			200.685		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular			200.685		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			290.973		8.587		10.000		2.856		2.559						5.415	60	54,15		5.415	6	1,86		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	25		5		5		1		2						3		60		3		12			
		3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium			205.695		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			85.278		8.587		10.000		2.856		2.559						5.415	60	54,15		5.415	12	6,35		
			Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	25		5		5		1		2						3		60		3		12			
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			120.106				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	12		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04.2.04.0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan			120.106		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	12		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan			200.695		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani (Kasus)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04.2.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya			200.695		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tertanganinya Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani (Kasus)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			**262.775**		**9.530**		**10.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	60		0		20,00				0						0		0		0		0			
				Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	70		0		90,00				0						0		0		0		0			
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			262.775		9.530		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis (laporan)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			63.184		9.530		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			15.037		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			62.184		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis			122.369		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tertanggulanginya Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis (laporan)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**			**192.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (%)	93,02		0		0				0						0		0		0		0			
		3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			192.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian			192.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**4.001.913**		**454.313**		**447.431**		**2.300**		**-**						**2.300**	**11,11**	**0,51**		**2.300**	**1,67**	**0,06**	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian	
			Meningkatnya pertanian bidang penyuluh kapasitas SDM	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (%)	91,67		0		25,0				0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (%)	70,59		0		23,5				0						0		0		0		0			
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			4.001.913		454.313		447.431		2.300		-						2.300	11,11	0,51		2.300	1,67	0,06		
			Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	15		3		3		1		0						1		33,33		1		6,67			
				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	10		3		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	4		4		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			250.695		72.273		360.000		2.300		-						2.300	33,33	0,64		2.300	6,67	0,92		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	15		3		3		1		0						1		33,33		1		6,67			
		3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			1.236.601		156.199		82.431		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	10		3		3		0		0						0		0		0		0			
		3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			2.371.171		225.841		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	4		4		4		0		0						0		0		0		0			
		3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			143.445		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**13.701.153**		**2.669.439**		**3.375.000**		**-**		**139.369**						**139.369**	**10,67**	**4,13**		**139.369**	**18,18**	**1,02**		
		3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**			**6.874.038**		**1.394.528**		**1.820.000**		**-**		**131.369**						**131.369**	**50**	**7,22**		**131.369**	**50**	**1,91**	Dinas Perindustrian, Perdagangan	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	16		0		8,00				1						1		12,5		1		6,25			
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			6.772.000		1.388.156		1.800.000		-		131.369						131.369	100	7,3		131.369	100	1,94		
			Tersedianya sarana distribusi perdagangan yang dibangun	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1		0		1		0		1						1		100		1		100			
		3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			6.772.000		1.388.156		1.800.000		-		131.369						131.369	100	7,3		131.369	100	1,94		
			Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1		0		1		0		1						1		100		1		100			
		3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			102.038		6.372		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan terhadap Penagih Retribusi Pasar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			102.038		6.372		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**			**4.072.591**		**1.016.919**		**1.070.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perindustrian, Perdagangan	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	60,55		64		60,01				30						30		49,99		30		49,55			
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			4.072.591		1.016.919		1.070.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	56		14		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4		2		10		0		0						0		0		0		0			
		3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			156.730		14.097		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	56		14		12		0		0						0		0		0		0			
		3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			3.915.861		1.002.822		1.050.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4		2		10		0		0						0		0		0		0			
		3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**			**2.160.172**		**230.418**		**415.000**		**-**		**8.000**						**8.000**	**2,22**	**1,93**		**8.000**	**33,33**	**0,37**	Dinas Perindustrian, Perdagangan	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Rp. Juta Per Tahun)	46,32				38,92				5						5		12,85		5		10,79			
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.160.172		230.418		415.000		-		8.000						8.000	2,22	1,93		8.000	33,33	0,37		
			Terlaksananya Event Pameran dagang dan Promosi Dagang yang diikuti	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3		0		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	2		2		30		0		2						2		6,67		2		100			
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	2		2		10		0		0						0		0		0		0			
		3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional			1.020.380		61.316		200.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3		0		20		0		0						0		0		0		0			
		3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal			1.020.380		163.564		200.000		-		8.000						8.000	6,67	4		8.000	100	0,78		
			Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	2		2		30		0		2						2		6,67		2		100			
		3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan			119.412		5.538		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	2		2		10		0		0						0		0		0		0			
		3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**			**398.152**		**27.575**		**70.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perindustrian, Perdagangan	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	77,71				71,35				35						35		49,05		35		45,04			
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			398.152		27.575		70.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	4		4		50		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	12		12		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit)	1		1		2		0		0						0		0		0		0			
		3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			204.076		21.094		40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	4		4		50		0		0						0		0		0		0			
		3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			129.384		3.881		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	12		12		20		0		0						0		0		0		0			
		3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal			64.692		2.600		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit)	1		1		2		0		0						0		0		0		0			
		3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**			**196.200**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perindustrian, Perdagangan	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (%)	60				50,00				20						20		40		20		33,33			
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			196.200		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya promosi, pemasaran dan peningkatan produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			196.200		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**3.134.180**		**714.933**		**273.403**		**-**		**5.524**						**5.524**	**14,29**	**2,02**		**5.524**	**14,29**	**0,18**		
		3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**			**2.912.705**		**710.358**		**233.403**		**-**		**5.524**						**5.524**	**20**	**2,37**		**5.524**	**20**	**0,19**	Dinas Perindustrian, Perdagangan	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	6,27				5,27				2						2		37,95		2		31,9			
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			2.912.705		710.358		233.403		-		5.524						5.524	20	2,37		5.524	20	0,19		
			Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Promosi Industri Kecil Menengah	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	1		0		2		0		0						0		0		0		0			
		3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			298.460		-		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			107.038		68.287		25.000		-		5.524						5.524	100	22,09		5.524	100	5,16		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
		3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			234.188		11.879		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			1.999.420		630.192		108.403		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota			273.600		-		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	1		0		2		0		0						0		0		0		0			
		3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**			**119.440**		**-**		**20.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perindustrian, Perdagangan	
			Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	5,65		8		5,00				1						1		20		1		17,7			
		3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			119.440		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dokumen penerbitan izin usaha	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota			119.440		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**			**102.035**		**4.575**		**20.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Perindustrian, Perdagangan	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	98		100		91,00				30						30		32,97		30		30,61			
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			102.035		4.575		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dokumen informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			102.035		4.575		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem [illegible]	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**178.425.580**		**30.288.898**		**30.226.288**		**6.218.852**		**7.296.903**						**13.515.755**	**33,09**	**44,72**		**13.515.755**	**47,81**	**7,58**		
		4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**163.308.907**		**28.934.153**		**27.968.751**		**5.643.257**		**7.025.648**						**12.668.905**	**29,19**	**45,3**		**12.668.905**	**47,83**	**7,76**	Sekretariat Daerah	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	66,5		63,95		64,50		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			112.000		10.440		21.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		8		8		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			112.000		10.440		21.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		8		8		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			72.929.000		12.233.361		14.529.000		4.389.365		4.171.084						8.560.449	25,01	58,92		8.560.449	46,68	11,74		
			Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2408		2.408		4494		1.124		1.124						1.124		25,01		1.124		46,68			
		4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			72.929.000		12.233.361		14.529.000		4.389.365		4.171.084						8.560.449	25,01	58,92		8.560.449	46,68	11,74		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2408		2.408		4494		1.124		1.124						1.124		25,01		1.124		46,68			
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			653.000		95.000		125.000		-		99.469						99.469	50	79,58		99.469	250	15,23		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		5		0		5						5		100		5		500			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8		0		8		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			500.000		95.000		100.000		-		99.469						99.469	100	99,47		99.469	500	19,89		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		5		0		5						5		100		5		500			
		4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			153.000				25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8		0		8		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			29.181.668		6.022.541		5.370.000		631.234		1.305.735						1.936.969	18,06	36,07		1.936.969	46,39	6,64		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2		1		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		1		2		0		1						1		50		1		50			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5		1		3		0		1						1		33,33		1		20			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		500		100		25		25						25		25		25		208,33			
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.609.864		172.577		170.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		1		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			2.211.704		132.763		200.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2		1		3		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.088.750		2.679.681		1.600.000		333.284		519.731						853.015	50	53,31		853.015	50	12,03		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		1		2		0		1						1		50		1		50			
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			872.697		86.679		80.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			2.098.654		283.923		320.000		10.100		56.525						66.625	33,33	20,82		66.625	20	3,17		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5		1		3		0		1						1		33,33		1		20			
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			15.300.000		2.666.919		3.000.000		287.850		729.479						1.017.329	25	33,91		1.017.329	208,33	6,65		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		500		100		25		25						25		25		25		208,33			
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			11.378.060		3.845.484		600.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		1		6		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			2.100.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2		0		3		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			5.150.000		2.711.029		150.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		2		2		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			950.000		-		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.178.060		1.134.455		400.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		1		6		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14.069.411		2.841.191		2.817.146		311.566		682.008						993.574	12,5	35,27		993.574	12,5	7,06		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						3		25		3		25			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		1		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						3		25		3		25			
		4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			80.000		13.000		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			4.675.000		656.328		700.000		58.741		225.392						284.133	25	40,59		284.133	25	6,08		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						3		25		3		25			
		4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.609.840		12.000		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		1		2		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			7.704.571		2.159.863		2.057.146		252.825		456.616						709.441	25	34,49		709.441	25	9,21		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						3		25		3		25			
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			18.201.243		2.137.628		2.052.000		108.882		263.957						372.839	19,47	18,17		372.839	19,52	2,05		
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	18		18		19		0		9						9		47,37		9		50			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6		19		8		2		2						2		25		2		33,33			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		6		4		0		1						1		25		1		14,29			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		3		4		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			5.237.739		623.390		756.000		55.800		149.208						205.008	47,37	27,12		205.008	50	3,91		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	18		18		19		0		9						9		47,37		9		50			
		4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.813.000		321.716		376.000		53.082		95.789						148.871	25	39,59		148.871	33,33	5,29		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6		19		8		2		2						2		25		2		33,33			
		4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3.269.240		858.128		400.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.216.064		230.270		200.000		-		18.960						18.960	25	9,48		18.960	14,29	0,59		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		6		4		0		1						1		25		1		14,29			
		4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.665.200		104.124		320.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		3		4		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			3.445.525		563.130		649.105		116.051		187.277						303.328	52,38	46,73		303.328	52,38	8,8		
			Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	28		28		28		0		16						16		57,14		16		57,14			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2		2		2		0		1						1		50		1		50			
				Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	24		24		24		0		12						12		50		12		50			
		4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			975.525		149.991		179.105		50.051		50.051						100.102	57,14	55,89		100.102	57,14	10,26		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	28		28		28		0		16						16		57,14		16		57,14			
		01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			470.000		17.139		70.000		-		5.226						5.226	50	7,47		5.226	50	1,11		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2		2		2		0		1						1		50		1		50			
		4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2.000.000		396.000		400.000		66.000		132.000						198.000	50	49,5		198.000	50	9,9		
			Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	24		24		24		0		12						12		50		12		50			
		4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			1.624.000		170.000		300.000		-		170.000						170.000	66,67	56,67		170.000	66,67	10,47		
			Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
		4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			666.000				130.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			608.000		100.000		100.000		-		100.000						100.000	100	100		100.000	100	16,45		
			Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
		4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			350.000		70.000		70.000		-		70.000						70.000	100	100		70.000	100	20		
			Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			8.635.000		653.028		935.000		41.772		73.594						115.365	33,33	12,34		115.365	33,33	1,34		
			Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
		4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan			2.665.000		132.557		215.000		12.382		40.050						52.432	0	24,39		52.432	0	1,97		
			Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			4.150.000		427.575		550.000		17.390		16.443						33.833	0	6,15		33.833	0	0,82		
			Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan			1.820.000		92.897		170.000		12.000		17.100						29.100	100	17,12		29.100	100	1,6		
			Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi (KOD) (Angka)	35		29		30,00		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			3.080.000		362.350		570.000		44.388		72.525						116.914	61,27	20,51		116.914	81,48	3,8		
			Terlaksananya Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	8		6		6		1		4						4		66,67		4		50			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	9		7		7		2		4						4		57,14		4		44,44			
				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	2		5		5		1		3						3		60		3		150			
		4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			850.000		59.832		120.000		8.665		26.053						34.718	66,67	28,93		34.718	50	4,08		
			Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	8		6		6		1		4						4		66,67		4		50			
		4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1.215.000		215.078		285.000		18.230		25.255						43.485	57,14	15,26		43.485	44,44	3,58		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	9		7		7		2		4						4		57,14		4		44,44			
		4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			1.015.000		87.440		165.000		17.493		21.217						38.710	60	23,46		38.710	150	3,81		
			Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	2		5		5		1		3						3		60		3		150			
		4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**9.961.108**		**1.015.599**		**1.507.537**		**544.155**		**220.614**						**764.769**	**39,48**	**50,73**		**764.769**	**45,83**	**7,68**	Sekretariat Daerah	
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)	100		100		100		0		25						25		25		25		25			
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			3.061.108		279.761		472.537		491.301		31.311						522.612	5,56	110,6		522.612	33,33	17,07		
			Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,	1		1		6		0		1						1		16,67		1		100			
		4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			1.169.610		114.974		195.000		41.324		3.819						45.142	0	23,15		45.142	0	3,86		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			1.091.898		104.888		152.537		449.977		21.011						470.988	0	308,77		470.988	0	43,13		
			Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat			799.600		59.898		125.000		-		6.481						6.481	16,67	5,18		6.481	100	0,81		
			Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata,	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,	1		1		6		0		1						1		16,67		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	100		100		100		0		33,33						33,33		33,33		33,33		33,33			
				Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100		100		100		0		100						100		100		100		100			
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			3.395.000		353.142		530.000		12.903		113.683						126.586	52,78	23,88		126.586	41,67	3,73		
			Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4		1		3		1		1						1		33,33		1		25			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	4		9		4		1		1						1		25		1		25			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4		4		3		0		3						3		100		3		75			
		4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan			1.235.000		186.807		210.000		9.350		76.321						85.670	33,33	40,8		85.670	25	6,94		
			Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4		1		3		1		1						1		33,33		1		25			
		4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			1.030.000		51.709		110.000		3.554		20.088						23.641	25	21,49		23.641	25	2,3		
			Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	4		9		4		1		1						1		25		1		25			
		4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			1.130.000		114.625		210.000		-		17.275						17.275	100	8,23		17.275	75	1,53		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4		4		3		0		3						3		100		3		75			
			Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			3.505.000		382.696		505.000		39.951		75.619						115.570	60,12	22,89		115.570	62,5	3,3		
			Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	12		6		6		1		6						6		100		6		50			
				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	16		2		16		4		6						6		37,5		6		37,5			
				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	30		70		70		0		30						30		42,86		30		100			
		4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			1.350.000		101.515		180.000		12.031		16.302						28.333	100	15,74		28.333	50	2,1		
			Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	12		6		6		1		6						6		100		6		50			
		4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum			1.510.000		248.748		260.000		27.920		46.232						74.152	37,5	28,52		74.152	37,5	4,91		
			Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	16		2		16		4		6						6		37,5		6		37,5			
		4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			645.000		32.433		65.000		-		13.086						13.086	42,86	20,13		13.086	100	2,03		
			Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	30		70		70		0		30						30		42,86		30		100			
		4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**5.155.565**		**339.146**		**750.000**		**31.440**		**50.641**						**82.081**	**41,85**	**10,94**		**82.081**	**49,69**	**1,59**	Sekretariat Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)	100		100		100		0		50						50		50		50		50			
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			1.070.000		64.531		220.000		10.189		14.631						24.820	55,56	11,28		24.820	74,07	2,32		
			Terlaksananya Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	3		0		3		0		2						2		66,67		2		66,67			
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	36		4		4		0		2						2		50		2		5,56			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4		36		12		0		6						6		50		6		150			
		4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			185.000		-		35.000		-		-						-	66,67	0		-	66,67	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	3		0		3		0		2						2		66,67		2		66,67			
		4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			450.000		34.418		100.000		5.144		6.312						11.457	50	11,46		11.457	5,56	2,55		
			Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	36		4		4		0		2						2		50		2		5,56			
		4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			435.000		30.114		85.000		5.044		8.319						13.364	50	15,72		13.364	150	3,07		
			Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4		36		12		0		6						6		50		6		150			
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	100		100		100		0		40						40		40		40		40			
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			2.196.065		152.913		300.000		13.257		7.559						20.816	56,67	6,94		20.816	58,33	0,95		
			Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4		2		4		0		2						2		50		2		50			
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4		4		5		0		1						1		20		1		25			
				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	2		3		2		0		2						2		100		2		100			
		4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			955.364		69.162		140.000		7.875		2.585						10.460	50	7,47		10.460	50	1,09		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4		2		4		0		2						2		50		2		50			
		4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			906.574		68.735		110.000		5.383		1.411						6.793	20	6,18		6.793	25	0,75		
			Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4		4		5		0		1						1		20		1		25			
		4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			334.128		15.016		50.000		-		3.563						3.563	100	7,13		3.563	100	1,07		
			Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	2		3		2		0		2						2		100		2		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Nilai)	9,75		9		9,15		0		0						0		0		0		0			
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			1.889.500		121.702		230.000		7.994		28.451						36.445	13,33	15,85		36.445	16,67	1,93		
			Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4		8		5		1		2						2		40		2		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4		6		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	8		3		5		0		0						0		0		0		0			
		4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			990.000		63.523		100.000		7.994		28.451						36.445	40	36,44		36.445	50	3,68		
			Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4		8		5		1		2						2		40		2		50			
		4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			344.500		24.548		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4		6		5		0		0						0		0		0		0			
		4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			555.000		33.630		80.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	8		3		5		0		0						0		0		0		0			
		4.02	**SEKRETARIAT DPRD**			**163.633.507**		**30.097.832**		**26.931.623**		**7.590.547**		**6.069.389**						**13.659.936**	**17,08**	**50,72**		**13.659.936**	**6,66**	**8,35**		
		4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**135.187.710**		**23.639.263**		**23.603.623**		**7.004.433**		**6.012.522**						**13.016.955**	**23,34**	**55,15**		**13.016.955**	**9,46**	**9,63**	Sekretariat DPRK	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	345,8		0		65,50		32,59		27,95						60,54		92,43		60,54		17,51			
		4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			130.442		6.175		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	60		12		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			61.750		6.175		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	60		12		10		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			14.245		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			12.963		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			15.556		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			15.556		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			10.371		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			39.449.044		6.408.912		7.913.801		2.587.018		2.410.303						4.997.321	31,32	63,15		4.997.321	10,12	12,67		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2339		868		756		254,18		236,81						236,81		31,32		236,81		10,12			
		4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			39.449.044		6.408.912		7.913.801		2.587.018		2.410.303						4.997.321	31,32	63,15		4.997.321	10,12	12,67		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2339		868		756		254,18		236,81						236,81		31,32		236,81		10,12			
		4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			282.002		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	62		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	75		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			227.243		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			32.011		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	62		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			22.748		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	75		0		0		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.872.684		600.223		592.640		83.412		38.997						122.409	32,14	20,65		122.409	9,46	3,16		
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	125		0		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	375		75		20		0		15						15		75		15		4			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	22500		180		2		0		2						2		100		2		0,01			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		2		20		0		10						10		50		10		100			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5220		150		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	200		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40		40		1		0,98		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	520		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2		9		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			96.162		10.500		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	125		0		20		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			539.351		99.022		88.000		-		12.579						12.579	75	14,29		12.579	4	2,33		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	375		75		20		0		15						15		75		15		4			
		4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			53.099		16.103		8.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.311.216		227.988		230.000		-		16.297						16.297	100	7,09		16.297	0,01	1,24		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	22500		180		2		0		2						2		100		2		0,01			
		4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			371.810		39.000		65.000		-		10.122						10.122	50	15,57		10.122	100	2,72		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		2		20		0		10						10		50		10		100			
		4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			476.520		60.610		86.640		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5220		150		12		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			90.180		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			225.450		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	200		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			528.536		147.000		100.000		83.412		-						83.412	0	83,41		83.412	0	15,78		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40		40		1		0,98		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			112.725		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	520		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			67.635		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2		9		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.840.403		115.204		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		12		1		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			2.008.400		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			404.600		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			427.402		115.204		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		12		1		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.190.334		2.116.370		1.470.160		370.775		256.774						627.549	58,38	42,69		627.549	67,03	5,15		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2500		0		5000		5.000		0						5.000		100		5.000		200			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15		3		12		5,66		4,54						10,2		85		10,2		68			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	35		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4320		260		12		3,57		2,25						5,82		48,5		5,82		0,13			
		4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			25.060		5.600		5.000		350		-						350	100	7		350	200	1,4		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2500		0		5000		5.000		0						5.000		100		5.000		200			
		4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.796.946		337.478		221.847		104.699		83.974						188.673	85	85,05		188.673	68	10,5		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15		3		12		5,66		4,54						10,2		85		10,2		68			
		4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			75.465		12.000		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	35		0		2		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			10.292.863		1.761.292		1.228.312		265.726		172.800						438.526	48,5	35,7		438.526	0,13	4,26		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4320		260		12		3,57		2,25						5,82		48,5		5,82		0,13			
		4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.581.112		1.110.768		1.184.100		719.999		-						719.999	0	60,81		719.999	0	15,72		
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7		48		12		11,77		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18		60		6		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		6		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.195.244		824.190		872.600		719.999		-						719.999	0	82,51		719.999	0	60,24		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7		48		12		11,77		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			920.214		76.982		76.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18		60		6		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.029.252		159.606		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.561		49.990		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			335.841		-		215.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		6		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			2.099.185		873.642		1.005.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	150		30		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	15		3		30		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	15		3		10		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan			414.168		240.300		330.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	150		30		20		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.14.0002	Fasiltasi Komunikasi Pimpinan			1.300.849		356.962		375.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	15		3		30		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan			384.168		276.379		300.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	15		3		10		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			57.807.078		10.672.585		11.162.923		2.664.705		2.664.705						5.329.410	8,71	47,74		5.329.410	7,47	9,22		
			Tersediannya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	350		350		300		78,43		78,43						78,43		26,14		78,43		22,41			
				Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	125		0		25		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	25		0		1		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			55.017.395		10.292.124		10.771.673		2.664.705		2.664.705						5.329.410	26,14	49,48		5.329.410	22,41	9,69		
			Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	350		350		300		78,43		78,43						78,43		26,14		78,43		22,41			
		4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			2.104.533		255.461		266.250		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	125		0		25		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			685.150		125.000		125.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	25		0		1		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			11.935.427		1.735.385		240.000		578.524		641.743						1.220.267	45,5	508,44		1.220.267	0,47	10,22		
			Tersedianya Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	20		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	48		48		1		0,43		0,91						0,91		91		0,91		1,9			
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			55.308		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD			147.082		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	20		0		3		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			11.650.075		1.735.385		220.000		578.524		641.743						1.220.267	91	554,67		1.220.267	1,9	10,47		
			Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	48		48		1		0,43		0,91						0,91		91		0,91		1,9			
		4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			82.962		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**28.445.797**		**6.458.569**		**3.328.000**		**586.114**		**56.867**						**642.981**	**11,82**	**19,32**		**642.981**	**3,66**	**2,26**	Sekretariat DPRK	
			Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100		0		100				25,25						25,25		25,25		25,25		25,25			
		4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			2.891.290		585.321		245.000		10.987		-						10.987	0	4,48		10.987	0	0,38		
			Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	50		10		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	50		10		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	5		1		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	5		1		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1		1		1		0,71		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS			204.298		16.227		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	50		10		12		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			174.467		40.217		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	50		10		12		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD			1.612.489		215.549		70.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	5		1		12		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan			144.450		16.240		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	5		1		12		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester			24.083		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			731.502		297.088		100.000		10.987		-						10.987	0	10,99		10.987	0	1,5		
			Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1		1		1		0,71		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.115.047		853.841		815.000		20.261		5.185						25.446	24,6	3,12		25.446	6,18	0,5		
			Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	50		10		10		5,91		0						5,91		59,1		5,91		11,82			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	50		10		20		3,77		8,23						12		60		12		24			
				Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	50		10		10		5,87		0						5,87		58,7		5,87		11,74			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	10		10		1		0,59		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	10		10		1		1		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	10		10		1		0,83		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	10		10		1		0,18		0,19						0,19		19		0,19		1,9			
		4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			895.921		406.931		150.000		4.288		-						4.288	59,1	2,86		4.288	11,82	0,48		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	50		10		10		5,91		0						5,91		59,1		5,91		11,82			
		4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			1.265.507		164.441		270.000		1.368		2.985						4.353	60	1,61		4.353	24	0,34		
			Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	50		10		20		3,77		8,23						12		60		12		24			
		4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			1.205.482		109.591		210.000		4.256		-						4.256	58,7	2,03		4.256	11,74	0,35		
			Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	50		10		10		5,87		0						5,87		58,7		5,87		11,74			
		4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			1.250.385		115.852		120.000		4.288		-						4.288	0	3,57		4.288	0	0,34		
			Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	10		10		1		0,59		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			58.204		6.497		10.000		1.000		-						1.000	0	10		1.000	0	1,72		
			Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	10		10		1		1		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			58.941		6.719		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran			176.545		29.323		20.000		3.004		-						3.004	0	15,02		3.004	0	1,7		
			Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	10		10		1		0,83		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			204.060		14.487		25.000		2.056		2.200						4.256	19	17,03		4.256	1,9	2,09		
			Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	10		10		1		0,18		0,19						0,19		19		0,19		1,9			
		4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			7.134.608		1.390.485		255.000		450.000		-						450.000	16,64	176,47		450.000	9,98	6,31		
			Terlaksanaanya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	3		3		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	3		3		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	15		3		12		5,99		0						5,99		49,92		5,99		39,93			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah			237.694		57.196		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	3		3		2		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			58.122		2.620		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	3		3		1		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses			6.818.792		1.330.669		200.000		450.000		-						450.000	49,92	225		450.000	39,93	6,6		
			Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	15		3		12		5,99		0						5,99		49,92		5,99		39,93			
		4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah			20.000				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			745.640		108.064		105.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	1		2		1		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD			241.440				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD			504.200		108.064		105.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	1		2		1		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			406.084		382.106		47.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	12		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	6		6		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	12		12		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	18		18		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			39.681		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	12		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			212.542		7.000		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	6		6		1		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			70.268		338.355		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	12		12		1		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			63.593		36.751		17.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	18		18		20		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus			20.000				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	100		0		100				0						0		0		0		0			
				Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Tepat Waktu)	100		0		100				100						100		100		100		100			
		4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			4.085.148		539.521		275.000		19.762		1.500						21.262	13,76	7,73		21.262	5,03	0,52		
			Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	1		1		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	41		15		30		11,51		0,87						12,38		41,27		12,38		30,2			
				Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	2		2		22		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Orang)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			211.670		6.892		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	1		1		2		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			3.040.887		478.517		200.000		19.762		1.500						21.262	41,27	10,63		21.262	30,2	0,7		
			Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	41		15		30		11,51		0,87						12,38		41,27		12,38		30,2			
		4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			496.883		54.112		60.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	2		2		22		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik			154.906		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD			160.802		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Orang)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			7.688.714		2.095.090		1.436.000		85.105		50.182						135.287	13,07	9,42		135.287	3,81	1,76		
			Meningkatnya Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	25		25		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	36		36		12		7,93		3,97						3,97		33,08		3,97		11,03			
				Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	48		48		12		7,93		3,97						3,97		33,08		3,97		8,27			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	60		12		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	20		4		12		0,49		0,98						1,47		12,25		1,47		7,35			
		4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD			900.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD			1.212.305		405.618		200.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	25		25		1		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			899.577		200.000		150.000		40.000		20.000						60.000	33,08	40		60.000	11,03	6,67		
			Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	36		36		12		7,93		3,97						3,97		33,08		3,97		11,03			
		4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			1.002.650		204.880		181.000		40.000		20.000						60.000	33,08	33,15		60.000	8,27	5,98		
			Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	48		48		12		7,93		3,97						3,97		33,08		3,97		8,27			
		4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			806.812		566.337		700.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	60		12		12		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD			29.068		3.500		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD			2.838.302		714.756		200.000		5.105		10.182						15.287	12,25	7,64		15.287	7,35	0,54		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	20		4		12		0,49		0,98						1,47		12,25		1,47		7,35			
		4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah			379.267		504.140		150.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	12		2		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	2		2		1		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah			74.336		72.640		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	12		2		1		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi			304.931		431.500		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	2		2		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01	**PERENCANAAN**			**41.828.534**		**5.795.895**		**7.219.074**		**1.702.768**		**1.776.989**						**3.479.756**	**25,03**	**48,2**		**3.479.756**	**19,25**	**8,32**		
		5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**31.606.397**		**5.216.727**		**6.097.191**		**1.696.473**		**1.698.317**						**3.394.790**	**38,17**	**55,68**		**3.394.790**	**29,13**	**10,74**	Badan Perencanaan	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	77,5				69,10		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			113.700		10.922		13.700		-		438						438	22,22	3,2		438	5	0,39		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penggaggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	40		15		9		0		2						2		22,22		2		5			
		5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			113.700		10.922		13.700		-		438						438	22,22	3,2		438	5	0,39		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	40		15		9		0		2						2		22,22		2		5			
		5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			23.321.107		4.600.889		5.203.438		1.617.546		1.594.367						3.211.914	100	61,73		3.211.914	100	13,77		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Pada Bappeda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	840		840		840		840		840						840		100		840		100			
		5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			23.321.107		4.600.889		5.203.438		1.617.546		1.594.367						3.211.914	100	61,73		3.211.914	100	13,77		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	840		840		840		840		840						840		100		840		100			
		5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			80.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			491.260		13.250		40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	200		0		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		10		42		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			291.260		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	200		0		100		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			200.000		13.250		40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		10		42		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.645.627		157.749		185.140		23.372		23.059						46.431	37,33	25,08		46.431	23,47	2,82		
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	80		80		80		0		80						80		100		80		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1150		1.150		1150		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30		30		30		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	730		0		730		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300		60		60		28		24						52		86,67		52		17,33			
		5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			245.841		22.967		35.000		-		3.257						3.257	100	9,31		3.257	100	1,32		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	80		80		80		0		80						80		100		80		100			
		5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			202.326		16.215		24.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1150		1.150		1150		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			145.000		15.893		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30		30		30		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12.660		1.083		1.140		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	730		0		730		0		0						0		0		0		0			
		01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.039.800		101.592		100.000		23.372		19.802						43.174	86,67	43,17		43.174	17,33	4,15		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300		60		60		28		24						52		86,67		52		17,33			
		5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.935.410		-		95.196		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			800.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		3		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			540.214		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			395.196		-		95.196		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.715.753		316.722		377.116		45.968		55.512						101.480	64,25	26,91		101.480	39,52	3,74		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	30		30		30		0		30						30		100		30		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	420		85		84		12		13						13		15,48		13		3,1			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3540		708		708		133		414						547		77,26		547		15,45			
		5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			23.000		3.000		3.000		-		500						500	100	16,67		500	100	2,17		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	30		30		30		0		30						30		100		30		100			
		5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.229.400		101.741		164.600		24.893		25.362						50.255	15,48	30,53		50.255	3,1	4,09		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	420		85		84		12		13						13		15,48		13		3,1			
		5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.463.353		211.981		209.516		21.075		29.650						50.725	77,26	24,21		50.725	15,45	3,47		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3540		708		708		133		414						547		77,26		547		15,45			
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.303.540		117.194		182.600		9.587		24.941						34.527	75	18,91		34.527	75	2,65		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		3		3		3		3						3		100		3		100			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8		64		8		8		8						8		100		8		100			
		5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			241.264		27.288		49.600		1.795		8.042						9.837	100	19,83		9.837	100	4,08		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			369.276		64.921		78.000		5.831		13.739						19.570	100	25,09		19.570	100	5,3		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		3		3		3		3						3		100		3		100			
		5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			420.000		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			273.000		24.985		35.000		1.960		3.160						5.120	100	14,63		5.120	100	1,88		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8		64		8		8		8						8		100		8		100			
		5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			**6.123.584**		**286.532**		**628.331**		**6.295**		**48.307**						**54.602**	**27,27**	**8,69**		**54.602**	**16,67**	**0,89**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	100		95,6		100		100		100						100		100		100		100			
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			4.050.949		215.137		406.198		6.295		48.307						54.602	42,86	13,44		54.602	35,71	1,35		
			Terlaksananya Perencanaan dan Pendanaan Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	3		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	3		3		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1		3		1		1		1						1		100		1		100			
				Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	12		12		12		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1		2		1		0		1						1		100		1		100			
				Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	204		204		204		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	4		3		2		2		2						2		100		2		50			
		5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			122.764		5.383		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	3		2		2		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			265.827		5.832		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	3		3		2		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik			774.862		25.351		55.000		1.150		4.063						5.213	100	9,48		5.213	100	0,67			
			Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1		3		1		1		1						1		100		1		100			
		5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			270.255		2.436		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	12		12		12		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			964.788		57.248		56.780		-		7.075						7.075	100	12,46		7.075	100	0,73			
			Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1		2		1		0		1						1		100		1		100			
		5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			60.051		2.947		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	204		204		204		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			1.592.402		115.939		229.418		5.145		37.169						42.314	100	18,44		42.314	50	2,66			
			Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	4		3		2		2		2						2		100		2		50			
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			440.895		21.190		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			255.255		21.190		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			92.820		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			92.820		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			1.311.787		38.409		180.639		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	2		3		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	3		1		2		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			896.404		23.412		145.639		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	2		3		2		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			415.383		14.997		35.000		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	3		1		2		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			319.954		11.796		41.494		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Perencanaan Pembangunan yang Berbasis e-Planning	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			92.820		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			134.314		11.796		41.494		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			92.820		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**4.098.553**		**292.636**		**493.553**		**-**		**30.364**						**30.364**	**12,5**	**6,15**		**30.364**	**11,81**	**0,74**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			1.175.769		85.186		155.769		-		12.016						12.016	12,5	7,71		12.016	18,75	1,02		
			Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1		4		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1		2		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1		1		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	2		2		3		0		3						3		100		3		150			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1		2		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	3		2		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			110.000		7.973		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1		4		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			90.000		5.776		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1		2		5		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			172.800		17.307		32.800		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1		1		4		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			462.969		34.877		62.969		-		12.016						12.016	100	19,08		12.016	150	2,6		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	2		2		3		0		3						3		100		3		150			
		5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			110.000		5.412		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1		2		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			70.000		5.689		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	3		2		3		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			65.000		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			95.000		8.152		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			1.999.283		99.036		159.283		-		10.649						10.649	12,5	6,69		10.649	4,17	0,53		
			Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1		11		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	3		1		1		0		1						1		100		1		33,33			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2		3		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1		13		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1		13		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1		2		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			110.000		4.692		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			86.500		2.410		6.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1		11		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			70.000		4.717		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			349.283		13.560		19.283		-		10.649						10.649	100	55,22		10.649	33,33	3,05		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	3		1		1		0		1						1		100		1		33,33			
		5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			120.000		8.108		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2		3		2		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			86.500		3.932		6.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1		13		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			100.000		9.148		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1		13		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			1.077.000		52.468		67.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1		2		1		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			923.500		108.414		178.500		-		7.700						7.700	12,5	4,31		7.700	12,5	0,83		
			Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			345.000		34.290		40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			100.000		15.823		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			100.000		18.093		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			153.500		23.851		53.500		-		7.700						7.700	100	14,39		7.700	100	5,02		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
		5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			50.000		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			50.000		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			50.000		16.357		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			75.000		-		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02	**KEUANGAN**			**742.861.408**		**120.341.514**		**141.334.699**		**9.033.956**		**28.286.401**						**37.320.357**	**462,19**	**26,41**		**37.320.357**	**7,69**	**5,02**		
		5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**73.486.443**		**10.672.518**		**15.803.549**		**3.230.915**		**5.155.701**						**8.386.617**	**43,53**	**53,07**		**8.386.617**	**8,94**	**11,41**	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	68		66,15		66,25		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			126.900		18.288		25.200		250		-						250	62,5	0,99		250	12,5	0,2		
			Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	40		8		8		3		2						5		62,5		5		12,5			
		5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			126.900		18.288		25.200		250		-						250	62,5	0,99		250	12,5	0,2		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	40		8		8		3		2						5		62,5		5		12,5			
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			60.204.300		8.184.191		12.754.300		3.065.378		4.840.785						7.906.163	210	61,99		7.906.163	42	13,13		
			Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	400		84		80		84		84						168		210		168		42			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			60.204.300		8.184.191		12.754.300		3.065.378		4.840.785						7.906.163	210	61,99		7.906.163	42	13,13		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	400		84		80		84		84						168		210		168		42			
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			580.000		9.660		140.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25		2		5		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			480.000		-		120.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			100.000		9.660		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25		2		5		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.881.970		362.627		567.394		42.658		109.311						151.970	48,81	26,78		151.970	10,48	5.27		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		1		0						1		100		1		20			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		3		3		1		1						2		66,67		2		13,33			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		2		2		1		0						1		50		1		10			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		2		2		1		0						1		50		1		10			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1						2		50		2		10			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10		2		4		1		0						1		25		1		10			
		5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			75.000		-		15.000		708		-						708	100	4,72		708	20	0,94		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		1		0						1		100		1		20			
		5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			375.000		60.845		75.000		15.296		35.569						50.865	66,67	67,82		50.865	13,33	13,56		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		3		3		1		1						2		66,67		2		13,33			
		5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			400.000		28.800		80.000		900		17.200						18.100	50	22,63		18.100	10	4,53		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		2		2		1		0						1		50		1		10			
		5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			75.000		39.057		15.000		5.000		2.653						7.653	50	51,02		7.653	10	10,2		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		2		2		1		0						1		50		1		10			
		5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			11.970		2.280		2.394		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			850.000		129.536		170.000		19.554		24.918						44.473	50	26,16		44.473	10	5,23		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		1						2		50		2		10			
		5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1.095.000		102.109		210.000		1.200		28.971						30.171	25	14,37		30.171	10	2,76		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10		2		4		1		0						1		25		1		10			
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.585.000		390.504		695.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedia dan terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	20		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	30		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		71		6		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			450.000		-		450.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			515.000		-		125.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	20		0		5		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			620.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	30		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		390.504		120.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		71		6		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.173.273		1.110.351		1.434.655		95.012		160.401						255.413	66,67	17,8		255.413	13,33	3,56		
			Terusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		1		1		1		0						1		100		1		20			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	10		2		2		1		0						1		50		1		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10		2		2		1		0						1		50		1		10			
		5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			45.000		6.964		9.000		1.500		394						1.894	100	21,04		1.894	20	4,21		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		1		1		1		0						1		100		1		20			
		5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.202.500		241.487		440.500		35.342		72.427						107.769	50	24,47		107.769	10	4,89		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	10		2		2		1		0						1		50		1		10			
		5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4.925.773		861.901		985.155		58.170		87.580						145.750	50	14,79		145.750	10	2,96		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10		2		2		1		0						1		50		1		10			
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			935.000		596.898		187.000		27.617		45.204						72.821	25	38,94		72.821	5	7,79		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	40		8		8		1		3						4		50		4		10			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	150		117		30		10		5						15		50		15		10			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			225.000		312.314		45.000		24.117		30.401						54.518	50	121,15		54.518	10	24,23		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	40		8		8		1		3						4		50		4		10			
		5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			500.000		203.904		100.000		-		14.803						14.803	0	14,8		14.803	0	2,96		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			105.000		40.950		21.000		3.500		-						3.500	50	16,67		3.500	10	3,33		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	150		117		30		10		5						15		50		15		10			
		5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			105.000		39.730		21.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**655.433.616**		**108.180.439**		**122.863.061**		**5.760.117**		**22.910.615**						**28.670.732**	**36,07**	**23,34**		**28.670.732**	**7,21**	**4,37**	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akutansi dan pelaporan	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)	40,85		42,26		41,51		0		19,02						19,02		45,82		19,02		46,56			
				Persentase Penurunan SILPA (%)	-16,67		274,66		-37,50		56,51		-45,63						-45,63		121,68		-45,63		273,73			
				Persentase laporan keuangan tepat waktu (%)	100		100		100,00		25		50						50		50		50		50			
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	21,17		20,25		20,07		5,51		9,86						9,86		49,13		9,86		46,58			
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	97,87		79,88		95,78		19,75		33,8						33,8		35,29		33,8		34,54			
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			13.844.035		1.210.001		2.756.698		68.059		186.276						254.335	27,5	9,23		254.335	5,5	1,84		
			Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	10		4		2		2		0						2		100		2		20			
				Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	20		4		4		2		1						3		75		3		15			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	220		44		44		0		44						44		100		44		20			
		5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			397.635		45.897		73.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			373.355		56.469		73.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			244.120		-		48.120		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			244.186		-		48.186		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			244.120				48.120		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			244.120		-		48.120		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			1.209.500		176.078		241.500		35.292		-						35.292	100	14.61		35.292	20	2.92		
			Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	10		4		2		2		0						2		100		2		20			
		5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			1.209.500		123.566		241.500		-		6.257						6.257	0	2,59		6.257	0	0,52		
			Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			1.033.094		189.643		205.748		5.483		34.274						39.757	75	19.32		39.757	15	3.85		
			Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	20		4		4		2		1						3		75		3		15			
		5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			8.644.405		618.348		1.728.405		27.283		145.745						173.028	100	10.01		173.028	20	2		
			Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	220		44		44		0		44						44		100		44		20			
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			5.220.000		277.336		870.000		9.218		65.571						74.790	55,74	8,6		74.790	11,15	1,43		
			Tesusunnya Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	25		5		5		2		1						3		60		3		12			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	850		170		170		43		56						99		58,24		99		11,65			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	145		28		29		8		8						16		55,17		16		11,03			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	20		4		4		1		1						2		50		2		10			
				Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	340		68		68		0		34						34		50		34		10			
				Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	25		5		5		1		2						3		60		3		12			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	1360		271		272		68		102						170		62,5		170		12,5			
		5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			235.000		7.307		35.000		-		4.500						4.500	60	12.86		4.500	12	1,91		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	25		5		5		2		1						3		60		3		12			
		5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			1.120.000		22.594		200.000		-		1.160						1.160	58,24	0,58		1.160	11,65	0,1		
			Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	850		170		170		43		56						99		58,24		99		11,65			
		5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			865.000		53.263		150.000		600		11.954						12.554	55,17	8,37		12.554	11,03	1,45		
			Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	145		28		29		8		8						16		55,17		16		11,03			
		5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			235.000		2.958		35.000		-		-						-	50	0		-	10	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	20		4		4		1		1						2		50		2		10			
		5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			285.000		6.826		40.000		-		4.707						4.707	50	11,77		4.707	10	1,65		
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			1.060.000		62.609		180.000		-		24.230						24.230	50	13.46		24.230	10	2,29		
			Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	340		68		68		0		34						34		50		34		10			
		5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			380.000		11.723		60.000		-		-						-	60	0		-	12	0		
			Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	25		5		5		1		2						3		60		3		12			
		5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			1.040.000		110.057		170.000		8.618		19.020						27.639	62,5	16,26		27.639	12,5	2,66		
			Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	1360		271		272		68		102						170		62,5		170		12,5			
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			3.231.488		262.142		598.270		5.524		65.586						71.110	30	11,89		71.110	6	2,2		
			Tersuiunnya Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	360		72		72		18		18						36		50		36		10			
				Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	20		4		4		1		1						2		50		2		10			
				Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	20		4		4		1		1						2		50		2		10			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	200		25		40		0		40						40		100		40		20			
				Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	20		4		4		0		2						2		50		2		10			
				Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	25		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	700		100		140		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			168.143		14.729		31.080		-		2.563						2.563	50	8,25		2.563	10	1,52		
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	360		72		72		18		18						36		50		36		10			
		5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban			172.687		12.322		31.920		-		5.705						5.705	50	17,87		5.705	10	3,3		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	20		4		4		1		1						2		50		2		10			
		5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			286.297		23.689		52.920		-		2.711						2.711	50	5,12		2.711	10	0,95		
			Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	20		4		4		1		1						2		50		2		10			
		5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			560.097		45.226		103.530		5.524		39.587						45.111	100	43,57		45.111	20	8,05		
			Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	200		25		40		0		40						40		100		40		20			
		5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			998.632		115.027		184.590		-		15.020						15.020	50	8,14		15.020	10	1,5		
			Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	20		4		4		0		2						2		50		2		10			
		5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			323.789		-		59.850		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			135.764		-		25.095		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	25		0		5		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			151.669		13.676		28.035		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			150.384		-		28.750		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			284.025		37.473		52.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	700		100		140		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			633.138.093		106.430.960		118.638.093		5.677.316		22.593.182						28.270.498	25	23,83		28.270.498	5	4,47		
			Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1360		272		272		68		0						68		25		68		5			
		5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			633.138.093		106.430.960		118.638.093		5.677.316		22.593.182						28.270.498	25	23,83		28.270.498	5	4,47		
			Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1360		272		272		68		0						68		25		68		5			
		5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**6.648.000**		**672.717**		**1.288.000**		**41.564**		**102.571**						**144.135**	**31,11**	**11,19**		**144.135**	**6,22**	**2,17**	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset tetap (%)	2,2		3,1		2,74		0		0						0		0		0		0			
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			6.648.000		672.717		1.288.000		41.564		102.571						144.135	31,11	11,19		144.135	6,22	2,17		
			Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	10		2		2		2		0						2		100		2		20			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	25		5		5		1		1						2		40		2		8			
				Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	50		10		10		2		2						4		40		4		8			
				Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	170		34		34		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	5		1		1		1		0						1		100		1		20			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV															
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga			285.000		-		52.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			335.000		26.135		62.500		2.156		-						2.156	0	3,45		2.156	0	0,64		
			Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			285.000		14.875		52.500		5.560		-						5.560	100	10,59		5.560	20	1,95		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	10		2		2		2		0						2		100		2		20			
		5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah			1.195.000		306.414		230.000		27.147		56.234						83.381	40	36,25		83.381	8	6,98		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	25		5		5		1		1						2		40		2		8			
		5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah			793.000		29.904		153.000		-		3.920						3.920	0	2,56		3.920	0	0,49		
			Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah			2.750.000		116.773		550.000		-		22.344						22.344	40	4,06		22.344	8	0,81		
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	50		10		10		2		2						4		40		4		8			
		5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			285.000		16.422		52.500		-		1.858						1.858	0	3,54		1.858	0	0,65		
			Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			335.000		73.102		62.500		-		12.000						12.000	0	19,2		12.000	0	3,58		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	170		34		34		0		0						0		0		0		0			
		5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			385.000		89.091		72.500		6.701		6.216						12.917	100	17,82		12.917	20	3,36		
			Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	5		1		1		1		0						1		100		1		20			
		5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**7.293.349**		**815.840**		**1.380.089**		**1.360**		**117.513**						**118.873**	**2547,95**	**8,61**		**118.873**	**7,75**	**1,63**	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	10,01		10,05		10,29		6,37		9,26						9,26		89,99		9,26		92,51			
				Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (%)	100		100		75,00		80		83,33						83,33		111,11		83,33		83,33			
				Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)	91,41		90,46		90,14		90,14		90,26						90,26		100,13		90,26		98,74			
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			7.293.349		815.840		1.380.089		1.360		117.513						118.873	2547,95	8,61		118.873	7,75	1,63		
			Terupdate dan terkelolanya data Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	14		7		2		1		0						1		50		1		7,14			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	50		18		10		5		2						7		70		7		14			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	25		4		5		1		1						2		40		2		8			
				Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	50		508		10		2		3						5		50		5		10			
				Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	50		14		10		2		3						5		50		5		10			
				Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	336346		63.250		5000		1.500		4.000						5.500		110		5.500		1,64			
				Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	338191		60.695		100		15.000		15.000						30.000		30000		30.000		8,87			
				Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	50		17		10		2		3						5		50		5		10			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	2500		500		500		77		200						277		55,4		277		11,08			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	30		6		6		1		1						2		33,33		2		6,67			
				Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	30		6		6		1		1						2		33,33		2		6,67			
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	30		6		6		1		1						2		33,33		2		6,67			
				Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			270.000		25.563		50.000		-		8.000						8.000	50	16		8.000	7,14	2,96		
			Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	14		7		2		1		0						1		50		1		7,14			
		5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			105.000		9.100		15.000		-		-						-	70	0		-	14	0		
			Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	50		18		10		5		2						7		70		7		14			
		5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			1.672.439		202.688		332.439		-		25.426						25.426	40	7,65		25.426	8	1,52		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	25		4		5		1		1						2		40		2		8			
		5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			1.000.000		89.286		200.000		-		13.600						13.600	50	6,8		13.600	10	1,36		
			Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	50		508		10		2		3						5		50		5		10			
		5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			422.350		44.941		82.350		-		8.000						8.000	50	9,71		8.000	10	1,89		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	50		14		10		2		3						5		50		5		10			
		5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			320.000		25.149		60.000		-		3.200						3.200	110	5,33		3.200	1,64	1		
			Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	336346		63.250		5000		1.500		4.000						5.500		110		5.500		1,64			
		5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah			500.000		27.432		100.000		-		4.400						4.400	30000	4,4		4.400	8,87	0,88		
			Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	338191		60.695		100		15.000		15.000						30.000		30000		30.000		8,87			
		5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			170.000		22.351		30.000		-		6.000						6.000	50	20		6.000	10	3,53		
			Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	50		17		10		2		3						5		50		5		10			
		5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah			982.800		141.471		189.000		-		23.995						23.995	55,4	12,7		23.995	11,08	2,44		
			Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	2500		500		500		77		200						277		55,4		277		11,08			
		5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			343.980		13.584		66.150		-		3.572						3.572	33,33	5,4		3.572	6,67	1,04		
			Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	30		6		6		1		1						2		33,33		2		6,67			
		5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			982.800		82.082		189.000		-		5.120						5.120	33,33	2,71		5.120	6,67	0,52		
			Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	30		6		6		1		1						2		33,33		2		6,67			
		5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			343.980		132.193		66.150		1.360		16.200						17.560	33,33	26,55		17.560	6,67	5,1		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	30		6		6		1		1						2		33,33		2		6,67			
		5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			180.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.03	**KEPEGAWAIAN**			**41.375.631**		**6.115.902**		**6.786.567**		**1.270.155**		**1.391.243**						**2.661.398**	**21,79**	**39,22**		**2.661.398**	**16,88**	**6,43**		
		5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**29.411.146**		**5.165.686**		**5.113.082**		**1.270.155**		**1.320.966**						**2.591.121**	**30,43**	**50,68**		**2.591.121**	**18,61**	**8,81**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	65,5		62,85		63,5				0						0		0		0		0			
		5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			113.822		8.962		20.000		-		842						842	10	4,21		842	2	0,74		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	50		10		10		6		1						1		10		1		2			
		5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			113.822		8.962		20.000		-		842						842	10	4,21		842	2	0,74		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	50		10		10		6		1						1		10		1		2			
		5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			23.273.167		4.542.657		4.494.543		1.244.110		1.241.791						2.485.901	65,98	55,31		2.485.901	9,55	10,68		
			Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	335		67		97		64		64						64		65,98		64		19,1			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			23.259.093		4.542.657		4.494.543		1.244.110		1.241.791						2.485.901	65,98	55,31		2.485.901	19,1	10,69		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	335		67		97		64		64						64		65,98		64		19,1			
		5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			14.073		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			14.073		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			14.073		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			547.135		6.240		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	170		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5		0		15		0		0						0		0		0		0			
		5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			450.349		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	170		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			16.419		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			80.367		6.240		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5		0		15		0		0						0		0		0		0			
		5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.245.528		81.935		110.140		6.968		25.844						32.812	10,5	29,79		32.812	12,78	2,63		
			Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	30		30		80		0		10						10		12,5		10		33,33			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		10		1650		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30		30		40		0		10						10		25		10		33,33			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		12		365		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		40		4		6						6		15		6		10			
		5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			395.291		14.041		20.000		-		3.926						3.926	12,5	19,63		3.926	33,33	0,99		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	30		30		80		0		10						10		12,5		10		33,33			
		5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			155.000		6.438		9.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		10		1650		0		0						0		0		0		0			
		5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			113.205		5.730		10.000		-		1.516						1.516	25	15,16		1.516	33,33	1,34		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30		30		40		0		10						10		25		10		33,33			
		5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			8.177		760		1.140		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		12		365		0		0						0		0		0		0			
		5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			16.888		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			556.967		54.966		70.000		6.968		20.401						27.369	15	39,1		27.369	10	4,91		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		40		4		6						6		15		6		10			
		5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			763.671		96.136		60.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		5		20		0		0						0		0		0		0			
		5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			328.380		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			435.291		96.136		60.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		5		20		0		0						0		0		0		0			
		5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.575.112		338.160		313.799		17.427		39.692						57.119	52,78	18,2		57.119	63,89	2,22		
			Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		40		0		20						20		50		20		166,67			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		36		3		3						3		8,33		3		5			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10		2		2		0		2						2		100		2		20			
		5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			19.419		2.400		3.000		-		500						500	50	16,67		500	166,67	2,57		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		40		0		20						20		50		20		166,67			
		5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			843.126		82.318		116.000		13.577		27.642						41.219	8,33	35,53		41.219	5	4,89		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		36		3		3						3		8,33		3		5			
		5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.712.567		253.442		194.799		3.850		11.550						15.400	100	7,91		15.400	20	0,9		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10		2		2		0		2						2		100		2		20			
		5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			878.638		91.598		104.600		1.650		12.797						14.447	50	13,81		14.447	30	1,64		
			Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			
		5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			198.290		26.706		34.100		1.650		7.571						9.221	100	27,04		9.221	20	4,65		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
		5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			189.690		20.191		25.500		-		5.226						5.226	100	20,49		5.226	100	2,75		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			311.468		30.000		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			
		5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			179.190		14.700		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			11.964.485		950.216		1.673.485		-		70.277						70.277	13,15	4,2		70.277	14,97	0,59	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Skor Pengembangan Karir ASN dalam penilaian Sistem Merit (Skor)	60		0		15,00				0						0		0		0		0			
				Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (%)	82,5		0		81,48				0						0		0		0		0			
				Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	16,52		0		14,32				0						0		0		0		0			
				Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (%)	70,55		79,06		68,82				0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			3.345.500		160.747		320.000		-		21.967						21.967	20	6,86		21.967	14,29	0,66		
			Tersedianya Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		1		0		1						1		100		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			160.000		6.456		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			225.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN			1.505.000		120.514		180.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN			145.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			1.135.000		20.922		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			115.000		12.855		20.000		-		21.967						21.967	100	109,83		21.967	100	19,1		
			Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		1		0		1						1		100		1		100			
		5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian			60.500				5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			977.000		126.483		200.000		-		48.310						48.310	20,87	24,16		48.310	51,76	4,94		
			Tersedianya laporan Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	1		117		100		1		1						1		1		1		100			
				Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	1250		601		1000		214		102						316		31,6		316		25,28			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	10		8		10		0		3						3		30		3		30			
		5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN			166.500		28.224		50.000		-		3.823						3.823	1	7,65		3.823	100	2,3		
			Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	1		117		100		1		1						1		1		1		100			
		5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			428.000		33.710		80.000		-		44.487						44.487	31,6	55,61		44.487	25,28	10,39		
			Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	1250		601		1000		214		102						316		31,6		316		25,28			
		5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN			382.500		64.548		70.000		-		-						-	30	0		-	30	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	10		8		10		0		3						3		30		3		30			
		5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			5.694.985		520.297		923.485		-		-						-	2,75	0		-	1,22	0		
			Tersedianya Laporan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	3		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	150		0		100		0		11						11		11		11		7,33			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan (Orang)	8		0		50		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center			3.732.456		367.053		715.956		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terkelolanya Assesment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center (Dokumen)	3		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			157.528		9.225		47.528		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			685.000		127.029		120.000		-		-						-	11	0		-	7,33	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	150		0		100		0		11						11		11		11		7,33			
		5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			595.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN			340.000		16.990		40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan (Orang)	8		0		50		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN			185.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			1.947.000		142.690		230.000		-		-						-	9,2	0		-	9,2	0		
			Tersedianya Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	250		150		250		33		59						92		36,8		92		36,8			
				Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	250		0		150		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			1.305.000		101.949		150.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			182.000		15.561		30.000		-		-						-	36,8	0		-	36,8	0		
			Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	250		150		250		33		59						92		36,8		92		36,8			
		5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai			230.000		10.702		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	250		0		150		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN			230.000		14.477		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**13.538.043**		**-**		**1.256.203**		**-**		**35.835**						**35.835**	**0**	**2,85**		**35.835**	**0**	**0,26**		
		5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			**13.538.043**		**-**		**1.256.203**		**-**		**35.835**						**35.835**	**0**	**2,85**		**35.835**	**0**	**0,26**	Badan Kepegawaian	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)	2,6		0		1,59				0						0		0		0		0			
				Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)	5,19		0		4,33				0						0		0		0		0			
		5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis			925.000		-		165.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	100		0		477		0		0						0		0		0		0			
		5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			925.000		-		165.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	100		0		477		0		0						0		0		0		0			
		5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			12.613.043		-		1.091.203		-		35.835						35.835	0	3,28		35.835	0	0,28		
			Tersedianya Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			12.613.043				1.091.203		-		35.835						35.835	0	3,28		35.835	0	0,28		
			Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**2.944.000**		**120.600**		**404.000**		**-**		**3.926**						**3.926**	**5,56**	**0,97**		**3.926**	**2,5**	**0,13**		
		5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**1.665.000**		**120.600**		**200.000**		**-**		**3.926**						**3.926**	**11,11**	**1,96**		**3.926**	**3,33**	**0,24**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya pemanfaatan hasil Kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (%)	100		100		66,67		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			770.000		11.935		50.000		-		3.926						3.926	33,33	7,85		3.926	6,67	0,51		
			Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5		1		3		0		1						1		33,33		1		20			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah			300.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan			170.000		11.935		50.000		-		3.926						3.926	33,33	7,85		3.926	20	2,31		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5		1		3		0		1						1		33,33		1		20			
		5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan			300.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			150.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			75.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan			75.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			160.000		-		75.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan			75.000		-		75.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			45.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			585.000		108.664		75.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			300.000		64.091		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			235.000		44.573		75.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			50.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.05.03	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**			**1.279.000**		**-**		**204.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (%)	83,78		81,25		76,00		0		0						0		0		0		0			
		5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan			60.000		-		60.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian,	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.05.03.2.01.0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan			60.000				60.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian,	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi			1.219.000				144.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Invensi dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi (Laporan)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.05.03.2.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi			300.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.05.03.2.02.0003	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah			60.000		-		60.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi			684.000		-		84.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.05.03.2.02.0018	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi			100.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.05.03.2.02.0023	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi			75.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi (Laporan)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**			**64.400.133**		**8.790.967**		**7.931.647**		**2.074.924**		**2.327.515**						**4.402.439**	**47,44**	**55,5**		**4.402.439**	**8,2**	**6,84**		
		6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**41.886.310**		**7.421.827**		**6.452.480**		**1.943.394**		**2.091.239**						**4.034.633**	**54,85**	**62,53**		**4.034.633**	**9,27**	**9,63**	Inspektorat	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	68,7		0		68,30				0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			69.174		6.367		5.000		-		1.080						1.080	66,67	21,59		1.080	8	1,56		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	25		6		6		0		4						4		66,67		4		16			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			29.057		6.367		5.000		-		1.080						1.080	66,67	21,59		1.080	16	3,72		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	25		6		6		0		4						4		66,67		4		16			
		6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			40.117		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			30.265.654		5.850.361		5.905.307		1.891.754		1.880.742						3.772.496	145,61	63,88		3.772.496	20	12,46		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Pada Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	415		57		57		83		83						83		145,61		83		20			
		6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			30.265.654		5.850.361		5.905.307		1.891.754		1.880.742						3.772.496	145,61	63,88		3.772.496	20	12,46		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	415		57		57		83		83						83		145,61		83		20			
		6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20.078		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			20.078		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.756.717		96.645		35.000		-		117.144						117.144	37,5	334,7		117.144	3,41	6,67		
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	44		15		4		0		3						3		75		3		6,82			
		6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			25.064		3.215		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			1.731.653		93.430		30.000		-		117.144						117.144	75	390,48		117.144	6,82	6,76		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	44		15		4		0		3						3		75		3		6,82			
		6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.703.239		193.775		61.280		9.476		37.624						47.101	45	76,86		47.101	12,14	2,77		
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		1		12		0		9						9		75		9		15			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		1		12		3		0						3		25		3		5			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		1		4		0		2						2		50		2		50			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40		1		8		2		4						6		75		6		15			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			147.422		27.766		15.000		-		1.947						1.947	75	12,98		1.947	15	1,32		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		1		12		0		9						9		75		9		15			
		6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			30.064		13.990		10.000		4.080		-						4.080	25	40,8		4.080	5	13,57		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		1		12		3		0						3		25		3		5			
		6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			40.115		5.400		4.000		-		1.074						1.074	50	26,84		1.074	50	2,68		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		1		4		0		2						2		50		2		50			
		6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			11.429		1.520		2.280		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.434.082		145.099		30.000		5.396		34.604						40.000	75	133,33		40.000	15	2,79		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40		1		8		2		4						6		75		6		15			
		6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			20.064		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			20.064		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.488.746		608.146		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	50		10		6		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			450.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.038.746		608.146		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	50		10		6		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.652.832		277.855		219.093		35.564		32.259						67.823	37,5	30,96		67.823	7,5	4,1		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		1		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		1		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
		6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6.013		1.592		2.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		1		12		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			481.027		72.706		95.960		21.964		18.909						40.873	50	42,59		40.873	10	8,5		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		1		12		3		3						6		50		6		10			
		6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			130.384		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.035.409		203.557		111.133		13.600		13.350						26.950	100	24,25		26.950	20	2,6		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
		6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.929.870		388.678		196.800		6.600		22.390						28.990	81,25	14,73		28.990	13,88	0,99		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25		1		5		5		5						5		100		5		20			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8		1		1		0		1						1		100		1		12,5			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	100		20		12		0		3						3		25		3		3			
		6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			166.926		26.590		33.300		1.800		6.887						8.687	100	26,09		8.687	20	5,2		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
		6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			644.143		101.899		128.500		4.800		9.103						13.903	100	10,82		13.903	20	2,16		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25		1		5		5		5						5		100		5		20			
		6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.622.401		206.049		20.000		-		5.000						5.000	100	25		5.000	12,5	0,31		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8		1		1		0		1						1		100		1		12,5			
		6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			496.400		54.140		15.000		-		1.400						1.400	25	9,33		1.400	3	0,28		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	100		20		12		0		3						3		25		3		3			
		6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			**17.778.386**		**1.120.145**		**1.300.547**		**116.409**		**183.775**						**300.184**	**17,58**	**23,08**		**300.184**	**3,3**	**1,69**	Inspektorat	
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	85,3		82,31		82,40		82,31		78,56						78,56		95,34		78,56		92,1			
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			14.323.746		917.006		1.030.484		95.829		142.081						237.910	19,74	23,09		237.910	3,46	1,66		
			Terlaksananya pengawasan internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	47		6		7		1		2						3		42,86		3		6,38			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	51		38		15		1		1						2		13,33		2		3,92			
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	82		16		10		0		1						1		10		1		1,22			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV																	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	165		20		25		6		4						10		40		10		6,06			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	113		31		25		0		3						3		12		3		2,65			
				Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	50		21		10		1		1						2		20		2		4			
		6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			1.777.999		94.871		116.619		2.110		27.229						29.339	42,86	25,16		29.339	6,38	1,65		
			Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	47		6		7		1		2						3		42,86		3		6,38			
		6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			1.565.267		106.595		106.102		8.260		5.636						13.896	13,33	13,1		13.896	3,92	0,89		
			Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	51		38		15		1		1						2		13,33		2		3,92			
		6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja			1.786.522		117.575		141.885		-		23.120						23.120	10	16,29		23.120	1,22	1,29		
			Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	82		16		10		0		1						1		10		1		1,22			
		6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan			3.413.734		200.033		268.335		73.080		41.594						114.674	40	42,74		114.674	6,06	3,36		
			Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	165		20		25		6		4						10		40		10		6,06			
		6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa			3.623.432		236.606		289.044		-		40.530						40.530	12	14,02		40.530	2,65	1,12		
			Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	113		31		25		0		3						3		12		3		2,65			
		6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal			596.853		44.745		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			1.559.940		116.582		88.499		12.379		3.972						16.352	20	18,48		16.352	4	1,05		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	50		21		10		1		1						2		20		2		4			
		6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			3.454.640		203.139		270.063		20.580		41.694						62.274	10	23,06		62.274	2,73	1,8		
			Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	4		2		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	55		11		15		1		2						3		20		3		5,45			
		6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			562.038		23.624		26.120		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	4		2		1		0		0						0		0		0		0			
		6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			2.892.602		179.515		243.943		20.580		41.694						62.274	20	25,53		62.274	5,45	2,15		
			Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	55		11		15		1		2						3		20		3		5,45			
		6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			**4.735.437**		**248.996**		**178.620**		**15.120**		**52.502**						**67.622**	**70**	**37,86**		**67.622**	**11,46**	**1,43**	Inspektorat	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3.5		0		3.2												0		0		0			
				Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	3.6		3.031		3.3												0				0			
		6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			2.504.439		165.871		69.190		8.680		18.405						27.085	60	39,15		27.085	4,38	1,08		
			Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	50		10		10		1		1						2		20		2		4			
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	21		1		1		0		1						1		100		1		4,76			
		6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			1.406.939		85.919		31.035		8.680		12.389						21.069	20	67,89		21.069	4	1,5		
			Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	50		10		10		1		1						2		20		2		4			
		6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			1.097.501		79.951		38.155		-		6.015						6.015	100	15,77		6.015	4,76	0,55		
			Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	21		1		1		0		1						1		100		1		4,76			
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			2.230.997		83.125		109.430		6.440		34.097						40.537	75	37,04		40.537	15	1,82		
			Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	170		34		34		0		34						34		100		34		20			
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	170		23		34		34		34						34		100		34		20			
				Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	5		2		1		0		1						1		100		1		20			
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	34		34		34		0		0						0		0		0		0			
		6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			844.092		7.895		41.760		-		13.650						13.650	100	32,69		13.650	20	1,62		
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	170		34		34		0		34						34		100		34		20			
		6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			432.400		22.670		21.245		6.440		15.763						22.203	100	104,51		22.203	20	5,13		
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	170		23		34		34		34						34		100		34		20			
		6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			434.024		15.610		21.425		-		4.685						4.685	100	21,86		4.685	20	1,08		
			Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	5		2		1		0		1						1		100		1		20			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			520.480		36.951		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	34		34		34		0		0						0		0		0		0			
		7.01	**KECAMATAN**			**82.516.569**		**11.199.092**		**12.085.586**		**3.522.695**		**3.584.039**						**7.106.734**	**27,58**	**58,8**		**7.106.734**	**129,69**	**8,61**		
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**20.674.327**		**3.021.768**		**3.426.592**		**1.134.630**		**1.071.598**						**2.206.228**	**37,67**	**64,39**		**2.206.228**	**101,9**	**10,67**	Kecamatan Banda Kota	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	311,64		0		62,28		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			132.000		6.402		12.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		6		7		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			90.000		6.402		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		6		7		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			42.000		-		2.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.316.849		2.537.617		2.938.368		1.090.104		1.017.454						2.107.557	57,14	71,73		2.107.557	10,61	15,83		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1960		336		364		104		104						208		57,14		208		10,61			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.316.849		2.537.617		2.938.368		1.090.104		1.017.454						2.107.557	57,14	71,73		2.107.557	10,61	15,83		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1960		336		364		104		104						208		57,14		208		10,61			
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			735.664		-		27.083		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	80		0		80		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			301.551		-		20.083		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	80		0		80		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			82.000		-		2.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			352.113		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			906.810		78.290		98.140		4.008		4.490						8.497	61	8,66		8.497	60,2	0,94		
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	48		49		48		0		48						48		100		48		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8		6		8		0		8						8		100		8		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7		11		7		0		7						7		100		7		100			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	365		1		365		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	199		27		40		2		0						2		5		2		1,01			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			172.351		16.005		25.000		-		1.500						1.500	100	6		1.500	100	0,87		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	48		49		48		0		48						48		100		48		100			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			85.367		6.995		15.000		-		1.491						1.491	100	9,94		1.491	100	1,75		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8		6		8		0		8						8		100		8		100			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			85.367		7.200		15.000		-		1.500						1.500	100	10		1.500	100	1,76		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7		11		7		0		7						7		100		7		100			
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5.700		1.140		1.140		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	365		1		365		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			558.025		46.950		42.000		4.008		-						4.008	5	9,54		4.008	1,01	0,72		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	199		27		40		2		0						2		5		2		1,01			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.687.346		29.986		52.941		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	12		16		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.390.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			282.259		-		24.246		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.015.087		29.986		28.695		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	12		16		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.864.991		306.757		227.200		39.457		39.361						78.818	66,67	34,69		78.818	447,85	4,23		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	30		247		400		0		400						400		100		400		1333,33			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	240		36		48		12		12						24		50		24		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2640		12		12		3		3						6		50		6		0,23			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			26.456		790		3.000		-		492						492	100	16,4		492	1333,33	1,86		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	30		247		400		0		400						400		100		400		1333,33			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			286.200		42.640		46.200		11.740		10.669						22.409	50	48,5		22.409	10	7,83		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	240		36		48		12		12						24		50		24		10			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.552.335		263.327		178.000		27.717		28.200						55.917	50	31,41		55.917	0,23	3,6		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2640		12		12		3		3						6		50		6		0,23			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.030.667		62.718		70.860		1.063		10.293						11.356	53,33	16,03		11.356	117,33	1,1		
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		36		15		0		15						15		100		15		500			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15		0		15		0		10						10		66,67		10		66,67			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			333.095		26.880		33.800		1.063		7.008						8.071	100	23,88		8.071	20	2,42		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			121.031		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			397.291		25.928		22.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			51.911		9.910		5.000		-		1.485						1.485	100	29,7		1.485	500	2,86		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		36		15		0		15						15		100		15		500			
		7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			127.338		-		10.060		-		1.800						1.800	66,67	17,89		1.800	66,67	1,41		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15		0		15		0		10						10		66,67		10		66,67			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.244.329**		**117.265**		**95.000**		**19.999**		**-**						**19.999**	**20**	**21,05**		**19.999**	**4**	**1,61**	Kecamatan Banda Sakti	
			Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	339		100		65,00		65		0						65		100		65		19,17			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			919.405		105.325		75.000		19.999		-						19.999	50	26,67		19.999	10	2,18		
			Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5		1		1		1		0						1		100		1		20			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			165.734		24.910		25.000		19.999		-						19.999	100	80		19.999	20	12,07		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5		1		1		1		0						1		100		1		20			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			753.671		80.416		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			154.873		5.980		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			154.873		5.980		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.7.04	Pemberdayaan Mukim			170.051		5.960		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Mukim	Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	10		12		12		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim (Laporan)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.7.04.0002	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim			121.140		5.960		8.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	10		12		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.7.04.0004	Pelantikan Imeum Mukim			48.911				2.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim (Laporan)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**175.039**		**10.375**		**13.003**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Banda Sakti	
			Meningkatnya lingkungan yang aman, tertib, dan tentram	Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat. (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			175.039		10.375		13.003		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		22		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			103.823		10.375		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		22		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			71.217		-		3.003		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**197.390**		**14.055**		**33.200**		**5.400**		**-**						**5.400**	**100**	**16,27**		**5.400**	**20**	**2,74**	Kecamatan Banda Sakti	
			Meningkatnya Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Persentase kebijakan urusan pemerintahan (%)	500		100		100		36		0						36		36		36		7,2			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			197.390		14.055		33.200		5.400		-						5.400	100	16,27		5.400	20	2,74		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	5		1		1		1		0						1		100		1		20			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			197.390		14.055		33.200		5.400		-						5.400	100	16,27		5.400	20	2,74		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	5		1		1		1		0						1		100		1		20			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**405.468**		**13.975**		**44.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Banda Sakti	
			Meningkatnya Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			405.468		13.975		44.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	18		18		18		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	18		0		18		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	18		0		18		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	1		18		18		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			80.367		6.957		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	18		18		18		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			62.000		-		22.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	18		0		18		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			42.000		-		2.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	18		0		18		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			221.101		7.018		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	1		18		18		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**19.642.243**		**3.245.453**		**2.728.381**		**937.324**		**897.322**						**1.834.647**	**43,85**	**67,24**		**1.834.647**	**22,28**	**9,34**	Kecamatan Blang Mangat	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	301,67		0		60,20		15,05		15,05						30,1		50		30,1		9,98			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			129.000		6.275		9.000		300		-						300	20	3,33		300	20	0,23		
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		7		10		4		0						4		40		4		40			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			88.000		6.275		8.000		300		-						300	40	3,75		300	40	0,34		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		7		10		4		0						4		40		4		40			
		7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			41.000		-		1.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.744.585		2.128.726		2.324.193		884.400		827.664						1.712.063	50	73,66		1.712.063	12,88	15,93		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	264		276		204		51		51						102		50		102		38,64			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.664.585		2.128.726		2.324.193		884.400		827.664						1.712.063	50	73,66		1.712.063	38,64	16,05		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	264		276		204		51		51						102		50		102		38,64			
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			80.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			525.760		-		8.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	70		0		26		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	22		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			214.000		-		4.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	70		0		26		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			41.000		-		1.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			160.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	22		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			70.760		-		3.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			980.541		233.034		71.140		6.080		6.714						12.794	41,62	17,98		12.794	41,62	1,3		
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	70		316		70		0		36						36		51,43		36		51,43			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	600		564		600		0		300						300		50		300		50			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30		20		30		0		16						16		53,33		16		53,33			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	365		365		365		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30		30		30		8		8						16		53,33		16		53,33			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			221.841		76.714		15.000		-		1.050						1.050	51,43	7		1.050	51,43	0,47		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	70		316		70		0		36						36		51,43		36		51,43			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			193.000		60.962		15.000		-		1.000						1.000	50	6,67		1.000	50	0,52		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	600		564		600		0		300						300		50		300		50			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			130.000		4.560		10.000		-		500						500	53,33	5		500	53,33	0,38		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30		20		30		0		16						16		53,33		16		53,33			
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5.700		798		1.140		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	365		365		365		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			430.000		90.000		30.000		6.080		4.164						10.244	53,33	34,15		10.244	53,33	2,38		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30		30		30		8		8						16		53,33		16		53,33			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.342.214		59.352		22.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksanannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	8		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		10		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.122.000				2.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	8		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			120.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			240.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			800.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			540.214		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			320.000		59.352		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		10		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.873.754		341.378		238.299		43.845		51.355						95.200	66.67	39,95		95.200	68.06	5,08		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	30		115		30		8		22						30		100		30		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	72		72		72		18		18						36		50		36		50			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	288		888		312		78		78						156		50		156		54,17			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			22.000		791		2.000		200		300						500	100	25		500	100	2,27		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	30		115		30		8		22						30		100		30		100			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			226.493		44.359		45.299		4.911		11.530						16.441	50	36,3		16.441	50	7,26		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	72		72		72		18		18						36		50		36		50			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.625.261		296.227		191.000		38.733		39.525						78.258	50	40,97		78.258	54,17	4,82		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	288		888		312		78		78						156		50		156		54,17			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			966.390		476.687		55.750		2.700		11.590						14.290	93,33	25,63		14.290	38,1	1,48		
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		21		1		0		3						3		300		3		100			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15		0		15		0		10						10		66.67		10		66.67			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			289.000		37.173		33.800		2.700		8.700						11.400	100	33,73		11.400	100	3,94		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			35.440		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			410.000		419.514		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			45.000		20.000		5.000		-		1.500						1.500	300	30		1.500	100	3,33		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		21		1		0		3						3		300		3		100			
		7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			106.950		-		6.950		-		1.390						1.390	66,67	20		1.390	66,67	1,3		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15		0		15		0		10						10		66,67		10		66,67			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.025.360**		**191.366**		**85.360**		**20.000**		**-**						**20.000**	**0**	**23,43**		**20.000**	**0**	**1,95**	Kecamatan Blang Mangat	
			Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	339		63		65,00		65		0						65		100		65		19,17			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			590.360		110.548		70.360		20.000		-						20.000	0	28,43		20.000	0	3,39		
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1		0		0		1		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			100.000		25.000		20.000		20.000		-						20.000	0	100		20.000	0	20		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1		0		0		1		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			490.360		85.548		50.360		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			49.000		74.169		9.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			49.000		74.169		9.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.7.04	Pemberdayaan Mukim			386.000		6.648		6.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Mukim	Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	12		12		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim (Laporan)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.7.04.0002	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim			365.000		6.648		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	12		12		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.7.04.0004	Pelantikan Imeum Mukim			21.000				1.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim (Laporan)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**171.000**		**18.969**		**11.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Blang Mangat	
			Meningkatnya lingkungan yang aman, tertib, dan tentram	Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat. (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			171.000		18.969		11.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01.0001	*Sinergitas* dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			130.000		10.077		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya *Sinergitas* dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			41.000		8.892		1.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**173.200**		**14.090**		**33.200**		**8.400**		**6.100**						**14.500**	**100**	**43,67**		**14.500**	**100**	**8,37**	Kecamatan Blang Mangat	
			Meningkatnya Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Persentase kebijakan urusan pemerintahan (%)	100		100		100		25		55						80		80		80		80			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			173.200		14.090		33.200		8.400		6.100						14.500	100	43,67		14.500	100	8,37		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			173.200		14.090		33.200		8.400		6.100						14.500	100	43,67		14.500	100	8,37		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**342.000**		**67.014**		**42.000**		**-**		**5.000**						**5.000**	**25**	**11,9**		**5.000**	**25**	**1,46**	Kecamatan Blang Mangat	
			Meningkatnya Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	100		100		100		100		0						100		100		100		100			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			342.000		67.014		42.000		-		5.000						5.000	25	11,9		5.000	25	1,46		
			Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1		2		1		0		1						1		100		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	22		0		22		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	22		0		22		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	1		2		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			90.000		14.863		10.000		-		5.000						5.000	100	50		5.000	100	5,56		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1		2		1		0		1						1		100		1		100			
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			61.000		-		21.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	22		0		22		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			41.000		-		1.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	22		0		22		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			150.000		52.151		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	1		2		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**15.332.495**		**1.780.019**		**2.523.312**		**574.343**		**785.950**						**1.360.293**	**14,91**	**53,91**		**1.360.293**	**367,85**	**8,87**	Kecamatan Muara Kete	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	61		0		60,25				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			132.000		6.248		12.000		962		-						962	0	8,02		962	0	0,73		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		10		8		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			90.000		6.248		10.000		962		-						962	0	9,62		962	0	1,07		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		10		8		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			42.000		-		2.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.746.775		1.352.569		2.064.110		522.647		754.403						1.277.050	54,41	61,87		1.277.050	18,14	16,48		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	204		204		204		51		60						111		54,41		111		54,41			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.666.775		1.352.569		2.064.110		522.647		754.403						1.277.050	54,41	61,87		1.277.050	54,41	16,66		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	204		204		204		51		60						111		54,41		111		54,41			
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			80.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			651.500				31.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	40		0		40		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			189.500		-		29.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	40		0		40		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			42.000		-		2.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			160.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			220.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.844.526		76.458		82.880		16.126		-						16.126	20	19,46		16.126	14,29	0,87		
			Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	80		80		80		0		80						80		100		80		100			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1150		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	30		30		1100		30		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	730		12		10		10		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		365		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40		50		40		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			180.000		16.804		20.000		1.498		-						1.498	100	7,49		1.498	100	0,83		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	80		80		80		0		80						80		100		80		100			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			178.326		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1150		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			135.000		6.983		15.000		1.500		-						1.500	0	10		1.500	0	1,11		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	30		30		1100		30		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			26.520		9.816		15.000		1.500		-						1.500	0	10		1.500	0	5,65		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	730		12		10		10		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			50.880		855		2.880		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		365		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			803.800		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			470.000		42.000		30.000		11.628		-						11.628	0	38,76		11.628	0	2,47		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40		50		40		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.601.830		-		23.963		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urasan Pemerintahan daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.407.341		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			262.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			235.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			697.488		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		23.963		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.075.022		267.969		239.843		31.819		24.866						56.685	33	23,63		56.685	2904,17	5,27		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urasan Pemerintahan Daearah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	50		12		30		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	84		12		84		0		42						42		50		42		50			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		3		708		177		170						347		49,01		347		11566,67			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			45.929		790		8.400		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	50		12		30		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			449.350		52.228		86.700		5.719		6.016						11.735	50	13,54		11.735	50	2,61		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	84		12		84		0		42						42		50		42		50			
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			155.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			424.743		214.952		144.743		26.100		18.850						44.950	49,01	31,05		44.950	11566,67	10,58		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		3		708		177		170						347		49,01		347		11566,67			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.200.841		76.775		69.016		2.788		6.681						9.469	0	13,72		9.469	0	0,79		
			Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			216.000		36.787		40.000		2.788		6.681						9.469	0	23,67		9.469	0	4,38		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			32.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			867.841		29.988		24.016		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			65.000		10.000		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**2.488.544**		**116.236**		**112.000**		**16.500**		**-**						**16.500**	**0**	**14,73**		**16.500**	**0**	**0,66**	Kecamatan Muara Sa	
			Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100		0		90,00		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			626.671		102.705		75.000		16.500		-						16.500	0	22		16.500	0	2,63		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		5		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			25.000		25.000		25.000		16.500		-						16.500	0	66		16.500	0	66		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			601.671		77.705		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		5		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			1.592.873		6.689		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Kelompok PKK di tingkat Desa dari gampong yang menjalankan program-program PKK secara teratur dan efektif, serta memberikan dampak positif bagi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	100		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			1.592.873		6.689		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	100		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.7.04	Pemberdayaan Mukim			269.000		6.843		27.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersenggaranya Kegiatan Mukim	Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	8		0		8		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Peresmian Mukim (Dokumen)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim (Laporan)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		7.01.03.7.04.0002	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim			140.000		6.843		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	8		0		8		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.7.04.0003	Peresmian Mukim			67.000				10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peresmian Mukim	Jumlah Dokumen Hasil Peresmian Mukim (Dokumen)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.7.04.0004	Pelantikan Imeum Mukim			62.000		-		2.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim (Laporan)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**110.000**		**10.305**		**10.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Muara Satu	
			Meningkatnya lingkungan yang aman, tertib, dan tentram	Persentase Pelaksanaan Pemantauan Keamanan Dan Ketertiban Yang Dilakukan (%)	100		100		100				0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			110.000		10.305		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat.	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	100		6		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			110.000		10.305		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	100		6		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.7.03.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			-		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**254.300**		**17.321**		**33.200**		**5.400**		**5.418**						**10.818**	**50**	**32,59**		**10.818**	**600**	**4,25**	Kecamatan Muara Satu	
			Meningkatnya Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Persentase kebijakan urusan pemerintahan (%)	100		0		100				0						0		0		0		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			254.300		17.321		33.200		5.400		5.418						10.818	50	32.59		10.818	600	4,25		
			Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1		1		12		0		6						6		50		6		600			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			254.300		17.321		33.200		5.400		5.418						10.818	50	32.59		10.818	600	4,25		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1		1		12		0		6						6		50		6		600			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**408.000**		**28.363**		**44.000**		**-**		**2.886**						**2.886**	**12,5**	**6,56**		**2.886**	**12,5**	**0,71**	Kecamatan Muara Satu	
			Meningkatnya Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	100		100		100				0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			408.000		28.363		44.000		-		2.886						2.886	12.5	6,56		2.886	12,5	0,71		
			Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Dokumen gampong	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	4		4		4		0		2						2		50		2		50			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			124.000		8.776		10.000		-		2.886						2.886	50	28,86		2.886	50	2,33		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	4		4		4		0		2						2		50		2		50			
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			22.000		-		22.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			57.000		8.776		2.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			205.000		10.812		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**16.515.745**		**2.381.644**		**2.650.877**		**775.298**		**807.574**						**1.582.872**	**41,18**	**59,71**		**1.582.872**	**189,91**	**9,58**	Kecamatan Muara Satu	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	305		100		60,60				0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			150.000		6.803		30.000		-		1.000						1.000	50	3,33		1.000	44,44	0,67		
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9		7		8		0		8						8		100		8		88,89			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100.000		6.803		20.000		-		1.000						1.000	100	5		1.000	88,89	1		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9		7		8		0		8						8		100		8		88,89			
		7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			50.000		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.132.825		1.762.843		2.007.825		734.025		751.921						1.485.947	100	74.01		1.485.947	1506,67	16,27		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1540		350		308		88		308						308		100		308		20			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		45						45		0		45		4500			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.052.825		1.762.843		2.007.825		734.025		751.921						1.485.947	100	74,01		1.485.947	20	16,41		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1540		350		308		88		308						308		100		308		20			
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	4500	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		45						45		0		45		4500			
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			80.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			901.254		-		28.335		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	80		0		60		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			393.335		-		28.335		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	80		0		60		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			75.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			65.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			196.940		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			170.979		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.062.660		52.912		131.140		6.267		7.492						13.759	60	10,49		13.759	20	1,29		
			Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	400		30		80		20		80						80		100		80		20			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1150		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5750		5		1150		288		1.150						1.150		100		1.150		20			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		5		10		0		10						10		100		10		100			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	225		5		45		12		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			190.000		12.831		30.000		2.997		2.487						5.485	100	18,28		5.485	20	2,89		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	400		30		80		20		80						80		100		80		20			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			80.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1150		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			75.000		6.990		15.000		990		4.005						4.995	100	33,3		4.995	20	6,66		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5750		5		1150		288		1.150						1.150		100		1.150		20			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			75.000		4.199		15.000		-		999						999	100	6,66		999	100	1,33		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		5		10		0		10						10		100		10		100			
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12.660		798		1.140		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			80.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			550.000		28.094		70.000		2.280		-						2.280	0	3,26		2.280	0	0,41		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	225		5		45		12		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.895.173		58.227		120.750		-		5.844						5.844	0	4,84		5.844	22	0,2		
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		1		0		0		1						1		0		1		100			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		1						1		0		1		10			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.520.000		58.227		-		-		3.344						3.344	0	0		3.344	100	0,22		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		1		0		0		1						1		0		1		100			
		7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			600.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			135.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		-		-		2.500						2.500	0	0		2.500	10	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		1						1		0		1		10			
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			640.173		-		120.750		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.260.563		264.555		221.315		31.005		41.318						72.323	66,67	32,68		72.323	352,06	5,74		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	50		200		45		12		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	420		15		84		21		84						84		100		84		20			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	51		12		708		177		708						708		100		708		1388,24			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			27.589		790		5.250		492		-						492	0	9,37		492	0	1,78		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	50		200		45		12		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			403.904		30.266		48.365		6.080		6.943						13.023	100	26,93		13.023	20	3,22		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	420		15		84		21		84						84		100		84		20			
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			145.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			684.070		233.500		167.700		24.433		34.375						58.808	100	35,07		58.808	1388,24	8,6		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	51		12		708		177		708						708		100		708		1388,24			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.033.271		236.304		111.512		4.000		-						4.000	0	3,59		4.000	0	0,39		
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		3		1		1		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		3		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		3		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			251.505		26.880		46.512		4.000		-						4.000	0	8,6		4.000	0	1,59		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		3		1		1		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			163.202		99.812		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		1		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			38.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			525.563		99.812		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		3		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			55.000		9.800		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		3		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**2.564.823**		**113.549**		**104.280**		**20.000**		**-**						**20.000**	**0**	**19,18**		**20.000**	**0**	**0,78**	Kecamatan Muara D...	
			Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100		29,41		100		100		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			1.182.375		100.287		80.000		20.000		-						20.000	0	25		20.000	0	1,69		
			Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	3		0		3		3		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3		1		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			417.000		29.400		30.000		20.000		-						20.000	0	66,67		20.000	0	4,8		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	3		0		3		3		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			765.375		70.888		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3		1		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			458.647		6.719		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang dibina di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1		5		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			458.647		6.719		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1		5		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.7.04	Pemberdayaan Mukim			923.801		6.543		14.280		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Meningkatnya Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	8		6		8		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Peresmian Mukim (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim (Laporan)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.7.04.0002	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim			359.521		6.543		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	8		6		8		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.7.04.0003	Peresmian Mukim			205.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peresmian Mukim	Jumlah Dokumen Hasil Peresmian Mukim (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.7.04.0004	Pelantikan Imeum Mukim			359.280		-		4.280		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim (Laporan)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**114.000**		**7.120**		**14.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Kecamatan Muara D...	
			Meningkatnya lingkungan yang aman, tertib, dan tentram	Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat. (%)	100		47,06		100				0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			114.000		7.120		14.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat.	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		3		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		0		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			106.000		7.120		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		3		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			8.000		-		4.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		0		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**257.125**		**16.770**		**25.000**		**5.400**		**1.200**						**6.600**	**100**	**26,4**		**6.600**	**20**	**2,57**	Kecamatan Muara D...	
			Meningkatnya Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Persentase kebijakan urusan pemerintahan (%)	500		29,41		100				8						8		8		8		1,6			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			257.125		16.770		25.000		5.400		1.200						6.600	100	26,4		6.600	20	2,57		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		3		12		12		12						12		100		12		20			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			257.125		16.770		25.000		5.400		1.200						6.600	100	26,4		6.600	20	2,57		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		3		12		12		12						12		100		12		20			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**421.180**		**13.435**		**57.180**		**-**		**990**						**990**	**25**	**1,73**		**990**	**25**	**0,24**	Kecamatan Muara D...	
			Meningkatnya Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	100		100		100				19,8						19,8		19,8		19,8		19,8			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			421.180		13.435		57.180		-		990						990	25	1,73		990	25	0,24		
			Terlaksananya rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	4		1		4		0		4						4		100		4		100			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	3		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	3		17		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			99.000		6.590		10.000		-		990						990	100	9,9		990	100	1		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	4		1		4		0		4						4		100		4		100			
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			70.000				30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			72.000		-		4.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	3		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			180.180		6.845		13.180		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	3		17		3		0		0						0		0		0		0			
		8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**29.316.860**		**4.376.296**		**5.216.004**		**945.030**		**1.101.564**						**2.046.594**	**12**	**39,24**		**2.046.594**	**8,54**	**6,98**		
		8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**16.961.383**		**2.919.689**		**2.940.527**		**945.030**		**1.043.807**						**1.988.838**	**23,08**	**67,64**		**1.988.838**	**15,97**	**11,73**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	61,4		89,31		61,00				0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			120.000		17.577		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	75		5		15		6		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			120.000		17.577		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	75		5		15		6		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.479.561		2.362.192		2.478.705		945.030		983.511						1.928.542	300	77,8		1.928.542	367,2	16,8		
			Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	250		25		306		918		0						918		300		918		367,2			
		8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.479.561		2.362.192		2.478.705		945.030		983.511						1.928.542	300	77,8		1.928.542	367,2	16,8		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	250		25		306		918		0						918		300		918		367,2			
		8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			60.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	250		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	35		0		0		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			1.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	250		0		0		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			300.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	35		0		0		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.058.590		63.933		98.590		-		26.254						26.254	0	26,63		26.254	0	2,48		
			Tersedianya Pelaksanaan Pengadministrasian umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	323		0		1		3		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	224		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	143		1		1		4		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	125		12		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	270		20		1		0		0						0		0		0		0			

No	2	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			315.000		10.998		15.000		-		2.500						2.500	0	16,67		2.500	0	0,79		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	323		0		1		3		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			150.000		4.800		10.000		-		1.125						1.125	0	11,25		1.125	0	0,75		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	224		1		1		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			325.000		9.550		25.000		-		961						961	0	3,85		961	0	0,3		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	143		1		1		4		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			21.140		1.140		1.140		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	125		12		1		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			247.450		37.445		47.450		-		21.667						21.667	0	45,66		21.667	0	8,76		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	270		20		1		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.228.000		62.555		28.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	74		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	74		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	74		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	74		12		0		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	74		0		0		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	74		0		0		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			228.000		-		28.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		10		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			400.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	74		0		0		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			200.000		62.555		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	74		12		0		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			226.632		257.513		226.632		-		29.993						29.993	0	13,23		29.993	0	13,23		
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		12		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		100		1		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			75.000		40.480		75.000		-		12.418						12.418	0	16,56		12.418	0	16,56		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		12		1		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			151.632		217.033		151.632		-		17.575						17.575	0	11,59		17.575	0	11,59		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		100		1		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.288.600		155.920		88.600		-		4.050						4.050	0	4,57		4.050	0	0,31		
			Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			373.300		55.220		33.300		-		1.784						1.784	0	5,36		1.784	0	0,48		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			326.500		20.700		26.500		-		2.266						2.266	0	8,55		2.266	0	0,69		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			308.800		60.000		28.800		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			280.000		20.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			**577.181**		**987.480**		**97.181**		-		-						-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	32,14		50		25,00				0						0		0		0		0			
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			577.181		987.480		97.181		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	403		100		40		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	65		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	46		4		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paskibraka (Orang)	412		40		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			173.181		10.932		77.181		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	403		100		40		0		0						0		0		0		0			
		8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			96.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	65		0		0		0		0						0		0		0		0			
		8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			116.000		22.676		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	46		4		2		0		0						0		0		0		0			
		8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka			96.000		953.872		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	412		40		0		0		0						0		0		0		0			
		8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila			96.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			**5.831.296**		**83.381**		**1.431.296**		-		**57.756**						**57.756**	**0**	**4,04**		**57.756**	**0**	**0,99**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	50		81,98		36,00		0								0		0		0		0			
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			5.831.296		83.381		1.431.296		-		57.756						57.756	0	4,04		57.756	0	0,99		
			Terlaksananya Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	210		0		21		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	250		100		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Kegiatan)	87		0		2		0		0						0		0		0		0			
		8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			2.550.000		-		550.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	210		0		21		0		0						0		0		0		0			
		8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			80.000		60.705		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	250		100		0		0		0						0		0		0		0			
		8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			180.000		22.676		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		8.01.03.2.01.0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka			3.021.296		-		861.296		-		57.756						57.756	0	6,71		57.756	0	1,91		
			Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Kegiatan)	87		0		2		0		0						0		0		0		0			
		8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			**1.077.000**		**100.700**		**97.000**		-		-						-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	55,56		20,27		38,89		0								0		0		0		0			
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			1.077.000		100.700		97.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Organisasi kemasyrakatan yang aktif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	414		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di	1		0		0		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			97.000		100.700		97.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
		8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			800.000				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	414		0		0		0		0						0		0		0		0			
		8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			180.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			**2.990.000**		**67.710**		**50.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	100		4,37		77,94		0								0		0		0		0			
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			2.990.000		67.710		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Kebijakan dibidang ekonomi sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	45		20		30		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			2.850.000		67.710		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	45		20		30		0		0						0		0		0		0			
		8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			140.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			**1.880.000**		**217.335**		**600.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	100		100		100		0								0		0		0		0			
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			1.880.000		217.335		600.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	87		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	20		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	150		30		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar	190		30		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	5		12		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	20		12		1		0		0						0		0		0		0			
		8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			83.200		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	87		0		0		0		0						0		0		0		0			
		8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			123.200		-		40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	20		0		2		0		0						0		0		0		0			
		8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			233.200		23.230		150.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	150		30		20		0		0						0		0		0		0			
		8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			133.200		13.652		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar	190		30		20		0		0						0		0		0		0			
		8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			207.200		12.473		60.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	5		12		1		0		0						0		0		0		0			
		8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			1.100.000		167.980		300.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	20		12		1		0		0						0		0		0		0			
		9.01	**KEKHUSUSAN ACEH**			**140.731.708**		**9.609.006**		**19.236.893**		**3.398.187**		**4.954.628**						**8.352.815**	**20,65**	**43,42**		**8.352.815**	**18,47**	**5,94**		
		.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**18.170.914**		**3.238.626**		**3.245.350**		**875.626**		**927.668**						**1.803.293**	**14,17**	**55,57**		**1.803.293**	**95,83**	**9,92**	Sekretariat Majelis Permusyawaratan	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	62,3		0		61,72		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			64.000		6.550		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		6		3		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			64.000		6.550		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		6		3		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.783.799		1.690.071		1.782.494		638.293		583.949						1.222.242	66,67	68,57		1.222.242	1266,67	12,49		
			Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		0		228		76		76						152		66,67		152		1266,67			
		9.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.783.799		1.690.071		1.782.494		638.293		583.949						1.222.242	66,67	68,57		1.222.242	1266,67	12,49		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		0		228		76		76						152		66,67		152		1266,67			
		9.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			45.509		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Administras kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			45.509		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			636.700		41.461		37.140		2.096		11.136						13.232	0	35,63		13.232	0	2,08		
			Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		3		1		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		2		1		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		0		3		1		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			57.000		5.798		9.000		633		-						633	0	7,03		633	0	1,11		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		3		1		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			37.000		2.800		4.000		1.000		-						1.000	0	25		1.000	0	2,7		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		2		1		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			37.000		2.999		5.000		463		-						463	0	9,26		463	0	1,25		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		0		3		1		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5.700		1.140		1.140		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			500.000		28.724		18.000		-		11.136						11.136	0	61,87		11.136	0	2,23		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			488.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	13		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			345.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	13		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			143.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.570.155		1.309.650		1.299.166		221.042		315.275						536.317	10	41,28		536.317	12,5	8,16		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	120		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		0		5		1		1						1		20		1		25			
		9.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			15.000		800		1.000		500		-						500	0	50		500	0	3,33		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	120		1		1		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			6.555.155		1.308.850		1.298.166		220.542		315.275						535.817	20	41,27		535.817	25	8,17		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		0		5		1		1						1		20		1		25			
		9.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			582.750		190.895		116.550		14.195		17.307						31.502	27,5	27,03		31.502	25	5,41		
			Tersedianya Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4		0		4		1		1						1		25		1		25			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12		0		10		0		3						3		30		3		25			
		9.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			549.000		95.448		109.800		12.795		15.907						28.702	25	26,14		28.702	25	5,23		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4		0		4		1		1						1		25		1		25			
		9.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			33.750		95.448		6.750		1.400		1.400						2.800	30	41,48		2.800	25	8,3		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12		0		10		0		3						3		30		3		25			
		9.01.03	**PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH**			**4.642.269**		**-**		**15.455**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Sekretariat Majelis Permusyawaratan	
			Meningkatnya Fatwa yang tersebarluaskan	Persentase Fatwa yang di sosialisasikan (%)	94,23		0		85,71		0		0						0		0		0		0			
		9.01.03.7.01	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama			4.642.269		-		10.455		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Hasil Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	Jumlah Laporan Hasil Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama (laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan (Orang)	0		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Muzakarah Masalah Keagamaan (Laporan)	3		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam (Laporan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan (Orang)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.03.7.01.0002	Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama			336.401		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	Jumlah Laporan Hasil Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama (laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.03.7.01.0003	Pendidikan Kader Ulama			-		-		5.455		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggarakannya Pendidikan Kader Ulama	Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan (Orang)	0		0		10		0		0						0		0		0		0			
		9.01.03.7.01.0005	Muzakarah Masalah Keagamaan			1.181.011		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Muzakarah Masalah Keagamaan	Jumlah Laporan Hasil Muzakarah Masalah Keagamaan (Laporan)	3		0		1		0		0						0		0		0		0			
		9.01.03.7.01.0011	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam			1.119.403		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam (Laporan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.03.7.01.0014	Pendidikan Kader Ulama			2.005.455		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggarakannya Pendidikan Kader Ulama	Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan (Orang)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.03.7.02	Silaturahmi Ulama-Ulama			-		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
				Jumlah Ulama yang Berperan dalam Pembangunan Daerah (Orang)	0		0		20		0		0						0		0		0		0			
		9.01.03.7.02.0002	Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah			-		-		5.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Diterapkannya Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Ulama yang Berperan dalam Pembangunan Daerah (Orang)	0		0		20		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**19.692.092**		**606.484**		**1.867.536**		**214.202**		**120.752**						**334.954**	**26,92**	**17,94**		**334.954**	**19,52**	**1,7**	Sekretariat Baitul Mal	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	62,15		0		61,95		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			40.032		6.283		10.000		484		508						992	0	9,92		992	0	2,48		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	40		10		10		2		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			40.032		6.283		10.000		484		508						992	0	9,92		992	0	2,48		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	40		10		10		2		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.723.264		600.201		1.110.132		120.103		3.194						123.298	100	11,11		123.298	103,85	1,6		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26		26		27		27		27						27		100		27		103,85			
		9.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.723.264		600.201		1.110.132		120.103		3.194						123.298	100	11,11		123.298	103,85	1,6		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26		26		27		27		27						27		100		27		103,85			
		9.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			699.027		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	12		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			699.027		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	12		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			795.844				100.140		2.498		21.804						24.302	6,67	24,27		24.302	3,13	3,05		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	41		0		50		30		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	700		0		1000		500		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		0		3		1		1						1		33,33		1		25			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		0		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		0		40		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			94.302		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			99.076		-		24.000		998		1.032						2.030	0	8,46		2.030	0	2,05		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	41		0		50		30		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			57.629		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			86.526		-		20.000		1.000		300						1.300	0	6,5		1.300	0	1,5		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	700		0		1000		500		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			22.632		-		5.000		500		495						994	33,33	19,89		994	25	4,39		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		0		3		1		1						1		33,33		1		25			
		9.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.932		-		1.140		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		0		12		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			261.949		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			168.798		-		50.000		-		19.977						19.977	0	39,95		19.977	0	11,84		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		0		40		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6.018.617		-		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional dan Sarana Prasaran Pendukung Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		10		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			2.557.543		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			3.288.517		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			172.557		-		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		10		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.913.170		-		538.664		87.692		85.989						173.681	8,33	32,24		173.681	50	4,44		
			Terlaksananya Kegiatan Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		12		3		2						2		16,67		2		200			
		9.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12.484		-		2.600		-		492						492	0	18,93		492	0	3,94		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		100		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			104.780		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			52.390		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.743.516		-		536.064		87.692		85.497						173.189	16,67	32,31		173.189	200	4,63		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		12		3		2						2		16,67		2		200			
		9.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			502.138		-		78.600		3.425		9.258						12.683	66,67	16,14		12.683	24	2,53		
			Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		0		1		1		1						1		100		1		20			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		0		1		1		1						1		100		1		100			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		50		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		9.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			160.356		-		33.100		2.100		4.650						6.750	100	20,39		6.750	20	4,21		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		0		1		1		1						1		100		1		20			
		9.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			133.468		-		27.500		1.325		3.388						4.713	100	17,14		4.713	100	3,53		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		0		1		1		1						1		100		1		100			
		9.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			85.534		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			70.390		-		18.000		-		1.220						1.220	0	6,78		1.220	0	1,73		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		50		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			52.390		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.04	**PROGRAM BAITUL MAL**			**42.966.284**		**-**		**5.708.000**		**689.450**		**249.250**						**938.700**	**23,86**	**16,45**		**938.700**	**12,81**	**2,18**	Sekretariat Baitul Mal	
			Meningkat Pengumpulan ZISWAF	Persentase Peningkatan ZISWAF (%)	15,24		0		11,56		0		0						0		0		0		0			
		9.01.04.7.01	Pengelolaan ZISWAF			183.975		-		53.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersuiunnya Dokumen Perencanaan Ziswaf	Jumlah Perencanaan Ziswaf yang Disusun (Dokumen)	25		0		10		0		0						0		0		0		0			
		9.01.04.7.01.0001	Penyusunan Perencanaan ZISWAF			183.975		-		53.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersuiunnya Perencanaan Ziswaf	Jumlah Perencanaan Ziswaf yang Disusun (Dokumen)	25		0		10		0		0						0		0		0		0			
		9.01.04.7.02	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal			3.984.238		-		55.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersuiunnya Dokumen tentang Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf (Orang)	612		0		50		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM (Dokumen)	1		0		6		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen tentang Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal (Dokumen)	1		0		5		0		0						0		0		0		0			
		9.01.04.7.02.0001	Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF			1.853.644		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf (Orang)	612		0		50		0		0						0		0		0		0			
		9.01.04.7.02.0002	Pembinaan dan Koordinasi Badan Baitul Mal			261.949		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.04.7.02.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM			800.848		-		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM (Dokumen)	1		0		6		0		0						0		0		0		0			
		9.01.04.7.02.0004	Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal			1.067.797		-		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Jumlah Dokumen tentang Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal (Dokumen)	1		0		5		0		0						0		0		0		0			
		9.01.04.7.03	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf			38.798.071		-		5.600.000		689.450		249.250						938.700	35,79	16,76		938.700	19,92	2,42		
			Terlaksananya Kegiatan Penerimaan ZIS Ke Masyarakat	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir (Orang)	927		0		705		705		700						700		99,29		700		75,51			
				Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Miskin (Orang)	381		0		88		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Amil (Orang)	117		0		110		110		100						100		90,91		100		85,47			
				Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Muallaf (Orang)	15		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Gharimin (Orang)	10		0		6		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fisabilillah (Orang)	50		0		84		68		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir (Orang)	70		0		135		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Infaq (Orang)	410		0		78		78		75						75		96,15		75		18,29			
				Jumlah Laporan Pengelolaan Wakaf (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.04.7.03.0001	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir			11.751.000		-		1.305.000		491.250		18.750						510.000	99,29	39,08		510.000	75,51	4,34		
			Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir (Orang)	927		0		705		705		700						700		99,29		700		75,51			
		9.01.04.7.03.0002	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin			12.200.000		-		2.200.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Miskin (Orang)	381		0		88		0		0						0		0		0		0			
		9.01.04.7.03.0003	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil			4.066.000		-		550.000		59.000		-						59.000	90,91	10,73		59.000	85,47	1,45		
			Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Amil (Orang)	117		0		110		110		100						100		90,91		100		85,47			
		9.01.04.7.03.0004	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf			210.000		-		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Muallaf (Orang)	15		0		10		0		0						0		0		0		0			
		9.01.04.7.03.0005	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin			207.000		-		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Gharimin (Orang)	10		0		6		0		0						0		0		0		0			
		9.01.04.7.03.0006	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah			2.108.000				108.000		20.400		-						20.400	0	18,89		20.400	0	0,97		
			Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fisabilillah (Orang)	50		0		84		68		0						0		0		0		0			
		9.01.04.7.03.0007	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil			1.592.000		-		192.000		-		2.000						2.000	0	1,04		2.000	0	0,13		
			Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir (Orang)	70		0		135		0		0						0		0		0		0			
		9.01.04.7.03.0008	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq			6.464.071		-		1.200.000		118.800		228.500						347.300	96,15	28,94		347.300	18,29	5,37		
			Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Infaq (Orang)	410		0		78		78		75						75		96,15		75		18,29			
		9.01.04.7.03.0009	Pengelolaan Wakaf			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Wakaf	Jumlah Laporan Pengelolaan Wakaf (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**27.230.641**		**4.190.615**		**4.832.043**		**1.495.519**		**2.952.646**						**4.448.165**	**14,76**	**92,06**		**4.448.165**	**7,5**	**16,34**	Dinas Syariat Islam	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	62,2		61,35		61,45				0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			155.200		11.067		21.500		-		-						-	12,5	0		-	14,29	0		
			Tersedianya Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7		4		8		4		2						2		25		2		28,57			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			112.700		11.067		13.000		-		-						-	25	0		-	28,57	0		
			Tersuunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7		4		8		4		2						2		25		2		28,57			
		9.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			42.500		-		8.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersuunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.432.644		3.453.318		3.920.504		1.403.812		2.733.872						4.137.684	29,18	105,54		4.137.684	26,88	22,45		
			Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	532		32		490		239		143						143		29,18		143		26,88			
		9.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			18.432.644		3.453.318		3.920.504		1.403.812		2.733.872						4.137.684	29,18	105.54		4.137.684	26,88	22,45		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	532		32		490		239		143						143		29,18		143		26,88			
		9.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			20.000						-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			596.500		-		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	160		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			340.000				-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	160		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			11.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			245.000		-		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.037.050		78.844		124.140		7.380		24.542						31.921	0,24	25,71		31.921	0,03	3,08		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	50		38		50		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	420		250		420		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		5		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	365		2		365		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	400		95		85		1		0						1		1,18		1		0,25			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV															
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		9.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			123.100		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			152.000		14.512		18.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	50		38		50		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			8.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			68.000		7.050		8.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	420		250		420		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			47.000		4.200		7.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		5		2		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5.700		798		1.140		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	365		2		365		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			621.250		52.285		90.000		7.380		24.542						31.921	1,18	35,47		31.921	0,25	5,14		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	400		95		85		1		0						1		1,18		1		0,25			
		9.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			12.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.693.750		53.879		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		12		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.017.750		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			400.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		0		4		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			120.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			140.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			598.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			60.000		53.879		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		2		2		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			358.000		-		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		12		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.359.198		453.437		522.000		84.327		184.882						269.210	41.67	51.57		269.210	31,25	8,01		
			Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	250		100		250		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		3		1		1		1						1		100		1		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		3		4		1		1						1		25		1		25			
		9.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			13.500		1.592		2.700		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	250		100		250		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.840.500		274.972		370.500		70.334		152.964						223.299	100	60,27		223.299	100	12,13		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		3		1		1		1						1		100		1		100			
		9.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			403.200		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.101.998		176.873		148.800		13.993		31.918						45.911	25	30,85		45.911	25	4,17		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		3		4		1		1						1		25		1		25			
		9.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			936.300		140.068		118.900		-		9.350						9.350	25	7,86		9.350	9,52	1		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12		1		12		0		4						4		33,33		4		33,33			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24		1		12		0		8						8		66,67		8		33,33			
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8		21		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8		0		22		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			170.300		31.709		37.100		-		4.500						4.500	33,33	12,13		4.500	33,33	2,64		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12		1		12		0		4						4		33,33		4		33,33			
		9.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			229.000		21.906		39.800		-		4.850						4.850	66,67	12,19		4.850	33,33	2,12		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24		1		12		0		8						8		66,67		8		33,33			
		9.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			110.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			225.000		86.454		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8		21		3		0		0						0		0		0		0			
		9.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			162.000		-		17.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8		0		22		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02	**PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH**			**28.029.508**		**1.573.281**		**3.568.508**		**123.390**		**704.312**						**827.702**	**25,8**	**23,19**		**827.702**	**6,64**	**2,95**	Dinas Syariat Islam	
			Meningkatnya Pembinaan Syariat Islam	Angka Melek Al-Qur"an (Angka)	88,87		0		85,41				0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.01	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam			1.707.500		60.638		175.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelatihan Wawasan Keislaman bagi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Mawaris (Orang)	65		68		25		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas yang Mengikuti TOT Modul Wawasan Keislaman (Orang)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Tokoh Masyarakat yang Dibina dan Ditingkatan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam (Orang)	80		90		30		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Tenaga Hisab dan Ru"yat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Seminar Problematika Syariat Islam (Orang)	80		85		25		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat yang Terbina Mental Spiritualnya (Orang)	100		90		100		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.01.0001	Pelatihan Mawaris			369.000		11.077		25.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelatihan Mawaris	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Mawaris (Orang)	65		68		25		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.01.0002	TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas			120.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Telaksananya TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas	Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas yang Mengikuti TOT Modul Wawasan Keislaman (Orang)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.01.0003	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam			295.000		16.339		35.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbina dan Meningkatnya Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Tokoh Masyarakat yang Dibina dan Ditingkatan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam (Orang)	80		90		30		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.01.0004	Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru"yat			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru"yat	Jumlah Tenaga Hisab dan Ru"yat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.01.0005	Seminar Problematika Syariat Islam			375.000		13.643		75.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Seminar Problematika Syariat Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Seminar Problematika Syariat Islam (Orang)	80		85		25		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.01.0006	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat			348.500		19.580		40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbinanya Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat	Jumlah Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat yang Terbina Mental Spiritualnya (Orang)	100		90		100		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.02	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran			7.069.350		775.959		980.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan peningkatan pemahaman Al-Qur'an	Jumlah Lembaga Tilawah Quran yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan (Lembaga)	3		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran yang Mengikuti Bimbingan Teknis (Orang)	30		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Imam Hafid pada Masjid yang Mengikuti Pembinaan (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ (Orang)	232		182		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional yang Mengikuti Pelatihan/Training Center (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kafilah Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional yang Diberangkatkan (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.02.0001	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran			1.000.000		-		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	Jumlah Lembaga Tilawah Quran yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan (Lembaga)	3		0		2		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.02.0002	Peningkatan Kualitas Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran			486.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran	Jumlah Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran yang Mengikuti Bimbingan Teknis (Orang)	30		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.02.0003	Pembinaan Imam Hafidz pada Masjid			140.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Imam Hafid pada Masjid	Jumlah Imam Hafid pada Masjid yang Mengikuti Pembinaan (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.02.0004	Pelaksanaan MTQ			5.317.350		775.959		880.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ (Orang)	232		182		100		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.02.0005	Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional			60.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional	Jumlah Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional yang Mengikuti Pelatihan/Training Center (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.02.0006	Pemberangkatan Kafilah Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional			66.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberangkatan Kafilah Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional	Jumlah Kafilah Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional yang Diberangkatkan (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.03	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya laporan Peningkatan Toleransi Umat Beragama	Jumlah Dokumen Hasil Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.03.0001	Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam	Jumlah Dokumen Hasil Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.04	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam			4.440.570		194.684		658.570		-		109.053						109.053	57,14	16,56		109.053	7,69	2,46		
			Terlaksananya Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam (Dokumen)	3		1		1		1		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil yang Mengikuti Pembinaan (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dai dan Koordinator Lapangan yang Dibina dan Meningkat Kualitasnya (Orang)	100		0		25		0		100						100		400		100		100			
				Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan yang Mengikuti Pembinaan (Orang)	500		500		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Takmir Masjid yang Mengikuti Pelatihan (Orang)	104		0		66		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Cerdas Cermat Syariat Islam (Orang)	80		100		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gampong Percontohan Syariat yang Dibina (Gampong)	5		0		6		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Khatib Jum"at yang Dikirim ke Kabupaten/Kota (Orang)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Masjid/Meunasah/Mushalla yang Menyelenggarakan Ceramah Bulan Suci Ramadhan (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Gampong yang Menyelenggarakan Ceramah (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana Peribadatan yang Didistribusikan dan Diawasi (Unit)	10		9		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Rumah Ibadah dan Harta Agama yang Didata dan Diinvertarisir (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Agama yang Ditingkatkan Pembangunannya (Unit)	10		0		3		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.04.0001	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam			917.000		122.601		130.000		-		3.644						3.644	0	2,8		3.644	0	0,4		
			Terlaksananya Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam (Dokumen)	3		1		1		1		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.04.0002	Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil			2.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbinanya Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil	Jumlah Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil yang Mengikuti Pembinaan (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		02.7.04.0003	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan			380.409		-		105.409		-		105.409						105.409	400	100		105.409	100	27,71		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terbina dan Meningkatnya Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan	Jumlah Dai dan Koordinator Lapangan yang Dibina dan Meningkat Kualitasnya (Orang)	100		0		25		0		100						100		400		100		100			
		9.01.02.7.04.0004	Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan			450.000		33.232		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbinanya Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan	Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan yang Mengikuti Pembinaan (Orang)	500		500		100		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.04.0005	Pelatihan Takmir Mesjid			453.161		-		108.161		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelatihan Takmir Mesjid	Jumlah Takmir Masjid yang Mengikuti Pelatihan (Orang)	104		0		66		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.04.0006	Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam			380.000		26.991		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Cerdas Cermat Syariat Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Cerdas Cermat Syariat Islam (Orang)	80		100		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.04.0007	Pembinaan Gampong Percontohan Syariat			580.000		-		200.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbinanya Gampong Percontohan Syariat	Jumlah Gampong Percontohan Syariat yang Dibina (Gampong)	5		0		6		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.04.0008	Pengiriman Khatib Jum"at Ke Gampong			150.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengiriman Khatib Jum"at ke Kabupaten/Kota	Jumlah Khatib Jum"at yang Dikirim ke Kabupaten/Kota (Orang)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.04.0009	Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Meunasah/ Mushalla			48.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Meunasah/Mushalla	Jumlah Laporan Masjid/Meunasah/Mushalla yang Menyelenggarakan Ceramah Bulan Suci Ramadhan (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.04.0010	Penyelenggaraan Pengajian di Gampong			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Pengajian di Gampong	Jumlah Laporan Gampong yang Menyelenggarakan Ceramah (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.04.0011	Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan			415.000		11.860		35.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan	Jumlah Unit Sarana Peribadatan yang Didistribusikan dan Diawasi (Unit)	10		9		5		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.04.0012	Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama			295.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama	Jumlah Unit Rumah Ibadah dan Harta Agama yang Didata dan Diinvertarisir (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.04.0013	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama			330.000		-		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	Jumlah Sarana dan Prasarana Agama yang Ditingkatkan Pembangunannya (Unit)	10		0		3		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.05	Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam			7.799.491		46.630		1.083.000		123.390		595.259						718.649	32.22	66.36		718.649	23,2	9,21		
			Tersedianya Laporan Pengkajian Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Imeum Masjid/Meunasah yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam (Orang)	52		100		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Keluarga Islam yang Mengikuti Pembinaan (Keluarga)	50		0		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah yang Dibina (Pelaku Ekonomi)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat (Orang)	68		0		45		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla (Orang)	25		0		30		10		48						58		193,33		58		232			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Qari Qariah (Orang)	30		0		25		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Hafizh Hafizhah (Orang)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Beasiswa bagi Qari/Hafidz yang Diberikan (Beasiswa)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.05.0001	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman			573.000		21.840		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Jumlah Laporan Hasil Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.05.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.05.0003	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Masjid/Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam			200.000		24.790		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Masjid/ Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Imeum Masjid/Meunasah yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam (Orang)	52		100		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.05.0004	Pembinaan Keluarga Islami			380.000		-		40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbinanya Keluarga Islam	Jumlah Keluarga Islam yang Mengikuti Pembinaan (Keluarga)	50		0		20		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.05.0005	Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah			350.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbinanya Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah	Jumlah Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah yang Dibina (Pelaku Ekonomi)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.05.0006	Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat			475.000		-		75.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat (Orang)	68		0		45		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.05.0007	Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla			4.886.491		-		888.000		123.390		595.259						718.649	193,33	80,93		718.649	232	14,71		
			Terlaksananya Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla (Orang)	25		0		30		10		48						58		193,33		58		232			
		9.01.02.7.05.0008	Pembinaan Qari Qariah			314.000		-		50.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Pembinaan Qari Qariah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Qari Qariah (Orang)	30		0		25		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.05.0009	Pembinaan Hafizh Hafizhah			221.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Hafizh Hafizhah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Hafizh Hafizhah (Orang)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.05.0010	Pemberian Beasiswa bagi Qari/Hafidz			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Beasiswa bagi Qari/Hafidz	Jumlah Beasiswa bagi Qari/Hafidz yang Diberikan (Beasiswa)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.06	Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam			4.878.347		450.570		591.938		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan Regulasi Syariat Islam (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peradilan Islam (Orang)	55		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Korban Konflik dan Masyarakat Miskin yang Mengajukan Isbat Nikah (Orang)	30		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Workshop dan FGD Perkara Syariah (Orang)	55		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Regulasi Syariat Islam yang Disusun (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam (Laporan)	6		6		6		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Penyelenggaraan Rukyatul Hilal (Orang)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Ibadah Haji Daerah (Orang)	400		0		350		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.06.0001	Penyuluhan Regulasi Syariat Islam			140.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan Regulasi Syariat Islam (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.06.0002	Bimbingan Teknis Peradilan Islam			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Peradilan Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peradilan Islam (Orang)	55		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.06.0003	Isbat Nikah bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin			100.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Isbat Nikah bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin	Jumlah Korban Konflik dan Masyarakat Miskin yang Mengajukan Isbat Nikah (Orang)	30		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.06.0004	Workshop dan FGD Perkara Syariah			250.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Workshop dan FGD Perkara Syariah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Workshop dan FGD Perkara Syariah (Orang)	55		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.06.0005	Penyusunan Regulasi Syariat Islam			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Regulasi Syariat Islam	Jumlah Regulasi Syariat Islam yang Disusun (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.06.0006	Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam			257.500				57.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.06.0007	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam			1.635.410		188.116		240.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam (Laporan)	6		6		6		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.06.0008	Penyelenggaraan Rukyatul Hilal			80.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rukyatul Hilal	Jumlah Peserta yang Mengikuti Penyelenggaraan Rukyatul Hilal (Orang)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.06.0009	Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah			2.015.438		262.454		294.438		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Ibadah Haji Daerah (Orang)	400		0		350		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.07	Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah			2.094.250		44.800		80.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselengaranya Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman (Lembaga)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Agung Daerah (Orang)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengajian Rutin Keislaman Masjid Agung Daerah (Orang)	200		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Tutor yang Mengikuti Pelatihan Pendidikan Al-quran di Masjid Agung Daerah (Orang)	40		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala (Unit)	7		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.07.0001	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Agung Daerah			480.000		44.800		80.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbinanya Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Agung Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman (Lembaga)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.07.0002	Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Agung Daerah			220.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Agung Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Agung Daerah (Orang)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.07.0003	Pengajian Rutin Keislaman Masjid Agung Daerah			380.000						-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengajian Rutin Keislaman Masjid Agung Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengajian Rutin Keislaman Masjid Agung Daerah (Orang)	200		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.07.0004	Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Agung Daerah			200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Agung Daerah	Jumlah Tutor yang Mengikuti Pelatihan Pendidikan Al-quran di Masjid Agung Daerah (Orang)	40		0		0		0		0						0		0		0		0			
		9.01.02.7.07.0005	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah			814.250		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala (Unit)	7		0		0		0		0						0		0		0		0			
			JUMLAH		**4,018,156,453**		**728,174,808**		**816,489,376**		**150,724,545**		**175.162.147**						**325,886,692**				**325,886,692**					
			Rata-rata capaian kinerja (%)																		**44,51**	**39,91**			**20,57**	**8,11**		**SUB KEGIATAN**
			Predikat kinerja																		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
			Rata-rata capaian kinerja (%)																		**25,3**				**23,05**			**PROGRAM**
			Predikat kinerja																		**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

Lampiran II

INSPEKTORAT KOTA LHOKSEUMAWE

CATATAN HASIL REVIU

TERHADAP

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA (P-RKPK) LHOKSEUMAWE

PADA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : 700.1.2.8/CHR-ILw/2026

TANGGAL : 26 AGUSTUS 2026

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
INSPEKTORAT
alan Nyak Adam Kamil No. 4 Kota Lhokseumawe, Kode Pos:24311
Laman: https://inspektorat.lhokseumawekota.go.id
Pos-el: inspektorat@lhokseumawekota.go.id

CATATAN HASIL REVIU
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA (RKPK)
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026

Pemerintah Kota Lhokseumawe

Inspektorat Kota Lhokseumawe

Disusun Oleh : Warnita, S.Sos
Tanggal/Paraf : /
Direviu Oleh : Syahril , S.Pt, MSM
Tanggal/Paraf : /

Sehubungan dengan penugasan Tim Inspektorat Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Lhokseumawe Nomor: 800/ 121.A / IL /2026 tanggal 19 Agustus 2026 untuk melaksanakan Reviu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026 sesuai pedoman reviu yang berlaku. Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026 yang disusun berpedoman pada Perubahan Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029. Tata cara penyusunan Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Dokumen Keuangan Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah dan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan terkait serta lainnya. Maka dari itu, dengan ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu (CHR) berupa kesimpulan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

A. Pengujian Kesesuaian Program dan Indikator Pada RPJMK dengan Perubahan RKPK

Berdasarkan Pengujian penelaahan dokumen terkait Kesesuaian Program RPJMK tahun 2025 - 2029 dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Tahun Anggaran 2026 terdapat beberapa ketidaksesuaian data antara indikator program, satuan dan target indikator program pada Rancangan Akhir Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 dengan indikator program, satuan dan target indikator program pada RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025 – 2029, adapun data terlampir pada lampiran I

B. Pengujian atas Kesesuaian Informasi Pada Rancangan Akhir Perubahan RKPK dengan Program Prioritas Nasional

a. Berdasarkan Pengujian penelaahan dokumen terkait Kesesuaian penetapan target Indikator Makro Pembangunan pada rancangan akhir Perubahan RKPK terdapat penurunan target pada indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dari Target RKPK Kota 2026 sebesar 4,53-4,80 menjadi 3,43-3,80 Pada Target P-RKPD Kota 2026

C. Pengujian terhadap Kesesuaian dan ketetapan dukungan pelaksanaan Program Strategis Nasional pada Perubahan RKPK

1) Berdasarkan pengujian terhadap kesesuaian dan ketetapan dukungan pelaksanaan Program Strategis Nasional Pengentasan Kemiskinan arahan pusat terdapat beberapa sub kegiatan, belum dicantumkan pada Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026, adapun data terlampir pada lampiran II
2) Berdasarkan pengujian terhadap kesesuaian dan ketetapan dukungan pelaksanaan Program Strategis Nasional Ketahanan Pangan arahan pusat terdapat beberapa sub kegiatan, belum dicantumkan pada Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026, adapun data terlampir pada lampiran III
3) Berdasarkan pengujian terhadap kesesuaian dan ketetapan dukungan pelaksanaan Program Strategis Nasional Kesehatan Untuk Semua arahan pusat terdapat beberapa sub kegiatan, belum dicantumkan pada Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026, adapun data terlampir pada lampiran IV

4) Berdasarkan pengujian terhadap Kesesuaian dan ketetapan dukungan pelaksanaan Program Strategis Nasional Perluasan Akses Pendidikan arahan pusat terdapat beberapa sub kegiatan, belum dicantumkan pada Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026, adapun data terlampir pada lampiran V

5) Berdasarkan pengujian terhadap kesesuaian dan ketetapan dukungan pelaksanaan Program Strategis Nasional Pertumbuhan Ekonomi arahan pusat terdapat beberapa sub kegiatan, belum dicantumkan pada Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026, adapun data terlampir pada lampiran VI

D. Pengujian Terhadap Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tersedia Pada Rancangan Akhir Perubahan RKPK

1) Berdasarkan Pengujian penelaahan dokumen terkait Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Standar Pelayanan minimal (SPM) bidang Pendidikan terdapat beberapa sub kegiatan arahan pusat yang belum dicantumkan pada dokumen Perubahan RKPK, adapun data terlampir pada lampiran VII

2) Berdasarkan Pengujian penelaahan dokumen terkait Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Standar Pelayanan minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum terdapat beberapa sub kegiatan arahan pusat yang belum dicantumkan pada dokumen Perubahan RKPK, adapun data terlampir pada lampiran VIII

3) Berdasarkan Pengujian penelaahan dokumen terkait Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Standar Pelayanan minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat terdapat beberapa sub kegiatan arahan pusat yang belum dicantumkan pada dokumen Perubahan RKPK, adapun data terlampir pada lampiran IX

4) Berdasarkan Pengujian penelaahan dokumen terkait Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Standar Pelayanan minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat terdapat beberapa sub kegiatan arahan pusat yang belum dicantumkan pada dokujmen Perubahan RKPK, adapun data terlampir pada lampiran X

5) Berdasarkan Pengujian penelaahan dokumen terkait Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Standar Pelayanan minimal (SPM) Bidang Sosial terdapat

beberapa sub kegiatan arahan pusat yang belum dicantumkan pada dokumen Perubahan RKPK, adapun data terlampir pada lampiran XI

E. Pengujian Pemenuhan Mandatory Spending pada Rancangan Akhir Perubahan RKPK

Berdasarkan Pengujian atas Pemenuhan Mandatory Spending pada Rancangan Akhir Perubahan RKPK terdapat Anggaran Belanja *Mandatory Spending* belum sesuai dengan besaran yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu pada belanja Pegawai dan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, adapun data terlampir pada lampiran XII.

Kesimpulan

Tim Reviu Inspektorat Kota Lhokseumawe berkesimpulan bahwa proses dan hasil penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Tahun Anggaran 2026 pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, khususnya terhadap kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan, target, indikator, serta penganggaran dalam dokumen Perubahan RKPK. Hal-hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) agar ditindaklanjuti oleh pihak penyusun sebelum dokumen ditetapkan.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kota Lhokseumawe

Reza Mahnur, S.STP, M. Kesos
Nip19850516 200312 1 001

Lhokseumawe, 26 Agustus 2026

Pengendali Teknis,

Syahril , S.Pt, MSM
NIP19770805 200504 1 001

Lampiran III

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JL. H. RAMLI RIDWAN NO. 2 TELP. (0645) 630835 FAXIMILE (0645) 630253
Website : www.bappeda.lhokseumawekota.go.id
LHOKSEUMAWE - 24351

Lhokseumawe, 26 Agustus 2026

Nomor : 000.7/1127
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Atas Catatan Hasil Reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026

Yth. Inspektur Kota Lhokseumawe
di-
Tempat

Sehubungan dengan Catatan Hasil Reviu Inspektorat Kota Lhokseumawe tanggal 26 Agustus 2026 terhadap Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 yang Bappeda terima pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026, Kami dari Tim Penyusun Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 menjelaskan sebagai berikut:

A. Pengujian Kesesuaian Program dan Indikator Pada RPJMK dengan Perubahan RKPK

Jawaban : Target dan Satuan Indikator Program telah diselaraskan dengan Target dan Satuan Indikator pada RPJMK Lhokseumawe 2025-2029.

B. Pengujian atas Kesesuaian Informasi Pada Rancangan Akhir Perubahan RKPK dengan Program Prioritas Nasional

Jawaban : terdapat penurunan target pada indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dari Target RKPK Kota 2026 sebesar 4,53-4,80 menjadi 3,43-3,80 Pada Target P-RKPD Kota 2026 dikarenakan penyesuaian capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 sebesar 3.39%, tumbuh melambat karena dampak dari bencana hidrometrologi yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan sehingga mobilitas barang dan orang terhambat, perdagangan lesu dan daya beli masyarakat melemah. Selain itu investasi dan belanja pemerintah melambat tercermin dari sektor kontruksi tumbuh terbatas, ditambah realisasi belanja modal

APBK menurun akibat efisiensi anggaran dan transisi pemerintahan baru di awal 2025.

C. **Pegujian terhadap Kesesuaian dan ketetapan dukungan pelaksanaan Program Strategis Nasional pada Perubahan RKPK**

Jawaban : Karena keterbatasan fiskal Perangkat Daerah tidak memungkinkan untuk mengakomodir semua sub kegiatan penandaan program strategis nasional, namun sebagian sub kegiatan yang mendukung ProSN sudah disajikan pada Perubahan RKPK.

D. **Pengujian Terhadap Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tersedia Pada Rancangan Akhir Perubahan RKPK**

Jawaban : Karena keterbatasan fiskal Perangkat Daerah tidak memungkinkan untuk mengakomodir semua sub kegiatan penandaan SPM.

- Untuk Bidang Pendidikan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan telah diakomodir pada program Reviltalisasi Sekolah oleh Pemerintah Pusat.
- SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk jaringan perpipaan sementara waktu tidak dapat dilakukan, memngingat Kota Lhokseumawe belum memiliki Sumber Air Baku, dan pemenuhan Air Minum perpipaan saat ini dilakukan dengan sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yaitu Sumur Bor perpipaan.

E. **Pengujian Pemenuhan Mandatory Spending pada Rancangan Akhir Perubahan RKPK**

Jawaban : Pemenuhan Mandatory Spending untuk Belanja Infrastruktur belum terpenuhi 40%, akibat terbatasnya fiskal daerah dan beban belanja pegawai yang tinggi sehingga serapan anggaran tidak dapat memenuhi mandatory yang seharusnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Lhokseumawe

REZA MAHNUR, S.STP., M. Kesos
NIP. 19850516 200312 1 001

Lampiran IV

INSPEKTORAT KOTA LHOKSEUMAWE

LAPORAN HASIL REVIU

TERHADAP

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA (P-RKPK) LHOKSEUMAWE

PADA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : 700.1.2.8/ 117 /LHR-ILw/2026

TANGGAL : 26 AGUSTUS 2026

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
INSPEKTORAT
Jalan Nyak Adam Kamil No. 4 Kota Lhokseumawe, Kode Pos:24311
Laman: https://inspektorat.lhokseumawekota.go.id
Pos-el: inspektorat@lhokseumawekota.go.id

LAPORAN HASIL REVIU DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA (P-RKPK) LHOKSEUMAWE TAHUN 2026

NOMOR : 700.1.2.8/ 117 /LHR-ILw/2026

TANGGAL : 26 Agustus 2026

I. Ringkasan Eksekutif

1. Inspektorat Kota Lhokseumawe sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota (P-RKPK) Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026 berupa pengujian terbatas terhadap substansi yang termuat pada rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota

   Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi yang disajikan telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan, sehingga dapat menghasilkan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota yang berkualitas.

   Pelaksanaan kegiatan reviu dilakukan oleh tim reviu Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Lhokseumawe tahun 2026. Tim Reviu Perubahan RKPK telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji proses penyusunan atas penyajian dan substansi dalam dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota (P-RKPK) Tahun 2026. Pengujian dilaksanakan dengan menelaah dan menganalisis dengan dokumen pendukung lainnya, dan konfirmasi mengenai proses penyusunannya untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak

terdapat penjelasannya dalam penyajian dokumen Perubahan RKPK tersebut.

2. Berdasarkan hasil reviu pengujian dalam dokumen Perubahan RKPK Lhokseumawe tahun 2026 dapat disimpulkan sebagai berikut :

   1. Pengujian Kesesuaian Program dan Indikator Pada RPJMK dengan Perubahan RKPK
   2. Pengujian atas Kesesuaian Informasi Pada Rancangan Akhir Perubahan RKPK dengan Program Prioritas Nasional
   3. Pengujian terhadap Kesesuaian dan ketetapan dukungan pelaksanaan Program Strategis Nasional pada Perubahan RKPK
   4. Pengujian Terhadap Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tersedia Pada Rancangan Akhir Perubahan RKPK
   5. Pengujian Pemenuhan Mandatory Spending pada Rancangan Akhir Perubahan RKPK

II. Dasar Hukum

Dasar hukum terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan reviu dokumen P-RKPD tahun 2026, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); telah diubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara 311). Sebagai gantinya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan. Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
- Permendagri Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Dokumen Keuangan Daerah
- Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2026.
- Surat dari Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 000.7.2.4/964 tanggal 18 Agustus 2026
- Surat Perintah Tugas Inspektur Kota Lhokseumawe Nomor 800/ 121.A /IL/2026 tanggal 18 Agustus 2026.

III. Tujuan Reviu

Tujuan Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2026 yaitu untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota telah disusun berpedoman kepada RPJMK, Rencana Kerja Pemerintah, Program Strategis Nasional, pedoman penyusunan RKPK dan kaidah-kaidah perencanaan pembangunan lainnya.

IV. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup pelaksanaan Reviu Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 ini adalah pengujian terbatas atas kesesuaian dokumen Perubahan RKPK dengan dokumen RPJMK dan dokumen perencanaan terkait lainnya, Fokus reviu Perubahan RKPK ini adalah memastikan bahwa rumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026 telah berpedoman pada RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

V. Metodologi Reviu

Metodologi yang digunakan dalam reviu dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota adalah melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Penelaahan dokumen berupa laporan, data pendukung, kebijakan, peraturan, dan dokumen terkait lainnya.

2. Diskusi dengan pihak-pihak terkait dalam bentuk komunikasi baik langsung maupun tidak langsung terkait pembahasan atas data serta informasi yang disajikan.
3. Pengujian terbatas melalui penelusuran data, pencocokan dokumen pendukung, dan analisis atas informasi yang dilaporkan.
4. Konfirmasi dan tanggapan dengan pihak pemerintah sebelum finalisasi laporan reviu atas pelaporan untuk memperoleh klarifikasi, perbaikan, dan penyempurnaan informasi yang menjadi objek reviu.

Reviu dilaksanakan berdasarkan keputusan Inspektur Kota Lhokseumawe dengan susunan tim sebagai berikut:

No	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Husnul Fikar, SE	Inspektur Lhokseumawe	Penanggung Jawab
2	Muhammad Halim, ST, M.CIO	Inspektur Pembantu II	PPJ
3	Syahril , S.Pt, MSM	PPUPD Madya	Pengendali Teknis
4	Warnita, S.Sos	Auditor Muda	Ketua Tim
5	Athiya Imtina Putri, SE	Auditor Pertama	Anggota
6	Puji Rahayu, S.E	Auditor Pertama	Anggota

VI. Gambaran Umum

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan daerah dengan berpedoman kepada RKPK dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. RKPK merupakan penjabaran dari RPJMK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan mengacu kepada RKP.

Dokumen RKPK menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah atas dokumen RPJMK dan Renstra Perangkat Daerah kedalam rencana program dan kegiatan serta penganggaran tahunan. RKPK memjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis serta mengoperasionalkan rencana strategis kedalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana pembangunan jangka menengah.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menegaskan antara lain bahwa RPJMK dan RKPK digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Kemudian RKPK juga menjadi pedoman kepada kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

VII. Uraian Hasil Reviu

Berdasarkan hasil pengujian terbatas yang telah dilakukan dapat dinyatakan bahwa perumusan dokumen Rancangan Akhir P-RKPK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026 secara garis besar telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan. Akan tetapi masih terdapat beberapa kelemahan untuk segera dilakukan perbaikan. Dari hasil Catatan Hasil Reviu (CHR) dapat disimpulkan sebagian kelemahan dan permasalahan sudah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan baik atas kelengkapan dokumen pendukung yang harus memadai, maupun kesesuaian antar dokumen lainnya serta substansi penyusunan rancangan akhir Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026. Adapun beberapa kelemahan yang belum ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Program, Indikator, dan Target Perubahan RKPK Belum Sepenuhnya Selaras dengan RPJMK
2. Pemenuhan Mandatory Spending pada Rancangan Akhir Perubahan RKPK belum memadai

Komentar dari Tim Penyusun :

A. **Pengujian Kesesuaian Program dan Indikator Pada RPJMK dengan Perubahan RKPK**

Target dan Satuan Indikator Program telah diselaraskan dengan Target dan Satuan Indikator pada RPJMK Lhokseumawe 2025-2029.

B. **Pengujian atas Kesesuaian Informasi Pada Rancangan Akhir Perubahan RKPK dengan Program Prioritas Nasional**

Terdapat penurunan target pada indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dari Target RKPK Kota 2026 sebesar 4,53-4,80 menjadi 3,43-3,80 Pada Target PRKPD Kota 2026 dikarenakan penyesuaian capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 sebesar 3.39%, tumbuh melambat karena dampak dari bencana hidrometrologi yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan sehingga mobilitas barang dan orang terhambat, perdagangan lesu dan daya beli masyarakat melemah. Selain itu investasi dan belanja pemerintah melambat tercermin dari sektor kontruksi tumbuh terbatas, ditambah realisasi belanja modal APBK menurun akibat efisiensi anggaran dan transisi pemerintahan baru di awal 2025.

C. **Pegujian terhadap Kesesuaian dan ketetapan dukungan pelaksanaan Program Strategis Nasional pada Perubahan RKPK**

Karena keterbatasan fiskal Perangkat Daerah tidak memungkinkan untuk mengakomodir semua sub kegiatan penandaan program strategis nasional, namun sebagian sub kegiatan yang mendukung ProSN sudah disajikan pada Perubahan RKPK.

D. **Pengujian Terhadap Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tersedia Pada Rancangan Akhir Perubahan RKPK**

Karena keterbatasan fiskal Perangkat Daerah tidak memungkinkan untuk mengakomodir semua sub kegiatan penandaan SPM.

- Untuk Bidang Pendidikan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan telah diakomodir pada program Reviltalisasi Sekolah oleh Pemerintah Pusat.

- SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk jaringan perpipaan sementara waktu tidak dapat dilakukan, memngingat Kota Lhokseumawe belum memiliki Sumber Air Baku, dan pemenuhan Air Minum perpipaan saat ini dilakukan dengan sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yaitu Sumur Bor perpipaan.

E. Pengujian Pemenuhan Mandatory Spending pada Rancangan Akhir Perubahan RKPK

Pemenuhan Mandatory Spending untuk Belanja Infrastruktur belum terpenuhi 40%, akibat terbatasnya fiskal daerah dan beban belanja pegawai yang tinggi sehingga serapan anggaran tidak dapat memenuhi mandatory yang seharusnya.

REKOMENDASI :

Kepada Tim Penyusun Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026 disarankan Agar:

1. Memastikan kesesuaian seluruh target dan indikator dalam dokumen Perubahan RKPK dengan target dan indikator dalam dokumen RPJMK.
2. Menyesuaikan anggaran belanja sesuai dengan ketentuan dan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah.

APRESIASI

Inspektorat Kota Lhokseumawe mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak, sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh kegiatan Reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026.

Lhokseumawe, 26 Agustus 2026

Inspektur Kota Lhokseumawe,

Husnul Fikar, SE

NIP. 19770201 200803 1 001

Lampiran V

PEMERINTAH ACEH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureu-eh No. 26 Telp. (0651) 21440 (hunting), Fax. 33654 email:bappeda@acehprov.go.id
BANDA ACEH-23121

Banda Aceh, 31 Agustus 2026
18 Rabiul Awal 1448

Nomor : 000.7/345
Sifat : Segera
Lampiran : satu berkas
H a l : Hasil Fasilitasi Rancangan Perkada tentang Perubahan Kota Lhokseumawe Tahun 2026

Yth. Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe

di -
Lhokseumawe

1. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh telah melakukan Rapat Fasilitasi Perubahan Rancangan Perkada terhadap RKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2026 bertempat di Ruang Rapat Bappeda Aceh dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Lhokseumawe terkait.
2. Berdasarkan hasil pembahasan dimaksud, maka diharapkan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe agar segera menindaklanjuti sebagai berikut:
   a. Melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2026 dengan memperhatikan saran hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini;
   b. Menetapkan Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD Perubahan Kota Lhokseumawe menjadi Peraturan Walikota Lhokseumawe paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (P-RKPA) Tahun 2026; dan
   c. Menyampaikan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2026 kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Bappeda Aceh paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan dengan melampirkan matrik tindaklanjut penyempurnaan hasil fasilitasi dan mengunggah pada modul e-fasilitasi SIPD dan link https://bit.ly/tinjuthasil_fasperubRKPD2026.
3. Demikian disampaikan dan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH ACEH,

Dr. Ir. ZULKIFLI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197111181997031006

Tembusan:
1. Gubernur Aceh;
2. Plt. Sekretaris Daerah Aceh; dan
3. Walikota Lhokseumawe.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN SURAT KEPALA BAPPEDA ACEH
NOMOR : 000.7/345
TANGGAL : 31 Agustus 2026

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2026 dapat dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara lengkap yang terdiri dari:

a. Surat Walikota Lhokseumawe Nomor 000.7/995 tanggal 26 Agustus 2026 perihal permohonan Fasilitasi Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026;
b. Rancangan Perubahan RKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2026;
c. Hasil Reviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP*)* Nomor 700.1.2.8/117/LHR-ILw/2026 tanggal 26 Agustus 2026;
d. Hasil evaluasi pelaksanaan pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I Tahun 2026;
e. Daftar isian fasilitasi perubahan RKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2026.

II. HASIL FASILITASI

Beberapa hal yang perlu disempurnakan di dalam Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2026, antara lain:

1. Penyajian Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2026 **perlu disesuaikan** dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
2. Catatan penyempurnaan terhadap sistematika dan substansi Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2026 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Catatan Penyempurnaan
Perubahan Rancangan RKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2026

No	Bab/Subbab	Catatan Penyempurnaan
UMUM		
1	Daftar Akronim	Agar menyajikan daftar akronim guna memberikan penjelasan mengenai singkatan atau istilah yang digunakan dalam dokumen. Agar dilengkapi dengan Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran
BAB I. PENDAHULUAN		
1.	Latar Belakang	1. Alasan utama yang menjadi dasar perubahan APBK : poin 2, 3, 4, 5 tidak perlu disebutkan dasar hukum. Cukup disebutkan substansi dari peraturan dimaksud. Dasar hukum tersebut agar disajikan saja pada subbab 1.2 Dasar Hukum Penyusunan; 2. Penanggulangan bencana hidrometeologi agar disajikan pada latar belakang dan disebutkan sebagai salah satu penyebab yang melatarbelakangi perubahan RKPD Tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Bab/Subbab	Catatan Penyempurnaan
2.	Tahapan Penyusunan RKPD	Agar ditambahkan subbab yang menyajikan tentang tahapan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 (kegiatan-kegiatan yang disertai dengan tanggal pelaksanaannya).
3.	Dasar Hukum	1. Agar penulisan/pencantuman seluruh peraturan perundangan disertai dengan nomor dan tahun lembar negara/lembar daerah serta nomor dan tahun tambahan berita negara/daerah; 2. Penempatan urutan penyajian peraturan perundangan disesuaikan dengan hirarki tingkat pemerintahan, lembaga, tahun dan nomor penetapannya; 3. Agar penulisan/ pencantuman seluruh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri dilengkapi dengan “Republik Indonesia”; 4. Agar peraturan perundangan yang tidak berkaitan dengan penyusunan RKPD dihapus saja, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 (poin 11); 5. Agar ditambahkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185); 6. Agar ditambahkan : a. Peraturan/Keputusan Menteri yang terkait dengan perubahan dana Tranfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026, ataupun peraturan lainnya terkait yang mempengaruhi perubahan terhadap jumlah pendapatan dan belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2026; b. Agar ditambahkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2025-209 Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 10); c. Agar ditambahkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2025 Nomor 27); d. Agar ditambahkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.3.3/1416/2025 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometerologi di Aceh Tahun 2025.
4.	Hubungan antar dokumen	1. Subbab 1.3 Hubungan Antar dokumen, agar dilengkapi penjelasan yang lebih spesifik menyangkut visi, Misi dan arah kebijakan, karena penyajiannya masih bersifat normatif. Oleh karena itu perlu ditambahkan penjelasan mengenai hubungan antara permasalahan, isu strategis, visi, misi, dan arah kebijakan secara lebih detil yang tersedia dalam RPJMD Kota Lhokseumawe 2025-2029 dengan Perubahan RKPD Kota Lhokseumawe 2026; 2. Gambar 1.5 : agar ditambahkan P-RKPD 2026.
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD		
1.	Hasil Evaluasi RKPD 2026	1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD : Masih menyajikan data Triwulan I. Agar seluruh data yang disajikan tersebut, baik yang berupa tabel ataupun narasi penjelasannya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Bab/Subbab	Catatan Penyempurnaan
		agar diperbaharui sampai dengan Triwulan II. Adapun data terutama capian indikator yang belum tersedia sd Triwulan II, dapat disajikan kondisi Triwulan I namun dengan memberikan catatan/keterangan (atau dapat juga disajikan data perkiraan); 2. Tabel Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPK 2026, agar dipindah menjadi bagian dari Lampiran; 3. Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 : Data isian pada kolom 6 (persentase capaian realisasi terhadap target RKPK) agar kolom 5 dibagi dengan kolam 3, bukan terhadap kolom 4; 4. Seluruh data yang masih kosong agar dilengkapi kembali.
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH		
1.	Arah Kebijakan Ekonomi	1. Subbab 3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Lhoseumawe : Agar penyajian data makro Kota Lhokseumawe agar diupdate sampai dengan kondisi Triwulan II (sesuai dengan ketersediaan data). Hal ini sebagai dasar bagi penentuan target perubahan 2026; 2. Tabel 3.1 Agar 3.1 ditambahkan kolom capaian Triwulan II 2026.
2.	Arah Kebijakan Keuangan	1. Tabel 3.2 : Narasi penjelasan terhadap Tabel 3.2 agar disesuaikan kembali karena terdapat alenia menjelaskan realisasi Triwulan I, sedangkan data pada tabel tersebut tidak mendukung penjelasan tersebut; 2. Tabel 3.3 : agar kolom 8 (realisasi sd TW I-2026), agar dihapus saja sehingga tidak mengulangi data yang telah disajikan pada bab evaluasi RKPK dan disesuaikan dengan format penyajian Tabel 3.2; 3. Tabel 3.5 : agar kolom 8 (realisasi sd TW I-2026), agar dihapus saja sehingga tidak mengulangi data yang telah disajikan pada bab evaluasi RKPK dan disesuaikan dengan format penyajian Tabel 3.2; 4. Subbab 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Kota Lhokseumawe : Agar ditambah 1 (satu) buah tabel yang menyajikan data pembiayaan daerah sesuai dengan format penyajian Tabel 3.2; 5. Tabel 3.7. Kewajiban Belanja Kota Lhokseumawe, agar dipindahkan pada Bab V dalam rangka mendukung penjelasan terhadap data yang disajikan pada Tabel 5.1. Disamping itu judul Tabel 3.7 disempurnakan menjadi “Kewajiban Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2026”; 6. Tabel 3.11 Pembangunan Rumah Layak Huni Islamic Relief dan Baitul Mal Kota Lhokseumawe Tahun 2026, agar dipindahkan pada Bab V dalam rangka mendukung penjelasan terhadap data yang disajikan pada Tabel 5.1
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		
1.	Tujuan, Sasaran dan Pembangunan	1. Hal IV-1 : masih terdapat narasi yang menyebutkan “Triwulan I, agar isesuaikan kembali menjadi “Triwulan II”; 2. Gambar 4.3, agar diperbaiki dan disesuaikan kembali dengan tema pembangunan yang tersedia dalam dokumen RPJM Kota Lhokseumawe 2025-2029 (karena belum tersaji tema pembangunan Tahun 2025); 3. Tabel 4.1 : Agar kolom target 2027 dihapus, cukup disajikan kolom target 2026 saja. Kolom 2027 agar diganti dengan kolom keterangan yang menjelaskan status perubahan target indikator (“naik”, “turun”, atau “tetap”).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Bab/Subbab	Catatan Penyempurnaan
2.	Prioritas Pembangunan	1. Tabel 4.3 dan Tabel 4.6 : Agar kolom capaian 2025 agar dihapus saja karena sudah tersedia pada tabel sebelumnya, cukup dilakukan perbandingan terhadap target 2026 saja; 2. Tabel 4.8 : Belum terdapat narasi yang menjelaskan terhadap beberapa program yang mengalami perubahan pagu anggaran yang cukup signifikan pada beberapa SKPK. Agar disajikan alasan ataupun penyebab yang melandasi perubahan tersebut, seperti program pembangunan, diantaranya program dengan kode 2.17.07, 3.30.06, 3.31.02, 3.27.03, 2.07.04, 1.03.03, 1.03.06, 1.03.02 dan seterusnya. Disamping itu juga perlu dikaitkan perubahan anggaran program tersebut dengan perubahan target terhadap indikator kinerja.
3.	Pokok Pikiran DPRK	Agar disajikan usulan/perubahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRK Tahun 2026 yang disinkronkan dengan prioritas daerah, karena belum tersedia dalam dokumen RKPK.
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH		
1.	Rencana Kerja dan Pendanaan	1. Tabel 5.1 : Agar penyajian data pada kolom “Bertambah/Berkurang (Rp)” disajikan secara lebih jelas dengan menyajikan tanda “dalam kurung ( )” atau “minus (-)” bagi pagu yang berkurang. Disamping itu juga agar disajikan nomor terhadap masing-masing kolom tabel; 2. Tabel 5.1 : Agar dicek kembali terhadap data rekapitulasi pagu pada kolom P-RKPK 2026 yang disajikan serta disinkronkan dengan data pagu pada Tabel 5.4 (kolom 12); 3. Agar disajikan narasi penyebab terhadap kenaikan atau penurunan pagu anggaran yang signifikan terhadap beberapa SKPK yang dikaitkan dengan perubahan kebijakan anggaran Tahun 2026, sejalan dengan data yang telah disajikan pada Tabel 4.8; 4. Tabel 5.2 : Terdapat banyak perubahan pagu kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung SPM, agar ditambahkan narasi yang menjelaskan terhadap hal yang menyebabkan hal tersebut; 5. Bab V : Agar ditambahkan tabel yang menyajikan data realisasi dan penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana Tahun 2026 dari berbagai sumber dikaitkan dengan Rencana Induk Penanggulangan Bencana yang telah disusun; 6. Tabel 5.4 : Agar dilengkapi kembali data terhadap kolom yang masih kosong.
BAB VI. PENUTUP		
1	Tidak ada catatan	-

III. HAL-HAL LAINNYA YANG MENJADI PERHATIAN

Berdasarkan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2026, maka disampaikan hal-hal lainnya yang menjadi perhatian, antara lain:

1. Pemerintah Kota Lhokseumawe agar memperhatikan, mempertimbangkan, dan mengakomodasi saran/masukan sebagaimana tabel di atas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berkenaan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam melakukan penataan kegiatan pada Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2026 dengan memperhatikan kewenangan sesuai tingkatan pemerintahan untuk masing-masing urusan dan kesesuaian keluaran (*output*) yang akan dihasilkan oleh suatu kegiatan guna mendukung pencapaian hasil (*outcome*);
3. Pemerintah Kota Lhokseumawe agar secara resmi menyampaikan hasil tindak lanjut hasil fasilitasi kepada Kepala Bappeda Aceh dengan mengunggah pada modul e-fasilitasi SIPD dan link https://bit.ly/tinjuthasil_fasperubRKPD2026;
4. Dalam rangka meningkatkan nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah di masa yang akan datang, maka penyempurnaan Perubahan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2026 perlu memperhatikan memperhatikan beberapa aspek terhadap penyajian materi, yaitu : (1) proses penyusunan dokumen; (2) sinergi dan keselarasan; (3) konsistensi; (4) kelengkapan dan kedalaman; dan (5) program unggulan daerah.

Demikian hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2026, untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH ACEH,

Dr. Ir. ZULKIFLI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197111181997031006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran VI

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JL. H. RAMLI RIDWAN NO. 2 TELP. (0645) 630835 FAXIMILE (0645) 630253
Website : www.bappeda.lhokseumawekota.go.id
LHOKSEUMAWE - 24351

Lhokseumawe, 1 September 2026

Nomor : 000.7/1155.1
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tindak Lanjut Hasil Fasilitasi Rancangan Perkada tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2026

Yth. Kepala Bappeda Aceh

di-
Tempat

Menindaklanjuti Fasilitasi Rancangan Perkada tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2026 dan hasilnya telah disampaikan kepada kami melalui Surat Nomor 000.7/345 tanggal 31 Agustus 2026, dengan ini kami sampaikan Tindak Lanjut Hasil Fasilitasi Rancangan Perkada tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

REZA MAHNUR, S.STP, M.Kesos
Pembina Tk. I / Nip.19850516 200312 1 001

Lampiran Surat Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe
Nomor : 000.7/1155.1
Tanggal : 1 September 2026
Hal : Tindak Lanjut Hasil Fasilitasi Perubahan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2026

No	Narasi Masukan Perbaikan	Tindak Lanjut		Halaman	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	2	3	4	5	6
I	KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI				
	Fasilitasi terhadap Perubahan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2026 dapat dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara lengkap yang terdiri dari: a. Surat Wali Kota Lhokseumawe perihal permohonan fasilitasi perubahan RKPD Tahun 2026; b. Rancangan Perubahan RKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2026; c. Hasil Reviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP); d. Hasil evaluasi pelaksanaan pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I Tahun 2026; e. Daftar isian fasilitasi perubahan RKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2026.				
II	HASIL FASILITASI				
	1 Penyajian Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2026 perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;				
	2 Catatan penyempurnaan terhadap sistematika dan substansi Perubahan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2026 terlihat pada tabel berikut:				
	UMUM				
	1 Daftar Akronim				
	1 Agar menyajikan daftar akronim guna memberikan penjelasan mengenai singkatan atau istilah yang digunakan dalam dokumen.	√		Daftar Akronim - vii	Menambahkan Daftar Akronim
	2 Agar dilengkapi dengan Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran	√		Daftar Lampiran - xv	Menambahkan Daftar Lampiran
	BAB I PENDAHULUAN				
	1 Latar Belakang				
	1 Alasan utama yang menjadi dasar perubahan APBK : poin 2, 3,4,5 tidak perlu disebutkan dasar hukum. Cukup disebutkan substansi dari peraturan dimaksud. Dasar hukum tersebut agar disajikan saja pada subbab 1.2 Dasar Hukum Penyusunan;	√		Halaman I-3 dan I-7	Telah disempurnakan
	2 Penanggulangan bencana hidrometeologi agar disajikan pada latar belakang dan disebutkan sebagai salah satu penyebab yang melatarbelakangi perubahan RKPD Tahun 2026.	√		Halaman I-3 Point 2	Telah disempurnakan
	2 Tahapan Penyusunan RKPD				

No	Narasi Masukan Perbaikan	Tindak Lanjut		Halaman	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	2	3	4	5	6
	Agar ditambahkan subbab yang menyajikan tentang tahapan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 (kegiatan-kegiatan yang disertai dengan tanggal pelaksanaannya).	√		Halaman I-4	Telah ditambahkan
	3 Dasar Hukum				
	1 Agar penulisan/pencantuman seluruh peraturan perundangan disertai dengan nomor dan tahun lembar negara/lembar daerah serta nomor dan tahun tambahan berita negara/ daerah;	√		Halaman I-6 s.d I-8	Telah disempurnakan
	2 Penempatan urutan penyajian peraturan perundangan disesuaikan dengan hirarki tingkat pemerintahan, lembaga, tahun dan nomor penetapannya;	√		Halaman I-6 s.d I-8	Telah disempurnakan
	3 Agar penulisan/ pencantuman seluruh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri dilengkapi dengan “Republik Indonesia”;	√		Halaman I-6 s.d I-8	Telah disempurnakan
	4 Agar peraturan perundangan yang tidak berkaitan dengan penyusunan RKPD dihapus saja, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 (poin 11);	√		Halaman I-7	Telah dihapus
	5 Agar ditambahkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185);	√		Halaman I-7	Telah ditambah
	6 Agar ditambahkan :				
	a Peraturan/Keputusan Menteri yang terkait dengan perubahan dana Tranfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026, ataupun peraturan lainnya terkait yang mempengaruhi perubahan terhadap jumlah pendapatan dan belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2026;	√		Halaman I-7	Telah ditambah
	b Agar ditambahkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2025-2029 Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 10);	√		Halaman I-8	Telah ditambah
	c Agar ditambahkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2025 Nomor 27);	√		Halaman I-8	Telah ditambah

No	Narasi Masukan Perbaikan	Tindak Lanjut		Halaman	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	2	3	4	5	6
	d Agar ditambahkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.3.3/1416/2025 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometerologi di Aceh Tahun 2025.	√		Halaman I-8	Telah ditambah
	4 Hubungan antar dokumen				
	1 Subbab 1.3 Hubungan Antar dokumen, agar dilengkapi penjelasan yang lebih spesifik menyangkut visi, Misi dan arah kebijakan, karena penyajiannya masih bersifat normatif. Oleh karena itu perlu ditambahkan penjelasan mengenai hubungan antara permasalahan, isu strategis, visi, misi, dan arah kebijakan secara lebih detil yang tersedia dalam RPJMD Kota Lhokseumawe 2025-2029 dengan Perubahan RKPD Kota Lhokseumawe 2026;	√		Halaman I-10 s.d I-13	Telah disempurnakan
	2 Gambar 1.5 : agar ditambahkan P-RKPD 2026.	√		Halaman I-11	Telah disempurnakan
	BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD				
	1 Hasil Evaluasi RKPD				
	1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD : Masih menyajikan data Triwulan I. Agar seluruh data yang disajikan tersebut, baik yang berupa tabel ataupun narasi penjelasannya agar diperbaharui sampai dengan Triwulan II. Adapun data terutama capian indikator yang belum tersedia sd Triwulan II, dapat disajikan kondisi Triwulan I namun dengan memberikan catatan/ keterangan (atau dapat juga disajikan data perkiraan);	√		Halaman II-1 s.d II-76	Telah disempurnakan
	2 Tabel Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPK 2026, agar dipindah menjadi bagian dari Lampiran;	√		Lampiran	Telah dipindahkan dan disajikan pada bagian Lampiran sesuai dengan hasil Fasilitasi
	3 Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 : Data isian pada kolom 6 (persentase capaian realisasi terhadap target RKPK) agar kolom 5 dibagi dengan kolam 3, bukan terhadap kolom 4;	√		Tabel 2.1 Halaman II-2 Tabel 2.2 Halaman II-5 s.d II-6	Telah disempurnakan
	4 Seluruh data yang masih kosong agar dilengkapi kembali.	√		Halaman II-1 s.d II-58	Telah disempurnakan
	BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH				
	1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI				

No	Narasi Masukan Perbaikan	Tindak Lanjut		Halaman	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	2	3	4	5	6
	1 Subbab 3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Lhoseumawe : Agar penyajian data makro Kota Lhokseumawe agar diupdate sampai dengan kondisi Triwulan II (sesuai dengan ketersediaan data). Hal ini sebagai dasar bagi penentuan target perubahan 2026;	√		Halaman III-19	Sudah ditindaklanjuti, namun capaian data makro Kota Lhokseumawe sampai dengan triwulan II 2026 belum tersedia.
	2 Tabel 3.1 Agar 3.1 ditambahkan kolom capaian Triwulan II 2026.	√		Halaman III-38	
	2 Arah Kebijakan Keuangan				
	1 Tabel 3.2 : Narasi penjelasan terhadap Tabel 3.2 agar disesuaikan kembali karena terdapat alenia menjelaskan realisasi Triwulan I, sedangkan data pada tabel tersebut tidak mendukung penjelasan tersebut;	√		Halaman III-42 s.d III-43	
	2 Tabel 3.3 : agar kolom 8 (realisasi sd TW I-2026), agar dihapus saja sehingga tidak mengulangi data yang telah disajikan pada bab evaluasi RKPK dan disesuaikan dengan format penyajian Tabel 3.2;	√		Halaman III-45	
	3 Tabel 3.5 : agar kolom 8 (realisasi sd TW I-2026), agar dihapus saja sehingga tidak mengulangi data yang telah disajikan pada bab evaluasi RKPK dan disesuaikan dengan format penyajian Tabel 3.2;	√		Halaman III-56	
	4 Subbab 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Kota Lhokseumawe : Agar ditambah 1 (satu) buah tabel yang menyajikan data pembiayaan daerah sesuai dengan format penyajian Tabel 3.2;	√		Halaman III-58	Sudah Ditambahkan tabel 3.6 tentang Realisasi Pembiayaan dan Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Lhokseumawe.
	5 Tabel 3.7. Kewajiban Belanja Kota Lhokseumawe, agar dipindahkan pada Bab V dalam rangka mendukung penjelasan terhadap data yang disajikan pada Tabel 5.1. Disamping itu judul Tabel 3.7 disempurnakan menjadi “Kewajiban Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2026”;	√		Halaman III-60	Sudah ditindaklanjuti, Tabel 3.7 menjadi Tabel 3.8 serta Judul Tabel Sudah Disesuaikan. Namun Tabel tersebut tidak dipindahkan pada Bab V, karena merupakan penjelasan atas narasi penggunaan SiLPA Tahun 2025.

No	Narasi Masukan Perbaikan	Tindak Lanjut		Halaman	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	2	3	4	5	6
	6 Tabel 3.11 Pembangunan Rumah Layak Huni Islamic Relief dan Baitul Mal Kota Lhokseumawe Tahun 2026, agar dipindahkan pada Bab V dalam rangka mendukung penjelasan terhadap data yang disajikan pada Tabel 5.1:	√		Halaman III-78	Sudah ditindaklanjuti, namun Tabel 3.11 tidak dipindahkan pada Bab V, karena merupakan bagian dari Pendanaan CSR dan Sumber Pendanaan Lainnya.
	BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH				
	1 Tujuan, Sasaran dan Pembangunan				
	1 Hal IV-1 : masih terdapat narasi yang menyebutkan “Triwulan I, agar disesuaikan kembali menjadi “Triwulan II”;	√		Halaman IV-1	Telah disempurnakan
	2 Gambar 4.3, agar diperbaiki dan disesuaikan kembali dengan tema pembangunan yang tersedia dalam dokumen RPJM Kota Lhokseumawe 2025-2029 (karena belum tersaji tema pembangunan Tahun 2025);	√		Halaman IV-5	Telah disempurnakan
	3 Tabel 4.1 : Agar kolom target 2027 dihapus, cukup disajikan kolom target 2026 saja. Kolom 2027 agar diganti dengan kolom keterangan yang menjelaskan status perubahan target indikator (“naik”, “turun”, atau “tetap”).	√		Halaman IV-6 s.d IV-10	Telah dihapus
	2 Prioritas Pembangunan				
	1 Tabel 4.3 dan Tabel 4.6 : Agar kolom capaian 2025 agar dihapus saja karena sudah tersedia pada tabel sebelumnya, cukup dilakukan perbandingan terhadap target 2026 saja;	√		Tabel 4.3 Halaman IV-16 s.d IV-10 Tabel 4.6 Halaman IV-25 s.d IV-29	Telah dihapus
	2 Tabel 4.8 : Belum terdapat narasi yang menjelaskan terhadap beberapa program yang mengalami perubahan pagu anggaran yang cukup signifikan pada beberapa SKPK. Agar disajikan alasan ataupun penyebab yang melandasi perubahan tersebut, seperti program pembangunan, diantaranya program dengan kode 2.17.07, 3.30.06, 3.31.02, 3.27.03, 2.07.04, 1.03.03, 1.03.06, 1.03.02 dan seterusnya. Disamping itu juga perlu dikaitkan perubahan anggaran program tersebut dengan perubahan target terhadap indikator kinerja.	√		Halaman IV-82	Telah disempurnakan
	3 Pokok Pikiran DPRK				

No	Narasi Masukan Perbaikan	Tindak Lanjut		Halaman	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	2	3	4	5	6
	1 Agar disajikan usulan/ perubahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRK Tahun 2026 yang disinkronkan dengan prioritas daerah, karena belum tersedia dalam dokumen RKPK.		√		Tidak ada usulan perubahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRK Tahun 2026
	BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH				
	1 Rencana Kerja dan Pendanaan				
	1 Tabel 5.1 : Agar penyajian data pada kolom "Bertambah/ Berkurang (Rp)" disajikan secara lebih jelas dengan menyajikan tanda "dalam kurung ( )" atau "minus (-)" bagi pagu yang berkurang. Disamping itu juga agar disajikan nomor terhadap masing-masing kolom tabel;	√		Halaman V-2 s.d V-3	Telah disempurnakan
	2 Tabel 5.1 : Agar dicek kembali terhadap data rekapitulasi pagu pada kolom P-RKPK 2026 yang disajikan serta disinkronkan dengan data pagu pada Tabel 5.4 (kolom 12);	√		Halaman V-2 s.d V-3	Telah disempurnakan
	3 Agar disajikan narasi penyebab terhadap kenaikan atau penurunan pagu anggaran yang signifikan terhadap beberapa SKPK yang dikaitkan dengan perubahan kebijakan anggaran Tahun 2026, sejalan dengan data yang telah disajikan pada Tabel 4.8;	√		Halaman V-3 s.d V-4	Telah disempurnakan
	4 Tabel 5.2 : Terdapat banyak perubahan pagu kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung SPM, agar ditambahkan narasi yang menjelaskan terhadap hal yang menyebabkan hal tersebut;	√		Halaman V-23	Telah disempurnakan
	5 Bab V : Agar ditambahkan tabel yang menyajikan data realisasi dan penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana Tahun 2026 dari berbagai sumber dikaitkan dengan Rencana Induk Penanggulangan Bencana yang telah disusun;	√		Halaman V-29 s.d V-32	Telah ditambah
	6 Tabel 5.4 : Agar dilengkapi kembali data terhadap kolom yang masih kosong.		√		Menjadi Tabel 5.5 merupakan cetakan dari aplikasi SIPD-RI
	BAB VI. PENUTUP				
	1 Tidak ada catatan	-	-	-	

KEPALA BAPPEDA KOTA LHOKSEUMAWE

REZA MAHNUR, S.STP., M. Kesos
Pembina IV/ Nip. 19850516 200312 1 001

P-RKPK 2026

Bappeda Kota Lhokseumawe